



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**





**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan Yang Mengatur Kewenangan Penugasan Penyelenggaraan Keistimewaan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, Kalurahan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Yogyakarta atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2023 serta prakiraan maju Tahun 2024.
- (3) Program prioritas pembangunan Daerah pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.
- (4) Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta tahun 2023; dan
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.
- (3) Penjabaran RKPD Kota Yogyakarta tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 57

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Aspek Geografi	II-1
2.1.1.2. Aspek Demografi	II-14
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-44
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar	II-44
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-131
2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-213
2.1.3.4. Aspek Penunjang Urusan	II-225
2.1.4. Fokus Keistimewaan	II-243
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah	II-245
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-260
2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-260
2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021	II-307
2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-355
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-371
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-371
2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-375
2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-375
2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-386
2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-403
2.3.2.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	II-406
2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran dan Program Perangkat Daerah	II-409
2.4. Isu Strategis	II-416
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1

3.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III-14
3.1.6.	Kemiskinan.....	III-16
3.1.7.	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	III-18
3.1.8.	Indeks Pembangunan Manusia	III-20
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-23
3.2.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.3.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-27
3.3.1.2.	Pendapatan Transfer.....	III-29
3.3.1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-31
3.2.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-34
3.3.2.1.	Kebijakan Belanja Operasi	III-38
3.2.2.2.	Kebijakan Belanja Modal	III-39
3.2.2.3.	Kebijakan Belanja Tidak Terduga	III-40
3.2.2.4.	Kebijakan Belanja Transfer.....	III-40
3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III-42
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta	IV-2
4.3.	Tema Pembangunan	IV-2
4.4.	Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta	IV-3
4.5.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.6.	Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	IV-10
4.6.1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	IV-10
4.6.2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	IV-11
4.6.3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	IV-12
4.6.4.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	IV-13
4.6.5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-14
4.6.6.	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan.....	IV-15
4.6.7.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	IV-16
4.6.8.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-17
4.6.9.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	IV-19
4.6.10.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	IV-19
4.6.11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	IV-20
4.7.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-21
4.8.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	IV-23
4.9.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta	IV-24
4.9.1.	Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-24
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta	II-1
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021	II-2
Tabel 2.3	Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta	II-4
Tabel 2.4	Klasifikasi Necara Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019	II-5
Tabel 2.5	Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-5
Tabel 2.6	Kondisi Kelembaban Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 2.7	Kondisi Tekanan Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 2.8	Kondisi Curah Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 2.9	Jumlah Hari Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-7
Tabel 2.10	Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-11
Tabel 2.11	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-11
Tabel 2.12	Data Korban dan Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-12
Tabel 2.13	Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-13
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021	II-14
Tabel 2.15	Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021	II-16
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021	II-16
Tabel 2.17	Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-17
Tabel 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-17
Tabel 2.19	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.20	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-20
Tabel 2.21	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-21
Tabel 2.22	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (%).....	II-22
Tabel 2.23	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-23
Tabel 2.24	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021	II-24
Tabel 2.25	Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2019	II-25
Tabel 2.26	Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2021	II-25
Tabel 2.27	PDRB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-26
Tabel 2.28	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) PDRB per Kapita Tahun 2018-2019.....	II-26
Tabel 2.29	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) PDRB per Kapita Tahun 2020-2021	II-26
Tabel 2.30	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Indeks Gini Tahun 2018-2021	II-27
Tabel 2.31	Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.32	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021... ..	II-29
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.34	Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-30
Tabel 2.35	Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-31
Tabel 2.36	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-33

Tabel 2.40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.41	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.42	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.43	Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.44	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta	II-38
Tabel 2.45	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.46	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.47	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2021	II-41
Tabel 2.48	Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.49	Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.50	Jumlah Wilayah Rentan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-43
Tabel 2.51	Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.52	Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.53	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.54	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.55	Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.56	Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-51
Tabel 2.57	Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-51
Tabel 2.58	Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .	II-52
Tabel 2.59	Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik.....	II-53
Tabel 2.60	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-53
Tabel 2.61	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-54
Tabel 2.62	Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-56
Tabel 2.63	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-56
Tabel 2.64	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.65	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-57
Tabel 2.66	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .	II-58
Tabel 2.67	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2021	II-59
Tabel 2.68	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2021 ..	II-59
Tabel 2.69	Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.70	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.71	Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.72	Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-63
Tabel 2.73	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.74	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-65
Tabel 2.75	Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.76	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-67

Tabel 2.79	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.80	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....	II-69
Tabel 2.81	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.82	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.83	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.84	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.85	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.86	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-74
Tabel 2.87	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-74
Tabel 2.88	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.89	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.90	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.91	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta 2017-2021.....	II-77
Tabel 2.92	Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-78
Tabel 2.93	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..	II-78
Tabel 2.94	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-79
Tabel 2.95	Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2.96	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.97	Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.98	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.99	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.100	Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.101	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-84
Tabel 2.102	Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-85
Tabel 2.103	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin.....	II-86
Tabel 2.104	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.105	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS).....	II-88
Tabel 2.106	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021.....	II-88
Tabel 2.107	Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	II-89
Tabel 2.108	Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-90
Tabel 2.109	Ketersediaan <i>Bed</i> di Rumah Sakit s.d 30 Desember 2021 di Kota Yogyakarta	II-91

Tabel 2.113	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.114	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	II-96
Tabel 2.115	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.116	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan	II-97
Tabel 2.117	Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta	II-98
Tabel 2.118	Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.119	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.120	Penduduk Berakses Air Minum Sesuai Dengan Jenis Aksesnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.121	Jumlah Akses Air Minum Non Perpipaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-100
Tabel 2.122	Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.123	Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta	II-102
Tabel 2.124	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.125	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.126	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	II-104
Tabel 2.127	Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.128	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-106
Tabel 2.129	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-107
Tabel 2.130	Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.131	Jumlah rekomendasi perijinan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP	II-109
Tabel 2.132	Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.133	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021	II-109
Tabel 2.134	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021	II-110
Tabel 2.135	Luas Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-111
Tabel 2.136	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-112
Tabel 2.137	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-113
Tabel 2.138	Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta	II-113
Tabel 2.139	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019-2021	II-114
Tabel 2.140	Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.141	Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-115
Tabel 2.142	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	II-116
Tabel 2.143	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-117

Tabel 2.145	Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.146	KTB dan Kaltana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.147	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2021	II-121
Tabel 2.148	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021	II-122
Tabel 2.149	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.150	Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-124
Tabel 2.151	Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.152	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.....	II-126
Tabel 2.153	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	II-127
Tabel 2.154	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-127
Tabel 2.155	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-128
Tabel 2.156	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-128
Tabel 2.157	Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.158	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2019-2021.....	II-130
Tabel 2.159	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Sosial Tahun 2018-2021	II-130
Tabel 2.160	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-131
Tabel 2.161	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.162	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-132
Tabel 2.163	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2017-2021	II-133
Tabel 2.164	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-134
Tabel 2.165	Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-134
Tabel 2.166	Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.167	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.168	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.169	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-136
Tabel 2.170	Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-137
Tabel 2.171	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..	II-138
Tabel 2.172	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan	

Tabel 2.173	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-139
Tabel 2.174	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	II-139
Tabel 2.175	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2021	II-140
Tabel 2.176	Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-141
Tabel 2.177	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-141
Tabel 2.178	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-142
Tabel 2.179	Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-143
Tabel 2.180	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-143
Tabel 2.181	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.182	Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-144
Tabel 2.183	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-145
Tabel 2.184	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-146
Tabel 2.185	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-148
Tabel 2.186	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-149
Tabel 2.187	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-150
Tabel 2.188	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-151
Tabel 2.189	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-152
Tabel 2.190	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta	II-153
Tabel 2.191	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangnya Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-154
Tabel 2.192	Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-155
Tabel 2.193	Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).....	II-156
Tabel 2.194	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-158
Tabel 2.195	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021	II-159
Tabel 2.196	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-160
Tabel 2.197	Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-161
Tabel 2.198	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-161

Tabel 2.201	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-163
Tabel 2.202	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.203	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-164
Tabel 2.204	Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-165
Tabel 2.205	Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-166
Tabel 2.206	Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.207	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-167
Tabel 2.208	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-169
Tabel 2.209	Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-169
Tabel 2.210	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.211	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-170
Tabel 2.212	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-171
Tabel 2.213	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-172
Tabel 2.214	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-172
Tabel 2.215	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-173
Tabel 2.216	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-174
Tabel 2.217	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-175
Tabel 2.218	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-175
Tabel 2.219	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-176
Tabel 2.220	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren di Kota Yogyakarta	II-177
Tabel 2.221	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	II-177
Tabel 2.222	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta	II-178
Tabel 2.223	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-179
Tabel 2.224	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta	II-180
Tabel 2.225	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-180
Tabel 2.226	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-181
Tabel 2.227	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui	

Tabel 2.229	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-183
Tabel 2.230	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.231	Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta	II-185
Tabel 2.232	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.233	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-186
Tabel 2.234	Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-187
Tabel 2.235	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.236	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-188
Tabel 2.237	Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta	II-189
Tabel 2.238	Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta	II-190
Tabel 2.239	Kinerja Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-190
Tabel 2.240	Rata-rata Kecepatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-191
Tabel 2.241	Data Tempat Khusus Parkir (TKP) yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta	II-191
Tabel 2.242	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.....	II-192
Tabel 2.243	Ruang Publik yang terpasang Free Wifi dan Free CCTV	II-192
Tabel 2.244	Analisis Hasil Evaluasi SPBE 2021	II-194
Tabel 2.245	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Indeks Layanan Informasi Publik Tahun 2018-2021	II-195
Tabel 2.246	Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-195
Tabel 2.247	Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-196
Tabel 2.248	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-196
Tabel 2.249	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nilai Omset UKM yang Dibina Tahun 2019-2021	II-197
Tabel 2.250	Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-198
Tabel 2.251	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-199
Tabel 2.252	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2021	II-199
Tabel 2.253	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....	II-199
Tabel 2.254	Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-200
Tabel 2.255	Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-201
Tabel 2.256	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-202
Tabel 2.257	Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-202
Tabel 2.258	Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-203
Tabel 2.259	Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-204
Tabel 2.260	Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-204
Tabel 2.261	Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-204
Tabel 2.262	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-205
Tabel 2.263	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-206

Tabel 2.265	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif Tahun 2018-2021	II-208
Tabel 2.266	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-209
Tabel 2.267	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-209
Tabel 2.268	Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-210
Tabel 2.269	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-211
Tabel 2.270	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-211
Tabel 2.271	Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-212
Tabel 2.272	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-213
Tabel 2.273	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-214
Tabel 2.274	Lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta 2017-2021	II-214
Tabel 2.275	PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-215
Tabel 2.276	Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-216
Tabel 2.277	Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-217
Tabel 2.278	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-218
Tabel 2.279	Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-219
Tabel 2.280	Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Tahun 2017-2021	II-219
Tabel 2.281	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-220
Tabel 2.282	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-220
Tabel 2.283	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-221
Tabel 2.284	Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-221
Tabel 2.285	Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-222
Tabel 2.286	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-222
Tabel 2.287	Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020	II-223
Tabel 2.288	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-224
Tabel 2.289	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	II-225
Tabel 2.290	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	II-226
Tabel 2.291	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	II-226
Tabel 2.292	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta	II-227
Tabel 2.293	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-227
Tabel 2.294	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-228
Tabel 2.295	Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2021	II-229

Tabel 2.298	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-230
Tabel 2.299	Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-230
Tabel 2.300	Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-231
Tabel 2.301	Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020	II-231
Tabel 2.302	Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-232
Tabel 2.303	Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-232
Tabel 2.304	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Keuangan Tahun 2018-2019..	II-233
Tabel 2.305	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta	II-234
Tabel 2.306	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta	II-234
Tabel 2.307	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	II-235
Tabel 2.308	Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-236
Tabel 2.309	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-236
Tabel 2.310	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta	II-237
Tabel 2.311	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	II-237
Tabel 2.312	Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2020	II-239
Tabel 2.313	Hasil Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-240
Tabel 2.314	Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-240
Tabel 2.315	Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-241
Tabel 2.316	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-241
Tabel 2.317	Jumlah Perda yang Ditetapkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-242
Tabel 2.318	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD	II-242
Tabel 2.319	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-243
Tabel 2.320	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2021	II-243
Tabel 2.321	Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021	II-244
Tabel 2.322	Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-246
Tabel 2.323	Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020	II-246
Tabel 2.324	Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-247
Tabel 2.325	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-248
Tabel 2.326	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta	II-249
Tabel 2.327	Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-249
Tabel 2.328	Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2018	II-250
Tabel 2.329	Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2019-2021	II-251

Tabel 2.332	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan	II-253
Tabel 2.333	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha.....	II-254
Tabel 2.334	Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha.....	II-254
Tabel 2.335	Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-256
Tabel 2.336	Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-256
Tabel 2.337	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta .	II-257
Tabel 2.338	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-258
Tabel 2.339	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-259
Tabel 2.340	Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-260
Tabel 2.341	Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2021	II-260
Tabel 2.342	Pengukuran Capaian Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun.....	II-261
Tabel 2.343	Pengukuran Capaian Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat.....	II-264
Tabel 2.344	Pengukuran Capaian Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat.....	II-267
Tabel 2.345	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta Berdasarkan Data SUSENAS Tahun 2021.....	II-267
Tabel 2.346	Pengukuran Capaian Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	II-271
Tabel 2.347	Pengukuran Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	II-272
Tabel 2.348	Pengukuran Capaian Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	II-276
Tabel 2.349	Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat.....	II-280
Tabel 2.350	Pengukuran Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	II-286
Tabel 2.351	Pengukuran Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat.....	II-290
Tabel 2.352	Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	II-291
Tabel 2.353	Pengukuran Capaian Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	II-294
Tabel 2.354	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah	II-294
Tabel 2.355	Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat.....	II-296
Tabel 2.356	Pengukuran Capaian Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkat	II-299
Tabel 2.357	Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah	II-299
Tabel 2.358	Pengukuran Capaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat.....	II-301
Tabel 2.359	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Yogyakarta	II-307
Tabel 2.360	Target dan Realisasi Fisik Tahun 2020-2021	II-355
Tabel 2.361	Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2021.....	II-356
Tabel 2.362	Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta	II-358
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	III-2
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023.	III-25
Tabel 3.3	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021	III-28
Tabel 3.4	Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021	III-30
Tabel 3.5	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota	

Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-43
Tabel 3.9	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	III-44
Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta ...	IV-2
Tabel 4.3	Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)	IV-8
Tabel 4.4	Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)	IV-9
Tabel 4.5	Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta.....	IV-9
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023	IV-10
Tabel 4.7	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-11
Tabel 4.8	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-12
Tabel 4.9	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	IV-13
Tabel 4.10	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	IV-14
Tabel 4.11	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-15
Tabel 4.12	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV-16
Tabel 4.13	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	IV-17
Tabel 4.14	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-18
Tabel 4.15	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-19
Tabel 4.16	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah.....	IV-20
Tabel 4.17	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.....	IV-21
Tabel 4.18	Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023	IV-22
Tabel 4.19	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023	IV-23
Tabel 5.1	Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	V-2
Tabel 5.2	Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	V-3
Tabel 5.3	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023	V-12
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2023	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJPD, RPJMD/RPD, dan RKPd Kota Yogyakarta	I-5
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Yogyakarta	II-2
Gambar 2.2	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Yogyakarta	II-14
Gambar 2.3	Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021	II-15
Gambar 2.4	Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-18
Gambar 2.5	Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2021	II-19
Gambar 2.6	Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-27
Gambar 2.7	Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta	II-28
Gambar 2.8	Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2.9	Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2.10	Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.12	Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-48
Gambar 2.13	Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-49
Gambar 2.14	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	II-55
Gambar 2.15	Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Per Kemantren 2021	II-89
Gambar 2.16	Persentase Kasus Konfirmasi Covid-19 Menurut Kematian dan Kesembuhan di Tahun 2021	II-90
Gambar 2.17	Jumlah Pengguna <i>Jogja Smart Service</i> (JSS) Tahun 2018-2021	II-193
Gambar 2.18	Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek	II-194
Gambar 2.19	Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021	II-245
Gambar 2.20	Proses Bisnis Kemiskinan Masyarakat Menurun	II-262
Gambar 2.21	Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkat	II-265
Gambar 2.22	Proses Bisnis Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	II-268
Gambar 2.23	Proses Bisnis Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	II-271
Gambar 2.24	Proses Bisnis Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	II-273
Gambar 2.25	Proses Bisnis Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Menurun	II-276
Gambar 2.26	Proses Bisnis Kualitas Pendidikan Meningkat	II-281
Gambar 2.27	Proses Bisnis Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	II-286
Gambar 2.28	Proses Bisnis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	II-292
Gambar 2.29	Proses Bisnis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	II-295
Gambar 2.30	Proses Bisnis Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	II-297
Gambar 2.31	Proses Bisnis Infrastruktur Wilayah Meningkat	II-300
Gambar 2.32	Proses Bisnis Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	II-303
Gambar 2.33	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Tahun 2020-2021	II-355
Gambar 2.34	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2021	II-356
Gambar 2.35	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021	II-357
Gambar 2.36	Tren Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 Per-Pekan pada Minggu ke-44 s.d Minggu ke-94	II-379
Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-2

Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	III-5
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-6
Gambar 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-7
Gambar 3.6	Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2021 (ADHK 2010)	III-8
Gambar 3.7	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021	III-9
Gambar 3.8	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	III-10
Gambar 3.9	PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	III-11
Gambar 3.10	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-12
Gambar 3.11	Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (yoy) 2019-2021	III-12
Gambar 3.12	Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (mtm) 2019-2021	III-13
Gambar 3.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-14
Gambar 3.14	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2021	III-15
Gambar 3.15	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	III-16
Gambar 3.16	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-17
Gambar 3.17	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023	III-18
Gambar 3.18	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Antar Bulan Tahun 2017-2021	III-19
Gambar 3.19	Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2020-2021	III-19
Gambar 3.20	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	III-20
Gambar 3.21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021	III-21
Gambar 3.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta v.s. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Lain Tahun 2021	III-22
Gambar 3.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	III-22
Gambar 4.1	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-11
Gambar 4.2	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pariwisata	IV-12
Gambar 4.3	Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	IV-13
Gambar 4.4	Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	IV-14
Gambar 4.5	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-15
Gambar 4.6	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV-16
Gambar 4.7	Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	IV-17
Gambar 4.8	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-18
Gambar 4.9	Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-19
Gambar 4.10	Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah	IV-20
Gambar 4.11	Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	IV-21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat di sini mengandung makna semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan yang dapat berperan sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan melalui perencanaan yang responsif gender. Mengingat sumber daya yang terbatas, upaya-upaya inovasi daerah dalam pembangunan diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan proses sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusun RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;

- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Sistematika penyajian Rancangan Awal RKPD adalah:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- g. Penutup

Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam penyempurnaannya sebagai pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan DIY maupun Nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Yogyakarta merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Yogyakarta. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD dengan Peraturan Walikota dilaksanakan setelah RKP dan RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan.

2023 merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

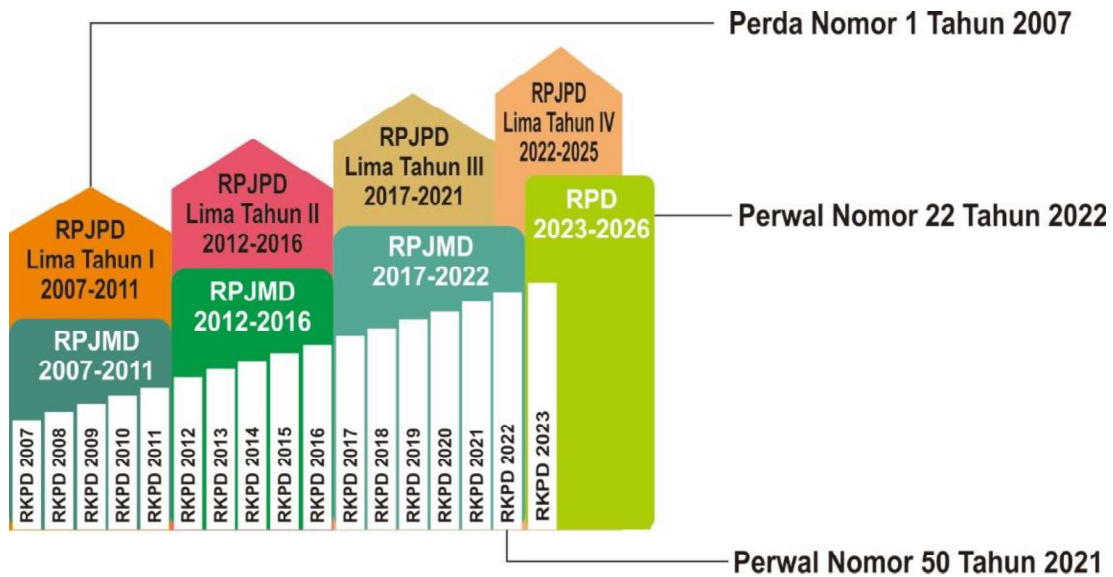
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D); dan
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama periode Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035.

Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD DIY Tahun 2023. Untuk itu perlu dilakukan telaah terhadap kebijakan pembangunan nasional dan DIY, dalam hal ini mengenai keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas pembangunan, akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.



Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD, RPJMD/RPD, dan RKPD Kota Yogyakarta

Sumber: Hasil Olahan, 2022

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
4. Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.280 Ha. Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

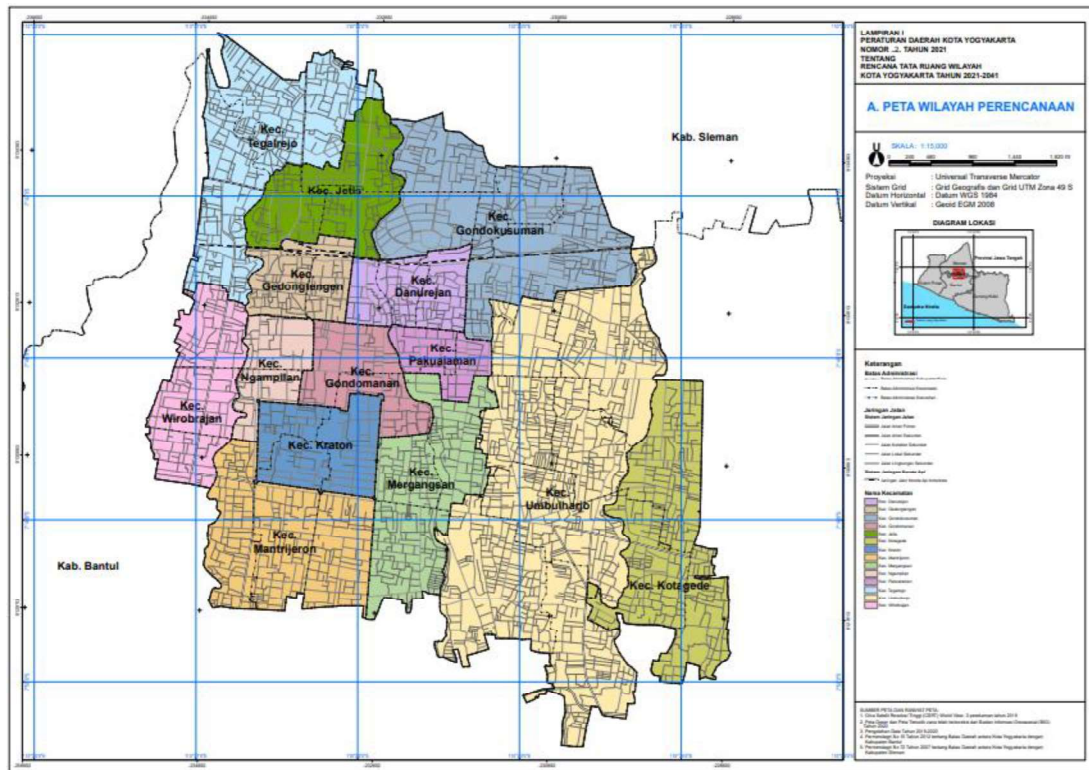
Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW dan RT ini mengalami perubahan di tahun 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta. Luas wilayah masing-masing Kemantren dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta

Kemantren	Luas Kemantren (Ha)	Jumlah Kelurahan	Persentase Luas (%)
Tegalrejo	294	4	8,96
Jetis	174	3	5,30
Gondokusuman	397	5	12,10
Danurejan	111	3	3,38
Gedongtengen	99	2	3,02
Ngampilan	85	2	2,59
Wirobrajan	175	3	5,34
Mantrijeron	268	3	8,17
Kraton	138	3	4,21
Gondomanan	115	2	3,51
Pakualaman	64	2	1,95
Mergangsan	229	3	6,98
Umbulharjo	834	7	25,43
Kotagede	297	3	9,05
Jumlah	3.280	45	100,00

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2022

Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 834 ha atau 25,43% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan Kemantren lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kemantren yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kemantren Pakualaman, yakni seluas 64 ha atau sebesar 1,95% dari luasan Kota Yogyakarta.



Gambar 2.1 **Peta Administrasi Kota Yogyakarta**

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2022

2. **Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

3. **Topografi**

Dilihat dari ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut, diketahui bahwa antar Kemantren di Kota Yogyakarta memiliki ketinggian dengan rata-rata ketinggian sebesar 126,00 mdpl.

Tabel 2.2 **Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021**

No.	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Tegalrejo	128,90
2.	Jetis	114,00
3.	Gondokusuman	152,00
4.	Danurejan	159,00
5.	Gedongtengen	156,90
6.	Ngampilan	125,00
7.	Wirobrajan	128,00

No.	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
11.	Pakualaman	157,00
12.	Mergangsan	119,30
13.	Umbulharjo	126,00
14.	Kotagede	110,00
Kota Yogyakarta		126,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

4. Geologi

Kota Yogyakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur, tekstur tanahnya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, dan mudah tererosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah Kota Yogyakarta terbilang cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen *old andesite* (batuan sedimen andesit tua). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yakni Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota, dan Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta.

5. Hidrologi

Wilayah Kota Yogyakarta adalah bagian dari dataran kaki fluvio vulkanik Merapi yang mempunyai potensi sumber daya air tanah dan air permukaan yang cukup besar. Besarnya potensi ini disebabkan karena Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Sedangkan di bagian tenggara (Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya) jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (*sandy clay*) dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (*old andesit*). Karakteristik tanah regosol pada umumnya profil tanah belum berkembang, tekstur tanah kepasiran, geluh, struktur tanah remah gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dengan solum tebal. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Tangkapan hujan (*recharge area*) bagi air tanah di Kota Yogyakarta berada di lereng Gunung Merapi dan mengalir lewat akuifer lereng Merapi hingga Graben Bantul. Kedalaman air tanah antara 0,5-20 meter, semakin ke selatan muka air tanah semakin dangkal. Pemanfaatan air tanah oleh penduduk Kota Yogyakarta secara mandiri, sebagian besar berupa sumur dangkal.

a. Cekungan Air Tanah (CAT)

Simpanan air tanah di Kota Yogyakarta di cekungan air tanah adalah dari area yang terlampar lintas batas kabupaten/kota, yaitu CAT Yogyakarta - Sleman yang mencakup wilayah di lereng selatan

barat laut dan tenggara. Sedangkan secara geologis, CAT Yogyakarta - Sleman dibatasi oleh sesar utama, yaitu sesar sepanjang Sungai Opak di bagian timur yang membentuk Graben Bantul dan Graben Yogyakarta. Litologi utama penyusun CAT Yogyakarta - Sleman adalah Formasi Yogyakarta di bagian atas dan Formasi Sleman di bagian bawah yang merupakan endapan volkanoklastik Gunung Merapi.

Tabel 2.3 Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Cekungan Air Tanah (CAT)		Wilayah Administrasi		Litologi/Akuifer	Jumlah Air Tanah juta (m ³ tahun)	
Nama	Luas (km ²)	Kabupaten/Kota	Provinsi		Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)
Yogyakarta - Sleman	916	Kota Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	Endapan sungai dan pematang pantai yang terdiri dari pasir dan kerikil	509	9
		Kab. Sleman	D.I. Yogyakarta	Batuan gunung api Gunung Merapi yang terdiri dari tuff, breksi aglomerat dan lava		
		Kab. Bantul	D.I. Yogyakarta	Endapan gunung api Gunung Merapi dan Formasi Sentolo		
		Kab. Kulonprogo	D.I. Yogyakarta	Endapan alluvium yang berasal dari sungai		

Sumber: Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Review RISPAM Kota Yogyakarta, 2021

Sedangkan dalam pemetaan daerah aliran sungai, letak sebagian besar Kota Yogyakarta masuk ke dalam DAS Opak yang terbagi menjadi tiga Sub DAS yaitu sub DAS Winongo, Sub DAS Code dan Sub DAS Gajahwong (Kajian Disperparu Kota Yogyakarta 2019). Luas wilayah Kota Yogyakarta yang masuk ke dalam wilayah DAS Opak tersebut adalah sebesar 31,8 kilometer persegi atau 3180 hektar (KemenPU, 2010). Sedangkan sebagian kecil lainnya dari wilayah Kota Yogyakarta berada di dalam wilayah DAS Progo dengan luas sebesar 23,55 hektar (Paimin, et all. 2012). Wilayah DAS Progo ini terdapat di sisi Barat Kota Yogyakarta, tepatnya berada di Kelurahan Bener, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Patangpuluhan. Sumber air permukaan terdapat di lereng Gunung Merapi, yaitu berupa sumber-sumber mata air yang kini sudah dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih bagi Kota Yogyakarta oleh PDAM Tirtamarta, yaitu sumber Mata Air Umbul Wadon dan Kali Kuning.

b. Neraca Air

Neraca air menyajikan perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Ketersediaan sumber daya air dalam kajian ini meliputi ketersediaan air tanah dinamis dan ketersediaan air

sedangkan ketersediaan air permukaan atau air sungai adalah sejumlah 425.352.356 m³/tahun. Total ketersediaan air di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.081.324.178 m³/tahun.

Hasil klasifikasi neraca air total Kota Yogyakarta diperoleh dari kebutuhan air total dibagi dengan ketersediaan air total. Nilai kelas neraca air total tertinggi berada di Kecamatan Kotagede sebesar 0,04 dan nilai terendah berada di Kecamatan Gondomanan, Kraton, dan Pakualaman sebesar 0,01. Kelas neraca air total seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta termasuk dalam kelas IV. Kelas IV merupakan klasifikasi yang paling rendah yaitu berarti ketersediaan air total di Kota Yogyakarta masih dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4 Klasifikasi Neraca Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019

No	Kemantren	Ketersediaan Air Total (m ³ /tahun)	Kebutuhan (m ³ /tahun)	Kelas Neraca Air Total	Klasifikasi
1	Danurejan	59.218.479	898.735	0,02	IV
2	Gedongtengen	53.234.676	932.921	0,02	IV
3	Gondokusuman	125.533.110	2.331.361	0,02	IV
4	Gondomanan	68.549.986	684.763	0,01	IV
5	Jetis	67.033.710	1.100.849	0,02	IV
6	Kotagede	41.621.531	1.712.476	0,04	IV
7	Kraton	54.971.052	820.145	0,01	IV
8	Mantrijeron	63.212.791	1.570.917	0,02	IV
9	Mergangsan	60.831.857	1.522.527	0,03	IV
10	Ngampilan	45.474.229	814.679	0,02	IV
11	Pakualaman	48.641.117	440.281	0,01	IV
12	Tegalrejo	97.071.066	1.904.304	0,02	IV
13	Umbulharjo	254.968.962	4.524.728	0,02	IV
14	Wirobrajan	40.961.613	1.216.785	0,03	IV
	Jumlah	1.081.324.178	20.475.471	0,02	IV

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2019

6. Klimatologi

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2021 terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 495,5 mm³. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, yakni sebanyak 24 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, terendah terjadi pada bulan September sebesar 71,4%. Sedangkan rata-rata tekanan udara pada tahun 2021 sebesar 992,64 mb dan suhu udara rata-rata 28,15°C.

Tabel 2.5 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	22,20-33,00	22,20 – 33,60	23,5-31,8	22,0–33,4	22,4–33,0
2	Februari	22,20-33,80	21,30 – 33,80	23,6-31,8	23,2–33,8	21,8–33,0
3	Maret	22,40-32,80	22,20 – 33,20	23,4-31,1	22,8–33,4	22,0–33,8
4	April	22,00-33,00	21,40 – 33,80	23,9-32,4	22,2–34,2	21,1–34,0
5	Mei	20,60-33,40	21,20 – 34,00	22,9-32,8	23,0–34,2	21,6–34,6
6	Juni	21,20-33,00	20,00 – 33,80	20,7-30,8	21,0–33,4	21,7–33,2

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Oktober	22,80-33,80	20,80 – 34,00	23,0-32,5	22,4–34,2	22,0–34,2
11	November	22,00-33,60	22,60 -34,80	24,0-31,3	22,5–34,2	22,4–32,4
12	Desember	21,20-32,60	22,70 - 32,80	24,2-33,0	21,0–33,4	22,8–33,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.6 Kondisi Kelembaban Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Kelembaban Udara (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	88,00	87	88	77,59	78,9
2	Februari	88,00	87	87	79,47	80,4
3	Maret	87,00	86	88	81,49	77,2
4	April	88,00	86	85	78,90	74,5
5	Mei	83,00	83	82	79,21	74,1
6	Juni	84,00	83	83	75,32	77,9
7	Juli	84,00	81	81	71,71	72,9
8	Agustus	81,00	82	80	70,62	73,9
9	September	81,00	83	77	69,20	71,4
10	Oktober	84,00	79	78	75,21	75,1
11	November	90,00	84	84	76,61	85,2
12	Desember	86,00	87	83	81,32	81,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.7 Kondisi Tekanan Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Tekanan Udara (mb)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	994,30	993,00	995,47	995,06	993,6
2	Februari	995,00	995,10	996,73	995,48	994,0
3	Maret	995,10	994,60	995,81	995,18	994,4
4	April	995,60	994,70	995,08	995,34	995,2
5	Mei	995,80	995,50	996,33	995,10	994,6
6	Juni	996,30	996,70	997,03	995,78	966,0
7	Juli	997,40	997,70	997,06	995,52	996,0
8	Agustus	997,10	997,80	998,23	995,90	996,8
9	September	997,20	997,60	998,67	996,08	996,0
10	Oktober	996,00	997,20	996,96	995,13	995,9
11	November	993,60	996,30	996,51	995,09	994,1
12	Desember	994,50	995,60	995,45	993,40	995,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.8 Kondisi Curah Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Curah Hujan (mm ³)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	291,80	464,10	382,00	308,2	349,8
2	Februari	348,50	337,00	237,60	398,4	305,3
3	Maret	402,90	190,90	648,40	516,8	152,1
4	April	243,40	107,50	33,40	207,0	237,4
5	Mei	45,70	10,80	-	275,9	2,3

No.	Bulan	Curah Hujan (mm ³)				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Oktober	60,10	0,00	-	114,0	57,1
11	November	692,50	275,40	275,40	182,8	495,5
12	Desember	372,50	177,60	214,60	341,6	281,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.9 Jumlah Hari Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Bulan	Hari Hujan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	28,00	31	25	22	20
2	Februari	24,00	19	20	24	23
3	Maret	21,00	15	25	23	17
4	April	20,00	14	4	17	11
5	Mei	7,00	8	-	15	3
6	Juni	5,00	6	1	5	12
7	Juli	4,00	0	-	2	2
8	Agustus	1,00	5	-	5	9
9	September	6,00	8	-	3	6
10	Oktober	14,00	0	-	18	10
11	November	25,00	17	17	11	23
12	Desember	22,00	22	19	16	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berlaku untuk tahun 2021-2041 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
 - a. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota, meliputi:
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta; dan
 - 2) Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta.
 - b. Penataan Bangunan dan Lingkungan, meliputi:
 - 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta; dan
 - 2) Penataan bangunan dan lingkungan.
 - c. Pembangunan Fasilitas Utama Perkotaan, meliputi:
 - 1) Pengembangan pusat pelayanan kegiatan administrasi kota, yang berlokasi di kawasan balaikota, kantor Kemantren, dan kantor kelurahan;
 - 2) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan perekonomian kota, yang berlokasi di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo.

2. Perwujudan Sistem Transportasi
 - a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
 - 2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder, yang berlokasi di Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, Jalan Pramuka, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedong Kuning;
 - 3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder; dan
 - 4) Pembangunan *flyover*, yang berlokasi di perlintasan rel KA sebidang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mojo, dan Jalan Ipda Tut Harsono.
 - b. Pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - 1) Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;
 - 2) Pembangunan fasilitas *Park and Ride*;
 - 3) Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional, yang terdiri atas:
 - a) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Surakarta – Madiun -Surabaya;
 - b) Jaringan jalur Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Purwokerto – Cirebon – Jakarta; dan
 - c) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Bandung.
 - 4) Pengembangan jaringan kereta komuter, yang terdiri atas:
 - a) Jalur KA Yogyakarta – Wates – Kutoarjo; dan
 - b) Jalur KA Yogyakarta – Klaten – Surakarta
 - 5) Pengembangan jaringan kereta bandara;
 - 6) Pengembangan Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan sebagai angkutan penumpang; dan
 - 7) Pengembangan stasiun kereta api dalam kota dan perkotaan.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi
 - a. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan gas perkotaan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
 - b. Pengembangan jaringan infrastuktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kemantren Gondokusuman;
 - 2) Penambahan gardu induk kota di Kemantren Wirobrajan;
 - 3) Penambahan gardu yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
 - 4) Peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik yang

- 5) Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - a. Pengembangan sistem informasi, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan sistem informasi tata ruang dan pertanahan;
 - 2) Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat di bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH taman; dan
 - 3) Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung *smart city* Kota Yogyakarta.
 - b. Pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan *fixline*; dan
 - 2) Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik.
 - c. Pengadaan jaringan bergerak, meliputi:
 - 1) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi.
 5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - a. Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
 - b. Pengembangan sumber air permukaan, meliputi:
 - 1) Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya; dan
 - 2) Peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang terbuka air (RTA) serta fungsi kegiatan wisata air, penataan lingkungan, konservasi, dan pengendalian banjir.
 - c. Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta.
 6. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan perpipaan baru, yang berlokasi di Kemantren Kotagede, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, dan Kemantren Umbulharjo;
 - b) Pemeliharaan jaringan perpipaan eksisting;
 - c) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa; dan
 - d) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
 - 2) Pengembangan SPAM bukan perpipaan, meliputi:
 - a) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.

- a) Pemeliharaan jaringan SPAL domestik;
 - b) Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Danurejan, dan Kemantren Mergangsan;
 - c) Pengembangan jaringan baru jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Kotagede, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Umbulharjo, dan Kemantren Wirobrajan.
- c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3; dan
 - 2) Pengelolaan awal limbah B3.
 - d. Pengembangan jaringan persampahan kota, meliputi:
 - 1) Pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal;
 - 2) Pengembangan sektor pelayanan persampahan di Sektor Gunungketur, Sektor Kotagede, Sektor Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Malioboro, dan Sektor Ngasem Gading;
 - 3) Peningkatan layanan TPS secara merata;
 - 4) Pengembangan TPST;
 - 5) Pengelolaan sampah setempat skala rumah tangga; dan
 - 6) Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah.
 - e. Pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) Pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kampung dan kota;
 - 2) Pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3) Pembentukan Kampung Tanggap Bencana (KTB).
 - f. Pengembangan sistem drainase, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan primer di Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong;
 - 2) Pengembangan jaringan sekunder; dan
 - 3) Pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau.
 - g. Pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - 1) Pengembangan kawasan khusus pedestrian di Koridor jalan Malioboro;
 - 2) Pengembangan kawasan semi pedestrian di Koridor Jalan Urip Sumoharjo; dan
 - 3) Pengembangan dan penyediaan *street furniture*.

C. Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Kota Yogyakarta dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan potensi bahaya

Tabel 2.10 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Ancaman Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1	Banjir	3.037,44	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	3.015,07	Tinggi
3	Gempa Bumi	3.269,00	Sedang
4	Kekeringan	3.269,00	Sedang
5	Letusan Gunung api	37,94	Rendah

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta 2022

Tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Yogyakarta memiliki tingkat bahaya rendah, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah letusan gunung api, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah banjir, gempa bumi dan kekeringan. Sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah cuaca ekstrim. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah 72,57 (sedang). Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.11 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko 2021
1	Kota Yogyakarta	78,46	73,00	72,86	72,86	72,57	Sedang

Sumber: BNPB, 2022

Potensi bencana di Kota Yogyakarta teridentifikasi pada 14 kemantren, baik bahaya banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi maupun kekeringan. Sedangkan bahaya letusan gunung api teridentifikasi 4 kemantren terpapar bahaya letusan gunung api Merapi dari Kabupaten Sleman.

Potensi gempa bumi di Kota Yogyakarta terdapat dua jenis ancaman bencana gempa bumi yaitu gempa vulkanik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik. Potensi gempa vulkanik ada ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Sedangkan yang kedua adalah ancaman gempa tektonik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi. Kota Yogyakarta terletak di daerah rawan gempa tektonik karena letaknya berdekatan dengan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia di Samudra Hindia. Tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia juga menimbulkan sesar aktif yang disebut dengan sesar Opak. Letak sesar Opak yang berada sangat dekat dengan permukiman warga yaitu sebelah selatan dan timur Kota Yogyakarta.

Selain potensi bencana diatas, terdapat adanya rawan kebakaran yang merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya api yang tidak diinginkan dan dapat merugikan berupa materi maupun nyawa sekaligus. Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi

kepadatan penduduk, akses jalan yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran, hingga wilayah bantaran sungai. Kawasan rawan kebakaran di Kota Yogyakarta meliputi beberapa area berikut (1) Kemantren dengan tingkat kerawanan tinggi, meliputi Kemantren Jetis, Kemantren Gedongtengen, Kemantren Gondomanan, dan Kemantren Danurejan; (2) kawasan di sepanjang jalan arteri yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan jasa.

Tabel 2.12 Data Korban dan Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

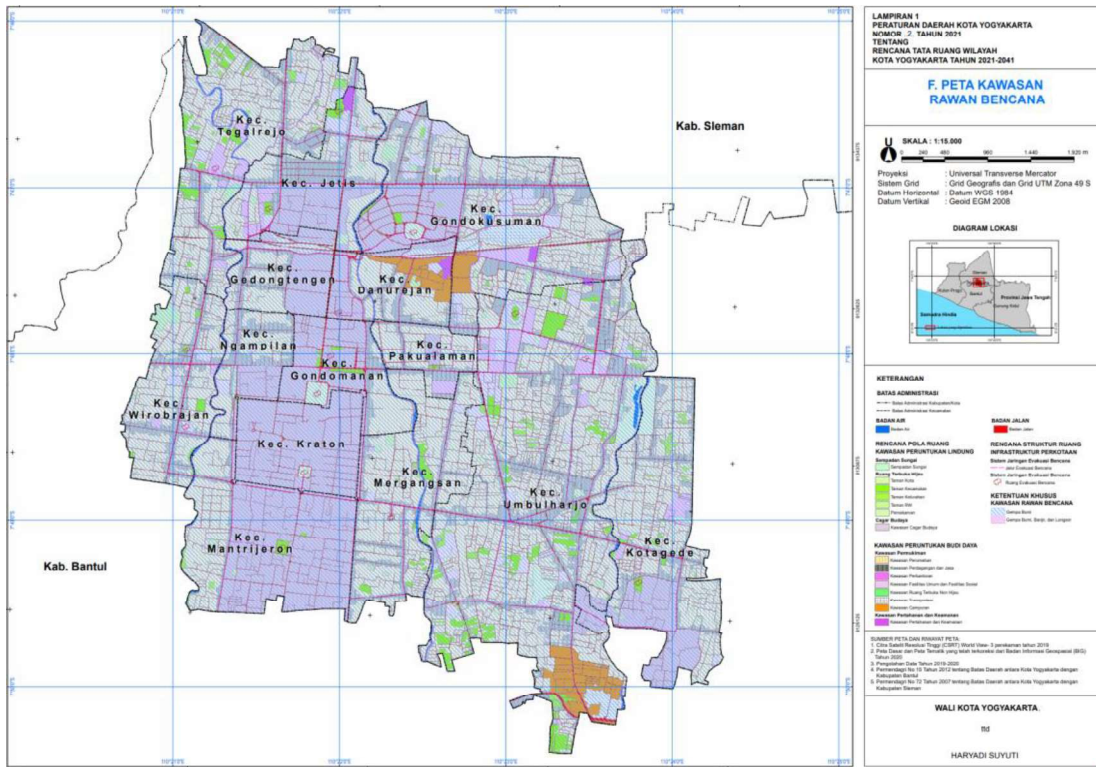
Jenis Bencana	Kejadian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Korban (Jiwa)	Kerusakan	Jumlah Korban (Jiwa)	Kerusakan	Jumlah Korban (Jiwa)	Kerusakan	Jumlah Korban (Jiwa)	Kerusakan	Jumlah Korban (Jiwa)	Kerusakan
Cuaca ekstrim	Talud/Brojong/ Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang)	61	Rumah warga dan akses jalan	0	Jalan kampung, balai RW, dan rumah warga	0	Akses jalan dan rumah warga	205	Rumah warga, balai RW	52	Rumah warga dan jalan
Cuaca ekstrim	Tanah Longsor	213	Rumah dan Bangunan SD Bangunrejo 2	4	Rumah warga, pemakaman umum Bangunrejo	0	Tebing dan rumah warga	5	Rumah warga	45	Rumah warga, jalan, kios rumah potong ayam
Cuaca ekstrim	Jalan/Tanah Ambles	0	Jalan kampung, rumah, dan gorong-gorong	0	Akses jalan	-	-	17	Rumah warga, jalan kampung, tiang penerangan	0	Jalan dan tiang penerangan kampung
Cuaca ekstrim	Aspal (Berlubang/Mengelupas)	0	Jalan kampung	0	Jalan kampung	-	-	0	-	0	-
Cuaca ekstrim	Sumur Ambrol	-	-	0	6 Kamar mandi umum	9	Dapur rumah warga	-	-	0	-
Cuaca ekstrim	Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/Usia/Terbakar)	0	Rumah, mobil, jaringan listrik	1	Mobil, rumah, tempat usaha, pagar sekolah, jaringan telepon	8	Mobil, rumah warga, jaringan listrik & telepon	55	Mobil, Rumah warga, jaringan listrik & telepon	114	Mobil, rumah warga, jaringan listrik dan telepon, bangunan sekolah, akses jalan
Cuaca ekstrim	Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)	0	Atap rumah warga	0	Atap rumah warga	0	Atap rumah warga	10	Atap rumah warga	41	Rumah warga, warung warga dan sekolah
Cuaca ekstrim	Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ ambles)	6	Rumah warga	0	Rumah warga	0	Rumah warga	-	-	0	-
Banjir	Banjir	0	Bronjong	0	Rumah	8	-	5	Rumah	3	Arus Pendek (Kendaraan)

Tabel 2.13 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Jenis Bencana	2017	2018	2019	2020	2021
1	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-
2	Gempa	1	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	-	-	-	-	31
4	Banjir	3	7	1	3	-
5	Banjir lahar dingin	-	-	-	-	-
6	Cuaca ekstrim	19	58	80	92	71
7	Kebakaran	71	63	64	53	50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Selama tahun 2017-2021, bencana alam yang cukup sering terjadi di Kota Yogyakarta adalah cuaca ekstrim, kebakaran, banjir (genangan/luapan) dan talud/tanah longsor. Selain itu, Pusdalop BPBD Kota Yogyakarta juga telah merekap data korban dan kerusakan pada tahun 2017-2021 atas kejadian yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 bencana cuaca ekstrim mendominasi dan terdapat korban atas kejadian di wilayah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 kejadian yang korbannya paling banyak adalah tanah longsor yaitu 213 korban dengan kerusakan berupa rumah dan bangunan SD Bangunrejo 2. Begitu pula pada tahun 2018, namun korban yang terdampak hanya sebanyak 4 korban dengan kerusakan rumah warga, dan pemakaman umum Bangunrejo. Kemudian tahun 2019, kejadian dengan korban terbanyak adalah sumur ambrol dengan korban sebanyak 9 korban dan kerusakan berupa dapur rumah warga. Pada tahun 2020, kejadian Talud/Bronjong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) adalah kejadian dengan korban terbanyak yaitu 205 korban dengan kerusakan rumah warga dan balai RW. Selanjutnya, pada tahun 2021 kejadian dengan korban terbanyak adalah pohon tumbang/dahan patah yaitu sebanyak 114 korban dengan kerugian berupa mobil, rumah warga, jaringan listrik dan telepon, bangunan sekolah serta terkendalanya akses jalan. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrim terjadi hampir di semua Kemantren yaitu Kemantren Kotagede, Umbulharjo, Gondokusuman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Mergangsan, Mantrijeron, Gondokusuman, Danurejan, Jetis, dan Kemantren Tegalrejo.



Gambar 2.2 **Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Yogyakarta**

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

2.1.1.2. Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

A. Struktur Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.14 **Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021**

No	Kemantren	Jumlah penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021

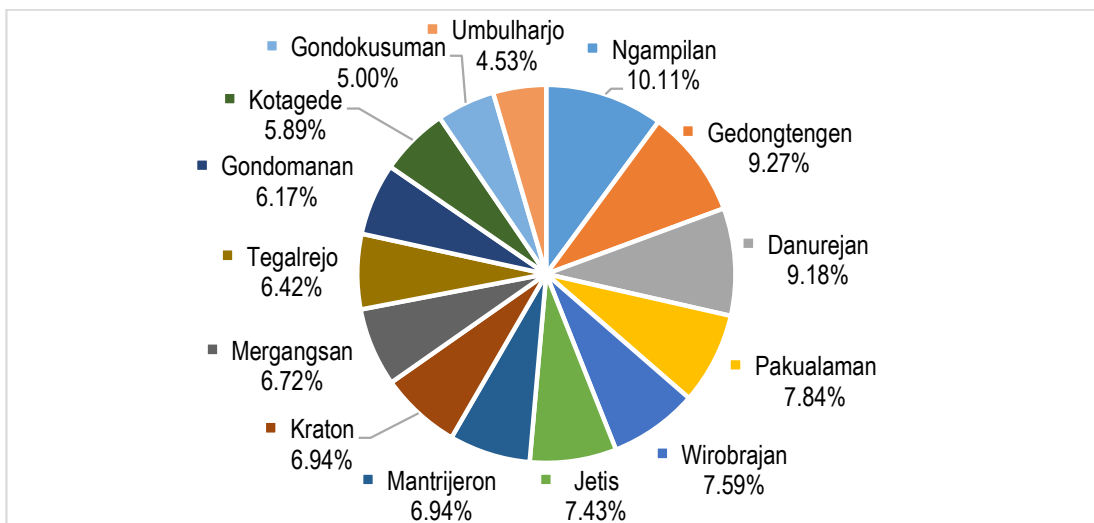
No	Kemantren	Jumlah penduduk (jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Gedongtengen	18.388	18.546	19.891	16.484	16.582
6	Ngampilan	17.031	17.117	18.550	15.358	15.450
7	Wirobrajan	25.992	26.134	27.868	24.739	24.887
8	Mantrijeron	33.406	33.688	35.433	33.340	33.748
9	Kraton	17.575	17.575	21.831	17.943	18.097
10	Gondomanan	13.697	13.781	14.982	12.793	12.869
11	Pakualaman	9.341	9.336	10.810	9.148	9.203
12	Mergangsan	30.666	30.836	32.043	28.739	28.911
13	Umbulharjo	90.775	92.867	69.887	68.170	68.576
14	Kotagede	37.055	37.937	34.311	33.280	33.694
Jumlah		422.732	427.498	414.055	373.589	376.324

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki kecenderungan menurun tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 376.324. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2021 disebabkan migrasi penduduk.

2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Kemantren Umbulharjo merupakan wilayah dengan luas terbesar di Kota Yogyakarta, selain itu juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 68.576 jiwa pada tahun 2021. Berkebalikan dengan Kemantren Umbulharjo, Kemantren Pakualaman selain menjadi wilayah paling kecil di Kota Yogyakarta, juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 9.203 jiwa pada tahun 2021.



Gambar 2.3 Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

penduduk terlengang adalah Kemantren Umbulharjo dengan angka kepadatan sebesar 8.445 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2021 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 11.579 jiwa/km², hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian yang dikarenakan covid-19 dan non covid-19 dan perpindahan penduduk disebabkan kondisi pandemi di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021

No	Kemantren	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tegalrejo	13.139	13.296	12.771	11.897	11.968
2	Jetis	14.108	14.139	15.960	13.756	13.838
3	Gondokusuman	11.895	11.963	10.731	9.253	9.309
4	Danurejan	17.389	17.475	19.395	16.973	17.104
5	Gedongtengen	19.154	19.319	20.720	17.171	17.273
6	Ngampilan	20.770	20.874	22.622	18.729	18.841
7	Wirobrajan	14.768	14.849	15.834	14.056	14.140
8	Mantrijeron	12.799	12.907	13.576	12.774	12.930
9	Kraton	12.554	12.554	15.594	12.816	12.926
10	Gondomanan	12.229	12.304	13.377	11.422	11.490
11	Pakualaman	14.827	14.819	17.159	14.521	14.608
12	Mergangsan	13.275	13.349	13.871	12.441	12.516
13	Umbulharjo	11.179	11.437	8.607	8.395	8.445
14	Kotagede	12.070	12.357	11.176	10.840	10.975
Kota Yogyakarta		13.007	13.154	12.740	11.495	11.579

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

3. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021

No	Indikator	Satuan	2000-2010	2010-2018	2010-2019	2010-2020	2020-2021
1.	Laju pertumbuhan penduduk	%	-0,21	1,19	1,18	-0,38	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2010-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka -0,21% kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 dengan laju pertumbuhan

19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Yogyakarta karena kematian penduduk akibat covid-19.

Kemudian, pada tahun 2021 laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,98%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2021. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori $r > 0$ menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 2.17 Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Lahir	Jiwa	4.197	4.486	4.419	4.156	3.966
2	Mati	Jiwa	3.164	3.209	3.526	3.310	5.364
3	Datang	Jiwa	8.413	9.450	9.038	6.457	7.475
4	Pergi	Jiwa	772	756	763	625	8.626

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah kelahiran jumlah bayi laki-laki sebanyak 2.028 jiwa dan bayi perempuan sebanyak 1.938 jiwa. Selanjutnya, jumlah kematian laki-laki sebanyak 2.920 jiwa dan kematian perempuan sebanyak 2.444 jiwa. Kemudian jumlah pendatang laki-laki sebanyak 3.428 jiwa dan pendatang perempuan sebanyak 4.047 jiwa serta jumlah laki-laki yang pindah/pergi sebanyak 4.065 jiwa dan jumlah perempuan yang pindah/pergi sebanyak 4.561 jiwa.

4. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2017	206.421	216.311	422.732	95,43
2	2018	208.792	218.706	427.498	95,47
3	2019	201.538	212.517	414.055	97,97
4	2020	182.019	191.570	373.589	95,01
5	2021	183.251	193.073	376.324	94,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

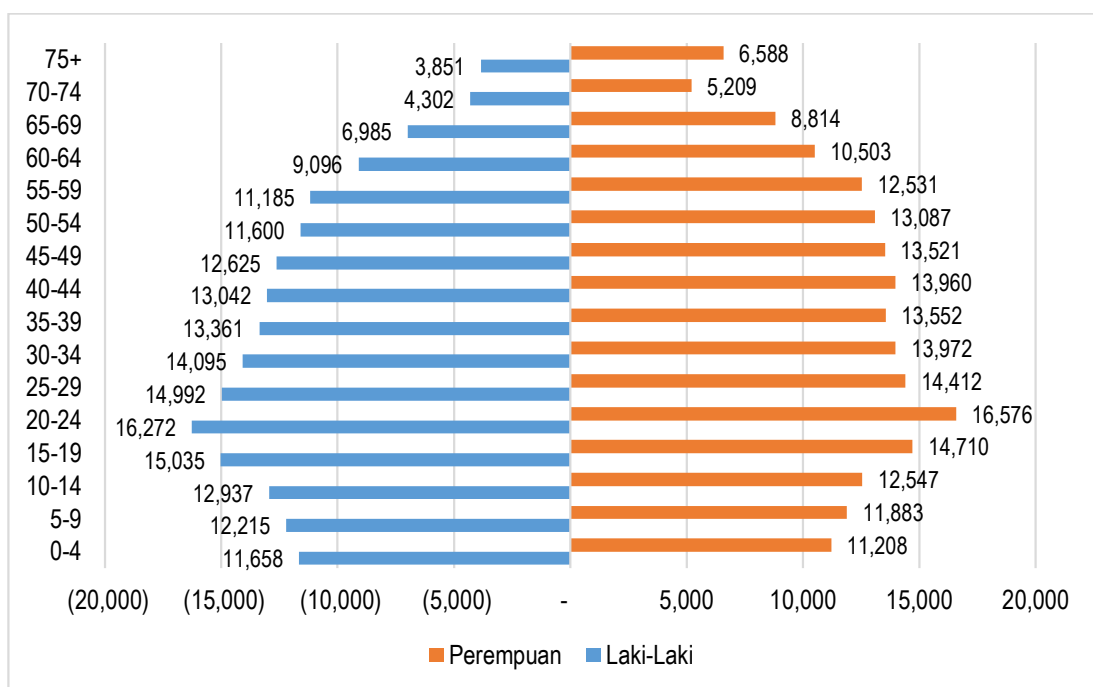
Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, besaran nilai rasio jenis kelamin di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang fluktuatif, yakni menunjukkan kisaran angka 94-

kisaran angka 94, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurun.

Berdasarkan data laporan kelahiran tahun 2021, kelahiran bayi perempuan lebih kecil dari laki-laki, hal ini berarti banyaknya penduduk perempuan bukan karena kelahiran bayi perempuan. Tetapi karena banyak mutasi datang penduduk perempuan dan penduduk yang meninggal lebih banyak yang laki-laki.

B. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Yogyakarta memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah total sebesar 32.848 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 20-24 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 16.272 jiwa dan perempuan sebanyak 16.576 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 9.511 jiwa.



Gambar 2.4 Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

C. Penduduk Menurut Agama

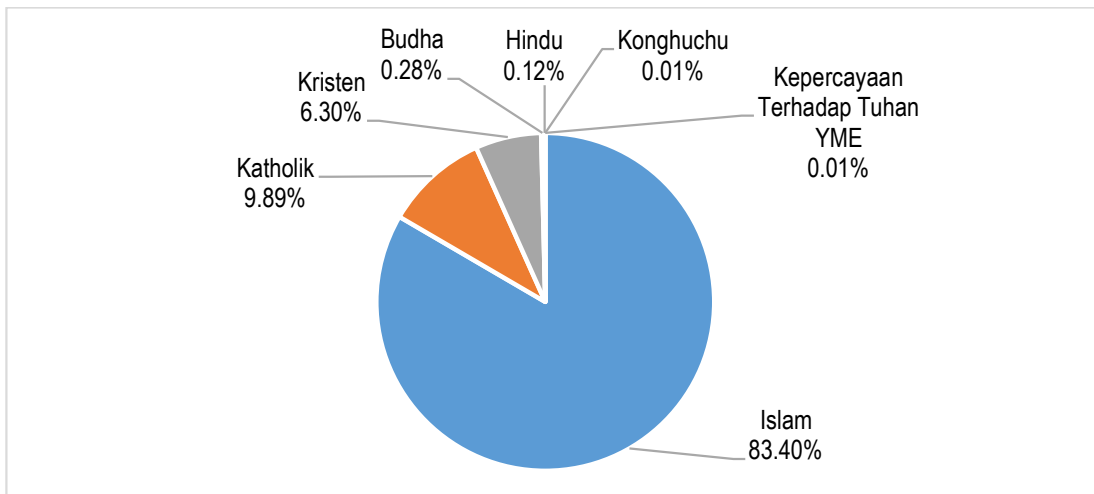
Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

Tabel 2.19 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Islam	Jiwa	342.361	343.824	344.817	346.556	346.532
2	Kristen	Jiwa	26.402	26.399	26.180	26.407	26.184
3	Katolik	Jiwa	42.102	41.929	41.299	41.410	41.088
4	Hindu	Jiwa	518	501	478	472	478
5	Budha	Jiwa	1.257	1.247	1.222	1.212	1.171
6	Konghuchu	Jiwa	29	30	26	27	26
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Jiwa	23	31	33	33	30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 83,40%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 9,89%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman agama di Kota Yogyakarta ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.



Gambar 2.5 Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota

peningkatan sebesar 5,09% atau bertambah sebesar 1.375,59 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2017-2021 rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta mencapai 3,53%.

Tabel 2.20 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018 ^r	2019	2020 [*]	2021 ^{**}
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	36,77	37,27	38,02	38,58	38,93
B	Pertambangan dan Penggalian	0,88	0,89	0,90	0,83	0,79
C	Industri Pengolahan	3.276,81	3.394,68	3.580,91	3.408,98	3.415,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,42	62,20	65,68	64,80	66,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34,60	36,15	39,00	39,16	41,33
F	Konstruksi	1.877,75	1.982,26	2.064,29	1.729,23	1.870,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.754,13	1.845,14	1.937,55	1.820,88	1.852,36
H	Transportasi dan Pergudangan	938,00	987,44	1.050,36	896,35	945,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.926,57	3.127,94	3.396,16	2.629,88	2.772,28
J	Informasi dan Komunikasi	3.474,91	3.704,30	3.959,89	4.737,88	5.348,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.488,72	1.564,44	1.686,58	1.677,56	1.690,90
L	Real Estate	2.264,81	2.388,47	2.512,67	2.559,82	2.590,53
M,N	Jasa Perusahaan	304,28	320,47	338,81	279,76	302,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.238,65	2.328,92	2.400,06	2.344,07	2.386,39
P	Jasa Pendidikan	2.424,68	2.572,77	2.734,51	2.847,45	2.948,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	973,06	1.035,72	1.096,68	1.303,94	1.368,50
S,T,U	Jasa Lainnya	693,38	738,18	783,21	635,30	750,08
PDRB Kota Yogyakarta ADHK		24.768,43	26.127,22	27.685,29	27.014,49	28.390,08
PDRB DIY ADHK		92.300,24	98.024,01	104.485,46	101.683,52	107.308,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: ^r = 2018 angka direvisi; ^{*}) sementara; ^{**}) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2021, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai 5.348,12 miliar rupiah atau sebesar 18,84% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,03% atau 3.415,05 miliar rupiah di tahun 2021. Selanjutnya, sektor pendidikan menghasilkan PDRB sebesar 2.948,71 miliar rupiah atau 10,39% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB ADHK Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai pada angka 26,46%.

Tabel 2.21 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47,86	50,61	53,23	55,18	57,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,14	1,17	1,13	1,11
C	Industri Pengolahan	4.217,23	4.484,69	4.800,42	4.675,56	4.828,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	70,34	75,28	81,77	80,08	82,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,99	48,34	52,22	52,78	56,70
F	Konstruksi	2.422,78	2.678,95	2.866,83	2.415,13	2.677,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.345,12	2.549,69	2.734,02	2.627,90	2.753,36
H	Transportasi dan Pergudangan	1.238,62	1.324,63	1.472,45	1.308,66	1.422,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.241,59	4.576,58	5.031,19	3.905,54	4.238,70
J	Informasi dan Komunikasi	3.270,52	3.520,38	3.747,16	4.476,83	5.155,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.083,55	2.269,74	2.495,53	2.490,37	2.611,87
L	Real Estate	2.850,16	3.072,64	3.341,98	3.482,22	3.595,34
M,N	Jasa Perusahaan	338,22	365,44	397,24	334,81	371,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.261,12	3.486,76	3.674,87	3.714,44	3.902,20
P	Jasa Pendidikan	2.850,18	3.090,52	3.365,64	3.589,83	3.808,69
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.181,95	1.273,07	1.382,48	1.725,02	1.861,50
S,T,U	Jasa Lainnya	842,67	919,14	994,43	822,05	992,34
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		31.309,05	33.787,58	36.492,64	35.757,45	38.416,52
PDRB DIY ADHB		119.128,72	129.818,36	141.047,69	138.306,83	149.369,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: ^r = 2018 angka direvisi; *) sementara; **) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta pada tahun 2018, nilai PDRB yang terbesar adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni sebesar 4.576,68 miliar rupiah atau sebesar 13,55% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 13,27% atau 4.484,69 miliar rupiah di tahun 2018. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi menghasilkan PDRB sebesar 3.520,38 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 10,41% dari total PDRB. Angka yang tercantum dalam PDRB Kota Yogyakarta sektor transportasi dan pergudangan sudah mencakup hitungan pendapatan dari transportasi ojek daring yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2019, nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah yang terbesar, yaitu mencapai 5.031,19 miliar rupiah atau sebesar 13,79% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan sebesar 13,15% atau 4.800,42 miliar rupiah di tahun 2019. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi menghasilkan PDRB sebesar 3.747,16 miliar rupiah atau 10,27% dari total PDRB.

4.476,83 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 3.905,54 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 10,92% dari total PDRB.

Selanjutnya pada tahun 2021, sektor dengan nilai PDRB terbesar yaitu sektor informasi dan komunikasi yakni sebesar 5.155,60 miliar rupiah atau sebesar 13,42% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 12,57% atau 4.828,35 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 4.238,70 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar pada angka 25% hingga 27%.

Tabel 2.22 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (%)

No.	Lapangan Usaha	2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	13,47	13,27	13,15	13,08	12,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
F	Konstruksi	7,74	7,93	7,86	6,75	6,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,49	7,55	7,49	7,35	7,17
H	Transportasi dan Pergudangan	3,96	3,92	4,03	3,66	3,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,55	13,55	13,79	10,92	11,03
J	Informasi dan Komunikasi	10,45	10,42	10,27	12,52	13,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,65	6,72	6,84	6,96	6,80
L	Real Estate	9,10	9,09	9,16	9,74	9,36
M,N	Jasa Perusahaan	1,08	1,08	1,09	0,94	0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,42	10,32	10,07	10,39	10,16
P	Jasa Pendidikan	9,10	9,15	9,22	10,04	9,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,78	3,77	3,79	4,82	4,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,69	2,72	2,73	2,30	2,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: ^r= 2018 angka direvisi; *) sementara; **) sangat sementara

Pada kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,54% per tahun. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan sebesar 0,150% dan terus menurun hingga 0,143% di tahun 2019. Kemudian, angka tersebut naik menjadi 0,151% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 0,146%. Kemudian kontribusi sektor tanaman pangan (palawija) dalam sektor pertanian dan perkebunan Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun pertumbuhan rata-rata per tahun

perikanan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,48% per tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 0,0030%, lalu menurun di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 0,0028% di tahun 2019 dan kemudian meningkat menjadi 0,0032% di tahun 2020 dan 0,0033% di tahun 2021. Kecilnya kontribusi sektor perikanan di Kota Yogyakarta disebabkan karena sempitnya perairan di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB Tahun 2021, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi sektor-sektor tersier sebesar 30.713,20 miliar atau 79,95% dari total PDRB. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi yang sangat kecil, yaitu sebesar 58,55 miliar atau 0,15% dari total PDRB. Selanjutnya, sektor sekunder memiliki kontribusi sebesar 7.644,76 miliar atau 19,90% dari total PDRB. Hal ini wajar apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2.23 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)					Rata-rata (%)
		2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,07	1,37	2,00	1,49	0,91	1,37
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	1,12	1,01	-7,39	-4,32	-1,43
C	Industri Pengolahan	4,77	3,60	5,49	-4,80	0,18	1,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,72	2,94	5,60	-1,35	2,95	2,77
E	Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,21	4,49	7,88	0,40	5,55	4,31
F	Konstruksi	5,27	5,57	4,14	-16,23	8,18	1,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	5,19	5,01	-6,02	1,73	2,33
H	Transportasi dan Pergudangan	4,77	5,27	6,37	-14,66	5,52	1,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	6,88	8,58	-22,56	5,41	1,03
J	Informasi dan Komunikasi	5,91	6,60	6,90	19,65	12,88	10,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	5,09	7,81	-0,53	0,80	3,26
L	Real Estate	4,47	5,46	5,20	1,88	1,20	3,64
M,N	Jasa Perusahaan	6,42	5,32	5,72	-17,43	8,29	1,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,03	3,05	-2,33	1,81	2,23
P	Jasa Pendidikan	5,07	6,11	6,29	4,13	3,56	5,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,75	6,44	5,89	18,90	4,95	8,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,70	6,46	6,10	-18,88	18,07	3,49
Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta		5,24	5,49	5,96	-2,42	5,09	3,87
Pertumbuhan PDRB DIY		5,26	6,20	6,59	-2,68	5,53	4,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: ^r= 2018 angka direvisi; *) sementara; **) sangat sementara

Pada tahun 2017 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang

sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor penyediaan makan dan minum yaitu sebesar 6,88% di tahun 2018 dan 8,58% di tahun 2019 sedangkan paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12% di tahun 2018 dan 1,01% di tahun 2019.

Pada tahun 2020 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 19,65%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan -22,56%. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan hampir semua sektor mengalami kontraksi. Untuk memutus rantai Covid-19, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat sehingga aktivitas masyarakat terutama pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum menurun. Akan tetapi, hal ini tidak berdampak pada sektor informasi dan komunikasi yang justru mengalami peningkatan karena selama pembatasan kegiatan banyak aktivitas berbasis daring atau online. Selain itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial turut mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB kurun waktu 2017-2021 terbesar yaitu sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,39% per tahun. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar -1,43% per tahun.

Kemudian pada tahun 2021 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor jasa lainnya sebesar 18,07%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan -4,32%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2021 hampir semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 120,90% di tahun 2021. Angka capaian tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 90,99%. Berikut data SDGs angka pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2021.

Tabel 2.24 Sustainable Development Goals (SDGs) Angka Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Angka pertumbuhan ekonomi	%	5,13	5,16	5,49	106,40	5,19	5,96	114,84	-2,22	-2,42	90,99	4,04-4,21	5,09	120,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T= Target, R= Realisasi, C= Capaian

2. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya

Tabel 2.25 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun)
1	Bahan Makanan	%	4,77	2,71	3,15	2,77	-13,00
2	Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	%	3,84	2,79	2,63	3,76	3,30
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	%	1,64	5,63	2,43	2,08	57,35
4	Sandang	%	3,04	3,84	3,61	5,51	24,32
5	Kesehatan	%	4,17	2,76	1,19	5,40	87,69
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	%	2,40	2,81	3,34	3,92	17,77
7	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	%	-2,06	6,72	2,46	0,37	-191,52
Inflasi Kota Yogyakarta		%	2,29	4,2	2,66	2,77	16,96
Inflasi Nasional		%	3,02	3,61	3,13	2,72	-2,29

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020

Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta kurun waktu 2016-2019 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 16,96% per tahun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,2% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Mulai tahun 2020, penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.26 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2021

No	Kelompok Pengeluaran	Satuan	2020	2021
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	%	2,73	4,09
2	Pakaian dan Alas Kaki	%	1,30	-0,01
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	%	0,69	1,04
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	%	0,96	2,27
5	Kesehatan	%	1,72	1,96
6	Transportasi	%	-1,85	3,4
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	%	-0,10	0,64
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	%	1,29	4,09
9	Pendidikan	%	1,92	1,42
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	%	2,40	1,05
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	%	6,24	3,56
Inflasi Kota Yogyakarta		%	1,40	2,29
Inflasi Nasional		%	1,68	1,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yaitu 1,40% sedangkan inflasi nasional menunjukkan angka 1,68%. Penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan 6,24%. Sedangkan, kelompok pengeluaran dengan nilai inflasi terendah yaitu kelompok transportasi dengan nilai inflasi -1,85%.

Kemudian inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, yaitu 2,29% sedangkan inflasi nasional menunjukkan angka 1,87%. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga dari beberapa kelompok selama tahun 2021. Penyumbang nilai inflasi terbesar

sebesar 4,09%. Sedangkan, kelompok pengeluaran dengan nilai inflasi terendah yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dengan nilai inflasi -0,01%.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.27 PDRB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
ADHB (Rupiah/jiwa)	74.063.579,83	79.035.646,00	84.226.678,46	95.680.794,73	102.083.624,46
ADHK (Rupiah/jiwa)	58.591.320,42	61.116.583,31	63.898.904,04	72.285.957,45	75.440.537,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,39% per tahun menurut ADHB dan 6,59% per tahun menurut ADHK. Pada tahun 2017 PDRB per kapita menurut ADHB sebesar 74.063.579,83 rupiah/jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 102.083.624,46 rupiah/jiwa pada tahun 2021, sedangkan menurut ADHK sebesar 58.591.320,42 rupiah/jiwa pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga mencapai 75.440.537,46 rupiah/jiwa pada tahun 2021. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks.

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 149,64% di tahun 2021. Angka capaian tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 145,41%. Berikut data SDGs PDRB per Kapita tahun 2018-2021.

Tabel 2.28 Sustainable Development Goals (SDGs) PDRB per Kapita Tahun 2018-2019

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019		
			T	R	C	T	R	C
1	PDRB ADHB per Kapita	58.533.947	60.955.762	79.035.646,00	129,66	63.377.577	84.226.678,46	132,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

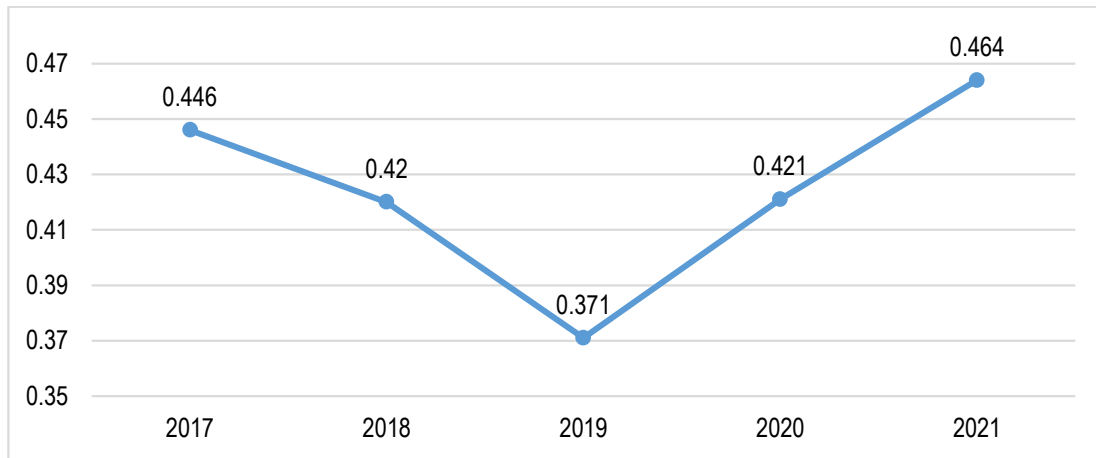
Keterangan: T= Target; R= Realisasi, C= Capaian

Tabel 2.29 Sustainable Development Goals (SDGs) PDRB per Kapita Tahun 2020-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2020			2021		
			T	R	C	T	R	C

4. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 0,446, kemudian menurun menjadi 0,42 pada tahun 2018. Selanjutnya, indeks gini terus mengalami penurunan menjadi 0,371 pada tahun 2019. Menurunnya indeks gini menunjukkan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah semakin merata dan dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali sehingga menjadi 0,464.



Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Indeks gini merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 91,08% di tahun 2021. Angka capaian tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 128,89%. Berikut data Indeks gini tahun 2018-2021.

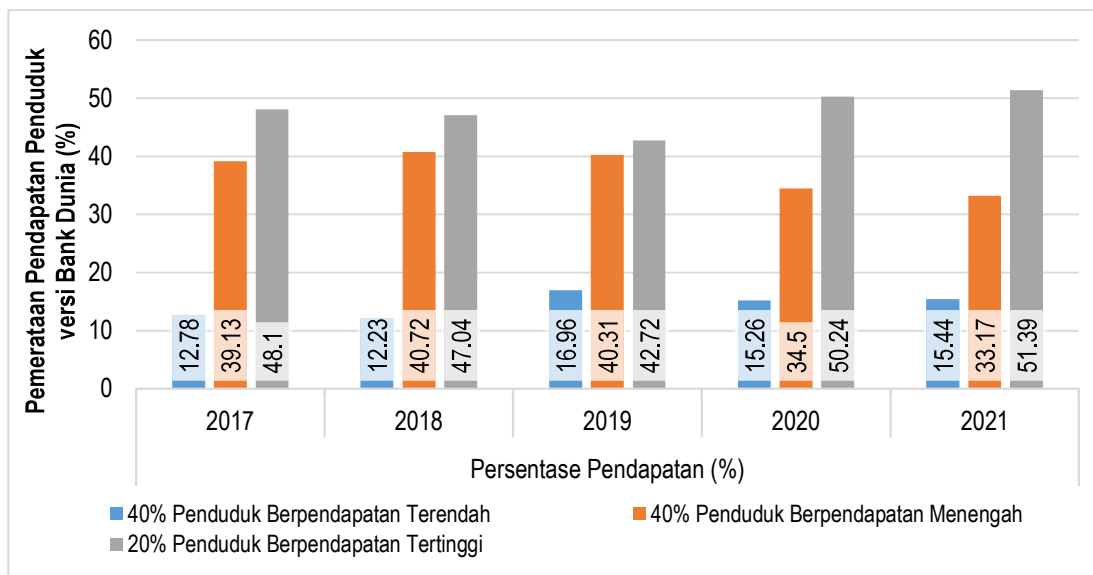
Tabel 2.30 Sustainable Development Goals (SDGs) Indeks Gini Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Indeks Gini	0,42	0,41	0,42	98,55	0,4	0,371	107,25	0,592	0,421	128,89	0,393-0,426	0,464	91,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Berikut grafik pemerataan pendapatan penduduk versi Bank Dunia Kota Yogyakarta.



Gambar 2.7 Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Pada kurun waktu 2017-2021, kategori 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 8,12% per tahun. Dari tahun ke tahun, persentase pemerataan pendapatan bagi 40% penduduk berpendapatan terendah merupakan persentase terendah dibandingkan dengan 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi.

Pada tahun 2017, persentase pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 12,78% lalu menurun hingga 12,23% di tahun 2018. Selanjutnya, persentase pendapatan penduduk meningkat menjadi 16,96% di tahun 2019, lalu terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 15,44% dari total pengeluaran penduduk DIY. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Pada saat yang sama, terjadi penurunan pendapatan pada penduduk pendapatan menengah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,79% per tahun. Sedangkan, pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% tertinggi mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 hingga menjadi 51,39%, dengan pertumbuhan rata-rata 2,07% per tahun.

6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	32,2	29,75	29,45	31,62	34,07
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	92,36	93,02	93,16	92,73	92,31
D.I. Yogyakarta						
Garis Kemiskinan	Rupiah	374.009	409.744	432.026	463.479	482.855
Jumlah penduduk miskin	000 jiwa	488,53	460,10	448,47	475,72	506,45
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan	(%)	86,98	87,87	88,30	87,72	87,20

Sumber: Statistik Kemiskinan Daerah istimewa Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2020 fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 32,2 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 29,45 ribu jiwa atau setara 6,84% dari total penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Kemudian meningkat menjadi 31,62 ribu jiwa di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 34,07 ribu jiwa. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Dampak terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta sangat dirasakan mulai awal periode pandemi ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Dibandingkan dengan DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin DIY mencapai 13,02% kemudian menurun menjadi 11,70% pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali menjadi 12,8%. Meningkatnya persentase penduduk miskin sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 94,51% di tahun 2021. Angka capaian tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 147,96%. Berikut data Indeks gini tahun 2018-2021.

Tabel 2.32 Sustainable Development Goals (SDGs) Angka Kemiskinan Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Angka Kemiskinan	%	7,70	7,58	6,98	107,92	6,24	6,84	90,38	13,97	7,27	147,96	7,29-7,18	7,69	94,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai

pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.33 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,35	74,45	74,56	74,65	74,76	0,14
Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,82	17,05	17,28	17,43	17,60	1,19
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,43	11,44	11,45	11,46	11,72	0,63
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp	18.005	18.629	19.125	18.678	18.801	1,11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		85,49	86,11	86,65	86,61	87,18	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,49% per tahun. Pada tahun 2017 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta sebesar 85,49, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 87,18 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2020 nilai IPM menurun menjadi 86,61 atau turun 0,04 poin dibanding tahun 2019. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan IPM secara nasional termasuk di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021, IPM di kota Yogyakarta kembali meningkat 0,57 poin menjadi 87,18.

Tabel 2.34 Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator IPM	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18	0,49
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	0,42
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	0,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, nilai IPM Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM DIY dan nilai IPM Indonesia. IPM Kota Yogyakarta menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2010-2021. Selain itu, angka harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2018 sebesar 17,05 tahun yang merupakan angka tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Yogyakarta ini masuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut hasil kajian Bappeda DIY mengenai IPM per Kemantren tahun 2013-2018 terdapat urutan 10 Kemantren dengan IPM terbesar di DIY, dalam urutan tersebut terdapat 7 Kemantren dari daerah Kota Yogyakarta, yaitu Kemantren Gondokusuman, Kemantren Pakualaman, Kemantren Mergangsan,

8. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel angka melek huruf di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.35 Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

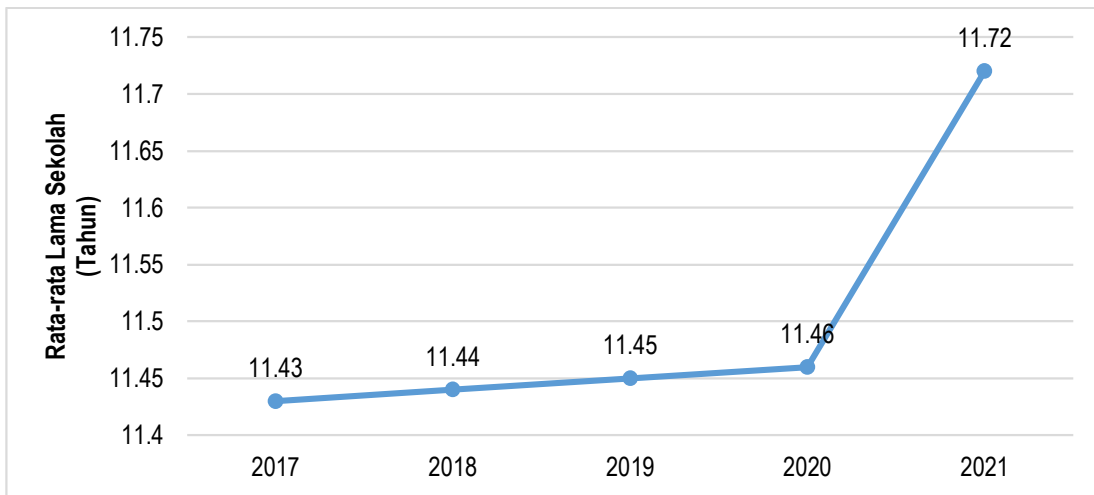
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Angka Melek Huruf	Persen	98,64	98,75	98,95	99,04	98,84	0,05

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum persentase angka melek huruf di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017-2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata angka melek huruf sebesar 0,05% per tahun. Pada tahun 2017 angka melek huruf di Kota Yogyakarta adalah sebesar 98,64% kemudian angka tersebut meningkat menjadi 99,04% pada tahun 2020. Selanjutnya, angka melek huruf menurun menjadi 98,84% pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar sebagian kecil penduduk Kota Yogyakarta (1,34%) yang masih belum melek huruf. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.



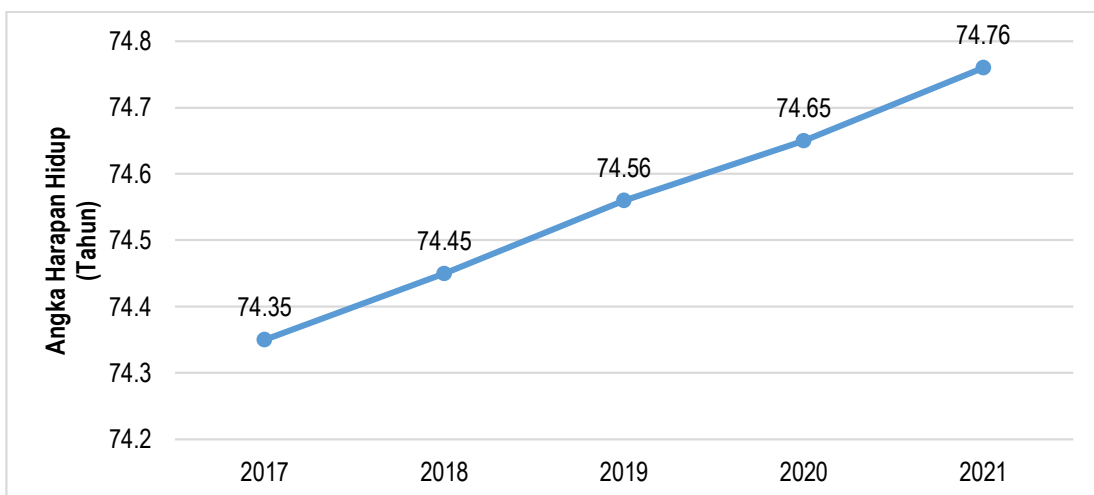
Gambar 2.8 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022;

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 11,43 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,72 tahun pada tahun 2021. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Faktor pendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah antara lain tenaga pendidik adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan anggaran yang *responsive* terhadap kebutuhan, penyediaan wifi gratis, tingginya swadaya masyarakat (Relawan Mengajar) serta tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran.

10. Angka Usia Harapan Hidup

Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.9 Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2017 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 74,35 tahun dan terus meningkat menjadi 74,76 tahun pada 2021. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

11. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.36 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun)
1.	Jumlah balita gizi buruk	Anak	89	80	84	156	103	11,66
2.	Jumlah balita	Anak	14.954	14.471	13.931	11.884	11.142	-6,97
3.	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,60	0,55	0,60	1,31	0,92	22,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase balita yang mengalami gizi buruk menunjukkan fluktuasi dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk sebesar 0,60% kemudian persentase balita gizi buruk terus meningkat menjadi 1,31% pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga *early warning* balita yang mengalami 2 kali turun (2T) tidak berjalan optimal sebagai upaya pencegahan gizi buruk. Kesadaran masyarakat terkait pemberian makanan bergizi kepada balita masih kurang. Di dalam evaluasinya permasalahan gizi ini tidak hanya berasal dari anak dari keluarga miskin saja. Saat ini pemilahan lebih kepada sasaran dan penyebab terjadinya permasalahan gizi, untuk diberikan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Penyebab lainnya yaitu adanya perbedaan rujukan pembandingan antropometri yang lebih sensitif yaitu berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standard Anthropometri Anak yang semula berdasarkan Berat Badan/Umur menjadi Berat Badan/Tinggi Badan sehingga akan menghasilkan kesimpulan balita mendekati gizi buruk meningkat. Adapun faktor lain (misal asupan gizi, ekonomi keluarga) belum bisa dilakukan analisis karena banyak bias dalam penerapannya di lapangan. Selanjutnya, pada tahun 2021 mulai terlihat adanya penurunan menjadi 0,92%. Penurunan persentase balita gizi buruk disebabkan karena selama pandemi mobilitas orang tua dan balita berkurang (lebih sering di rumah) sehingga asupan gizi balita lebih diperhatikan oleh orang tua. Kecukupan gizi balita tahun 2021 cenderung lebih baik.

untuk mengetahui berapa persentase balita gizi kurang di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.37 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya balita gizi kurang	Anak	1.136	1.102	1.056	668	630	-12,40
2.	Jumlah balita	Anak	14.954	14.471	13.931	11.884	11.142	-6,97
3.	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	7,60	7,62	7,58	5,62	5,65	-6,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi kurang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata prevalensi balita gizi kurang yang mencapai -6,37% per tahun. Pada tahun 2017 prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,60, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 7,62% di tahun 2018. Kemudian prevalensi balita gizi kurang terus menurun hingga menjadi 5,62% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik karena terdapat upaya pencegahan balita dengan status gizi baik batas bawah turun menjadi gizi kurang. Selama pandemi, orang tua menjaga daya tahan tubuh balita sehingga balita tidak mudah sakit. Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi balita dengan pemberian makanan tambahan berupa makanan lokal dan biskuit padat gizi kepada balita gizi kurang selama minimal 90 hari makan anak. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang secara angka terjadi peningkatan 0,03 namun demikian untuk kasus absolut terjadi penurunan kasus. Peningkatan angka prevalensi ini disebabkan karena penurunan jumlah balita sebagai pembaginya.

Sedangkan untuk prevalensi stunting di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 11,30 kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 14,34. Kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 12,88. Kejadian stunting balita dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita gizi kurang sehingga upaya yang paling efektif yaitu penatalaksanaan balita gizi kurang secara komprehensif serta akan ada 20 kelurahan yang menjadi lokus penanggulangan stunting tahun 2022, yaitu Kelurahan Purbayan, Tegalpanggung, Prenggan, Tegalrejo, Pakuncen, Tahunan, Brontokusuman, Panembahan, Notoprajan, Bener, Wirobrajan, Kricak, Pringgokusuman, Pandeyan, Gedongkiwo, Giwangan, Baciro, Karangwaru, Prawirodirjan dan Ngampilan.

13. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berikut ini merupakan data cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.38 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelurahan siaga aktif	kelurahan	45	45	45	45	45
2.	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	kelurahan	45	45	45	45	45
3.	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk, sama dengan jumlah kelurahan siaga aktif yaitu 45 kelurahan siaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar sudah mulai terpenuhi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam pengembangan kelurahan siaga aktif, diantaranya adalah mengenai kelembagaan kelurahan siaga yang belum mantap dan frekuensi pertemuan forum kelurahan siaga belum berjalan secara rutin.

14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja.

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja)	Jiwa	179.104	180.403	180.717	184.185	181.280	0,31
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jiwa	342.350	341.963	338.187	342.233	336.621	-0,42
3.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	52,32	52,76	53,44	53,82	53,85	0,73

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2017-2021, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,73% per tahun. Pada tahun 2017 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 52,32% kemudian naik di tahun 2018 menjadi 52,76%. Selanjutnya

kembali bekerja sehingga masuk menjadi angkatan kerja. Sedangkan, pada tahun 2020 peningkatan terjadi karena jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas banyak yang bekerja. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 53,85, hal ini diakibatkan banyaknya jumlah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19. Ditambah lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja yang semakin meningkat.

15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Pada rentang tahun 2017-2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0,66%.

Tabel 2.40 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Angkatan Kerja 15 thn ke atas	Jiwa	185.272	184.681	183.821	187.857	187.032	0,24
2.	Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas	Jiwa	342.350	341.963	338.187	342.233	336.621	-0,42
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	54,12	54,01	54,35	54,89	55,56	0,66

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu menjadi 55,56%. Jumlah partisipasi kerja pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan Tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan *supply* tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh banyaknya lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja. Adapun penghitungan tingkat partisipasi Angkatan kerja berdasarkan data SIAK Dukcapil.

16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Tabel 2.41 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,08	6,22	4,95	9,16	9,13	21,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Selama tahun 2017-2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,69% per tahun. Pada tahun 2017, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 5,08% kemudian angka tersebut terus mengalami peningkatan menjadi 9,13% pada tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan tenaga kerjanya.

17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja.

Tabel 2.42 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Penduduk yang Bekerja	Jiwa	179.104	180.403	180.717	184.185	181.280	0,31
2.	Angkatan Kerja	Jiwa	185.272	184.681	183.821	187.857	187.032	0,24
3.	Rasio penduduk yang Bekerja		0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,07

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai angka 0,97 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,98 pada tahun 2020. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 0,97 hal ini akibat banyaknya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan tenaga kerjanya di masa pandemi Covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, dilihat dari tren perkembangannya diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pertumbuhan rata-ratanya 0,07% per tahun.

18. Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah besar pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin

Tabel 2.43 Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	PDRB ADHK	Miliar rupiah	24.768,43	26.127,22	27.685,29	27.014,49	28.390,08	3,53
2.	Jumlah tenaga kerja	Jiwa	213.591	224.641	231.876	224.468	238.202	2,85
3.	PDRB ADHK per tenaga kerja	Juta rupiah/jiwa	115,96	115,43	117,99	120,35	119,18	0,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan 2022

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017, PDRB per tenaga sebesar 115,96 juta rupiah/jiwa, kemudian terus meningkat hingga menjadi 120,35 juta rupiah/jiwa di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 119,18 juta rupiah/jiwa.

19. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah indikator yang membandingkan jumlah total kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah Kota Yogyakarta. Rasio ini akan menggambarkan besar kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada rentang tahun 2017-2021, rasio kesempatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -22,91% per tahun. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 yaitu 1,192% kemudian terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,336% pada tahun 2021. Rasio kesempatan kerja kembali naik pada tahun 2021 setelah PPKM turun ke level 2 sehingga banyak kesempatan kerja yang terbuka pada triwulan akhir 2021.

Tabel 2.44 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Kesempatan Kerja	Orang	4.081	2.094	1.813	999	1100	-24,22
2.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Orang	342.350	341.350	338.187	342.233	327.505	-1,08
3.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	1,192	0,613	0,536	0,292	0,336	-22,91

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Penilaian didapatkan melalui survei. Survei yang dilakukan pada Kota Yogyakarta terdiri dari empat kategori pengelompokan pelayanan publik, yaitu OPD dan unit kerja pemerintahan (bagian dan dinas), unit Kemantren dan kelurahan, UPT puskesmas pada Dinas Kesehatan, dan bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK).

Tabel 2.45 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79,77	80,21	80,45	80,45	80,69

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari angka 79,77 pada tahun 2017 menjadi 80,69 pada tahun 2021. Pelaksanaan hasil SKM Perangkat Daerah/Unit Kerja baik eksternal maupun internal dilakukan setahun sekali sesuai dengan PermenPAN no.14 tahun 2017, sedangkan yang menyelenggarakan SKM 2 kali yaitu puskesmas. Mulai Tahun 2021, hasil survey SKM merupakan pengukuran SKM tahun 2020 hal ini sesuai dengan SE Permenpan No. B/46/PP.06/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan SKM. Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada sulitnya perangkat daerah/unit kerja untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

21. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

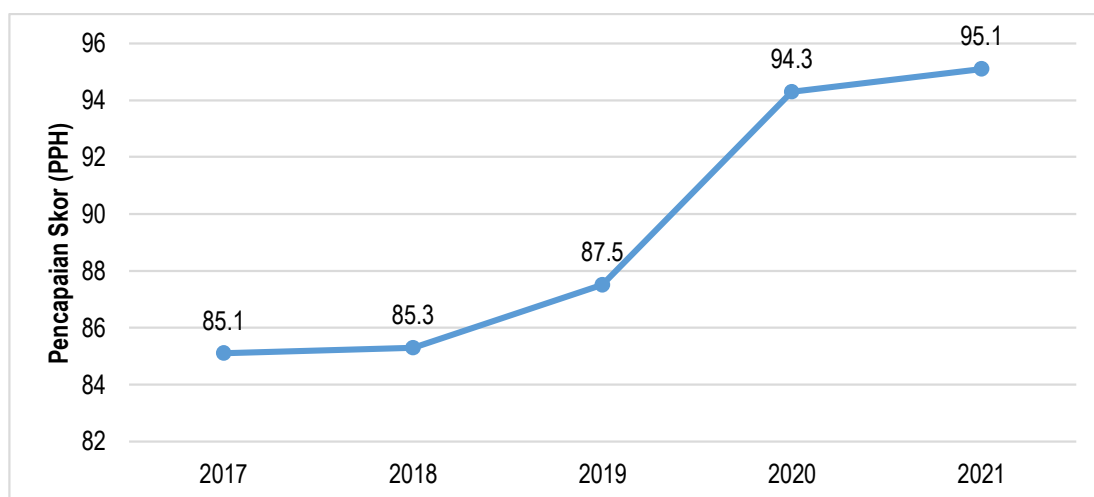
Tabel 2.46 Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Juta Rupiah	657.049,37	667.493,08	689.049,73	563.174,37	598.121,89	-1,81
2.	Realisasi Pendapatan	Juta Rupiah	1.659.277,14	1.736.920,00	1.765.760,42	1.699.751,02	1.707.273,29	0,76

Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta kurun tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,69% per tahun. Kontribusi realisasi pendapatan PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Penurunan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata berdampak besar terhadap menurunnya PAD karena sektor pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2021 PAD Kota Yogyakarta terlihat mengalami sedikit peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan tetapi cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta. Kondisi yang belum pulih akibat pandemi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga berpengaruh pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

22. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.



Gambar 2.10 Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022

Pada kurun tahun 2017-2021, skor pola pangan harapan Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Skor pola pangan harapan pada tahun 2017 sebesar 85,1 kemudian meningkat menjadi 85,3 pada tahun 2018, kenaikan tersebut karena pelaksanaan program ketersediaan pangan dan

pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran sehingga menggunakan data SUSENAS dan terjadi peningkatan signifikan terhadap skor PPH menjadi 94,3. Perbedaan data antara survei mandiri dengan survei susenas yaitu metode pengukuran datanya berbeda. Survei mandiri yang ditanyakan adalah jenis dan jumlah yang dikonsumsi hari kemarin, sedangkan data SUSENAS menggunakan jenis dan jumlah yang dibeli untuk kebutuhan satu minggu. Untuk kelompok pangan Sayuran dan Buah, Padi-padian, Pangan Hewani, Gula, serta Minyak dan Lemak mencapai skor maksimal. Kemudian pada tahun 2021 kembali dilakukan survei mandiri tetapi skor PPH mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 95,1.

Skor PPH juga menjadi indikator SDGs Kota Yogyakarta, capaian kinerja sebesar 100,63% di tahun 2021. Angka capaian tahun 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu 107,77%. Berikut data SDGs pola harapan pangan tahun 2018-2021.

Tabel 2.47 Sustainable Development Goals (SDGs) Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Skor PPH	%	85,00	85,20	85,30	100,12	85,40	87,50	102,46	87,50	94,30	107,77	94,50	95,10	100,63

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T=Target; R=Realisasi; C=Capaian;

23. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal ini. Jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam tabel dibawah ini merupakan data jumlah cadangan beras yang ada di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.48 Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cadangan pangan	Ton	100	100	112	116,75	131,75
Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	116,75	131,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

Pada kurun waktu 2016-2018 jumlah cadangan pangan di Kota Yogyakarta berjumlah sama, yaitu 100 ton. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta belum melakukan pencadangan beras sendiri, sehingga jumlah cadangan beras hanya berasal dari Pemerintah Pusat untuk penanganan tanggap darurat yang ada di Bulog sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012, yaitu sebesar 100 ton. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Yogyakarta sudah melakukan pencadangan beras sendiri yaitu sebesar 12 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pada tahun 2019 menjadi 112 ton. Kemudian tahun 2020 terdapat penambahan sejumlah 4,75 ton sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor

24. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan pra sejahtera. Masing-masing indikator tersebut diskor kemudian digabungkan sebagai penentu tingkat resiko kerawanan pangan daerah. Pada kurun waktu 2017-2021, semua wilayah di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori aman pangan (tidak ada wilayah rawan pangan).

Tabel 2.49 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan	Daerah	0	0	0	0	0
2	Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	Daerah	0	0	0	0	0
3	Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

Selain itu situasi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Yogyakarta digambarkan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security And Vulnerability Atlas* atau FSVA Kota Yogyakarta. FSVA disusun berbasis kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk dan (2) kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek ketahanan pangan adalah (1) rasio rumah tangga tanpa akses air bersih dan (2) rasio tenaga Kesehatan terhadap penduduk.

Kelurahan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab kerentanan

Tabel 2.50 Jumlah Wilayah Rentan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Klasifikasi	Satuan	2021
Prioritas 1	Kelurahan	0
Prioritas 2	Kelurahan	4
Prioritas 3	Kelurahan	6

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

Mendasarkan hasil analisis FSVA 2021 terdapat 4 kelurahan yang termasuk prioritas 2 dan 6 kelurahan yang termasuk prioritas 3 (tiga). Kelurahan prioritas 2 (dua) yaitu Kelurahan Gedongkiwo (Kemantren Mantrijeron), Kelurahan Keparakan (Kemantren Mergangsan), Kelurahan Pringgokusuman (Kemantren Gedong Tengen), Kelurahan Kricak (Kemantren Tegalrejo). Kelurahan prioritas 3 yaitu Kelurahan Tahunan dan Semaki (Kemantren Umbulharjo), Kelurahan Rejowinangun (Kemantren Kotagede), Kelurahan Tegalpanggung (Kemantren Danurejan), Kelurahan Pakuncen (Kemantren Wirobrajan) dan Kelurahan Bener (Kemantren Tegalrejo).

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) dan 14 kemantren: Peningkatan penyediaan pangan dengan megoptimalkan sumberdaya pangan lokal serta Pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan pertanian perkotaan;
2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), 14 Kemantren dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Dinas PKU): Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur (jalan, air bersih) dan pemberian bantuan sosial serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
3. Dinas PUPKP: Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
4. Dinas Kesehatan dan Puskesmas: Penyediaan tenaga Kesehatan yang memadai untuk masing-masing wilayah kelurahan; dan
5. Dinas P3AP2KB: Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.

Intervensi spesifik untuk 3 (tiga) kemantren yang masuk kategori rentan pangan menurut FSVA DIY dilaksanakan melalui program pekarangan pangan lestari tahap penumbuhan Tahun 2021 dilanjutkan tahap pengembangan Tahun 2022 untuk kemantren Wirobrajan dan Kraton. Sedangkan Kemantren Kraton menjadi lokus program pengembangan kampung sayur dan rintisan kampung pangan lestari pada Tahun 2022.

25. **Produksi Sektor Pertanian**

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi

Tabel 2.51 Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020*	2021*	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton	751	764	780	615,485	571,35	-6,11

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Dinas Pertanian dan Pangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Hasil survei Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun 2017-2021 produksi tanaman padi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar -6,11%. Pada tahun 2017 produksi padi di Kota Yogyakarta sebesar 751 ton kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 571,35 ton di tahun 2021. Penurunan produksi padi cukup dipengaruhi oleh pengalihan fungsi lahan pertanian sehingga produktifitas lahan padi di Kota Yogyakarta menurun.

26. **Pertumbuhan Industri**

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Namun mulai tahun 2017 lalu, kewenangan atas industri besar dan menengah dilimpahkan kepada Pemerintah DIY. Dari tahun 2017-2021, jumlah unit industri kecil di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pertumbuhan rata-ratanya sebesar 48,62% per tahun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.204 unit usaha industri kecil dari tahun sebelumnya dan merupakan hasil akumulasi dengan verifikasi di lapangan.

Tabel 2.52 Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Unit usaha industri kecil	Unit	1.279	1.397	2.862	4.375	5.579
Pertumbuhan	%	-79,44	9,23	104,87	52,87	27,52

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

2.1.3. **Aspek Pelayanan Umum**

2.1.3.1. **Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar**

A. **Pendidikan**

1. **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.53 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

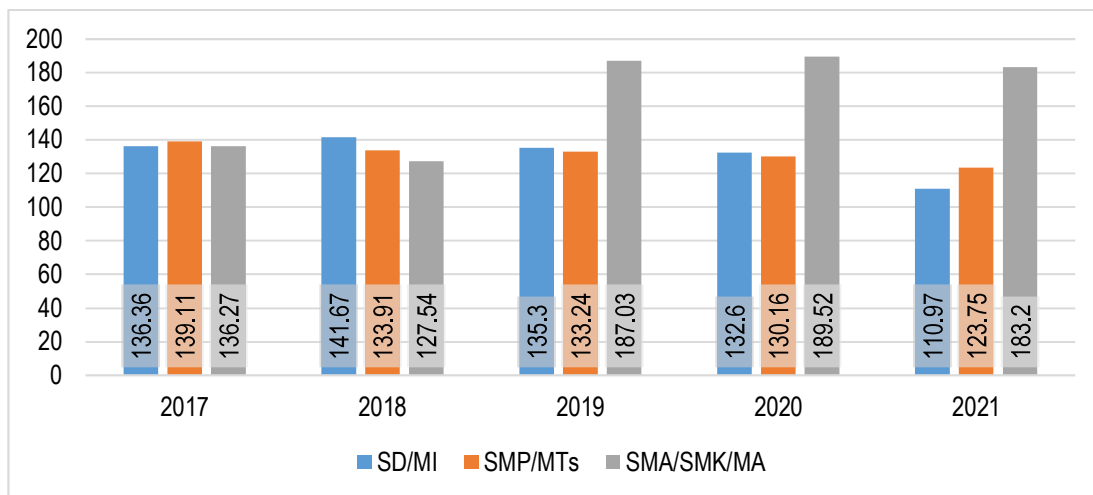
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak	Jiwa	11.295	15.910	18.386	11.597	8.717	-1,33
2.	Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	Jiwa	16.876	17.174	17.291	16.749	11.179	-8,49
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	67	93	106	69	78	7,73

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak adalah siswa yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Data tersebut terdiri atas siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,73%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan rasio PAUD yang cukup signifikan menjadi 93%. Peningkatan tersebut karena faktor ibu bekerja semakin tinggi dan kesadaran keluarga agar anak balitanya mendapatkan pendidikan lebih dini. Selanjutnya, pada tahun 2019 rasio PAUD kembali meningkat bahkan nilainya melebihi angka 100%, yaitu sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak melebihi jumlah anak usia 4-6 tahun di Kota Yogyakarta, artinya ada anak dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah TK/RA/penitipan anak di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, pada tahun 2020 rasio PAUD turun menjadi 69% karena dampak dari Pandemi Covid-19 pembelajaran sekolah masih dilaksanakan secara daring, sehingga banyak orang tua yang menunda untuk memasukkan anaknya ke TK. Kemudian pada tahun 2021 rasio PAUD mengalami peningkatan menjadi 78%, untuk jumlah siswa PAUD di tahun 2021 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya dikarenakan banyak dari orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke TK /penitipan, mengingat kondisi pandemi yang masih terjadi dan belum stabil.

2. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.



Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022

Apabila melihat gambar di atas, nilai persentase APK dari masing-masing jenjang pendidikan memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI dalam kurun waktu 2017-2020 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APK pada jenjang SD/MI sebesar $-4,73\%$ per tahun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 angka APK pada jenjang SD/MI menunjukkan kenaikan, yaitu dari $136,36\%$ menjadi $141,67\%$. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta dan mutu sekolah yang baik di Kota Yogyakarta sehingga menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 angka APK pada jenjang SD/MI menurun dari angka $135,3\%$ menjadi $110,97\%$. Penurunan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan adanya sistem zonasi dan memilih sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya di daerah asal untuk menyiapkan anak-anak mereka bersaing di tingkat SMP daerah mereka sendiri.

Pada kurun waktu 2017-2021 angka APK pada jenjang SMP/MTs cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar $-2,87\%$ per tahun. Pada tahun 2021 angka APK di tingkat SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari $130,16\%$ menjadi $123,75\%$. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA pada kurun waktu 2017-2018 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari $136,27\%$ di tahun 2017 menjadi $127,54\%$ di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 – 2020 angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan menjadi $187,03\%$ di tahun 2019 dan $189,52\%$ di tahun 2020. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA/SMK/MA yang terletak di Kota Yogyakarta. Hal ini

SMA/SMK/MA/Paket C dan jumlah penduduk kota Yogyakarta berumur 16-18 tahun mengalami penurunan pada tahun 2021.

3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Yogyakarta. Berikut adalah angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.54 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Tidak/Belum Sekolah	Persen	13,16	13,96	14,46	15,09	15,90	4,84
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	10,93	10,65	10,49	10,29	10,17	-1,79
3.	Tamat SD/Sederajat	Persen	10,53	10,28	9,91	9,74	9,51	-2,50
4.	SMP/Sederajat	Persen	12,75	12,65	12,61	12,49	12,30	-0,90
5.	SMA/Sederajat	Persen	30,31	30,13	30,11	29,80	29,34	-0,80
6.	Diploma I/II	Persen	0,81	0,80	0,77	0,75	0,74	-2,36
7.	Diploma III/ Akademi/ Sarjana Muda	Persen	4,88	4,84	4,80	4,77	4,71	-0,89
8.	Diploma IV/Strata I	Persen	14,83	14,87	14,98	15,15	15,24	0,68
9.	Strata II	Persen	1,60	1,63	1,66	1,71	1,74	2,16
10.	Strata III	Persen	0,19	0,19	0,19	0,20	0,21	1,95

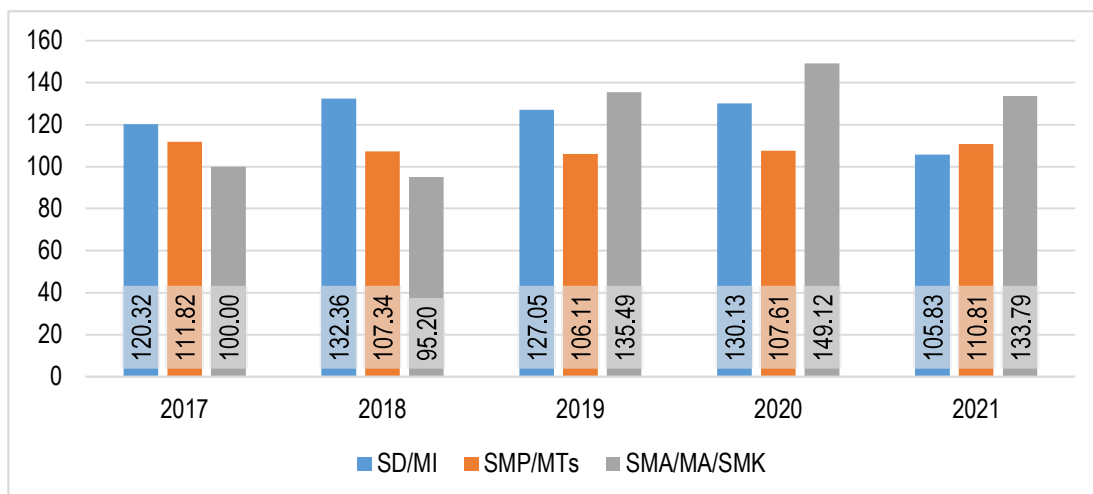
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 terdapat penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Adapun peningkatan terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang pendidikan tinggi seperti Diploma dan Strata. Meningkatnya persentase pada kategori tersebut menandakan kondisi baik, sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi.

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk

dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.



Gambar 2.12 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022

Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SD/MI sebesar -2,56% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SD/MI sebesar 120,32% dan angka tersebut berfluktuasi menjadi 105,83% pada tahun 2021. Penurunan yang terjadi di tahun 2021 disebabkan calon peserta didik di Kota Yogyakarta memilih bersekolah di dekat tempat tinggal karena adanya sistem zonasi.

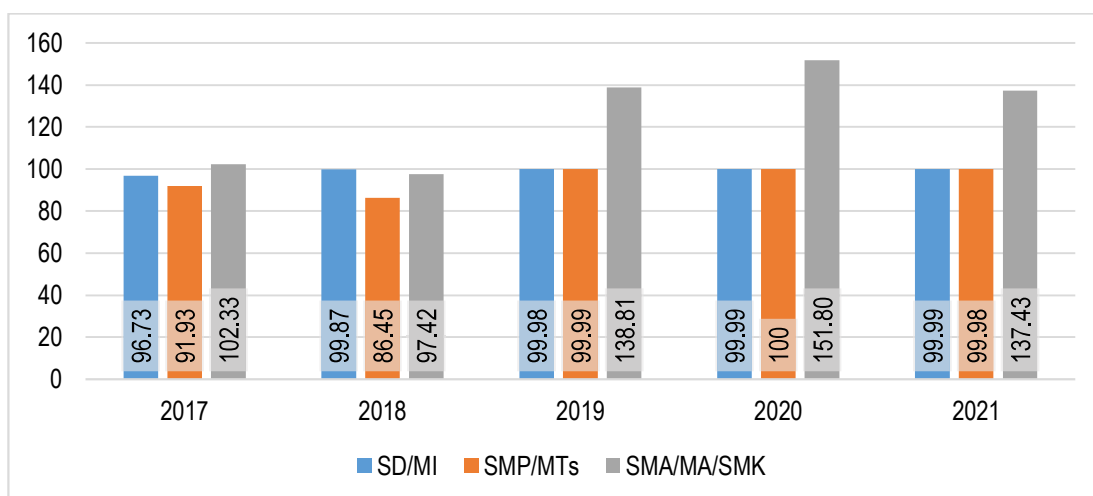
Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SMP/MTs sebesar -0,19% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SMP/MTs sebesar 111,82% dan angka tersebut terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 110,81%. Penurunan APM disebabkan Wilayah DIY melaksanakan Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dengan sistem zonasi di wilayah DIY, sehingga peserta didik dari luar Kota Yogyakarta lebih memilih dan berpeluang diterima bersekolah di daerah tempat tinggalnya.

Pada jenjang SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,33% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SMA/MA/SMK sebesar 100% dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi 149,12%. Peningkatan ini disebabkan karena kualitas pendidikan Kota Yogyakarta masih unggul sehingga menjadi rujukan masyarakat DIY. Dapat dikatakan bahwa SMA/SMK/MA yang ada di Kota Yogyakarta memiliki siswa usia 16 – 18 tahun yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kota usia 16 – 18 tahun. Kelebihan siswa tersebut berasal dari 4 Kabupaten lain di DIY maupun provinsi lain di luar DIY. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 133,79% hal ini dipengaruhi jumlah Penduduk yang berumur 16-18 tahun dan jumlah peserta didik yang berumur 16-18 yang belajar di sekolah jenjang SMA/SMK/MA mengalami

banyak penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 2.13 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022

Berdasarkan gambar di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 APS SD/MI sebesar 96,73% kemudian pada tahun 2018-2021 terjadi peningkatan APS menjadi 99,99% di tahun 2021. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2021 juga cenderung fluktuatif dengan rata-rata kenaikan 2,42% per tahunnya. APS jenjang SMP/MTs pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan hingga menjadi 86,45% di tahun 2018 dan kemudian meningkat hingga 100% di tahun 2020. Kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 99,98%.

Peningkatan angka partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs tersebut karena daya tampung sekolah di kota yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, adanya jaminan pendidikan daerah untuk keluarga tidak mampu dan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun data terkait APS pada jenjang SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 2017-2021 cukup fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 9,40% per tahunnya. APS SMA/SMK/MA menurun di tahun 2018 sebesar 97,42% dibandingkan tahun 2017 sebesar 102,33%. Kemudian APS SMA/SMK/MA pada tahun 2019-2020 APS mengalami peningkatan menjadi 151,80% di tahun 2020. Peningkatan di

di kota. Perhitungan menggunakan data siswa SMP/MTs 16-18 dikarenakan untuk menghitung akses dan layanan pendidikan bagi penduduk kota usia 16-18 tahun. Selanjutnya di tahun 2021 APS SMA/SMK/MA menurun menjadi 137,43% hal ini dipengaruhi jumlah penduduk yang berumur 16-18 tahun dan jumlah peserta didik yang berumur 16-18 yang belajar di sekolah jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan pada tahun 2021.

6. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2016-2020.

Tabel 2.55 Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI	Persen	0,01	0	0,01	0	0,01
2.	SMP/MTs	Persen	0	0	0,02	0,02	0,02
3.	SMA/MA/SMK	Persen	0,006	0,04	0,036	0,05	0,30

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta terlihat semakin baik, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK. Meskipun di tahun 2017-2021 masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tetapi sistem pendidikan yang diterapkan sudah semakin baik, dan juga adanya program bantuan pembiayaan bagi KMS, penyediaan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang semakin ditingkatkan sehingga mereka dapat bersekolah di sekolah umum. Adanya angka putus sekolah tersebut dikarenakan adanya pengaruh pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi.

Selain itu, masih adanya angka putus sekolah dalam kurun waktu 2017-2021. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa alasan, yaitu faktor lingkungan, disabilitas intelektual dan tidak minat bersekolah. Pada tahun 2021, jumlah peserta didik SMA/MA/SMK yang berhenti atau tidak meneruskan sekolahnya meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Meski demikian, Dikpora DIY tetap berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah.

7. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.56 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	0
2.	SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	0
3.	SMA/MA/SMK	Persen	100	100	100	99,9	100	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2017-2019 di angka 100%. Selanjutnya dalam kurun waktu 2017-2019 angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA sudah mencapai 100%, namun pada tahun 2020 menurun ke angka 99,9%. Kemudian pada tahun 2021 angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA kembali mencapai 100%.

Apabila dilihat secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan rata-rata per tahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah mampu mempertahankan angka kelulusan. Selain itu, terdapat kegiatan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya sehingga berdampak pada kemampuan siswa.

8. Angka Melanjutkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.57 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110	104,74	107,93	107,93	104,87	-1,14
2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen	156,24	152,94	141,51	150,28	133,07	-3,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2017-

Penurunan tersebut karena banyak faktor baik ekonomi maupun non ekonomi, seperti pergaulan, kurangnya dukungan keluarga, sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin bekerja.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK sebesar -3,71% per tahun. Pada tahun 2017, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK sebesar 156,24%. Selanjutnya angka tersebut terus menurun menjadi 133,07% pada tahun 2021.

Apabila dicermati, angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang lebih tinggi menunjukkan angka di atas 100%. Hal ini disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah sekitarnya.

9. Fasilitas Pendidikan

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan, sehingga data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik, yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Berikut adalah data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.58 Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	1.733	1.655	1.675	1.674	1.824
2	Jumlah Seluruh Kelas SD/MI	Unit	1.768	1.708	1.729	1.674	1.824
3	Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	98,02	96,90	96,88	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Pada tahun 2021 persentase ruang kelas kondisi baik sudah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan renovasi kelas. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang baik.

b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Tabel 2.59 Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Ruang Kelas SMP/MTs							
1	Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Unit	822	747	835	782	782
2	Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs	Unit	832	756	844	782	782
3	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Persen	98,80	98,81	98,93	100,00	100,00
Ruang Kelas SMA/SMK/MA							
1	Jumlah Kelas SMA/SMK/MA Kondisi Baik	Unit	1.232	1.236	1.236	786	839
2	Jumlah Seluruh Kelas SMA/SMK/MA	Unit	1.287	1.274	1.257	1.251	1.281
3	Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik	Persen	95,73	97,02	98,33	62,83	65,50

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase ruang kelas baik pada jenjang SMP/MTs sudah berada kondisi baik. Pada kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dilihat dari angka rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 angka persentase sudah mencapai 100%, dikarenakan adanya penambahan rombongan belajar serta renovasi kelas di beberapa sekolah SMP. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh pelajar di Kota Yogyakarta semakin membaik setiap tahunnya.

Persentase ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA kurun waktu 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan dari 95,73% terus meningkat menjadi 98,33%. Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 62,83% dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 65,50%. Meningkatnya presentase di tahun 2021 ini dikarenakan adanya penambahan atau pembangunan gedung baru di beberapa sekolah SMA, sehingga jumlah ruang kelas berkondisi baik menjadi bertambah.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini adalah data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.60 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	232	232	234	232	233	0,11
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa	48.762	49.280	49.280	49.828	55.663	3,47
3.	Rasio ketersediaan		48	47	47	47	42	3,06

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan -3,06% per tahun. Pada tahun 2017 tersedia 48 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Selanjutnya, pada tahun 2018 tersedia 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar pada tahun 2019 cenderung tetap, yaitu 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 234 unit. Pada tahun 2020, tersedia 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Berkurangnya jumlah sekolah sebanyak 2 unit dari tahun sebelumnya karena terdapat sekolah yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian di tahun 2021, tersedia 42 sekolah tiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 233 unit. Jumlah sekolah ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, mengingat jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun juga meningkat.

11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini perhitungannya melibatkan angka jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.61 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit	79	76	77	75	76	-0,94
2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa	20.612	20.579	19.716	19.510	19.434	-1,45
3.	Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA	Unit/10.000 jiwa	38,33	36,93	39,05	38,44	39,11	0,57

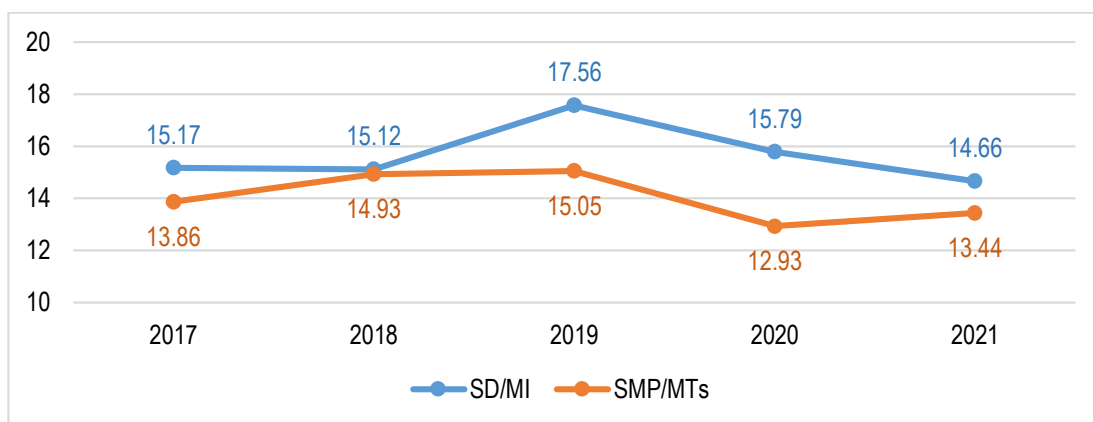
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA yaitu 38 sekolah dalam 10.000 penduduk, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 36 sekolah dalam 10.000 penduduk. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah sekolah. Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MK meningkat kembali menjadi 39 sekolah dalam 10.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini disebabkan bertambahnya sekolah dan berkurangnya jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 38 sekolah dalam 10.000 penduduk di tahun 2020. Penurunan terjadi karena jumlah sekolah

hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sekolah, sedangkan penduduk usia 16-18 di kota yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2021.

12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS. Formula untuk menghitung rasio ini adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut gambar rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.14 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, angka rasio ketersediaan guru/murid SD/MI pada tahun 2021 sebesar 14,66, artinya satu guru dapat mengajar 14 hingga 15 murid. Sedangkan rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 13,44, artinya satu guru mengajar 13 hingga 14 murid. Untuk guru SD/MI menurun karena adanya mutasi guru ke luar Kota Yogyakarta, sedangkan guru SMP/MTs naik karena adanya mutasi guru ke dalam Kota Yogyakarta dan Formasi guru di Kota Yogyakarta bertambah.

Guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas. Guru yang mengajar siswa SMP/MTs merupakan guru untuk setiap mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda.

13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada level

agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.62 Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang	3.270	3.263	3.277	2.884	2.767	-3,96
2.	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang	37.209	36.564	36.095	36.496	34.802	-1,64
3.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		878,82	892,41	907,88	790,22	795,07	-2,27

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah guru SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dan cenderung turun. Penurunan jumlah guru dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya pensiun dan mutasi. Meskipun demikian rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan menengah di Kota Yogyakarta menunjukkan ketersediaan guru pada pelayanan pendidikan yang sudah baik. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah guru dan jumlah murid dari tahun sebelumnya, sehingga rasio guru terhadap murid pendidikan menengah menjadi 795,07 yang berarti pada 10.000 murid diajar oleh 795,07 guru atau dengan kata lain seorang guru dapat mengampu hingga 13 murid.

14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD/MI. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.63 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah guru SD per kelas	Orang	2.478	2.405	2.631	2.687	2.663
2.	Jumlah murid SD	Orang	43.061	42.142	42.821	42.429	39.224
3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		575,46	570,69	614,42	633,29	678,92

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dalam kurun

murid. Pada tahun 2021 jumlah guru SD mengalami penurunan karena adanya mutasi guru ke luar Kota Yogyakarta dan guru yang pensiun, sedangkan jumlah murid SD berkurang dikarenakan masa pandemi.

15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan menengah yang dimaksud adalah SMP/MTs, karena pendidikan jenjang SMA/SMK/MA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.64 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah guru SMP per kelas	Orang	1.678	1.378	1.609	1.795	1.574
2.	Jumlah murid pendidikan SMP	Orang	23.913	20.513	23.492	23.207	20.697
3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata		701,71	671,77	684,91	773,47	760,50

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2019 fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio/guru murid SMP/MTs menurun dari tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2019-2020 rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs kembali meningkat, kemudian terjadi penurunan kembali menjadi 760,50 di tahun 2021. Hal ini berarti setiap satu orang guru per kelas mengajar 13 hingga 14 murid. Jumlah guru SMP pada tahun 2021 berkurang karena adanya guru yang mutasi ke luar Kota Yogyakarta dan adanya guru yang pensiun, sedangkan jumlah murid menurun sebagai dampak dari PPDB zonasi dan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menurunkan jumlah siswa.

16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Indikator ini adalah perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun (usia rata-rata lulus SD). Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya siswa yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar. Berikut merupakan proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.

Tabel 2.65 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Banyaknya lulusan SD	Orang	7.133	7.190	7.351	7.307	6.985	-0,49

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
3.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	113	141	144	112	111	0,98

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017, proporsi murid yang berhasil menamatkan sekolah dasar sebesar 113% dan terus mengalami kenaikan menjadi 144% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 angka proporsi tersebut turun menjadi 112% kemudian di tahun 2021 kembali turun menjadi 111%. Penurunan terjadi karena jumlah penduduk usia 12 tahun mengalami peningkatan, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di tingkat SD rata-rata belum berusia 12 tahun hingga siswa tersebut lulus. Pada kurun waktu 2017-2021, proporsi murid yang menamatkan sekolah dasar menunjukkan angka lebih dari 100%, hal ini dikarenakan banyaknya lulusan SD lebih besar jika dibanding jumlah penduduk yang berusia 12 tahun. Hal ini terjadi karena bisa saja siswa yang lulus pada saat itu tidak berusia 12 tahun, dan bisa juga siswa tersebut bukan penduduk Kota Yogyakarta.

17. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.66 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang	6.861	6.369	7.133	7.116	6.766	-0,08
2.	Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang	7.174	6.604	7.276	7.357	6.977	-0,46
3.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,64	96,44	98,03	96,72	96,98	0,35

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, persentase guru berijazah S1/D-IV mencapai 95,64% kemudian terus meningkat hingga mencapai 98,03% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut karena adanya persyaratan untuk mendapatkan

berijazah S1/D-IV maupun jumlah guru keseluruhan. Penurunan jumlah guru disebabkan oleh guru yang pensiun, meninggal dunia, ataupun sebab lainnya. Kemudian pada tahun 2021, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami sedikit kenaikan menjadi 96,98%. Hal ini dipengaruhi karena adanya penurunan jumlah guru berijazah S1/D-IV serta penurunan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Penurunan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan ini disebabkan oleh adanya guru yang pensiun maupun yang mutasi ke luar wilayah Kota Yogyakarta sehingga jumlah kualifikasi guru yang berijazah S1/D-IV berkurang.

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.67 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100,00%	100,00%	100,00%
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%	100,00%	100,00%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tindak lanjut pencapaian SPM pada perencanaan tahun 2023 adalah akan dikoordinasikan lebih intensif dengan stakeholder terkait sesuai dengan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.68 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGS	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
2	Persentase SMP terakreditasi A	%	74	67,8	77,19	113,85	74,5	76,27	102,38	77,97	75,86	97,29	75,86	77,59	102,28
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	%	128,98	120,34	132,36	109,99	129,02	127,05	98,47	127,68	130,13	101,92	130,16	105,83	81,31
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	%	105,97	111,83	107,34	96	106,23	106,11	99,89	106,40	107,61	101,14	107,68	110,81	102,91
5	Angka partisipasi kasar SD	%	142,61	136,38	141,67	103,88	141,67	135,30	95,50	135,81	132,60	97,64	135,9	110,97	81,66
6	Angka partisipasi kasar SMP	%	141,11	139,13	133,91	96,25	141,22	133,24	94,35	133,8	130,16	97,28	133,92	123,75	87,52
7	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	11,42	11,43	11,44	100,09	11,43	11,45	100,17	11,45	11,46	100,09	11,46	11,72	102,27
8	Persentase guru sesuai kualifikasi	%	92,37	93,96	94,61	100,69	93,97	99,42	105,80	99,67	96,21	96,53	99,7	94,43	94,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T= Target; R = Realisasi; C = Capaian

Berdasarkan data capaian SDGs di atas dapat dilihat capaian setiap indikator, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai 100% di tahun 2021 yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka partisipasi kasar SD, Angka partisipasi kasar SMP, dan Persentase guru sesuai kualifikasi. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor seperti:

- Kualitas pendidikan di Kabupaten lain semakin merata, meningkat dan bersaing sehingga minat warga luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta semakin turun;
- Adanya sistem zonasi sekolah; dan
- Adanya pandemi COVID-19 yang kemungkinan masih belum mereda di tahun mendatang menjadi ancaman untuk pencapaian target di tahun 2022.

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.69 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	33	35	24	35	33	3,69
2.	Jumlah kelahiran hidup	bayi	3.621	3.620	3.338	3.118	2.757	-6,50
3.	Angka kematian bayi per 1.000		9,11	9,67	7,19	11,23	11,97	10,80

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 9,11 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat kembali menjadi 9,67 di tahun 2018. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2019, jumlah kematian bayi mencapai angka 24 kasus dari 3.338 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi 11,23. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Yogyakarta yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental.

Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian bayi di Kota Yogyakarta yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Faktor lainnya yaitu terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan kelas ibu kurang aktif karena masa pandemi tidak boleh berkumpul dan belum dapat dilakukannya kelas ibu secara daring sehingga edukasi preventif tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Begitu pula pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka kematian bayi menjadi sebesar 11,97 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kasus kematian bayi adalah pneumonia yang meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021. Beberapa kegiatan posyandu yang sudah dilakukan untuk menekan AKB dan kematian neonatus, diantaranya layanan pembinaan posyandu, posbindu, dan ukbm lainnya melalui sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.70 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	9,1	9,7	7,19	11,23	11,97	10,87
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) □ (1000-AKB)	990,9	990,3	992,81	988,77	988,03	-0,07

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

kemudian menurun menjadi 990,3 di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi meningkat menjadi 992,81, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 988,77 dan 988,03. Penurunan ini selaras dengan meningkatnya angka kematian bayi pada tahun tersebut. Angka kematian bayi meningkat di tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya kasus pneumonia pada bayi akibat pandemi Covid-19. Hal ini mempengaruhi penurunan angka kelangsungan hidup bayi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,07% pertahun.

Dinas Kesehatan mempunyai rencana program kegiatan di tahun 2022 terkait dengan pencapaian target angka kelangsungan hidup bayi, rencana tersebut ada di dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terdapat beberapa output, sebagai berikut:

- a. Bayi baru lahir memperoleh skrining hipotiroid kongenital sebanyak 2205 orang;
- b. Petugas kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan 70 orang; dan
- c. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di 18 Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.71 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	4	10	7	6	3	13,93
2.	Jumlah kelahiran hidup	balita	3.621	3.585	3.338	3.118	2.757	-6,51
3.	Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)		1,10	2,79	2,10	1,92	1,09	19,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka kematian balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Angka kematian balita mengalami peningkatan tahun 2018 menjadi 2,79 per 1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian balita ini disebabkan karena infeksi paru 3 balita, infeksi radang otak 3 balita, serta kelainan kongenital 4 balita. Selanjutnya angka kematian balita mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 2,10 hingga menjadi 1,92 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020. Penyebab kematian balita pada tahun 2020 yaitu meninggal karena pneumonia sebanyak 3 orang, karena diare sebanyak 1 orang, dan 2 orang karena penyebab lain. Angka kematian balita ini kembali menurun di tahun 2021 menjadi 1,09 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung lebih baik.

mikronutrien pada ibu hamil, dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Yogyakarta adalah dengan pemeriksaan ANC terpadu berkualitas, implementasi manajemen terpadu bayi muda (MTBM), implementasi manajemen terpadu balita sakit (MTBS), peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.72 Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi	25	26	13	24	20	5,49
2.	Jumlah kelahiran hidup	Bayi	3.621	3.585	3.338	3.118	2.757	-6,51
3.	Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)		6,90	7,25	3,89	7,70	7,25	12,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat dari tabel di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 12,66% per tahun. Pada tahun 2017, angka kematian neonatus sebesar 6,90 yang berarti bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 6-7 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia dan mulai meningkat di tahun 2018 sebesar hingga sebesar 7,25. Penyebab jumlah kematian bayi meningkat di tahun 2018 disebabkan beberapa hal seperti adanya kelainan jantung dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Akan tetapi jika dilihat pada tabel, selisih jumlah kematian bayi pada tahun 2018 hanya 1 bayi dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih merupakan batas aman. Peningkatan angka kematian neonatal dapat disebabkan oleh tingginya prevalensi anemia ibu hamil di Kota Yogyakarta, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri, serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil. Pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi juga masih perlu ditingkatkan, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella, sehingga tingginya kematian neonatal di Kota Yogyakarta yang disebabkan karena kelainan konginetal perlu diperhatikan.

Selanjutnya, angka kematian neonatal kembali menurun menjadi 3,89 di tahun 2019. Apabila dicermati angka kematian bayi pada tahun 2019 merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan, pada tahun 2020 angka kematian neonatal meningkat menjadi 7,70 dan merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka kematian neonatal kembali

5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.73 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	orang	4	4	4	2	16	162,50
2.	Jumlah kelahiran hidup	orang	3.621	3.585	3.338	3.118	2.757	-6,51
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		110,47	111,58	119,83	64,14	580,34	191,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 119,83. Selanjutnya, pada tahun 2020 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 64,14 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2021, yaitu sebesar 580,34 per 100.000 kelahiran hidup.

Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (*Antenatal Care*), hal ini dibuktikan hanya terdapat 60% ibu hamil yang mengakses pelayanan tersebut;
- Belum optimalnya sistem rujukan maternal neonatal; dan
- Pandemi Covid-19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program. Kasus kematian ibu yang terbanyak tahun 2021 disebabkan oleh infeksi Covid-19 (sebesar 69%). Kondisi ibu dengan komorbid dan terkonfirmasi Covid-19, dapat memperburuk prognosis ibu hamil dengan Covid-19. Kemudian pada bulan Juli dan Agustus 2021, saat puncak gelombang 2 Covid-19, ibu hamil dengan Covid-19 mengalami keterlambatan akses fasilitas kesehatan karena keterbatasan RS, ICU dan Ventilator.

hamil saat ibu hamil isolasi mandiri di rumah karena kesulitan pemantauan ataupun ketidaktahuan masyarakat tentang kapan harus segera mencari pertolongan.

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu yang berkategori pratama sebanyak 175 posyandu, kategori madya sebanyak 2 posyandu, kategori mandiri ada 446 posyandu sedangkan untuk kategori posyandu purnama tidak ada. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.74 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Posyandu	Unit	623	621	623	623	623	0,00
2.	Jumlah Balita	Anak	16.917	17.653	16.814	11.884	14.727	-1,45
3.	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/anak	36,83	35,18	37,05	52,42	42,30	5,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio posyandu per satuan balita sebesar 36,83, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 36 posyandu. Angka tersebut menurun menjadi 35,18 pada tahun 2018 karena jumlah posyandu berkurang dua unit. Pada tahun 2019 rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 37,05. Angka tersebut kembali meningkat empat puluh persen menjadi 52,42 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 52 posyandu pada tahun 2020. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang lebih sedikit dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian menurun kembali di tahun 2021 menjadi 42,30 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu tetap, namun jumlah balita mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat, terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.

ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.75 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Puskesmas	Unit	18	18	18	18	18	0.00
	Puskesmas Pembantu	Unit	8	8	8	8	8	0.00
	Klinik	Unit	88	92	88	91	92	1.18
	Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik	Unit	114	118	114	117	118	0.90
2	Jumlah penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2.76
3	Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk		26,97	27,60	27,53	31,32	31,36	3,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 26,97, artinya terdapat 26 sampai 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus meningkat hingga menjadi 27,60 puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2017-2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah klinik. Namun tahun 2019 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 27,53 atau 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah klinik, dari 92 unit menjadi 88 unit di tahun 2019. Penurunan jumlah klinik ini dikarenakan ada beberapa klinik yang belum memperbaiki izin dan ada klinik yang tutup. Pada tahun 2020 angka rasio ini kembali meningkat menjadi 31,32, artinya terdapat 31 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Terdapat kenaikan jumlah klinik dan diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk. Begitu pula di tahun 2021, terdapat penambahan klinik dan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio puskesmas, klinik, dan pustu hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 31,36 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,99% per tahun.

8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik

Tabel 2.76 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Rumah Sakit	Unit	21	21	20	20	20	-1,19
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2.76
3.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1.83

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2019 terdapat satu rumah sakit yang tutup karena sudah tidak bisa membiayai operasional sendiri. Kemudian sampai dengan tahun 2021, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta pun masih tetap yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.77 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Dokter Umum	Orang	573	363	416	377	396	-6,60
2.	Dokter Spesialis	Orang	662	651	493	586	519	-4,63
3.	Dokter Gigi	Orang	243	145	93	91	80	-22,61
4.	Jumlah Dokter	Orang	1.478	1.159	1.002	1054	995	-8,88
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
6.	Rasio per satuan penduduk		3,50	2,71	2,42	2,82	2,64	-5,72

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata -5,72% per tahun. Pada tahun 2017, rasio dokter sebesar 3,50 yang artinya terdapat tiga dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 2,71 di tahun 2018 dan terus menurun menjadi 2,64 di tahun 2021. Penurunan ini terjadi disebabkan karena dalam proses pengajuan STR, terdapat gangguan pada sistem registrasi online, sehingga perpanjangan STR untuk tenaga kesehatan khususnya di masa pandemi diperpanjang. Data

10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Tabel 2.78 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1	Jumlah Perawat	Orang	2.434	2.803	2.309	2.360	2.438	0,76
2	Jumlah Perawat gigi	Orang	140	89	80	73	78	-12,11
3	Jumlah Bidan	Orang	377	397	311	367	360	-0,06
4	Jumlah Total	Orang	2.951	3.289	2.700	2.800	2876	-0,01
5	Jumlah Penduduk	Orang	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
6	Rasio Perawat	per 1000	5,76	6,56	5,58	6,32	6,48	3,69
7	Rasio Perawat gigi	per 1.000	0,33	0,21	0,19	0,20	0,21	-9,28
8	Rasio Bidan	per 1.000	0,89	0,93	0,75	0,98	0,96	3,30
	Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk	per 1.000	6,98	7,69	6,52	7,49	7,64	2,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2,97% per tahun. Rasio tenaga kesehatan meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019, dan rasio meningkat kembali sampai dengan 7,64 di tahun 2021. Rasio perawat juga memiliki kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 3,69% per tahun. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan -9,28% per tahun. Sedangkan rasio bidan fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 3,30% per tahun, karena terjadi penurunan di tahun 2019 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2021 menjadi 0,96 per satuan penduduk.

11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (pre-eklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

Tabel 2.79 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif	Orang	1.009	1.169	1.067	962	827	-4,19
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	Orang	846	841	1.067	962	827	0,60
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	119,27	139,00	100,00	100,00	100,00	-2,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Yogyakarta mengalami penurunan yaitu dari 119,27% menjadi 100%. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Peningkatan cakupan komplikasi tahun 2017 dan 2018 ini disebabkan adanya peningkatan faktor resiko dan terjadinya peningkatan penanganan komplikasi kebidanan. Pada 2020 terdapat penurunan jumlah PKO karena turunnya jumlah ibu hamil. Kasus komplikasi kebidanan tertangani terbanyak adalah persalinan dengan riwayat SC, perdarahan pervaginam pada kehamilan (abortus, keguguran), anemia, infeksi saluran kencing, persalinan lama atau persalinan macet, dan ketuban pecah dini. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani stagnan di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kasus komplikasi kebidanan dapat tertangani dengan baik.

12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021.

Tabel 2.80 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	Orang	4.228	3.587	3.343	3.127	2.760
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	85,55	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018-2021 sudah mencapai 100%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tidak mencapai 100% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Kemudian pada tahun 2018, angka cakupan ini sudah mencapai 100%, namun terdapat penurunan jumlah ibu bersalin karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2021 ini menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

13. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.81 Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kelurahan UCI	Unit	45	45	45	45	45
2.	Jumlah Seluruh Kelurahan	Unit	45	45	45	45	45
3.	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumah sakit.

14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U)

kurun waktu tertentu. Jumlah balita gizi buruk fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dari tahun 2020, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali menjadi 187 anak di tahun 2021. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 seluruhnya telah mendapatkan perawatan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.82 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	Anak	89	80	84	156	187
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	Anak	89	80	84	156	187
3.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.83 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	anak	3.540	3.389	3.345	3.091	2.729	-6,22
2.	Jumlah anak usia 1 tahun	anak	3.686	3.483	3.429	3.180	2.841	-6,24
3.	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	persen	96,04	97,30	97,55	97,20	96,06	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota

peningkatan sampai tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya optimalisasi sweeping bayi yang belum imunisasi sesuai jadwal dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Pada tahun 2020, angka persentase menurun menjadi 97,20% karena terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya, dengan alasan takut jika anaknya diimunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Angka persentase menurun kembali menjadi 96,06% di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena kegiatan imunisasi hanya dapat dilakukan di pelayanan kesehatan, sehingga berkurangnya jumlah anak yang melakukan imunisasi campak di pelayanan kesehatan karena terkendala pandemi Covid-19. Selain itu, peserta imunisasi ialah anak dengan usia tepat 1 tahun. Jumlah anak dengan usia 1 tahun ini berhubungan dengan jumlah kelahiran yang juga cenderung menurun setiap tahunnya.

16. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VIII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio AFP rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

Tabel 2.84 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	orang	4	2	6	0	2
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	orang	93.223	88.299	87.880	86.127	84.636
3.	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk		4,29	2,27	6,83	0	2,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Yogyakarta secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terdapat 2 orang penderita. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi empat orang penderita dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus menjadi dua orang. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 6 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2016-2020, *rate*-nya berada pada rentang 0– 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non Polio AFP Rate adalah minimal 2

non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.85 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	Anak	823	1.178	1.540	543	182
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	Anak	1.783	1.783	1.783	1.783	1792
3.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	Persen	46,16	66,07	86,37	30,45	10,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada kurun waktu 2017-2019, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 46,16% di tahun 2017 hingga 86,37% di tahun 2019. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening hingga ke wilayah pada tahun 2018-2019, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2020, terjadi penurunan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani seiring dengan menurunnya jumlah penderita Pneumonia yang ditangani sebesar 543 anak dari 1.540 anak pada tahun 2019. Penurunan terjadi disebabkan oleh jumlah kunjungan balita ke puskesmas yang juga menurun akibat pandemi Covid-19. Begitu pula di tahun 2021 yang juga mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani. Hal ini dikarenakan pelaksanaan screening yang dilakukan ke wilayah berkurang disebabkan masih adanya pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan balita dengan kasus pneumonia yang ditangani di Puskesmas pun berkurang, sehingga cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2021 hanya sebesar 10,16%.

18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	Orang	547	564	604	429	345
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	Orang	621	710	770	960	730
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	88,08	79,44	78,44	44,69	47,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, namun terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 44,69%. Penurunan angka cakupan seiring dengan menurunnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2020 menurun karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun sehingga kegiatan aktif *case finding* di wilayah juga tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati serta penurunan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+), sehingga cakupannya menjadi 47,26%. Penemuan kasus baru TBC terkonfirmasi bakteriologis secara absolut mengalami penurunan kembali di tahun 2021 karena kegiatan aktif *case finding* di wilayah terkendala karena masih adanya pandemi dan adanya kebijakan PPKM.

19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

Tabel 2.87 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	551	556	604	429	477
2.	Jumlah Penduduk	Orang	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	130,34	130,06	145,87	114,83	126,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 429 kasus di tahun 2020 dan kasus tertinggi sebanyak 604 kasus di tahun 2019. Pada tahun 2017 tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 130,34. Pada tahun 2017 ini,

terobati. Selanjutnya tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi 145,87 per 100.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan aktif case finding. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami penurunan menjadi 114,83 per 100.000 penduduk. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya pasien dengan gejala tuberkulosis yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena pandemic Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 477 penderita. Kasus ini ditemukan meningkat karena adanya kegiatan ACF dengan mobile rontgen dari Zero TB Yogyakarta yang banyak menemukan kasus klinis, sehingga tingkat prevalensi tuberkulosis tahun 2021 pun menjadi meningkat menjadi sebesar 126,75, per 100.000 penduduk.

20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pasien TB yang meninggal	Orang	13	20	56	47	51
2.	Jumlah Penduduk	Orang	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	3,08	4,68	13,52	12,58	13,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi tahun 2021 sebesar 13,55 artinya terdapat 13-14 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasien TB meninggal dunia yang cukup signifikan yaitu sebanyak 56 orang. Kenaikan jumlah kematian tersebut tidak hanya disebabkan oleh TB itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta seperti HIV dan DM (Diabetes Melitus). Hal tersebut dikarenakan adanya pengembangan kasus TB dimana kasus HIV dan DM ikut dimasukkan. Alasan diadakan pengembangan kasus TB karena TB sangat rentan sekali menyerang anak-anak, penderita HIV dan DM (Diabetes Melitus). Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pasien TB yang meninggal, yaitu sebanyak 47 orang sehingga tingkat kematian karena tuberkulosis menjadi 12,58. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian penganan yang tepat. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pasien TB yang meninggal menjadi 51 orang. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemi

21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.89 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	944	943	1.048	780	853
2.	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang	386	399	428	320	345
3.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	244,56	236,34	244,86	243,75	247,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 247,25%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 236,34%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2017–2021 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah penemuan kasus TB juga menurun. Namun pada tahun 2021 jumlah pasien baru dan jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS kembali meningkat. Kasus penemuan tuberkulosis meningkat ini karena adanya kegiatan ACF dengan *mobile rontgen* dari Zero TB Yogyakarta yang banyak menemukan kasus TB klinis. Selain itu dilaksanakan kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 247,25%.

22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.90 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	69,60	69,60	73,97	71,13	86,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 69,60% dan stagnan sampai tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, proporsi TB yang diobati dan sembuh meningkat menjadi 73,97%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2020, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 71,13%. Penurunan disebabkan karena selama pandemi frekuensi pasien TB untuk kontrol dan mengambil obat diperpanjang waktunya, yang sebelumnya 2 minggu sekali menjadi 1 bulan sekali. Selain itu, pemantauan minum obat oleh petugas tetap dilakukan secara daring. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 86,06%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2021. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.91 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	Jiwa	414	113	476	296	93
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Jiwa	414	113	476	296	93
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu 2017-2021, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2019. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 karena

Betwolbachia di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya jumlah penderita DBD yang ditemukan dan yang ditangani terus menurun hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 program gerakan 1 rumah 1 jumantik tetap berjalan dengan baik yang didukung implementasi kegiatan 3M di masyarakat karena masih dalam situasi pandemi. Selain itu, adanya pelepasan telur nyamuk berwolbacia oleh World Mosquito Program (WMP) UGM Yogyakarta. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

24. Penderita Diare yang Ditangani

Definisi indikator ini adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

Tabel 2.92 Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	Jiwa	9.081	9.757	9.453	5.228	3.840
2.	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Jiwa	8.832	11.144	11.143	11.233	11.233
3.	Penderita diare yang ditangani	Persen	102,82	87,55	84,83	46,54	34,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penderita diare yang ditangani di tahun 2017 sebesar 102,82% dan di akhir periode menurun menjadi 34,18%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2020 angka penderita diare yang ditangani kembali mengalami penurunan cukup signifikan dari 84,83% menjadi 46,54% karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun akibat terjadi pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita diare yang dilayani, karena berkurangnya kunjungan pasien yang datang ke puskesmas.

25. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	422,732	427,498	414,055	373,589	376,324
3.	Prevalensi HIV/AIDS	Persen	0.038	0.038	0.030	0.017	0.018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV/AIDS di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV/AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,017%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 0,038% dengan jumlah pasien HIV/AIDS mencapai 161 orang.

Terdapat 4 Puskesmas yang bisa melayani ARV (*Anti Retro Viral*) di Kota Yogyakarta, yaitu Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Mantrijeron, dan Puskesmas Tegalrejo. Pada tahun 2020 jumlah pasien HIV dan AIDS mengalami penurunan signifikan dari angka 123 menjadi 63 jiwa akibat pandemi Covid-19 sehingga pasien yang melakukan konseling Tes HIV (KT HIV) di fasilitas pelayanan kesehatan maupun secara *mobile* menurun. Namun, pada tahun 2021 kasus yang ditemukan meningkat, yaitu sebanyak 62 orang kasus HIV dan 5 orang kasus AIDS. Screening yang dilakukan tahun 2021 belum maksimal, karena terbatasnya kegiatan screening akibat aturan PPKM selama pandemi Covid-19 ini.

Jumlah pasien HIV/AIDS merepresentasikan angka tahunan jumlah pasien HIV/AIDS pada tahun tersebut. Pasien lama akan dihitung kembali menjadi pasien baru pada tahun berikutnya karena belum sembuh dan pasien HIV/AIDS tidak dapat dipilah antara HIV dan AIDS.

26. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS digunakan untuk mengukur efektifitas program penyebaran informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS, khususnya pada populasi orang muda berusia 15-24 tahun.

Tabel 2.94 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	Jiwa	3.095	3.127	3.930	0	779
2.	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	Jiwa	64.493	64.413	64.958	63.707	63.446
3.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	4,80	4,85	6,05	0,00	1,23

Berdasarkan data di atas, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS secara umum masih sangat sedikit, yaitu tidak sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit penduduk usia 15-24 tahun di Kota Yogyakarta yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Pada kurun waktu 2017-2019 persentase yang ada menunjukkan peningkatan di setiap tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 persentase menunjukkan angka 0 karena puskesmas tidak melaksanakan survei pengetahuan HIV baik di sekolah maupun di wilayah karena fokus pelayanan terkonsentrasi pada penanganan Covid-19. Kemudian tahun 2021, walaupun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, beberapa sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga survey pengetahuan HIV mulai berjalan kembali baik di sekolah maupun di wilayah. Hal ini mempengaruhi jumlah penduduk usia 15-24 yang mempunyai pengetahuan komprehensif terkait penyakit HIV/AIDS menjadi meningkat kembali, sebesar 779 jiwa, atau sebesar 1,23%.

27. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

Tabel 2.95 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyakit Jantung	26	30	245	4.367	4.242
2.	Kanker	323	401	558	205	217
3.	Gangguan Jiwa Berat	969	939	1.190	1.030	1.002
4.	Gagal Ginjal	722	898	981	1.109	1.031
5.	Anemia	1.157	1.373	872	1.200	923
6.	Stroke	1.344	1.763	350	398	443
7.	Asma	2.786	2.659	2.607	1.756	1.307
8.	Diabetes	9.036	9.272	11.046	10.635	13.237
9.	Hipertensi	19.897	21.262	26.400	23.032	27.843

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal dan gangguan jiwa berat merupakan enam penyakit tidak menular yang terbanyak di Kota Yogyakarta. Jumlah penderita penyakit tidak menular yang sangat tinggi yaitu hipertensi. Bahkan rata-rata jumlah penderita penyakit ini selama tahun 2017-2021 mencapai angka 23.687 penderita per tahun. Penyakit tidak menular yang cukup tinggi lainnya yaitu Diabetes.

Terlihat pada tahun 2019 mencapai 11.046 penderita yang meningkat dari 2018 sebesar 9.272 penderita. Begitu pula tahun 2021 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 13.237

selanjutnya pasien melakukan kontrol rutin di Puskesmas. Sedangkan untuk penyakit tidak menular yang menurun di tahun 2021 ini, disebabkan beberapa pasien tidak mengakses layanan puskesmas karena membatasi mobilitas dan status penyakit anemia untuk penderita anemia sudah sembuh karena sudah mengikuti program pemberian tablet tambah darah (Fe). Jumlah penderita penyakit tidak menular yang terendah sampai dengan tahun 2021 yaitu kanker dengan rata-rata 341 penderita per tahun.

Kecenderungan masyarakat menganggap PTM adalah sesuatu yang biasa. Upaya pemerintah saat melaksanakan vaksinasi covid-19 yang didahului dengan screening kesehatan menjadi salah satu media bagi seseorang untuk mengetahui apakah dirinya terdeteksi menderita PTM atau tidak. PHBS secara promotif sudah diinformasikan dengan berbagai macam media, baik itu leaflet, poster, flyer, infografis, baliho, siaran di radio, status whatsapp dan media lainnya, penyuluhan di puskesmas juga dilakukan sampai dengan tingkat RW.

28. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.96 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3.235	3.270	3.342	2.680	2.289
2.	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	orang	3.621	3.585	3.345	3.118	2.632
3.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	89,34	91,21	99,91	85,95	86,97

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi sebesar 89,34% di tahun 2017, selanjutnya mengalami kenaikan kembali sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 99,91%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si ibu membawa bayi ke

catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 2020 angka cakupan menurun mejadi 85,95%. Penurunan cakupan kunjungan bayi ini salah satunya dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi di posyandu yang merupakan indikator pelayanan bayi tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Selain itu, selaras dengan penurunan jumlah bayi lahir hidup setiap tahun di Kota Yogyakarta. Begitu pula tahun 2021 yang mengalami penurunan jumlah bayi lahir hidup diikuti penurunan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga cakupan kunjungan bayi menjadi sebesar 86,97%.

29. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kemantren. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.97 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah puskesmas	Unit	18	18	18	18	18
2.	Jumlah Kemantren	Unit	14	14	14	14	14
3.	Cakupan puskesmas	Persen	128,57	128,57	128,57	128,57	128,57

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan dari tahun 2017-2021 yaitu sebanyak 18 unit puskesmas. Jumlah Kemantren di Kota Yogyakarta berjumlah 14 unit, sehingga cakupan puskesmas adalah 128,57%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kemantren minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kemantren, sehingga idealnya minimal dalam satu Kemantren terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 4 Kemantren yang memiliki 2 puskesmas.

30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
2.	Jumlah kelurahan	Unit	45	45	45	45	45
3.	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan angka yang stagnan, yaitu 17,78. Pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 tersedia 8 puskesmas pembantu.

31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.99 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Orang	3.809	3.791	3.407	3.127	2.760
2.	Jumlah sasaran ibu hamil	orang	4.228	4.207	3.855	3.386	2.760
3.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	90,09	90,11	88,38	92,35	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 88,38%. Penurunan kunjungan ibu hamil pada tahun 2019 terjadi karena mobilitas ibu hamil yang tinggi, yang memungkinkan melakukan kunjungan ke 2, 3 ataupun ke 4 di fasilitas kesehatan lain (di luar Kota Yogyakarta). Sementara itu, komunikasi pemberi layanan dengan ibu hamil tidak berjalan lancar sehingga pemantauan pelayanan ibu hamil tidak dapat dilaporkan. Dinas Kesehatan hanya melakukan pencatatan terhadap kunjungan ibu hamil di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan menurunnya jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran ibu hamil selaras dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4, sehingga cakupannya sudah mencapai 100%.

jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Tabel 2.100 Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	orang	3.342	3.253	3.120	2.957	2.631
2.	Jumlah seluruh ibu nifas	orang	3.617	3.585	3.346	3.127	2.760
3.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	92,40	90,74	93,25	94,56	95,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2017-2021 di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu dari 90,74% menjadi 95,53%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Meskipun, ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

33. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia*, *ikterus*, *hipotermia*, *tetanus neonatorum*, *infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.101 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	Orang	508	428	472	424	352
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	Orang	543	606	472	468	413
3.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang	Persen	93,55	70,63	100,00	90,60	85,23

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani turun cukup signifikan dari tahun 2017 menjadi 70,63%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami kenaikan hingga mencapai angka 100%, artinya semua neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2020, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani kembali menurun menjadi 90,60%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 85,23%, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, serta tingkat keparahan kasus sehingga yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 352 orang dari 413 neonatus dengan komplikasi yang ada.

34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

Tabel 2.102 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Orang	11.840	12.253	14.180	9.644	11.373
2.	Jumlah seluruh anak balita	Orang	16.917	17.653	16.814	13.273	14.727
3.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	69,99	69,41	84,33	72,66	77,226

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2017-2021 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 84,33%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2018 yaitu 69,41%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang.

balita mengalami penurunan dari 84,33% menjadi 72,66%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan peningkatan kembali menjadi 77,226%, karena keluarga melakukan pemantauan secara mandiri selama situasi pandemi Covid-19.

35. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) Pada Anak Usia 6-24 Bulan untuk Keluarga Miskin merupakan program dari Kementerian Kesehatan melalui dana non fisik BOK, dengan cara memberikan stimulus MP ASI berupa biskuit.

Tabel 2.103 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak	590	1.321	1.567	0	0
2.	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Anak	1.295	1.364	1.812	0	0
3.	Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	45,56	96,85	86,48	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 45,56%. Angka ini meningkat hingga menjadi 96,85% pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pemenuhan PMT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun program nasional. Pada tahun 2019 cakupan kembali menurun menjadi 86,48%. Hal ini dikarenakan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin bersifat promotif dan tidak termasuk dalam SPM. Anggaran kesehatan lebih difokuskan pada program/kegiatan yang mendukung pencapaian SPM, antara lain Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan penimbangan minimal 8 kali setahun. Pada tahun 2020 dan 2021, program pemberian MPASI dari Kementerian Kesehatan sudah ditiadakan, sehingga angka cakupannya nol. Di dalam evaluasinya permasalahan gizi ini tidak hanya berasal dari anak dari keluarga miskin saja.

36. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah murid SD yang diperiksa adalah murid SD kelas 1. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

Tabel 2.104 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	Anak	6.880	6.904	6.707	19.805	30.879
2.	Jumlah murid SD dan setingkat	Anak	6.880	6.904	6.725	40.424	59.227
3.	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persen	100	100	99,73	48,99	52,14

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat bersifat fluktuatif. Pada periode tahun 2017-2018 cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat telah mencapai 100%, artinya semua murid SD dan setingkat telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Pada tahun 2019, cakupan menurun menjadi 99,73%. Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dilaksanakan pada kelas 1 secara keseluruhan, namun pada tahun 2019 ini belum melibatkan jejaring fasilitas layanan kesehatan di wilayah.

Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan kembali menurun secara signifikan menjadi 48,99%. Penurunan cakupan secara signifikan selaras dengan peningkatan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dari 6.707 anak pada tahun 2019 menjadi 19.805 anak pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan perbedaan jumlah kelas yang diperiksa. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 pemeriksaan kesehatan dilakukan pada anak yang duduk di kelas 1 SD sedangkan pada tahun 2020 dilakukan pada anak yang duduk di kelas 1-5. Tahun 2021, jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya meningkat cukup besar, yaitu sebanyak 30.879 anak atau sekitar 52,14%. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi Mobscreen Penjarkes, sehingga memudahkan murid SD untuk diperiksa kesehatannya.

37. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.105 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	15	16	15	20	20
2.	Jumlah RS	20	21	20	20	20
3.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	75,00	76,19	75,00	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Yogyakarta memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS khusus belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2020 dan 2021 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%.

38. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

Tabel 2.106 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021

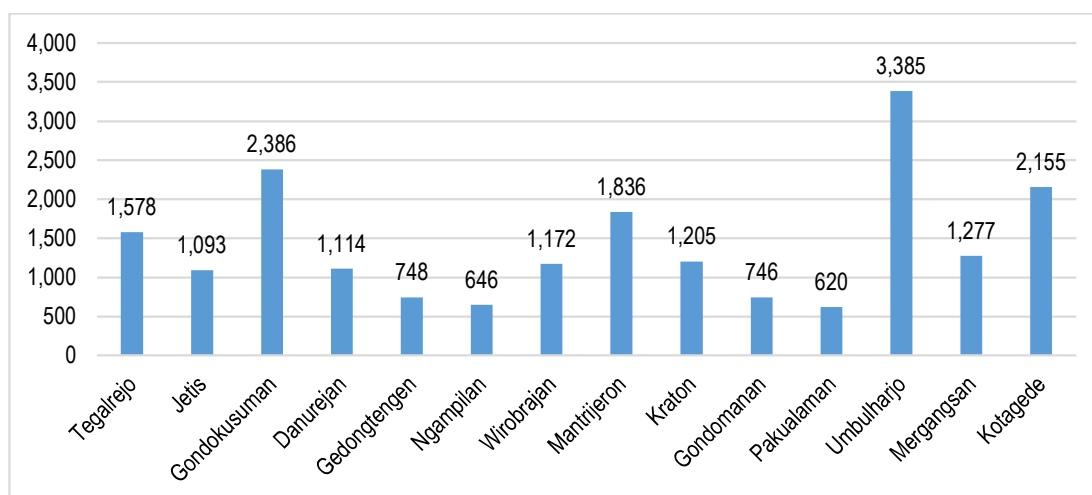
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam	kasus	45	27	16	8	3
2.	Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	kasus	45	27	16	8	3
3.	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas, selama periode tahun 2017-2021 terdapat sejumlah KLB di Kota Yogyakarta. Tahun 2017 adalah tahun dimana jumlah KLB terbanyak yaitu 45 kejadian, sedangkan tahun 2021 jumlah kejadian KLB paling sedikit yaitu 3 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2020 terdiri dari 4 KLB Leptosirosis, 3 Keracunan Makanan, dan 1 Chikungunya. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan

39. Penanganan Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan disebabkan oleh *Coronavirus*. Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta mulai terjadi pada 13 Maret 2020 dan merupakan kasus Covid-19 pertama di DIY. Berikut ini grafik kasus konfirmasi positif Covid-19 sampai dengan tahun 2021 di seluruh kemantren se-Kota Yogyakarta.



Gambar 2.15 Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Per Kemantren 2021

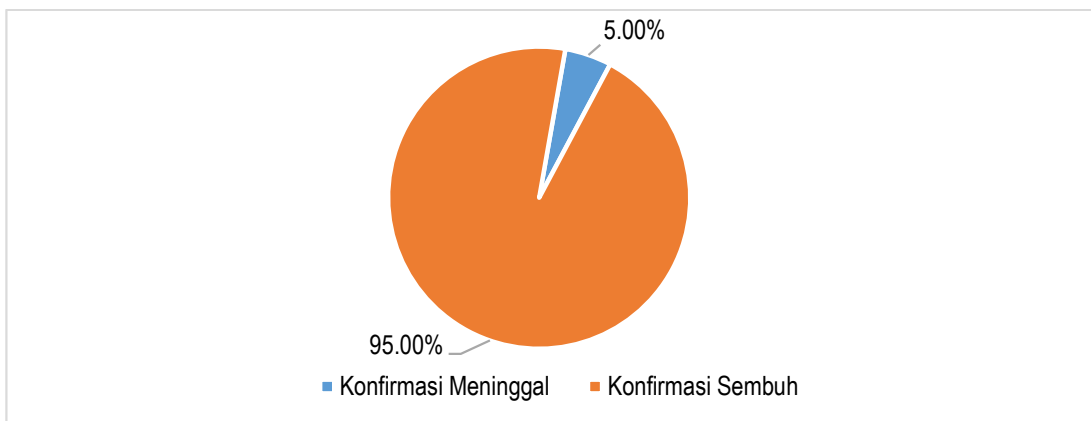
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.107 Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

No.	Kecamatan	Satuan	Konfirmasi Positif Covid-19	
			2020	2021
1	Tegalrejo	Orang	187	1.578
2	Jetis	Orang	119	1.093
3	Gondokusuman	Orang	191	2.386
4	Danurejan	Orang	146	1.114
5	Gedong Tengen	Orang	88	748
6	Ngampilan	Orang	68	646
7	Wirobrajan	Orang	109	1.172
8	Mantriheron	Orang	159	1.836
9	Kraton	Orang	95	1.205
10	Gondomanan	Orang	79	746
11	Pakualaman	Orang	67	620
12	Umbulharjo	Orang	344	3.385
13	Mergangsan	Orang	150	1.277
14	Kotagede	Orang	131	2.155
Jumlah		Orang	1.933	19.961

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Apabila dibandingkan dengan kasus tahun 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada setiap kemantren se-Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, kasus konfirmasi Covid-19 tercatat 1.933 kasus se-Kota Yogyakarta, dan meningkat menjadi 19.961 di tahun 2021. Pada tahun 2021 kemantren yang tercatat memiliki kasus tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo sebesar 3.385 kasus, selanjutnya



Gambar 2.16 Persentase Kasus Konfirmasi Covid-19 Menurut Kematian dan Kesembuhan di Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19, dapat diketahui persentase kematian kasus konfirmasi Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 5,00% atau 1.095 kasus kematian. Pada kasus Covid-19, terdapat beberapa kelompok yang rentan terhadap Covid-19, salah satunya adalah komorbid atau penyakit penyerta. Persentase kasus konfirmasi dengan komorbid di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,87% atau sekitar 374 orang. Selain itu pada Minggu ke-94 (bulan Desember 2021) dari PPKM Darurat Laju Penularan Covid-19 Kota Yogyakarta sebesar 0,48 per-100.000 penduduk, hal ini diartikan bahwa masuk dalam Transmisi Komunitas 1 (TK 1/Insidensi Rendah). Sedangkan untuk Laju Kematian Covid-19 Kota Yogyakarta sebesar 0,00 per-100 ribu penduduk, sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) adalah 0,0.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Covid-19, sebagai berikut:

- Pelacakan kasus dengan kontak *tracing* pada pasien dan kontak eratnya;
- Edukasi untuk isolasi mandiri dan aktif menginformasikan ke Puskesmas tentang kondisi pasien dan keluarga;
- Edukasi atau promosi kesehatan dengan menggunakan leaflet, flyer, status, *offline* untuk menerapkan protokol kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat sekitar;
- Koordinasi lintas sektor dan kerjasama dalam penanganan kasusnya;
- Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* untuk kontak erat pasien wilayah Kota Yogyakarta, guna mempercepat status covid-19 dalam 3T (*Testing, Tracing, Treatment*);
- Membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kemantren dan Kalurahan; dan
- Menyusun peta zonasi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.108 Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kelompok Sasaran	Dosis 1 Realisasi	Dosis 2 Realisasi	Dosis 3 Realisasi
1	Tenaga Kesehatan	15.635	15.279	10.434
Target	9.728	160,72%	157,06%	107,26%

SHELTER	Jumlah Kamar	Daya Tampung	Total Masuk	Keluar Sembuh	Keluar Dirujuk	Total Keluar	Terisi Saat Ini	Sisa Daya Tampung	Siap Dipakai	DETAIL PENGHUNI						BOR
	(Unit)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)		Anak-anak	Lansia	Ibu Hamil	Difabel	Balita	Dewasa	(%)
TOTAL	57	114	0	0	0	0	0	114	40	0	0	0	0	0	0	0.0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2021 naik turunnya kasus konfirmasi positif covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta masih mempengaruhi ketersediaan bed di rumah sakit maupun shelter. Terlihat pada tabel diatas hingga akhir tahun 2021, keterisian BOR Isolasi sebanyak 5,64%, BOR Intensif sebanyak 12% dan BOR Bed sebanyak 6,65% yang berada di rumah sakit. Sedangkan untuk BOR yang ada di shelter sebanyak 0% artinya sudah tidak ada pasien konfirmasi positif yang isolasi di shelter Bener dan Gemawang.

40. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	98%	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	99%	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99%	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84%	100%	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Capaian		
			2019	2020	2021
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2021 seluruh capaiannya sudah 100%. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun 2019 yang masih terdapat 4 dari 12 indikator yang belum terealisasi 100%. Dengan tercapainya target SPM tahun 2021 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sudah baik.

Tindak lanjut pencapaian SPM pada perencanaan tahun 2023 adalah akan dikoordinasikan lebih intensif dengan stakeholder terkait sesuai dengan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

41. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.112 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	99,91	99,91	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	%	85,2	87	91,10	104,71	89,50	91,33	102,04	89,70	98,57	109,89	89,90	96,84	107,72
3	Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang	%	8,81	8,61	8,53	100,93	8,42	8,18	102,85	8,19	10,72	69,11	7,97	6,58	117,44
4	Prevalensi stunting	%	13	12,80	12,80	100	12,60	11,30	110,32	12,40	14,34	84,35	12,20	12,88	94,43
5	Jumlah kematian ibu	Orang	4	4	4	100	4	4	100	4	2	150	4	4	100
6	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	7,52	7,39	9,76	67,93	7,13	6,89	103,37	7,06	11,50	37,11	6,97	10,88	43,90

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
8	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV/AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV/AiDs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90,21	90,21	100	100	100
11	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	86,55	86,55	100	100	100
13	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	%	80	82	96	117,07	84	98,23	116,94	86	94	109,30	88	100	113,64
14	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	%	88	94	96	102,13	100	100,56	100,56	100	100,65	100,65	100	101	101
15	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	%	85	94	95,40	101,49	95	95,89	100,94	95	97,83	102,98	95	100	102,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T=Target; R = Realisasi; C = Capaian

Indikator SDGS pada bidang kesehatan terdiri atas 15 indikator. Pada tahun 2021 capaian

prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 94,43% dan capaian indikator angka kematian bayi sebesar 43,90%.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta, maka terdapat duplikasi nama ruas jalan dengan nomor ruas jalan yang berbeda, ketidaksesuaian panjang dan lebar ruas jalan serta ketidaksesuaian ujung dan pangkal ruas jalan, sehingga Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti Kepwal nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.113 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah panjang jalan*	Km	233,21	233,21	233,21	233,21	233,21	0,00
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/1000	0,5517	0,5455	0,5632	0,6242	0,6197	3,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,06% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,76% per tahun. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Yogyakarta yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

2. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Data kondisi jalan mantap (baik dan sedang) digunakan untuk mengganti data kondisi jalan

Tabel 2.114 Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	190,254	191,087	200,85	200,85	230,33	5,06
2.	Panjang seluruh jalan	Km	233,21	233,21	233,21	233,21	233,21	0,00
3.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,58	81,94	86,12	86,12	98,77	5,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Kondisi jalan mantap di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat. Dari tahun 2017 terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi 86,12% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap tidak mengalami penambahan pada tahun 2020. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penanganan pada tahun 2020 sangat sedikit, hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran APBD untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali yang cukup besar menjadi 230,33 km atau sebesar 12.65% jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2020. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan perbaikan jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti dana alokasi khusus (DAK).

Adapun jalan yang ditingkatkan kondisinya antara lain: Jl. Wahidin Sudirohusodo sepanjang 0.498 km; Jl. Timoho sepanjang 0.802 km; Jl. Menteri Supeno sepanjang 1.17 km; Jl. Lempuyangan sepanjang 0.573 km; Jl. Poncowinatan 0.694 km; Jl. Sidokabul sepanjang 0.844 km dan pemeliharaan rutin berkala jalan yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

3. Cakupan Layanan Sanitasi

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Data hasil cakupan layanan sanitasi yang dilakukan terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.115 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sistem Layanan	Satuan	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	%	86,01	85,75	85,36	85,00	82,16
	KK	119.581	120.585	121.337	117.589	100.643
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	%	13,99	14,25	14,64	15,00	17,84
	KK	19.458	20.039	20.807	20.753	21.849
Buang Air Besar	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secara umum, jumlah cakupan layanan sanitasi berdasarkan sistem layanan di Kota Yogyakarta sebagian besar masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat atau rumah tangga dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 cakupan layanan sanitasi terjadi penurunan disebabkan karena penurunan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Cakupan layanan sanitasi ini juga terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.

Tabel 2.116 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2017	2018	2019	2020	2021
Akses Aman	%	23.36%	24.47%	26.26%	28.02%	35.05%
	KK	32.474	34.411	37.320	38.757	42.928
Akses Layak Tidak termasuk aman	%	75.38%	74.61%	72.87%	70.57%	63.91%
	KK	104.813	104.926	103.586	97.631	78.279
Akses Belum layak	%	1.26%	0.92%	0.87%	1.41%	1.05%
	KK	1.752	1.288	1.238	1.954	1.285
Tidak Ada Akses	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	KK	0	0	0	0	0
Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	KK	139.039	140.624	142.144	138.342	122.492

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2017, namun terlihat menurun sampai dengan tahun 2021. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Yogyakarta sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolah tinja (IPLT).

4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem

dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.117 Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang Drainase Kondisi Baik	Km	292,27	296,23	300,77	301,38	301,41	0,78
2.	Panjang Seluruh Drainase	Km	334,93	338,89	343,43	344,046	344,08	0,68
3.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	87,26	87,41	87,58	87,60	87,601	0,10

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Tren panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan yakni sebesar 292,27 km pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 301,41 km pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik. Pada tahun 2021, pelaksanaan pekerjaan drainase hanya sedikit sekali yang dilakukan dari tahun 2020, karena adanya pengurangan anggaran pekerjaan yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga pertumbuhan rata-rata drainase dalam kondisi baik hanya sebesar 0,10% pertahun sampai dengan tahun 2021.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

5. Daerah Dengan Potensi Genangan Tinggi

Indikator selanjutnya ialah daerah dengan potensi genangan tinggi. Daerah dengan potensi genangan ini apabila tidak ditangani akan menimbulkan permasalahan genangan yang mengganggu kegiatan masyarakat. Potensi genangan ini seringkali disebabkan oleh sedimentasi, banyaknya sampah di saluran drainase dan pada saat terjadi curah hujan yang tinggi.

Tabel 2.118 Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi	Ha	5,65	18,66	17,96	12,75	7,91

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Ha seiring dengan upaya pemeliharaan seperti pelumpuran berkala untuk menghilangkan sedimentasi, pembersihan sampah, penambahan SPAH (saluran pembuangan air hujan), rehabilitasi saluran dengan penambahan volume dan kapasitas saluran drainase serta serta penanganan titik-titik genangan dengan bekerjasama dengan pihak swakelola dan insidentil.

6. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Di Kota Yogyakarta data terkait irigasi masih sangat minim. Terdapat dua indikator terkait irigasi, yaitu persentase irigasi kota dalam keadaan baik dan rasio jaringan irigasi. Dari kedua indikator tersebut hanya satu indikator yang dapat dianalisis yaitu indikator rasio jaringan irigasi.

Tabel 2.119 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Panjang saluran irigasi	Km	56	53,28	51,58	51,58	51,58	-2,01
2.	Luas lahan budidaya pertanian	Ha	57,6	57,6	57,6	56,5	52,03	-2,46
3.	Rasio Jaringan Irigasi		0,97	0,93	0,90	0,91	0,99	0,62

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 panjang saluran irigasi dan luas budidaya pertanian menunjukkan kecenderungan yang menurun. Penurunan yang terjadi pada luas lahan budidaya pertanian tentunya akan berpengaruh pada panjang saluran irigasi, karena semakin sempit luas lahan pertanian maka akan semakin pendek pula saluran irigasinya. Berkurangnya luas lahan budidaya pertanian di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 ini diindikasikan karena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (permukiman). Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat populasi penduduk di Kota Yogyakarta yang semakin bertambah dengan diiringi luas daerah yang stagnan. Selain itu, Kota Yogyakarta juga bukan wilayah yang berbasis pada sektor pertanian, sehingga luas lahan pertanian yang ada sangat sempit (terbatas).

7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Yogyakarta. Air minum berkualitas (layak) di Kota Yogyakarta bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindungi, PDAM, dan BPPSPAM.

Tabel 2.120 Penduduk Berakses Air Minum Sesuai Dengan Jenis Aksesnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tahun	Akses Perpipaan		Akses Non Perpipaan		Jumlah Akses Layak	
	%	KK	%	KK	%	KK
2018	18,26	25.678	81,74	114.946	100,00	140.624
2019	16,50	23.454	83,33	118.448	99,83	141.902
2020	16,70	23.103	83,30	115.239	100,00	138.342
2021	19,83	24.290	80,17	98.202	100,00	122.492

Sumber: Data Susenas, 2021

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memiliki kecenderungan yang meningkat tetapi pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan jumlah penduduk. Namun, persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta secara umum sudah mencapai 100%. Pencapaian ini didukung adanya pengawasan eksternal, pengambilan sampel air minum, laboratorium kesehatan lingkungan yang memudahkan dalam pemeriksaan air, pembinaan depot air minum, pelatihan rencana pengamanan air minum dan pembinaan asosiasi depot air minum.

Jika dilihat dari pendataan penduduk berakses air minum sesuai dengan jenis aksesnya, penduduk Kota Yogyakarta sebagian besar menggunakan akses non perpipaan, atau dengan kata lain menggunakan sumur pompa, sumur yang terlindungi maupun sumur yang tak terlindungi.

Tabel 2.121 Jumlah Akses Air Minum Non Perpipaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tahun	Sumur				Mata air terlindungi dan tak terlindungi		Jumlah	
	Pompa		Terlindungi dan tak terlindungi					
	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK
2017	55,96	77.806	27,12	37.707	0,00	0	83,08	115.514
2018	47,17	66.333	34,42	48.403	0,15	211	81,74	114.946
2019	63,14	89.750	19,93	28.329	0,26	370	83,33	118.448
2020	69,97	96.798	13,33	18.441	0,00	0	83,30	115.239
2021	59,05	72.332	20,58	25.209	0,54	661	80,17	98.202

Sumber: Data Susenas, 2021

Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. Dari data diatas, dari tahun 2017 sampai 2021, penggunaan akses air minum non perpipaan sebagian besar menggunakan sumur pompa, namun tidak sedikit pula yang menggunakan sumur dangkal baik berupa sumur terlindungi maupun tak terlindungi.

8. Areal Kawasan Kumuh

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta secara time series yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan pendataan yang dilakukan,

Tabel 2.122 Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Kawasan Kumuh	Ha	192,751	107,511	75,32	114,72	94,18	-9,94

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 75,32 Ha. Pada Akhir tahun 2019 dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 yang dilakukan oleh Korkot KOTAKU Kota Yogyakarta, Satker/PPK PIP Kota Yogyakarta, dan Pokja PKP Kota Yogyakarta maka didapatkan hasil pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 257,82 Ha.

Pada tahun 2020 dilakukan pendataan ulang didasarkan pada Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 sehingga luasan kumuh menjadi bertambah dengan adanya lokasi kumuh yang baru dan sisa luasan kumuh tahun 2019. Jumlah penanganan yang dilakukan pada tahun 2020 sangat sedikit hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Penanganan permukiman kumuh hanya dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) DIY melalui dana APBN pada 3 kelurahan yaitu: Tegalrejo, Pakuncen dan Pringgokusuman.

Pada tahun 2021 ditetapkan SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh tertanggal 3 Februari 2021 berdasarkan hasil pendataan kawasan kumuh di tahun 2020. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tersebar di 12 kemantren, dengan total luasan kumuh sebesar 114,72 Ha, kemudian dilakukan penanganan permukiman kumuh sepanjang tahun 2021 seluas 20,54 Ha. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh saat ini seluas 94,18 Ha. Lokasi penanganan kawasan kumuh tahun 2021 berada di Kelurahan Baciro, Terban, Prawirodirjan, Wirogunan, Karangwaru, Kricak, Giwangan, Sorosutan, dan Pakuncen.

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

9. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum, yang

Tabel 2.123 Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta

No.	Nama TPU	Lokasi		Luas area (ha)	Daya Tampung (Unit) *per 2018
		Kelurahan	Kemantren		
1.	TPU Sasanalaya	Keparakan	Mergangsan	12,65	4.611
2.	TPU Sarilaya	Mantrijeron	Mantrijeron	6,497	1.779
3.	TPU Pracimalaya	Wirobrajan	Wirobrajan	12,213	3.632
4.	TPU Utaralaya	Tegalrejo	Tegalrejo	16,764	3.421

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Melihat daya tampung TPU yang tetap, menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

Tabel 2.124 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	Unit	12.579	12.579	12.579	12.579	12.579	0,00
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
3.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk		29,76	29,42	30,38	33,67	33,43	3,06

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 3,06% per tahunnya. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2017 sampai tahun 2021, namun luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan pemakaman umum di wilayah Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi lahan pemakaman, yang sudah dilakukan adalah menginventarisasi 62 TPU yang menggunakan Tanah Kasultanan untuk kemudian diproses surat-surat kekancingannya agar TPU tersebut dapat dikelola oleh Pemkot Yogyakarta;
- b. Dinas PUPKP Kota Yogyakarta telah menyusun Kajian Makam pada tahun 2020 (membedah Perda yang lama; salah satunya tentang terminologi bahwa TPU adalah yang ada di tanah milik Pemkot sehingga yang dikelola oleh masyarakat tidak masuk ke dalam

- c. Dinas PUPKP Kota Yogyakarta pada tahun 2021 akan menyusun kajian tentang Perencanaan Penataan Makam di Tanah SG (sinkronisasi dengan hasil pendataan di 62 makam SG).

10. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.125 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah Tempat Ibadah:							
	a. Masjid	Unit	496	517	518	519	528	1,59
	b. Mushola	Unit	470	487	487	487	529	3,06
	c. Gereja Kristen	Unit	41	41	54	54	56	8,85
	d. Gereja Katolik	Unit	7	7	7	7	7	0,00
	e. Pura	Unit	1	1	1	1	1	0,00
	f. Vihara	Unit	6	5	5	5	5	-4,17
	g. Klenteng	Unit	2	2	2	2	2	0,00
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
3.	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk							
	a. Masjid	Unit/1000 Jiwa	1,17	1,21	1,25	1,39	1,40	4,64
	b. Mushola	Unit/1000 Jiwa	1,11	1,14	1,18	1,30	1,41	6,09
	c. Gereja Kristen	Unit/1000 Jiwa	0,10	0,10	0,13	0,14	0,15	12,16
	d. Gereja Katolik	Unit/1000 Jiwa	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	3,06
	e. Pura	Unit/1000 Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
	f. Vihara	Unit/1000 Jiwa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-1,06
	g. Klenteng	Unit/1000 Jiwa	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	3,06

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah masjid. Keberadaan masjid di Kota Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 496 unit, kemudian terus meningkat hingga mencapai 519 unit pada tahun 2020. Terdapat penambahan 1 masjid di tahun 2020 yaitu di daerah Gondokusuman. Kemudian terdapat penambahan masjid pada tahun 2021 yang berlokasi di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman dan Gondomanan, sehingga tahun 2021 jumlah masjid menjadi 528 unit. Mushola di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 468 unit menjadi 487 unit dan jumlahnya tetap 487 unit hingga tahun 2020. Selanjutnya terdapat penambahan mushola pada tahun 2021 yang berlokasi di Kemantren Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Gondomanan, Wirobrajan, dan Tegalrejo, sehingga jumlah mushola tahun 2021 mencapai 529 unit.

5 unit hingga tahun 2021. Gereja katolik, Pura dan Klenteng jumlahnya tetap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 perkembangan rasio jumlah tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta, pada tempat ibadah Masjid, Mushola dan Gereja Kristen mengalami peningkatan, sedangkan yang lainnya memiliki rasio tetap.

11. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

Tabel 2.126 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	189,628	190,467	190,68	263,634	263,716	9,71
2.	Luas wilayah ber HPL	Ha	8,52	8,52	7,0343	13,473	3,340	-0,28
3.	Luas wilayah ber HGB	Ha	157,63	183,03	392,9897	396,572	384,61	32,18
4.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL		22,26	22,36	27,11	19,57	78,96	74,35
5.	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB		1,20	1,04	0,49	0,66	0,69	-6,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022; Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya peningkatan luas RTH dan penurunan luas wilayah yang bertatus HPL maupun HGB pada tahun 2021, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL/HGB tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sedang melakukan validasi data pertanahan secara menyeluruh sehingga perubahan data akan sangat dinamis yang dipengaruhi oleh tumpang tindih bidang tanah dan hak atas tanah yang berakhir jangka waktunya. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.127 Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luasan RTH publik yang tersedia	Ha	189,628	190,467	190,680	263,634	263,716	9,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 pengukuran telah menggunakan citra satelit yang terbaru, sehingga didapat luasan yang merepresentasikan keadaan di lapangan pada tahun 2017. Tahun 2017 juga terdapat beberapa perubahan identifikasi tutupan lahan, yang sebelumnya jalur pengaman jalan dan median jalan secara keseluruhan masuk pada hitungan RTH publik, pada tahun 2017 yang termasuk dalam hitungan luas tutupan lahan tersebut adalah jalur pengaman jalan dan median jalan yang ditanami perindang, yang dapat diinterpretasi secara manual melalui citra tersebut.

Dalam rangka mencapai luasan RTH minimal 30% dari total luasan wilayah, salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan membeli tanah yang diperuntukkan sebagai RTH publik. Contohnya pada tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DISPERTARU (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) membeli tanah seluas 1.365 m². Tanah tersebut berada pada daerah Pringgokusuman seluas 172 m², Purwokinanti seluas 276 m², dan di daerah Kricak seluas 917 m². Pada tahun 2018, luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM meningkat menjadi seluas 190,467 m². Pada tahun 2018 terdapat penambahan RTH publik di Pringgokusuman, Brontokusuman, dan Kadipaten. Keadaan yang sama terjadi pada persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta yang juga menunjukkan peningkatan menjadi 5,86%. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 5 lokasi baru RTH publik di Keparakan, Prenggan, Giwangan, Suryatmajan, dan Gedongkiwo dengan penambahan luas 2.252 m².

Pertumbuhan rata-rata luas RTH Publik dari tahun 2017-2021 cukup tinggi, yaitu sebesar 9,71% pertahun. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau se-Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, sehingga menyebabkan adanya penambahan luasan RTH publik yang meliputi halaman sekolah 162.367 m², jalur hijau pada perindang kecil 200 m², peralihan status hutan kota seluas 173.907 m², taman RW 221.760 m², lahan pertanian kota seperti kebun hortikultura, kebun pertanian, BBI, RPH, PIH 78.000 m², RTHP Permukiman 2 lokasi 453 m², RTHP yang masuk program Kotaku di Muja Muju 580 m², Embung Giwangan 34.900 m², dan makam 57.320 m² sehingga RTH publik di tahun 2020 menjadi 263,634 Ha. Sedangkan RTH privat meliputi roof garden dan taman dalam hotel 60.000 m², pekarangan rumah 1.519.440 m² dan lahan lainnya 940.100 m². Namun demikian untuk RTH Privat ada pengurangan dari sawah, tegalan dan pergeseran status hutan kota.

Selanjutnya, pada tahun 2021 luasan RTH sedikit mengalami kenaikan. Kenaikan luasan RTHP berasal dari inventarisir data dari hasil pekerjaan penyempurnaan RTHP Pakuncen yang luasannya

2000 m², tetapi luasan RTH yang diperoleh masih kurang untuk memenuhi target 20%. Hal ini disebabkan semakin sulitnya mencari lahan untuk RTH Publik karena tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta, serta anggaran Pemerintah Kota yang terbatas. Ditambah adanya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan RTHP dikarenakan anggaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sehingga, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian RTH, terutama RTH Publik yang sudah ada di Kota Yogyakarta. Selain itu, dibutuhkan inovasi yang perlu dilakukan untuk percepatan penambahan luasan RTH Publik ataupun RTH secara umum.

13. Rasio Bangunan Ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan memiliki IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.128 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Bangunan ber- IMB	Unit	71.189	71.682	72.143	72.530	72.821	0,57
2.	Jumlah Bangunan	Unit	133.686	134.179	134.640	135.027	149.464	2,92
3.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan		0,533	0,534	0,536	0,537	0,487	-2,11

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017-2021 terus meningkat, yakni sebanyak 71.189 unit pada tahun 2017 hingga menjadi 72.821 unit di tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,57% per tahun. Tren rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2017-2021 pun mengalami kenaikan. Di tahun 2021 terdapat penambahan jumlah bangunan yang ber-IMB sebesar 291 unit. Terjadi penambahan jumlah bangunan ber-IMB namun kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan masih kurang. Hal ini karena masih ada masyarakat yang masih kurang paham dengan alur pengajuan izin. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Selama masa pandemi pelayanan permohonan IMB melalui email dmpykimb@gmail.com dan pelayanan konsultasi melalui WA.

14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, indikator tersebut memiliki definisi yang sama dengan indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2021 angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di kota Yogyakarta sebesar 79,84% atau 2.617,8 Ha dengan capaian kinerja 100,3% sehingga masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan persentase luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 11,44% atau 375,02 Ha, dan persentase pemanfaatan non kegiatan dan zonasi sebesar 8,72% atau sekitar 285,85 Ha.

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan IPPT dan pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Yogyakarta yang tersebar di 5 Kemantren yaitu Umbulharjo, Wirobrajan, Gondokusuman, Tegalrejo dan Kotagede. Selain itu juga ada penambahan pada fungsi sarana Pendidikan di seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.129 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Pemanfaatan Ruang	Rencana Sesuai RDTR (Ha)	Eksisting 2021 (Sesuai): (Ha)	Eksisting 2021 (Tidak Sesuai): (Ha)
A.	Berdasarkan Kelas Kegiatan & Zonasi RDTR			
1	Penghijauan	62,07	319,02	-256,95
2	Hunian	1.859,01	1.492,00	370,80
3	Perdagangan	469,88	213,10	256,78
4	Perhotelan	23,93	26,75	-2,82
5	Jasa	198,43	63,27	135,16
6	Wisata & Rekreasi	95,73	91,82	3,91
7	Industri	0,53	9,81	-9,28
8	Pelayanan Pendidikan	87,71	154,81	-67,10
9	Pelayanan Perkantoran	71,72	124,45	-52,73
10	Pelayanan Transportasi	42,60	41,94	0,66
11	Pelayanan Kesehatan	18,14	36,85	-18,71
12	Keagamaan, Sosial & Budaya	59,45	44,16	15,29

No	Pemanfaatan Ruang	Rencana Sesuai RDTR (Ha)	Eksisting 2021 (Sesuai): (Ha)	Eksisting 2021 (Tidak Sesuai): (Ha)
13	Jalan	245,22	241,43	3,79
14	Sungai	44,43	44,43	
Luas pemanfaatan non kegiatan/zonasi RDTR		289,64	285,85	
Pemanfaatan ruang sesuai kegiatan & zonasi			2.617,98	79,84%
Pemanfaatan ruang tidak sesuai kegiatan & zonasi			375,02	11,44%
Pemanfaatan non kegiatan (sungai & jalan) dari RDTR			285,85	8,72%
Luas total (Ha) berdasarkan RDTR			3.278,85	100%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2022

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

15. Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan

Persentase pemenuhan bangunan gedung di Kota Yogyakarta dihitung dari perbandingan antara jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah direhab dengan jumlah gedung yang dimiliki pemerintah secara keseluruhan.

Tabel 2.130 Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab)	unit	1.395	1.409	1.430	1.453	1.446
2	Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	unit	1.620	1.620	1.628	1.618	1.606
Persentase (%)			86,11	86,98	87,84	89,80	90,04

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Naik turunnya jumlah bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan pendataan ulang aset kepemilikan gedung. Bangunan gedung pemerintah banyak yang sudah membutuhkan renovasi dan rehabilitasi karena usia gedung dan kebutuhan ruang yang sudah tidak sesuai standar. Juga adanya kebutuhan gedung baru sehingga terjadi perubahan fungsi gedung lama dan memerlukan pembangunan agar sesuai standar. Dari total seluruh bangunan milik pemerintah masih terdapat sekitar 9.6% yang masih diperlukan perhatian. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan gedung sesuai standar kebutuhan antara lain rehabilitasi fisik, renovasi serta pemeliharaan rutin dan berkala.

dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota Yogyakarta yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna

Tabel 2.131 Jumlah rekomendasi perijinan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Dokumen	-	-	696	796	563

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

17. Pemenuhan Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksiyang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Dengan disahkannya UU Cipta Kerja turut mempertegas aturan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan sertifikasi kompetensi kerja. Kondisi di Indonesia terutama di Kota Yogyakarta pekerja yang telah memiliki sertifikat masih terbatas, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memfasilitasi para tenaga kerja mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku jasa konstruksi dan asosiasinya melalui sosialisasi dan forum komunikasi.

Tabel 2.132 Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tenaga konstruksi yang terampil	Orang	-	-	-	239	348

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.133 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM iaringan permukaan dan SPAM	100,00%	100,00%	100,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	98,56%	98,56%	100,00%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2021 seluruh capaiannya telah mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Tindak lanjut pencapaian SPM pada perencanaan tahun 2023 adalah akan dikoordinasikan lebih intensif dengan stakeholder terkait sesuai dengan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pekerjaan umum disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.134 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	%	83,22	83,55	84,05	100,06	84,60	84,06	100,00	85,09	85,09	100,00	86,21	88,47	102,62
2	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	%	82	84	84,12	100,14	86	86,20	100,23	88	88,13	100,15	89	96,67	108,62

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T=Target; R = Realisasi; C = Capaian

Dilihat pada tabel diatas, 2 indikator SDGs dari bidang pekerjaan umum sudah tercapai 100%. Tercapainya hal tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan dukungan anggaran baik melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY melalui Dana Keistimewaan, APBN maupun CSR.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Luas Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Yogyakarta terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.135 Luas Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	1.510,28	1.421,52	1.540,18	1.500,78	1.397,82	-1,74

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2021 fluktuatif. Fluktuasi data tersebut dikarenakan adanya pendataan ulang perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta data luasan permukiman yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai peraturan terbaru yaitu, Permen PU Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018. Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang pada tahun 2019 tinggal menyisakan 75,32 Ha, pada tahun 2020 naik menjadi 114,72 Ha. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penanganan permukiman kumuh hanya dilaksanakan oleh Balai PPW melalui dana APBN, sedangkan penanganan melalui dana APBD Kota Yogyakarta tidak dilaksanakan, hal ini terkait kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lokasi penanganannya berada di beberapa wilayah meliputi Tegalrejo, Pringgokusuman, dan Pakuncen. Sedangkan untuk rehab rumah (*Mundhur, Mungguh, Madep Kali*) di sepanjang aliran sungai menggunakan anggaran APBD.

2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini hampir sama dengan indikator rasio rumah layak huni, akan tetapi pembagiannya yang berbeda. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.136 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	90.193	91.167	121.967	122.310	122.764	8,88
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	133.686	134.179	124.951	124.951	124.951	-1,63
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	67,47	67,94	97,61	97,89	98,25	11,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun, kemudian meningkat sampai tahun 2021 meningkat menjadi 98,25% dengan pertumbuhan rata-rata 11,26% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pendataan kembali rumah layak huni TA 2019.

Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2004 yaitu keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; dan (e) penghuninya malas dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, Manunggal maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong jembatan, atau terminal.

Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta, kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m² per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m² per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan *gedheg*, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah

Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, tersebar di 13 Kemantren, yakni Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel 2.137 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rumah tidak Layak Huni	Unit	2.640	1.798	2.984	2.640	2.187

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Yogyakarta selalu mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH telah efektif dilaksanakan, termasuk program *Mundhur, Mungghah, Madep Kali* (M3K) dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah rumah tidak layak huni dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya pendataan ulang pada perumahan dan RTLH di tahun 2019. Setelah pendataan tersebut, pada tahun 2020 mulai terlihat penurunan jumlah RTLH. Keterbatasan penanganan RTLH pada tahun 2020 disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula pada tahun 2021, yang juga mengalami penurunan jumlah rumah tidak layak huni menjadi 2.187. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah berusaha melakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni, baik melalui skema APBD, APBD DIY, APBN maupun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2021, sebanyak 655 unit rumah yang sudah direhabilitasi. Sebanyak 131 unit rumah dilakukan perbaikan dengan menggunakan APBD (DAK), 30 unit rumah dengan menggunakan APBD program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), 35 unit rumah menggunakan APBD Provinsi, 449 unit rumah dengan APBN melalui Program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dan 10 unit rumah dari dana CSR. Melihat tren penurunan jumlah RTLH di Kota Yogyakarta ini, maka dapat diartikan jika kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi permukiman kumuh secara umum dan rumah tidak layak huni secara khusus telah dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

3. Pengelolaan Rumah Susun

Rumah susun sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 4 unit yang terletak di Kemantren Pakualaman, Kemantren Tegalrejo (2 unit) dan Kemantren Danurejan. Rusunawa dengan jumlah unit kamar paling banyak ialah Rusunawa Cokrodirjan dengan total 72 unit kamar.

Tabel 2.138 Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Rumah Susun	Jumlah Unit Kamar
-----	-------------	-------------------

No	Rumah Susun	Jumlah Unit Kamar
4	Rusunawa Bener 2	44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2019-2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.139 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019-2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rensana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n	100%	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	-	100%	100%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2021 seluruhnya telah tercapai 100%.

Tindak lanjut pencapaian SPM pada perencanaan tahun 2023 adalah akan dikoordinasikan lebih intensif dengan stakeholder terkait sesuai dengan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogenya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusakan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000

Tabel 2.140 Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Linmas	Orang	2.864	3.575	3.847	3.823	3.837
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa	67,75	83,63	92,91	102,33	101,96
4	Cakupan	%	42,27	42,75	41,41	37,36	37,63

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel hasil perhitungan cakupan petugas Linmas di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019 cakupan petugas linmas masih berada di bawah 50% dengan kisaran angka 41-42%, tetapi dari tahun 2020 hingga 2021 menurun pada kisaran angka 37%. Terlihat bahwa pada tahun 2018-2019 terdapat kenaikan jumlah linmas. Hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Yogyakarta saat pemilu dan terdapat pendaftaran anggota linmas secara sukarela. Kemudian pada tahun 2020 cakupan petugas linmas turun menjadi 37,36% hal ini dipengaruhi jumlah linmas yang mengalami penurunan menjadi 3.823 orang dikarenakan terdapat beberapa petugas linmas yang meninggal dunia. Penambahan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan juga tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan petugas linmas terhadap wilayah kerja per 10.000 penduduk. Namun, di tahun 2021 persentase cakupan petugas linmas mengalami sedikit kenaikan menjadi 37,63%, hal ini karena adanya penambahan jumlah anggota linmas menjadi 3.837 orang. Kenaikan jumlah anggota linmas ini terjadi karena masih tingginya animo masyarakat Kota Yogyakarta yang secara sukarela bergabung menjadi anggota linmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat di wilayah masing-masing, khususnya wilayah Kota Yogyakarta pada umumnya melalui tugas dan fungsi kelinmasan (penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan).

Cakupan petugas Linmas ini dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas Linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas.

Tabel 2.141 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kemantren	Kampung	RW	RT	Jumlah Linmas
1	Tegalrejo	14	46	191	354
2	Jetis	9	37	166	270
3	Gondokusuman	17	66	271	395
4	Danurejan	16	41	155	220
5	Gedongtengen	14	36	138	208
6	Ngampilan	7	21	120	142
7	Wirobrajan	8	34	165	273
8	Mantrijeron	12	55	231	334
9	Kraton	12	43	175	248
10	Gondomanan	7	31	110	150
11	Pakualaman	7	19	83	120
12	Mergangsan	17	60	219	325

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di wilayah Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran K3 terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Namun, semakin tinggi juga tingkat penyelesaiannya maka pelanggaran K3 yang terjadi juga banyak terselesaikan. Berikut adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.142 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	Kasus	4.118	4.391	4.271	5.361	8.097
2	Jumlah Pelanggaran K3	Kasus	4.300	4.466	4.299	5.387	8.129
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	95,77	98,32	99,35	99,52	99,61

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021 persentase tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Yogyakarta telah berada di atas angka 95% dan dapat dikatakan mencapai predikat yang sangat baik. Pada tahun 2018-2020, terjadi kenaikan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara pre-emptif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi. Selain itu, peningkatan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di tahun 2020 juga merupakan dampak dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selanjutnya, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 99,61%. Realisasi 99,61% didapatkan dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 8097 pelanggaran dari 8129 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah 8097 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 7810 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 287 pelanggaran;
- Jumlah 8.129 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 7.810 pelanggaran dan dari hasil operasi yustisi sebesar 319 pelanggaran; dan
- Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggar yang tidak memenuhi surat panggilan penyidik yang masih dipantau proses penyidikannya dengan diberikan surat peringatan kesatu dan kedua.

peraturan juga meningkat. Penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 menjadi tantangan penerapan kegiatan penegakan perda.

Perwal Nomor 51 Tahun 2020 mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan yakni 26 Juni 2020. Satpol PP mendasarkan peraturan tersebut dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta dari tahun 2020, 2021, dan juga tahun mendatang selama ketentuan peraturan tersebut masih relevan digunakan. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta, Jenis pelanggaran perda dan perwal yang dominan terjadi di Kota Yogyakarta khususnya pada tahun 2021, diantaranya:

- a. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Thn 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima; dan
- c. Perwal Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta

Pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta diselesaikan melalui strategi penegakan perda secara non yustisi melalui upaya penertiban pelanggaran dan secara yustisi melalui upaya hukum penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran untuk diteruskan ke proses persidangan tipiring. Persentase Penegakan Perda merupakan persentase penyelesaian pelanggaran perda melalui strategi penegakan perda secara yustisi.

3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Tabel 2.143 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,8
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,8
3.	Cakupan pelayanan bencana	Persen	100	100	100	100	100

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Dari tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 luas WMK adalah sebesar 32,5 km² yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Namun pada tahun 2021 terdapat perubahan luas wilayah Kota Yogyakarta menjadi 32,8 km², hal ini sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Sehingga luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran menjadi 32,8 km². Pada saat ini Pos Pemadam Kebakaran terdapat di 2 lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

Tabel 2.144 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤15 menit	Kejadian	71	63	64	32	50
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	71	63	64	53	50
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	60,38	100
4.	Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	11	11	11	13,4	6,3

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga juga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya. Terjadinya penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020-2021 diperkirakan karena pada masa pandemi Covid-19 aktivitas publik mengalami

Apabila dilihat dari tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK di seluruh Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 hingga 2019 tingkat waktu tanggap sebesar 100% dan di bawah 15 menit, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat waktu tanggap yang disebabkan karena lokasi kejadian di luar jangkauan (2,5 km) dari pos terdekat, tingkat kepadatan lalu lintas pada jam tertentu yang menyebabkan mobilitas unit mobil damkar tidak leluasa bergerak, dan juga tingkat kesadaran lalu lintas pemakai jalan untuk memprioritaskan unit mobil Pemadam Kebakaran masih kurang sehingga tingkat waktu tanggap meningkat menjadi 13,4 menit. Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap kembali mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena lokasi terjadinya kebakaran dekat dengan pos serta didukung oleh cukup tingginya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kesempatan berjalan mendahului. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam, petugas, hingga kualitasnya.

Persebaran kejadian kebakaran di tiap Kemantren berbeda, perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen masih banyak, serta kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Bangunan yang terbakar didominasi beberapa hal, yakni bangunan perumahan yang belum permanen, penggunaan listrik yang berlebihan, penambahan kebutuhan energi listrik yang belum diikuti perbaikan jaringan kelistrikan, serta pola hidup masyarakat yang belum terbangun upaya pencegahan kebakaran.

5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel 2.145 Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA	Kasus	789	649	534	316	287
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	1.110	724	562	342	319
3	Penegakan PERDA	Persen	71,08	89,64	95,02	92,40	89,97

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah penegakan Perda yang dihitung berdasarkan persentase atas jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dengan jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Yogyakarta, sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019, persentase penegakan Perda

Untuk tahun 2020, persentase penegakan PERDA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 89,97% di mana pelanggaran perda sejumlah 319 pelanggaran merupakan jumlah dugaan pelanggaran dari hasil operasi penegakan perda secara yustisi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berdasarkan penerbitan Surat Panggilan (SP) kepada terduga pelanggar. Dari jumlah SP tersebut telah terselesaikan sejumlah 287 dugaan pelanggaran (160 SP terbukti melakukan pelanggaran dan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan/BAP ke persidangan, 127 SP setelah dilakukan klarifikasi telah memiliki dokumen perizinan atau tidak terbukti melakukan pelanggaran). Jumlah dugaan pelanggaran perda belum terselesaikan sejumlah 32 SP merupakan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi surat panggilan (tidak hadir) yang masih dipantau proses penyidikannya dengan diberikan surat peringatan kesatu dan kedua (penegakan perda yustisi dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga proses penyidikan dilaksanakan pada tahun berikutnya). Meskipun demikian jumlah pelanggaran perda menurun dari tahun sebelumnya. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan mewabahnya pandemi Covid-19 bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga terhadap ruang gerak petugas operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda, khususnya penegakan perda secara yustisi karena terdapat fungsi koordinasi dengan institusi lain. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang juga menerapkan kebijakan khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Sebagai contoh, terdapat kebijakan penundaan pengajuan berkas berita acara penyidikan pelanggaran ke persidangan oleh Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tertentu karena berpotensi memudahkan penularan virus, menjadi faktor penghambat tidak optimalnya penegakan Perda. Jumlah pelanggaran Perda yang terbanyak berdasarkan BAP dan ditindaklanjuti ke persidangan adalah pelanggaran terhadap Perwal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

6. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Sampai dengan tahun 2021, di Kota Yogyakarta sudah terbentuk 37 Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana), 130 Kampung Tangguh Bencana (KTB) dari total 169 kampung yang ada.

Tabel 2.146 KTB dan Kaltana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Kampung Tangguh Bencana	Kampung	90	97	115	115	130
Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	16	26	31	34	37

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2022

Kaltana dan Kampung Tangguh Bencana telah menyebar di 14 Kemantren dan 45 Kelurahan. Bertambahnya Kampung Tangguh Bencana di setiap tahunnya adalah bentuk antusias serta partisipasi warga kampung di Kota Yogyakarta. Penambahan KTB di tahun 2021 sejumlah 15 kampung yang tersebar di beberapa Kelurahan yaitu di Kelurahan Mantriijeron (1 kampung)

kampung), Semaki (1 kampung), Tahunan (1 kampung) dan Giwangan (1 kampung). Kemudian penambahan Kaltana pada tahun 2021 sejumlah 3 kelurahan yaitu Kelurahan Patangpuluhan, Karangwaru dan Mantrijeron.

Peran serta relawan/masyarakat di tingkat kampung (KTB) dan kelurahan (kaltana) sebagai *first responder* yang melakukan upaya penanganan awal/dini kejadian bencana di wilayahnya. Relawan KTB juga terlibat aktif dalam upaya pencegahan (edukasi protokol kesehatan dan penyemprotan disinfektan) serta menjadi tim pemakaman protokol kesehatan covid-19 yang dikoordinasikan oleh satgas wilayah/kemantren.

7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.147 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	88,59%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%
		Jumlah layanan pemadaman tahun x dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di kali seratus persen.	100%	100%	100%
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran dalam tahun x	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator telah tercapai

termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

8. **Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.148 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Persentase kampung tangguh bencana	%	40	40	57,06	142,65	67,65	67,65	100	68,05	68,05	100	76,92	76,92	100
2	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	75	82	83,45	101,77	84	100	119,05	100	100	100	100	100	100
3	Persentase edukasi proteksi kebakaran	%	95	96	100	104,17	96	100	104,17	97	100	103,09	97	100	103,09
4	Angka kriminalitas	Kejadian	1.660	1.628	1.037	136,302	1.596	620	161,153	1.000	485	151,500	600	534	111

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2022; BPBD Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T = Target; R = Realisasi; C = Capaian

Dilihat dari tabel diatas, indikator SDGs dari bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018-2021 telah mencapai target capaian lebih dari 100%. Salah satu faktor pendorong keberhasilan capaian adalah antusias serta partisipasi warga kampung dalam pembentukan Kampung Tangguh Bencana cukup tinggi dan diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi Covid-19.

F. **Sosial**

1. **PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani

sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.149 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	31.473	25.614	30.781	45.424	48.798	14,14
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	33.020	32.709	35.947	47.856	50.461	11,88
3.	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	95,31	78,31	85,63	94,92	96,70	1,06

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mencapai angka 95,31%, tetapi mengalami penurunan menjadi 78,31% di tahun 2018, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 94,92%. Hal ini dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menggunakan kriteria baru dalam penentuan pemberian bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia. Semula, kriteria penerima ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar) adalah lanjut usia terlantar. Tahun 2018, kriteria penerima adalah lanjut usia miskin yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta yang terdata sebagai KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial). Perubahan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan manfaat dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Meningkatnya jumlah PMKS pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM (Asistensi Lanjut Usia Miskin). Kebijakan tersebut memperluas sasaran penerima manfaat.

Selain itu, terjadinya kenaikan persentase PMKS yang menerima bantuan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat support political will di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Hal yang sama terjadi di tahun 2021, yakni persentase PMKS yang menerima bantuan meningkat menjadi 96,70% yang disebabkan oleh perluasan penerima bansos APBD dan APBN di masa pandemi covid.

Data PMKS yang dipakai adalah hasil pendataan tahun sebelumnya, sehingga terdapat mekanisme cleansing data antara lain tempat domisili, meninggal, dan NIK tidak sesuai dengan database Dinas Dukcanil Kota Yogyakarta. Unava yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

- a. Penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar (yang terakomodasi dalam UPT Balai Rehabilitasi Anak), Lansia terlantar (pada UPT Balai Rehabilitasi Lansia), gelandangan pengemis dan korban bencana (di shelter dan isolasi mandiri di wilayah);
- b. Penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng dan korban bencana; dan
- c. Fasilitasi dokumen kependudukan bagi 4 afirmasi PMKS terlantar (penyandang disabilitas, anak, lansia, gepeng).

2. PMKS yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan penurunan terjadi pada tahun 2018, di mana tahun sebelumnya persentase PMKS yang tertangani adalah sebesar 75,87% dan menurun menjadi 74,76%. Penurunan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2018 dikarenakan penurunan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan penerima BPNT dikarenakan mulai tahun 2018, penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan *ewarong* sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase PMKS hingga menjadi 81,08%. Meningkatnya PMKS yang tertangani, salah satunya disebabkan perbaikan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sehingga penerima bantuan semakin banyak.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase PMKS yang tertangani dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat *support political will* di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Tahun 2020 juga telah direncanakan adanya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Aslum, tetapi karena pandemi maka tidak dicairkan mengingat adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) APBN dan Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD (Kota dan DIY) sehingga dikhawatirkan mendapatkan lebih dari 1 intervensi. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 96,71% yang disebabkan karena perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid.

Tabel 2.150 Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	41.598	29.182	34.051	45.942	48.873	7,03
2.	Jumlah PMKS yang ada	Orang	54.827	39.035	41.999	48.374	50.536	-0,39
3.	Persentase PMKS yang tertangani	%	75,87	74,76	81,08	94,97	96,71	6,49

3. PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bantuan sosial) dalam jangka waktu satu tahun. Berikut merupakan tabel PMKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel 2.151 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun	Orang	31.751	24.452	29.379	32.828	35.545	4,29
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	33.500	31.091	33.957	34.810	29.934	-2,37
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	94,78	78,65	86,52	94,31	118,74	6,98

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat pada tabel di atas, persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 94,78% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 78,65%. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan baru skema bantuan sosial. Bantuan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya diberikan berupa beras (raskin) diganti menjadi non tunai. Mulai tahun 2018, bantuan bagi masyarakat miskin berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan *e-warong* sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Dengan demikian, tidak semua calon penerima bantuan menerima BPNT. Selanjutnya pada tahun 2019-2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat menjadi sebesar 94,31% yang dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM yang memperluas sasaran penerima manfaat. PMKS yang menerima bantuan sosial untuk kebutuhan dasar diantaranya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin), dan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas).

Selanjutnya faktor pendorong meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah karena adanya *support political will* di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme

tahun 2021, presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial kembali meningkat menjadi 118,74% yang disebabkan karena adanya perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid.

4. **PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya**

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya. Adapun persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial pada tahun 2017–2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi kenaikan persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama. Selanjutnya, terdapat penurunan persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE di tahun 2019-2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kondisi usaha ekonomi anggota KUBE sehingga tidak beraktivitas secara kelompok selama pandemi (beberapa KUBE tidak aktif), sehingga KUBE yang tidak aktif tidak mendapatkan akses intervensi program. Kemudian di tahun 2021, persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE meningkat menjadi 98,68% yang disebabkan karena banyaknya peserta KUBE yang gulung tikar di masa pandemi sehingga banyak KUBE yang tidak aktif lagi.

Tabel 2.152 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	8.125	3.630	3.490	3.460	1.341
2.	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	20.253	6.580	6.580	6.580	1.359
3.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	40,12	55,17	53,04	52,58	98,68

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

5. **Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021 telah

Tabel 2.153 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	13	13	13	16	17
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	13	13	13	16	17
3.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini adalah untuk melihat persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah WKBSM di Kota Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah WKBSM yang dipengaruhi oleh adanya penumbuhan WKBSM di wilayah. Secara kultural, mulai muncul gerakan untuk peduli kepada sesama. Namun, ditahun 2021 persentase WKBSM menurun menjadi 74% yang disebabkan karena adanya pandemi yang mengakibatkan WKBSM tidak ada kegiatan.

Tabel 2.154 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah WKBSM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	Unit	22	22	25	26	20	-1,36
2.	Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	22	22	25	26	27	5,37
3.	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	74	-6,48

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

7. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan

biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi.

Tabel 2.155 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	76	105	60	127	11
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	76	105	60	127	11
3.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2017 hingga 2021 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

8. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.156 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	279	139	86	277	255
2.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	279	139	86	277	255
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah korban bencana alam cuaca ekstrim yang

korban banjir sebanyak 9 orang mengungsi, jumlah korban cuaca ekstrim sebanyak 8 orang luka-luka dan 66 orang mengungsi, serta korban bencana lainnya sebanyak 3 orang mengungsi. Sedangkan pada tahun 2020 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 277 korban yang menyebar di 14 Kemantren. Korban bencana yang telah tertangani sebagian besar dari Kemantren Gondokusuman yaitu 149 korban. Sedangkan sisanya menyebar di semua Kemantren kecuali Kemantren Kraton dan Kemantren Pakualaman. Kemudian pada tahun 2021 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 255 korban yang menyebar di 14 Kemantren.

9. **Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial**

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Berdasarkan tabel di bawah, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2017-2018, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial nilainya masih di bawah 80%, sedangkan di tahun 2019 persentasenya sudah di atas 80%. Kemudian, pada tahun 2020 persentasenya turun menjadi 32,29%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan angka kemiskinan sehingga jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial naik menjadi 9.065 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial adalah adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Aslum (untuk Lansia) tidak dicairkan agar tidak terjadi double intervensi bantuan dengan Pemerintah Pusat dan DIY. Namun, pada tahun 2021, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial meningkat menjadi 59,84% yang disebabkan karena perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid-19.

Tabel 2.157 Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	1.989	2.207	4.358	2.927	4.478
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	3.713	3.713	4.435	9.065	7.483
3.	Penyandang cacat fisik dan mental.	%	53,57	59,44	98,26	32,29	59,84

10. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.158 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2019-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100,00%	100,00%	100,00%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Persentase kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	100,00%	100,00%	100,00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100,00%	100,00%	100,00%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase kebutuhan dasar lanjut gelandangan dan pengemis	100,00%	100,00%	100,00%
5	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Bagian Tapem Setda Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2021 SPM bidang Sosial dari 5 indikator SPM semua telah tercapai 100%.

Tindak lanjut pencapaian SPM pada perencanaan tahun 2023 adalah akan dikoordinasikan lebih intensif dengan stakeholder terkait sesuai dengan 4 (empat) tahapan penerapan SPM yang termuat di dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 4 (empat).

11. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang sosial disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.159 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Sosial Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Angka kemiskinan	%	7,7	7,58	6,98	107,92	6,24	6,84	90,38	13,97	7,27	147,96	7,29-7,18	7,69	94,51
2	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	80	80	85,92	107,40	82	87,97	107,28	84	84,13	100,15	87,30	82,46	94,46
3	Persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	%	70	70	88,73	126,76	77	89,58	116,34	77	78,10	101,43	81	87,47	107,99

Berdasarkan tabel di atas, 3 indikator SDGs di bidang Sosial yang telah mencapai 100% adalah indikator persentase PPKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial. Sedangkan 2 indikator lainnya belum mencapai 100%.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Tabel 2.160 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	24	14	16	23	28	9,53
2.	Jumlah Perusahaan	Unit	1.470	1.689	1.692	1.417	403	-18,18
3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		16,33	8,29	9,46	16,23	69,48	91,14

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2017-2020, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 24 kasus, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 14 sengketa, kemudian mengalami kenaikan pada kurun waktu 2019 – 2021 hingga menjadi 28 sengketa di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Yogyakarta sangat kondusif mengingat tingkat kasus sengketa terus menurun, tetapi jumlah perusahaan terus meningkat. Selain itu, penanganan kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dilakukan dengan cara mediasi oleh OPD dan jika tidak menemukan titik temu kasus tersebut akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian di tahun 2020 hanya terjadi 23 kasus sengketa saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah sengketa pengusaha-pekerja di tahun 2020 terjadi peningkatan kasus karena banyak perusahaan mengalami kesulitan operasi usahanya di masa pandemi yang mengakibatkan pengambilan kebijakan pengurangan pekerja yang dirasakan merugikan pekerja dan pada akhirnya menjadi sengketa antara pekerja dan

Tetapi pada tahun 2021 angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta mencapai 69,48 dengan jumlah perusahaan menurun. Meningkatnya angka sengketa disebabkan karena adanya pandemi sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mengurangi pekerja.

2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -11,98%. Penurunan ini disebabkan karena adanya dua perusahaan yang tidak hadir, dimana perusahaan dan pekerja tetap dalam pendiriannya masing-masing.

Tabel 2.161 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	13	14	11	16	16	7,93
2.	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus	13	14	16	23	23	21,87
3.	Tingkat penyelesaian kasus	%	100	100	68,75	69,57	57,14	-11,98

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2017, jumlah pencari kerja ada sebanyak 3.816, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2019 jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami peningkatan menjadi 2.323 orang, hal ini dikarenakan oleh banyaknya peserta CPNS Kota Yogyakarta tahun 2019 yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Namun, pada tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan lebih banyak dari persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019, artinya pencari kerja yang mendaftarkan lebih banyak terserap untuk ditempatkan. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurun akibat dampak pandemi covid-19. Banyak perusahaan melaksanakan efisiensi salah satunya dengan tidak membuka lowongan pekerjaan.

Tabel 2.162 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
----	-----------	--------	------	------	------	------	------	---------------------------------

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	%	64,99	114,30	50,06	79,83	63,71	14,74

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

4. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2017, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah sebesar 90,62%, tetapi di tahun selanjutnya terus menurun hingga mencapai 43,12% pada tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2021 menjadi 1,36%.

Tabel 2.163 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK	Orang	57.677	57.649	57.677	58.121	343	-24,66
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang	63.649	68.021	68.021	134.802	25.134	5,92
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek	%	90,62	84,75	84,79	43,12	1,36	-38,10

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek di tahun 2020 turun secara signifikan karena adanya perubahan metode pendataan yang semula WLTK (Wajib Lapor Tenaga Kerja) yang terpisah dengan data BPJS. Namun, mulai tahun 2020, pendataan WLTK terintegrasi dengan pendataan BPJS. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK menurun menjadi 343 dikarenakan tahun 2021 menggunakan pendataan dari Dinsosnakertrans Kota sedangkan tahun 2020 menggunakan data dari Disnaker DIY.

5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, penyelesaian perselisihan buruh dan

Perjanjian Bersama dan 7 kasus dengan penyelesaian dengan anjuran. Pada tahun 2021, jumlah penyelesaian perselisihan meningkat menjadi 28 yang sebanding dengan jumlah kejadian perselisihan.

Tabel 2.164 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus	13	14	16	23	28	21,87
2.	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus	13	14	16	23	28	21,87
3.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

6. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, persentase tenaga kerja terbiasa kompetensi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi yang semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2020 hanya dilaksanakan 3 jenis pelatihan saja dari 20 jenis pelatihan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kebijakan pengalihan anggaran (*refocusing*), sehingga pendaftaran pelatihan hanya sampai bulan April tahun 2020.

Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang dilatih menunjukkan peningkatan, hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid-19 di Tahun 2021 sudah mulai membaik, sehingga kegiatan pelatihan bisa dilaksanakan walaupun ada beberapa kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring.

Tabel 2.165 Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	605	625	598	20	363	404,33
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1.553	1.566	1.121	571	633	-16,45
3.	Persentase tenaga kerja terbina kompetensi	%	38,96	39,91	53,35	3,50	57,35	369,98

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

7. Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3

Rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang pendidikan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pencari kerja di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 71 524 orang pada tahun 2021 sehingga pertumbuhan rata-

Tabel 2.166 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jiwa	68.605	69.088	69.730	71.017	71.524	1,05
2.	Jumlah Seluruh Penduduk	jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3		0,162	0,162	0,168	0,190	0,190	4,16

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022; Hasil Olahan, 2022

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.167 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	5.605	5.524	5.376	5.352	5.263
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	74.103	74.760	76.154	76.638	76.154
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	7,56	7,39	7,06	6,98	6,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 7,56% hingga pada tahun 2021 turun menjadi 6,91%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, mutasi kerja, dan pensiunan di tiap tahunnya.

2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Jumlah kursi di keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki jumlah tetap, yakni 40 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung menurun. Pada tahun 2017, terdapat 9 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRD dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 22,5%. Selanjutnya terus menurun hingga tahun 2020 di mana jumlah kursi DPRD yang

12,5%. Kemudian di tahun 2021, persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD meningkat menjadi 15% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2017 hingga 2021, besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

Tabel 2.168 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	9	9	5	5	6
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	40	40	40	40	40
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	22,5	22,5	12,5	12,5	15

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Yogyakarta, 2022

3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.169 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	31.806	32.487	33.529	33.944	33.489
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	74.103	74.760	76.154	76.638	76.154
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	42,92	43,46	44,03	44,29	43,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung meningkat. Partisipasi pekerja perempuan di lembaga swasta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga pemerintahan. Partisipasi di lembaga swasta tahun 2020 mencapai lebih dari 44,29% total jumlah pekerja perempuan. Sebagai catatan, perhitungan jumlah perempuan di lembaga swasta merupakan hasil pengurangan antara jumlah pekerja perempuan dan pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Selanjutnya, di tahun 2021, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 43,98% yang disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, mutasi kerja, dan pensiunan di tiap tahunnya.

4. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.170 Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah KDRT	Orang	254	193	249	203	235	0,57
2.	Jumlah rumah tangga	Orang	133.686	135.602	138.430	139.654	140.288	1,21
3.	Rasio KDRT	%	0,19	0,14	0,18	0,15	0,17	-0,66

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2017, jumlah KDRT adalah sebesar 254 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,19% dan mengalami penurunan di tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 203 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,15%. Penurunan jumlah KDRT pada tahun 2017 disebabkan karena perbedaan metode penghitungan, di mana pada tahun 2017 data yang ditampilkan murni kejadian KDRT yang dialami oleh penduduk Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2018-2019 terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Selain itu, semakin banyak lembaga yang turut membantu dalam penanganan kasus KDRT salah satunya melalui jejaring kerja di Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat Kota dan Kemantren yang telah didukung oleh status hukum yang kuat. Kemudian, di tahun 2021, jumlah KDRT meningkat daripada tahun 2020 menjadi sebanyak 235 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,17%.

Meningkatnya jumlah KDRT di tahun 2021 tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga adanya Satgas SIGRAK dengan sistem yang sudah berjalan. Selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi, mengingat pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat.

5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut

Tabel 2.171 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	60,05	63,49	64,32	61,30	65,11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64,32% pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,30%. Meskipun mengalami penurunan angka partisipasi angkatan kerja perempuan, tetapi hal ini tetap menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat menjadi 65,11%.

6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT. Akan tetapi, data yang disajikan di bawah merupakan data gabungan, di mana korban kekerasan tidak hanya ditangani oleh UPT saja. Penanganan dilakukan oleh lembaga lain seperti Rifka Annisa, Puskesmas, petugas provinsi, dsb.

Tabel 2.172 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	254	87	122	145	165
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	254	87	122	145	165
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2017 sebanyak 254 laporan menjadi 87 laporan di tahun 2018. Tingginya laporan di tahun 2017 karena adanya metode penghitungan laporan, angka laporan yang didapatkan di tahun 2017 tidak hanya dari penanganan dari UPT tetapi dari lembaga lain. Kemudian dari tahun 2018 penghitungan jumlah pengaduan hanya data penanganan di dalam UPT saja sehingga terlihat penurunan yang signifikan.

Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan. Di masa pandemi, laporan atas tindakan kekerasan dapat dilaporkan melalui online

7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini bertujuan untuk melihat besarnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Yogyakarta. Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Namun, data yang ada bersifat fluktuatif, misalnya saja di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan semua kasus tersebut telah mendapatkan penanganan oleh petugas kesehatan yang ada. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat. Selain itu ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.173 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	35	58	60	34	31
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	35	58	60	34	31
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum.

Tabel 2.174 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	20	56	75	42	60
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	20	56	75	42	60

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017-2021 cakupan pelayanan bantuan hukum kepada korban kekerasan sudah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban kekerasan sudah optimal. Naiknya jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum dipengaruhi beberapa hal seperti adanya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan adalah persoalan atau permasalahan yg harus ditangani, masyarakat sudah mengetahui harus melapor kemana atas tindak kekerasan yang terjadi, serta adanya satgas sigrak yang dapat menjangkau kejadian tersebut. Layanan bantuan hukum ini menyesuaikan jumlah assesment yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

9. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.175 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,65	0,14	0,11	121,42 9	0,13	0,10	123,077	0,12	0,09	125,00	0,11	0,11	100,00
2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	Persen	74	76	88,64	116,63	78	86,76	111,23	80	91,40	114,25	83,20	87,23	104,84
3	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%	0,74	0,15	0,03	180,00	0,14	0,06	157,14	0,13	0,04	169,23	0,12	0,04	166,67

Sumber: DP2AP2KB, 2021

Keterangan: T=Target; R=Realisasi, C=Capaian

Dilihat dari tabel diatas, semua indikator SDGs pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018-2021 telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya pengembangan inovasi SIGRAK (Siap Gerak Atasi Kekerasan).

C. Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama selama tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,13%, sedangkan pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan utama yaitu sebesar 3.09% per tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah

Tabel 2.176 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama	Kg	56.487.000	50.116.000	55.726.000	56.434.000	55.475.000	-0,13
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324	-2,76
3	Ketersediaan Pangan Utama	kg/jiwa	133,62	117,23	134,59	151,06	147,41	3,09

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik. Penurunan ketersediaan pangan utama di tahun 2021 disebabkan terjadinya penurunan produksi gabah/beras dalam kota dikarenakan pandemi covid-19.

2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasikan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal / Kapita / Hari dan protein 57 Gram / Perkapita / Perhari.

Ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2021, tersedia energi sebesar 2.607 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 80,61 gram per kapita per hari. Peningkatan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

Tabel 2.177 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari							
1	Energi	Kkal	2.472	2.480	2.507	2.594	2.607
2	Protein	Gram	75,69	75,43	78,88	85,25	80,61
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari							
3	Energi	Kkal	2.200	2.200	2.200	2.200	2.100
4	Protein	Gram	57	57	57	57	57

3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan perhitungan rumus pangan aman dengan menghitung persentase jumlah sampel yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, persentase pangan yang aman di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 97,99. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pada sampel pangan pertanian dan perikanan. Hal itu terjadi karena sampel tersebut membeli dan pada tahun 2020 adanya rasionalisasi anggaran sehingga jumlah sampel berkurang. Kemudian di tahun 2021, persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan kembali mengalami penurunan dikarenakan pengurangan jumlah pengambilan sampel (kegiatan monitoring) disebabkan adanya pandemi covid-19.

Tabel 2.178 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi	Sampel	2.694	1.476	2.214	1.850	986
2	Jumlah sampel pangan yang diambil	Sampel	2.719	1.585	2.399	1.888	1.050
3	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	99,08	93,12	92,29	97,99	93,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

D. Pertanahan

1. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah umum, *sultan ground*, dan *pakualaman ground*. Data secara rinci terkait luas lahan bersertifikat untuk tanah umum, tanah *sultan ground*, dan tanah *pakualaman ground*, sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional belum bisa menampilkan. Hal ini dikarenakan dalam sistem Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta belum ada fasilitas untuk merekap luas

Tabel 2.179 Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas lahan bersertifikat	Ha	789,03	2.646,27	2.665,63	2.657,17	2.698,79	59,34

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya 59,34%. Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa terjadi kenaikan luas tanah bersertifikat yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dilaksanakan oleh BPN Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2020, luas lahan yang bersertifikat mengalami sedikit penurunan menjadi 2.657,17 Ha. Hal ini terjadi karena Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sedang melakukan validasi data pertanahan secara menyeluruh sehingga perubahan data akan sangat dinamis yang dipengaruhi oleh tumpang tindih bidang tanah serta Hak Atas Tanah yang berakhir jangka waktunya. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan luas lahan yang bersertifikat menjadi 2.698,79 Ha hal ini terjadi karena meningkatnya permohonan persertifikatan tanah di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.180 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	3	5	3	8	5	38,96
2.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	5	7	5	14	11	42,50
3.	Penyelesaian kasus sengketa tanah	%	60,00	71,43	60,00	57,14	45,45	-5,54

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Berdasarkan data yang ada, persentase penyelesaian kasus sengketa jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh BPN dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan turun dengan pertumbuhan rata-ratanya sebesar -5,54% per tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak

kasus dilaksanakan dalam bentuk non litigasi berupa fasilitasi koordinasi dan mediasi. Semua kasus sudah bisa tertangani/terfasilitasi melalui upaya koordinasi dan mediasi. Namun belum semua kasus dapat terselesaikan karena sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa untuk terwujudnya sebuah kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian.

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.181 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah izin lokasi	Unit	-	2	20	22	13
2.	Permohonan izin lokasi	Unit	-	2	20	22	13
3.	Penyelesaian izin lokasi	%	-	100	100	100	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Permohonan izin lokasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 tidak ada data dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan izin lokasi dan hanya memberikan pertimbangan teknik kepada Walikota terkait penerbitan izin lokasi, sehingga tidak terdapat data. Pada tahun 2018, terdapat permohonan izin lokasi sebanyak 2 unit yang mendapatkan persetujuan dan tahun 2019 meningkat menjadi 20 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan. Permohonan izin lokasi terbanyak obyeknya terletak di Kemantren Umbulharjo. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 13 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan baru terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

E. Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya RPPLH Kota

Indikator tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Dokumen RPPLH di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2.182 Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersusunnya RPPLH Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

dokumen jangka panjang yang ada di tahun 2017-2018, namun masih sampai proses inventarisasi, dan Pemerintah kota Yogyakarta belum memiliki Perda RPPLH, penyusunan naskah akademik RPPLH untuk menjadi Perda telah diajukan dan telah dianggarkan pada tahun 2020, namun berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran tersebut dirasionalisasi. Kemudian RPPLH ini diajukan sebagai proses inventarisasi ulang pada tahun 2023 untuk pembaruan data, sehingga harapannya 2026 perda RPPLH bisa diselesaikan. Rincian proses RPPLH per tahun antara lain inventarisasi (2023), penyusunan (2024), naskah akademik (2025), dan penetapan (2026).

2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota

Indikator terselenggaranya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah kota akan menunjukkan ada atau tidaknya dokumen atau kajian tersebut di suatu kota.

Tabel 2.183 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

KLHS adalah dokumen wajib untuk pengkajian suatu perencanaan yang sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan. Jika perencanaan sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan dan membuat dokumen KLHS maka perencanaan tersebut sudah termasuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, beberapa dokumen yang wajib harus mempunyai KLHS adalah perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD/RPJMD (Kebijakan Perencanaan) dan dokumen RTRW/RDTR (Perencanaan Tata Ruang). KLHS di Kota Yogyakarta dibuat oleh instansi yang sedang membuat dokumen perencanaan dengan melibatkan instansi lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS telah dilakukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta sebagai salah satu dasar penyusunan RPJMD 2017-2022 dan dilakukan oleh Dispetaru untuk Revisi Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta karena anggaran penyelenggaraannya di OPD masing-masing. Keterlibatan DLH Kota Yogyakarta adalah berperan dalam Pokja KLHS. Mulai tahun 2017, dokumen KLHS dibuat seiring dengan dibuatnya Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Yogyakarta. Tahun 2017 dibuat oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta karena BAPPEDA adalah instansi yang membuat RDTR dan RPJMD tersebut. Selanjutnya, mulai tahun 2018 pembuatan dokumen KLHS dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai pembuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Yogyakarta. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua kelompok kerja. Untuk tahun 2020, tidak ada K/R/P yang membutuhkan KLHS sehingga tidak diselenggarakan. Penyusunan KLHS dikaitkan dengan RPJMD dan RTRW/RDTR yang pada tahun 2021 tidak ada penyusunan dokumen perencanaan tersebut pada instansi yang membidangi (Bappeda dan Dinpetaru).

3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran. Hal tersebut sama dengan data yang ada di Kota Yogyakarta, tetapi data indeks kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diolah dan menggunakan formula dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan indikator indeks kualitas air pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Oleh karena itu, satuan pada indikator ini disesuaikan dengan data yang ada.

Tabel 2.184 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	50,00	49,26	41,98	39,79	38,44	-6,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, secara umum dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai indeks kualitas air di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan menurun dengan nilai indeks kualitas air sebesar 38,44 di tahun 2021. Penyebab penurunan indeks kualitas air pada tahun 2019 dikarenakan adanya parameter yang masih dominan melebihi baku mutu yaitu parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Coliform yang diakibatkan oleh cuaca musim panas yang terlalu panjang sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil. Selanjutnya pada tahun 2020 perkembangan kawasan perkotaan mempengaruhi penurunan kualitas air sungai, salah satunya disebabkan oleh aktivitas masyarakat perkotaan dalam membuangnya limbahnya ke sungai mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2021 parameter yang berperan dalam pengukuran indeks kualitas air dan mengakibatkan penurunan indeks adalah bakteri *e coli*, sehingga dipastikan bahwa semakin tahun jumlah bakteri *e coli* di sungai semakin meningkat yang menunjukkan indikasi bahwa pembuangan limbah domestik ke badan sungai semakin tinggi di sepanjang sungai dan kemungkinan aktivitas peternakan di badan sungai. Bakteri *e coli* dihasilkan dari limbah domestik hasil aktivitas pencernaan manusia dan hewan. Sehingga indeks kualitas air Kota Yogyakarta masih termasuk dalam kategori kurang baik ($40 < IKA \leq 50$).

Pengujian kualitas air yang ada di Kota Yogyakarta selama ini sudah merepresentasikan musim dan kondisi sungai yang ada. Hal ini dikarenakan pengujian dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang masing-masing merepresentasikan musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian, pengujian kualitas air sungai telah dilakukan pada lima titik (hulu, tengah dan hilir) pada setiap sungai. Sungai yang diuji kualitas airnya yaitu Sungai Manunggal, Gajah Wong, Code dan Winongo. Selain itu, parameter yang diujikan juga sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, *Total Phospat*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Parameter yang berperan dalam pengukuran indeks kualitas air dan mengakibatkan penurunan indeks adalah bakteri *e coli*, sehingga dipastikan bahwa semakin tahun jumlah bakteri *e coli* di sungai semakin

Lokasi titik sampel diambil dari 4 sungai (Code, Manunggal, Winongo, Gadjahwong) dengan kategori Cemar Berat secara merata, dengan metode Storet dan metode IP. Dari metode Storet dapat disimpulkan bahwa status mutu air sungai kategori Cemar Berat, sungai dengan tingkat pencemaran paling tinggi adalah Sungai Manunggal, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Iromejan sebesar 218, Mangkukusuman sebesar 222, Kusumanegaran sebesar 222 dan Menteri Supeno sebesar 242. Dan sungai dengan tingkat pencemaran air paling rendah adalah sungai Code, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Petinggen sebesar 160, Gondolayu sebesar 182, Sayidan sebesar 192, Tungkok sebesar 128 dan Wirosaban sebesar 130.

Sementara dari hasil pengujian sampel air dengan metode IP, menunjukkan hasil yang sama yaitu status mutu air sungai kategori Cemar Berat, sungai dengan tingkat pencemaran air paling tinggi adalah sungai Manunggal, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Iromejan sebesar 13,84, Mangkusuman sebesar 13,54, Kusumanegara sebesar 13,07 dan Menteri Supeno sebesar 11,25. Kemudian sungai dengan tingkat pencemaran paling rendah adalah sungai Code. Dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Petinggen sebesar 11,02, Gondolayu sebesar 11,58, Sayidan sebesar 13,02, Tungkok sebesar 12,48 dan Wirosaban sebesar 11,52.

Indeks Kualitas Air (IKA) untuk 4 sungai di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Hasil uji dari parameter fisika dan kimia untuk perhitungan IKA yaitu TSS, DO, BOD, COD dan *Fosfat* bervariasi nilai hasil ujinya, pada beberapa lokasi masih memenuhi baku mutu dan terdapat juga pada beberapa lokasi yang melebihi batas baku. Sedangkan untuk parameter mikrobiologi yaitu *Fecal Coliform* dan *Total Coliform* nilai hasil ujinya selalu jauh melebihi baku mutu pada semua lokasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter dominan atau kritical pada kualitas air sungai di Kota Yogyakarta adalah *Fecal Coliform* dan *Total Coliform*.

Selanjutnya, menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, nilai indeks kualitas air ± 50 IKA tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai $IP\ 5,0 < PI_j \leq 10,0$. Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai maupun jauh dari sungai. Diantaranya adalah masih banyaknya masyarakat bantaran sungai yang membuang limbah atau sampah rumah tangga mereka ke sungai langsung tanpa ada penanganan terlebih dahulu.

Tercemarnya kualitas air sungai di Kota Yogyakarta juga tidak dapat dihindari, karena sungai yang ada di Kota Yogyakarta adalah sungai bagian tengah dari seluruh badan sungai di DIY, sehingga sungai yang ada di Kota Yogyakarta akan terpengaruh dengan kualitas hilir sungai dari kabupaten diatasnya yaitu Kabupaten Sleman. Jika kualitas air masukan dari Kabupaten Sleman buruk, maka sungai-sungai di Kota Yogyakarta tentunya akan memiliki kualitas air yang hampir sama pula. Oleh karena itu, penanganan kualitas air ini cukup sulit karena menyangkut seluruh kota/kabupaten di wilayah DIY. Tindakan atau penanganan yang telah dilakukan oleh DLH dalam upaya menjaga kualitas air sungai di Kota Yogyakarta diantaranya adalah pembinaan terhadap perusahaan yang rawan membuang limbah ke sungai, pembinaan kepada masyarakat di pinggir sungai, pembentukan satgas kebersihan sungai sebanyak 40 orang, kerja bakti rutin di bantaran sungai pada 140 RW, dan

4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara ini didapatkan melalui sebuah formula sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017 yaitu $IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$. Perhitungan tersebut sama dengan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.185 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	89,27	84,24	84,00	86,97	90,70	0,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas udara Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-ratanya menunjukkan peningkatan dengan angka 0,48% per tahun.

Pengukuran IKU di Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan parameter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili sumber pencemar bergerak dan SO₂ mewakili sumber pencemar tidak bergerak.

Sebelum tahun 2017, pengukuran indeks kualitas udara dilaksanakan oleh DLH Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode manual aktif, sedangkan pada tahun 2017 dan seterusnya pengukuran indeks kualitas udara langsung dilakukan oleh pusat dengan menggunakan metode pasif. Pada tahun 2019 terjadi penurunan indeks kualitas udara dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 84,24 menjadi 84,00. Penurunan indeks kualitas udara pada tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat di Kota Yogyakarta dan adanya penambahan aktivitas setiap akhir minggu dan libur serta kurangnya lahan penghijauan di Kota Yogyakarta.

Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kualitas udara menjadi 86,97 hal ini dipengaruhi berkurangnya aktivitas dalam penggunaan sarana transportasi selama pandemi Covid-19, contohnya aktivitas pariwisata berkurang, adanya WFH pada aktivitas perkantoran serta aktivitas sekolah yang melalui daring/online sehingga kadar polutan udara berkurang. Kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan hasil pengukuran indeks kualitas udara menjadi sebesar 90,70 yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni berkurangnya mobilitas/aktivitas transportasi warga masyarakat akibat pandemi covid-19, berkurangnya mobilitas warga menuju bandara karena adanya perpindahan bandara NYIA di Kulon Progo.

Dilihat dari indeks kualitas udara, Kota Yogyakarta termasuk dalam kondisi yang baik. Karena semakin besar nilai IKU maka akan semakin baik pula kualitas udaranya. Selanjutnya, walaupun Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi daerah yang padat dilalui kendaraan,

5. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan yang dimaksud pada Permendagri 86/2017 ini adalah hasil dari pengukuran dengan formula tertentu yang tertuang dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Formula tersebut sama dengan formula yang digunakan untuk menentukan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada dokumen IKLH, sehingga data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaras dengan data yang dibutuhkan.

Tabel 2.186 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39,67	39,68	39,69	44,04	44,06	2,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, indeks kualitas tutupan lahan tahun 2017-2021 yang ada di Kota Yogyakarta menunjukkan besaran dengan kecenderungan meningkat sehingga pertumbuhan rata-ratanya menjadi 2,76 per tahun.

Pada tahun 2017, indeks kualitas tutupan lahan sebesar 39,67 selanjutnya terus meningkat menjadi 44,04 di tahun 2020. Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dikarenakan adanya penambahan dan penanaman pohon perindang pada Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan permukiman berdasarkan hasil sinkronisasi antar OPD menurut SK Walikota Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas RTH. Pada tahun 2020, angka IKTL sebetulnya adalah 44,0368 yang kemudian dibulatkan menjadi 44,04. Sehingga pada tahun 2021, kenaikan angka IKTL sebanyak 0,02 berasal dari meningkatnya angka RTH pada tahun 2021 dan inventarisir RTHP pada tahun 2021.

Nilai IKTL di Kota Yogyakarta cenderung rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks kualitas udara. Angka IKTL berasal dari data tutupan lahan dengan vegetasi maupun pohon berkanopi yang disinkronkan dengan data luasan RTH, yang dirumuskan sedemikian rupa dan dihitung setiap tahunnya mengikuti perkembangan RTH di Kota Yogyakarta. Mulai pada tahun 2020 dan berimbas di tahun 2021, angka IKTL mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Angka IKTL pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup banyak dikarenakan mengikuti sinkronisasi data RTH pada tahun 2020. Sehingga angka IKTL pada tahun 2020-2021 dapat mencapai target minimal setiap tahunnya yang sudah ditentukan di renstra. Selain itu, pada tahun 2021 RTH mengalami perkembangan dikarenakan adanya penambahan luasan yang berasal dari inventarisir data RTHP di lingkungan permukiman yang kemudian kami sempurnakan fisiknya, dan penambahan luasan taman dan perindang.

Faktor pendorong IKTL yaitu sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau sekota Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, nilai IKM pada tahun lalu yang menjadi

Ruang sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan kosong yang berada di wilayah, yang dapat distatuskan fungsinya dan dimanfaatkan sebagai RTH Publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan DED dan pembangunan fisiknya. (sumber: LAKIP DLH 2021).

6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sebesar 60,84. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2018-2019, nilai IKLH cenderung menurun. Hal ini wajar karena faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran badan air dan pencemaran udara yang terus meningkat dan terus berkurangnya tutupan vegetasi karena pembangunan atau alih fungsi lahan. Akan tetapi, pada tahun 2020 nilai IKLH justru meningkat. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil tersebut adalah pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi ini menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat sehingga volume lalu lintas juga mengalami penurunan cukup besar sehingga kualitas udara meningkat. Beberapa usaha juga mengalami penurunan atau malah menutup usahanya selama pandemi ini. Hal ini tentu saja sangat mengurangi terhadap beban pencemaran air dan udara. Adanya sinkronisasi dan inventarisasi ulang keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang tertuang dalam SK Walikota Nomor 401 tahun 2020 juga membantu menambah luas RTH secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2021 nilai IKLH kembali meningkat menjadi 60,84, hal ini dipengaruhi beberapa hal selain adanya sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau sekota Yogyakarta pada tahun 2020 antara lain adanya alat pemantau kualitas udara secara *real time* (AQMS) sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara *real time*, berkurangnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan.

Tabel 2.187 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Formula	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	30%IKA+30%IKU+40%IKTL	57,65	55,92	53,67	55,64	60,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Dari hasil perhitungan IKLH diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maka IKLH Kota Yogyakarta tahun 2021 masuk dalam kategori Sedang karena nilai IKLH Kota Yogyakarta berada pada rentang $50 \leq \text{IKLH} < 70$.

7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota

lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan data total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota kemudian dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.188 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani	Laporan	93	103	32	13	5	-44,77
2.	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Pemantauan Perusahaan	76	120	48	17	26	-3,44
3.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	122,37	85,83	66,67	76,47	19,23	-28,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 sehingga pertumbuhan rata-ratanya adalah -28,08% per tahun. Pada tahun 2017, persentasenya melebihi angka 100% yang mengindikasikan jika penanggung jawab usaha yang ada di Kota Yogyakarta telah menaati semua peraturan terkait lingkungan secara umum.

Jika dilihat dari data di atas, pada tahun 2020 jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota turun signifikan. Hal ini disebabkan banyak kegiatan/usaha yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, terdapat kegiatan usaha yang tutup dan ada yang tutup sementara, contohnya hotel-hotel & toko-toko. Pada tahun 2021, persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPULH yang telah

Selain itu angka yang terus menurun dari tahun 2018 hingga 2021 dikarenakan adanya pandemi beberapa perusahaan berhenti operasional sehingga tidak ada uji lab (uji air tanah, uji air limbah, dan lain-lain), sehingga tidak ada pelaporan masuk dari perusahaan. Sedangkan untuk uji lab tersebut membutuhkan biaya bagi perusahaan, jumlah pengawas semakin menurun karena sebelumnya menjadi satu dengan personil UPT Lab yaitu sekitar 16 orang pada tahun 2017-2018, namun sejak tahun 2019 berkurang hingga saat ini menjadi 4 personil karena bidangnya sudah berpisah dengan UPT Lab.

8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Indikator terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ini adalah indikator terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat atas jasanya melestarikan lingkungan khususnya di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.189 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Pemberian penghargaan lingkungan hidup telah menjadi agenda rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari data yang ada pemberian penghargaan lingkungan hidup di lingkup Kota Yogyakarta diberikan setiap tahun, meliputi penghargaan:

- a. Lomba bank sampah;
- b. Lomba adipura Kemantren;
- c. Sekolah adiwiyata kota;
- d. Kehati award;
- e. Lomba kalpataru;
- f. Sekolah dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan;
- g. Program kampung iklim (Proklam); dan
- h. Lomba-lomba Lingkungan Hidup (Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Lingkungan Hidup, Olimpiade Lingkungan, dll).

Namun, pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberian penghargaan hanya diberikan kepada pemenang lomba-lomba lingkungan pada HPSN 2020 sejumlah 9 kelompok pemenang dan Sekolah Berwawasan Lingkungan 2020 sejumlah 23 sekolah. Sedangkan untuk pemberian penghargaan lainnya ditiadakan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk proses penilaian sekolah berwawasan lingkungan, yakni sebanyak 23 sekolah dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan melalui virtual/daring

pada tahun 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan lingkungan kepada: 4 (empat) Sekolah Berwawasan Lingkungan, 11 (sebelas) Sekolah Adiwiyata Kota, 5 (lima) Bank Sampah Reguler, 5 (lima) Bank Sampah Inovatif.

9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta

Indikator ini didapatkan dari pembagian jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase pengaduan masalah yang dapat ditangani oleh dinas terkait.

Tabel 2.190 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	pengaduan	5	5	18	8	6	44,6
2.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	pengaduan	5	5	18	8	6	44,6
3.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Kota Yogyakarta	%	100	100	100	100	100	0,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik secara 100%. Akan tetapi, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-ratanya adalah 44,6% per tahun. Peningkatan pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terjadi dikarenakan bertambahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta cukup beragam, sebagai contoh pengaduan terkait limbah keluaran pabrik ataupun penyusutan tinggi muka air tanah pada sumur masyarakat karena indikasi aktivitas perhotelan.

Pada tahun 2020, semua pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti, terdiri dari 6 pengaduan yang berada di wilayah kota Yogyakarta dan 2 pengaduan yang diteruskan ke wilayah

- a. Bau kotoran ayam dari toko DVD di Baciro;
- b. Temuan limbah medis di TPS Bausasran;
- c. Limbah kotoran unggas yang dibuang ke bantaran Sungai Winongo;
- d. Polusi udara akibat sisa pembakaran panen sawah di Jalan Tegal Kenongo, Kasihan Bantul;
- e. Polusi berupa kebauan dan gangguan kebisingan dari kegiatan IPAL industri; dan
- f. Polusi udara akibat pembakaran sampah di Pasar Ikan Higienis.

10. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju sistem *zero waste*. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.191 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/ tahun)
1.	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke Lingkungan	Ton/hr	92,65	55,56	100,35	94,06	40,46	-5,67
2.	Total timbulan sampah	Ton/hr	365	359,07	361,96	360,79	298,87	-4,58
3.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	25,38	15,47	27,72	26,07	13,54	-3,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah yang dikelola secara 3R meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah, dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung dan sampah yang diolah pada TPST 3R di Nitikan. Jumlah sampah yang dikelola kembali di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata -5,67% per tahun.

Pengelolaan sampah 3R pada tahun 2017 mencapai angka 92,65 ton/hr dikarenakan pada tahun 2017 mulai dioperasikannya TPST 3R yang berada di Nitikan sehingga membuat pengolahan sampah 3R meningkat drastis. Hal tersebut menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan rata-rata jumlah sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 24,73% per tahun. Selanjutnya, untuk

karena itu, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada kedua tahun tersebut. Pada tahun 2018, jumlah timbulan mengalami penurunan, tetapi di tahun ini jumlah pengelolaan sampah juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 55,56 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 359,07 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mencapai 15,47% saja sampah yang dapat dikelola di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah timbulan mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 100,35 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 361,96 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mencapai 27,72%. Peningkatan persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dikarenakan adanya penambahan fasilitas dan kapasitas rumah kompos dari 72 ton menjadi 144 ton dan memasukkan aktivitas pemulung dan pelapak sebagai pelaku pengurangan sampah serta penambahan jumlah komunitas pengelola sampah berupa bank sampah.

Kemudian, pada tahun 2020 jumlah timbulan mengalami penurunan, demikian pula dengan jumlah pengelolaan sampah mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 94,06 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 360,79 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R mencapai 26,07%. Terjadinya penurunan jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian warga tidak maksimal dalam memilah sampahnya, sehingga aktivitas masyarakat dalam mengelola bank sampah dan mengurangi sampah mengalami penurunan.

Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah mengalami penurunan menjadi 298,87 ton/hari hal ini dikarenakan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Yogyakarta 2021 pada tahun ini membuktikan adanya penurunan nilai koefisien timbulan sampah per orang/hari dari 0,87 di tahun-tahun sebelumnya diubah menjadi 0,80. Meski adanya penurunan timbulan sampah tetapi persentase sampah yang berkurang melalui 3R menurun menjadi 13,54%. Terjadinya penurunan jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2020 dikarenakan perubahan pola aktivitas masyarakat di masa pandemi covid-19, terutama untuk di sektor perdagangan seperti pasar banyak yg tidak beroperasi penuh, sampah yang dihasilkan selama masa pandemi mayoritas adalah sampah kering.

Selain itu pada tahun ini juga dilakukan penyesuaian komponen yang sebelumnya kurang kuat data pendukungnya (komponen pembatasan timbulan sampah di tahun-tahun sebelumnya dimunculkan, tetapi karena kesulitan untuk membuktikan penyajian datanya, maka mulai tahun ini komponen tersebut tidak dimasukkan, beberapa poin dalam hal pembatasan sampah sudah tercakup di dalam pengurangan sampah yang melalui bank sampah, dll). Sehingga untuk angka yang dimunculkan dalam persentase capaian indikator ke depannya akan mengacu kepada hasil rekomendasi Masterplan Persampahan 2021.

Tabel 2.192 Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

											Pertumbuhan

Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat kelompok bank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 7,11% per tahun.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antusiasme penduduk semakin meningkat yang diidentifikasi dari peningkatan kelompok bank sampah yang sangat tinggi hingga pada tahun 2019 terdapat 481 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah kelompok bank sampah dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah dan melalui kelompok-kelompok masyarakat sadar lingkungan antara lain penambahan bank sampah di wilayah Karangwaru, Pakuncen, Suryodiningratan, dan Klitren. Pengelolaan sampah secara kelompok melalui bank sampah juga mulai dikembangkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Adanya peningkatan jumlah bank sampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka pengelolaan sampah secara 3R. Hingga tahun 2020 jumlah kelompok bank sampah masih tetap dan tidak ada penambahan, dari 481 kelompok bank sampah terdapat 29 kelompok bank sampah yang tidak aktif atau sekitar 94% yang aktif.

Berdasarkan hasil monitoring Bank Sampah, ada kenaikan jumlah Kelompok Bank Sampah pada tahun 2021 sebanyak 84 Bank Sampah, yang terdiri dari 53 Bank Sampah Baru dan 31 Bank Sampah lama yang diaktifkan kembali.

11. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Indikator timbulan sampah yang ditangani dan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani didapat dari perbandingan volume sampah yang ditangani dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Yang dimaksud volume sampah yang ditangani adalah volume sampah yang dibuang ke TPA.

Tabel 2.193 Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)	ton/hari	261,28	236,05	252,95	262,32	255,34	-0,36
2.	Realisasi timbulan sampah	ton/hari	365	359,07	361,96	360,79	298,87	-4,58
3.	Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA	%	71,58	65,74	69,88	72,71	85,44	4,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

berfluktuatifnya jumlah perkiraan timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan pertumbuhan rata-rata -4,58% per tahun.

Keadaan tersebut tidak lepas dari tingginya kenaikan volume timbulan sampah dari tahun 2017-2018. Hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja DLH Kota Yogyakarta yang melakukan pendataan secara menyeluruh timbulan sampah di Kota Yogyakarta. Pendataan timbulan sampah pada tahun 2018 meliputi sampah yang terdapat di TPS dan sampah dari pihak swasta (seperti hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, dll). Volume sampah mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020 dikarenakan aktivitas warga dalam memilah sampah menurun akibat adanya pandemi Covid-19.

Timbulan sampah yang terdata pada tahun 2021 mengalami penurunan sesuai hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Yogyakarta. Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA pada tahun ini justru mengalami peningkatan karena memang hampir seluruh timbulan sampah yang masuk ke fasilitas pengumpulan sampah milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan setelah dilakukan pemilahan akan menyisakan sampah residu yang selalu dapat terangkut ke TPA Piyungan. Bahkan di saat TPA Piyungan mengalami penutupan dan mengakibatkan penumpukan jumlah sampah yang terpaksa ditimbun selama beberapa hari di lokasi TPS/Depo pengumpulan sampah. Kemudian setelah TPA dibuka kembali, segera dilakukan eksekusi pembersihan dan pengangkutan sampah secara maraton oleh petugas di lapangan, hingga sampah tersebut bisa habis terangkut semua keluar dari TPS/Depo.

Selain itu banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada di TPS mengindikasikan jika masyarakat belum menerapkan kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) secara baik. Masyarakat masih membuang sampah langsung tanpa dilakukannya pengelolaan terlebih dahulu, sehingga sampah menumpuk di TPS. Kemudian, jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu siang hari di Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk pada waktu malam hari. Selain itu, sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga memiliki pengaruh terhadap jumlah timbulan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganan sampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, saat ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Yogyakarta

Indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kota ini adalah indikator yang bertujuan untuk menunjukkan nilai TPA dari program adipura di suatu wilayah. Di Kota Yogyakarta, data terkait nilai adipura ini dapat ditunjukkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2.194 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai TPA (Program Adipura)	67,76	63,17	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat jika nilai program adipura di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 selalu mendapatkan adipura. Akan tetapi, tahun setelahnya yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016 Kota Yogyakarta tidak mendapatkan adipura. Lalu setelahnya, tahun 2017 Kota Yogyakarta baru mendapatkan adipura lagi. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 nilai TPA tidak dapat ditampilkan dikarenakan belum ada data penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejak terbitnya PermenLHK RI Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, diatur bahwa klasifikasi kabupaten/kota yang dapat mengikuti program penilaian Adipura harus memenuhi persyaratan dengan kualifikasi salah satunya wajib memiliki TPA yang beroperasi di bawah kewenangan pemerintah daerah tersebut. Padahal hingga saat ini, kita belum memiliki TPA yang dioperasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri, TPA yang menjadi tujuan pembuangan sampah dari wilayah Kota Yogyakarta adalah TPA Regional yang digunakan secara bersama oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 hingga sekarang kita tidak mengikuti program penilaian Adipura.

Penghargaan Adipura diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai penghargaan kepada kota/kabupaten dalam pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan sampah, Penghijauan/RTH, Air dan Udara dan penilaian TPA. Pada penilaian TPA dipersyaratkan bahwa:

- a. Pengelolaan Sampah TPA wajib dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*; dan
- b. Ada penilaian lain terhadap pengelolaan sampah di TPA meliputi: Pemilahan Sampah, pengolahan sampah Organik dan pengolahan Sampah B3.

Untuk TPA Piyungan DIY sampai saat ini belum memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga nilai capaiannya masih di bawah yang disyaratkan (minimal 72,00).

13. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Lingkungan Hidup

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Lingkungan Hidup disaiki dalam

Tabel 2.195 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Lingkungan Hidup Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Indeks Kualitas Udara		66,85	85,40	84,24	98,64	85,90	84,00	97,79	86,40	86,97	100,66	89,90	90,70	104,37
2	Indeks Kualitas Air		50,2	50	49,26	98,52	50,60	41,98	82,96	50,80	39,79	78,33	51	38,45	75,39
3	Persentase pengangkutan sampah	%	91,26	92,17	92,71	100,59	93,99	102,76	109,33	99,32	100,47	101,16	99,32	101,20	101,89
4	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	%	29,19	29,51	29,30	99,29	29,68	29,34	98,85	29,85	40,56	135,88	30,02	40,57	135,14
5	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	5,65	7,98	8,04	100,75	10,08	9,99	99,11	12,03	11,35	94,35	13,70	12,63	92,19
6	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	12	13	15,47	119,00	14	27,72	198,00	16	24,79	154,94	24	13,54	56,42
7	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	%	23,62	27,58	31,46	114,07	31,36	42,34	135,01	42,34	47,75	112,78	45,97	51,68	112,42
8	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	41,58	41,92	41,50	99,00	42,25	41,57	98,39	42,57	30,31	71,20	42,90	30,33	70,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T=Target; R=Realisasi, C=Capaian

Berdasarkan data pada tabel diatas, dari 8 indikator SDGs bidang lingkungan hidup terdapat 4 indikator yang belum mencapai 100%. Belum tercapainya indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya penurunan indikator kualitas air yang disebabkan oleh bakteri *e coli* di beberapa titik sampel air; dan
- b. Berkurangnya jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dan jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan,

oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.196 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	302.408	306.600	311.302	311.564	311.846	0,77
2.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	309.788	313.317	314.241	317.853	318.459	0,69
3.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk		0,98	0,98	0,99	0,98	0,98	0,08

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2017-2021. Penurunan rasio dari tahun 2019 ke 2020 ini disebabkan adanya pembatasan layanan rekam KTP dikarenakan pandemi Covid-19. Hingga tahun 2021 penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP mencapai 311.846 orang dengan pertumbuhan rata-rata 0,77% per tahun.

2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel 2.197 Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
1.	Jumlah bayi berakta kelahiran	Orang	4.202	3.794	3.894	4.186	3.215	-5,69
2.	Jumlah bayi	Orang	4.293	3.795	3.894	4.186	3.215	-6,17
3.	Rasio Bayi Berakta Kelahiran		0,98	1,00	1,00	1,00	1,00	0,54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2017 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,98. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas, Kemantren, dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Klinik Utama Khadijah, RS Bethesda, RSKIA Sadewa, dan RSU Sakina Idaman.

3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 2.198 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pasangan nikah berakta nikah	Orang	97.646	105.965	131.692	144.793	152.216
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Orang	190.487	191.839	193.805	194.345	192.140
3.	Rasio pasangan berakte nikah		0,51	0,55	0,68	0,75	0,79

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencatatan data perkawinan antara lain untuk perkawinan baru melalui inovasi “Mantul” (Manten Anyar Entuk Telu) di mana pasangan pengantin langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yaitu akta perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP El yang baru dengan perubahan data status perkawinan yang diserahkan sesaat setelah perkawinan secara agama, sehingga data perkawinannya langsung terupdate. Sedangkan untuk perkawinan lama, pemutakhiran data perkawinan difasilitasi dalam aplikasi “Pemutakhiran Data Perkawinan” yang terintegrasi dalam Jogja Smart Service, untuk memudahkan warga melaporkan perkawinannya.

Sosialisasi dilakukan melalui sosial media maupun info dari wilayah (koordinasi dengan kementren & kelurahan dan ditindaklanjuti dengan info pemberitahuan ke warga).

4. Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kota

Basis data atau *database* merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan *database* akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan. Tabel berikut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan *database* kependudukan skala kota dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 2.199 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Tabel berikut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021.

Tabel 2.200 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Perkantoran pemerintahan kelurahan merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Kualitas perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.201 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik	Kantor	10	20	21	21	23
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Kantor	19	13	15	15	15
Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik	Kantor	16	12	9	9	7
Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan	Kantor	45	45	45	45	45
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik	Persen	64,44	73,33	80,00	80,00	84,44

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2017 adalah sebesar 64,44% meningkat mencapai 80% di tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari kurang baik menjadi sangat baik karena pembangunan gedung baru, yaitu Kelurahan Demangan, Ngupasan, dan Brontokusuman. Sementara itu, terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari sangat baik menjadi baik karena kerusakan bangunan seperti atap bocor, eternit berlubang, dan kerusakan papan nama berada di Kelurahan Rejowinangun dan Prawirodirjan. Data tahun 2020 sama dengan data tahun 2019, hal ini karena anggaran perbaikan kantor kelurahan di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada perbaikan gedung dan kantor pemerintahan kelurahan di tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik mengalami peningkatan menjadi 84,44%. Hal itu dikarenakan 1 Kelurahan dari kategori baik menjadi sangat baik karena dilakukan renovasi bangunan secara menyeluruh, 1 Kelurahan dari kategori kurang baik menjadi sangat baik karena menempati lokasi dan kantor kelurahan baru, serta 1 Kelurahan dari kategori kurang baik menjadi baik.

2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh

LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

Tabel 2.202 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	kelompok	616	616	616	617	623
2.	Jumlah LPM	kelompok	45	45	45	45	45
3.	Rata-rata binaan LPM		13,69	13,69	13,69	13,71	13,84

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah kelompok binaan LPM jumlahnya cenderung stagnan. Di tahun 2017-2019 jumlahnya 616 kelompok dengan total jumlah LPM dari tahun 2017-2019 sebanyak 45 kelompok. Namun, pada tahun 2020, jumlah kelompok binaan LPM bertambah menjadi 617 hal ini dikarenakan adanya penambahan RW. Hal ini pun mempengaruhi meningkatnya rata-rata binaan LPM menjadi 13,71. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah kelompok binaan LPM meningkat menjadi 623 dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi meningkatnya rata-rata binaan LPM menjadi 13,84.

3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan dari PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Tabel 2.203 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma)	Kelompok	4.854	4.854	4.819	4.819	4.819
2.	Jumlah PKK	Kelompok	3.240	3.210	2.992	2.992	3.212
3.	Rata-rata binaan PKK		1,50	1,51	1,61	1,61	1,50

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya kecenderungan rata-rata binaan PKK meningkat hingga

kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) disebabkan oleh penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan perwal kampung No.72 tahun 2018. Dengan adanya penggabungan RT ini memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma. Kemudian pada tahun 2021 jumlah PKK bertambah karena ada pemekaran wilayah di Kota Yogyakarta.

4. Persentase LSM Aktif

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM berfungsi untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Bila melihat dari bentuknya, LSM adalah inisiatif dan merupakan bentukan dari masyarakat. Oleh karena itu, LSM bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya maupun kegotongroyongan. LSM juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam mendorong pembangunan segala bidang. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah LSM dengan jumlah LSM yang aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.204 Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah LSM yang Aktif	Lembaga	28	37	38	13	12
2.	Jumlah seluruh LSM	Lembaga	48	49	50	22	17
3.	Persentase LSM aktif	%	58,33	75,51	76,00	59,09	70,59

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah LSM yang aktif dapat diketahui berdasarkan masa berlaku yang ada pada surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Pusat, dan dari masing-masing LSM yang melapor kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta. Dari data yang ada, dapat terlihat bahwa jumlah LSM yang aktif meningkat jumlahnya dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 13 lembaga. Hal ini juga mempengaruhi jumlah keseluruhan LSM menjadi 22 lembaga. Hal ini dikarenakan banyaknya LSM yang sudah tidak melakukan kegiatan apapun sehingga tidak memperpanjang SKT di Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. LSM yang tidak melaporkan diri untuk memperpanjang SKT dianggap sudah tidak aktif. Pada tahun 2021, jumlah LSM turun menjadi 12 karena ada beberapa LSM yang tidak jelas karena perpindahan alamat dan sampai saat ini belum memberikan laporan lagi ke Bakesbangpol.

5. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang

strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, Kelurahan, Kemantren hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.205 Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok	1	1	1	1	1
2.	Jumlah TP PKK Kemantren Se-Kota Yogyakarta	kelompok	14	14	14	14	14
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se-Kota Yogyakarta	kelompok	45	45	45	45	45
4.	Jumlah kel. PKK RW se-Kota Yogyakarta	kelompok	616	616	575	575	616
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok	2.532	2.532	2.357	2.357	2.532
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok	4.854	4.854	4.819	4.819	4.819

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2017 hingga ke tahun 2018, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan. Sementara itu, di tingkat dasawisma jumlahnya menurun cukup besar dari tahun 2016-2017, dan terus menurun hingga 2020. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan Perwal Kampung Nomor 72 tahun 2018. Dengan adanya penggabungan RT memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah. Untuk tahun 2021, jumlah kelompok PKK RW se Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 616, sedangkan untuk jumlah kelompok PKK RT mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi 2532. Data tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Se-Kota Yogyakarta.

6. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah

Tabel 2.206 Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit	623	621	623	199	446
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit	623	621	623	623	623
3.	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	31,9	71,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2017-2019 sudah mencapai 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase posyandu aktif dikarenakan adanya perubahan definisi operasional posyandu aktif. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif. Pada tahun 2020 jumlah posyandu yang masuk dalam katagori aktif sebanyak 199. Menurunnya capaian tersebut terutama disebabkan karena tidak tercapainya kriteria 1, yaitu jumlah hari pelayanan di posyandu. Hal ini disebabkan karena hampir 4 bulan, yaitu sejak bulan Maret hingga Juni 2020 posyandu tidak membuka pelayanan karena pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar posyandu hanya melakukan pelayanan 8 kali dalam 12 bulan.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah posyandu yang aktif mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 446 unit. Pelaksanaan posyandu masih terkendala pandemi, masih ada posyandu yang belum bisa melaksanakan kegiatan posyandu balita secara lengkap.

7. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, makin kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

Tabel 2.207 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Swadaya Masyarakat	Rupiah	1.618.887.325	1.423.299.240	1.939.122.500	2.105.533.000	44.027.390.800
2.	Total Program	Rupiah	4.640.350.000	4.640.350.000	5.540.350.000	5.540.350.000	45.896.041.873
3.	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program	Persen	34,89	30,67	35,00	38,00	95,93

Dapat dilihat pada tabel diatas terlihat perbedaan yang cukup besar antara jumlah swadaya masyarakat dan total program swadaya masyarakat di tahun 2017-2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2017 - 2020 jumlah swadaya masyarakat dihitung dari swadaya masyarakat yang digunakan untuk pendampingan hibah/belanja langsung LPMK di wilayah. Selanjutnya, berdasarkan nilai persentase di tahun 2020 mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kesadaran akan partisipasi masyarakat dalam swadaya meningkat, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan Pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan dapat memacu dana yang dihimpun oleh masyarakat, juga adanya kesadaran dari masyarakat bahwa tidak semua permasalahan dapat dibiayai oleh pemerintah. Selain itu pada tahun 2020 anggaran hibah kepada LPMK dialihkan menjadi Belanja Langsung di masing-masing Kelurahan. Sehingga diasumsikan total Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 dan 2020 nilainya sama dengan jumlah total hibah kepada LPMK.

Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan secara signifikan baik dari jumlah swadaya masyarakat maupun total program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan. Total program swadaya masyarakat diambil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Kemantren ditambah dengan anggaran yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sedangkan jumlah swadaya masyarakat dihitung dari seluruh swadaya masyarakat di wilayah ditambah infak masjid dan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang berperan aktif di Kampung KB diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan, DLH, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Kemantren/Kelurahan, Koramil, Polsek, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPPA, Dinas Pendidikan, Kemenag/KUA, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, BPBD, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda, PKK Kota Yogyakarta, BNN, BKKBBN, Koperasi AKU dan Perguruan Tinggi (UNY, UAD, UGM, UMY, Amikom).

2. Jumlah Perangkat Daerah yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dengan 51 OPD dan 45 Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal ini Kelurahan dihitung sebagai PD tersendiri di luar Kemantren.

3. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana

Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai nilai 1,25, tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,19 anak per keluarga. Penurunan hingga tahun 2021 ini disebabkan adanya peristiwa pisah KK karena pernikahan, pindah domisili, dan kematian kepala keluarga, sehingga membentuk KK sendiri. Pemerintah secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan anjuran.

Tabel 2.208 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anak	Orang	167.319	168.163	168.876	168.835	168.184
2.	Jumlah keluarga	Keluarga	133.686	135.820	137.933	140.527	141.908
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	1,25	1,24	1,22	1,20	1,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

4. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.209 Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	29.579	27.453	27.237	22.177	23.978
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	42.147	40.258	38.951	33.878	34.301
3.	Rasio akseptor KB2	%	70,18	68,19	69,93	65,46	69,90

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Catatan: Pengertian akseptor KB sama dengan peserta KB aktif

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017-2018 persentase rasio akseptor KB terus mengalami penurunan, yaitu dari 70,18% menjadi 68,19% yang disebabkan oleh perubahan dalam data dasar statistik rutin. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio akseptor KB sedikit meningkat menjadi 69,93%. Namun, pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 65,46%. Jumlah akseptor KB di tahun 2017 adalah sebanyak 29.579, di mana jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 22.177 yang disebabkan adanya pasangan usia subur yang *drop out* karena memasuki usia menopause (lebih dari 49 tahun), serta beberapa pasangan usia subur yang memilih melepas alat kontrasepsi karena ingin memiliki anak. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah akseptor KB mengalami kenaikan menjadi 23.978 yang diikuti dengan kenaikan pasangan usia subur menjadi sebanyak 34.301. Hal ini mengakibatkan rasio akseptor KB di tahun 2021 meningkat

PUS yang tahun kemarin belum (yang tahun kemarin hamil, PUS bukan peserta KB) menjadi peserta KB, di tahun 2021 menjadi peserta KB.

5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, juga termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

Tabel 2.210 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	29.579	27.453	27.237	22.177	23.978
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	42.147	40.258	38.951	33.878	34.301
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	%	70,18	68,19	69,93	65,46	69,90

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menampilkan data angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun atau yang sering disebut dengan indikator cakupan peserta KB aktif dalam rentang lima tahun. Cakupan KB aktif di Kota Yogyakarta pada 2017 yaitu 70,18% kemudian terus turun hingga tahun 2018 menjadi 68,19%. Penurunan cakupan KB aktif di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 disebabkan oleh perubahan dalam data dasar statistik rutin. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga kedalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa Kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam rekapitulasi peserta KB aktif (PUS yang ber-KB) sehingga terjadi penurunan capaian rasio peserta KB di wilayah-wilayah yang melakukan perubahan/integrasi data tersebut. Pada tahun 2019 angka tersebut kembali naik menjadi 69,93%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 65,46%. Penurunan jumlah pemakaian kontrasepsi ini disebabkan adanya pasangan usia subur yang hamil atau *drop out* karena memasuki usia menopause (lebih dari 49 tahun), serta beberapa pasangan usia subur yang memilih melepas alat kontrasepsinya karena ingin memiliki anak. Kemudian untuk tahun 2021 persentase angka pemakaian kontrasepsi/CPR Bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun meningkat menjadi 69,90%. Hal ini disebabkan karena terdapat PUS yang tahun kemarin belum menjadi peserta KB (karena hamil), di tahun 2021 menjadi peserta KB.

Tabel 2.211 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah peserta KB aktif	Pasangan	29.579	27.453	27.237	22.177	23.978

6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

Tabel 2.212 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	Kelahiran	68	62	29	34	53
2	Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Orang	16.606	16.375	16.651	15.938	15.698
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	Per 1.000 wanita	4,09	3,79	1,74	2,1	3,4

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 angka kelahiran remaja adalah sebesar 4,09 yang terus menurun mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 1,74, yang artinya setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun terdapat 1 orang yang telah melahirkan. Penurunan tersebut dikarenakan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang didalamnya memberikan pembekalan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan juga mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program tersebut menyarankan usia kawin pertama bagi wanita adalah 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Kemudian pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sehingga menjadi 3,4 yang disebabkan karena adanya tambahan PUS dibawah usia 19 tahun karena pernikahan usia muda dan terjadinya peningkatan akses teknologi informasi di satu sisi, namun di sisi lain melemahnya kontrol orangtua terhadap penggunaan gadget menyebabkan anak lebih cepat matang sehingga rentan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu, kebanyakan kasus perkawinan anak didominasi karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu (Kehamilan yang Tidak Diinginkan).

7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama. Tabel berikut menunjukkan cakupan pasangan Usia Subur (PUS)

Tabel 2.213 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th	Pasangan	122	122	105	197	96
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	42.147	40.258	38.951	33.878	34.301
3.	Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	0,29	0,30	0,27	0,58	0,28

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Apabila melihat tabel di atas, cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,29%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 0,30%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun menurun menjadi 0,27%. Hal ini dikarenakan adanya program pendewasaan usia perkawinan, adanya program PIK-R, dan gerakan orang tua sahabat remaja. Namun, di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,58%, dikarenakan terjadi peningkatan pernikahan usia dini. Akan tetapi, pada tahun 2021 persentase cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun kembali mengalami penurunan menjadi 0,28% yang menunjukkan bahwa KIE pendewasaan usia kawin makin berhasil.

8. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana, dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

Tabel 2.214 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda	Pasangan	5.790	6.095	3.654	3.202	3.825
2.	Jumlah pasangan usia subur	Pasangan	42.147	40.258	38.951	33.878	34.301
3.	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	13,74	15,14	9,38	9,45	11,15

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *unmet need* KB selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 *unmet need* KB sebesar 13,74%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 15,14%. Selanjutnya menurun kembali di tahun 2019, dan naik kembali menjadi 9,45% pada tahun 2020. Penurunan persentase *unmet need* disebabkan oleh

Sedangkan untuk kenaikan persentase *unmet need* dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perubahan dalam data dasar statistik rutin, usia PUS, kesadaran pria ber KB relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan wanita di kota Yogyakarta. Kemudian tahun 2021, jumlah pasangan usia subur kembali mengalami kenaikan yang diikuti dengan meningkatnya persentase *unmet need* menjadi sebesar 11,15%. Hal ini disebabkan karena PUS ber-KB pada tahun 2021 ada penambahan maupun pengurangan jumlah yang tersebar di beberapa kemantren.

9. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi.

Tabel 2.215 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MJKP	Pasangan	12.674	11.965	11.796	9.985	10.229
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	29.579	27.453	27.237	22.177	23.978
3.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42,85	43,58	43,31	45,02	42,66

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Catatan: MKJP terdiri atas IUD, MOP, MOW, Implan/Susuk

Tabel di atas menunjukkan kondisi lima tahun terakhir persentase penggunaan MKJP di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang sebesar 42.85%. Selanjutnya persentase MKJP terus meningkat hingga mencapai 43.58% pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh akseptor KB yang ingin segera memiliki anak, hamil atau sudah memasuki usia menopause. Selanjutnya, untuk tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Kota Yogyakarta kembali mengalami kenaikan. Namun, bila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MJKP, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 9.985 pasangan. Hal ini disebabkan karena jumlah PUS yang sudah *drop out* atau melebihi 49 tahun (sudah mengalami menopause), atau pasangan usia subur yang hamil dan melepas alat kontrasepsinya karena ingin memiliki anak. Selain itu, sebagian PUS menggunakan alat kontrasepsi tradisional. Namun, pada tahun 2021 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang kembali mengalami penurunan menjadi 42,66 yang disebabkan karena PUS pengguna MKJP berkurang karena ganti cara dan ada juga yang sudah *menopause*. Penambahan jumlah akseptor

10. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (*contraceptive discontinuation rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian *drop out* KB.

Tabel 2.216 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Pasangan	6.804	6.710	3.654	3.202	4.147
2.	Jumlah akseptor KB	Pasangan	29.579	27.453	27.237	22.177	23.978
3.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	23,00	24,44	13,42	14,44	17,30

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bersifat fluktuatif. Data tahun 2018 dan 2020 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dan menurunnya jumlah akseptor KB. Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi atau biasa disebut *drop out* (DO) dalam data di atas dapat dikarenakan menopause, sedang hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda, tidak ingin lagi memiliki anak ataupun alasan-alasan lainnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah *drop out* (DO) dalam data di atas adalah: $\{(Jumlah\ Peserta\ KB\ Aktif\ Tahun\ Lalu + Jumlah\ Peserta\ KB\ Baru\ Tahun\ Ini) - Jumlah\ Peserta\ KB\ Aktif\ Bulan\ ini\}$. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi kembali mengalami peningkatan menjadi 17,30% yang disebabkan angka PUS yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi lebih tinggi di tahun 2021 bisa disebabkan karena PUS yang di tahun kemarin ber-KB kemudian melepas KB-nya dikarenakan ingin menambah anak lagi/sedang dalam program hamil/sedang hamil.

11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan

Tabel 2.217 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang	5.036	4.619	4.470	3.980	3.952
2.	Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang	5.961	5.530	5.438	4.949	5.039
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	%	84,48	83,53	82,20	80,42	78,43

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, cakupan anggota bina BKB yang ber KB di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2021, yaitu dari 84,48% menjadi 78,43%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga ke dalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam statistik rutin sehingga terjadi penurunan capaian di wilayah yang melakukan integrasi data tersebut. Statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKB yang bersatus PUS. Selain itu, penyebab lainnya adalah anggota BKB adalah keluarga yang masih memiliki balita atau rata-rata keluarga anggota BKB adalah PUS Mupar (pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda). PUS MUPAR ada yang melepas KB dikarenakan PUS berkeinginan menambah anak. Sedangkan penurunan di tahun 2021 disebabkan karena di tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan tahun 2021 tidak masuk.

12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR. Kondisi cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Yogyakarta dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.218 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Orang	1.479	1.368	1.339	1.314	1.268
2.	Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS	Orang	1.822	1.834	1.733	1.709	1.640
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	%	81,17	74,59	77,26	76,89	77,32

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

2019, dan turun kembali di tahun 2020 hingga mencapai 76,89%. Penurunan jumlah ini terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu, anggota BKR dan BKL yang masih PUS cenderung merupakan PUS yang mendekati *menopause* dan tidak ingin punya anak lagi berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi modern. Alasan lainnya adalah anggota BKB merupakan keluarga yang masih memiliki balita atau rata-rata keluarga anggota BKB adalah PUS Mupar (pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda). Kemudian di tahun 2021, jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB mengalami penurunan menjadi 1.268 orang hal ini karena pada tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan di tahun 2021 tidak masuk dalam hitungan.

13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya. Di Kota Yogyakarta, cakupan anggota BKL ber-KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan persentase sebesar 85,88% menjadi 68,93% pada tahun 2019, selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 73,21% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 65,28% yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.219 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang	1.624	1.529	1.329	1.186	1.164
2.	Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS	Orang	1.891	1.937	1.928	1.620	1.783
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	%	85,88	78,94	68,93	73,21	65,28

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Penurunan pada tahun 2017-2019 ini terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah anggota BKR

Sedangkan untuk penurunan di tahun 2021 disebabkan karena di tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan tahun 2021 tidak masuk dalam hitungan.

14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan, maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di lingkup Kemantren seperti halnya puskesmas. Persentase PPKS dapat digunakan untuk melihat cakupan PPKS di suatu wilayah. Adapun data terkait jumlah unit Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kemantren sebagai berikut.

Tabel 2.220 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PPKS	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Kemantren	Wilayah	14	14	14	14	14
3.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren	%	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kota Yogyakarta hanya terdapat satu unit, yaitu Kemantren Mergangsan. Hal ini menyebabkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kemantren di Kota Yogyakarta cukup rendah, yaitu sebesar 7,14%.

15. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Tabel di bawah ini menunjukkan cakupan remaja PIK R/M per Kemantren/distrik selama kurun waktu lima tahun di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.221 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PIK R/M	Kelompok	51	51	55	53	53
2.	Jumlah Kemantren	Wilayah	14	14	14	14	14
3.	Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa	%	364,29	364,29	392,86	378,57	378,57

Tabel di atas menunjukkan cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2021. Secara umum, cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi 392,86%. Peningkatan jumlah PIK R/M disebabkan oleh beberapa wilayah yang membentuk forum PIK R setelah merasakan manfaat adanya kegiatan PIK R/M. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 persentase cakupan remaja dalam PIK remaja/mahasiswa mengalami penurunan menjadi 378,57%. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dari Kemantren Gondokusuman yang sudah tidak aktif lagi.

16. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan KB) pada awalnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi pengalihan status menjadi ASN Pemerintah Pusat. Pengalihan status PKB/PLKB ini merupakan konsekuensi pelaksanaan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski telah beralih kelola ke Pemerintah Pusat, PKB/PLKB akan tetap bertugas di daerah, karena fungsi pendayagunaan PKB/PLKB tetap ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.222 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan	Orang	20	18	18	22	22
2.	Jumlah PKB/PLKB	Orang	20	18	18	22	22
3.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk tahun 2017-2021 di Kota Yogyakarta. Secara umum, dapat dilihat bahwa cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah telah mencapai 100% dari tahun 2017–2021. Pada tahun 2018–2019 jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan menurun menjadi 18 orang jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan adanya PKB dan PLKB yang telah memasuki masa pensiun. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan jumlah PKB/PLKB, karena adanya penambahan 4 CPNS PKB yang mana pada tahun 2021 penambahan tersebut terdapat di Kemantren Jetis dan Kotagede.

17. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

Tabel 2.223 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Orang	1.890	1.706	1.613	1.389	966
2.	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	Orang	2.165	1.919	1.919	1.644	1.484
3.	Cakupan PUS Peserta KB UPPKS	%	87,30	88,90	84,05	84,49	65,09

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri di Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2021. Cakupan PUS peserta KB UPPKS mengalami fluktuasi. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 88,90%, sedangkan cakupan terendah terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 65,09%. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB dan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS dalam rentang tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mengalami penurunan dikarenakan adanya anggota kelompok yang sedang hamil atau yang ingin segera memiliki anak. Hal tersebut sama dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS juga mengalami penurunan karena alasan tersebut. Selain itu di tahun 2021 terdapat perbedaan cara pendataan PUS ber-KB dengan metode tradisional, yang sebelumnya masuk dalam hitungan sedangkan tahun 2021 tidak masuk.

18. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu, perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian, dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- a. Aspek demografis (jumlah kepala keluarga);
- b. Aspek wilayah teritorial (jumlah kampung/kelurahan); dan
- c. Aspek geografis (luas wilayah dan daerah kepulauan).

Tabel 2.224 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa	Orang	45	45	45	45	45
2.	Jumlah kelurahan	Wilayah	45	45	45	45	45
3.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan rasio PPKBD setiap kelurahan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun dari 2017 hingga 2021. Jumlah petugas pembantu pembina KB desa ada sejumlah 45 orang sejak tahun 2017 dan tidak berubah hingga tahun 2021. Rasio PPKBD di Kota Yogyakarta adalah 100%, artinya setiap kelurahan di Kota Yogyakarta sudah memiliki satu orang PPKBD.

19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) di daerah, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah dengan adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur. Melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi, diharapkan dapat menekan angka kelahiran di daerah tersebut.

Alat kontrasepsi merupakan pasokan dari pusat yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota. Sedangkan perkiraan permintaan masyarakat merupakan target yang harus dicapai oleh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peserta KB. Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi tidak selalu dapat dipenuhi karena alat kontrasepsi beserta pelayanan KB gratis lebih ditujukan untuk keluarga Pra KS dan KS 1. Harapannya keluarga sejahtera menjadi peserta KB mandiri. Peningkatan pasokan pusat untuk IUD sebagai upaya untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Pada tahun 2020, terjadi penurunan persentase ketersediaan alat kontrasepsi jika dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat, yaitu menjadi 23,30%. Hal ini dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi yang mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain banyak PUS yang mengalami *drop out* atau usia melebihi 49 tahun. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada cakupan ketersediaan menjadi 85,42%, tetapi dalam komponen jumlah alat kontrasepsi terjadi penurunan jumlah kondom jika dibandingkan tahun sebelumnya hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pada satuan kondom yang semula per unit menjadi gross (sesuai perhitungan dropping kondom) serta adanya penambahan ketersediaan alat kontrasepsi jenis suntikan dan susuk KB/implan.

Tabel 2.225 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator		Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah alkon per mix kontrasensi	IUD	Unit	1.608	2.236	2.681	523	543
		Kondom		58	251	205	1.858	153

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	gudang Alkon Kab/Kota	Total	12.944	6.179	10.778	7.064	14.088
2.	Perkiraan permintaan masyarakat	IUD	13.775	1.728	7.063	7.433	7.579
		Kondom	2.704	149	13.561	14.218	102
		Pil KB	3.192	2.315	2.309	2.342	2.384
		Suntikan	39.464	9.426	5.429	5.331	5.354
		Susuk KB/Implan	2.072	361	824	997	1.073
		Total	61.207	13.979	29.186	30.321	16.492
3.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	21,15	44,20	36,93	23,30	85,42

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

20. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dalam 4 (empat) tahun terakhir, yakni dari tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 91,80%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, yaitu sebanyak 56 faskes yang tersebar di 14 Kemantren, diantaranya Kemantren Kotagede sebanyak 7 faskes, Mergangsan 5 faskes, Mantrijeron 6 faskes, Gondomanan 3 faskes, Kraton 1 faskes, Ngampilan 3 faskes, Wirobrajan 2 faskes, Gedongtengen 1 faskes, Jetis 1 faskes, Gondokusuman 8 faskes, Pakualaman 1 faskes, Danurejan 4 faskes, Tegalrejo 4 faskes, dan Umbulharjo sebanyak 10 faskes. Sedangkan pada tahun 2021 persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS terjadi penurunan hal ini terjadi karena adanya beberapa faskes yang gulung tikar karena tidak bekerjasama dengan BPJS (kuota BPJS yang terbatas).

Tabel 2.226 Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	Unit	43	42	43	56	45
2.	Jumlah faskes dan jejaring	Unit	57	51	49	61	63
3.	Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS	%	75,44	82,35	87,76	91,80	71,43

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan pembangunan keluarga dilakukan melalui penguatan Delapan Fungsi Keluarga. Delapan Fungsi Keluarga yang dimaksud antara lain Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan.

Tabel 2.227 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	714	690	688	705	803
2.	Jumlah kelompok kegiatan	Kelompok	714	690	688	705	803
3.	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi 688 kelompok kegiatan. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 705. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kelompok kegiatan yang ada di wilayah, dengan rincian 242 kelompok BKB, 96 kelompok BKR, 131 kelompok BKL, 183 kelompok UPPKS, dan 53 kelompok PIK R/M yang dilaporkan. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 803 karena terdapat penambahan kelompok baru hasil dari kegiatan inisiasi pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK R).

Apabila dilihat dari cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui Delapan Fungsi Keluarga sudah mencapai 100%. Untuk mendukung pelaksanaan Delapan Fungsi Keluarga, Dinas P3AP2KB melaksanakan pembinaan melalui kelompok kegiatan BKS (Bina Keluarga Sejahtera), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dengan sasaran yang berbeda untuk masing-masing kelompok kegiatan. Penjabaran terkait masing-masing kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok BKS terdiri dari (a) Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anak balita sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lain terkait dengan tumbuh kembang anak; (b) Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap perilaku orangtua dan anggota keluarga lain sehingga terjalin hubungan yang harmonis;

skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB; dan

- c. Kelompok PIK R suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

22. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.228 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2021

No.	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	%	73,66	70,18	68,19	97,16	73,77	77,91	105,61	73,83	73,21	99,16	73,94	69,90	94,54
2	Total Fertility Rate (TFR)		1,92	2	1,24	138,00	2	1,22	139,00	2	1,21	139,50	2	1,06	147,00
3	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	%	11,4	13	15,13	83,62	11,28	9,38	116,84	11,12	9,45	115,78	11,16	11,15	100,09

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Berdasarkan data di atas, capaian indikator CPR belum mencapai 100%, sedangkan capaian 2 indikator lainnya yaitu TFR dan persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeetneed) sudah di atas 100%.

I. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Yogyakarta adalah data penumpang bis yang masuk Terminal Giwangan.

Tabel 2.229 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata
-----	-----------	--------	------	------	------	------	------	-----------------------

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata yaitu -29,54% per tahun. Penurunan jumlah penumpang bis pada tahun 2018–2019 karena banyaknya alat transportasi yang harganya bersaing dengan harga tiket bis dan juga semakin banyak kendaraan pribadi sebagai alternatifnya. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2020, akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum.

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.230 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1.938	1.756	1.591	1.003	1.207	-8.85

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung menurun, yaitu sebanyak 1.938 unit pada tahun 2017 menjadi 1.207 unit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata -8,85% per tahun.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta terjadi karena akumulasi dari berbagai faktor seperti mutasi kendaraan, perubahan angkutan umum menjadi angkutan pribadi, berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Yogyakarta akibat maraknya penggunaan angkutan online maupun berkurangnya kesadaran untuk melakukan uji KIR.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2020 terjadi karena di masa pandemi Covid-19 ini, UPT PKB sempat menghentikan kegiatan uji KIR dalam beberapa bulan. Selain itu, dalam menekan penyebaran Covid-19, maka dilakukan pembatasan jam dan jumlah kendaraan yang akan

3. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bus di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kemantren Umbulharjo.

Tabel 2.231 Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Terminal Bus	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Trans Jogja	Unit	34	50	69	69	69
3.	Jumlah Halte <i>Portable</i> Bus Trans Jogja	Unit	40	40	77	77	77
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Perhubungan DIY, 2022

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Di samping itu, juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bus Trans Jogja. Bus Trans Jogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjampakaikan ke Pemda DIY, sehingga semua halte sekarang dioperasikan oleh Provinsi. Selain halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte *portable* untuk bus Trans Jogja, di tahun 2017 jumlah halte *portable* untuk Trans Jogja sejumlah 40 unit dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 jumlah halte *portable* sejumlah 77 unit. Selain halte *portable*, jumlah halte permanen untuk Bus Trans Jogja di tahun 2017 sebanyak 34 unit, dan bertambah 16 unit di tahun 2018 sehingga total jumlah halte permanen mencapai 50 unit, kemudian di tahun 2019 halte bertambah 19 unit dengan total jumlah halte permanen saat ini mencapai 69 unit. Pada tahun 2020-2021, jumlah terminal bus, halte permanen Trans Jogja, halte *portable* bus Trans Jogja maupun Stasiun Kereta Api, tidak mengalami perubahan dari tahun 2019.

4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Tabel 2.232 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%)
----	-----------	--------	------	------	------	------	------	---------------------------

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
3	Persentase layanan angkutan darat	%	14,48	15,63	15,41	21,41	28,04	19,12

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat dari 14,48% pada tahun 2017 menjadi 28,04% di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,12% per tahun. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Yogyakarta menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi tidak mempengaruhi persentase layanan angkutan darat. Pada tahun 2021 persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan.

5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dua (karena setiap tahun satu angkutan umum uji KIR dua kali). Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomisili di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.233 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	2.244	1.991	1.794	1.173	894	-19,89
2	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	12.349	11.609	12.062	9.546	11.399	-0,88
3	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	18,17	17,15	14,87	12,29	7,84	-18,11

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelayakan, akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi tanda uji. Data jumlah angkutan yang memiliki KIR ini ialah data angkutan umum yang telah lulus uji KIR dan memiliki bukti lulus uji KIR

pertumbuhan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dengan pertumbuhan angkutan umum. Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -19,89% per tahun. Sedangkan peningkatan jumlah angkutan umum pada tahun 2019 terjadi karena adanya update data jumlah angkutan KTB di Kota Yogyakarta. Penurunan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum pada tahun 2020–2021 terjadi karena adanya penutupan UPT PKB dalam beberapa bulan untuk menekan penyebaran Covid-19, selain itu karena adanya pemberlakuan pembatasan kendaraan yang akan uji KIR.

6. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan nilai yang cenderung mengalami peningkatan, yakni sebesar 86,85% pada tahun 2017 meningkat menjadi 92,71% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,65% per tahun.

Tabel 2.234 Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah Rambu-rambu Terpasang	Unit	6.103	6.210	6.415	6.515	6.515	1,65
2.	Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia	Unit	7.027	7.027	7.027	7.027	7.027	0,00
3.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	86,85	88,37	91,29	92,71	92,71	1,65

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah Rambu-rambu yang terpasang mengalami kenaikan karena terdapat pemasangan rambu lalu lintas baru dalam rangka mendukung penerapan manajemen rekayasa lalu lintas. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

7. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan

Tabel 2.235 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Panjang Jalan	Km	233,21	233,21	233,21	233,21	233,21	0,00
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	279.562	289.480	305.565	291.978	288.360	0,82
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	km/unit	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	-0,73

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Kantor Samsat Kota Yogyakarta, 2022

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,82% per tahun, yakni 279.562 unit kendaraan pada tahun 2017 meningkat menjadi 305.565 unit kendaraan pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kendaraan, menjadi 291.978 unit. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Yogyakarta. Jumlah kendaraan di kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebanyak 288.360 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 3.618 kendaraan dibanding tahun 2020. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19.

Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yakni sepanjang 233,21 pada tahun 2017-2021.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan dengan tidak diiringi dengan penambahan luas atau lebar jalan tentunya akan semakin membuat kemacetan semakin parah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

8. Jumlah Orang dan Barang Melalui Terminal dan Stasiun per Tahun

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (*cargo*).

Tabel 2.236 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa	3.713.458	3.054.948	3.025.127	1.214.302	733.727	-29,69

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

bus, bukan dari penumpang yang masuk dan membayar retribusi peron. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021.

Selain itu, terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan yang berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) VI. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sementara itu, Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta apinya yang membujur dari barat ke timur, berada di wilayah Kemantren Danurejan. Stasiun Lempuyangan ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bus bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta, didukung dengan tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta yang selalu habis (*sold out*) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

Tabel 2.237 Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah penumpang kelas eksekutif	Orang	1.341.506	1.528.101	1.369.642	506.496	587.520	-10,87
2.	Jumlah penumpang kelas bisnis	Orang	692.223	583.273	230.557	82.857	30.109	-50,98
3.	Jumlah penumpang kelas ekonomi	Orang	6.551.363	3.439.294	4.060.647	1.088.716	775.880	-32,84
4.	Total penumpang melalui stasiun	Orang	8.585.092	5.550.668	5.660.846	1.678.069	1.393.509	-30,17

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2022

Jumlah penumpang Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5.550.668 penumpang kemudian naik kembali pada tahun 2019

masyarakat menjadi berkurang serta adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat, sehingga total penumpang yang melalui stasiun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -30,17% per tahun.

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 226.218 ton. Kemudian meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 246.503 ton. Sementara itu, jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun juga mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2017 sebanyak 12.174 ton meningkat menjadi 15.254 ton di tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 menurun, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2021 hingga menjadi 8.453 ton di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata total angkutan barang melalui Stasiun Kereta Api sebesar -2,25% per tahun.

Volume angkutan barang bahan bakar minyak melalui stasiun di Kota Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2020 keluar dari tren meningkat selama tahun 2016-2018, hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19, PO BBM dari Madiun yang mengalami penurunan. Sedangkan barang hantaran mengalami kenaikan di tahun 2020 ini didukung dengan adanya pola bisnis menjadi *Rail Express*.

Tabel 2.238 Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun)
1.	Bahan bakar minyak	Ton	275.882	300.911	256.188	226.218	246.503	-2,13
2.	Barang hantaran potongan	Ton	12.174	15.254	3.826	6.973	8.435	13,40
3.	Total angkutan barang melalui stasiun	Ton	288.056	316.165	260.014	233.191	254.938	-2,25

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2022

9. Kinerja jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

Tabel 2.239 Kinerja Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kinerja jalan (V/C atau VCR)	0,7216	0,7216	0,719	0,43	0,53

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 kinerja jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena terjadi pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat walaupun masih dalam pandemic COVID – 19. Pada tabel di bawah ini disajikan data rata – rata kecepatan jalan di jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.

Tabel 2.240 Rata-rata Kecepatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Fungsi Jalan	Satuan	Rata-Rata Kecepatan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jalan arteri sekunder	km/jam	27,10	25,00	30,57	33,35	27,19
2	Jalan kolektor sekunder	km/jam	25,76	23,50	26,23	34,02	27,22
3	Jalan lokal	km/jam	26,44	24,00	26,31	34,18	25,78

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Namun demikian, peningkatan kinerja jalan tetap dilakukan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa jalan di Kota Yogyakarta. Manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan antara lain memberlakukan sistem satu arah Jl. C. Simanjuntak dan Jl. Prof. Herman Yohannes. Penataan gyratory pada kawasan Malioboro juga turut dilakukan dengan memberlakukan sistem satu arah pada Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Pasar Kembang, Jl. Letjen Suprpto dan Jl. Letjen Suprpto. Selain itu dilakukan peningkatan Jembatan Gembiraloka turut mengurai masalah kepadatan kawasan tersebut yang sebelumnya terjadi. Serta mulai tahun 2012 dilakukan pula pengaturan simpang melalui ATCS yang sudah terpasang pada 23 simpang dari total 50 simpang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Masih ada titik simpang dengan kinerja rendah diantaranya:

- a. Simpang Pingit karena waktu tunggu lama, *over capacity* dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam kota Yogyakarta dari arah Barat dan Utara; dan
- b. Simpang Demangan disebabkan optimasi kapasitas simpang masih kurang (pengaturan lampu APILL oleh DIY) dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam kota Yogyakarta dari arah Timur dan Utara.

Selain itu, kelancaran lalu lintas di dalam kota, erat kaitannya dengan penyediaan sarana parkir. Dengan potensi daya tarik pariwisata dan banyaknya kegiatan perekonomian yang membangkitkan perjalanan di Kota Yogyakarta membutuhkan ketersediaan ruang parkir yang mencukupi. Ketersediaan ruang parkir baik oleh pemerintah ataupun swasta saat ini masih dirasa kurang sehingga masih sering terjadi pelanggaran parkir dan berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan ketersediaan ruang parkir ini. Antara lain ada dengan manajemen perparkiran, optimalisasi tempat khusus parkir yang ada serta melakukan kajian pengembangan TKP Ngabean. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan penindakan terhadap juru parkir serta operasi penegakkan peraturan perparkiran.

Tabel 2.241 Data Tempat Khusus Parkir (TKP) yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Nama	Ruas Jalan	Kapabilitas		
			Bus	Mobil	Motor
2.	Ngabean	Wahid Hasyim	30	30	-
3.	Sriwedani	Panembahan Senopati	-	50	150
4.	Abu Bakar Ali	Abu Bakar Ali	15	-	-
5.	Malioboro II	Ahmad Yani dan Pabringan	0	115	250
6.	Limaran	Mayor Suryotomo	-	-	50
Total			75	215	450

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

J. Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang ter-coverage dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di Kota Yogyakarta terkait layanan telekomunikasi. Data terkait layanan telekomunikasi didapatkan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Yogyakarta.

Tabel 2.242 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Wilayah Yang Ter-coverage	Km	37,51	35,75	35,75	35,75	35,75
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km	32,50	32,5	32,5	32,5	32,8
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		1,15	1,10	1,10	1,10	1,09

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data pada tahun 2018 – 2020 angka cakupan layanan telekomunikasi di Kota Yogyakarta adalah 1,10 dan menurun menjadi 1,09 di tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan luas wilayah keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Hal tersebut terlihat dari lebih luasnya cakupan yang ter-coverage dibandingkan luasan wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri. Dalam hal ini, luas wilayah yang ter-coverage adalah data luas wilayah yang telah ter-coverage dengan layanan provider telekomunikasi, bukan data telekomunikasi dengan layanan fiber optik.

Tabel 2.243 Ruang Publik yang terpasang Free Wifi dan Free CCTV

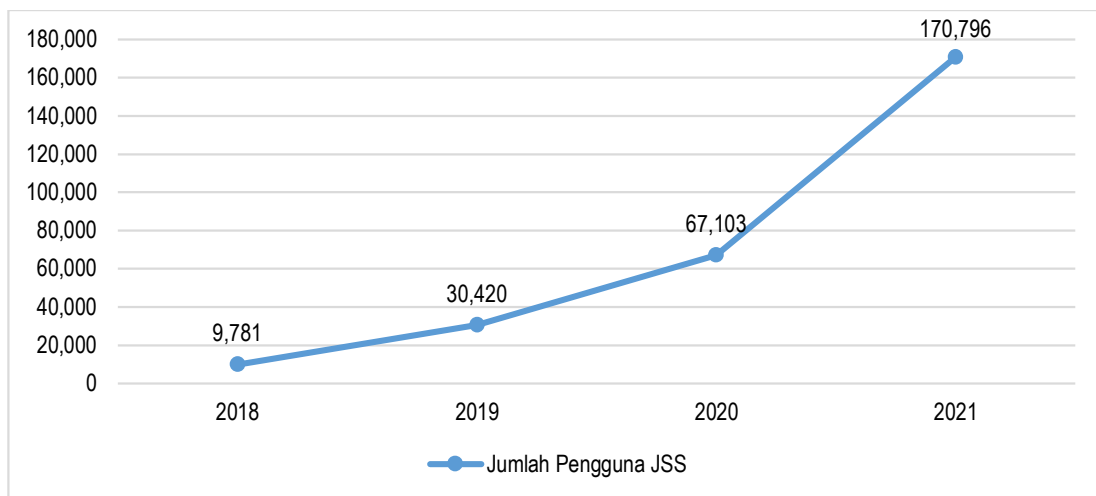
No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ruang Publik yang terpasang Free Wifi	Titik	40	73	98	253	527
2.	Ruang Publik yang terpasang Free CCTV	Titik	25	32	42	45	84

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pemasangan free wifi di 527 ruang publik. Pemasangan free wifi juga didukung oleh CSR dari perusahaan swasta. Terjadi peningkatan pemasangan free wifi secara signifikan di tahun 2020 dan 2021 untuk mendukung aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan secara daring dikarenakan efek dari pandemi Covid-19. Sedangkan free cctv

2. Penggunaan Aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)*

Jogja Smart Service merupakan inovasi tata kelola Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan basis Single ID, Single Window, Single Sign On. Prinsip dari aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* adalah mengumpulkan semua aplikasi ke dalam satu wadah, dengan menggunakan satu credential, dan hanya memerlukan satu kali log in untuk dapat masuk ke semua aplikasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna. Di dalam JSS, sudah tersedia cukup banyak layanan yang dapat diakses publik, seperti layanan administrasi kependudukan, kepengurusan dokumen perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, sampai dengan layanan pengaduan atau kedaruratan yang dapat dilaporkan oleh masyarakat secara cepat dan langsung terkoneksi dengan OPD yang bersangkutan untuk dilakukan penanganan.



Gambar 2.17 Jumlah Pengguna *Jogja Smart Service (JSS)* Tahun 2018-2021

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

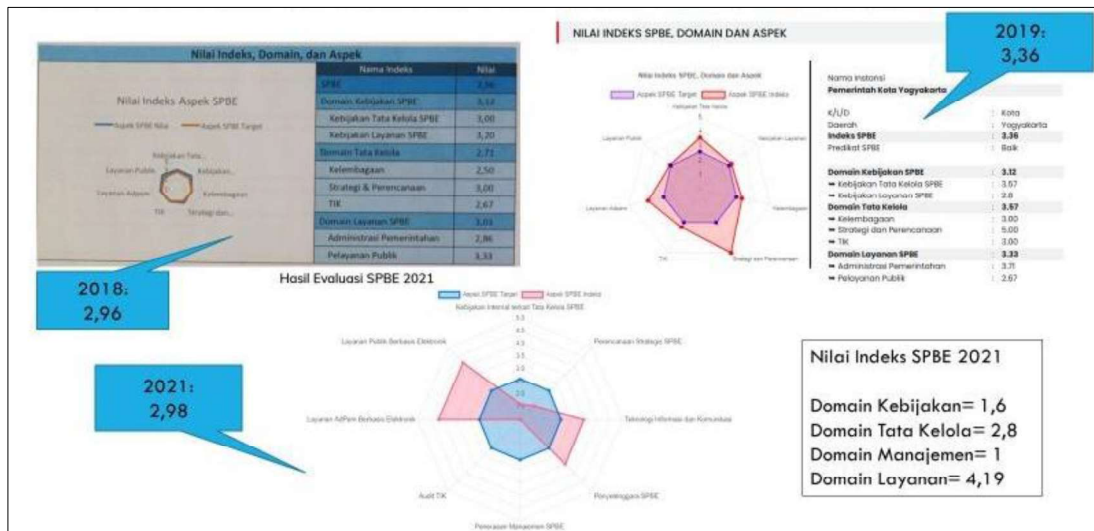
User atau pengguna aplikasi JSS setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2021, jumlah pengguna yang sudah memiliki akun pada aplikasi JSS ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 170.796 user. Hal ini mengindikasikan aplikasi JSS ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik secara daring terutama saat masa pandemi Covid-19 ini.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan



Gambar 2.18 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 masuk dalam kategori baik. Tahun 2020, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta tidak dilakukan karena penilaian yang dilakukan khusus untuk luar wilayah Pulau Jawa. Selanjutnya pada tahun 2021, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta juga menunjukkan kategori baik dengan nilai domain kebijakan SPBE sebesar 1,6; domain tata kelola 2,8; domain manajemen sebesar 1; dan domain layanan SPBE sebesar 4,19. Terkait penilaian ini, Pemerintah Kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta telah menganalisa dan menyusun strategi untuk mencapai nilai indeks SPBE diatas 3 pada tahun yang akan datang.

Tabel 2.244 Analisis Hasil Evaluasi SPBE 2021

Hasil Penilaian SPBE 2021	Penjelasan Mengapa Mendapat Nilai Tersebut	Langkah untuk Mencapai Nilai Minimal 3
1,6	Kebijakan terkait Tata Kelola SPBE belum ada, atau Konsep tersedia tetapi belum disahkan menjadi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengesahkan kebijakan yang memuat seluruh indikator-indikator pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE. 2) Ruang lingkup sesuai dengan persyaratan pada level 3. Ruang lingkup yang dimaksud adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan referensi arsitektur, muatan rencana, cakupan peta rencana SPBE • Sebagian atau keseluruhan dari rangkaian proses pengelolaan data • Wewenang konsultasi pembangunan aplikasi • Keseluruhan OPD yang terlibat dalam aspek kebijakan SPBE • Rincian tugas dan wewenang Tim Koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh OPD

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 2.245 Sustainable Development Goals (SDGs) Indeks Layanan Informasi Publik Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Indeks Layanan Informasi Publik	61,98	67,24	67,45	100,31	72,21	75,18	104,11	74,00	82,96	112,11	87,91	89,10	101,35

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T= Target; R = Realisasi; C = Capaian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indeks layanan informasi publik dari tahun 2018-2021 sudah diatas 100%.

K. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 2.246 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit	454	364	364	364	364	-4,96
2	Jumlah Seluruh Koperasi	unit	557	364	364	364	364	-8,66
3	Persentase Koperasi Aktif	%	81,51	100,00	100,00	100,00	100,00	5,67

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang menurun. Dari 454 unit koperasi aktif di tahun 2017, turun menjadi 364 unit koperasi aktif pada tahun 2018. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tahun 2019-2021, jumlah koperasi masih sama seperti tahun 2018, yaitu 364. Hal ini pun mempengaruhi rata-rata pertumbuhan persentase koperasi aktif yang mencapai angka 5,67%. Kelompok Pra-Koperasi yang dibina belum siap untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi berbadan hukum, sehingga tidak ada penambahan jumlah Koperasi hingga tahun 2021 ini.

mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami penurunan selama tahun 2017-2021. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

Tabel 2.247 Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit	15	10	10	10	10	-8,33
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit	14	14	14	14	14	0,00
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit	47	38	33	33	33	-8,08
Jumlah		Unit	76	62	57	57	57	-6,62

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami penurunan dari tahun 2017-2021. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.248 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	23.175	23.586	25.385	14.654	18.402	-1,82
Jumlah seluruh UKM	unit	23.987	24.398	26.196	14.654	18.402	-2,35
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,61	96,67	96,90	100	100	0,87

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu mencapai 25.385 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/*craft*, dan jasa). Namun, pada tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan menjadi 14.654 unit hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha mikro dan kecil menjadi berkurang. Selain penurunan jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah seluruh UKM pun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 14.654. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro dan kecil dan jumlah seluruh UKM mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya pembukaan pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 dan 2022 bagi para pelaku UMKM yang mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB). BPUM merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi dan UKM untuk memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Kemenkop UKM memberikan bantuan BPUM hanya untuk pelaku usaha mikro dengan tujuan supaya tetap bertahan di situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Pelaku UKM dapat mendaftarkan diri menjadi penerima BPUM ke Dinas Koperasi dan UMKM sesuai domisili dengan membawa berkas yang disyaratkan yang meliputi KTP, KK, SKU atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

4. Nilai Omset UKM yang Dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2019 – 2021 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.249 Sustainable Development Goals (SDGs) Nilai Omset UKM yang Dibina Tahun 2019-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	6,048 M	6,731 M	7,368 M	109,47	2,300 M	3,795 M	164,97	4,969 M	5,103 M	102,68

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan

Tabel 2.250 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Investor PMA	Unit	72	20	12	3	3	-46,81
2	Investor PMDN	Unit	132	640	1.702	673	4.904	279,75
	Total	Unit	204	660	1.714	676	4.907	237,14

Sumber: DPMPSTSP Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah Investor PMA di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami penurunan signifikan hingga menjadi 3 unit saja di tahun 2020–2021. Sedangkan jumlah Investor PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hingga mencapai 1.702 unit di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 673 unit. Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 4.907 unit. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 1.714 unit pada tahun 2019 dan 4.907 unit pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan total investor menjadi 676 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dilihat dari kontribusinya, investasi PMA memberikan kontribusi lebih besar seiring dengan lebih banyaknya unit investor PMA atas PMDN. Sepanjang kurun tahun 2017 sampai dengan 2019, nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 322,28%.

Pada tahun 2017, investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta sebesar 2.034.257,53 juta rupiah dengan rincian 768.305,8 juta rupiah PMA dan 1.265.951,73 juta rupiah PMDN. Sedang di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.453.822,51 juta rupiah dengan rincian 355.902,1 juta rupiah PMA dan 1.097.920,41 juta rupiah PMDN. Penurunan tersebut karena perubahan sistem perizinan berusaha dari semula SPIPISE menjadi OSS di bulan juli 2018 menyebabkan belum semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya (mengajukan izin usaha) melalui OSS. Kemudian dengan adanya kebijakan OSS tersebut pada tahun 2019 nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 21.993.757,29 juta rupiah dengan rincian 957.680,24 PMA dan 21.036.077,05 juta rupiah PMDN hal ini didukung oleh proses pengurusan izin yang dipermudah.

Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 243.232,32 juta rupiah dengan rincian 11.373,12 juta rupiah PMA dan 231.859,20 juta rupiah PMDN. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan

rupiah dengan rincian 131.228,02 juta rupiah PMA dan 121.048,07 juta rupiah PMDN. karena kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan pelaporan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semakin meningkat.

Tabel 2.251 Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Perusahaan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	PMA	Juta Rp	768.305,8	355.902,1	957.680,24	11.373,12	131.228,02	267,61
2	PMDN	Juta Rp	1.265.951,73	1.097.920,41	21.036.077,05	231.859,20	121.048,07	414,01
	Total	Juta Rp	2.034.257,53	1.453.822,51	21.993.757,29	243.232,32	252.276,09	322,28

Sumber: DPMPTSP Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Persentase realisasi investasi menjadi salah satu indikator SDGs dengan data capaian seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.252 Sustainable Development Goals (SDGs) Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Persentase realisasi investasi	8,75	80	82,81	103,51	82,50	87,10	105,58	86,02	69,22	80,47	87,66	87,66	100,00

Sumber: DPMPTSP Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Capaian realisasi investasi pada tahun 2018-2019 sudah lebih dari 100%, namun di tahun 2020, capaiannya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Namun pada tahun 2021, capaian realisasi investasi kembali menjadi 100%.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja.

Tabel 2.253 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Penanam Modal Asing (PMA)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	223	1.225	764	12	19
2	Perusahaan	Unit	7	20	12	3	3
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		31,86	61,25	63,67	4,00	6,33
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	651	5.745	23.546	4.053	8.774

Pada tahun 2017, 7 unit PMA yang datang ke Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 223 orang. Sedangkan PMDN yang berjumlah 17 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 651 orang. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa PMDN lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan rasio 38,29 tenaga kerja/unit. Sedangkan PMA hanya mampu menyerap tenaga kerja dengan rasio 31,86 tenaga kerja/unit.

Pada tahun 2018, terdapat 20 unit PMA yang datang ke Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225 orang, sedangkan PMDN yang berjumlah 282 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.745 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Namun menurun kembali dari 2019 hingga tahun 2020. Di tahun 2020 terdapat 3 unit PMA di Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 orang dan 673 unit PMDN dengan daya serap sebesar 4.053 tenaga kerja di Yogyakarta, dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 mencapai 10,02 jiwa/unit.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dari jumlah perusahaan maupun penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara. Sedangkan di tahun 2021 jumlah perusahaan PMDN dan jumlah tenaga kerja PMDN mengalami peningkatan hanya saja daya serap dari jumlah perusahaan terhadap pencari kerja masih kurang.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.254 Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun)
1.	Jumlah organisasi pemuda aktif	Organisasi	26	28	30	32	36	8,5
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Organisasi	30	30	30	39	39	7,5
3.	Persentase organisasi	%	86.67	93.33	100.00	82.05	92.31	2,35

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 sebesar 86,67%. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2019. Peningkatan jumlah organisasi pemuda disebabkan oleh bertambahnya minat pemuda untuk berorganisasi. Organisasi pemuda yang dimaksud dalam data di atas adalah organisasi pemuda yang bermitra langsung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Organisasi tersebut diantaranya adalah organisasi berbasis agama, karang taruna tingkat Kota Yogyakarta, dsb. Terdapat penambahan jumlah organisasi pemuda pada tahun 2020 sebanyak 2 organisasi, diantaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Kwartir Pramuka. Namun, akibat dampak Covid-19, di tahun 2020 belum dapat melaksanakan pembinaan secara maksimal pada seluruh organisasi pemuda di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah organisasi pemuda aktif, yaitu Insan Muda Cerdas (IMC), Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Pemuda Wilayah, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

2. Wirausaha Muda

Wirausaha adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu kota. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Berikut adalah data terkait jumlah wirausaha muda di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.255 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah wirausaha muda	Jiwa	129	129	150	150	180
2	Jumlah seluruh wirausaha	jiwa	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
3	Persentase wirausaha muda	%	6,20	6,20	7,21	7,21	8,65

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah wirausaha muda pada tahun 2017 dan 2018 adalah 129 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 150 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang. Peningkatan keberadaan wirausahawan muda ini diiringi dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi dan trend belanja *online*, seperti halnya dalam melakukan pemasaran sangat terbantu dengan adanya media sosial tanpa harus memiliki toko secara fisik, sehingga dalam proses pemasaran dan pelayanan konsumen dapat lebih efisien. Selain itu, juga banyak diselenggarakan pelatihan wirausaha bagi wirausaha muda. Wirausaha muda yang dimaksud di sini adalah wirausahawan yang berumur 16–30 tahun dan memiliki kemitraan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, tidak ada penambahan jumlah wirausaha muda, hal ini karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada terhambatnya kegiatan masyarakat. Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah wirausaha muda menjadi 180 orang dengan persentase wirausaha muda sebesar 8,65% karena semakin banyak pemuda yang ingin berwirausaha setelah mengikuti pelatihan maupun bimtek.

3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.256 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Unit	34	36	41	41	41
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Unit	34	36	41	41	41
3	Persentase cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 34. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 36 dan meningkat kembali menjadi 41 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat penambahan lima cabang olahraga yang dibina, yaitu berkuda, *softball*, *baseball*, *rugby* dan *soft tenis*. Pada tahun 2020–2021 tidak ada penambahan cabang olahraga yang dibina. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta sudah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar sudah terbina dengan baik.

4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.257 Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	Jiwa	56	56	154	154	154
2	Jumlah seluruh pelatih	jiwa	144	144	218	218	257
3	Persentase cakupan pelatih bersertifikasi	%	38,89	38,89	70,64	70,64	59,92

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase cakupan pelatih yang memiliki sertifikat tahun 2017-2018, yaitu hanya sebesar 38,89%. Rendahnya nilai cakupan disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan kesempatan bagi tiap daerah, tiap cabang olahraga untuk mengurus sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase cakupan pelatih bersertifikat meningkat menjadi 70,64%. Peningkatan tersebut disebabkan para pelatih mengikuti pelatihan/sertifikasi secara mandiri. Pada tahun 2020, belum dilakukan pendataan kembali karena adanya pandemi Covid-19, sehingga jumlah pelatih bersertifikasi masih sama dengan tahun 2019, yaitu 154 jiwa dengan

5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar. Kota Yogyakarta pada tahun 2017 memiliki atlet pelajar sebanyak 230 orang, dan 180 diantaranya adalah atlet yang dibina. Data tersebut meningkat di tahun 2018 yaitu dengan jumlah atlet pelajar 250 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 191 orang. Selanjutnya angka tersebut meningkat kembali di tahun 2019, yaitu dengan jumlah atlet pelajar 349 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 240 orang. Apabila dilihat dari persentase cakupan pembinaan atlet muda dalam kurun waktu tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan, yaitu dari 78,26 di tahun 2017 menjadi 68,77 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020–2021, persentase cakupan pembinaan atlet muda kembali meningkat menjadi 100% dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 338 jiwa di tahun 2020 dan 102 jiwa di tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah atlet pelajar terdiri dari siswa Kelas Khusus Olahraga SMP Negeri 13 Yogyakarta, hal ini disebabkan pada tahun 2021 tidak ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY maka tidak ada pembentukan kontingen dan pelatihan atlet pelajar yang akan bertanding di POPDA.

Tabel 2.258 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Jiwa	180	191	240	338	102
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	jiwa	230	250	349	338	102
3	Persentase cakupan pembinaan atlet muda	%	78,26	76,40	68,77	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pemerintah sangat memperhatikan potensi-potensi atlet muda untuk dibina melalui sentra-sentra pembinaan seperti kelas khusus olahraga, pemusatan latihan atlet Kota Yogyakarta serta pusat pembuatan minat bakat istimewa khusus anak-anak SD.

6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tahun tertentu. Pada tahun 2017, sebanyak 29 atlet berhasil menorehkan prestasi. Sebanyak 23 atlet memperoleh prestasi saat POPNAS dan 6 atlet berprestasi saat ajang SEA Games dan ASEAN Para Games. Di tahun 2018 yang masuk catatan atlet berprestasi sebanyak 33 orang, penambahan data ini merupakan akumulasi dari tahun 2017 dengan penambahan 4 orang atlet berprestasi pada kejuaraan Asian Para Games yang berasal dari cabang olahraga catur, voli pasir, dan panjat dinding. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah atlet yang memenangi kejuaran tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun mencapai 36 orang. Pada tahun 2019 atlet-atlet di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan prestasi baik di ajang Kejurnas Cabor, POPNAS, POMNAS, OOSN Nasional maupun *event-event* internasional yang diikuti. Namun, pada tahun 2020-2021 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan atau

Tabel 2.259 Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jiwa	29	33	36	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Pada tahun 2017 terdapat 15 kejuaraan bidang olahraga yang dimenangkan oleh atlet yang berasal dari Kota Yogyakarta. Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan di tingkat nasional adalah 11 cabang olahraga dan tingkat internasional sebanyak 4 cabang olahraga. Pada tahun 2018 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan ada 16 kejuaraan. Selanjutnya jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun menurun menjadi 9 kejuaraan. Hal ini disebabkan tingkat persaingan di semua cabang olahraga semakin kompetitif dan semakin ketat. Namun, pada tahun 2020-2021 karena adanya pandemi Covid-19 ini sehingga tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan atau diikuti.

Tabel 2.260 Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Kejuaraan	15	16	9	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

N. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat diinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

Tabel 2.261 Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buku Kota dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kota	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Untuk mengolah data statistik, diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku "Kota dalam Angka" dan buku "PDRB Kota". Untuk buku "Kota dalam Angka"

Pemerintah Kota bekerjasama dengan pihak ketiga dan melibatkan BPS dalam proses penyusunan dokumennya.

O. Persandian

1. Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Tabel 2.262 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	51	51	51	51	50
2.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	51	51	51	51	50
3.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sudah mencapai 100%. Mulai tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga jumlah Perangkat Daerah berubah menjadi 50.

Sampai dengan tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki Sandiman sebanyak 5 orang, 4 diantaranya sudah berkualifikasi Ahli Sandi. Pada tahun 2021 semua kasus pengamanan informasi berhasil ditangani yang terdiri dari 35 kasus filterisasi, 6 kasus sterilisasi, dan 28 kasus penetrasi jaringan.

Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian kinerja 100% di tahun 2018 – 2021.

P. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni

diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.263 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari	54	54	111	32	41

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 dan 2018 jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sebanyak 54 hari di tahun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 111 hari pertunjukan seni dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya kegiatan seni dan budaya yang mendapat anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

Tahun 2020, merupakan awal Pandemi Covid-19 sedangkan anggaran kegiatan disusun masih berdasarkan kondisi normal. Hal ini menyebabkan kegiatan Seni Budaya tahun 2020 baru dapat dilaksanakan setelah perubahan anggaran ditetapkan. Sehingga penyelenggaraan pertunjukan (Festival Seni Budaya) menjadi turun sebesar 32 hari. Penurunan penyelenggaraan pertunjukan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan konsep kegiatan yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Perubahan konsep yang dimaksud, mempengaruhi dokumen perencanaan yang mengalami perubahan mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan, sehingga berbagai kegiatan yang ditujukan ke wilayah juga menjadi terbatas. Dampak dari Covid-19 inipun menyebabkan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda.

Pada tahun 2021 konsep kegiatan dari awal sudah dirancang dengan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun dengan metode hybrid (luring dan daring). Pertunjukan (festival) seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 diantaranya:

- a. Sosialisasi nilai sejarah dengan tema "Serangan Umum 1 Maret" dan "Peristiwa Geger Sepoy" secara daring;
- b. Gelar Macapat 4 kali di nDalem Ngabean 4-7 Oktober 2021;
- c. Festival Sastra Yogyakarta 1 even, 1-5 Desember 2021 secara daring (youtube);
- d. Gelar Seni RKB melibatkan 21 RKB bertempat di Panggung Ramayana Ballet Purawisata Yogyakarta pada 27-28 Oktober 2021;
- e. Parade Musik RKB melibatkan 21 RKB di TBY 20-21 November 2021;
- f. Gelar Seni FKY 1 even meliputi pentas secara daring dan pameran 1-3 Oktober 2021;
- g. Jogja Cross Culture 1 event di Taman Budaya (daring) 26-27 September 2021;
- h. Pengiriman Festival Tingkat DIY 5 jenis, yaitu Festival Karawitan Putri Tingkat DIY 26 Juni

- i. Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY 1 event 30 Juni 2021;
- j. Gelar Upacara Adat 7 event di GOR Amongrogo 30 Juni 2021;
- k. Pagelaran Wayang 2 kali pada 6 dan 8 Desember 2021;
- l. Pengiriman pada Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY 2 kali pada 4 dan 6 Oktober 2021;
- m. Perayaan WBTB Kota Yogyakarta (RUMAKET) 1 kali di Museum Sonobudoyo pada 26-27 September 2021;
- n. Festival Jogja Kota 1 event di Taman Budaya Embung Giwangan Kota Yogyakarta di 6-7 November 2021;
- o. Pentas Godhong Apa-apa 5 kali, yaitu Pentas Seni Wayang Purwo saat Vaksinasi pada 14 September 2021, Event Jogja Membatik Dunia, Musik Keroncong, Srawung Kampung 20 Desember 2021.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Tabel 2.264 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	225	157	157	157	195
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki	Unit	181	157	157	157	195
3.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	124,31	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perbedaan landasan hukum dalam menentukan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Landasan hukum yang digunakan sebelum tahun 2017 adalah SK Walikota Yogyakarta Tahun 2009 Tentang Warisan Budaya. Pendataan di tahun-tahun tersebut hanya bersifat menginventarisasi saja sehingga semua bangunan lama dimasukkan, padahal banyak dari bangunan tersebut yang identitas kepemilikannya tidak jelas dan tidak disertai dengan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, semenjak tahun 2017 dilakukan verifikasi melalui kajian dengan landasan hukum yaitu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pada tahun 2017 terdapat 225 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, 181 diantaranya adalah BCB (Benda Cagar Budaya) dan 44 merupakan BWB (Benda Warisan Budaya). Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan pendataan kembali sehingga jumlah

Kemudian pada tahun 2021 terbit Keputusan Walikota Yogyakarta yang baru terkait Cagar budaya, yaitu:

- a. Keputusan Walikota Yogyakarta No 383 Tahun 2021 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kota Yogyakarta;
- b. Keputusan Walikota Yogyakarta No 501 Tahun 2021 tentang Penetapan Tembok Jebol Peninggalan Pangeran Diponegoro dan Tugu Jam Margo Mulyo sebagai Struktur Cagar Budaya;
- c. Keputusan Walikota Yogyakarta No 303 Tahun 2021 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta; dan
- d. Keputusan Walikota Yogyakarta No 502 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Peninggalan Pangeran Diponegoro sebagai Situs Cagar Budaya.

Dampaknya terjadi penambahan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan menjadi 195 unit di tahun 2021 dengan rincian 165 Bangunan Cagar Budaya, 15 Situs Cagar Budaya, 11 Struktur Cagar Budaya dan 4 Kawasan Cagar Budaya.

3. Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif

Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif menjadi salah satu indikator SDGs dengan data capaian seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.265 Sustainable Development Goals (SDGs) Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	%	44	50	55,50	111,00	56	60,00	107,14	61	61,90	101,48	68,18	70,83	103,89

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: T=Target; R=Realisasi; C=Capaian

Capaian realisasi Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif pada tahun 2018-2021 sudah lebih dari 100% dengan kategori predikat Sangat Tinggi.

Q. Perpustakaan

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau

Tabel 2.266 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Kunjungan	238.283	312.394	506.763	256.476	337.069
2	Jumlah populasi yang harus dilayani	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan		0,56	0,73	1,22	0,69	0,90

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2018 yang kemudian diikuti pula dengan kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2019. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.

Namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020 ini dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19, sehingga perpustakaan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan diantaranya dengan pembatasan kuota pengunjung, penyesuaian jam layanan, hingga pengurangan titik layanan perpustakaan keliling mengingat ada beberapa wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan melakukan layanan di wilayah tersebut. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan jam layanan dan meningkatnya akses terhadap layanan digital.

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2.267 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	21.024	22.541	36.910	35.220	35.962
2	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	34.710	42.002	52.425	43.247	46.443
3	Koleksi Buku yang Tersedia di		0,61	0,54	0,70	0,81	0,77

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Pada tahun 2020 pihak perpustakaan melakukan pendataan *stock opname*, sehingga hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah buku hingga 9.178 eksemplar. Hasil dari pendataan menunjukkan penurunan jumlah buku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terjadi kerusakan berat pada buku, dan hilangnya buku atau buku belum dikembalikan dalam kurun waktu 2019-2020, untuk selanjutnya perpustakaan akan melakukan pengusulan dalam penghapusan aset yang masuk dalam daftar *stock opname* tersebut. Pada tahun 2021 jumlah judul dan jumlah eksemplar buku yang tersedia meningkat karena adanya pengadaan rutin tahunan, bulanan, maupun buku sumbangan.

3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.268 Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan	unit	477	358	346	347	347
2	Jumlah Penduduk	jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3	Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk		11,28	8,37	8,36	9,29	9,22

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2017-2020, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 11,28 menjadi 8,36. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Pada tahun 2020 ada kegiatan pengembangan gemar membaca masyarakat yang diwujudkan melalui pembentukan kampung baca di wilayah Kota Yogyakarta. Tahun 2020 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan menjadi 9,29, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 9,22 karena penambahan jumlah

4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 307.355 jiwa pengunjung.

Tabel 2.269 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah pengunjung	Jiwa	238.283	312.394	506.763	256.746	337.069	
2	Rata-rata jumlah pengunjung	Jiwa						330.251

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2017-2019 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta. Namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung mengalami penurunan yang signifikan hingga 51%, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung di tahun 2021 karena adanya penambahan jam layanan dan meningkatnya akses terhadap layanan digital.

5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

Tabel 2.270 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pustakawan bersertifikat	Orang	6	6	15	15	15
Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*	Orang	26	45	18	18	18
Total	Orang	32	51	33	33	33
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai	Orang	41	51	33	33	33
Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat	%	78,05	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: *) Jumlah tenaga teknis dan penilai yang merupakan lulusan S1 Perpustakaan

Data terkait keseluruhan tenaga teknis dan penilai dalam hal ini dikategorikan bersertifikat

adanya penambahan tenaga teknis terkait dengan penambahan layanan perpustakaan keliling dan Perpustakaan Alternatif Wilayah Selatan Kota Yogyakarta (Pevita). Perpustakaan keliling menambah 7 orang dan Pevita menambah 12 orang sehingga persentase pustakawan sudah mencapai 100% yang artinya seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah pustakawan bersertifikat bertambah menjadi 9 orang karena adanya 1 orang pustakawan CPNS rekrutmen baru di tahun 2019. Sedangkan jumlah tenaga teknis berkurang karena penataan SDM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan pada tahun 2020 semua pustakawan dan tenaga teknis pustakawan telah memiliki ijazah minimal D3 Perpustakaan, serta 1 orang Pustakawan bersertifikat tim penilai pustakawan.

R. Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel 2.271 Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah OPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku	Unit	152	159	159	159	151
2.	Jumlah OPD	Unit	152	159	159	159	151
3.	Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah OPD yang dimaksud pada tabel adalah jumlah seluruh OPD Kota Yogyakarta ditambah dengan unit kerja dan juga BUMD. Pada tahun 2018 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 159 unit, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 152 unit. Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah OPD yang menerapkan arsip secara baku, yaitu 3 BUMD dan 4 UPT baru. Selanjutnya, pada tahun 2019 dan 2020 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. OPD yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2020 berjumlah 159 terdiri dari Sekretariat Daerah 8 unit, Dinas Daerah 20 unit, Lembaga Teknis Daerah 5 unit, UPTD 26 unit, Kelurahan 45 unit, Kemantren 14 unit, Puskesmas 18 unit, SMPN 16 unit, dan BUMD 3 unit. Tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Yogyakarta telah mencapai angka sempurna yakni 100%. Hal tersebut merupakan pencapaian yang

kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi. Berikut adalah kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.272 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	kali	11	11	11	9	14

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2020 mengalami penurunan kegiatan mengingat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran dan penerapan protokol kesehatan. Adapun Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2020 berjumlah sembilan kegiatan terdiri dari:

- a. AGITA (Satuan Tugas Arsip Kota Yogyakarta);
- b. Penyuluhan Kearsipan;
- c. Pendampingan;
- d. Diklat Kearsipan;
- e. Bimbingan Teknis Kearsipan;
- f. Uji Kompetensi Arsiparis;
- g. Workshop Kearsipan;
- h. Seminar Kearsipan; dan
- i. FGD Kearsipan.

Sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan kegiatan yang disebabkan oleh adanya pendampingan dan bimbingan serta ada beberapa OPD/ Unit Kerja yang telah melaksanakan kegiatan pemusnahan Arsip. Selain itu juga ada permintaan dari OPD/ Unit Kerja ke DPK (Arsiparis) untuk melakukan bimbingan teknis, penyuluhan dan pendampingan secara langsung.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta.

wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, selama tahun 2017-2021, untuk pertama kalinya kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang sangat drastis hingga berdampak pada jumlah pertumbuhan rata-rata kunjungan menjadi -42,37% per tahun.

Tabel 2.273 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kunjungan Wisman	Kunjungan	435.655	496.293	498.866	40.570	1.066	-72,18
2	Kunjungan Wisnus	Kunjungan	3.459.116	3.606.947	3.879.743	1.344.211	1.275.402	-40,73
Jumlah		Kunjungan	3.894.771	4.103.240	4.378.609	1.384.781	1.276.468	-42,37

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM Darurat pada level IV (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator SDGs dengan dengan capaian kinerja di atas 100% di tahun 2018 – 2021.

2. Lama Tinggal Wisatawan

Lama tinggal wisatawan juga sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata. Lama tinggal wisatawan akan menentukan produktivitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan. Dilihat dari perkembangan realisasi lama tinggal wisatawan, selama tahun 2017-2021, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan sebesar -9,28% per tahun. Pada tahun 2019, Lama tinggal wisatawan mencapai 2,08 hari dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,52 hari kunjungan.

Tabel 2.274 Lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
----	-----------	--------	------	------	------	------	------	---------------------------------

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta di tahun 2018 diantaranya adalah atraksi wisata malam di Kota Yogyakarta masih minim, banyaknya penerbangan komersial dari dan menuju Kota Yogyakarta yang tersedia setiap hari baik lintas kota atau negara mengakibatkan wisatawan memutuskan untuk tidak menginap, pembangunan Tol dan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan) mempermudah mobilisasi wisatawan, Adanya kejadian bencana gempa yang cukup besar di Indonesia (yaitu di Lombok, Palu dan Jawa Barat) sehingga menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki lama tinggal lebih panjang.

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya lama tinggal wisatawan pada tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya adalah semakin banyaknya event atraksi pariwisata berbasis budaya yang beragam, baik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta maupun instansi pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya (kampung wisata, seniman, dsb), banyaknya pilihan akomodasi yang tersedia seperti *homestay*, *guesthouse*, atau penginapan sejenis yang banyak diminati oleh wisatawan domestik/nusantara serta adanya *direct promotion* berupa Fam trip dan Travel Mart cukup efektif dalam mempertahankan serta meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Tahun 2020 dan 2021 lama tinggal wisatawan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari Pandemi Covid 19 mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, yaitu penerapan PPKM Darurat pada level IV (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta.

3. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi, di tahun 2019 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 36,58%. Namun di tahun 2020–2021 mengalami penurunan menjadi 20,34% di tahun 2021.

Tabel 2.275 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pajak Hotel	129.058.539.653	149.075.654.791	161.297.192.790	78.279.066.037	69.577.661.221
2.	Pajak Restoran	42.635.643.730	48.312.177.110	63.237.228.654	43.521.758.533	46.257.454.698
3.	Pajak Hiburan	13.662.360.780	12.594.868.046	12.702.230.080	3.870.424.584	2.972.217.801
4.	BLUD Taman Pintar	14.479.991.482	15.829.150.378	14.784.162.452	4.887.231.981	2.824.712.530
5.	Total Sektor Pariwisata	199.836.535.645	225.811.850.325	252.020.813.976	130.558.481.135	121.632.046.250
6.	Total PAD	657.049.376.703	667.492.075.470	689.049.725.509	563.174.371.397	598.121.885.338
7.	Persentase (%)	30,41	33,83	36,58	23,18	20,34

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata merupakan dampak dari kebijakan penanganan

B. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Yogyakarta sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.276 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020*	2021*	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Produksi Padi	Ton	751	764	780	615,485	571,35	-6,11
2.	Luas Panen Padi	Ha	117	117	115	94,69	87,9	-6,64
3.	Produktivitas Lahan	Ton/Ha	6,42	6,53	6,78	6,5	6,5	0,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Dinas Pertanian dan Pangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Hasil survei Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun 2017 hingga 2019 produksi padi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Tahun 2017 produksi padi mencapai 751 ton dan terus meningkat menjadi 780 ton di tahun 2019. Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Yogyakarta. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Meskipun begitu, produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia. Data tahun 2020–2021 menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Penurunan luas panen padi dari tahun 2020 ke 2021 dikarenakan pengurangan luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari 52,03 ha menjadi 47,29 ha dan di Kemantren Mergangsan saluran irigasi diperbaiki, sehingga hanya bisa ditanami 1 kali setahun harusnya 3 kali, kemudian di Sorosutan sama sekali tidak ditanami karena masalah air. Sedangkan di Kemantren Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru 1 ha lahan tidak ditanami karena kesulitan mencari penggarap dan di Kemantren Umbulharjo di sekitar embung kesulitan pengairan sehingga ditanami buah musim melon /semangka sebagai dampak dari pembangunan embung. Produksi padi mengalami penurunan selain karena penurunan lahan pertanian juga disebabkan permintaan pupuk oleh petani tidak terpenuhi dari pusat.

2. Cakupan Bina Kelompok Petani

pengarahan dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 11,04% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelompok tani yang diiringi dengan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka menstabilkan pangan di saat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatannya adalah dengan pemberian bantuan bibit dan media tanam serta kegiatan bimtek untuk kelompok tani dan seluruh anggotanya.

Jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan pemda menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 143,76% per tahun pada rentang waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 tidak ada kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda dikarenakan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan OPD baru sehingga belum menganggarkan bantuan kelompok petani. Selanjutnya di tahun 2018 sebanyak 3 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda. Pada tahun 2019 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda meningkat menjadi 15 kelompok. Hingga di tahun 2020 jumlah ini terus meningkat menjadi 47 kelompok tani yang menerima bantuan dari pemda. Peningkatan kelompok petani yang mendapat bantuan pemda dikarenakan adanya pengembangan sasaran/cakupan kelompok tani untuk dijadikan Demonstrasi Plot (Demplot) pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga/masyarakat. Pada tahun 2021 terkendala pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi jadi pertemuan dilakukan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan

Tabel 2.277 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	0	3	15	47	29	143,76
2	Total kelompok petani	Kelompok	179	179	180	233	266	11,04
3	Cakupan bina kelompok petani	Persen	0	1,68	8,33	20,17	10,90	123,33

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Mekanisme penerimaan bantuan yaitu kelompok petani mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian disurvei oleh dinas, selanjutnya menerima bantuan. Kriteria kelompok penerima bantuan antara lain memiliki anggota sebanyak 15 sampai dengan 20 orang, sudah disahkan oleh kelurahan dan mempunyai kegiatan pertanian yang berjalan aktif.

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Yogyakarta. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

Tabel 2.278 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	RT	101.880	105.351	144.022	145.091	147.989	10,71
2.	Jumlah rumah tangga	RT	133.686	140.758	144.033	147.022	148.003	2,59
3.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	76,21	74,85	99,99	98,69	99,99	-16,35

Sumber: Perusahaan Listrik Negara DIY, 2022

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta sebesar 76,21% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 99,99% di tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 98,69% dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 99,99%. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor kenaikan jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN yakni dengan penambahan pelanggan listrik PLN yang masuk pada golongan tarif rumah tangga.

2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Daya listrik terpasang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki daya yang semakin meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,87% per tahun. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan adanya penambahan satu trafo GI sebesar 30 MVA. Daya terkontrak Provinsi DIY lebih naik seiring dengan penambahan pelanggan dan penambahan daya listrik. Pada tahun 2020 dan 2021 persentase ketersediaan daya listrik menurun dikarenakan meningkatnya kebutuhan energi pelanggan PLN dilihat dari total daya terkontrak DIY.

Tabel 2.279 Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1.	Daya listrik terpasang	MVA	930	1.020	1.050	1.080	1.080	3,87
2.	Daya terkontrak DIY	MVA	1.698	1.822	1.952	2.071	2.198	6,67
3.	Persentase ketersediaan daya listrik	%	54,77	55,98	53,79	52,15	49,14	-2,63

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

3. Penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Kota Yogyakarta masih mengandalkan sumber energi listrik dari PLN. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak mempunyai sumber daya mineral sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk energi terbarukan teknologi yang digunakan adalah penggunaan *solar cell* (panel surya) di beberapa tempat seperti di 7 *warning light* dan 9 simpang bersinyal (Simpang Tunjung, Balaikota, SGM, Menukan, Wirosaban, APPI, Gondomanan, Yudonegaran, Pramuka) dari total 50 simpang yang ada sebagai pembangkit untuk menyalakan lampu APILL. Sedangkan sebagai upaya penghematan energi listrik telah dilakukan penggantian lampu penerangan jalan umum dari lampu konvensional menjadi lampu ramah lingkungan.

Tabel 2.280 Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah PJU ramah lingkungan	titik	6.817	8.680	11.943	13.906	14.740
2.	Jumlah titik PJU	titik	24.740	25.811	26.926	27.825	28.413
3.	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	%	27,55	33,63	44,35	49,98	51,88

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

D. Perdagangan

1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2017-2021, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Peningkatan nilai ekspor didukung oleh semakin tingginya permintaan ekspor produk kerajinan yang menjadi

Tabel 2.281 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Nilai Ekspor	Juta Rp	18.137.289,4	19.930.956,7	21.651.553,6	20.903.065,9	22.449.331,0	5,62
2	Nilai Impor	Juta Rp	22.664.452,5	24.921.419,3	26.201.912,6	24.824.353,2	25.618.382,5	3,26
	Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rp	-4.527.163,1	-4.990.462,6	-4.550.359,0	-3.921.287,3	-3.169.051,5	-7,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian.

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian kota ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini.

Tabel 2.282 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Unit	80	86	180	40	90
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Unit	15.450	13.933	13.832	13.832	13.832
3	Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal	%	0,52	0,62	1,30	0,29	0,65

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal yang sudah terbentuk di Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah yang relatif besar. Pada di tahun 2020 Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 180 unit di tahun 2019 menjadi 40 unit di tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan adanya *refocusing* anggaran oleh pemangku kebijakan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini pun berdampak pada persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan dari pemda, yaitu hanya 0,29% di tahun 2020. Adapun bantuan binaan untuk UKM di tahun 2020 dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan fasilitasi melalui media promosi dan pemasaran dalam bentuk pameran mandiri, namun kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 kali mengingat ancaman pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dari Pemda menjadi sebanyak 90 unit. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini terfokus pada pemulihan ekonomi sehingga didorong untuk meningkatkan

penyelenggaraan Pameran Mandiri DIY maupun Pameran Nasional melalui media online sebanyak 3 kali di tahun 2021.

E. Perindustrian

1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.283 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	kelompok	42	42	42	0	33
2	Total Kelompok Pengrajin	kelompok	50	50	50	0	33
3	Persentase bina kelompok pengrajin	%	84	84	84	0	100

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 terdapat 50 kelompok pengrajin dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2017 mencapai 84%, dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Namun di tahun 2020 jumlah ini turun drastis menjadi 0. Hal ini dikarenakan kelompok pengrajin sudah tidak ada lagi amanat untuk diberikan bantuan, selain itu adanya kebijakan terkait pemberian hibah yang tidak bisa diberikan setiap tahun. Pada tahun 2021 persentase bina kelompok pengrajin meningkat signifikan menjadi 100% hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

F. Transmigrasi

1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2016-2020, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri.

Tabel 2.284 Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah KK dan anggota keluarga yang ikut transmigrasi naik, jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi di tahun 2018-2019 sebanyak 10 KK dengan 33 orang anggota keluarga tahun 2018 dan 10 KK dengan 30 anggota keluarga di tahun 2019. Namun di tahun 2020 tidak ada penambahan anggota keluarga maupun peserta transmigrasi, dikarenakan adanya penundaan pemberangkatan calon transmigran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan jumlah individu yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuota peserta (KK) transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk jumlah anggota keluarga merupakan seluruh anggota dari KK yang terpilih untuk mengikuti program transmigrasi. Pada tahun 2021 jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi sebanyak 5 KK dengan 16 orang anggota keluarga.

Tabel 2.285 Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Transmigrasi Swakarsa						
	Kepala Keluarga	KK	0	0	0	0	0
	Individu	Jiwa	0	0	0	0	0
2	Transmigrasi Umum						
	Kepala Keluarga	KK	7	10	10	0	5
	Individu	Jiwa	22	33	30	0	16
3	Jumlah Total Transmigrasi						
	Kepala Keluarga	KK	7	10	10	0	5
	Individu	Jiwa	22	33	30	0	16

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

G. Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal.

Tabel 2.286 Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata
----	-----------	--------	------	------	------	------	------	-----------------------

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
	Tingkat Realisasi	%	68,24	104,99	100,22	104,16	106	13,75

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2017-2021, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata per tahun tingkat realisasi produksi mencapai 13,75%. Pada tahun 2017 tingkat realisasi sebesar 68,24%, dan pada tahun selanjutnya tingkat realisasi meningkat mencapai 104,99% pada tahun 2018. Namun tingkat realisasi pada tahun 2019 menurun menjadi 100,22%, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 106%.

Jika dilihat berdasarkan jumlah produksi ikan dan target daerah pada setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Secara umum, produksi ikan tertinggi ada di tahun 2021, yaitu sebesar 42.875 kg, dan angka tersebut telah mencapai target daerah yang sebesar 40.450 kg. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017-2018 disebabkan oleh adanya bantuan bibit oleh Pemerintah. Target daerah pada tahun 2018 diturunkan menjadi 40.300 kg dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan tidak ada lagi bantuan dari kementrian untuk budidaya lele. Produksi ikan pada tahun 2019 sebesar 40.690 kg telah mencapai target daerah yaitu sebesar 40.600 kg. Penurunan produksi ikan pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan suhu dan cuaca yang tidak tentu sehingga menyebabkan gagal panen. Sedangkan peningkatan produksi ikan di tahun 2020 dikarenakan adanya program lele cendol yang digalakkan di 45 Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Produksi lele terbanyak pada periode tahun 2020 berada di Kemantren Umbulharjo yang mencapai 11.034 Kg. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya program budidaya ikan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya (lele cendol, budi daya ikan dalam ember (budidamber), kolam terpal bulat) masih berlanjut.

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain.

Tabel 2.287 Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
1	Jumlah Konsumsi Ikan	kg/kapita	32,13	32,13	31,57	34,71	35,33	2,50

Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,50% per tahun. Realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2020 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keragaman konsumsi pangan khususnya ikan sebagai salah satu sumber pangan bergizi di Kota Yogyakarta menjadi menu pilihan makanan pokok masyarakat.

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggara pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.

Tabel 2.288 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda	Kelompok	0	0	11	5	3
2	Total kelompok pengusaha budidaya perikanan	Kelompok	76	45	40	47	68
3	Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan	%	0	0	27,50	10,64	4,41

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada rentang tahun 2017-2021, jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 terdapat 76 kelompok pengusaha budidaya perikanan, pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi 40 kelompok pada tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020-2021 menjadi 68 kelompok pada tahun 2021. Penurunan kelompok pengusaha budidaya perikanan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kelompok sudah tidak aktif. Pada tahun 2021 masyarakat yang awalnya melakukan kegiatan budidaya skala perorangan, antusias untuk membentuk kelompok, sehingga jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan meningkat.

Sementara itu, dilihat dari jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda, pada tahun 2017-2018 tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda. Pada tahun 2019 kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda ada 11 kelompok. Namun di tahun 2020-2021 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun bantuan yang diberikan oleh Pemda ke kelompok pengusaha budidaya ikan berupa paket bantuan budidaya ikan lele meliputi kolam bulat terpal bioflok, bibit lele, dan pakan; paket bantuan ikan hias; serta paket bantuan kolam Grc dan blower. Mekanisme pemberian bantuan yaitu (1) pembentukan kelompok dengan anggota minimal 10 orang yang berasal dari kelurahan yang sama;

pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda yaitu (1) proposal diketahui oleh ppl kelurahan dan Kemantren untuk kelompok pemula, sedangkan untuk kelompok madya proposal diketahui oleh pemerintah kota; (2) kelompok tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut; (3) kelompok harus memiliki pengurus dan anggota; (4) kelompok memiliki lahan; dan (5) memiliki ketersediaan air serta pembuangan limbah.

2.1.3.4. Aspek Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2.289 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Yogyakarta telah ada berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2.290 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Yogyakarta. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2014 hingga 2016, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016. Kemudian untuk tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPd disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPd Kota Yogyakarta tahun 2016 hingga 2020 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2017;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2020; dan
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Tabel 2.291 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel 2.292 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dokumen RTRW yang berlaku 2017–2020 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029. Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah yang baru terkait RTRW, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.293 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah program RKPD Tahun	Program	119	120	120	120	216

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKP yaitu pada tahun 2017 hingga 2021 telah mencapai 100%. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKP. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKP lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKP. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKP dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2021, hal ini dikarenakan Program RKP tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50–3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

6. Penjabaran Konsistensi Program RKP ke Dalam APBD Selanjutnya

Selain penjabaran program RPJMD ke dalam RKP, diperlukan juga pendetailan program mengenai aspek keuangan di dalamnya. Penjabaran tersebut dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Data terkait penjabaran program RKP ke dalam APBD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RKP yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.294 Penjabaran Konsistensi Program RKP ke Dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah program APBD Tahun berkenaan	Program	119	120	120	120	216
2.	Jumlah program RKP yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	Program	119	120	120	120	216
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKP ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya konsistensi program RKP ke dalam APBD dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

7. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta

Tabel 2.295 Indeks Perencanaan Pembangunan Tahun 2018-2021

No	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Indeks perencanaan pembangunan	91	91,20	97,58	107,00	94,40	98,84	108,14	92	98,73	107,31	92,20	98,60	106,94

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T= Target; R = Realisasi; C = Capaian

B. Keuangan

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2017-2021, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama 13 tahun mendapatkan opini BPK "WTP". Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 100% di tahun 2017-2021.

Tabel 2.296 Opini BPK "WTP" di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK "WTP"	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase SILPA Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2020 dan SILPA terkecil di tahun 2019. Tahun 2020 merupakan awal masa pandemi covid 19 sehingga masih belum mengetahui pola penanganan dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengambil kebijakan penganggaran yang lebih konservatif dengan menganggarkan anggaran yang relatif besar untuk penanganan covid 19 dan akhirnya tidak terealisasi maksimal. Sebagai contoh, anggaran untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2020 sebesar Rp. 242.417.712.53,09 terealisasi Rp. 74.385.331.447,58. Pada tahun 2021, penganggaran dapat dilakukan dengan lebih akurat sehingga selisih anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak terlalu besar. Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.53.642.020.964,00 terealisasi Rp. 5.350.719.740,00.

Tabel 2.297 Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Total SILPA	Rp	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	220.340.133.122,45	382.914.304.828,36	328.741.356.341,89
Total APBD	Rp	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	1.875.346.298.734,00
Persentase SILPA	%	17,11	13,70	12,70	25,23	17,53

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

3. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam analisis aspek ekonomi dalam urusan penunjang, program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD sebaiknya dilaksanakan secara keseluruhan, ketika ada satu atau beberapa jumlah program atau kegiatan dalam rencana yang tidak terlaksana tentu akan mengurangi hasil yang akan didapatkan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ada satupun program atau kegiatan yang tidak terlaksana dari rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan jumlah program atau kegiatan yang direncanakan kian bertambah. Pada tahun 2017 terdapat 119 program yang direncanakan dalam APBD, kemudian bertambah menjadi 120 program di tahun 2019–2020, dan di tahun 2021 jumlah program bertambah menjadi 216 program.

Tabel 2.298 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana	Program	0	0	0	0	0
2.	Jumlah program dalam APBD	Program	119	120	120	120	216
3.	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu senilai 30,38% dari total APBD Kota Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2020–2021 persentase belanja pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja urusan pendidikan meningkat karena adanya insentif pendidikan PAUD, kesejahteraan insentif GTT/PTT, serta inklusi insentif GPK (Guru Pendamping Khusus). Kemudian di tahun 2021 ada kenaikan di satuan BOS Nasional untuk jenjang SD dan SMP serta adanya bantuan DAK fisik untuk bidang SD dan SMP.

Tabel 2.299 Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah belanja urusan	Rupiah	451.057.057.376,91	381.032.183.162,54	375.686.835.468,11	336.286.388.976,00	443.382.925.238

5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase belanja urusan kesehatan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 10%. Belanja kesehatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 485 miliar rupiah atau senilai 25,89% dari total APBD Kota Yogyakarta. Kenaikan persentase belanja urusan kesehatan di tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19. Anggaran untuk percepatan vaksinasi Covid-19 antara lain digunakan untuk makan minum petugas vaksinasi, penyediaan APD petugas vaksinasi, penyediaan Vitamin petugas vaksinasi, sewa sarana pendukung kegiatan vaksinasi, pembelian alat kesehatan pendukung kegiatan vaksinasi, pembayaran jasa/insentif bagi relawan petugas vaksinasi, dan pengelolaan limbah hasil kegiatan vaksinasi.

Tabel 2.300 Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah belanja urusan kesehatan	Rupiah	293.957.094.614,42	310.949.518.124,38	323.577.594.454,29	324.743.706.389,73	485.464.256.197
Total APBD	Rupiah	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	1.875.346.298.734
Persentase	%	19,80	18,81	18,65	21,40	25,89

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Yogyakarta, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2017-2020, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Yogyakarta ini bersifat fluktuatif dengan belanja langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2017 dan belanja tidak langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2020.

Tabel 2.301 Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020

Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah belanja langsung	Rupiah	989.747.488.381	953.552.120.802,91	1.017.623.678.662,34	777.600.404.251,81
Total APBD	Rupiah	1.666.195.785.675	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39
Persentase	%	59,40	57,70	58,67	51,24
Jumlah belanja tidak langsung	Rupiah	676.448.297.294	699.175.722.721,00	716.969.657.199,00	739.999.064.238,58
Total APBD	Rupiah	1.666.195.785.675	1.652.727.843.523,91	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39
Persentase	%	40,60	42,30	41,33	48,76

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

realisasi belanja tidak terduga. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga hanya sebesar Rp. 317.693.064,00 sedangkan di tahun 2020 realisasi belanja tidak terduga meningkat menjadi Rp. 74.385.331.447,58.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Tabel 2.302 Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021

Variabel	Satuan	2021
Belanja Operasi	Rupiah	1.445.551.076.433
	%	77,08
Belanja Modal	Rupiah	240.007.571.435,93
	%	12,80
Belanja Tidak Terduga	Rupiah	5.350.719.740
	%	0,29
Belanja Transer	Rupiah	1.059.517.480
	%	0,06
Total APBD	Rupiah	1.875.346.298.734

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

7. Penetapan APBD

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan APBD adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 106 ayat 1 menyatakan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam kurun lima tahun terakhir Pemerintah Kota Yogyakarta selalu tepat waktu dalam menetapkan APBD.

Tabel 2.303 Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Variabel	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penetapan APBD	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

8. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan

daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

IPKD didapat dengan menjumlahkan Indeks pada setiap dimensi. IPKD Kota Yogyakarta tahun 2020 mendapatkan skor sebesar 66.2517. Rata-rata nilai IPKD di Indonesia adalah 55.5932. Nilai IPKD Kota Yogyakarta ada di atas rata-rata Nasional.

9. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang keuangan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.304 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Keuangan Tahun 2018-2019

No	Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	89,37	90,44	96,15	106,3 1	91,54	95,34	104,1 5	92,6 3	93, 36	100,7 9	92,75	93,09	100,3 7
2	Pendapatan Asli Daerah	%	546 M	547 M	667 M	121,8 4	559 M	689 M	123,1 3	376 M	563 M	149,7 8	557 M	598 M	107,3 8
3	Nilai Pajak Daerah	%	346 M	356 M	407 M	114,2 3	363 M	451 M	124,1 8	282 M	342 M	121,1 8	324 M	372 M	114,9 4

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T= Target; R = Realisasi; C = Capaian

Berdasarkan data pada tabel diatas, 3 indikator SDGs pada bidang keuangan pada tahun 2021 sudah mencapai 100%. Hal ini adalah wujud komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah dengan menetapkan keputusan walikota Nomor 399/2017 tentang Penilaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2017 tentang Peninjauan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Faktor lain dalam keberhasilan mencapai sesuai dengan target antara lain dengan terimplementasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah 49 Perangkat Daerah dan 1 SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan data laporan daerah serta adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang mensyaratkan pengajuan Ganti Uang melampirkan bukti rekonsiliasi asset turut mempercepat proses rekonsiliasi aset

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan tabel dengan data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan satuan jam pelajaran (jpl).

Tabel 2.305 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jpl	30	50	80	105	110

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Terjadinya fluktuasi data dikarenakan setiap tahunnya jumlah pendidikan dan pelatihan yang diadakan belum tentu sama, tergantung dengan prioritas hasil Analisis Kebutuhan Diklat. Pada tahun 2017, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 30 jpl. Selanjutnya angka tersebut terus meningkat, di tahun 2018 dan 2019 dikarenakan banyaknya diklat teknis dan fungsional baik dalam jabatan maupun di luar jabatan dengan durasi panjang. Pada tahun 2020 - 2021 mencapai lebih dari 100 jpl karena diklat dilaksanakan secara daring dan luring. Metode pelaksanaan diklat ini berpengaruh terhadap jumlah JPL yang didapat peserta diklat. Selain itu, jumlah pegawai yang diintervensi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan semakin bertambah dan Pola Kebutuhan Diklat yang meningkat sesuai dengan tren kinerja beberapa OPD yang meningkat.

2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para pegawai atau aparatur sipil negara (ASN), terdapat kategori pendidikan dan pelatihan pendidikan formal. Data didapatkan dengan membandingkan antara jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.306 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	1.271	1.247	1.839	357	1.800
2	Jumlah total ASN	Orang	5.564	5.226	5.223	4.876	5.010
3	Persentase	%	22,84	23,86	35,21	7,32	35,93

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2017 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 22,84%. Persentase tersebut terus meningkat menjadi 35,21% di tahun 2019, peningkatan ini dikarenakan jumlah pengajuan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari OPD meningkat, dan kebutuhan organisasi atas diklat juga meningkat, sehingga pelaksanaan diklat baik melalui swakelola maupun pengiriman diklat meningkat. Namun di tahun 2020 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal turun cukup signifikan menjadi 7,32% diakibatkan oleh adanya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 meningkat kembali sebesar 35,93%.

3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.307 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	256	321	388	414	475
2	Jumlah total struktural	Orang	791	831	830	803	709
3	Persentase	%	32,36	38,63	46,75	51,56	67,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus meningkat dari tahun 2017 sejumlah 32,36% sampai dengan tahun 2021 menjadi 67,00%. Jika dicermati pada tabel diatas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara (ketersediaan kuota di Bandiklat DIY, PPSDM Jateng dan Jatim), selain itu perampingan birokrasi yakni peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di tahun 2021 menyebabkan berkurangnya kegiatan pelatihan kepemimpinan.

4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina

Tabel 2.308 Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	22	19	26	29	32

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi yang cenderung meningkat pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta. Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi yang terdapat di jajaran instansi pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 22 orang pada tahun 2017 dan menurun menjadi 19 orang pada tahun 2018. Selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 – 2021. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta disesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit

Tabel 2.309 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah	orang	1.859	1.645	1.521	1.327	1.586

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hingga 2021 jumlah jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 jumlah jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah di instansi pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.859 orang. Selanjutnya, jumlah ini terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 1.327 orang. Hal ini dikarenakan perubahan jabatan antara pejabat fungsional umum beralih menjadi jabatan fungsional tertentu. Pada tahun 2021 jumlahnya meningkat lagi menjadi 1.586 orang. Penambahan dan pengurangan jumlah pemangku jabatan fungsional umum berdasarkan penambahan pegawai dari jalur CPNS, pegawai yang mutasi dari luar daerah maupun pegawai yang pensiun.

6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tabel 2.310 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	2.628	2.757	2.873	2.746	2.553

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.628 orang. Pada tahun 2018 angka tersebut bertambah menjadi 2.757 orang dan meningkat kembali pada tahun 2019 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi sebesar 2.873 orang, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2018 sebanyak 322 CPNS jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2020–2021 jumlah ini kembali turun menjadi 2.553 orang di tahun 2021 hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Jabatan Fungsional sebagian besar pada Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD). Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampingan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

7. Penilaian Sistem Merit

Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh predikat Baik dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh KASN pada tahun 2020 dengan nilai 287 dengan 8 aspek yang dirinci dalam 37 indikator sehingga indeks sistem meritnya sebesar 0,70. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin sempurna, mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

Tabel 2.311 Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No	Indikator	2020
1	Perencanaan kebutuhan	37,5
2	Pengadaan	36
3	Pengembangan karir	70
4	Promosi dan mutasi	25
5	Manajemen kinerja	62,5
6	Penggajian, penghargaan dan disiplin	25
7	Perlindungan dan pelayanan	10

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, pembuatan aplikasi terintegrasi SKP-PKP, penyelenggaraan diklat, penyempurnaan simpinter, Kerjasama permagangan, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan CORPU, penyusunan E Modul, dan lain-lain.

8. Penilaian Indeks Profesionalisme ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 20219, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi

80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah.

Tabel 2.312 Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2020

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN	Kategori
12,56	32,05	25,59	12,86	72,37	Sedang

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2021

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2020 indeks profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta sebesar 72,37 sehingga masuk pada kategori Sedang.

D. Penelitian dan Pengembangan

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan yang tercapai sebesar 100% di tahun 2021. Kendala utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (*evidence base policy*). Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawasan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tercapainya sasaran program penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Optimalisasi penyebaran informasi hasil penelitian melalui jurnal jaringan penelitian yang disusun setiap tahun dan penyusunan jurnal hasil penelitian secara elektronik dalam bentuk e-jurnal jarlit;
- b. Optimalisasi hasil penelitian yang didukung oleh kegiatan perancangan inovasi penyusunan Sistem Aplikasi *Decision Support System* (DSS), yaitu dengan mengoptimalkan *eksekutif summary* hasil kajian yang dapat diupload pada aplikasi dimaksud untuk memudahkan layanan data dan informasi terkait hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian serta informasi lainnya kepada mitra kerja Litbang;
- c. Optimalisasi peran Jaringan Penelitian (Jarlit) dalam mengawal proses penelitian tematis di Kota Yogyakarta;
- d. Optimalisasi peran Forum LPPM dalam meningkatkan peran serta aktif Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta dalam membantu pembangunan di Kota Yogyakarta melalui Tri Dharma Perguruan tinggi;
- e. Mendorong, mengawal, dan mengevaluasi Inovasi dan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan OPD, melalui kegiatan Anugerah Inovasi dan Penelitian; dan
- f. Optimalisasi peran Forum Inovasi Daerah dan Tim Perancangan Inovasi dalam

Salah satu bentuk keberhasilan pengawalan inovasi adalah Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2020 sebagai kota terinovatif.

E. Pengawasan

1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dalam proses kinerja pemerintah kota, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Berikut merupakan tabel mengenai hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK serta persentase tindak lanjut temuan dari perbandingan dengan jumlah total temuan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021.

Tabel 2.313 Hasil Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan BPK	Temuan	20	36	24	26	4
2	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi	39	67	72	61	8
3	Tindaklanjuti rekomendasi yang sudah sesuai	Rekomendasi	36	65	70	59	8
4	Tindaklanjuti rekomendasi yang belum sesuai	Rekomendasi	3	2	2	2	0

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2022

Dari data tabel diatas, hasil temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2017-2021 semua rekomendasi telah ditindaklanjuti. Temuan yang paling banyak berada pada tahun 2018 dengan jumlah temuan sebanyak 36 temuan dengan 67 rekomendasi. Sedangkan temuan yang paling sedikit ada pada tahun 2017 yaitu sebanyak 20 temuan dengan 39 rekomendasi.

Tabel 2.314 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	28	102	64	22	15
2	Jumlah total temuan	Rekomendasi	63	116	71	24	15
3	Persentase	Persen	44,44	87,93	90,14	91,67	100

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2022

Secara keseluruhan persentase tindak lanjut temuan di Kota Yogyakarta pada di tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 100% di tahun 2021. Tahun 2017 merupakan angka terendah persentase tindak lanjut temuan yakni dari 63 rekomendasi terdapat hanya 28 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan di tahun 2019–2021 jumlah total temuan dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami

rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 22 dari 24 rekomendasi, hal ini disebabkan rekomendasi yang bersifat kebijakan serta membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang oleh OPD yang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Tahun 2021 jumlah OPD dan temuan yang dihasilkan banyak bersifat administrasi sehingga cepat ditindaklanjuti. Selain itu juga didukung oleh OPD yang telah melaksanakan fungsi tugas pokoknya dengan baik dan menjalankan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) secara baik, OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan inspektorat dan obyek pemeriksanya, dan koordinasi dengan OPD mitra serta adanya timbal balik kerjasama dari OPD.

2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggar dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah kota. Berikut ini merupakan tabel persentase pelanggaran pegawai atau ASN di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2.315 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	7	8	11	22	7
2	Jumlah total ASN	Orang	5.564	5.225	5.223	4.876	5.010
3	Persentase	Persen	0,13	0,15	0,21	0,45	0,14

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta sebesar 0,13%, angka tersebut kemudian meningkat selama tahun 2018 – 2020 hingga mencapai 0,45% di tahun 2020. Peningkatan ini berkorelasi dengan jumlah penindakan yang dilakukan pelanggaran disiplin ASN. Pelanggaran pegawai sebagian dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi disharmonis rumah tangga, penawaran dan pilihan profesi lainnya, kondisi sosial - ekonomi pegawai yang mempengaruhi etos kerja dan motivasi pegawai.

F. Sekretariat Dewan

1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

Dalam melaksanakan kerjanya selama lima tahun, DPRD Kota Yogyakarta membutuhkan panduan kerja untuk dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang sesuai. Untuk itu diperlukan adanya rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan.

Tabel 2.316 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat DPRD diketahui bahwa telah ada rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya.

2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada setiap tahunnya, DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dan pengintegrasian program-program tersebut dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran. Adapun beberapa programnya yang telah terlaksana di tahun 2021 yakni penetapan Perda di Kota Yogyakarta sebanyak 12 Perda, kegiatan bimbingan teknis DPRD yang berlangsung sebanyak 6 kali, serta sidang paripurna DPRD sebanyak 40 kali sidang. Berikut informasi terkait jumlah Perda yang telah ditetapkan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.317 Jumlah Perda yang Ditetapkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perda yang telah ditetapkan	Perda	12	18	7	9	12

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, pada tahun 2021 terdapat 12 Perda yang telah ditetapkan. Adapun Perda yang setiap tahun ditetapkan adalah Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Kemudian pada DPRD Kota Yogyakarta sendiri telah ada pengintegrasian program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.318 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

3. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap Anggaran Pembangunan

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD. Kemudian pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir telah dilakukan pengintegrasian tersebut, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.319 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

G. Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Hasil capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.320 Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2021

No.	Indikator SDGs	Tahun Dasar	2018			2019			2020			2021		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	100	BB	A	100	A	A	100	A	A	100
2	Indeks Reformasi Birokrasi	69,85	70,28	70,63	100,50	70,71	71,73	101,44	71,14	73,32	103,06	71,57	76,17	106,43
3	Indeks pelayanan publik	79,75	80	80,21	100,26	80,25	80,45	100,25	80,50	80,45	99,94	80,75	80,69	99,93
4	Indeks pelaksanaan pembangunan	86,10	84,95	94,67	111,44	88,30	94,82	107,38	93,40	94,76	101,46	94,30	95,15	100,90

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: T=Target; R = Realisasi; C = Capaian

2.1.4. Fokus Keistimewaan

Kota Yogyakarta mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD DIY) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang bersumber dari APBD DIY yang dimaksud adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang terdiri dari BKK Dana Keistimewaan DIY dan BKK Reguler DIY. Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran

Pelaksanaan urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta yang didanai melalui BKK Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai proses pelestarian nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk program dan kegiatan keistimewaan di Kota Yogyakarta yang meliputi beberapa urusan diantaranya urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, serta urusan tata ruang. Adapun lingkup urusan keistimewaan yang dimaksud sebagai berikut.

a. Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan kelembagaan dilaksanakan untuk mencapai aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibiliti, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan.

b. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diatur melalui Perdais Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dana Keistimewaan urusan kebudayaan digunakan untuk pembelian alat-alat dan pembiayaan kegiatan-kegiatan budaya dan dapat dialokasikan pula untuk kegiatan-kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan yang bersifat budaya.

c. Urusan Pertanahan

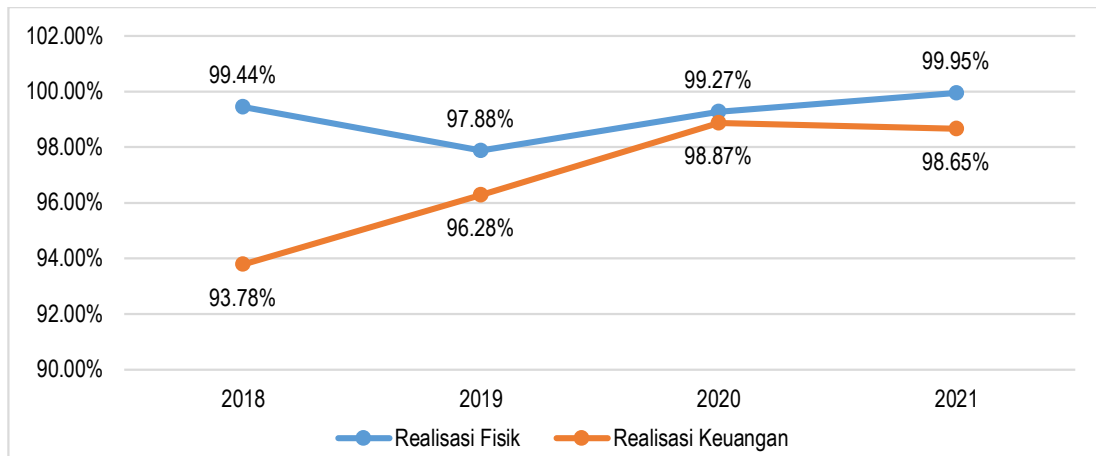
Urusan pertanahan diatur secara umum pada Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pada Perdais Nomor 1 Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun cakupan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten diantaranya penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan.

d. Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang diatur dalam Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanah tersebut dapat dipergunakan untuk kelestarian lingkungan guna membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Berikut alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Periode Tahun 2018-2021.

No	Urusan	2018	2019	2020	2021
3	Urusan Pertanahan	411.421.000	1.056.788.500	1.239.550.000	486.038.000
4	Urusan Tata Ruang	14.566.707.354	33.135.876.969	40.312.165.019	41.489.743.000
Total per Tahun		25.695.627.204	48.388.321.544	53.712.360.784	72.156.194.195
TOTAL BKK DAIS 2018 - 2021		199.952.503.727			

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2022



Gambar 2.19 Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2022

Selama rentang waktu tahun 2018-2021 total alokasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 199.952.503.727 dengan pagu anggaran disetiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 25.695.627.204 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,44% dan realisasi keuangan mencapai 93,78%. Tahun 2019 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 48.388.321.544 dengan persentase realisasi fisik mencapai 97,88% dan realisasi keuangan mencapai 96,28%. Tahun 2020 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 53.712.360.784 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,27% dan realisasi keuangan mencapai 98,87%. Tahun 2021 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 72.156.194.195 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,95% serta capaian realisasi keuangan mencapai 98,65%.

2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi pangan dan non pangan. Dengan adanya pengelompokan

Tabel 2.322 Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020*	2021**	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran pangan	Juta Rupiah	6.339.053	6.718.863	7.143.203	7.243.209	7.440.572	4,11
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah	12.503.211	13.358.777	14.149.502	13.744.739	14.258.384	3,41
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	18.842.264	20.077.641	21.292.705	20.987.948	21.698.957	3,64
Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	431.939	373.589	376.324	-2,65
Pengeluaran per kapita per tahun	Juta Rupiah	44,57	46,97	49,30	56,18	57,66	6,73
Pengeluaran per kapita per bulan	Juta Rupiah	3,71	3,91	4,11	4,68	4,81	6,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Selama rentang waktu tahun 2017-2021, pertumbuhan rata-rata pengeluaran pangan sebesar 4,11% per tahun, sedangkan pengeluaran untuk non pangan pertumbuhan rata-rata lebih kecil yaitu 3,41%. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok non pangan lebih kecil dari kelompok pangan karena kelompok non pangan ini mencakup pengeluaran banyak hal, seperti pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; hotel dan restoran; dan lainnya.

2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

Tabel 2.323 Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018*	2019**	2020	Pertumbuhan rata-rata (%/tahun)
Pengeluaran non pangan	Juta Rupiah	11.370.154	12.503.211	13.358.777	14.149.502	13.744.739	4,97
Jumlah pengeluaran	Juta Rupiah	17.232.488	18.842.264	20.077.641	21.292.705	20.987.948	5,13
Persentase Pengeluaran Non Pangan	%	65,98	66,36	66,54	66,45	65,49	-0,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

Keterangan: *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Selama rentang tahun 2016-2020, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita

perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,18% per tahun. Pada tahun 2016, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga perkapita Kota Yogyakarta sebesar 65,98% kemudian meningkat menjadi 66,36% di tahun 2017. Selanjutnya angka tersebut meningkat hingga mencapai 66,54% pada tahun 2018. Pada akhir periode tahun 2019 dan 2020 angka tersebut terus menurun menjadi 66,45% di tahun 2019 dan 65,49% di tahun 2020.

3. Produktivitas Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *services*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *manufacture* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.324 Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Nilai PDRB ADHK						
Lapangan Usaha	Satuan	2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**
<i>Agriculture</i>	Miliar rupiah	36,77	37,27	38,02	38,58	38,93
<i>Manufacture</i>	Miliar rupiah	5.250,46	5.476,18	5.750,78	5.243,00	5.394,48
<i>Service</i>	Miliar rupiah	19.481,19	20.613,79	21.896,48	21.732,89	22.956,65
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja						
Lapangan Usaha	Satuan	2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**
<i>Agriculture</i>	Jiwa	399	371	764	2.505	3.799
<i>Manufacture</i>	Jiwa	35.516	40.298	43.339	40.625	43.563
<i>Service</i>	Jiwa	177.676	183.972	187.773	179.545	158.229
Total Produktivitas						
Lapangan Usaha	Satuan	2017	2018 ^r	2019	2020*	2021**
<i>Agriculture</i>	Juta rupiah /jiwa	92,16	100,46	49,76	15,40	10,25
<i>Manufacture</i>	Juta rupiah /jiwa	147,83	135,89	132,69	129,06	123,83
<i>Service</i>	Juta rupiah /jiwa	109,64	112,05	116,61	121,04	145,08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: ^r) 2018 Angka direvisi; *) Data Sementara; **) Data Sangat Sementara

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah *service*, dengan jumlah tenaga kerja paling

4. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan, Dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.325 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Bank	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	KC Bank Umum	Unit	46	47	45	45	45	-0,52
2	KCP Bank Umum	Unit	94	95	95	93	170	20,44
3	KK Bank Umum	Unit	80	76	77	77	5	-24,30
4	KP BPR	Unit	11	11	11	11	11	0,00
5	KC BPR	Unit	8	8	10	10	10	6,25
6	KK BPR	Unit	17	17	17	14	14	-4,41
	Jumlah	Unit	256	254	255	250	255	-0,09

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Perkembangan jumlah bank di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah bank mencapai 256 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 254, namun jumlah tersebut naik di tahun 2019 menjadi 255, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 250 bank dan di tahun 2021 meningkat menjadi 255 bank. Di tahun 2021 jumlah KCP Bank Umum mengalami kenaikan signifikan menjadi 170 buah hal ini dikarenakan adanya Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Pasal 149 disebutkan Bank BHI atau KCBLN yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kantor kas, payment point atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP bagi bank BHI atau kantor di bawah KCP bagi KCBLN dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak Peraturan OJK ini berlaku atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI atau KCBLN. POJK tersebut berlaku sejak 31 Oktober 2021 bagi Bank Umum Konvensional. Terdapat penutupan 2 KCP Bank Umum, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Timoho dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP MMU Pasar Beringharjo dan ada 77 Kantor Kas Bank Umum Konvensional dicatitkan sebagai KCP.

Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut, karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah

(BI), sedangkan data rasio pinjaman tahun 2019-2021 ditampilkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR sebesar 0,47 kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 0,62 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020–2021 angka ini mengalami penurunan kembali menjadi 0,53 di tahun 2021.

Tabel 2.326 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019*	2020*	2021*	Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah pinjaman di bank umum dan BPR	Juta rupiah	13.823.255,36	17.683.923	27.377.913	27.602.090	27.824.876	21,09
2	Dana pihak ketiga di bank umum dan BPR	Juta rupiah	29.363.486,37	30.452.477	44.206.996	49.631.789	52.854.997	16,91
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR			0,47	0,58	0,62	0,56	0,53	3,66

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: *) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

6. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Meningkatnya total simpanan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyimpan uang, baik di Bank Umum maupun di BPR. Peningkatan jumlah simpanan masyarakat di bank tersebut bisa juga disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai berubah (adanya kecenderungan masyarakat mulai berpikir dan mengatur strategi pengeluaran untuk menghadapi kebutuhan hidup di masa yang akan datang).

Tabel 2.327 Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Simpanan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Giro	Juta Rp.	4.079.852	4.169.322	6.161.261	6.939.235	7.929.334
		rekening	20.162	20.933	24.152	27.333	30.449
		%	13,77	13,69	13,94	13,98	15,00
2.	Simpanan Berjangka	Juta Rp.	10.750.630	10.570.283	13.561.614	16.508.716	15.257.557
		rekening	50.935	52.010	71.859	75.303	77.499
		%	36,27	34,71	30,68	33,26	28,87
3.	Tabungan	Juta Rp.	14.806.004	15.712.873	24.484.121	26.183.837	29.668.106
		bilyet	1.899.130	2.096.619	3.240.056	3.565.133	3.708.686
		%	12,82	13,02	15,72	17,63	19,16

7. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

Tabel 2.328 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2018

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2017	2018
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha				
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.	60.551	46.075
		%	0,44	0,26
2	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	5.717	28.307
		%	0,04	0,16
3	Industri Pengolahan	Juta Rp.	889.003	996.779
		%	6,43	5,64
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.	7.839	8.679
		%	0,06	0,05
5	Konstruksi	Juta Rp.	1.205	2.464
		%	0,01	0,01
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.	1.258.566	1.320.278
		%	9,10	7,47
7	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.	3.328.568	3.735.124
		%	24,08	21,12
8	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.	104.443	96.083
		%	0,76	0,54
9	Jasa-jasa	Juta Rp.	1.716.301	1.855.420
		%	12,42	10,49
10	Informasi Dan Komunikasi	Rp Juta	140.359	120.317
		%	1,02	0,68
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Rp Juta	66.583	208.960
		%	0,48	1,18
12	Real Estate	Rp Juta	414.909	340.261
		%	3,00	1,92
13	Jasa Perusahaan	Rp Juta	155.058	189.522
		%	1,12	1,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Rp Juta	1.505	2.801
		%	0,01	0,02
15	Jasa Pendidikan	Rp Juta	118.119	501.452
		%	0,85	2,84
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Rp Juta	277.904	388.972
		%	2,01	2,20

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2017	2018
19	Flat dan Apartemen	Juta Rp.	32.792	31.963
		%	0,24	0,18
20	Ruko dan Rukan	Juta Rp.	117.777	103.897
		%	0,85	0,59
21	Kendaraan Bermotor	Juta Rp.	548.882	592.490
		%	3,97	3,35
22	Lainnya	Juta Rp.	2.876.186	5.084.203
		%	20,81	28,75
Total Pinjaman		Juta Rp	13.823.256	17.683.922

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Tabel 2.329 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2019-2021

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2019	2020	2021
Pinjaman Berdasarkan Jenis Penggunaan					
1	Pertanian	Juta Rp.	170.939	293.489	346.056
		%	0,62	1,06	1,24
2	Perikanan	Juta Rp.	30.456	51.099	66.701
		%	0,11	0,19	0,24
3	Pertambangan & Penggalian	Juta Rp.	22.125	30.121	23.805
		%	0,08	0,11	0,09
4	Industri Pengolahan	Juta Rp.	2.148.298	2.083.103	2.222.400
		%	7,85	7,55	7,99
5	Listrik, Gas & Air	Juta Rp.	28.850	23.737	25.497
		%	0,11	0,09	0,09
6	Konstruksi	Juta Rp.	1.279.471	1.261.020	1.207.005
		%	4,67	4,57	4,34
7	Perdagangan Besar & Eceran	Juta Rp.	6.609.326	6.406.406	6.681.903
		%	24,14	23,21	24,01
8	Peny Akomodasi & Makan Minum	Juta Rp.	2.123.191	2.332.285	2.601.599
		%	7,76	8,45	9,35
9	Transportasi, Pergudangan	Juta Rp.	1.014.277	1.229.563	1.003.325
		%	3,70	4,45	3,61
10	Perantara Keuangan	Rp Juta	545.606	405.326	372.881
		%	1,99	1,47	1,34
11	Real Estate, Usaha Persewaan	Rp Juta	470.863	463.534	528.782
		%	1,72	1,68	1,90
12	Adm Pemerintahan, Pertanahan	Rp Juta	2.783	45.275	796
		%	0,01	0,16	0,00
13	Jasa Pendidikan	Rp Juta	717.954	685.424	576.783
		%	2,62	2,48	2,07
14	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	Rp Juta	663.700	571.140	518.883
		%	2,42	2,07	1,86
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya	Rp Juta	844.682	899.227	1.056.874
		%	3,09	3,26	3,80
16	Jasa Perseorangan Rumah Tangga	Rp Juta	54.765	63.424	43.045
		%	0,20	0,23	0,15
17	Badan Internasional	Rp Juta	0	0	0
		%	0,00	0,00	0,00
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	Rp Juta	43.623	54.789	26.005
		%	0,16	0,20	0,09
19	Bukan Lapangan Usaha	Rp Juta	10.607.004	10.703.130	10.522.538
		%	38,74	38,78	37,82

Pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR berdasarkan penggunaan. Adapun data yang tertera pada tabel bersumber dari dua institusi yakni Bank Indonesia untuk tahun 2017-2018 dan Otoritas Jasa Keuangan untuk data tahun 2019-2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan wewenang terkait institusi pengampu data. Jika dilihat terdapat perbedaan dalam pengelompokan jenis pinjaman, pada tahun 2017-2018 pinjaman dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan jenis pinjaman kepada bukan lapangan usaha. Sedangkan pada tahun 2019-2021 pinjaman hanya dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaannya saja.

Total pinjaman yang diberikan baik di Bank Umum maupun di BPR menurut lapangan usaha dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak usaha di wilayah Kota Yogyakarta dinilai layak untuk dapat mengajukan kredit kepada bank. Pada tahun 2021 jenis pinjaman berdasarkan penggunaan terbesar kepada bank adalah pinjaman bukan lapangan usaha.

8. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan

Sama dengan posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, pengertian posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaan merupakan pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

Tabel 2.330 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Satuan	2017	2018	2019*	2020*	2021*
1.	Modal Kerja	Juta Rp.	4.777.557	5.561.252	10.021.726	9.842.411	10.392.571
		%	34,562	31,448	36,61	35,66	37,35
2.	Investasi	Juta Rp.	4.394.559	5.055.456	6.754.901	7.057.197	6.909.767
		%	31,791	28,588	24,67	25,57	24,83
3.	Konsumsi	Juta Rp.	4.651.140	7.067.215	10.601.286	10.702.482	10.522.538
		%	33,647	39,964	38,72	38,77	37,82
Total Pinjaman		Juta Rp.	13.823.256	17.683.923	27.377.913	27.602.090	27.824.876

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: *) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

Pinjaman yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya dibedakan

pada tahun 2020 jenis pinjaman berdasarkan penggunaan modal usaha mengalami penurunan menjadi 9.842.411 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 pinjaman yang digunakan untuk modal kerja mengalami kenaikan menjadi 10.392.571 juta rupiah, sedangkan pinjaman untuk investasi dan konsumsi mengalami penurunan.

9. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

Tabel 2.331 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Skala Usaha

No	Skala Usaha	Satuan	2017	2018	2019*	2020*	2021*
1.	Mikro	Juta Rp.	603.510	768.897	1.722.504	1.679.457	2.204.645
		%	14,256	17,131	17,613	16,721	20,176
2.	Kecil	Juta Rp.	1.327.797	1.559.183	3.509.009	3.686.669	4.889.144
		%	31,364	34,738	35,881	36,706	44,025
3.	Menengah	Juta Rp.	2.302.204	2.160.330	4.548.165	4.677.661	3.975.574
		%	54,380	48,131	46,506	46,573	35,799
Total Kredit		Juta Rp.	4.233.511	4.488.410	9.779.678	10.043.787	11.105.363

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: *) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

Kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan skala usaha terbagi menjadi tiga, yakni untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, total kredit untuk skala usaha mikro dan menengah cenderung fluktuatif, sedangkan total kredit untuk usaha kecil di wilayah Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Proporsi setiap tahunnya pada skala usaha mikro sebesar \pm 14-21%, skala usaha kecil \pm 31-45%, serta pada skala usaha menengah sebesar \pm 35-54%.

Tabel 2.332 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan

No	Jenis Penggunaan	Satuan	2017	2018	2019*	2020*	2021*
1.	Modal Kerja	Juta Rp.	2.540.921	3.024.182	6.442.618	6.700.246	7.290.922
		%	60,019	67,378	65,88	66,71	65,65
2.	Investasi	Juta Rp.	1.692.591	1.464.227	3.285.105	3.308.419	3.801.180
		%	39,981	32,622	33,59	32,94	34,23
3.	Konsumsi	Juta Rp.	-	-	51.955	35.121	13.262
		%	-	-	0,53	0,35	0,12
Total Kredit		Juta Rp.	4.233.512	4.488.409	9.779.678	10.043.786	11.105.364

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Selanjutnya, kredit UMKM yang diberikan baik di bank umum maupun BPR berdasarkan penggunaannya terdiri atas jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi, dan pada tahun 2019 adanya penambahan jenis penggunaan yakni konsumsi. Secara total, kredit UMKM yang diberikan di bank umum maupun di BPR dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu meningkat, yakni 4,233 triliun rupiah di tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 11,105 triliun rupiah di tahun 2021, dengan proporsi penggunaan untuk modal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dan konsumsi.

Tabel 2.333 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	Juta Rp.	15.746	20.827	30.091	29.043
		%	0,454	0,540	0,711	0,647
2.	Pertambangan dan Penggalian	Juta Rp.	1.020	539	3.565	7.430
		%	0,029	0,014	0,084	0,166
3.	Industri Pengolahan	Juta Rp.	222.888	246.434	297.188	370.374
		%	6,423	6,395	7,020	8,252
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	Juta Rp.	6.688	6.484	6.788	8.538
		%	0,193	0,168	0,160	0,190
5.	Konstruksi	Juta Rp.	162.394	1.317	1.203	2.414
		%	4,679	0,034	0,028	0,054
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Juta Rp.	2.396.503	195.473	352.781	248.499
		%	69,056	5,073	8,333	5,536
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	Juta Rp.	116.402	2.012.796	2.150.018	2.306.615
		%	3,354	52,235	50,786	51,391
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	Juta Rp.	210.523	95.038	77.097	72.324
		%	6,066	2,466	1,821	1,611
9.	Jasa-jasa	Juta Rp.	338.205	603.085	657.598	554.697
		%	9,746	15,651	15,533	12,358
10.	Informasi Dan Komunikasi	Juta Rp.	-	59.916	75.145	66.142
		%	0,000	1,555	1,775	1,474
11.	Jasa Keuangan Dan Asuransi	Juta Rp.	-	87.285	42.082	161.665
		%	0,000	2,265	0,994	3,602
12.	Real Estate	Juta Rp.	-	58.634	68.980	62.311
		%	0,000	1,522	1,629	1,388
13.	Jasa Perusahaan	Juta Rp.	-	130.780	131.828	175.220
		%	0,000	3,394	3,114	3,904
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp.	-	-	-	18
		%	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	Jasa Pendidikan	Juta Rp.	-	64.915	45.351	55.612
		%	0,000	1,685	1,071	1,239
16.	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Juta Rp.	-	34.047	33.228	69.454
		%	0,000	0,884	0,785	1,547
17.	Jasa Lainnya	Juta Rp.	-	235.767	260.569	298.051
		%	0,000	6,119	6,155	6,640
Total Kredit		Juta Rp.	3.470.369	3.853.337	4.233.512	4.488.407

Sumber: Bank Indonesia, 2019

No	Sektor Ekonomi	Satuan	2019	2020	2021
2.	Perikanan	Juta Rp.	29.643	49.389	66.493
		%	0,303	0,492	0,599
3.	Pertambangan & Penggalian	Juta Rp.	20.758	29.010	22.018
		%	0,212	0,289	0,198
4.	Industri Pengolahan	Juta Rp.	954.887	1.080.673	1.266.638
		%	9,764	10,760	11,405
5.	Listrik, Gas & Air	Juta Rp.	29.098	15.758	22.803
		%	0,298	0,157	0,205
6.	Konstruksi	Juta Rp.	656.275	608.083	616.497
		%	6,711	6,054	5,551
7.	Perdagangan Besar & Eceran	Juta Rp.	4.873.930	4.841.536	5.153.555
		%	49,837	48,204	46,404
8.	Peny Akomodasi & Makan Minum	Juta Rp.	1.002.992	1.066.206	1.421.519
		%	10,256	10,616	12,800
9.	Transportasi, Pergudangan	Juta Rp.	330.676	322.081	348.469
		%	3,381	3,207	3,138
10	Perantara Keuangan	Juta Rp.	161.337	116.801	122.232
		%	1,650	1,163	1,101
11	Real Estate, Usaha Persewaan	Juta Rp.	288.748	316.666	359.118
		%	2,953	3,153	3,234
12	Adm Pemerintahan, Pertanahan	Juta Rp.	1.905	1.637	182
		%	0,019	0,016	0,002
13	Jasa Pendidikan	Juta Rp.	148.947	139.378	129.337
		%	1,523	1,388	1,165
14	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	Juta Rp.	145.667	133.231	185.440
		%	1,489	1,327	1,670
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya	Juta Rp.	850.720	930.881	1.013.101
		%	8,699	9,268	9,122
16	Jasa Perseorangan Rumah Tangga	Juta Rp.	56.772	66.180	42.270
		%	0,581	0,659	0,381
17	Badan Internasional	Juta Rp.	0	0	0
		%	0,000	0,000	0,000
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	Juta Rp.	39.910	64.927	20.385
		%	0,41	0,65	0,18
19	Bukan Lapangan Usaha	Juta Rp.	46.791	35.121	13.626
		%	0,48	0,35	0,12
Total Kredit		Juta Rp.	9.779.676	10.043.788	11.105.728

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Selain dibagi menjadi berdasarkan skala usaha dan penggunaannya, kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR terdapat pula pembagian berdasarkan lapangan usahanya, yang meliputi pertanian; perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; penyedia akomodasi dan makan minum; transportasi, pergudangan; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan; adm pemerintahan, pertanahan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa kemasyarakatan, sosial budaya; jasa perorangan rumah tangga; badan internasional; kegiatan yang belum jelas batasannya; dan bukan lapangan usaha. Pada tahun 2021, jumlah kredit UMKM yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, proporsi terbesar pada sektor pedagang besar dan eceran sebesar 46,404%.

Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Terdapat 58 jenis pelanggaran/kejahatan seperti pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, curanmor, pencurian biasa, pemerasan, penipuan, dan lain-lain yang masuk dalam tahap penyidikan di Polresta Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 2.335 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus	615	575	435	373	516
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus	1.174	958	621	594	693
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	52,39	60,02	70,05	62,79	74,46

Sumber: *Bagian Reskrim Polresta Kota Yogyakarta, 2022*

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 52,39%, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 70,05% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kriminalitas yang tertangani, hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19 termasuk penyelesaian kasus juga mengalami penurunan. Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali angka penyelesaian kriminalitas yang mencapai 74,46%, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan tingkat mobilitas masyarakat di Kota Yogyakarta. Adapun di tahun 2021 jenis kejahatan yang dominan terjadi dan tertangani di Polresta Kota Yogyakarta adalah kasus penipuan yang mencapai 121 kasus. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas saat pandemi Covid-19 antara lain peningkatan volume patroli terutama di lokasi-lokasi yang mengundang kerumunan, penempatan personil di daerah rawan kejahatan, dibentuknya satgas saber pungli dan satgas anti klitih, adanya perda tentang pemasangan CCTV, dan operasi kepolisian yang dilaksanakan secara terus menerus.

Tabel 2.336 Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus	80	123	112	109	121
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba	Kasus	78	124	118	127	121
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	%	102,56	99,19	94,92	85,83	100,00

Sumber: *Bagian Narkoba Polresta Kota Yogyakarta, 2022*

fluktuatif. Seperti pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba jika dibandingkan dengan tahun 2017-2018 yang cenderung meningkat. Namun pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba sedangkan jumlah penyelesaian kasus narkoba mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2021 jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba mengalami penurunan dengan peningkatan persentase tertangani yang mencapai 100%. Angka kriminalitas narkoba setiap tahunnya cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena lokasi Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan menjadi pasar potensial untuk peredaran narkoba. Selain itu, banyaknya pelajar dan mahasiswa pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta, yang kurang pengawasan dari orang tua sehingga cenderung berbuat dan atau mencoba-coba menggunakan Narkoba. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya dengan peningkatan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya pencegahan yang semakin dimaksimalkan, peningkatan kegiatan ungkap kasus narkoba, kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba telah meningkat, dan adanya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tabel 2.337 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	695	698	547	621	516
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	422.732	427.498	414.055	373.589	376.324
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk	Kasus	16,44	16,33	13,21	16,62	13,71

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta jumlahnya fluktuatif apabila dihitung dengan perbandingan per 10.000 penduduk. Sejak tahun 2017 dengan jumlah kasus tindak kriminalitas sebanyak 16,44 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sedikit menurun menjadi 16,33, setelahnya menurun lagi menjadi 13,21 di tahun 2019. Kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 menjadi 16,62 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani ini kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 13,71 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tersangkanya tidak jelas karena korban tidak pernah bertemu/bertatap muka dengan pelaku (Online) mengakibatkan masih ada laporan tindak kriminalitas yang belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena minimnya informasi atau data pelaku.

11. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Sementara

pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 2.338 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Jenis Pendapatan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Pajak	Jenis	10	10	10	10	10	0,00
2	Retribusi	Jenis	15	13	14	14	14	-1,41
	Jumlah	Jenis	25	23	24	24	24	-0,91

Sumber: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta, 2022; BPKAD, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2017-2021 konstan dengan 10 jenis pajak. Selanjutnya, jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berjumlah 15 jenis, dan turun menjadi 13 jenis di tahun 2018. Pada tahun 2019 angka tersebut naik menjadi 14 jenis, hingga di tahun 2021 jenis retribusi jumlahnya tetap yakni 14 jenis. Pada tahun 2021 nilai pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Hotel yang mencapai Rp 76.594.845.997,- sedangkan untuk retribusi pendapatan terbesar berasal dari retribusi pelayanan pasar yang mencapai Rp 6.822.012.788,-.

Pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 terbagi menjadi tiga jenis yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum yang meliputi: retribusi pelayanan kesehatan (Poskeswan, Labkesling), retribusi pelayanan sampah, retribusi pemakaman, retribusi parkir TJU, retribusi pasar, retribusi PKB, retribusi tera/tera ulang, retribusi limbah cair;
- b. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD), retribusi parkir TKP, retribusi rumah potong hewan (RPH), retribusi penjualan produksi usaha daerah (Pertanian); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi: retribusi IMB, retribusi izin mempekerjakan tenaga asing/IMTA.

12. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan adanya Perda yang mengatur tentang investasi, maka dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap

peningkatan. Jumlah perda terkait perijinan pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan terus meningkat menjadi 60 di tahun 2021. Jumlah perda terkait lalu lintas barang dan jasa pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan terus meningkat menjadi 49 di tahun 2019 hingga tahun 2021. Selanjutnya, jumlah perda terkait ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan meningkat menjadi 41 buah di tahun 2019 hingga tahun 2021.

Tabel 2.339 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata pertumbuhan (%/tahun)
1	Jumlah Perda terkait perijinan	Buah	35	48	51	55	60	15,08
2	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	Buah	35	46	49	49	49	9,49
3	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	Buah	35	37	41	41	41	4,13

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, 2022

Terdapat lima buah Perda baru terkait perijinan di tahun 2021, dari kelima Perda tersebut terdapat dua perda yang sudah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yakni Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Sedangkan tiga perda lainnya yakni Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota, dan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan

Selain penambahan Perda baru di tahun 2021 yang telah ditetapkan, adapun beberapa Perda dan Perwal yang masih dalam tahap pembahasan. Perda tersebut diantaranya Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, Raperda Penyelenggaraan Reklame, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan Perwal yang masih dalam pembahasan diantaranya Raperwal Petunjuk Pelaksanaan Perda Perizinan Berusaha, Raperwal Rencana Umum Penanaman Modal, dan Raperwal Bangunan Gedung. Nantinya Perda dan Perwal ini akan terfokus pada pengaturan penumbuhan iklim investasi di Kota Yogyakarta.

13. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah 40,66%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif)

Tabel 2.340 Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
1	Penduduk usia <15th + usia >64th	Jiwa	119.607	119.812	120.387	120.802	120.106	0,10
2	Penduduk usia 15-64 tahun	Jiwa	293.085	294.147	293.668	295.315	295.403	0,20
3	Rasio ketergantungan	%	40,81	40,73	40,99	40,91	40,66	-0,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari tahun 2017 hingga 2021, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2017 angka rasio ketergantungan mencapai 40,81%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2020 sampai 2021. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin berkurang setiap tahunnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2021 berdasarkan pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.341 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Angka Kemiskinan	7,29 – 7,18	7,69	94,51%
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	64,50	64,82	100,50%
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Pola Pangan Harapan	94,50	95,10	100,63%
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,393 – 0,426	0,464	91,08%
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Angka Pertumbuhan Ekonomi	4,04% – 4,21%	5,09%	120,90%
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Angka Kriminalitas	600	534	111,00%
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.250	4.187	101,48%
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,46 tahun	11,72 tahun	102,27%
		Angka Harapan Lama Sekolah	17,43 tahun	17,60 tahun	100,98%
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Angka Harapan Hidup	74,65 tahun	74,76 tahun	100,15%
9	Peran Serta Masyarakat Dalam Penneimbangan dan	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang	67%	70,83%	105,72%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
10	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,60%	79,84%	100,30%
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,64	56,36	101,29%
12	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,80	45,28	103,38%
13	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A	A	100,00%
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100,00%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021

1. Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun

Kemiskinan masyarakat menurun diukur menggunakan indikator Angka Kemiskinan yang diterbitkan oleh BPS. Perhitungan angka kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun realisasi angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.342 Pengukuran Capaian Sasaran Kemiskinan Masyarakat Menurun

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	7,29 – 7,18	7,69	94,51	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021; Bappeda Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Intervensi penanggulangan kemiskinan tetap berjalan meski dengan banyak keterbatasan. *Framework* intervensi untuk penurunan angka kemiskinan bisa dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.20 Proses Bisnis Kemiskinan Masyarakat Menurun

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Proses bisnis pencapaian sasaran penurunan kemiskinan terdiri dari proses manajemen, utama dan pendukung. Proses manajemen dibagi lagi kedalam aspek Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Organisasi Tatalaksana dan SDM, serta Pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan. Proses Utama terdiri dari Aspek Perlindungan Sosial, Jaminan Pendidikan, Jaminan Kesehatan, Infrastruktur Permukiman, dan Peningkatan Pendapatan. Proses Pendukung meliputi penguatan data dan informasi, penguatan TKPK, dan pemberdayaan masyarakat.

Proses Bisnis Utama dilakukan oleh Dinas Sosnakertrans, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas PUPKP, Disperinkopukm, dan DP3AP2KB. Dinsosnakertrans fokus pada aspek perlindungan sosial dengan intervensi diantaranya Bansos asistensi penyandang disabilitas dan lansia miskin, penyaluran bantuan sosial PKH, Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai. Selain itu, OPD ini juga mendukung aspek peningkatan pendapatan, diantaranya melalui bantuan UEP PKH Graduasi, UEP PKH Pengembangan, Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja, padat karya bagi tenaga kerja mandiri dan lokal, serta pemindahan dan penempatan transmigrasi. Upaya lain juga dilakukan dengan pembinaan usaha berbasis kelompok melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP).

Upaya berorientasi peningkatan pendapatan lainnya dilakukan terutama oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM. Intervensi yang dilakukan diantaranya pelatihan sarana produksi bagi IKM, pelatihan teknis industri, dan promosi produk UMKM. DP3AP2KB diantaranya melakukan intervensi melalui bantuan hukum bagi warga miskin. Pembinaan usaha produktif juga dilakukan OPD ini dengan berbasis kelompok, yaitu melalui 5 skema sekaligus; UPPKS, UP2K, P2WKSS, Desa Prima dan Kelompok Rintisan Usaha (KRU). Bagian Administrasi Pembangunan mengawal pelaksanaan skema Nglarisi melalui aplikasi digital. Skema ini merupakan upaya Pemerintah Kota untuk bersinergi

Disamping beberapa OPD diatas, upaya peningkatan pendapatan melalui berbagai mekanisme juga dilakukan masing-masing Kemantren. Pelatihan kerajinan dari limbah sampah dan pelatihan membuat makanan tradisional, misalkan, dilakukan di Jetis. Sedangkan Kraton melaksanakan pelatihan membuat makanan ringan, packaging dan pemasaran serta pelatihan manajemen pengelolaan usaha. Kotagede menyelenggarakan pelatihan Sibori, daur ulang sampah, masakan nusantara, pengolahan jamur, dan tanaman buah. Kemantren lain juga relatif memiliki pola yang sama, dimana pemilihan suatu jenis intervensi, didasarkan pada hasil Musrenbang yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Aspek utama lain yang tidak kalah penting adalah pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan. Disamping implementasi skema Universal Health Coverage (UHC), Dinas Kesehatan memberikan jasa perawatan jaminan kesehatan daerah. UHC diterapkan untuk mencakup siapa saja warga Yogyakarta yang mau ditempatkan di kelas III. Jaminan Kesehatan bagi PMKS dan penanganan kegawatdaruratan dilakukan melalui PSC 119 Yes. Jaminan Pendidikan Daerah masih diberikan, disamping telah ekstensifnya Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat.

Dan untuk aspek utama yang terakhir yakni infrastruktur permukiman, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha melakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni, baik melalui skema APBD, APBD DIY, APBN maupun dana *Coporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2021, sebanyak 655 unit rumah yang sudah direhabilitasi.

Aspek pendukung dalam penurunan angka kemiskinan adalah 1) penguatan data informasi yang dilaksanakan melalui pengembangan SIM Pemberdayaan untuk mewujudkan single database sebagai basis intervensi kegiatan oleh perangkat 2) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat kota, kecamatan maupun wilayah serta 3) pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan 5 K yakni Kota, Korporasi, Kampung, Komunitas serta kampus dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Seluruh elemen Bersatu padu saling berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Secara umum, permasalahan yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan adalah Pandemi yang berkepanjangan yang berdampak pada terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Intervensi yang berorientasi meringankan beban pengeluaran keluarga miskin tetap dilaksanakan. Namun, untuk mendapatkan *impact* dalam jangka panjang belum cukup. Opsi intervensi yang berorientasi peningkatan pendapatan menjadi sangat terbatas. Pelatihan dan pendampingan usaha kecil berkurang frekwensi dan jumlah pesertanya. Pameran untuk promosi produk juga berkurang penyelenggaraannya. Bahkan, kegiatan-kegiatan lain yang mensyaratkan pengumpulan banyak Orang juga mengalami pembatasan, misalkan sosialisasi atau diseminasi program. Kelompok usaha kecil kuliner yang menjadi binaan Pemerintah Kota untuk menyerap anggaran jamuan juga terdampak dengan adanya refocusing. Selain itu, yang menjadi persoalan adalah keterbatasan lahan di Kota. Hal ini menyebabkan intervensi penataan kawasan kumuh dan jamban sehat mengalami hambatan. Akibatnya, opsi pembangunannya menjadi sangat terbatas. Bahkan untuk pembangunan jamban sebagian tidak bisa dilaksanakan sama sekali.

Prospeknya, imunisasi efektif mulai dilakukan Januari 2021 mendatang. Tinggal menunggu waktu saja vaksin tersebut menjadi aksesibel. Oleh karena itu, 2021 akan menjadi tahun normalisasi dan recovery dimana semua elemen akan berbenah. Pemerintah Kota memiliki kesempatan untuk mengembalikan skema-skema intervensi seperti pada masa sebelum Pandemi.

2. Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Keberdayaan masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indeks ini merupakan komposit 3 indikator; (1) pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, (2) persentase perempuan tidak mengalami kekerasan dan (3) persentase anak tidak mengalami kekerasan. Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung dihitung dari proporsi kampung yang aktif, ditandai dengan deklarasi beberapa jenis tematik pembangunan, dari keseluruhan kampung. Jumlah seluruh kampung yang ditetapkan dalam Perwal adalah 169 unit, berkurang 1 dari yang ditetapkan di awal. Sementara itu, persentase perempuan/anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari jumlah kasus perempuan/anak yang mengalami kekerasan. Jumlah yang mengalami kekerasan tersebut masing-masing dibagi dengan jumlah keseluruhan populasi (perempuan/anak). Perhitungan persentase perempuan/anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari 100% yang dikurangi dengan persentase yang mengalami kekerasan. Setiap indikator tersebut diestimasi nilainya setiap tahun, yang hasilnya sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.343 Pengukuran Capaian Sasaran Keberdayaan Masyarakat Meningkat

No	Komposit	Realisasi (%)	Bobot	Formula Perhitungan Indeks	Indeks
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	41,41	60%	Realisasi Komposisi x Bobot	24,85
2	Persentase perempuan yang tidak mengalami kekerasan	99,89	40%	$\frac{\text{Realisasi Komposit Perempuan} + \text{Anak}}{2} \times \text{Bobot}$	39,97
3	Persentase anak yang tidak mengalami kekerasan	99,96			
Jumlah Realisasi					64,82
Target					64,50
Capaian (%)					100,50
Predikat					Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Kesra Setda Kota Yogyakarta, 2021; DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Framework intervensi untuk peningkatan keberdayaan masyarakat bisa dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.21 Proses Bisnis Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Proses bisnis utama atau yang berkaitan dengan intervensi secara langsung dilakukan oleh banyak OPD. Pemberdayaan masyarakat berbasis kampung diantaranya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinsosnakertrans, Dinas Pariwisata, BPBD, Satpol PP, Dinas PUPKP, Bagian Kesra, Bagian Tapem, serta seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta. Pola yang paling umum yang menjadi skema intervensi berupa pemberdayaan berbasis kampung secara tematik. Diantara tema yang diusung adalah Kampung Panca Tertib oleh Satpol PP, Kampung Tangguh Bencana oleh BPBD, Kampung Ramah Anak dan Kampung KB oleh DP3AP2KB, Kampung Sayur, Kampung Pangan Lestari dan Kampung Mataraman oleh Dinas Pertanian dan Pangan, Kampung Baca, Kampung Literasi dan Kampung Sains oleh Dindikpora, Kampung Siaga Bencana oleh Dinsosnakertrans, serta Kampung Wisata oleh Dinas Pariwisata. Dalam hal ini keaktifan kampung dilihat dari jumlah kampung yang melakukan deklarasi pembangunan tematik. Dari 169 Kampung yang ada, 86,39% diantaranya dinilai aktif, angka ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 83%.

Intervensi lain terkait pemberdayaan berbasis kampung juga dilakukan berbagai OPD. Diantaranya adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terus melakukan upaya pembinaan, fasilitasi dan sosialisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Dinas Kesehatan melakukan pemberdayaan melalui Kelurahan Siaga (Kesi), dimana aktivitas masyarakat terkait dapat dimonitor melalui sipp-mas.jogjakita.go.id. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga terus ditumbuhkan di tingkat RW. Dinas Pertanian dan Pangan giat melakukan Bimtek Pengembangan Kampung Sayur, Pekarangan Pangan Lestari, dan Rintisan Kampung Pangan Lestari. Diluar Bimtek, OPD ini juga melakukan pembinaan pola konsumsi pangan, khususnya terhadap Ibu-Ibu maupun calon pengantin. Dindikpora melakukan pelayanan pustaka kampung berkolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta

kampung dengan gowes, pentas atraksi wisata, serta berbagai pelatihan lain yang melibatkan masyarakat pengelola atau pelaku wisata. BPBD banyak melibatkan masyarakat, terutama pengurus kampung tangguh bencana untuk menangani dampak Pandemi Covid-19. Disamping itu, masing-masing kemantren juga memiliki beragam intervensi terkait pemberdayaan masyarakat berbasis kampung.

Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak diantaranya dilakukan oleh DP3AP2KB dan Dinsosnakertrans. DP3AP2KB melakukan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Diantara intervensinya adalah pendampingan usaha, peningkatan pemahaman politik, dan penguatan kelembagaan organisasi perempuan. Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dilakukan berbasis gender. Pendampingan dan penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui Forum Anak, Desa/ Kelurahan Layak Anak, Kemantren Layak Anak, Layanan Hukum Ramah Anak, faskes Ramah Anak, dan beberapa fasilitas ramah anak lainnya. Sementara itu, Dinsosnakertrans memiliki intervensi terkait perlindungan Anak, yaitu melalui Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo. Perwujudan diantaranya adalah penyediaan sandang anak terlantar dan pelayanan kesejahteraan sosial. Sementara itu, penanganan anak terlantar dilakukan melalui Saktipeksos.

Permasalahan yang masih muncul dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat adalah belum sinkronnya kinerja Lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam menangani permasalahan anak, baik negeri maupun swasta. Hal ini menimbulkan potensi duplikasi atau ketidak-tuntasan penanganan suatu kasus. Selain hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 menjadi satu masalah tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Aktivitas peningkatan keberdayaan masyarakat hampir selalu terkait dengan banyak orang, mulai dari diseminasi/ sosialisasi, pelatihan maupun kegiatan tatap muka lainnya (contoh proses pembentukan sekolah ramah anak dan konseling tatap muka). Dengan pembatasan di masa Pandemi, secara otomatis aktivitas tersebut yang mengumpulkan banyak orang tersebut cenderung terhambat. Salah satu kasus yang dijumpai adalah kurangnya media komunikasi informasi edukasi (KIE) untuk mensosialisasikan perlindungan perempuan, serta keterbatasan perempuan untuk menyampaikan hasil pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan perempuannya. Seiring waktu, adaptasi secara gradual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi online, namun efektivitasnya beragam tergantung segmen kelompok masyarakat yang disasar.

Pandemi menyebabkan semua orang harus beradaptasi dengan kehidupan normal baru. Salah satunya adalah dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi internet. Pemanfaatannya mulai dari mengoptimalkan *platform* komunikasi yang ada, sampai mendesain aplikasi-aplikasi baru yang lebih *customized*, menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Beberapa skema kebijakan Pemerintah Kota telah memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga kedepan upaya tersebut bisa lebih diintensifkan dan implementasinya perlu diorientasikan untuk jangka panjang, tidak hanya dalam kondisi normal baru era pandemi, melainkan seterusnya. Tujuannya adalah layanan yang diberikan lebih efektif dan efisien tanpa mengorbankan kualitas, termasuk sekaligus bisa mengantisipasi keterbatasan

3. Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Neraca Bahan Makanan (NBM) digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Mendasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2021, kondisi ketersediaan pangan di wilayah Kota Yogyakarta sebesar 2.607 kkal/kapita/hari. Angka ini berada di atas Standar Nasional (sebesar 2.100 kkal/kapita/hari) baik dari ketersediaan energi maupun protein.

Sementara itu apabila dibandingkan Angka Ketersediaan Energi Kota Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 maka Angka Ketersediaan Energi Kota Yogyakarta (sebesar 2.607 kkal/kapita/hari) masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (sebesar 3.735 kkal/kapita/hari). Hal tersebut dikarenakan data provinsi mencakup 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu wilayah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta dengan data jumlah bahan pangan keluar dan masuk tercatat di Jembatan Timbang wilayah DIY. Sementara Kota Yogyakarta bukan merupakan wilayah produksi pertanian dan data bahan pangan keluar dan masuk di Kota Yogyakarta belum bisa 100% tercatat.

Situasi konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dianalisis dengan menggunakan sebuah sistem yang dinamakan Pola Pangan. Adapun prinsip dari analisis konsumsi pangan adalah: a) Sasaran konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah dianalisis berdasarkan data hasil harmonisasi perhitungan Skor Pola Pangan Harapan b) Estimasi kebutuhan konsumsi pangan wilayah dihitung sesuai dengan sasaran konsumsi pangan penduduk berdasarkan data hasil harmonisasi perhitungan Skor PPH sesuai data Susenas serta c) Target penyediaan pangan wilayah disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan. Realisasi Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.344 Pengukuran Capaian Sasaran Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	94,5	92,1	97,46	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Tabel 2.345 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta Berdasarkan Data SUSENAS Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita/Hari	%	% AKE *)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	291,2	1.181	57,0	56,3	0,5	28,5	28,1	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	25,7	25	1,2	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	123,0	343	16,6	16,3	2,0	33,1	32,7	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	22,3	198	9,5	9,4	0,5	4,8	4,7	5,0	4,7

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita/Hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita/Hari	%	% AKE *)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
8	Sayur dan Buah	234,8	132	6,4	6,3	5,0	31,8	31,4	30,0	30,0
9	Lain-lain	142,0	51	2,5	2,4	-	-	-	-	-
Total			2.073	100,0	98,7		106,7	105,3	100,0	92,1

Sumber: Harmonisasi Analisis PPH Kota Yogyakarta, 2021

Kuantitas konsumsi pangan penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat dari hasil analisis PPH. Konsumsi padi-padian sebanyak 291,2 gram/kapita/hari, sedangkan konsumsi umbi-umbian yang juga merupakan sumber karbohidrat sebanyak 25,7 gram/kapita/hari. Konsumsi sayur dan buah sebanyak 234,8 gram/kapita/hari, pangan hewani sebanyak 123 gram/kapita/hari, lain-lain (bumbu) sebanyak 142 gram/kapita/hari, kacang-kacangan sebanyak 24,5 gram/kapita/hari, minyak dan lemak sebanyak 22,3 gram/kapita/hari, gula sebanyak 18,1 gram/kapita/hari, dan buah/biji berminyak sebanyak 1,7 gram/kapita/hari.

Framework intervensi untuk peningkatan pola pangan harapan bisa dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.22 Proses Bisnis Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkatkan

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Skema sebagaimana digambarkan dalam proses bisnis diatas mensyaratkan keterlibatan beberapa perangkat daerah dengan ketugasan terkait. Dalam hal ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menjadi leading sektor dengan 80% ketugasan meliputi aspek utama, manajemen dan pendukung. Sementara Perangkat Daerah mengemban 20% dari ketugasan peningkatan

Distribusi Pangan), Dinas Kesehatan (Pembinaan Keamanan Pangan). Aspek pendukung penguatan data dan informasi dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat bidang ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 14 (empat belas) kementerian dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM.

Dinas Pertanian dan Pangan sebagai leading sektor didukung dengan perangkat daerah lain berkolaborasi dalam peningkatan ketahanan pangan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Pangan
 - a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui pengadaan cadangan beras daerah sebesar 31,75 ton bekerjasama dengan PT Taru Martani;
 - b. Pembinaan pola konsumsi pangan melalui Gerakan mengkonsumsi pangan lokal melibatkan kelompok kuliner Gandeng Gendong. Inovasi yang dilakukan adalah pengolahan pangan lokal dan pemberian label Jogja Sadar Kalori dengan dukungan Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota, Dinas Kominfo bekerjasama dengan AMPTA Yogyakarta;
 - c. Penguatan distribusi pangan melalui penyusunan peta distribusi pangan sebagai tool pemantauan stok dan harga pangan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada; dan
 - d. Pembinaan pola konsumsi pangan melalui Sosialisasi Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan terkait pengetahuan gizi dan Chef dari AMPTA Yogyakarta (penyajian variasi menu).
2. Dinas PUPKP: Mencukupi suplai air irigasi untuk pertanian berkolaborasi dengan DIY dan petani dalam pemeliharannya.
3. Dinas Kesehatan
 - a. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi kurang/buruk dan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dengan mengoptimalkan peran kader untuk memotivasi orang tua balita untuk memanfaatkan layanan gizi dan fasilitas Kesehatan di puskesmas; dan
 - b. Penyuluhan keamanan pangan untuk pemilik usaha pangan industri rumah tangga melalui fasilitasi perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui menu DILAN IRT pada Jogja Smart Service (JJS).
4. Dinas Perdagangan
 - a. Monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat agen pasar rakyat bekerjasama dengan Bulog dan Madubaru untuk memperpendek rantai distribusi khususnya barang kebutuhan pokok;
 - b. Monitoring ketersediaan BBM/Migas melibatkan agen untuk pengawasan di tingkat pengawalan serta bekerjasama dengan Pertamina dan Hiyunemigas;

- d. Pengawasan Bahan tambahan berbahaya pada pangan. Tahun 2021 Pasar Prawirotaman menjadi pilot project sebagai pasar sehat aman pangan dengan mendorong paguyuban pedagang untuk berperan serta dalam pengawasan peredaran bahan tambahan berbahaya pada bahan pangan.
5. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM: Melakukan pendataan UMKM secara online terutama UMKM yang bergerak di bidang kuliner dalam rangka perwujudan basis data.
6. DP3AP2KB
 - a. Mobilisasi Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (kampung KB) melalui Gerakan menanam tanaman pangan di lingkungannya; dan
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) melalui pengolahan hasil panen budidaya sayur dan perikanan sekaligus fasilitasi promosi produk olahan pangan di tingkat kota.
7. Kemantren
 - a. Peningkatan kapasitas Bidang Ketahanan Pangan di kelurahan Pringgokusuman;
 - b. Peningkatan kapasitas budidaya sayur dan tanaman Toga di Kelurahan Wirobrajan, Patangpuluhan, Purabayan, Rejowinangun; dan
 - c. Pelaksanaan roadshow Posyandu.

Pencapaian sasaran Peningkatan Ketahanan Pangan selama masa pemulihan ekonomi memerlukan komitmen dan dukungan semua stakeholder pembangunan. Adapun faktor pendorong yang ada dalam upaya peningkatan pola pangan harapan ini adalah 1) Kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan cadangan beras dan inovasi-inovasi pertanian perkotaan mendorong keberhasilan program pertanian 2) Partisipasi aktif dari kader Kesehatan dan penyuluh pertanian terhadap peningkatan ketahanan pangan keluarga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang 3) Kegiatan edukasi masyarakat melalui media sosial dan youtube semakin mudah diakses dengan dukungan wifi publik tersebar di Kota Yogyakarta serta 4) Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pertanian perkotaan yang inklusif dimana baik kelompok lansia, anak-anak maupun difabel memiliki akses yang terbuka untuk mengikuti program ini.

Sedangkan kendala yang masih ditemukan dalam pencapaian sasaran ini antara lain : Upaya keberlanjutan program Pertanian perkotaan membutuhkan komitmen dan upaya masyarakat agar budidaya tanaman pangan dan perikanan tidak berhenti pasca panen, Pelatihan-pelatihan yang belum ditindaklanjuti oleh masyarakat serta adanya kewaspadaan terhadap gelombang pandemi menyebabkan desain kegiatan yang masih membatasi kegiatan yang mendorong kerumunan massa untuk meminimalisir resiko penyebaran penyakit.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kedepan, untuk ditindak-lanjuti pada periode selanjutnya yakni 1) meningkatkan motivasi dan edukasi masyarakat utamanya melalui media sosial dan youtube untuk mendorong keberlanjutan program pertanian 2) meningkatkan pola kerjasama untuk keberlanjutan dan produktivitas pertanian perkotaan melalui intervensi teknologi serta 3) memantau

4. Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Sasaran 4 Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun mendukung pencapaian Misi 2 Pembangunan Kota Yogyakarta yaitu Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta. Indikator sasaran ini diukur menggunakan Indeks Gini (*Gini Ratio*) yaitu sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat dari antar kelompok pendapatan masyarakat, yang nilainya berkisar antara nol (merata sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Tabel 2.346 Pengukuran Capaian Sasaran Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Gini Ratio	$GR=1-\sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah % penerima pendapatan kelas ke i ; Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i ; $0 < GR < 1$	0,393 – 0,426	0,464	91,08	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja				91,08	

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, predikat capaian untuk indikator *Gini Ratio* berada pada level Sangat Tinggi. Target 0,393 - 0,426 merupakan target hasil reviu serta rekomendasi dari Pemerintah Daerah DIY, mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Framework kebijakan penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.23 Proses Bisnis Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

pokok, pada semua aspek, baik utama, manajemen maupun pendukung. Pada aspek utama, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan sasaran penurunan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM. Pada aspek pendukung Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi melaksanakan sasaran penempatan transmigrasi, sementara Dinas. Aspek pendukung untuk pemberdayaan masyarakat didukung secara simultan dan integratif oleh berbagai OPD yaitu OPD wilayah 14 Kemantren, Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB, Dinas Pertanian Pangan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta.

Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang berada pada kategori 40% berpenghasilan terendah adalah pemberian pelatihan bagi pencari kerja, pembinaan Lembaga pelatihan kerja, peningkatan produktivitas perusahaan dan UKM, Pemberian Motivasi, Pelatihan Singkat, Pemberian Modal bagi Penyandang Disabilitas Mampu Latih dan anak jalanan, penempatan transmigrasi bagi warga kurang mampu, padat karya serta pembinaan hubungan industrial perusahaan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun pengawasan dan pengembangan koperasi melalui klinik koperasi sehat juga turut mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat oleh Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Selain itu, Dinas Kesehatan juga turut mendukung dari segi Penyuluhan Keamanan Pangan untuk pemilik usaha Pangan Industri Rumah Tangga serta penerbitan SPP-IRT. Adapun kendala dalam pelaksanaan adalah masih adanya Pandemi Covid-19 yang memaksa pengampu kegiatan merubah metode pelaksanaan demi menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, keterbatasan modal yang dimiliki warga masyarakat juga menjadi kendala tersendiri terhadap upaya peningkatan pendapatan, sehingga pelatihan yang diberikan cenderung jalan di tempat tanpa adanya tindak lanjut ke depannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya melakukan *channeling* dan fasilitasi akses modal kepada para UMKM. Dengan upaya tersebut, diharapkan pelaku UMKM maupun warga yang telah mendapat pelatihan, dapat bergerak maju sehingga mampu meningkatkan pendapatan.

5. Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu wilayah diukur dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran Daerah ke 5 ingin mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pertumbuhan produksi barang/jasa di Kota Yogyakarta sehingga terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.347 Pengukuran Capaian Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pertumbuhan Ekonomi/Y (%)	$Y = (PDRB_n - PDRB_{n-1}) / PDRB_{n-1}$	4,04 – 4,21	5,09	120,90	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2021



Gambar 2.24 Proses Bisnis Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Skema sebagaimana digambarkan dalam proses bisnis diatas mensyaratkan kolaborasi antar OPD sesuai dengan peran masing-masing. Dinas Pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan lama tinggal wisatawan melalui peningkatan daya tarik baik dengan penyelenggaraan event offline maupun virtual atau dengan penambahan daya tarik Kota Yogyakarta. Penambahan daya tarik wisata kampung yang dipadukan dengan konsep *sport tourism* sepeda dalam branding Monalisa (menikmati harmoni Yogya dengan lima jalur sepeda wisata) diharapkan mampu menambah lama tinggal wisatawan. Penambahan daya tarik di luar Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) regular dilakukan pada Kawasan Kotabaru, Taman Budaya Embung Giwangan dan Embung Langensari. Penataan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti papan penanda (*signage*), toilet, lampu hias dan promosi yang cukup masif dilakukan pada ODTW baru tersebut.

Pada masa pandemi covid-19, penambahan jumlah kunjungan wisata memiliki korelasi positif terhadap penambahan jumlah kasus covid-19. Berdasarkan hal tersebut implementasi protokol kesehatan dalam konsep *Clean, Healthy, Safety and Environment* (CHSE) menjadi hal yang wajib dilakukan untuk memperkecil resiko penambahan kasus covid-19 sehingga keuntungan secara ekonomi akan lebih besar dari resiko kesehatan yang harus dihadapi. Monitoring evaluasi implementasi protokol kesehatan pada Hotel, Restoran, ODTW dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan dukungan dari 14 kemantren di Kota Yogyakarta. Penerapan *One Gate System* (Sistem Satu Pintu) pada kunjungan bus pariwisata menjamin keamanan kesehatan bagi wisatawan dan ketersediaan parkir adalah wujud dukungan Dinas Perhubungan bagi pariwisata Kota Yogyakarta. Promosi Pariwisata di masa pandemi covid-19 juga dilakukan dengan strategi yang sedikit berbeda. Promosi pariwisata melalui berbagai media cetak maupun digital yang diperkuat dengan kerjasama *Business to Business* (*B to B*) melalui kegiatan *Table Top* dan pengiriman misi kesenian dilakukan secara berkesinambungan. Kerjasama promosi dengan provider transportasi on-line dan pembuatan Calender of Event yang dikemas dengan menarik dan komprehensif menjadi terobosan

industri yang didukung dengan peningkatan kapasitas pelaku pada tahapan produksi, manajemen dan pemasaran menjadi fokus Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Dinas PKU). Disisi lain perluasan akses pendanaan bagi UMKM juga dilakukan Dinas PKU dengan bekerjasama dengan Bank BPD DIY dan Bank Jogja. Inovasi kerjasama dengan provider transportasi dan marketplace dalam pemasaran produk dan peningkatan literasi digital dilakukan untuk menjawab tantangan pergeseran pasar UMKM.

Selain sektor industri, sektor perdagangan juga menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan yang berfokus pada pengembangan pasar tradisional dan kemudahan distribusi barang kebutuhan menjadi fokus Dinas Perdagangan. Pengembangan Pasar Tradisional menjadi fungsi lain yang mendukung pariwisata dimulai dengan pengembangan *rooftop* pasar Prawirotaman sebagai pusat ekonomi kreatif Kota Yogyakarta. Kerjasama dengan provider transportasi online untuk peningkatan pendapatan pedagang pasar dilakukan dengan memberikan subsidi ongkos kirim dan perluasan pasar ke area digital. Pengamanan distribusi kebutuhan masyarakat dilakukan secara interatif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang kondusif yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP). Pada sisi pengembangan ekonomi investasi mempunyai peran yang cukup signifikan. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan dalam meningkatkan iklim investasi melalui Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), promosi investasi, Evaluasi Investasi dan Pengembangan Teknologi Informasi pendukung kemudahan investasi. Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan fasilitas *print from home* menjadi inovasi pelayanan untuk menjawab tantangan pada masa pandemi covid-19.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pada penumbuhan ekonomi. Bagaimana menyeimbangkan dampak ekonomi supaya lebih tinggi dari dampak kesehatan menjadi fokus pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19. Adapun faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi ini adalah 1) Komitmen untuk implementasi adaptasi kebiasaan baru dalam mempertahankan eksistensi ODTW, Pasar Tradisional dan tempat publik lainnya 2) Komitmen untuk memberikan pelayanan secara daring dengan mengoptimalkan teknologi informasi serta 3) Penawaran kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi pada masa pandemi covid-19.

Selain faktor pendorong di atas, ditemukan pula beberapa poin yang menjadi kendala dalam penumbuhan ekonomi pada masa pandemi covid-19 yakni:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam monitoring evaluasi penerapan CHSE sebagai syarat dasar penyelenggaraan pariwisata di masa pandemi covid-19;
2. Dalam pengembangan ODTW baru diperlukan fasilitas yang membutuhkan ketersediaan lahan terutama untuk jalur sepeda. Untuk tiang pendukung penanda kawasan dan rambu pariwisata yang membutuhkan tiang yang tidak sedikit yang dapat mengganggu citra Kota Yogyakarta;

3. Kendala peningkatan kapasitas bagi pelaku wisata, pedagang pasar dan UMKM di Kota Yogyakarta karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
4. Pembatasan jumlah kunjungan untuk setiap ODTW dan Pasar Tradisional berdampak pada pendapatan;
5. Kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan harus dilaksanakan dengan keterbatasan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;
6. Tingkat literasi digital UMKM dan pedagang pasar tradisional dalam rangka mengakses pemasaran secara daring masih perlu ditingkatkan; dan
7. Kesadaran wisatawan dalam menerapkan protokol kesehatan masih membutuhkan pengawasan secara ketat dan menyeluruh.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan tersebut, terdapat beberapa solusi pemecahan masalah yang sudah dilakukan dan dapat menjadi dasar pengembangan bagi perencanaan selanjutnya:

1. Monitoring Evaluasi penerapan protokol kesehatan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak sedikit mengingat besarnya jumlah Hotel, restaurant, ODTW, Pasar Tradisional dan ruang public lainnya di Kota Yogyakarta. Untuk mengatasi keterbatasan SDM Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan civitas Pemangku Wilayah di tingkat Kemantren (Kemantren, Kelurahan, Puskesmas, Kepolisian Sektor, dan Komandan Rayon Militer);
2. Dalam pengembangan suatu ODTW, pembangunan signage (papan penanda dan penunjuk arah) dapat mengoptimalkan penggunaan tiang rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Merancang desain piktogram secara modular sehingga dapat menyesuaikan dengan keluasaan lahan yang tersedia;
3. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku wisata, pedagang pasar dan UMKM dilakukan dengan pembagian kelas dan pengurangan jumlah peserta sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk perencanaan ke depan diperlukan perencanaan pelaksanaan yang telah mengakomodir asumsi penerapan protokol kesehatan;
4. Pembatasan pengunjung pada ODTW harus dilakukan dan berdampak pada pengurangan pendapatan pengelola ODTW, pengembangan ke depan perlu dikembangkan pendapatan dari atraksi ODTW secara virtual. Untuk meminimalisir pengurangan pendapatan pedagang pasar sebagai dampak pembatasan jumlah pengunjung sudah dilakukan perluasan pasar ke ranah digital melalui kerjasama dengan provider transportasi online. Hal yang serupa dilakukan terhadap UMKM melalui penambahan kerjasama dengan provider *marketplace*; dan
5. Peningkatan literasi digital bagi pengelola ODTW, UMKM, dan Pedagang Pasar harus dilakukan secara berkelanjutan.

6. Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran 6 merupakan bagian dari upaya mencapai misi ke-3 RPJMD, yaitu "Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta". Penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur dari turunnya angka kriminalitas dan berkurangnya jumlah pelanggaran Perda. Pengukuran kinerja sasaran 6 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.348 Pengukuran Capaian Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	600	516	114,00	Sangat Tinggi
Jumlah Pelanggaran Perda	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$	4.250	4.187	101,48	
Rata-Rata Capaian Kinerja		107,74			

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021; Satpol PP, 2021; Hasil Olahan, 2022

Kriminalitas merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai salah satu indikasi tingkat kesejahteraan itu sendiri. Disini diasumsikan bahwa banyak perbuatan kriminal dilatar-belakangi alasan kekurangan ekonomi yang diderita, sehingga tingginya kriminalitas menandakan banyak yang belum mencapai kesejahteraan ekonomi. Cakupan kriminalitas meliputi kejahatan konvensional, transnasional, pelanggaran HAM, dan gangguan Kamtibmas.

Perda merupakan sistem regulasi yang mengatur kehidupan sosial agar berjalan tertib. Adanya pelanggaran Perda mengindikasikan timbulnya potensi-potensi yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk hidup dan beraktivitas. Dengan demikian, jumlah pelanggaran Perda yang menjadi tolok ukur disini adalah yang dilaporkan oleh masyarakat dan/ atau dipantau petugas.

Framework Kebijakan penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:



Penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman didekati dengan 3 proses bisnis: Manajemen, Utama dan Pendukung. Di samping aspek manajemen, terdapat 2 skema intervensi utama yang digunakan, yaitu Preventif dan Represif. Preventif atau upaya pencegahan merupakan skema untuk mengantisipasi agar pelanggaran tidak dilakukan. Sedangkan Represif atau upaya penindakan merupakan skema untuk memberikan *punishment* bagi para pelanggar dengan tujuan memberikan efek jera dan tidak terjadi pelanggaran serupa dikemudian hari. Sebagian besar dari upaya represif ini –yaitu terkait penindakan kriminalitas- tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota. Oleh karena itu, perlu keterlibatan stakeholder lain yang memiliki kewenangan lebih dominan, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Dalam Proses Bisnis diatas, keterlibatan aparat penegak hukum diakomodir dalam skema kerjasama. Karena tupoksi aparat penegak hukum diluar kendali kewenangan Pemerintah Kota, meski krusial, skema tersebut menjadi aspek pendukung untuk mencapai sasaran 6 ini.

Setiap skema intervensi, baik utama maupun pendukung, selanjutnya diturunkan kedalam *logical-framework* berbagai skema operasional turunan, yang pelaksanaanya dilakukan beberapa OPD sesuai Tupoksi masing-masing. OPD yang memiliki peran dominan adalah Satpol PP, yang memiliki ketugasan dalam upaya pencegahan sekaligus penindakan. Kantor Kesbang dan 14 Kecamatan juga memiliki peran signifikan dalam upaya pencegahan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum. OPD lainnya ikut berperan dalam upaya pencegahan, meliputi Dispora, Dindik, Dinsos, Dinas Dalduk KB, serta Bagian Tapem dan Kesra.

Satpol PP melakukan upaya preventif melalui pembinaan dan mobilisasi Linmas. Aktivitas yang dilakukan diantaranya pembekalan, pelatihan dan sarasehan anggota Linmas, serta pengamanan wilayah dan piket rescue oleh Linmas. Upaya preventif ini juga didekati melalui pembinaan gerakan kampung panca tertib yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ketertiban. Upaya tersebut didukung oleh Kantor Kesbang melalui kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan. Dispora juga memiliki skema pendukung dengan sasaran pemuda dan support kegiatan keolah-raga. Dinas Pendidikan mendekati upaya preventif ini melalui pengembangan pembelajaran dan pengelolaan kesiswaan baik tingkat SD maupun SMP. Dinas Sosial bersinergi dengan memberdayakan beberapa elemen masyarakat sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, termasuk Karang Taruna. Dinas Dalduk KB mendekati dengan upaya pembinaan pembangunan berbasis keluarga. Sementara itu, Bagian Tapem melalui penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Peran Kecamatan dalam upaya preventif ini meliputi operasi ketertiban masyarakat, peningkatan kapasitas Linmas, dan di beberapa wilayah terdapat pengamanan masyarakat, sosialisasi pencegahan pelanggaran Perda, dan penyuluhan serta pembinaan PKL.

Upaya penindakan yang dilakukan Satpol PP diantaranya melalui penegakan peraturan perundang-undangan. Operasionalisasinya dilakukan melalui penegakan Perda secara Yustisi, sidang tindak pidana ringan, penyidikan kasus, dan penegakan hukum terhadap saksi/ tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS. Selain itu, operasi ketertiban umum juga dilakukan, yang meliputi penindakan hukum secara terpadu, operasi ketertiban gabungan, pengendalian kawasan tertib, serta

dan penyelidikan. Polisi Pamong Praja sebagai tulang punggung penindakan juga ditingkatkan kapasitasnya melalui kesemaptaan, bimbingan mental, bimbingan teknis, dan workshop. Upaya penindakan ini juga didukung dengan memastikan instrument hukum efektif melalui pengkajian berbagai produk hukum, konsultasi pakar, serta penegakannya di lapangan.

Sebagai instrument pendukung, kerjasama dengan aparat penegak hukum dilakukan melalui 2 tingkat wilayah, Kota dan Kecamatan. Sebagai representasi kota, Kantor Kesbang memiliki kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan. Sementara untuk tingkat wilayah, setiap kecamatan menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban. Upaya Kecamatan tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan bagi koordinasi antar pemerintah dan masyarakat, diantaranya melalui forum pembauran kebangsaan dan forum kewaspadaan dini masyarakat serta di beberapa wilayah terdapat pelatihan bela negara bagi generasi muda serta dan workshop FKUB.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, upaya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dominan dilaksanakan oleh Satpol PP. OPD lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan diwarnai dengan adanya Pandemi yang menginterupsi kelancaran kegiatan. Namun demikian, kembalinya aktivitas masyarakat menjadi normal menimbulkan potensi pelanggaran perda di Kota Yogyakarta meningkat. Sektor pariwisata dan ekonomi yang mulai menggeliat berdampak pada naiknya jumlah pelanggaran perda terutama untuk PKL, reklame dan Kawasan Tanpa Rokok. Pelaku pelanggaran terutama terkait pemasangan reklame menjadi permasalahan tersendiri, mereka memasang secara sembunyi-sembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas. Sehingga butuh strategi baru dalam pelaksanaan patroli untuk mengatasi hal tersebut.

Jumlah realisasi 4.187 pelanggaran didapat dari penegakan perda secara non yustisi sebesar 4.027 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 160 pelanggaran, baik yang didapat dari laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan dari hasil operasi petugas di lapangan. Kegiatan patroli secara rutin oleh petugas Pol PP dalam rangka monitoring dan operasi penegakan perda dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di wilayah Kota Yogyakarta dengan pola 3 shift selama 24 jam dalam sehari baik melalui monitoring terbuka maupun monitoring tertutup dengan dukungan personil dari Pol PP Intelijen. Intensifikasi koordinasi baik di internal Pemkot Yogyakarta maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dsb) serta kerjasama kemitraan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) kerjasama, dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penegakan peraturan perundang-undangan di Kota Yogyakarta. Selain itu dukungan personil dari Linmas turut berkontribusi bagi terwujudnya perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta. Laporan masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda di wilayah, dilaporkan kepada petugas Bawah Kendali Operasi (BKO) yang ditempatkan di tiap kecamatan sebagai petugas terdepan dalam penanganan masalah pelanggaran perda dan seoptimal mungkin untuk dapat terselesaikan di tingkat wilayah.

Strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif dilakukan melalui dukungan, peran serta dan pola kerjasama dengan kemitraan dalam rangka turut menjaga ketentraman dan ketertiban

Yogyakarta melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat dan sosialisasi Gerakan Panca Tertib berbasis Kampung (melalui Deklarasi dan penandatanganan komitmen serta penumbuhan dan pemberdayaan Gerakan Kampung Panca Tertib), berbasis sekolah (*Pantib for School*) dan berbasis komunitas (*Pantib for community*) yang bertujuan memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat, bukan hanya untuk mentaati peraturan perundang-undangan tetapi sekaligus sebagai subjek pendukung dalam menjaga dan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam lingkup kampung pada khususnya dan Kota Yogyakarta pada umumnya. Gerakan kampung Panca Tertib sebagai bagian dari skema preventif juga terus dilakukan. Gerakan ini disisi lain juga merupakan bagian dari skema peningkatan keberdayaan masyarakat berbasis kampung untuk pencapaian sasaran kedua. Pembentukan dan penumbuhannya dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan relawan dimasing-masing wilayah. Prosesnya meliputi sosialisasi, pelatihan dan deklarasi komitmen.

Permasalahan yang timbul terkait implementasi strategi penegakan perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan cenderung membuka ruang melakukan pelanggaran kembali. Bahkan upaya yang sampai pada level putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda pun belum cukup efektif. Apalagi di masa pandemi Covid19, keterbatasan aktivitas sosial berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk dengan cara melanggar peraturan. Pandemi juga berpengaruh terhadap ruang gerak petugas operasional Pol PP dalam penegakan perda. Sebagai contoh terdapat kebijakan penundaan pengajuan berkas berita acara penyidikan pelanggaran ke persidangan oleh pengadilan negeri dalam kurun waktu tertentu karena berpotensi memudahkan penularan virus, menjadi faktor penghambat tidak optimalnya penegakan perda.

Upaya penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban meskipun telah melampaui target, sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Pandemi beserta pembatasan-pembatasan social ekonomi menjadi salah satu simpul penting. Upaya penindakan yang kurang menimbulkan efek jera salah satunya juga karena tekanan pandemik. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dimasa depan, perlu upaya peningkatan konsolidasi antar stakeholder. Momentumnya untuk tahun depan adalah masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi. Kehidupan cara pandemi yang sudah dianggap normal tersebut menghadirkan peluang penegakan peraturan, baik terkait kriminalitas secara umum maupun Perda, secara normal juga. Dalam hal ini, stakeholder terkait perlu lebih mengintensifkan upaya penegakan, termasuk sampai pada tahap peradilan jika diperlukan. Masa pandemi menghadirkan *intuisi* bagi pelaku pelanggaran untuk memaklumi pelanggaran yang dilakukan, sehingga upaya penegakan dianggap *counter-intuitive* sehingga cenderung diabaikan. Namun sesuatu yang dianggap *counter-intuitive* tersebut dilakukan secara lebih intensive, berulang-ulang dan terus menerus, maka pada akhirnya akan tertanam kembali jika pelanggaran tersebut memang sesuatu yang salah dan harus dihindari.

stakeholder yang sifatnya *ngaruhke* sekaligus menyegarkan dan menengahkan isu-isu ketentraman, ketertiban, serta aktivitas-aktivitas social yang bersifat positif sebagai pengalihanya. Dalam setiap pertemuan tersebut yang dibalut acara formal, komunikasi-komunikasi interpersonal non-formal juga terjadi yang juga mendukung hubungan baik antar actor sehingga upaya yang dilakukan, baik pencegahan maupun penindakan jadi semakin solid dan kompak. Namun, pelaksanaan aktivitas tersebut menjadi jauh berkurang sejak adanya Pandemi. Sebagai alternative, pertemuan-pertemuan mulai dialihkan menjadi pertemuan secara virtual. Sebagaimana beragamnya masyarakat, keberterimaan terhadap teknologi virtual tersebut juga beragam sehingga dalam waktu dekat ini belum semua pihak familier dengan teknologi tersebut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi dua pihak sekaligus. *Pertama*, stakeholder yang bersinggungan dengan isu pembangunan, khususnya ketentraman dan ketertiban, perlu lebih intens membiasakan komunikasi-koordinasi kolektif secara virtual. *Kedua*, penyedia jasa layanan teknologi pertemuan virtual, khususnya internal Pemkot, perlu inovasi-inovasi untuk menyederhanakan aplikasi agar lebih mengakomodasi keterbatasan-keterbatasan yang dialami pengguna dengan latar belakang yang berbeda.

7. Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi ke empat yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya" dan tujuan "Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan". Untuk mengukur keberhasilan sasaran ke tujuh ini ada 2 (dua) indikator yang dipakai yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Pengukuran indikator sasaran kualitas pendidikan meningkat pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.349 Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
ARLS	$RLS = \frac{\text{Jumlah Lama Sekolah Penduduk Usia 25th Keatas}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 25th Keatas}}$	11,46 th	11,72 th	102,27	Sangat Tinggi
AHLS	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	17,43 th	17,60 th	100,98	
Rata-rata Capaian Kinerja		101,625			

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dari tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Selain rata-rata lama sekolah, indikator dari kualitas pendidikan meningkat adalah Harapan

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Framework Kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.26 Proses Bisnis Kualitas Pendidikan Meningkatkan

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Skema sebagaimana digambarkan dalam proses bisnis diatas mensyaratkan keterlibatan beberapa OPD yang memiliki ketugasan terkait. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengambil peran paling pokok, memasuki hampir semua aspek, baik utama maupun pendukung. Beberapa OPD lain yang ikut berkontribusi dalam aspek utama adalah Kemantren/Kecamatan (PAUD), Dinsosnakertrans (Pendidikan Inklusi). Aspek pendukung untuk pemenuhan sarpras dilakukan oleh Dinas PUPKP, penguatan data dan informasi oleh Dinsosnakertrans, pengembangan budaya literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Keterampilan oleh Dinas Kebudayaan, dan Kemantren/Kecamatan.

Tahun 2021 ini menjadi proses penyesuaian bagi penyelenggaraan proses pembelajaran di masa pandemic covid-19 yang mulai menyerang sejak maret 2020. Dinas Pendidikan memiliki beragam intervensi pada masing-masing aspek.

Aspek Pendidikan SD, SMP mempunyai pola yang serupa dalam intervensinya. Memastikan bagaimana kurikulum pembelajaran dikembangkan terlebih penyesuaian bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa namun juga menjadi panduan bagi guru dalam kemudahan evaluasi hasil belajar siswa di masa pandemic covid-19 dengan penerapan proses belajar mengajar secara daring, luring dengan ketentuan dan penjadwalan tertentu, maupun metode hybrid/campuran antara daring dan luring. Aspek Pendidikan SD dan SMP juga memikirkan bagaimana para siswa dapat tetap mengembangkan diri melalui beberapa kompetisi keiuraan yang diselenggarakan baik local, nasional.

untuk ini merupakan kolaborasi antara pendataan kondisi sarpras yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan pelaksanaan pemenuhannya baik melalui Dindikpora maupun Dinas PUPKP. Sementara dari sisi kelembagaan dan manajemen sekolah baik Pendidikan SD dan SMP melakukan pendampingan pengelolaan dan pengembangan manajemen sekolah termasuk melakukan pengelolaan dana BOS serta pendampingan akreditasi sekolah.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran, pengelolaan prestasi siswa, pengelolaan BOS dan BOSDA, serta jaminan pendidikan daerah memperkuat aspek pendidikan, baik SD maupun SMP. Dari sisi kurikulum jenjang SD, pembuatan modul pembelajaran kelas 1 s.d 6 jenjang SD menjadi salah langkah perubahan yang diupayakan dalam rangka penyediaan bahan pembelajaran yang dibutuhkan oleh semua pihak, terutama di masa pandemic ini. Pembuatan modul pembelajaran inovatif ditujukan untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Didalam modul pembelajaran ini selain terdapat materi juga terdapat latihan soal sebagai bahan evaluasi pencapaian pembelajaran dan uraian penilaian yang harus dikuasai oleh guru. Modul ini dirancang lebih ringkas dan mudah dipahami sehingga menarik minat siswa untuk membacanya karena bahasa yang digunakan lebih sederhana dibandingkan dengan buku teks pelajaran namun konten materinya lebih padat sehingga akan lebih memudahkan siswa dalam memahami materi.

Pra KSN (Kompetisi Sains Nasional) SD merupakan kegiatan yang diadakan sebelum pelaksanaan babak penyisihan KSN SD. Kegiatan ini bertujuan supaya sekolah mempunyai referensi/masukan untuk menentukan satu (1) siswa yang akan mewakili mapel IPA dan satu (1) siswa yang akan mewakili mapel matematika maju babak penyisihan KSN yang langsung diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Untuk kegiatan Pra KSN ini masing-masing sekolah mengirimkan peserta maksimal 2x jumlah rombel kelas 5 yang ada di sekolah. Misalnya sekolah A kelas 5 ada 4 rombel, maka sekolah mengirim sebanyak 8 siswa untuk mapel Matematika dan 8 siswa mapel IPA. Disamping itu, peraih 30 besar hasil seleksi klinik sains tahun 2019, juga akan langsung mengikuti kegiatan Pra KSN SD tanpa harus diajukan oleh sekolah. Dari total 164 SD Negeri dan Swasta yang ada di Kota Yogyakarta tercatat ada 148 SD dengan akreditasi A, 15 SD akreditasi B, dan 1 sekolah baru yang belum terakreditasi.

Dalam rangka matrikulasi dan pemetaan kompetensi akademik serta potensi psikologi siswa secara komprehensif guna memaksimalkan proses pembelajaran dan memudahkan guru dalam memberikan treatment kepada siswa di kelas berikutnya yang didasari adanya pandemi covid19, maka Dindikpora melakukan inovasi yang berupa Asesmen General Siswa khusus untuk siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama dan MTS yang selama 2020 melakukan pembelajaran secara daring/ belajar dari rumah. Pembinaan minat, bakat dan kretifitas siswa SMP memperoleh kejuaraan antara lain Kompetis Sains Nasional (KSN) 5 medali (1 emas, 2 perak, & 2 perunggu), KOPSI (Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia) 1 medali perak, Festival Lomba Seni Siswa Nasional 2 medali (1 perak , 1 perunggu), International Science and Invention Fair (ISIF) 5 medali (2 emas, 2 perak & 1 perunggu), South African Youth Engineering and Science Symposium (SAYESS) 2021 2 medali perunggu.

Aspek Pendidikan, Anak usia Dini sepanjang tahun 2021 dilakukan kegiatan yang berupa

dengan hasil inovasi 12 modul PAUD dalam pembelajaran daring; uji kompetensi pendidik PAUD bagi pendidik PAUD dengan syarat sudah mengikuti diklat dasar; sosialisasi, bimtek, dan pendampingan bagi Satuan Pendidikan yang akan diakreditasi melibatkan pengawas TK, penilik, serta asesor pada 55 satuan Pendidikan terdiri dari TK/RA, Kelompok Bermain, TPA, dan SPS. Kegiatan lain yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sasaran 41 peserta didik di PAUD Salma adalah kegiatan pembelajaran secara daring 5 hari dalam 1 minggu dengan rincian kegiatan pembelajaran daring melalui google meet sebanyak 3 kali dan melalui whatsapp group 2 kali dalam 1 minggu, pengambilan materi pembelajaran 1 kali dalam 1 minggu (orang tua datang ke sekolah mengambil bahan ajar), kegiatan ekstrakurikuler (musik, lukis, dan tari) dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu melalui google meet, pengumpulan tugas pembelajaran anak dilakukan dengan mengirimkan bukti foto anak saat berkegiatan atau bersama hasil tugas. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan pula Uji Kompetensi Pendidik PAUD Kota Yogyakarta sebanyak 150 pendidik (Uji Kompetensi 1) dan 30 pendidik (Uji Kompetensi 2), sembilan orang pendidik dan tenaga kependidikan mengikuti berbagai jenis bimtek, pelatihan dan webinar secara daring, menyusun program pembelajaran (Prosem, RPPM, RPPH), menyusun penilaian anak menyusun raport dan portofolio anak. Dukungan dari 14 kemantren/kecamatan yang berupa pembinaan PAUD di wilayah turut melengkapi aspek Pendidikan PAUD di Kota Yogyakarta.

Kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan inklusi adalah peningkatan akses pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dan pelaksanaan konferensi kasus untuk mengurangi hambatan belajar PDBK, yang juga merupakan inovasi dengan branding ULD MENYAPA yang dikembangkan di UPT Unit Layanan Disabilitas Didndikpora Kota Yogyakarta. ULD MENYAPA dengan 3 kegiatan inovasi antara lain pertama, pendampingan secara luring ke rumah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atas ijin orangtua siswa, kedua, kunjungan psikolog ke sekolah untuk mengasesmen siswa bermasalah, ketiga kasus yang ditemukan dibahas dalam konferensi kasus melalui zoom meeting tiap 2 minggu sekali, didampingi psikolog ULD dan narsum dari kampus. Hasil bahasan konferensi kasus ini adalah rekomendasi untuk memperbaiki / membantu mengurangi hambatan belajar siswa yang bersangkutan yang dilakukan oleh Guru Pendamping Khusus, Guru Kelas, maupun orangtua. Siswa yang bermasalah dan sudah di konferensi kasuskan ini di monitor perkembangannya oleh Tim ULD sampai tuntas. Assesmen dilakukan kepada 459 anak ke psikolog yang terdeteksi bermasalah berat 85 anak, dan 55 diantaranya terselesaikan masalahnya. Tahun 2021 sudah ada 92 sekolah ber SK SPPI (Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi), dengan proporsi SPPI sebagai berikut TK/PAUD :8, *Homeschooling*: 1, SD: 58 dan SMP: 25. Sekolah lain meskipun tidak ber SK SPPI wajib melayani Peserta Didik berkebutuhan khusus disekolahnya. Jumlah guru pendamping khusus (GPK) negeri 83 orang, swasta 37 orang. Dukungan kegiatan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berupa pemberian biaya pendidikan dan persediaan obat-obatan bagi 29 anak terlantar di UPT Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo dan 507 rekomendasi keringanan biaya pendidikan dilakukan untuk menjamin kelancaran pendidikan terutama bagi anak-anak dalam kelompok rentan (terlantar dan atau miskin)

kegiatan dari organisasi perangkat daerah yang lain. Aspek peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan peningkatan pendidikan guru yang belum S1. Tercatat jumlah dan sebaran guru TK =1020, SD=2786, SMP=1515, Total =5321. Dari data total yang ada, didapat guru belum S1 sebanyak 45 orang (sumber Dapodik). Guru inilah yang kemudian berhak mendapatkan bantuan beasiswa.

Pemenuhan aspek standar dan sarpras pendidikan terutama di pembangunan atau renovasi gedung yang merubah secara struktur menjadi kewenangan Dinas PUPKP. Bermula dari hasil pemetaan kelayakan gedung/ updating data ledger, yang kemudian rencana pembangunannya dimulai dari penyusunan DED sampai dengan bangunan selesai dibangun.

Aspek penguatan data dan informasi didukung dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di Dindikpora. Bimbingan belajar yang diisi oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya untuk memfasilitasi siswa dalam memahami pelajaran sekolah melalui inovasi pembelajaran secara daring menggunakan zoom meeting dan live youtube, mengirimkan pertanyaan terkait pembelajaran di website Konsultasi Belajar Siswa (KBS), pengumpulan informasi tentang kegiatan siswa di yang dikonversi menjadi nilai/poin melalui inovasi monitoring kegiatan siswa di sekolah dengan berbasis web dan jss yang dilaksanakan di 16 sekolah SMP melalui SIMONS (Sistem Monitoring Siswa), inovasi dalam membuat sistem untuk pengumpulan informasi tentang data pokok pendidikan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, bersumber dari Dapodik ataupun Emis (dibawah kementerian agama), sehingga akan bisa diidentifikasi data anak Kota Yogyakarta yang bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Berikutnya adalah tersedianya sistem pengajuan permohonan legalisir dan permohonan mutasi siswa secara online melalui SIPETEESPE, pengembangan system informasi manajemen Jaminan Pendidikan Daerah dengan merubah beberapa menu antara lain JPD untuk mahasiswa, JPD untuk penghuni Panti Asuhan Swasta di Kota Yogyakarta, bantuan biaya satuan Pendidikan, mobile template. Fokus lain Dindikpora yang tidak kalah penting terkait input dari proses pendidikan adalah penerimaan Peserta Didik Baru secara Online dan Offline jenjang SD dan SMP. Inovasi pembuatan Sistem Informasi Kelembagaan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga (sigasspol) dalam membuat basis data yang menampung informasi kelembagaan sarana prasarana pemuda dan olahraga sehingga dapat diakses masyarakat luas, sekaligus menjadi pelengkap dari sisi keolahragaan sebagai wadah bagi pelajar yang mempunyai minat bakat khusus di bidang olahraga. Dinsosnakertrans berperan dalam memberikan dukungan data anak-anak usia sekolah yang berhak mendapatkan bantuan jaminan pendidikan daerah. Tahun 2021 ini alokasi jaminan Pendidikan Daerah sebanyak 14.100, dalam perjalanannya setelah dilakukan verifikasi terealisasi sejumlah 13.415. Jaminan Pendidikan Daerah ini dapat diterimakan langsung kepada peserta didik KMS untuk memenuhi biaya personal maupun biaya satuan pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan swasta, melalui Kartu Jogja Berprestasi, dan penyalurannya 2 kali dalam 1 tahun. Jaminan pendidikan daerah disalurkan secara non-tunai untuk kepentingan belanja terkait keperluan sekolah, yaitu dengan menggunakan debit card, kerjasama dengan BPD dan Merchant partner.

Aspek pengembangan budaya literasi didukung penuh oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

artinya kualitas perpustakaan juga harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan pula kualitas pembinaan perpustakaan yang ditempuh melalui beberapa kegiatan antara lain membekali masyarakat di kampung baca dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diterapkan berbasis buku-buku perpustakaan; mengelola layanan perpustakaan umum dan keliling PUSPITA (Perpustakaan Alternatif Kota Yogyakarta) antara lain layanan perpustakaan keliling berbasis kewilayahan yang menggunakan motor roda tiga sebanyak 9 unit, MONIKA (Mobil Internet Kewilayahan) yaitu layanan perpustakaan keliling berbasis internet dengan menggunakan armada mobil sebanyak 2 unit, BILI (Mobil Keliling), layanan perpustakaan keliling yang dikhususkan untuk sekolah dasar sebanyak 2 unit; mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial; membina perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus/instansi, dan kampung baca, dengan jumlah total 250 perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus/intansi dan kampung baca yang telah dibina sampai dengan akhir 2021; membangun aplikasi perpustakaan digital (e-library YK). Kegiatan lain yang menjadi catatan inovasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah, literasi terapan, Pelatihan Menulis Jelita (Jejak Literasi Siswa Kota Yogyakarta) dan Melisa (Merajut Literasi Siswa Kota, Bank Buku Jogja (Baby), Belinda (Blind Corner untuk Anda), Jamila (Jaminan Mengantarkan Buku Andalan ke Pemustaka), Anisa (Kartu Anggota Istimewa Perpustakaan Kota Yogyakarta), Moli (Motor Keliling), Lestari (Lesehan Literasi Jogja Istimewa), Pojok Baca, Saskia (Sabtu Seru di Perpustakaan Kota Yogyakarta), Talita (Wisata Pengenalan Literasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta), Bianca (BI Corner untuk anda), Starla (Story Telling Online Perpustakaan Kota Yogyakarta).

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran delapan dari aspek pendidikan masyarakat dan pembinaan lembaga pendidikan keterampilan di dukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, dan 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Dinas pendidikan melakukan intervensi melalui fasilitasi pendidikan masyarakat paket A, B, dan C bagi masyarakat yang tidak dapat sekolah di sekolah formal atau lebih memilih pendidikan non formal/ kesetaraan melalui lembaga seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sampai dengan saat ini terdapat 16 PKBM dan 1 SKB di Kota Yogyakarta, dengan. Dinas Kebudayaan melakukan intervensi melalui kegiatan Kompetisi Bahasa dan Sastra terdiri dari (Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara, Geguritan, Pranata adicara, *Stand up Comedy* Jawa, Alih Manuskrip, Sesorah) dengan sasaran Pelajar di Kota Yogyakarta (SD, SMP, SMA). Siswa SD sebanyak 104 orang, siswa SMP sebanyak 107 orang, dan siswa SMA/SMK sebanyak 148 orang, Lomba Cerdas Cermat Sejarah dengan sasaran Pelajar SMA di Kota Yogyakarta sebanyak 81 siswa yang dibagi dalam 27 kelompok, Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan dengan sasaran, Lomba Lukis DIY-Kyoto dengan sasaran Pelajar di Kota Yogyakarta (TK, SD, SMP, SMA/SMK). Siswa TK sebanyak 9 orang, siswa SD sebanyak 114 orang, siswa SMP sebanyak 53 orang, dan siswa SMA/SMK sebanyak 38 orang. Kemantren mengambil peran melalui pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat.

8. Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu pendukung pencapaian misi keempat yang

keberhasilan sasaran ke delapan ini indikator yang dipakai adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Pengukuran pencapaian sasaran ini berdasarkan pada data BPS tahun 2021. Hasil pengukuran sasaran harapan hidup masyarakat meningkat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.350 Pengukuran Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Angka harapan hidup	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	74,65	74,76	100,15	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Framework kebijakan peningkatan angka harapan hidup disajikan pada bagan berikut ini:



Gambar 2.27 Proses Bisnis Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Proses bisnis yang dibangun tersebut juga sangat relevan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. SPM tersebut mencakup 12 isu layanan kesehatan. 7 diantaranya layanan kesehatan sepanjang hidup, secara umum berdasarkan pengelompokan umur, yaitu layanan (1) ibu hamil dan (2) bersalin, (3) bayi baru lahir, (4) balita, (5) usia pendidikan dasar, (6) usia produktif, dan (7) usia lanjut. Sementara itu, 5 layanan lainnya berdasarkan kelompok jenis penyakit, yaitu (1) layanan kesehatan penderita hipertensi, (2) diabetes mellitus, (3) orang dengan gangguan jiwa berat, (4) orang terduga tuberkulosis, dan (5) orang dengan resiko terinfeksi HIV. Sebagian besar intervensi peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat menyentuh aspek kesehatan ibu dan anak. Sedangkan instrument pencegahan dan pengendalian penyakit yang disupport semua aspek lainnya menasar pada 5 SPM terkait penyakit. Sementara itu, layanan untuk usia pendidikan dasar, produktif dan lansia ditangani mulai dari aspek screening kesehatan sampai penanganan

Keberhasilan dari aspek kesehatan masyarakat meningkat terpengaruh oleh keberhasilan bagaimana Dinas kesehatan melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dasar, anak usia produktif, lanjut usia, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga TB, resiko terinfeksi HIV, kesehatan gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olah raga, kesehatan lingkungan, termasuk keberhasilan puskesmas dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat.

Biaya jaminan persalinan, Peningkatan ketrampilan petugas dalam penanganan kegawatan maternal neonatal melalui metode drilling, penguatan dan orientasi pelayanan bayi baru lahir neonatal esensial, pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital, penguatan pelayanan balita, penguatan penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak, pendampingan kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit / Manajemen Terpadu Bayi Muda, aksi konvergensi penurunan stunting, Rencana Aksi Daerah 8000 Hari Pertama Kehidupan, penguatan kesehatan calon pengantin, pelaksanaan skrining anak usia sekolah menggunakan aplikasi Mobscreen penjarkes -aplikasi screening anak sekolah yang bisa diisi mandiri melalui HP atau computer. Selain itu penambahan pengetahuan untuk bidan pemberi layanan bagi 60 orang di puskesmas dan praktik mandiri bidan, pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) & kanker payudara dengan metode Sadanis pada WUS seksual aktif dengan sasaran 30 WUS per kelurahan dengan total jumlah diperiksa 1.350 WUS. Kegiatan lainnya adalah deteksi dini faktor risiko PTM pada Institusi (Posbindu Balaikota Yogyakarta), validasi data PTM Keswa pada 18 Puskesmas pemeriksaan orang terduga TB baik di puskesmas maupun di rumah sakit melalui pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM), Mikroskopis, atau pemeriksaan penunjang lainnya sebanyak 5.547 terduga TB (data per 14 Desember 2021). Pemeriksaan orang dengan resiko terinfeksi HIV di Puskesmas maupun di Rumah Sakit melalui Tes HIV sebanyak 8.833 orang dengan resiko terinfeksi HIV telah di tes HIV (Data kumulatif hingga November 2021), pertemuan koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan monev penerapan prinsip kesehatan kerja dan kesehatan olahraga pada lintas program, lintas sektor termasuk sektor swasta, penyusunan dokumen lingkungan berupa UKL UPL untuk Puskesmas Gedongtengen dan Puskesmas Jetis yang sedang melakukan pengembangan fasilitas di Puskesmas tersebut, pengambilan dan pemeriksaan sampel air sebagai bentuk pengawasan 158 sampel, pengelolaan limbah medis vaksinasi massal dan shelter Pemerintah Kota Yogyakarta, pertemuan koordinasi forum dan pembina kota sehat, pemberian penghargaan kepada lokasi unggulan kota sehat adalah macam kegiatan lain yang dilaksanakan Dinas Kesehatan sepanjang tahun 2021. Bentuk kegiatan lain yang mendukung adalah pelaksanaan vaksin masal di tingkat kota dan wilayah. Awalnya melaksanakan sesuai tahapan vaksin. Tahap 1 untuk tenaga kesehatan, tahap 2 untuk pelayan publik, dan lansia, tahap 3 untuk masyarakat rentan dan tahap 4 untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat umum, awalnya hanya melayani KTP Kota Yogyakarta, namun kemudian dibuka untuk seluruh KTP nasional. Aspek Kelas ibu hamil, desinfo program kader pendamping bumil, validasi data ibu hamil, Kunjungan rumah ibu hamil beresiko tinggi. Pendataan ibu bersalin dan bayi baru lahir oleh kader. Desinfo program kader

DP3AP2KB ikut berperan terhadap pencapaian sasaran 8 dari aspek kesehatan masyarakat. Jumlah penduduk terkendali dengan penggerakan kegiatan di kampung KB melalui Bina keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta KIE program KB dan Kesehatan Reproduksi melalui penyuluhan di Balai Penyuluhan KB, Pelayanan KB dan Deteksi Dini faktor resiko Kanker Serviks melalui Papsmear menjadi fokus dalam kegiatannya. Kegiatan lainnya berupa peningkatan kapasitas kelompok UPPKA, inisiasi pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pendampingan lembaga layanan keluarga, pendampingan kegiatan dapur balita, poyandu balita, posyandu lansia, pemberian makanan tambahan bagi anak dengan gizi kurang.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung dari pelaksanaan kegiatan yang berupa kunjungan kepada 20 lansia melalui Jogja Sapa Lansia untuk lebih memahami kondisi lansia tersebut berbasis kemandirian, pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan kedaruratan bagi 59 lansia di UPT Budhi Dharma.

Aspek peningkatan layanan Kesehatan tercermin dalam kinerjanya puskesmas dengan indikator indeks kepuasan layanan puskesmas. Cerminan kegiatan yang ada di 18 puskesmas di Kota Yogyakarta dalam upaya peningkatan layanannya adalah sebagai berikut pendataan & kunjungan rumah ibu nifas & neonatus, pendataan PUS/WUS & IVA, Kelas Ibu Hamil Saat Pandemi Dengan Online (KASIH SEMPOL), Koordinasi Forum Gerakan Sayang Ibu (GSI) di wilayah, desinfo program audit maternal perinatal, sweeping kunjungan neonatus dan nifas lengkap oleh kader, Orientasi e-kohort, supervisi fasilitatif, refreshing cara mengukur panjang badan bayi baru lahir, pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas dan Praktik Mandiri Bidan (PMB), PHN untuk Bufas dan BBL, Pertemuan Pendampingan Balita Bermasalah, Kunjungan Balita Gizi Buruk dan Kurang, Pertemuan Pendampingan Balita Bermasalah, Simulasi PMBA Untuk Ibu Baduta Di Posyandu, Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Di Posyandu, Pendataan Balita Oleh Kader, Supervisi Fasilitatif Ke Jejaring Puskesmas, PMT Pemulihan Balita gizi Kurus, sweeping Imunisasi, Orientasi P4K bagi bidan, kepala desa/kelurahan/kader/tokoh masyarakat Desa.

RS jogja mengambil peran pada aspek peningkatan layanan Kesehatan melalui beberapa kegiatan yang ada di dalamnya antara lain (1) pengadaan alat kesehatan, (2) pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala, (3) pengembangan SIM RS Ruang lingkup aplikasi SIMRS, mencakup pengelolaan informasi dalam lingkup manajemen pasien (front office), data medis dan data manajerial. Lingkup ini antara lain sebagai berikut: 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik 3. Pelayanan Rawat Inap 4. Filing 5. Apotek 6. Gudang Farmasi 7. Sistem Keuangan 8. Pelayanan Penunjang 9. Pelayanan Ruang Tindakan 10. Pelayanan Intensive 11. Pelayanan Penjaminan 12. Pelayanan Rekam Medis, (4) Pelatihan Karyawan RS yang dilakukan dengan optimalisasi pelatihan secara daring, (5) penanganan dan Pencegahan COVID-19 dengan cara 1. Melakukan renovasi ruangan di bangsal perawatan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 (bengkel ledaluca dan flambevan) 2. Renovasi bangunan untuk menambah ruang isolasi di ICD 3.

COVID-19 (bansal vinolia) 5. Renovasi bangunan poliklinik untuk mencegah penyebaran COVID-19 (poli gigi).

Promosi Kesehatan memegang peran di dalam aspek pencegahan dan pengendalian penyakit. Kedalaman kegiatan yang dilakukan antara lain (1) Penyelenggaraan workshop tema keamanan pangan dengan narasumber dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan dari BPOM DIY dengan sasaran penggiat usaha pangan di 45 kelurahan di Kota Yogyakarta. (2) Penyelenggaraan sosialisasi terkait Covid-19 kepada para tokoh masyarakat seperti LPMK, KESI, PKK, Ketua RT/RW dll di 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta dengan narasumber dari DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, pembuatan berbagai media promosi kesehatan dalam bentuk cetak (leaflet, flyer, kalender, dll) sebagai bahan edukasi dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sasaran, tes kebugaran Calon Jamaah Haji, test kebugaran bagi karyawan puskesmas, pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, ASN tingkat kecamatan, anak sekolah, dan jemaah haji), pengukuran kebugaran jasmani pada kelompok masyarakat (calon jemaah haji, kelompok olahraga masyarakat dan kelompok pekerja).

Aspek regulasi dikawal oleh Dinas Kesehatan secara langsung dengan mematikan Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sekaligus melihat validitas perizinan Apotek, Toko Obat, dan UMOT.

Aspek pengembangan data dan informasi melibatkan 3 OPD sekaligus yaitu DP3AP2KB yang support terhadap data kekerasan terhadap anak/perempuan yang memerlukan rujukan layanan kesehatan, Dinsosnakertrans yang support untuk menyediakan database PBI Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi, dan Dinas kesehatan yang melakukan update terkait data-data kesehatan lewat produk Profil Dinas Kesehatan.

Aspek pengembangan tenaga kesehatan menjadi ketugasan dinas kesehatan dalam pemetaan, pemenuhan, distribusi, monitoring perijinan, termasuk peningkatan kompetensinya.

Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan ada peran dari Dinas Kesehatan, DPUPKP, serta kecamatan/kemantren. Upaya pemenuhannya terlihat dari kegiatan pembelian barang habis pakai berupa alkohol swab sebanyak 1.100 box @ 100 buah dan Blood Lancet sebanyak 550 box @ 200 buah dan reagen gula dan didistribusikan ke Puskesmas untuk deteksi dini FR PTM (Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular), tersedianya posbindu kit di 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta yang menjadi daya dukung kelancaran pelaksanaan posbindu di wilayah. Sedangkan Dinas PUPKP secara teknis melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan/Gedung baru maupun renovasi yang merubah struktur sebelumnya.

Peran dari kemantren terlihat dengan adanya pembinaan KESI dan RW Siaga, Lomba Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Lomba Balita Sehat, Lomba Administrasi Posyandu, dan Senam Lansia.

Keberhasilan pencapaian target angka harapan hidup masyarakat ini tidak lepas dari

komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi dengan

melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara, didukung dengan sumber daya manusia kesehatan lainnya

Square, maupun PDAM. Hal ini merupakan respon cepat yang diambil pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk jaminan layanan kesehatan masyarakat di masa pandemi covid-19. Adapun kendala yang masih dijumpai adalah kegiatan yang bersifat melibatkan massa tidak dapat berjalan optimal seperti posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, masih terbatas dalam pelaksanaannya, meskipun sudah dilakukan pengalihan metode pelaksanaan. Hal ini menjadi catatan perbaikan kinerja pada periode mendatang agar *outcome* tetap dapat tercapai meskipun terdapat perubahan metode.

9. Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Sasaran strategis 9 memiliki 1 (satu) indikator yakni Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah rintisan kelurahan budaya yang aktif dibandingkan jumlah rintisan kelurahan budaya. Realisasi indikator sasaran pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.351 Pengukuran Capaian Sasaran Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif}}{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya}} \times 100\%$	67%	70,83%	105,72	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Pada tahun 2021, ada penambahan 1 Rintisan Kelurahan Budaya yang ditetapkan menjadi Kelurahan Budaya yakni Kelurahan Gedongkiwo dan 4 Kelurahan yang ditetapkan menjadi RKB baru yaitu Kel. Patangpuluhan, Kel. Pakuncen, Kel. Giwangan, dan Kel. Brontokusuman, sehingga total Rintisan Kelurahan Budaya ada 24 RKB.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat dengan target persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif pada tahun 2021 sebesar 70,83 %. Dari penilaian yang dilakukan terhadap keaktifan Rintisan Kelurahan Budaya terdapat sebanyak 17 Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif dari sejumlah 24 Rintisan Kelurahan Budaya yaitu: Keparakan, Purbayan, Pandean, Cokrodiningratan, Ngampilan, Prenggan, Gunung Ketur, Wirobrajan, Warungboto Semaki, Bausasran, Rejowinangun, Sorosutan, Pringgokusuman, Pakuncen, Purwikananti dan Prawirodirjan. Sesuai dengan formula indikator sasaran, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif}}{\text{Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya}} \times 100\% = \frac{17}{24} \times 100\% = 70,83\%$$

Penilaian aktifitas Rintisan Kelurahan Budaya pada tahun 2021 mencakup aktivitas masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan seni budaya dengan interval penilaian keaktifan Rintisan Kelurahan

indikator, dimana masing-masing indikator memiliki nilai tertinggi 20, sehingga nilai tertinggi/maksimal yang diperoleh Rintisan Kelurahan Budaya adalah 90.

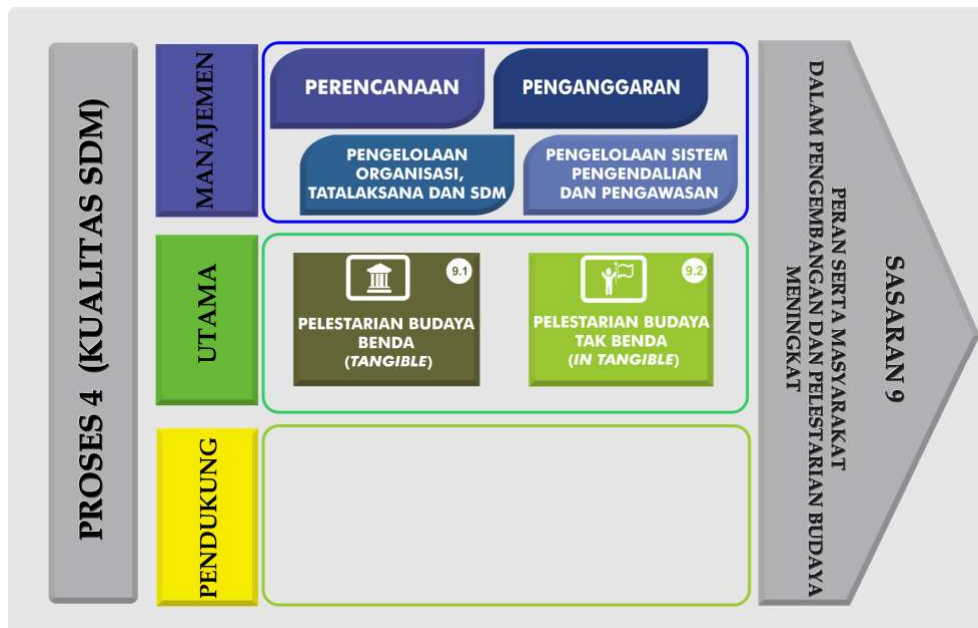
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya yang menjadi indikator keaktifan pada tahun 2021 meliputi 5 Indikator penilaian: Adat dan Tradisi, Kesenian dan Permainan Rakyat, Bahasa, Sastra, dan Aksara, Kerajinan, Kuliner, dan Pembuatan Obat Tradisional, dan Penataan Ruang dan Bangunan Warisan Budaya Seperti terlihat dalam tabel penilaian terhadap 21 Rintisan Kelurahan Budaya sebagai berikut:

Tabel 2.352 Aktivitas Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta Tahun 2021

No.	Rintisan Kelurahan Budaya	Adat dan Tradisi	Kesenian dan Permainan Rakyat	Bahasa, Sastra, dan Aksara	Kerajinan, Kuliner, dan Pembuatan Obat Tradisional	Penataan Ruang dan Bangunan Warisan Budaya	Total	Predikat
1	Purbayan	15	15	20	20	20	90	Aktif
2	Keparakan	15	20	15	20	20	90	Aktif
3	Pandeyan	15	20	20	20	15	90	Aktif
4	Cokrodingratan	14	19	19	19	14	85	Aktif
5	Semaki	14	18	18	20	15	85	Aktif
6	Rejowinangun	14	20	18	15	18	85	Aktif
7	Pringgokusuman	14	18	18	20	15	85	Aktif
8	Ngampilan	14	17	18	20	14	83	Aktif
9	Prenggan	14	18	17	20	14	83	Aktif
10	Warungboto	13	18	20	17	14	82	Aktif
11	Sorosutan	13	18	17	20	14	82	Aktif
12	Wirobrajan	14	17	17	20	14	82	Aktif
13	Gunungketur	14	18	18	19	13	82	Aktif
14	Bausasran	14	17	18	18	14	81	Aktif
15	Pakuncen	14	18	17	18	14	81	Aktif
16	Prawirodirjan	14	17	18	18	14	81	Aktif
17	Purwokinanti	13	17	19	18	14	81	Aktif
18	Kotabaru	13	18	16	18	14	79	Cukup Aktif
19	Patehan	14	17	16	18	14	79	Cukup Aktif
20	Tegalpanggung	14	16	16	18	14	78	Cukup Aktif
21	Baciro	14	18	16	16	14	78	Cukup Aktif
22	Patangpuluhan	14	16	17	17	14	78	Cukup Aktif
23	Brontokusuman	14	16	16	17	14	77	Cukup Aktif
24	Giwangan	14	17	16	16	14	77	Cukup Aktif

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2021

Framework Kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya tersaji dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.28 Proses Bisnis Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Terdapat 5 OPD yang memiliki peran pada proses utama adalah Dinas Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan 14 Kecamatan.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya antara lain:

1. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya. Dalam rangka meningkatkan keaktifan Rintisan Kelurahan Budaya, berbagai kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, di antaranya: Peningkatan SDM Pengelola RKB, Gelar Potensi Seni RKB, Parade Musik RKB, Workshop, Pembuatan Video Profil, dan Akreditasi Calon Rintisan Kelurahan Budaya.

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 ini, sudah tercapai 17 RKB yang aktif atau sebesar 70,83%. Serta adanya penambahan 1 RKB yang ditetapkan menjadi KB yakni Kelurahan Gedongkiwo dan 4 Kelurahan yang ditetapkan menjadi RKB baru yaitu Kel. Patangpuluhan, Kel. Pakuncen, Kel. Giwangan, dan Kel. Brontokusuman.

2. Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya melalui Rekomendasi/ Telaah Teknis Bangunan Baru pada Situs, KCB dan Koridor menuju KCB; Rehab BCB; Sosialisasi Bentuk Arsitektur Bangunan di KCB; Apresiasi Kelestarian dan Keterawatan WBCB.
3. Festival Jogja Kota, Jogja Cross Culture, Pagelaran Wayang, Festival Sastra, Pentas Godhong Apa-apa, Rumaket, Pelestarian Adat dan Tradisi, Penghargaan Seniman dan

Sehubungan dengan masih adanya Pandemi Covid 19 pada tahun 2021, maka telah dimunculkan berbagai inovasi yaitu Pentas budaya sebagian besar dilaksanakan secara daring (full daring atau hybrid), dengan model live ataupun tapping serta Sapa Budaya (Menjalin interaksi, jejaring dan kolaborasi antar pelaku seni di Kota Yogyakarta); Penyebarluasan nilai-nilai budaya Kota Yogyakarta melalui film dan bincang budaya sekaligus sebagai promosi budaya Kota Yogyakarta. Optimalisasi Pendaftaran Nomor Induk Kebudayaan melalui sosialisasi ke masyarakat; Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan sebagai pusat aktivitas seniman Kota Yogyakarta untuk mengekspresikan karyanya.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong tercapainya sasaran daerah adalah sebagai berikut : 1) Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Kualitas Budaya 2) Adanya perangkat regulasi yang cukup memadai 3) Adanya Program-Program terkait Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan 4) Ketersediaan Pendanaan melalui Dana Keistimewaan 5) Peran serta aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya , contohnya antusiasme dan partisipasi masyarakat (masyarakat umum dan dari sekolah) yang tinggi dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan. 6) Adanya dukungan dari stakeholder kebudayaan yang lain dalam pelaksanaan program kegiatan, seperti Berhasilnya sinergi antara Dinas Kebudayaan dengan lembaga terkait seperti instansi vertikal Kebudayaan (BPNB), lembaga non pemerintahan/LSM dan komunitas/penggiat kebudayaan dan seni serta masyarakat umum dalam upaya penyadaran pelestarian, hingga pengembangan kebudayaan dan seni. 7) Peran aktif guru dan siswa SD dan SMP yang melestarikan seni budaya di Kota Yogyakarta. 8) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain faktor pendorong, tentunya dijumpai pula penghambat dalam pelaksanaan sasaran 9 ini antara lain adanya Pandemi Covid-19 yang meningkat kasusnya pada pertengahan tahun sehingga kegiatan sosial budaya tidak dapat terlaksana sesuai dengan tatakala sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dibatalkan dan perubahan konsep kegiatan. Rangkaian kegiatan dibuat dengan konsep yang berbeda dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai himbuan dari Pemerintah. Hal ini juga berpengaruh besar dengan realokasi dan redesain anggaran yang banyak dialihkan untuk pos anggaran penanganan Covid 19.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa langkah yang dilaksanakan adalah kegiatan yang bersifat pentas, festival dilaksanakan secara daring dan luring (hybrid) serta dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan melihat perkembangan situasi perkembangan covid 19 serta mengoptimalkan pemanfaatan social media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara Daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif.

10. Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan "Mewujudkan

dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Adapun realisasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.353 Pengukuran Capaian Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Luas wilayah sesuai peruntukan dalam RTRW/Luas Wilayah Kota Yogyakarta	79,60%	79,84%	100,3	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Kesesuaian pemanfaatan ruang diukur dengan cara membandingkan antara luas wilayah sesuai peruntukan pola ruang dalam RTRW dengan luas wilayah Kota Yogyakarta. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2021 adalah sebesar 79,84% atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 79,6% dengan capaian kinerja sebesar 100,30%. Tercapainya target kesesuaian ruang ini didasarkan pada perhitungan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang lebih detail berbasis pola ruang masing-masing wilayah dan usaha pengendalian dan pengawasan tata ruang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.354 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah

No.	Kemantren	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Luas Wilayah (%)			
		Diizinkan	Diizinkan Terbatas	Diizinkan Bersyarat	Tidak Diizinkan
1	Gedongtengen	85,97	0,04	0,46	0,90
2	Wirobrajan	85,45	0,94	2,89	0,50
3	Ngampilan	84,61	0,68	2,54	0,19
4	Kotagede	84,24	0,79	4,31	0,31
5	Umbulharjo	84,03	0,65	3,49	1,54
6	Danurejan	82,30	0,94	1,85	1,06
7	Mergangsan	82,10	1,41	3,60	0,71
8	Manrijeron	81,74	2,52	4,84	0,65
9	Gondomanan	81,12	0,62	6,04	0,06
10	Tegalrejo	79,85	0,90	5,83	1,28
11	Gondokusuman	78,77	1,28	5,45	1,52
12	Jetis	78,62	3,10	3,46	0,62
13	Pakualaman	75,10	0,94	11,30	1,58
14	Kraton	53,80	3,54	26,32	5,83
	Jumlah	79,84	1,31	5,88	1,20
				87,03	88,23
				Persentase Luas: Jalan (10,55); Sungai (1,22)	
					11,77

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2021

Di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR, definisi dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang berisi

kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan (X) pada zona lindung maupun zona budi daya dengan penjelasan masing-masing klasifikasi sebagai berikut:

1. Klasifikasi I: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan/diizinkan. Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan;
2. Klasifikasi T: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat secara terbatas;
3. Klasifikasi B: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersyarat tertentu. Hal ini bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam bentuk inovasi atau rekayasa teknologi; dan
4. Klasifikasi X: Merupakan klasifikasi untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan. Artinya, kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta (klasifikasi I) adalah 79,84% dan pola ruang yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah sebesar 1,2%.

Framework peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang tersaji dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.29 Proses Bisnis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun faktor pendorong antara lain 1) Diterbitkannya Peraturan Daerah no 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencabut Peraturan Daerah no 2 tahun 2010 dan Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota

untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi. Sedangkan penghambat yang masih dijumpai adalah masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta mekanisme insentif dan disinsentif belum bisa dilaksanakan.

Adapun usaha-usaha untuk meningkatkan angka persentase pemanfaatan kesesuaian tata ruang antara lain:

1. Penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagai upaya untuk peningkatan persentase pemanfaatan ruang dalam rangka pemanfaatan tanah negara, tanah kasultanan dan tanah kadipaten, termasuk pengadaan tanah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Diharapkan kesesuaian tata ruang dan pertanahannya akan memudahkan proses pemanfaatan selanjutnya.
2. Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagai upaya peningkatan tertib tata ruang dalam proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penyempurnaan format dan isi/konten SKRK untuk menyertakan aturan-aturan terkait secara komprehensif agar lebih memudahkan pemohon dalam pemenuhan kesesuaian tata ruang.
3. Adanya aplikasi sitaru.jogjakota.go.id yang dapat diunduh melalui *playstore* dengan *keyword* atau kata kunci pencarian "SITARU". Dengan aplikasi ini masyarakat dapat aktif mendapatkan informasi terkait dengan zonasi daerah yang ingin diketahui sehingga apabila akan mengajukan rekomendasi sudah yang sesuai dengan PZ (Peraturan Zonasi) secara *online*.
4. Pemberian informasi kesesuaian tata ruang yaitu permohonan informasi tata ruang di zona tertentu secara *offline*.

11. Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi kelima yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu 'Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan' dan tujuan 'Meningkatkan kualitas lingkungan hidup'. Sasaran ini diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi IKLH pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.355 Pengukuran Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	30% IKA+30% IKU+40% ITV	55,64	56,36	101,29	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Framework Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.30 Proses Bisnis Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Terdapat 6 OPD yang memiliki peran pada proses utama adalah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPKP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan pada proses pendukung, terdapat 2 OPD yakni Kesehatan dan 14 Kecamatan pada aspek pemberdayaan masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas air dalam menopang kualitas lingkungan hidup antara lain: 1) Pemberian izin dilakukan secara ketat serta tetap dilaksanakan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi yang membuang limbah ke sungai. 2) Sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran air sungai 2) Kegiatan bersih sungai yang dilakukan secara rutin oleh ulu-ulu sungai yang didukung oleh masyarakat di wilayah pinggiran sungai, mampu mengurangi pembuangan sampah ke sungai.

Selain kualitas air, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga dilaksanakan peningkatan kualitas udara melalui:

1. Pemantauan Evaluasi Kegiatan Udara Perkotaan (EKUP) yang memantau emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan emisi udara tidak bergerak di beberapa ruas jalan Kota Yogyakarta setiap tahun sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta;
2. Penyempurnaan RTHP menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk menjaga kualitas air dan mengurangi polutan udara perkotaan;
3. Melakukan publikasi kepada masyarakat tentang kondisi udara di Kota Yogyakarta, sehingga meningkatkan kepedulian dan informasi lingkungan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan peran serta penghijauan di lingkungan rumah-rumah warga Kota

7. Inventarisasi dan sinkronisasi data Ruang Terbuka Hijau;
8. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan yang bersifat kecil seperti pembersihan di RTHP Permukiman;
9. Melakukan pemeliharaan agar RTHP selalu dalam kondisi hijau, sejuk dan nyaman;
10. Mensosialisasikan pentingnya RTHP ke masyarakat secara langsung ataupun lewat media sosial; dan
11. Melibatkan stakeholder wilayah dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan RTHP. Pembentukan komitmen bersama antara warga, aparat pemerintah, dan pemangku wilayah untuk bersama-sama menjaga RTHP yang ada.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan di atas, terdapat pula faktor yang mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yakni 1) Aktivitas masyarakat perkotaan belum sepenuhnya normal sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan. 2) Pada saat kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan ke nilai yang lebih baik 3) Adanya Laboratorium pengujian kualitas air yang telah terakreditasi oleh KAN sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. 4) Pemantauan kualitas air dilakukan dari 4 sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, Winongo, Gajah Wong dan Manunggal. 2) Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara *real time*.

Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam upaya mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain : 1) Kualitas air dari hulu sebelum masuk Ke Kota Yogyakarta sudah rendah 2) Kebiasaan masyarakat yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, COD dan fosfat melebihi baku mutu, 3) Warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggir sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli dan total coliform melebihi batas baku mutu sehingga meningkatkan pencemaran air sungai 3) Masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai dan melakukan pembakaran sampah sehingga menjadi sampah yang belum terkelola, 4) Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan 5) Tidak semua RTHP di Kota Yogyakarta dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 6) Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km², sehingga untuk memperoleh prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah sangat sulit untuk dipenuhi karena RTHP harus mencapai luasan 6.5 km². 7) Kurangnya peran serta warga dalam melaksanakan pemeliharaan secara bersama-sama RTHP.

12. Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkat

Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-enam yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman” dan tujuan “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman”. Sasaran ini

Tabel 2.356 Pengukuran Capaian Sasaran Infrastruktur Wilayah Meningkat

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur Wilayah	[40% x [70%{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} + {30Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman}] + [20%{50% pengurangan sampah + 50% pengangkutan sampah}] + 30% Level of Service + [10%(Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana + Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran)/2]	43,8	45,28	103,38	Sangat Tinggi

Sumber: Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2021; DLH Kota Yogyakarta, 2021; Dinas PKP Kota Yogyakarta, 2021; BPBD, 2021; Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

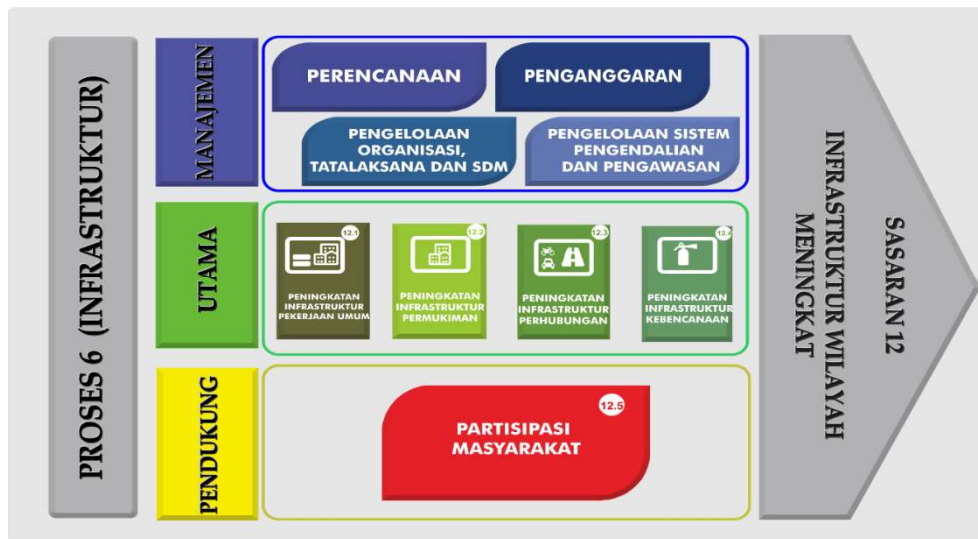
Adapun rincian perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.357 Rincian Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah

Pengampu	Uraian	Bobot	Realisasi 2021	Hasil Pembobotan
Dinas PUPKP	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	70% x 40%	86,56	24,237
	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	30% x 40%	94,51	11,34
DLH	Persentase Pengurangan Sampah	50% x 20%	23,50%	0,023
	Persentase Pengangkutan Sampah	50% x 20%	101,20%	0,101
Dinas Perhubungan	Level of Service	30%	0,530	0,159
BPBD	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	50% x 10%	88,46	4,42
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran	50% x 10%	100	5,00
Indeks Infrastruktur Wilayah				45,28

Sumber: Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, 2021; DLH Kota Yogyakarta, 2021; Dinas PKP Kota Yogyakarta, 2021; BPBD, 2021; Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2022

Framework Kebijakan peningkatan infrastruktur wilayah dapat terlihat pada bagan berikut ini:



Gambar 2.31 Proses Bisnis Infrastruktur Wilayah Meningkatkan

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Beberapa upaya yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dapat dibagi sesuai dengan proses bisnis utama yaitu : 1) Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengelolaan penerangan jalan umum, serta pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase 2) Peningkatan Infrastruktur Permukiman melalui penanganan kawasan kumuh, penanganan rumah tidak layak huni, pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, pemeliharaan fasilitas umum, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembawa serta pengolahan limbah dan penanganan dan pengurangan sampah 3) Peningkatan Infrastruktur Perhubungan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan, Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas, serta pengawasan juru parkir dan penertiban parkir 4) Peningkatan Infrastruktur kebencanaan melalui pencegahan bencana kebakaran melalui pembangunan hydrant kampung, Edukasi, Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, pelatihan bagi personil pemadam kebakaran, serta penguatan kampung Tangguh bencana dalam rangka siaga bencana di Kota Yogyakarta.

Adapun factor pendorong yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini adalah: 1) Perencanaan kegiatan fisik yang sudah sesuai dan tepat waktu 2) Partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan permukiman kumuh cukup tinggi yang dipacu dengan adanya keberhasilan program serupa di wilayah lain 3) Adanya sinkronisasi penanganan dengan beberapa sumber dana yang berbeda dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh (APBN dan DFAT) serta rumah tidak layak huni (4) Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah. 5) Penguji kendaraan bermotor yang berkompentesi 6) Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang lengkap dan terkalibrasi 7) Kemudahan layanan pengujian kendaraan bermotor (KIR) 8) Penerapan Peraturan Daerah yang baru tentang

Walaupun sasaran bisa dicapai, namun ada beberapa factor penghambat yang dijumpai dalam proses pencapaian sasaran tersebut, yakni : 1) Rehabilitasi terhadap RTLH yang berada di atas tanah ngindung dan tidak diperbolehkan untuk direhab oleh pemilik tanah 2) Beberapa masyarakat ada yang tidak memiliki dana swadaya sedangkan nilai bantuan terbatas 3) Keberadaan RTLH berada di atas lahan ilegal secara tata ruang, semisal: wedi kengser 4) Masih adanya masyarakat di lingkungan kumuh yang belum siap untuk ditata 5) Keterbatasan lahan sehingga penataan permukiman kumuh hanya dapat dilakukan dengan pola pemugaran 6) Keterbatasan lahan sehingga kekurangan kecukupan ruang pada RTLH tidak dapat ditangani 7) Masih terdapat kalangan masyarakat belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum dapat berjalan maksimal 8) Masih ada perilaku masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota 9) Ketergantungan atas kondisi TPA Piyungan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah 10) Masih terdapat pembuangan sampah di sungai terutama dilakukan oleh para penghuni sementara di kota Yogyakarta 11) Terdapat penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya 12) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan adanya asumsi bahwa pengujian itu sulit untuk lulus 13) Pemasangan papan informasi terkadang terkendala lahan yang akan dipasang karena kondisi di lapangan 14) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga bersama sarana umum (papan tarif dan papan informasi) 15) Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk parkir di tempat yang sudah disediakan 16) Ada beberapa tempat tidak memungkinkan untuk pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) besar dan pekerjaan *boring cable* sudah tidak memungkinkan lagi karena disepanjang trotoar di bawahnya terdapat saluran.

13. Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran strageis 13 ini merupakan upaya untuk mencapai misi ke tujuh yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”. Untuk mengukur sasaran ke tiga belas ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mengingat nilai resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas kinerja implementasi SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021, serta Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 belum dirilis, maka realisasi menggunakan data estimasi. Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan meningkat terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.358 Pengukuran Capaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	A	A*	100%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-rata Capaian Kinerja		100%			

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2021; BPKAD, 2021

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB adalah evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bukan semata evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebenarnya merupakan adopsi dari penerapan Manajemen Kinerja (*Performance Management*) yang biasanya diterapkan di sektor swasta, namun karena Objeknya adalah Instansi Pemerintah maka dimodifikasi menjadi SAKIP. Namun pada akhirnya, tujuannya sama yaitu bagaimana agar Instansi bisa meningkatkan kinerja dan lebih berorientasi hasil (*result-oriented*). Siklusnya pun tidak jauh berbeda, mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Monitoring, dari keempat siklus itu, LAKIP hanya salah satu bagian dari objek evaluasi yaitu di pelaporan kinerja. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan, menghasilkan Nilai Akuntabilitas Kinerja tiap-tiap Instansi pemerintah, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja di masing-masing instansi, yaitu mencerminkan sejauh mana kemampuan Instansi tersebut dapat mempertanggungjawabkan hasil (*result/outcome*) yang diperoleh atas penggunaan uang negara.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kemen PAN/RB Tahun 2021, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 memperoleh predikat A yang mana nilai ini merupakan kinerja tahun 2020 yaitu A. Adapun untuk kinerja tahun 2021 diprediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta bertahan pada tingkat A.

Setiap tahun, BPK melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ini berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan pemerintah daerah tersebut bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam proses pemeriksaan tersebut dilakukan pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam CALK. BPK menjalankan prosedur pemeriksaan berdasarkan pertimbangan profesional, termasuk penilaian risiko salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah semakin baik dari waktu ke waktu. Opini WTP yang dalam akuntansi diistilahkan dengan *unqualified of opinion* jika laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71 tahun 2010), tidak terdapat salah saji yang material, patuh terhadap peraturan perundang-undangan (*compliance*), internal control yang memadai serta pengungkapan yang memadai (*adequated full disclosure*).

Dengan capaian WTP, artinya seluruh aspek keuangan yang disajikan berupa Laporan

saji yang material. Selain itu telah dilakukan pengungkapan yang memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disajikan dengan basis akrual. Dimana hak dan kewajiban daerah diakui tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan, tetapi diakui saat hak/kewajiban tersebut timbul.

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. LRA menyajikan APBD dengan realisasinya secara komparatif yang berisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan Saldo Awal SAL, penggunaan Saldo Awal, SILPA tahun berjalan dan koreksi pembukan, serta saldo akhir SAL. Berbeda dengan LRA, Laporan Operasional menyajikan Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode akuntansi. LO tidak menyangdingkan anggaran dan realisasinya, tetapi LO menyangdingkan Pendapatan LO dengan beban yang diukur dengan basis akrual. Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada akhir tahun anggaran. Laporan Arus Kas menyajikan informasi saldo awal kas dan saldo akhir kas, disertai dengan rincian penerimaan dan pengeluaran kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. (Disadur dari Artikel "Menilik Opini Audit BPK dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", *Joko Supriyanto, SST, Ak. M. Ak. CA*)

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 12 kali berturut-turut sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Framework Kebijakan ntuk meningkatkan kapasitas tatakelola pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.32 Proses Bisnis Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2022

Seperti juga halnya dengan pencapaian sasaran sebelumnya, 3 proses yang dilakukan adalah

Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi kunci peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Sedangkan Proses Pendukung adalah proses yang dibutuhkan keberadaannya untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pencapaian sasaran. Penguatan Inovasi, Pengembangan E-Gov dan Manajemen Kearsipan menjadi dukungan penting dalam Tatakelola Pemerintah, terlebih dalam perkembangan jaman di masa kini yang membutuhkan kecepatan dan inovasi serta teknologi.

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menindaklanjuti Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP tahun sebelumnya serta mencermati kembali dan meningkatkan kualitas aspek penilaian per komponen, terutama yang nilainya masih di bawah standar nilai A yakni 80. Adapun upaya perbaikan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Penyusunan Proses Bisnis RPJMD Tahun 2017-2022 yang mengidentifikasi proses utama, pendukung dan manajemen dalam pencapaian visi misi serta sasaran daerah berikut OPD penanggung jawab untuk masing-masing kegiatan;
 - b. Penataan Kelembagaan berbasis proses bisnis RPJMD (Perda 4 Tahun 2020);
 - c. Penyempurnaan cascading RPJMD mendasarkan proses bisnis, kelembagaan serta nomenklatur program pada Permendagri 90 Tahun 2019;
 - d. Penyelarasan perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV mendasarkan pohon kinerja; dan
 - e. Pelaksanaan reviu indikator dan target kinerja secara berkala yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai dasar perencanaan tahunan dan perjanjian kinerja.
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Penyusunan metadata indikator sebagai dasar pengukuran kinerja;
 - b. Pelaksanaan Desk Timbal Balik sebagai proses pengukuran kinerja tribulanan yang melibatkan Bappeda, BPKAD, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Inspektorat; dan
 - c. Pengembangan SIMONEVA yang merupakan integrasi SIM Monev dan SIM e-LKIP sebagai instrument untuk mengukur kinerja baik tingkat kota maupun perangkat daerah.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Penyempurnaan Laporan Kinerja dengan pengkayaan narasi pencapaian target sasaran daerah;
 - b. Penyamaan template Laporan Kinerja pada level perangkat daerah; dan
 - c. Penyusunan dan Publikasi Infografis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah serta Publikasi.
4. Evaluasi Internal
 - a. Pengendalian lintas sektor berbasis proses bisnis dalam evaluasi ketercapaian

- b. Penyampaian laporan kinerja tribulanan secara rutin kepada kepala daerah dan TAPD;
 - c. Pendokumentasian tindaklanjut hasil evaluasi dalam Berita Acara Desk Timbal Balik; dan
 - d. Pengembangan *Early Warning System* Capaian Kinerja Bulanan perangkat daerah bagi pengambil kebijakan dan kepala OPD.
5. Pencapaian Kinerja
- a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan serta penerapan anggaran berbasis kinerja melalui implementasi proses bisnis RPJMD;
 - b. Kolaborasi Lintas Sektor melalui Program Gandeng Gendong yang melibatkan 5K (Kota, Kampus, Kampung, Korporasi dan Komunitas) dalam upaya pembangunan di Kota Yogyakarta;
 - c. Penguatan inovasi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik; dan
 - d. Penguatan *e-government* melalui Jogja Smart Services sebagai wujud Balaikota di Dunia Maya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan percepatan pencapaian target pembangunan.

Adapun kendala yang masih dihadapi dalam peningkatan nilai SAKIP adalah belum seluruh pegawai mengetahui kaitan ketugasan mereka dengan dukungan pencapaian target RPJMD. Hal ini dapat diatasi dengan implementasi Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Periode II Tahun 2021, dimana kinerja individu merupakan tanggung renteng kinerja atasan sampai dengan Jabatan Tinggi Pratama sehingga apa yang dilaksanakan oleh seorang pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMD.

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari komitmen Kepala Daerah serta kerjasama semua *stakeholder* dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja. Pencapaian Target pada tahun 2021 ini merupakan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2017-2022. Upaya yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan Predikat WTP adalah:

1. Koordinasi secara berkala dengan OPD untuk rekonsiliasi SPJ Fungsional;
2. Sinkronisasi laporan keuangan yang telah disusun oleh OPD secara berkala;
3. Bekerjasama dengan BPKP Perwakilan DIY dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan serta review peraturan terkait akuntansi dan pelaporan;
4. Penataan Barang sesuai dengan kelembagaan baru;
5. Penyesuaian Kodefikasi BMD yang mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019;
6. Pengembangan SIMBADA Versi 2 yang mengakomodasi penyesuaian kodefikasi baru dan kelembagaan baru; dan
7. Sosialisasi dan melaksanakan pendampingan bimbingan teknis untuk aplikasi SIMBADA V.2 bagi Pejabat, Penatausahaan, Barang, Pengguna serta Pengurus, Barang

Disamping pendorong, masih dijumpai pula beberapa kendala dalam perwujudan indikator sasaran ini, yakni:

1. Adanya perubahan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD sehingga membutuhkan waktu untuk penyusunan peraturan turunan di level daerah (Perda dan Perwal);
2. SIM pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh kemendagri untuk dipergunakan oleh daerah (SIPD) masih belum dapat beroperasi dengan sempurna sehingga menyebabkan penggunaan SIM Pengelolaan Keuangan Daerah secara paralel (SIPKD dan SIPD);
3. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta adanya mutasi personil pengelola keuangan daerah dan personil pengurus barang pengguna/pembantu di OPD/Unit kerja yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah; dan
4. Pengembangan SIMBADA Versi 2 (penyesuaian kodefikasi baru penyesuaian kelembagaan baru) yang harus di sosialisasikan ke OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Terhadap hambatan tersebut, maka strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Segera menyelesaikan peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah di level daerah (Perda/Perwal);
2. Aktif berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengetahui perkembangan SIPD dan mendapatkan solusi atas permasalahan/kendala dalam implementasi SIPD;
3. Bekerjasama dengan OPD terkait dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas SDM personil pengelola keuangan daerah dan personil pengurus barang pengguna/pembantu di OPD/Unit Kerja;
4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD melalui pelaksanaan rekonsiliasi BMD setiap bulan dalam rangka mendukung terwujudnya pelaporan keuangan yang handal dan akuntabel; dan
5. Melaksanakan pendampingan ke OPD dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021

Tabel 2.359 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Yogyakarta

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
A	URUSAN WAJIB									
1	Pendidikan									
		Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	162.538.401.370	96,97%	151.418.424.520	106,6
			Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional		Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional	3 medali		3 medali		100
		Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A		Persentase SMP akreditasi A	75,86%		75,86%		100,0
			Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional		Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	3 medali		6 medali		200
		Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan non formal dan informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A		Persentase Kelulusan UASDA Paket A	-		-		-
			Persentase Kelulusan UNPK Paket B		Persentase Kelulusan UNPK Paket B	-		-		-
			Persentase Kelulusan UNPK Paket C		Persentase Kelulusan UNPK Paket C	-		-		-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
					Persentase Kelulusan warga belajar	90,50%		92,23%		101,5
			Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	60 lbg		56 lbg		93,3
			Jumlah LKP terakreditasi		Jumlah LKP terakreditasi	5 lbg		13 lbg		260,0
		Program pengembangan pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi		Persentase guru sesuai kualifikasi	99,70%		94,43%		94,7
			Jumlah sekolah inklusi		Jumlah sekolah inklusi	84 Sekolah		92 sekolah		109,5
2	Kesehatan									
		Program pelayanan kesehatan dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80,5	136.040.963.734	82,51	109.404.570.012	102,5
		Program pelayanan kesehatan rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama		Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75		82,06		109,4
		Program upaya pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%		100%		100,0
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%		101,00%		101,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
			Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi		Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	84,62%		89,47%		105,7	
			Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan		Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100,00%		100%		100,0	
			Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan		Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	100%		100%		100,0	
		Program regulasi dan pengembangan sumber daya kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar		Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%		100%		113,6	
			Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	90%	16.121.483.533	99%	14.218.508.543	110,2	
			Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%		100,00%		105,2	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	80%		100,00%		125,0	
			Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar		Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar						
			Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96%	376.746.200	100%	299.702.840	104,1	
			Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%		100,00%		102,0	
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%		97,92%		103,0	
		Program peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%		100%		100,0	

No	Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%		100%		100,0	
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%		100%		100,0	
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100,00%		100,0	
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%		100,0	
			Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%		100,0	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
			Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	466	247.683.000	466	227.683.000	100,0
			Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66,70%		66,70%		100,0
			Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96,30%		96,39%		100,0
			Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan		Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89,90%		96,84%		107,7
			Persentase Institusi yang melaksanakan UKK		Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%		100%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
		Program pencegahan dan pengendalian penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%		100%		100,0
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%		100%		100,0
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%		100%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
			Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%		100%		100,0	
			Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%		100%		100,0	
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100%		100,0	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
			Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		100,00%		100,0	
			Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart		Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%		100,00%		100,0	
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%		100%		100,0	
		Program pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	12%	136.040.963.734	23,70%	109.404.570.012	197,5	
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan		Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	81,00%		81,50%		100,6	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		9
						K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	24		24		100,0
			Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
		Program Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	89%	46.434.762.000	96,67%	40.748.908.856	108,6
			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51,04%		51,88%		101,6
		Program peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	91,57%	6.005.448.188	92,10%	4.931.154.496	100,5
			Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	87,58%	2.758.600.000	87,60%	2.206.705.587	100,0
		Program pembangunan gedung pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	90%	35.414.567.948	90,04%	31.040.674.066	100,0
		Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	24%	16.108.788.867	13,54%	15.035.998.435	56,4
			Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74,61		77,94		104,4
		Program pengelolaan ruang terbuka hijau publik	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,90%	6.722.786.867	30,33%	6.519.413.101	70,7

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
			Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	72,31		77,94		107,7
		Program pengaturan dan pembinaan tata ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78,64%	2.426.450.500	81,59%	2.357.391.150	103,7
		Program Pengendalian tata ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang		Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62,25%		62%		100,0
4	Ketahanan Pangan									
		Program pembinaan ketahanan pangan	Kelurahan dengan kerawanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan	100%	95.210.540	100%	94.885.700	100,0
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
		Program penataan perumahan permukiman dan tata bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96,7%	10.989.748.840	97,10%	9.990.991.245	100,4
			Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86,21%	41.239.743.000	88,47%	41.189.664.498	102,6
					Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30,00%		0		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
					Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,10%		0		101,1
6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		Program Penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99,00%	17.016.033.008	99,61%	16.651.082.493	100,6
		Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	94,65%		100,00%		105,6
		Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%		94,01%		101,3
		Program perlindungan masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	78,35%		80,24%		102,4

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
		Program pencegahan kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%	5.968.739.740	100%	5.056.443.251	101,0
			Persentase edukasi proteksi kebakaran		Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%		100%		103,0
		Program penanggulangan kebakaran	Persentase Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%		100%		100,0
					Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%		100%		100,0
					Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100%		100%		100,0
		Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	76,92%	9.721.714.741	76,92%	8.574.092.837	100,0
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap		Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%		100%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	100%		100%		100,0	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	15500%	141.299.930	5400%	137.569.930	165,1	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	30000%	130.573.500	30000%	125.922.000	100,0	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	30000%	291.113.682	28300%	286.266.163	105,6	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	5000%	90.695.204	4100%	90.654.500	118,0	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	27500%	128.017.424	12300%	120.568.139	155,2	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	9600%	106.373.894	9400%	106.185.500	102,0	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	7200%	250.462.072	7000%	232.274.680	102,7	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	6000%	102.542.250	4300%	97.899.200	128,3	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	3600%	175.927.000	2900%	145.702.000	119,4
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	10000%	96.464.800	3800%	94.106.000	162,0
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	16000%	219.435.550	14500%	219.298.750	109,3
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	12500%	98.964.750	5800%	96.487.063	153,6
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	14400%	203.620.000	6600%	193.700.000	154,1
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	2400%	384.640.500	2400%	384.567.000	100,0
7	Sosial									
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87%	13.454.538.478	82,46%	7.492.723.728	94,4
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%		100,00%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	81%	12.098.992.249	87,47%	7.863.362.324	107,9
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%		100,00%		100,0
		Program data, informasi dan pemberdayaan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	87,18%	590.621.507	91,53%	535.008.182	104,9
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100,00%	139.749.832	100,00%	92.559.582	100,0
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100,00%	32.805.000	100,00%	32.400.000	100,0
8	Tenaga Kerja									
		Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68,18%	873.876.000	68,00%	825.263.180	99,7

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
			Persentase penempatan transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100,00%	171.506.875	100,00%	168.752.500	100,00%
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65,48%	160.938.400	62,92%	150.308.400	96,00%
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,00%	1.740.303.910	91,18%	1.703.832.520	100,20%
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,26%	915.986.000	29,57%	866.368.380	79,30%
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	2.708.135.245	1,22%	2.283.334.408	105,10%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	85%		86,39%		101,7	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	72,22%	802.883.976	72,22%	764.780.527	100,0	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	83,33%		92,86%		111,4	
			Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	83%	1.146.517.951	87,23%	811.140.390	104,8	
		Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	100,0%	1.253.998.861	100,00%	1.245.305.478	100,0	
			Persentase Puskesmas Ramah Anak		Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%		100%		100,0	
			Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)		Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	90,99%		100,00%		109,9	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
			Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%	849.129.990	100%	837.390.590	100,0
10	Pertanahan									
		Program pengelolaan pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	79,76%	529.454.436	80,80%	373.246.516	101,3
			Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	99,02%	38.794.584.040	99,02%	31.308.579.140	100,0
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100,00%	7.820.000	100,00%	7.679.600	100,0
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100,00%	207.894.375	100,00%	200.758.800	100,0
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	93,33%	285.815.164	93,33%	258.883.112	100,0
					Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	75,00%		90,00%		120,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
11	Lingkungan Hidup									
		Program penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74,15%	1.744.531.476	75,64%	1.661.603.249	102,0
			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13,70%		12,63%		92,1
		Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	45,97%		51,68%		112,4
		Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	96,12%	1.123.022.628	60,52%	1.096.069.084	62,9
			Persentase Kampung berwawasan lingkungan		Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	52,94%		53,25%		100,5

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
			Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	31,11%	519.565.220	37,78%	513.994.159	121,4
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
		Program pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75%	978.905.562	99,87%	943.990.688	100,0
		Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100,00%	349.675.180	100,00%	347.750.288	100,0
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Persentase pemanfaatan data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100,00%	575.533.360	100,00%	568.106.146	100,0
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Danurejan	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82	388.066.850	82,03	383.830.210	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.037.956.600	3.161.557.477	1.188.050.000	2.867.742.879	114,4
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,5	343.868.246	83,64	335.656.897	100,1
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	705.184.000	1.831.479.018	791.346.000	1.817.951.530	112,2
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,5	553.834.260	81,75	547.096.407	100,3
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	4.831.000.000	4.478.519.995	3.831.131.000	4.401.830.123	79,3
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9	303.624.153	88,57	300.948.656	100,7

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Kecamatan Gondomanan	Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	469.200.000	2.140.288.689	1.962.512.500	2.089.449.512	418,2
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	87	607.298.883	87,14	579.199.750	100,0
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	600.000.000	2.619.753.585	730.294.500	2.565.530.173	121,7
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	89,9	565.545.430	90,15	556.928.785	100,2
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	2.700.000.000	2.851.819.218	2.822.346.500	2.829.425.381	104,5

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kraton	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	77,69	603.137.199	85,25	588.842.260	109,7
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	429.601.667	2.666.683.736	964.503.000	2.581.285.309	224,5
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mantriheron	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,57	615.784.762	84,58	607.091.756	100,0
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	565.000.000	3.302.090.704	1.212.616.100	3.018.999.432	214,6
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84	712.818.966	84,15	710.598.347	100,1
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.105.000.000	2.468.700.030	1.113.893.600	2.372.597.962	100,8

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	84,00	565.351.266	84,16	542.252.059	100,00
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	212.200.000	1.700.447.505	692.230.000	1.566.431.329	326,20
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59	464.458.012	81,6	460.731.556	100,00
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	632.535.000	1.748.353.017	1.014.273.100	1.715.679.538	160,30
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,00	735.049.351	83,25	712.022.981	102,70

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		9
						K	Rp	K	Rp	K
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.702.478.583	3.607.697.056	495.230.500	3.502.302.631	29,0
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,00	745.429.024	82,39	740.386.154	100,4
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.982.733.000	5.321.627.146	2.439.904.850	5.054.771.515	123,0
		Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Nilai survei kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,99	674.654.230	83,05	650.953.565	100,0
			Angka Swadaya Murni	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	933.300.000	2.456.674.697	1.020.252.000	2.365.055.680	109,3
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
		Program pengendalian penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	274.305.900	6,53	268.297.760	134,7
		Program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32,58%	1.122.638.340	32,59%	1.064.008.140	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,16%	3.288.748.780	11,15%	1.331.007.158	100,0
			CPR (Contraceptive Prevalence Rate)		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,94%		69,90%		94,5
15	Perhubungan									
		Program pengelolaan lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	24 km/jam	9.198.288.544	26,81 km/jam	8.534.379.261	111,7
		Program pengelolaan parkir	Persentase juru parkir yang tertib		Persentase juru parkir yang tertib	97,32%		97,34%		100,0
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	92%		92,44%		100,4
		Program angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas	Jumlah pelanggaran		Jumlah pelanggaran	480		548		85,8
			Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	91,00%		84,24%		92,5
16	Komunikasi dan Informatika									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program peningkatan komunikasi publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96,50%	3.904.343.200	98,14%	3.689.350.560	101,7
		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	67,96%	13.421.278.610	70,89%	12.599.876.867	104,3
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	94,08%		94,08%		100,0
					Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100,00%		100,00%		100,0
					Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	90,00%		100,00%		111,1
					Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100,00%		100,00%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program pengelolaan informasi dan statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%		100%		100,0
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
		Program peningkatan kualitas koperasi	Nilai Aset Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115	169.764.960	115	169.653.230	100,0
			Nilai Omset Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115	65.845.400	115	65.755.300	100,0
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465	346.953.890	465	345.683.800	100,0
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	10 unit	377.593.150	10 unit	369.781.220	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100	559.527.000	100	548.682.800	100,0
					Jumlah UKM ber-IUM	400		400		100,0
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	30	590.214.694	30	585.899.755	100,0
					Jumlah IKM Mandiri	140		149		106,4
18	Penanaman Modal									
		Program pelayanan penanaman modal dan perizinan	persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	85%	802.730.376	89,85%	801.768.267	105,7
		Program pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan		Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	100%		100,00%		100,0
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	-	561.787.540		550.874.955	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
					Persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM	67,00%		181,00%		270,00%
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	92,00%	418.421.744	92,31%	416.168.473	100,30%
		Program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Persentase regulasi pelayanan perizinan	-						-
		Program pengembangan penanaman modal	Persentase realisasi investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	-	894.678.228		878.942.471	-
					Nilai Rencana Investasi	359.227.706.890		359.227.706.890		100,00%
19	Kepemudaan dan Olahraga									
		Program pengembangan kepemudaan	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	92%	2.299.451.500	92%	2.061.340.250	100,00%
		Program pengembangan olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	97%	9.254.768.000	99%	9.026.575.264	102,00%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30 %	340.863.600	78%	336.206.000	117,7
20	Statistik									
		Program pengelolaan informasi dan statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	165.682.200	100%	158.322.020	100,0
21	Persandian									
		Program peningkatan pelayanan persandian	Persentase pengamanan informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi	100%	780.838.070	100%	773.468.000	100,0
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	60%		60%		100,0
22	Kebudayaan									
		Program pelestarian warisan dan nilai budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35,71%	24.543.849.295	42,85%	22.945.724.067	119,9
		Program pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan		Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	15 dokumen		15 dokumen		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		9
						K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6					
			Persentase pelestarian bahasa dan sastra		Persentase pelestarian bahasa dan sastra	-		-		-
					Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	4,71		4,71		100,0
		Program pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi	Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan		Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60%		60,00%		100,0
					Persentase BCB yang dilestarikan	52%		52,00%		100,0
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum	-		-		-
					Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	78%		78,75%		100,9
					Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	79%		75,00%		94,9

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
				PROGRAM PEGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	172.000	2.924.922.947	149.323	2.594.472.719	86,8
23	Perpustakaan									
		Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250	2.319.695.868	250	2.285.793.588	100,0
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77		81,25		105,5
		Program pelestarian koleksi pustaka dan data informasi perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1200	111.644.100	1872	109.804.575	156,0
24	Kearsipan									
		Program pengelolaan pengembangan kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja	541.450.084	140 perangkat daerah /unit kerja	534.789.165	100,0
		Program perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840	541.450.084	840	534.789.165	100,0
B	URUSAN PILIHAN									
25	Pariwisata									
		Program pengembangan dan pemasaran pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50,00%	6.183.955.892	50,00%	5.193.257.786	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
		Program pengembangan Taman Pintar	Jumah Pengunjung Taman Pintar		Jumah Pengunjung Taman Pintar	-				-
		Program peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata		Indeks kualitas atraksi pariwisata	86,36		103,87		120,2
			Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	37,08%	1.636.346.000	36,84%	1.271.013.500	99,3
					Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi	66,87%		91,67%		137,0
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1.000.000	3.374.586.697	1.276.828	3.261.561.186	127,6
26	Pertanian									
		Program pembinaan keahewanan dan perikanan	Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80%	477.570.380	80%	464.543.750	100,0
			Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya		Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	95,08%		95,08%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan	46,67%	50.635.030	46,67%	49.763.900	100,0
		Program pembinaan pertanian	Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91,25%	165.125.390	92,00%	161.238.698	100,9
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan	22,06%	467.911.425	22,06%	466.427.928	100,0
			Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	8 Kelompok	508.944.770	8 Kelompok	489.528.066	100,0
27	Perdagangan									
		Program pemeliharaan sarana prasarana kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	23,3%	17.078.309.792	24%	16.651.449.507	103,2
		Program penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	Pendapatan retribusi pasar		Pendapatan retribusi pasar	11.143.571.982		11.363.525.575		101,9

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
		Program pengembangan pusat bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	2.252.105.592		2.404.929.465		106,7
		Program pembinaan dan pengendalian perdagangan	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8,00%	1.398.879.992	19%	1.365.934.803	234,3
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20,00%	47.860.000	20%	47.833.000	100,0
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100,00%	153.672.720	100%	153.233.016	100,0
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	92,76%	300.981.500	95%	298.865.206	101,8
				Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan						
28	Perindustrian									
		Program pembinaan perindustrian	Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	3%	3.567.756.097	6,22%	3.474.863.630	207,3

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin industri	2%	134.727.500	3,41%	134.720.000	213,0
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100%	82.123.750	100%	82.075.000	100,0
		Program pengembangan industri logam	Pendapatan UPT Logam	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pendapatan UPT logam	405.110.000		441.253.741		108,9
29	Transmigrasi									
		Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68,18%		68,00%		99,7
			Persentase penempatan transmigran	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100,00%		100,00%		100,0
C	URUSAN PENUNJANG									
30	Perencanaan									
		Program perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20%	2.232.635.756	98,99%	2.222.750.436	107,3

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program perencanaan dan pengendalian bidang fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,20%		97,62%		105,8
		Program perencanaan dan pengendalian bidang sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial		Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	92,20%		98,27%		106,5
		Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,20%		97,63%		105,8
					Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100,00%		100,00%		100,0
31	Keuangan									
		Program perencanaan dan pengendalian anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100,00%	55.361.981.998	100,00%	7.020.145.503	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
		Program pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Persentase penyerapan belanja daerah		Persentase penyerapan belanja daerah	88,20%		87,00%		98,6	
		Program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik		Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95,00%		93,18%		98,0	
		Program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	-	4.969.454.006	-	4.371.113.866	-	
					Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	87,80%		85,37%		97,2	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K
		Program pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100,00%	2.774.351.350	100,00%	2.757.410.179	100,00%
		Program pembukuan & penagihan pajak daerah	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar		Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	16.000.000.000		19.705.571.223		123,12%
					Nilai pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174		1.707.273.287.342		462,00%
32	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
		Program pengembangan karir aparatur sipil negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	87,00%	3.066.238.232	90,93%	2.466.719.595	104,50%
					Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	92,00%		100%		108,70%
		Program pelayanan administrasi kepegawaian	persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian		persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%		100%		100,00%

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94,00%	6.502.284.592	99,9%	5.640.553.431	106,3
33	Penelitian dan Pengembangan									
		Program penelitian dan pengembangan	Indeks Kemudahan Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemudahan Penelitian dan Pengembangan	88,00%	1.495.098.571	100,00%	1.487.008.679	113,6
34	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	75,00%	1.720.937.900	75,00%	1.252.374.360	100,0
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	81,00%	1.103.043.052	81,00%	1.069.905.058	100,0
					Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	55,70%		55,75%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	44,00%	212.928.898	44,00%	207.147.080	100,0
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75,00%	679.296.750	76,00%	612.392.072	101,3
					Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	65,00%		66,00%		101,5
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	70,00%	670.900.492	85,00%	659.300.827	121,4
35	Inspektorat									
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91,00%	196.388.888	100%	169.062.400	109,8

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91,00%		100,00%		109,8	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	91,00%		100%		109,8	
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91,00%		100,00%		109,8	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program peningkatan dan evaluasi pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal		Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	89,00%		100,00%		112,3
			Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	237.691.700	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	231.813.100	100,0
36	Sekretariat Daerah									
		Program Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83,00%	2.708.135.245	90,00%	2.283.334.408	108,4
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang		Cepat Berkembang (nilai 383,22)		100,0
		Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50,00%	526.153.504	50,00%	425.968.838	100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		9
						K	Rp	K	Rp	K
					Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%		78,99%		105,8
		Program pengendalian pelaksanaan pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,3%	578.286.294	99,30%	557.138.713	101,0
		Program pelayanan pengadaan barang/jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85,00%		78,46%		92,3
			Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85,00%		96,07%		113,0
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95,00%	1.097.391.986	95,12%	1.017.721.977	100,1
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)		87,86		100,0
		Program penataan peraturan perundang- undangan dan pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%		100%		100,0

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi	
						7		8			9
						K	Rp	K	Rp		K
		Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	-		-		-	
		Program pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	-		-		-	
					Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	80,75		81,3		100,6	
		Program fasilitasi penyusunan perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	28.293.618.421	100%	19.272.421.759	100,0	

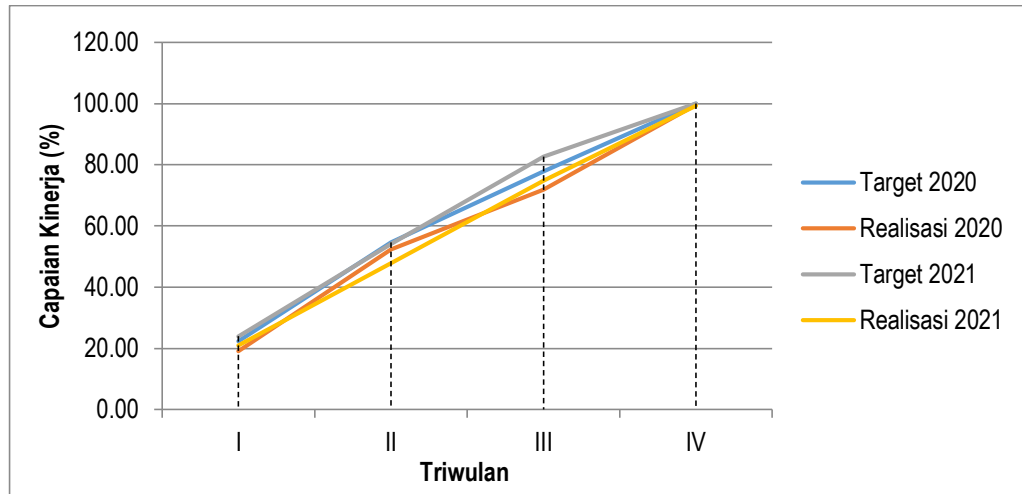
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program50	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun 2021)		Tingkat Realisasi
						7		8		
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	9
		Program fasilitasi penganggaran dan pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%		100%		100,0
					Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100%		100%		100,0
					Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan	100%		100%		100,0

Sumber: Evaluasi Hasil RPJMD, 2021

2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021

1. Kinerja Fisik

Pencapaian kinerja fisik kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing-masing perangkat daerah dalam SIMONEVA (www.simoneva.jogjakota.go.id) yang sudah terintegrasi dengan JSS. Berikut ini disajikan grafik realisasi fisik tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.33 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Tahun 2020-2021

Sumber: Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2020; Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021

Tabel 2.360 Target dan Realisasi Fisik Tahun 2020-2021

		TW I	TW II	TW III	TW IV
2020	Target	22,32	54,71	77,77	100,00
	Realisasi	19,10	52,31	71,90	99,57
2021	Target	23,88	54,17	82,74	100,00
	Realisasi	20,98	47,88	74,83	99,28

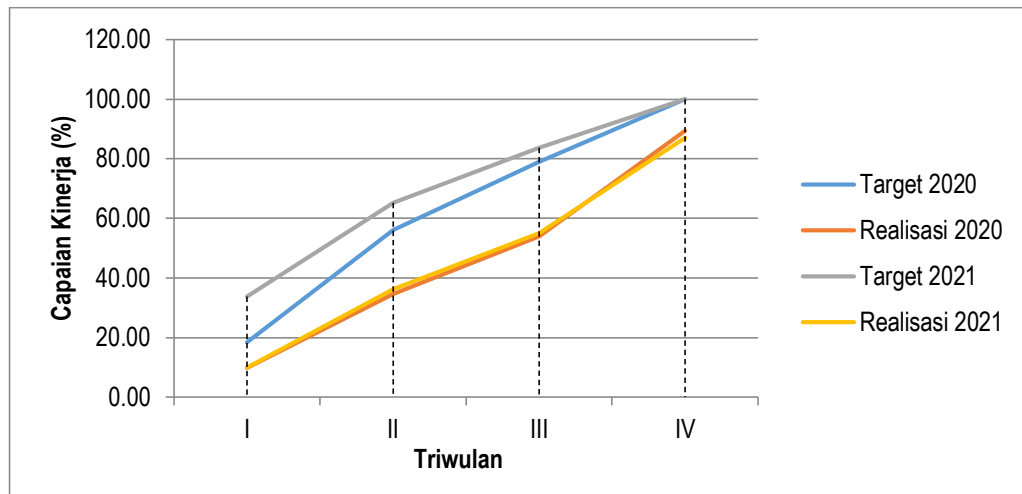
Sumber: Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2020; Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021

Dari gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi fisik pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,29 persen. Sedangkan apabila dilihat dari pencapaian target tahun 2021, maka diperoleh nilai deviasi sebesar 0,72 persen. Adapun penyebab terjadinya deviasi adalah sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid19 mengakibatkan:
 - 1) Kegiatan yang melibatkan siswa dan ibu hamil tidak terlaksana;
 - 2) Pembatalan program dari pusat (Proses akreditasi dari Kemenkes RI); dan
 - 3) Belanja modal tata udara tidak jadi dilaksanakan sebagai imbas turunnya pendapatan BLUD Pusat Bisnis.
- b. Batalnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan oleh:
 - 1) Putus kontrak (Alkes-RS Jogja);
 - 2) Gagal Tender untuk pengadaan Mobile PCR (RS Pratama); dan

2. Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan kegiatan diperoleh melalui pelaporan masing-masing perangkat daerah dalam SIMONEVA (www.simoneva.jogjakota.go.id) yang sudah terintegrasi dengan JSS. Berikut ini disajikan grafik realisasi keuangan tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.34 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2021

Sumber: Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2020; Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021

Tabel 2.361 Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2020-2021

		TW I	TW II	TW III	TW IV
2020	Target	18,35	56,04	78,91	100,00
	Realisasi	9,84	34,64	53,95	89,36
2021	Target	33,72	65,21	83,67	100,00
	Realisasi	9,86	36,25	55,09	86,98

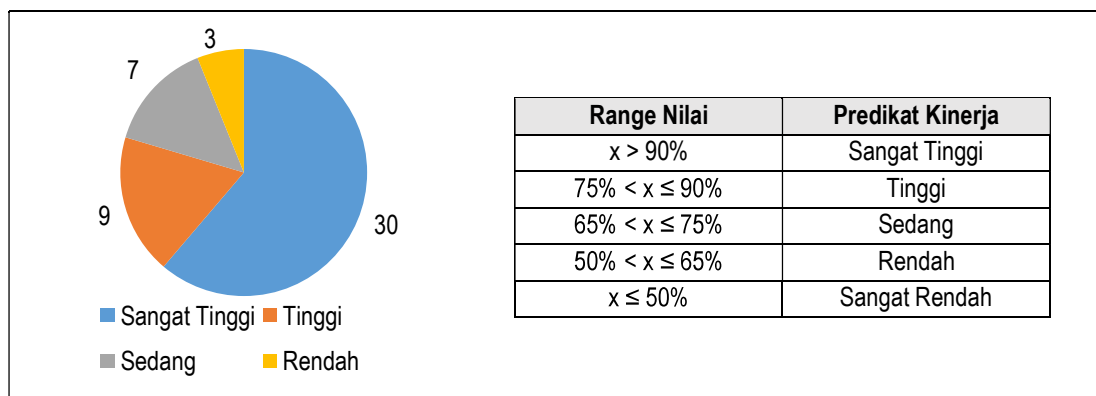
Sumber: Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2020; Data Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2021

Dari gambar dan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,38 persen. Sedangkan apabila dilihat dari pencapaian target tahun 2021, maka diperoleh nilai deviasi sebesar 13,02 persen. Adapun penyebab terjadinya deviasi adalah sebagai berikut:

- Belanja gaji menyesuaikan kebutuhan (ada ASN yang pensiun, mutasi) sedangkan tunjangan ASN sesuai kinerja ASN dalam parameter TPP;
- Pembayaran jasa pelayanan menyesuaikan pendapatan;
- Pembayaran iuran Tapera belum dapat direalisasikan karena masih menunggu kebijakan lebih lanjut;
- Belanja yang bersifat jaga-jaga dan pemenuhan kebutuhan ASN menyesuaikan kebutuhan;
- Adanya pembatasan selama pemberlakuan PPKM yang mengakibatkan beberapa kegiatan tatap muka dan kewilayahan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;

- g. Aturan kewajiban sisa BLUD sebesar 20 persen;
- h. Pembatalan kegiatan akreditasi puskesmas;
- i. Terdapat perbedaan standar harga pada kegiatan bersumber dari DAK sehingga tidak terserap optimal;
- j. Efisiensi sisa pengadaan;
- k. Gagal lelang proses pengadaan 1. Pengadaan Mobile PCR tidak terlaksana dikarenakan gagal lelang, sebagai informasi telah dilaksanakan 2 kali lelang, kemudian akan dilanjutkan dengan penunjukan langsung, namun waktu pelaksanaan tidak memungkinkan 2 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan yaitu pekerjaan Normalisasi SAH Kricak Kidul yang gagal karena belum ada kesepakatan dengan warga;
- l. Pekerjaan yang putus kontrak (Alkes RS Jogja);
- m. Pengadaan alat kesehatan RS berupa Set mikrodermabrasi tidak dapat terlaksana; dan
- n. Penundaan belanja modal tata udara dan pemeliharaan AC UPT Bisnis sebagai imbas tidak tercapainya target pendapatan.

Untuk capaian keuangan 49 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat 30 Perangkat Daerah (61,22 persen) yang memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi, 9 Perangkat Daerah (18,37 persen) yang memiliki predikat kinerja Tinggi, 7 Perangkat Daerah (14,29 persen) yang memiliki predikat kinerja Sedang, dan 3 Perangkat Daerah (6,12 persen) yang memiliki predikat kinerja Rendah. Capaian tersebut disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 2.35 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2021

Sumber: SIMONEVA, 2022

Tabel 2.362 Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
1	KEMANTREN TEGALREJO	99,61	96,62	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Keterbatasan personil karena dan mutasi keluar namun tidak pengganti, serta adanya pember WHO cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	97,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Anggaran tidak terserap maksimal beberapa jenis belanja di program Pemerintah Kabupaten/Kota karena lebih rendah dari harga di SHB, menyesuaikan dengan kebutuhan
3	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	100,00	95,51	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kecepatan dan ketepatan dalam administrasi keuangan (SPJ).
4	BAGIAN ORGANISASI	100,00	92,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Tidak sinkronnya regulasi pusat. 2. Dinamika perubahan regulasi di daerah. 3. penyerapan jampun tidak optimal karena penyelenggara daring dan luring. 4. plotting anggaran honorarium menyebabkan kemacetan pelaksanaan kegiatan berkurang

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
5	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	100,00	95,64	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	UP yang rendah sehingga menenggu, Pandemi Covid
6	BAGIAN HUKUM	100,00	84,97	Sangat Tinggi	Tinggi	Pandemi covid yang masih ada
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100,00	94,21	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	dengan adanya pertemuan dari kurangnya informasi yang kurang maksimal dan informasi yang tidak tersampaikan secara baik dan benar
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	99,33	88,95	Sangat Tinggi	Tinggi	Masih adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena PPKM
9	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	99,87	67,31	Sangat Tinggi	Sedang	Pandemi COVID 19
10	KEMANTREN KRATON	99,99	95,91	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Pandemi masih berlangsung baik kegiatan yang tertunda atau dikurangi jumlah pelaksanaan kegiatan yang dihapus diperub
11	SEKRETARIAT DPRD	97,50	81,00	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Dalam tahapan pembahasan yang dipengaruhi faktor eksternal yaitu kurangnya fasilitas dan evaluasi dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu terjadi kegiatan DPRD tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu kondisi pandemi covid

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
						mempengaruhi agenda pembaharuan yang terjadwal tidak dapat terlaksana. Perubahan sistem aplikasi SIPD yang ada belum semuanya siap. Sistem aplikasi SIPD belum sepenuhnya terintegrasi. Terkait penatausahaan masih menggunakan sistem SIPKD.
12	KEMANTREN KOTAGEDE	100,00	98,66	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya PPKM berdampak pada kehadiran peserta, penundaan kegiatan dan keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan.
13	KEMANTREN GEDONGTENGEN	99,98	97,65	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Ada kegiatan yang tidak terseraut yaitu kegiatan PAM, namun sudah dilaksanakan dengan kegiatan operasional PAM.
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	99,89	87,11	Sangat Tinggi	Tinggi	-Rapat-rapat koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga makan minum tidak terdapat. Pembatasan perjalanan dinas ke luar kota.

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
15	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	98,56	89,72	Sangat Tinggi	Tinggi	Tertundanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya PPKM Level 3 kegiatan lebih banyak dilaksanakan mengakibatkan capaian kinerja 3.
16	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	99,67	82,04	Sangat Tinggi	Tinggi	(1) Kebutuhan sinkronisasi dan aturan sebagai tindak lanjut diteruskan dan aturan turunannya (2) persetujuan substansi RDTR te

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
						<p>mekanisme di Kementerian ATF lokasi lahan yang diajukan sebagai saluran irigasi (4) adanya PPKM penanganan permasalahan pertanian berlangsung secara efektif (5) harga pemilik tanah di atas harga app tercapai kesepakatan harga/ga persertifikatan tanah aset pem pendaftaran masuk ke Kantor P Yogyakarta maka proses selanjutnya mekanisme di Kantor Pertanahan (7) Adanya perbedaan titik koordinat Kemendagri dengan data dari D UGM (8) Berkas permohonan dokumen lengkap untuk pengajuan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah pelaksanaan survei lapangan terdampak pandemi</p>
17	KEMANTREN PAKUALAMAN	100,00	98,37	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<p>Kondisi Pandemi Covid-19 yang membuat PPTK menyesuaikan pelaksanaan kegiatan, ada yang dikala ada pula yang kegiatannya di Perubahan APBD, jadi menujukkan perubahan APBD</p>

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
18	INSPEKTORAT	100,00	91,30	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	-Keterlambatan melaksanakan tugas baru dilaksanakan pada akhir tahun pengumpulan bukti dukung kurang optimal. -Diklat kompetensi API tidak menyesuaikan tata kala dari BP yang berubah ubah. -Anggaran Diklat disentralkan di BKPSDM sehingga koordinasi yang sangat panjang. -BPKP selama ini sering lewat dan kurang efektif.
19	DINAS KESEHATAN	96,91	56,40	Sangat Tinggi	Rendah	1. Pandemi Covid 19 meningkatkan risiko ibu oleh karena ibu hamil merupakan kelompok berisiko tinggi. 2. Pandemi Covid 19 menghambat kesehatan dan implementasi program.

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
20	KEMANTREN NGAMPILAN	100,00	93,84	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Penyesuaian harga lelang pada pengurangan volume kegiatan sehingga kegiatan ada yang tidak secara maksimal
21	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	100,00	78,69	Sangat Tinggi	Tinggi	Beberapa belanja dibawah harga
22	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	98,92	81,24	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Kurangnya pemahaman SDM pengadaan barang/jasa dalam pemilihan penyedia yang mengakibatkan ketidaklengkapan dokumen pemilihan dan pembuatan kontrak tepat waktu 2. Adanya perubahan spesifikasi pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Renja SKPD tahun 2021 sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan perubahan tersebut 3. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterlambatan proses pengadaan yang melibatkan pihak eksternal sehingga penyampaian form surat pernyataan (penyedia) kurang maksimal
23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99,25	91,54	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Sistem penatausahaan keuangan yang melibatkan bendahara pengeluaran yang tidak terdapat dalam Renja SKPD dibidang, sehingga harus memproses secara manual yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan dan berdampak pada aktifitas di

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
						anggaran untuk penanganan Covid-19 beberapa pekerjaan harus ditunda; penanganan kualitas infrastruktur terakomodir
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00	98,24	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya pandemi covid-19 memengaruhi pelaksanaan kegiatan; terbatasnya prasarana penyimpanan arsip
25	KEMANTREN MERGANGSAN	99,94	96,18	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	proses lelang konblok kelurahan belum digitalisasi salah kode rekening
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	98,03	94,33	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kondisi Pandemi dan aturan PPKM kegiatan tidak bisa terlaksana maksimal Penyesuaian beberapa regulasi
27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	99,99	77,11	Sangat Tinggi	Tinggi	kondisi pandemi membuat kegiatan di tengah masyarakat masih terbatas
28	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	99,14	87,48	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Bagian Kesra merupakan Unit Kerja masih terdapat keterbatasan sumber pembatasan berskala mikro berskala kegiatan yang melibatkan penganggaran pemberlakuan WFH WFO ASN
29	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	98,78	94,06	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
30	KEMANTREN JETIS	100,00	97,46	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya PPKM Darurat sehingga kegiatan yang pelaksanaannya Pengurangan jumlah peserta ke jamuan sidang, ATK dan transp
31	DINAS PARIWISATA	99,85	87,38	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Banyak wisatawan yang men perjalanannya sehingga tidak m Penerapan PPKM Darurat pada September 2021); SE Menpan Tahun 2021 tentang Pembatasan Kurangnya alternatif atraksi wis malam hari; 3. Masih terdapat b memerlukan perbaikan baik dar produk/fasilitas, layanan, maupu Ada DTW yang pada tahun 202 5. UJP belum memiliki kelengka administrasi yang menjadi persy Usaha Jasa Pariwisata; 6. Bany yang belum bergabung dalam o sehingga sulit untuk pendataan
32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00	89,69	Sangat Tinggi	Tinggi	Adanya perubahan rencana ke bola ke wilayah, tempat publik, adanya pandemi covid 19. Dan Drive thru pindah di Mall Pelaya

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100,00	94,04	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Adanya pengalihan anggaran pandemi covid-19 2. Penurunan serta masyarakat dalam menggerakkan 3R dengan adanya pandemi covid-19
34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	99,50	98,98	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Masih ada keterlambatan pemenuhan dokumen dari pihak ketiga sehingga proses administrasi sedikit terganggu rencana kegiatan per triwulan masih belum selesai sehingga menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai tatakala Selisih anggaran karena harga dibawah standar.
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	99,89	96,54	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Kurang optimalnya realisasi fisik karena terdapat beberapa kegiatan insidental, kondisional, dan menyangkut Pemkot terkait protokol kesehatan aktivitas kegiatan, dan himbauan kerumunan dalam rangka pencegahan penanggulangan pandemi covid-19
36	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	100,00	97,90	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	beberapa ketua RT RW blm melaksanakan PPKM menyebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara terbatas
37	KEMANTREN MANTRIJERON	99,81	93,83	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	adanya aturan PPKM darurat sehingga pelaksanaan menjadi terbatas

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
38	KEMANTREN GANDOMANAN	100,00	96,37	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Adanya pandemi Covid 19 yang menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga banyak kegiatan yg ditunda dan pelaksanaan kegiatan dengan berbagai kegiatan di akhir tahun.
39	KEMANTREN WIROBRAJAN	99,89	96,54	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Pelaksanaan kegiatan yang belum selesai sangat dibutuhkan kalau ada bantuan harus dilaksanakan tetapi lupa atau terlambat memudahkan PPTK di akhir tahun penyerapan anggaran.
40	DINAS PERHUBUNGAN	100,00	92,61	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Beberapa pekerjaan gagal lempar baru dari kementerian perhubungan monitoring andalalin
41	KEMANTREN DANUREJAN	99,74	92,29	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	1. Adanya sifat apatis dari warga masyarakat kegiatan yang tidak dilaksanakan SDM/personil di Kelurahan dan kualitas maupun kuantitas
42	KEMANTREN UMBULHARJO	99,88	95,52	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Dokumentasi bahan dan data serta laporan yang belum memadai
43	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	99,85	29,51	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Nilai pendapatan asli daerah blm memadai memaksa pengelola kegiatan monev koordinasi secara daring sehingga koordinasi dan SPPD masih memerlukan konsultan perencanaan untuk penerapan sehingga realisasi mengalami k

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
44	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	88,63	Sangat Tinggi	Tinggi	Penurunan kasus pemakaman di dalam 3 bulan terakhir sehingga anggaran tidak sepenuhnya disediakan untuk kegiatan tersebut. Honorarium pemakaman oleh masyarakat masih tinggi. Konsumsi untuk petugas pemakaman masih belum maksimal.
45	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	98,02	88,32	Sangat Tinggi	Tinggi	Sistem kerja masih berdasarkan koordinasi antar dinas sehingga koordinasi masih dilakukannya secara tatap muka dan daring sehingga mengganggu pelaksanaan koordinasi. dan belum semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan tatakala
46	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	99,87	97,73	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Beberapa PPTK dalam menyusun anggaran sehingga beberapa realisasi terganggu. dan pelaksanaan pelaksanaannya namun dapat t
47	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	97,46	97,56	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Penyerapan anggaran pada program kegiatan eksternal mengalami penundaan karena dampak pandemi.
48	DINAS PERDAGANGAN	99,15	90,23	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Progres pengadaan terhambat karena belum belanja modal yang besar (tata kelola) untuk tahun berikutnya disebabkan karena APBD belum ideal. Tahun 2021 masih belum sewa 75% ke penyewa kios dan anggaran (SILPA) digunakan un

No	Nama SKPD	Rata-Rata Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Predikat Tingkat Capaian Renja SKPD Tahun 2021		Faktor Penghambat
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Renja SKPD	
1	2	3	4	5	6	7
						awal tahun 2022. Pemeliharaan tahun 2021 ditunda karena kondisi
49	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	99,04	84,67	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Pembatasan kegiatan/PPKM yang melibatkan masyarakat di pesertanya. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan protokol kesehatan edukasi untuk anak TK ditiadakan
	Rata-Rata	99,54	89,59	Sangat Tinggi	Tinggi	

Sumber: SIMONEVA, 2022

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan Sasaran Daerah pertama Kemiskinan Masyarakat Menurun, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung berkepanjangan mengakibatkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan sehingga jumlah kemiskinan mengalami lonjakan.

Sasaran kedua, Keberdayaan Masyarakat Meningkatkan, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Seringkali didapati bahwa satu orang berafiliasi dengan banyak wadah kelembagaan. Hal ini disatu sisi merupakan bentuk semangat aktivisme tinggi yang sangat bagus untuk pemberdayaan masyarakat. Namun disisi lain, seringkali aktor-aktor pemberdayaan tersebut terbebani terlalu banyak tugas sehingga kurang fokus dan kurang detail baik dalam penyusunan program dan kegiatan serta dalam proses pelaksanaannya. Hal ini juga kemungkinan yang menjadi faktor kesulitan dalam membuat perencanaan berbasis potensi wilayah

Selain itu, sinkronisasi kinerja Lembaga yang belum maksimal dalam menangani permasalahan dapat menimbulkan potensi duplikasi atau ketidak-tuntasan penanganan suatu kasus; dan

- b. Pembatasan di masa Pandemi, secara otomatis aktivitas tersebut yang mengumpulkan banyak orang tersebut cenderung terhambat.

Sasaran ketiga, Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda dan cenderung membuka ruang pelanggaran kembali. Apalagi kondisi pandemic covid-19 dengan berbagai keterbatasan sosial mendorong masyarakat melakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan tak terkecuali dengan melanggar peraturan;

- b. Keterbatasan aktivitas akibat Pandemi covid-19 menghambat ruang gerak serta operasionalisasi Pol PP dalam penegakan perda. Masih diihat terdapat kebijakan penundaan pengajuan berkas berita acara penyidikan pelanggaran ke persidangan oleh pengadilan negeri dalam kurun waktu tertentu karena berisiko meningkatkan penyebaran virus.

Sasaran keempat, Kualitas Pendidikan Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dipending atau dialihkan;
- b. Masih terdapat anak putus sekolah; dan
- c. Pembelajaran Jarak Jauh yang diselenggarakan saat ini bukanlah suatu konsep yang direncanakan secara matang.

Sasaran kelima, Harapan Hidup Masyarakat Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. kegiatan yang bersifat melibatkan massa tidak dapat berjalan optimal seperti posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, masih terbatas dalam pelaksanaannya, meskipun sudah dilakukan pengalihan metode pelaksanaan.

Sedangkan sasaran keenam, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya Pandemi Covid-19 yang meningkat kasusnya pada pertengahan tahun sehingga kegiatan sosial budaya tidak dapat terlaksana sesuai dengan tatakala sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dibatalkan dan perubahan konsep kegiatan.

2. Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, dengan Sasaran Daerah pertama Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta mekanisme insentif dan disinsentif belum bisa dilaksanakan.

Sasaran kedua, Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Kualitas air dari hulu sebelum masuk Ke Kota Yogyakarta sudang rendah;
- b. Kebiasaan masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, COD dan fosfat melibihi baku mutu;

- c. Masih ada sebagian warga masyarakat yang masih membuang sampah di sungai dan melakukan pembakaran sampah sehingga menjadi sampah yang belum terkelola;

- d. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota

- e. Tidak semua RTHP di Kota Yogyakarta dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- f. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km², sehingga untuk memperoleh prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah sangat sulit untuk dipenuhi karena RTHP harus mencapai luasan 6.5 km²; dan
- g. Kurangnya peran serta warga dalam melaksanakan pemeliharaan secara bersama-sama RTHP.

Sedangkan sasaran ketiga, Infrastruktur Wilayah Meningkatkan. Memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi terhadap RTLH yang berada di atas tanah ngindung dan tidak diperbolehkan untuk direhab oleh pemilik tanah;
- b. Beberapa masyarakat ada yang tidak memiliki dana swadaya sedangkan nilai bantuan terbatas;
- c. Keberadaan RTLH berada di atas lahan ilegal secara tata ruang, semisal: wedi kengser;
- d. Masih adanya masyarakat di lingkungan kumuh yang belum siap untuk ditata;
- e. Keterbatasan lahan sehingga penataan permukiman kumuh hanya dapat dilakukan dengan pola pemugaran;
- f. Keterbatasan lahan sehingga kekurangan kecukupan ruang pada RTLH tidak dapat ditangani;
- g. Masih terdapat kalangan masyarakat belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga;
- h. Masih ada perilaku masyarakat masih kurang tertib dalam hal waktu dan tempat pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama pengunjung dari luar kota;
- i. Masih terdapat pembuangan sampah di sungai terutama dilakukan oleh para penghuni sementara di kota Yogyakarta;
- j. Ketergantungan atas kondisi TPA Piyungan karena tidak ada alternatif lain sebagai lokasi pembuangan sampah;
- k. Terdapat penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya;
- l. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor dan adanya asumsi bahwa pengujian itu sulit untuk lulus;
- m. Pemasangan papan informasi terkadang terkendala lahan yang akan dipasang karena kondisi di lapangan;
- n. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga bersama sarana umum (papan tarif dan papan informasi);
- o. Masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk parkir di tempat yang sudah

- p. Ada beberapa tempat tidak memungkinkan untuk pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan) besar dan pekerjaan boring cable sudah tidak memungkinkan lagi karena disepanjang trotoar di bawahnya terdapat saluran.
3. Prioritas Peningkatan Perekonomian, dengan Sasaran Daerah pertama Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:
- a. Keberlanjutan program Pertanian Perkotaan masih berpotensi mengalami masalah akibat budidaya tanaman pangan dan perikanan yang berhenti pasca panen. Kegiatan pelatihan-pelatihan pengembangan ketahanan pangan terbatas karena gelombang pandemic yang masih mengalami ketidakpastian kapan berakhirnya sehingga Kegiatan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi pertanian yang bersifat tatap muka dan mendorong kerumunan massa dibatasi untuk meminimalisir resiko penularan.

Sasaran kedua, Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Pandemi Covid-19 memaksa pengampu kegiatan melakukan perubahan metode pelaksanaan demi menegakkan protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran virus. Keterbatasan modal yang dimiliki masyarakat menjadi kendala lain dalam upaya peningkatan pendapatan sehingga pelatihan kerja yang diberikan tidak dapat berdampak jangka panjang atau cenderung bergerak di tempat.

Sedangkan sasaran ketiga, Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, memiliki permasalahan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan monitoring evaluasi penerapan CHSE sebagai syarat dasar penyelenggaraan pariwisata di masa pandemic covid-19 mengalami kendala akibat keterbatasan sumber daya manusia;
- b. Pengembangan ODTW baru memerlukan banyak ketersediaan lahan terutama untuk jalur sepeda. Fasilitas pendukung seperti tiang penanda Kawasan dan rambu pariwisata membutuhkan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat mengganggu citra Kota Yogyakarta;
- c. Kondisi pandemic covid-19 yang belum kunjung berakhir menghambat peningkatan kapasitas bagi pelaku wisata, pedagang pasar dan UMKM Kota Yogyakarta akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jumlah kunjungan pada setiap ODTW dan Pasar Tradisional juga dibatasi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Kurang optimalnya pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan stakeholder lain akibat pandemic Covid-19 menyebabkan kegiatan harus dilaksanakan dengan keterbatasan jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;
- d. Tingkat literasi digital UMKM dan pedagang pasar tradisional dalam rangka mengoptimalkan pemasaran secara daring masih perlu ditingkatkan; dan

4. Prioritas Pemanjapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi, dengan Sasaran Daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan memiliki permasalahan sebagai berikut:
 - a. Adanya perubahan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan BMD sehingga membutuhkan waktu untuk penyusunan peraturan turunan di level daerah (Perda dan Perwal);
 - b. SIM pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh kemandagri untuk dipergunakan oleh daerah (SIPD) masih belum dapat beroperasi dengan sempurna sehingga menyebabkan penggunaan SIM Pengelolaan Keuangan Daerah secara paralel (SIPKD dan SIPD);
 - c. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta adanya mutasi personil pengelola keuangan daerah dan personil pengurus barang pengguna/pembantu di OPD/Unit kerja yang sedikit banyak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - d. Pengembangan SIMBADA Versi 2 (penyesuaian kodefikasi baru penyesuaian kelembagaan baru) yang harus di sosialisasikan ke OPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berikut ini disajikan permasalahan Kota Yogyakarta mendasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

- a. Masih adanya anak putus sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2021, jumlah peserta didik SMA/MA/SMK yang berhenti atau putus sekolah meningkat cukup tinggi menjadi 0,30% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 0,05%. Meningkatnya angka putus sekolah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, disabilitas intelektual ataupun tidak minat bersekolah. Selain itu, apabila dilihat dari data angka melanjutkan sekolah, tahun 2021 menurun 3,06% anak yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, atau dengan kata lain semakin bertambahnya anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Begitu pula dengan angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK yang juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 17,21%.

tidak mau melanjutkan sekolah. Selain itu, adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang menurunkan daya beli masyarakat dan memicu terjadinya PHK dan berdampak pada terjadinya siswa putus sekolah. Permasalahan-permasalahan ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah untuk setiap jenjang pendidikan.

- b. Belum semua ruang kelas maupun fasilitas pada jenjang Sekolah Menengah dalam kondisi baik

Pada tahun 2021, persentase ruang kelas pada jenjang SMA/MK/MA dalam kondisi baik bertambah 53 unit dari tahun 2020 menjadi 839 unit. Namun, apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh kelas SMA/SMK/MA yang ada di Kota Yogyakarta, ruang kelas dalam kondisi baik masih sebesar 65,50% yang berarti belum sepenuhnya ruang kelas dalam kondisi baik. Hal ini tentu menjadi perhatian dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk dapat memenuhi kebutuhan rehab sarana, prasarana serta utilitas sekolah agar dapat memenuhi 100% kondisi yang baik.

Pemenuhan kebutuhan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah ini pun menjadi penting dalam rangka mempersiapkan sekolah guna mendukung penerapan kebijakan Kemdikbudristek terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No.1 tahun 2021. Sistem zonasi ini merupakan upaya untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan, sehingga sarana dan prasarana sekolah penting untuk ditingkatkan agar seluruh peserta didik dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

- c. Belum semua guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Pada tahun 2021 masih terdapat 211 guru yang belum berijazah S1/D-IV dari total 6.977 guru di Kota Yogyakarta. Jumlah guru yang berijazah S1/D-IV ini pun berkurang dari tahun 2020 karena adanya guru yang pensiun maupun guru yang mutasi keluar wilayah Kota Yogyakarta. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang optimal, maka semua guru pun diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi (sertifikasi). Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas para tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan dengan memberi kesempatan pada guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Angka Kematian Bayi (AKB) masih relatif tinggi

Angka Kematian Bayi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 10,80% per tahun. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu 11,97 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta yaitu karena berat badan lahir rendah/preterm, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Tingginya angka kematian bayi di tahun 2021 ini juga disebabkan karena pneumonia pada bayi yang meningkat akibat pandemi covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021. Melihat masih tingginya angka kematian bayi mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan terutama ibu dan bayi. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan bayi juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu sejak sebelum hamil, sehingga perlunya peningkatan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat sampai dengan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.

b. Tingginya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu tahun 2021 menjadi angka tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 580,34 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil diantaranya kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan; masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (*Antenatal Care*); dan belum optimalnya sistem rujukan maternal neonatal. Adanya pandemic Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini menambah jumlah ibu yang terinfeksi Covid-19 dengan komorbid sehingga memperburuk prognosis ibu hamil. Banyaknya jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 menyebabkan keterlambatan akses ke fasilitas kesehatan bagi ibu karena keterbatasan RS, ICU, dan Ventilator.

Pencegahan kematian ibu ini diperlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai sektor mengingat banyaknya kematian ibu hamil. Pemerintah Kota Yogyakarta pun terus berupaya dalam mengurangi angka kematian ibu dimulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, sampai dengan peningkatan penyediaan alat fasilitas kesehatan secara merata.

c. Masih ada kematian karena Tuberkulosis

Kasus kematian karena Tuberkulosis dalam lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yaitu sebanyak

per 100.000 penduduk. Kenaikan jumlah kematian tidak hanya disebabkan oleh TB itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta seperti HIV, Diabetes Melitus, ditambah adanya pandemi Covid-19 yang dapat memperparah kondisi penderita. Angka kematian yang cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan tatalaksana pengobatan pasien TB dimulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, serta deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah perburukan penyakit.

d. Cakupan pelayanan anak balita belum optimal

Setiap anak balita (12-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun. Cakupan pelayanan anak balita tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 menjadi 77,22%. Namun, selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Terjadinya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Sehingga dibutuhkan inovasi penanganan khususnya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 agar tetap dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita.

e. Masih adanya kasus balita gizi buruk

Kasus balita gizi buruk masih kerap ditemukan di Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2017 hingga 2019, kasus balita gizi buruk cukup menurun, namun meningkat kembali sejak tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga early warning balita yang mengalami 2 kali turun (2T) tidak berjalan optimal sebagai upaya pencegahan gizi buruk. Kesadaran masyarakat terkait pemberian makanan bergizi kepada balita pun masih kurang. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat balita gizi buruk sebanyak 103 anak dari 11.142 balita. Masih adanya balita gizi buruk mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

f. Masih adanya kasus stunting pada balita

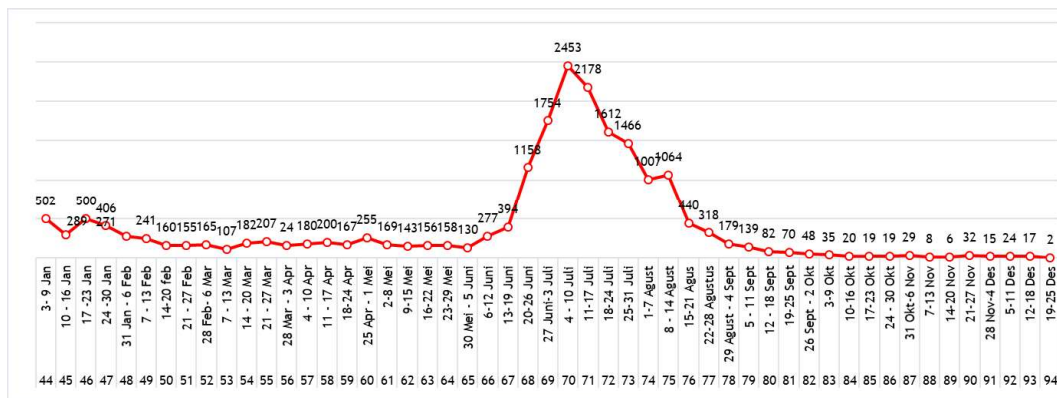
Prevalensi stunting pada kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Angka prevalensi stunting di Kota Yogyakarta sejak 2020 meningkat menjadi 14,34. Pada tahun 2021 terdapat balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD/standar deviasi di kota Yogyakarta sebanyak 1.433 anak dari 11.127 balita yang diukur. Kejadian stunting balita dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita gizi kurang sehingga upaya yang paling efektif yaitu penatalaksanaan balita gizi kurang secara komprehensif. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas

g. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan

Beberapa permasalahan bidang kesehatan di Kota Yogyakarta beberapa diantaranya disebabkan karena masih kurangnya sarana dan fasilitas layanan kesehatan. Jumlah rumah sakit di Kota Yogyakarta sebanyak 20 unit. Namun, ketika wabah pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020, rumah sakit yang tersedia di Kota Yogyakarta dirasa masih sangat kurang. Selain itu, fasilitas di dalamnya pun masih kurang, seperti ruang ICU, Ventilator, dan tabung oksigen. Sehingga, masih diperlukannya penambahan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi adanya wabah penyakit seperti pada saat Covid-19.

h. Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 yang Relatif Tinggi

Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta terjadi sejak 13 Maret 2020 dan merupakan kasus Covid-19 pertama di DIY. Sepanjang tahun 2020, terdapat 1.933 kasus konfirmasi positif Covid-19 dengan kasus terbanyak terjadi di Kemantren Umbulharjo sebanyak 344 kasus. Dari 1.933 kasus positif terdapat 4,71% atau sebanyak 91 orang terkonfirmasi meninggal. Kemudian kasus positif ini meningkat menjadi 19.961 di tahun 2021, dengan kasus terbanyak yang masih terjadi di Kemantren Umbulharjo sebanyak 3.385 kasus. Berikut gambaran kondisi yang terjadi sampai dengan akhir Desember 2021.



Gambar 2.36 Tren Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 Per-Pekan pada Minggu ke-44 s.d Minggu ke-94

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2021

Dari grafik diatas pada bulan Juni 2021 (Minggu ke-44) sampai dengan Desember 2021 (Minggu ke-94) menunjukkan kasus konfirmasi positif Covid-19 yang fluktuatif dan cenderung menurun. Penambahan kasus konfirmasi positif yang paling tinggi terjadi pada periode 4-10 Juli 2021 yaitu sejumlah 2.453 kasus. Dari 19.961 yang terkonfirmasi positif, sebanyak 5% yang terkonfirmasi meninggal, atau 1.095 kasus kematian akibat Covid-19.

Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus berupaya menangani dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta. Pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro, penegakan protokol kesehatan, vaksinasi dosis 1

immunity warga masyarakat Kota Yogyakarta. Selain itu pelacakan atau tracing yang kontak dengan pasien positif perlu terus dilakukan untuk dapat memutus rantai penyebaran covid-19.

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

a. Belum semua jalan dalam kondisi mantap

Panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 233,21 km. Adapun Panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,06% dan tidak mengalami perubahan yang cukup banyak sejak tahun 2020 karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun peningkatan yang cukup tinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 12,65%. Walaupun begitu masih terdapat sekitar 1,23% jalan yang belum dalam kondisi mantap. Hal ini disebabkan karena beban lalu lintas, tingginya curah hujan yang terjadi serta masih adanya titik potensi genangan juga menjadi faktor yang dapat menurunkan kualitas perkerasan jalan sehingga memerlukan pemeliharaan dan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Masih terdapat pembuangan aliran air/drainase dalam kondisi kurang baik

Dalam kurun waktu 2017-2021, panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,68% pertahun. Drainase dalam kondisi baik turut meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 0,78% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik. Panjang seluruh drainase sepanjang tahun 2021 mencapai 344,08 km. Namun, drainase dalam kondisi baik masih sepanjang 301,41 km, sehingga belum secara menyeluruh drainase yang berkondisi baik.

Di sisi lain, masih terdapat potensi genangan tinggi yang dapat terjadi di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di Kota Yogyakarta mencapai 7.91 Ha. Potensi genangan ini seringkali disebabkan oleh sedimentasi, banyaknya sampah ataupun akibat curah hujan yang tinggi. Hal ini perlu perhatian khusus Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani potensi titik-titik rawan genangan terutama saat musim penghujan. Selain itu dibutuhkan pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase agar dapat mempertahankan kualitas drainase menjadi lebih baik.

c. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki fungsi untuk

mengalami kenaikan dari tahun 2020. Namun, untuk angka persentase luasan RTH Publik dari luasan kota, tidak terlihat perubahannya dari tahun 2020 karena sangat sedikit mengalami kenaikan luasan RTH Publik sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, secara umum dalam lima tahun terakhir luasan RTH belum memenuhi 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sehingga diperlukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik agar dapat mendekati kepada target luasan RTH sesuai dengan standar.

d. Bencana longsor talud/tebing kerap terjadi

Cuaca ekstrem memiliki potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial bahkan menimbulkan korban jiwa. Salah satu akibat dari cuaca ekstrem yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah terjadinya tanah longsor. Pada tahun 2020, kejadian longsor Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) merupakan kejadian dengan korban terbanyak yaitu 205 korban dengan kerusakan rumah warga dan balai RW yang berlokasi di sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. Kejadian paling banyak terjadi di Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Gondokusuman. Kemudian tahun 2021 masih terdapat 52 korban kejadian longsor Talud/Brojong/Tebing akibat cuaca ekstrem dengan kerusakan rumah-rumah warga dan menyebabkan kerusakan jalan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani masalah longsor talud di beberapa titik di Kota Yogyakarta dengan merehabilitasi tanggul dan tebing sungai.

e. Masih terdapat pembuangan limbah ke aliran sungai

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai indeks kualitas air di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -6,22% pertahun. Penurunan kualitas air ini dikarenakan adanya parameter yang melebihi baku mutu yaitu parameter bakteri *e-coli* Tinja dan Bakteri Coliform yang diakibatkan oleh cuaca musim panas yang terlalu panjang yang terjadi pada tahun 2019 sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil. Kemudian pada tahun 2020 jumlah bakteri *e-coli* di sungai semakin meningkat hingga tahun 2021 yang menunjukkan indikasi bahwa pembuangan limbah domestik ke badan sungai semakin tinggi di sepanjang sungai dan kemungkinan adanya aktivitas peternakan di badan sungai, sehingga indeks kualitas air Kota Yogyakarta masih termasuk dalam kategori kurang baik ($40 < IKA \leq 50$).

f. Belum semua rumah tangga berakses sanitasi layak

Akses sanitasi yang dikatakan belum layak apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, serta kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Dilihat dari cakupan layanan sanitasi, masih terdapat 1,05% atau sekitar 1.285 rumah tangga yang akses sanitasinya belum layak di Kota Yogyakarta. Sehingga diperlukan penanganan khusus untuk penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat

g. Kondisi TPA Piyungan yang sudah melebihi kapasitas

TPA Piyungan melayani sampah perkotaan dari wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul yang beroperasi sejak 1995. Jumlah sampah yang masuk dari tiga wilayah tersebut ke TPA Piyungan pun terus meningkat hingga akhir Maret 2022 yaitu sebesar 772 ton/hari dan Kota Yogyakarta menyumbang sampah sebesar 273 ton/hari. Hal ini menyebabkan kondisi dumping sampah di TPA Piyungan sudah semakin tinggi dan hanya berjarak sekitar 16 meter dari jalan utama, dan area untuk unloading pun semakin terbatas serta jalan operasional menjadi bergesekan dengan akses warga. Sehingga diperlukan pengembangan sarana prasarana untuk pengolahan sampah di Kota Yogyakarta sebagai alternatif untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan, seperti optimalisasi bank sampah, pengembangan TPS3R Nitikan dengan pemasangan incinerator.

h. Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Pada tahun 2021 angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di kota Yogyakarta sebesar 79,84% atau 2.617,8 Ha dengan persentase luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 11,44% atau 375,02 Ha, dan persentase pemanfaatan non kegiatan dan zonasi sebesar 8,72% atau sekitar 285,85 Ha.

4. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah seluruh rumah layak huni dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah seluruh rumah layak huni sebanyak 122.764 unit. Adapun jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak 124.951 sehingga masih terdapat 2.187 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni. Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, tersebar di 13 Kemantren, yakni Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Rumah tidak layak huni ini harus segera diintervensi oleh Pemerintah Kota, karena hal ini mempengaruhi kelayakan dan keamanan dari bangunan tempat tinggal masyarakat. Dukungan dan kerjasama dari sektor swasta pun dibutuhkan dalam penyediaan rumah layak huni sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau

b. Masih Terdapat Kawasan Kumuh

Pada tahun 2021 dilakukan pendataan kumuh yang ditetapkan dengan SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh tertanggal 3 Februari 2021. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai data pada Bulan Februari 2021 di Kota Yogyakarta tersebar di 12 kemantren, dengan total luasan kumuh sebesar 114,72 Ha, kemudian dilakukan penanganan permukiman kumuh sepanjang tahun 2021 seluas 20,54 Ha. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh saat ini seluas 94,18 Ha. Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penegakan Perda

Pada tahun 2021 persentase penegakan PERDA mengalami penurunan menjadi 89,97% jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana pelanggaran perda sejumlah 319 pelanggaran merupakan jumlah dugaan pelanggaran dari hasil operasi penegakan perda secara yustisi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berdasarkan penerbitan Surat Panggilan (SP) kepada terduga pelanggar.

Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan mewabahnya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap ruang gerak petugas operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda, khususnya penegakan perda secara yustisi karena terdapat fungsi koordinasi dengan institusi lain.

b. Belum optimalnya kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 130 Kampung Tangguh Bencana (KTB) dari 169 kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 37 Kaltana dari 45 Kelurahan. Sehingga masih ada 39 kampung yang belum menjadi KTB dan 8 kelurahan yang belum menjadi Kaltana.

c. Masih adanya tindak kriminalitas yang belum tertangani

Kriminalitas masih menjadi permasalahan yang penting untuk ditangani dan diantisipasi di Kota Yogyakarta. Kriminalitas yang masih kerap terjadi diantaranya pencurian, pencurian motor, kekerasan (klitih), pemerasan, dan penipuan. Adapun di tahun 2021 jenis kejahatan yang dominan terjadi dan tertangani di Polresta Kota Yogyakarta adalah kasus penipuan yang mencapai 121 kasus. Selain itu, kejadian

Klitih merupakan fenomena kekerasan yang menggunakan senjata tajam yang dilakukan sekelompok orang dengan mengendarai sepeda motor yang sudah menjadi keresahan masyarakat di seluruh wilayah DI Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2021, jumlah laporan tindak kriminalitas di Kota Yogyakarta mencapai 693 kasus, dan yang tertangani masih sebesar 74,46%, sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dalam menangani tindak kriminalitas di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, seperti peningkatan volume patroli, penempatan personil dan pembentukan satgas pengamanan yang tersebar di beberapa ruas jalan, penambahan dan pemerataan CCTV di beberapa ruas jalan, dan sebagainya.

d. Degradasi Moral Masyarakat

Kota Yogyakarta terus mengalami perkembangan baik dilihat dari segi aktivitas maupun jumlah penduduknya. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar ini telah mendatangkan banyak penduduk dari luar untuk masuk ke dalam wilayah Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Hal ini dapat menimbulkan dinamika perubahan sosial, heterogenitas masyarakat Kota Yogyakarta dengan berbagai budaya dan adat kebiasaan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang tanpa batas pun dapat memberikan efek negatif. Beberapa dampak yang ditimbulkan diantaranya pergeseran tradisi, kenakalan remaja, penyebaran berita hoax dan sebagainya yang juga disebabkan karena degradasi moral masyarakat yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian terhadap sesama.

6. Urusan Sosial

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:

a. Masih ada penduduk miskin di Kota Yogyakarta

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di seluruh wilayah DIY termasuk Kota Yogyakarta. Isu kemiskinan di DIY ini menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi DIY dalam 5 tahun (2017-2022) karena jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY dari tahun 2017-2021 masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih didominasi di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif paling kecil, sehingga penduduk yang berada diatas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta lebih besar yaitu 92,31% dibandingkan dengan DIY yang sebesar 87,20% penduduk. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta

Yogyakarta. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini yang perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu penting diperlukan akses pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada karakter, kapasitas serta potensi penerima manfaat.

- b. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Jumlah PMKS fluktuatif dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan pula dengan peningkatan jumlah PMKS yang diberikan bantuan baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat dari tahun 2017 hingga 2021. Bentuk bantuan sosial yang paling besar diberikan antara lain BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

Jumlah PMKS di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 tercatat sebanyak 50.461 orang. Sedangkan, jumlah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 48.798, dengan kata lain masih terdapat 1.663 orang yang belum mendapatkan bantuan. Hal ini yang masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial.

- c. Masih terdapat Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang belum menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan berpengaruh besar terhadap penghasilan masyarakat, sehingga jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial pun naik menjadi 9.065 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun sebanyak 2.927 orang. Hal ini berarti masih terdapat 6.138 orang yang masih belum menerima jaminan sosial. Pada

penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 7.483 orang sehingga masih terdapat 3.005 orang yang masih belum menerima jaminan sosial. Oleh karena itu masih diperlukan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar semua penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial.

d. Belum optimalnya verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data penerima bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan verifikasi langsung ke wilayah berdasarkan nama dan alamat yang ada di dalam daftar DTKS dan juga melakukan pendataan masyarakat yang berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan sosial yang kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar DTKS. Hasil dari verifikasi DTKS calon penerima bantuan sosial yang tidak diketemukan diusulkan untuk dihapus ke Kementerian Sosial. Akan tetapi data yang diusulkan dihapus pada penetapan DTKS periode selanjutnya ternyata tidak dihapus oleh Kementerian Sosial. Selain itu dari Kementerian Sosial tidak ada penjelasan terkait kriteria usulan calon penerima bantuan sosial yang disetujui untuk dimasukkan dalam daftar DTKS periode selanjutnya. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk masyarakat yang kondisi sosial ekonominya berdasarkan pendataan di wilayah termasuk dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum masuk dalam daftar DTKS.

e. Ada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang sudah mampu hidup mandiri namun belum bersedia dikeluarkan dari daftar KPM PKH

Setiap KPM PKH mempunyai pendamping PKH yang memantau peningkatan kondisi sosial ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari pendamping PKH ada KPM PKH yang sudah mampu hidup tetapi belum bersedia dicoret dari daftar KPM PKH karena dengan alasan mereka tidak akan mendapatkan bantuan lagi jika dikeluarkan dari daftar KPM PKH. Padahal di sisi lain masih ada keluarga yang lebih buruk kondisi sosial ekonominya tetapi tidak masuk dalam daftar KPM PKH.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi

Pengangguran merupakan orang yang termasuk dalam usia angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Jumlah ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja kadangkala tidak sebanding sehingga mengakibatkan timbulnya

pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 1,95% atau dengan kata lain bertambah 568 orang menjadi 3.672 orang yang menganggur sebagai akibat dari banyaknya pekerja yang dirumahkan/di PHK di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 2,19% atau sekitar 5.752 orang. Bertambahnya 2.080 orang yang menganggur di tahun 2021 ini masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Disamping itu, semakin banyaknya lulusan SMK dan perguruan tinggi yang masuk dunia kerja sehingga tingkat pengangguran menjadi semakin naik. Keterampilan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri juga perlu didorong untuk memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan usaha baru dalam bentuk UMKM juga perlu difasilitasi karena diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja.

- b. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat masih mendominasi sehingga daya saing tenaga kerja rendah

Jumlah lulusan S1/S2/S3 dapat menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang pendidikan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pencari kerja di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 71.524 orang pada tahun 2021, namun tidak sedikit pula yang lulusan SMA/Sederajat. Sesuai dengan data angka pendidikan yang ditamatkan, 29,34% lulusan jenjang SMA/Sederajat, sedangkan 15,24% lulusan jenjang Diploma IV/S1. Hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat, karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan minimal klasifikasi D-IV/S1. Untuk itu, tenaga kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi agar lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan di tahun 2021 sebesar 363 orang, yang artinya masih terdapat 270 orang yang belum mendapat pelatihan meski sudah mendaftar pelatihan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membenahi sistem pelatihan berbasis kompetensi, terutama penerapan pelatihan yang berbasis online dikarenakan kondisi pandemi yang masih terjadi, sehingga dapat mempermudah peserta dan menyaring lebih banyak pencari kerja yang tertarik dan mengikuti pelatihan.

- c. Masih terdapat sengketa pengusaha-pekerja

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Angka sengketa pengusaha-pekerja meningkat dari 9,46% di tahun 2019 menjadi 16,23% di tahun 2020. Kemudian meningkat kembali menjadi 69,48% di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan yang menurun. Peningkatan kasus terjadi karena

pekerja dan pada akhirnya menjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain ada pula yang menutup perusahaannya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Penanganan kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja perlu dilakukan dengan mediasi oleh OPD dan jika tidak menemukan titik temu kasus tersebut akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

a. Tingginya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada tahun 2021, jumlah KDRT meningkat daripada tahun 2020 menjadi sebanyak 235 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,17%. Meningkatnya jumlah KDRT di tahun 2021 tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga adanya Satgas SIGRAK dengan sistem yang sudah berjalan. Selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi, mengingat pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian penuh untuk dapat menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta.

b. Masih Adanya Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Fenomena kasus kekerasan seksual pada anak masih kerap terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Banyak orangtua yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual tidak mau melapor, bahkan sebagian korban yang sudah remaja juga merasa enggan untuk melaporkan kasus yang telah dialami. Selain itu, rentang waktu antara kejadian dan pelaporan yang berselang cukup lama sehingga lebih menyulitkan untuk ditangani. Kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi di lingkungan keluarga, ataupun terjadi di berbagai ruas jalan yang berupa pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan. Hal ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang tentunya membutuhkan kerjasama dari masyarakat.

c. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang belum optimal

Indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan keterlibatan wanita secara aktif dapat berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG ini menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, Indeks pemberdayaan gender (IDG) di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 71,05, dan pada tahun 2021 sebesar 73,18. Nilai tersebut masih berada dibawah rata-rata IDG DIY yaitu sebesar 76,57. Hal ini menggambarkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik di Kota Yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal.

partisipasi perempuan secara aktif dalam kehidupan ekonomi, politik, serta dalam pengambilan keputusan.

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

a. Masih ada kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan

Kota Yogyakarta bukan merupakan wilayah produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar kota, seperti Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan ditentukan berdasarkan tiga aspek yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, diantaranya (1) Ketersediaan Pangan; (2) Akses terhadap Pangan; (3) Pemanfaatan Pangan. Berdasarkan hasil analisis, dari 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, didapatkan 4 kelurahan yang masuk dalam kategori kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan, diantaranya Kelurahan Kricak (Kemantren Tegalrejo), Kelurahan Gedongkiwo (Kemantren Mantrijeron), Kelurahan Pringgokusuman (Kemantren Gedongtengen), dan Kelurahan Keparakan (Kecamatan Mergangsan).

Kelurahan-kelurahan ini masuk dalam kategori rentan terhadap rawan pangan dikarenakan sarana prasarana penyedia pangan yang masih kurang, masih adanya rumah tangga tanpa air bersih, serta masih terdapat penduduk yang tidak sejahtera. Sarana prasarana yang dimaksud adalah pasar, minimarket, toko, warung yang diasumsikan sebagai tempat penyimpangan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan ataupun dari wilayah. Sarana prasarana penyedia pangan ini dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang terdapat di kelurahan tersebut. Kemudian, rumah tangga yang masih terkendala air bersih cenderung rumah tangga yang terdapat di kawasan bantaran sungai. Untuk itu, dibutuhkan beberapa upaya yang lebih optimal untuk mengatasi kerentanan terhadap pangan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan akses pangan, peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan, pembangunan pertanian perkotaan secara merata.

b. Pola konsumsi masyarakat belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang dan aman/B2SA) dan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat masih rendah

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017 – 2021 selalu menunjukkan peningkatan. Skor PPH tahun 2017 sebesar 85,1 kemudian meningkat hingga 95,1 di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pola konsumsi komponen sayur dan buah. Akan tetapi, skor PPH Kota Yogyakarta belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberagaman konsumsi pangan masyarakat masih kurang

4. **Urusan Pertanahan**

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

a. Masih ada lahan yang belum bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang dalam hal ini merupakan tanah umum, sultan *ground*, dan pakualaman *ground*. Pada tahun 2021 luas lahan bersertifikat sebanyak 2.698,79 Ha meningkat dari luas lahan bersertifikat di tahun 2020 yang sebesar 2.657,17 Ha. Masih ada aset umum seperti jalan bernomor ruas dan tidak bernomor ruas yang belum bersertifikat. Total Tanah yg belum sertifikat 596 bidang yang terdiri dari tanah untuk fasilitas umum (non jalan) sebanyak 34 bidang dan tanah fasilitas umum untuk jalan bernomor ruas sebanyak 562 ruas jalan. Semua jalan masih dalam proses pensertifikatan secara bertahap.

b. Masih terdapat kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Penyelesaian kasus sengketa tanah menurun dari 57,14% di tahun 2020 menjadi 45,45% di tahun 2021. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak seimbangnya jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus yang terdaftar. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum ada kasus sengketa tanah yang dapat tertangani 100%. Oleh karena masih banyaknya kasus yang belum tertangani, maka menyebabkan angka persentasenya rendah. Keadaan ini harusnya menjadi catatan bagi pihak yang terkait untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik meskipun jumlah kasus yang ada setiap tahunnya hanya sedikit.

5. **Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 60,84 masih berada di bawah IKLH nasional sebesar 71,43.

b. Pencemaran air sungai masih terjadi

Hasil pengukuran indeks kualitas air menurun dari 50,00 IKA di tahun 2017 menjadi 38,44 IKA di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 2017-2021 sebesar -6,22% per tahun. Perkembangan kawasan perkotaan mempengaruhi penurunan kualitas air sungai, salah satunya disebabkan oleh aktivitas masyarakat perkotaan dalam membuang limbahnya ke sungai mengalami peningkatan. Selanjutnya, menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, nilai indeks kualitas air ± 50 IKA tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai $IP\ 5,0 < PI_j \leq 10,0$. Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai

bagian tengah dari seluruh badan sungai di Provinsi DIY, sehingga sungai yang ada di Kota Yogyakarta akan terpengaruh dengan kualitas hilir sungai dari kabupaten di atasnya yaitu Kabupaten Sleman. Jika kualitas air masukan dari Kabupaten Sleman buruk, maka sungai-sungai di Kota Yogyakarta tentunya akan memiliki kualitas air yang hampir sama pula. Oleh karena itu, penanganan kualitas air ini cukup sulit karena menyangkut seluruh kota/kabupaten di wilayah Provinsi DIY.

- c. Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam dokumen perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan dan dilakukan pengawalan.
- d. Belum semua sampah terangkut ke TPA

Penanganan sampah di kawasan Kota Yogyakarta perlu dilakukan peningkatan, dimana kondisi saat ini baru 681,92 ton/hari sampah yang dapat tertangani. Sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah yang dikelola secara 3R meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah, dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung dan sampah yang diolah pada TPST 3R di Nitikan. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R menurun dari 26,07% di tahun 2020 menjadi 13,54% di tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R dari 94,06 ton/hari menjadi 40,46 ton/hari di tahun 2021. Terjadi penurunan jumlah sampah dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian warga tidak maksimal dalam memilah sampahnya, sehingga aktivitas masyarakat dalam mengelola bank sampah dan pengurangan sampah mengalami penurunan.

- e. Pengurangan sampah dari sumbernya belum optimal

Pengurangan sampah di kawasan Kota Yogyakarta perlu ditingkatkan, karena kondisi saat ini baru mencapai 102 ton sampah yang dikurangi. Pengurangan sampah di kawasan perkotaan Yogyakarta ini memerlukan kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu dari skala rumah tangga. Pemerintah Kota telah berupaya mengkampanyekan pada warga masyarakat untuk meminimalisir pembuangan sampah dari rumah, namun sejauh ini hasilnya belum optimal. Pengurangan jumlah sampah ini penting dilakukan untuk dapat mengurangi jumlah sampah yang ditampung di bank sampah, karena hal ini dapat mendorong dan mengoptimalkan kinerja Bank Sampah yang sudah ada. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan secara optimal di setiap kelurahan untuk lebih membangun kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan dan sampah mandiri yang saat ini menjadi ketugasan dari Fasilitator Kelurahan Pengelola Sampah Mandiri se-Kota Yogyakarta.

- f. Masih Terdapat Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada tahun 2021, jumlah ketetapan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin

kembali. Disamping itu, persentase usaha yang telah memiliki izin pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), belum tercapai 100% karena banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru serta banyaknya pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya mengalami hambatan karena pandemi covid 19.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

a. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas yang akan memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan yang dapat digunakan sebagai syarat membuat surat-surat tertentu. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2021 sebesar 0,98. Angka ini cenderung tetap jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun masih belum mencapai 100%. Adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penerbitan KTP oleh Dinas Dukcapil, sehingga cakupan penerbitan KTP belum mencapai 100% atau belum semua penduduk yang wajib memiliki KTP melakukan penerbitan KTP.

b. Masih adanya penduduk yang berpasangan belum memiliki akta nikah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakta nikah. Rasio pasangan berakta nikah tahun 2021 sebesar 0,79, berarti masih banyak pasangan yang belum melaporkan akta nikah yang dimiliki. Rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal karena banyak pasangan yang sudah lama menikah belum melaporkan akta pernikahannya. Pemerintah perlu mengupayakan kebijakan agar semua pasangan nikah melaporkan akta pernikahannya.

c. Adanya tuntutan perubahan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara cepat efisien, dan efektif melalui sistem online akibat dari perubahan pola perilaku masyarakat dikarenakan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat sejak masa Pandemi Covid-19 sampai dengan pasca pandemi.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

a. Jumlah kelompok binaan PKK menurun

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok desawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai

jenjang untuk terlaksananya program PKK. Rata-rata binaan PKK di tahun 2021 turun dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 1,50.

Jika dilihat data tahun 2017 hingga 2020, rata-rata jumlah binaan PKK cenderung mengalami peningkatan. Namun kelompok dasawisma yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan mulai kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif lagi dari tahun ke tahun. Sehingga angka rata-rata nya mengalami penurunan di tahun 2021.

b. Masih adanya posyandu yang masuk kategori tidak aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada bayi dan balita, serta tempat pelayanan keluarga berencana. Persentase Posyandu aktif meningkat dari 31,90% di tahun 2020 menjadi 71,40% di tahun 2021, namun masih belum dapat mencapai angka 100%. Belum tercapainya persentase posyandu aktif secara maksimal ini dipengaruhi oleh perubahan kategori posyandu aktif, yaitu bila memenuhi 5 kriteria dari definisi posyandu aktif. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif. Pada tahun 2021 jumlah posyandu yang masuk dalam katagori aktif sebanyak 445 dari 623 posyandu. Sebanyak 178 posyandu tidak memenuhi kriteria jumlah hari pelayanan di posyandu. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan posyandu masih terkendala pandemi. Masih ada posyandu yang belum bisa melaksanakan kegiatan posyandu balita secara lengkap.

c. Pengelolaan lembaga kemasyarakatan masih harus dioptimalkan

Masih diperlukan peningkatan kapasitas pengurus karena vitalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan dan pembangunan diantaranya dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dan agenda-agenda pembangunan lainnya.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur (ASFR) 15-19 Tahun

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) merupakan banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. Pada tahun 2020-2021, ASFR di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari 2,1 di tahun 2020 menjadi 3,4 di tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena adanya tambahan Pasangan Usia Subur (PUS) dibawah usia 19 tahun akibat dari pernikahan usia muda dan terjadinya peningkatan akses teknoogi informasi di satu sisi, namun di sisi lain melemahnya kontrol orangtua terhadap penggunaan gadget menyebabkan anak lebih cepat matang sehingga rentan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu kebanyakan kasus perkawinan anak didominasi karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu (*Kehamilan yang Tidak Diinginkan*).

dalam memberikan penyuluhan baik kepada orang tua maupun anak usia subur terkait bahaya perkawinan anak/usia dini.

b. Masih adanya kasus pernikahan usia dini

Pasangan usia subur dengan istri yang berusia di bawah 20 tahun dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20–35 tahun. Pada tahun 2021 terdapat PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun sebesar 28% atau sebanyak 96 pasangan. Untuk itu, diperlukan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menekan pernikahan usia di bawah 20 tahun.

c. Meningkatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

Persentase *unmet need* KB selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah pasangan usia subur kembali mengalami kenaikan yang diikuti dengan meningkatnya persentase *unmet need* menjadi sebesar 11,15%. Hal ini disebabkan karena PUS ber-KB pada tahun 2021 ada penambahan maupun pengurangan jumlah yang tersebar di beberapa kemitraan. Oleh karena itu diperlukan peran Pemerintah Kota untuk menumbuhkan kesadaran pada wanita usia subur menikah agar menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya.

d. Belum adanya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan.

Berdasarkan data tahun 2017-2021, jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kota Yogyakarta hanya ada satu unit yaitu di Kecamatan Mergangsan atau sebesar 7,14 persen. PPKS memberikan layanan data/informasi mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan, maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat.

e. Belum semua faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS

Persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan hingga persentasenya di tahun 2020 mencapai angka 91,80%. Namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 71,43%. Sehingga dari total 63 faskes dan jejaring, masih ada 45 faskes dan jejaring yang tidak bekerjasama dengan BPJS.

9. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Adanya penurunan jumlah penumpang yang keluar/masuk Kota Yogyakarta

Jumlah penumpang bus yang keluar/masuk Kota Yogyakarta melalui Terminal Giwangan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

dengan harga bersaing maupun karena semakin banyaknya kendaraan pribadi. Sedangkan penurunan yang terjadi mulai tahun 2020 akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sampai tahun 2021, kondisi pandemik masih belum berakhir sehingga mobilitas masyarakat terutama dalam bepergian keluar kota masih dibatasi. Namun, perlu diantisipasi jika mobilitas masyarakat sudah kembali normal di masa pasca pandemi kedepannya.

b. Masih rendahnya jumlah Uji KIR angkutan umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum cenderung menurun dari 1.938 unit di tahun 2017 menjadi 1.207 unit di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata -8,85% per tahun.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta terjadi karena akumulasi dari berbagai faktor seperti mutasi kendaraan, perubahan angkutan umum menjadi angkutan pribadi, berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Yogyakarta akibat maraknya penggunaan angkutan online maupun berkurangnya kesadaran untuk melakukan uji KIR. Pada tahun 2021 kondisi masih pandemi, sehingga banyak kendaraan yang belum beroperasi. Khususnya kendaraan umum seperti bus dan taksi.

c. Masih terbatasnya sarana prasarana transportasi

Permasalahan prasarana transportasi yang dimaksud adalah ketersediaan jalan. Ketersediaan jalan dapat dilihat melalui ratio/perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari tahun 2017-2021, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan dari 279.562 unit kendaraan di tahun 2017 hingga 288.360 unit kendaraan di tahun 2021. Peningkatan jumlah kendaraan ini tidak diikuti dengan panjang jalan yang ada di Kota Yogyakarta, dimana berdasarkan data tahun 2017-2021 tidak mengalami pertumbuhan/peningkatan.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan dengan tidak diiringi dengan penambahan luas atau lebar jalan tentunya akan semakin membuat kemacetan semakin parah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

Sedangkan permasalahan sarana transportasi yang hingga saat ini masih erat kaitannya dengan kelancaran lalu lintas di Kota Yogyakarta adalah ketersediaan lahan parkir. Dengan potensi daya tarik pariwisata dan banyaknya kegiatan rekreasi yang

saat ini masih dirasa kurang sehingga masih sering terjadi parkir liar dan berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan ketersediaan ruang parkir di Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan melakukan manajemen perparkiran, optimalisasi tempat khusus parkir yang ada serta melakukan kajian pengembangan TKP Ngabean. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan penindakan terhadap juru parkir serta operasi penegakan peraturan perparkiran.

- d. Belum adanya regulasi pasti yang mengatur angkutan sewa khusus (angkutan sewa khusus daring seperti Taksi Online) sebagai moda transportasi baru di era modern

Kota Yogyakarta belum memiliki regulasi khusus sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian armada angkutan tidak dalam trayek agar tetap beroperasi sesuai ketentuan serta tetap mendukung pembangunan Kota Yogyakarta. Pada tingkat nasional terdapat Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus perihal penetapan kuota taksi daring. Namun sayangnya belum ada regulasi yang diterbitkan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut. Penetapan regulasi di level pemerintah daerah masih terkendala, karena pendataan yang belum tersedia dari pihak penyelenggara taksi online yang mencakup lingkup regional wilayah sehingga sulit untuk memetakan jumlah armada taksi online yang hanya beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

- e. Masih terdapat titik simpang dengan kinerja rendah

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada pada skala 0-1, dimana semakin mendekati 0 nilai V/C maka semakin tinggi kinerja jalannya. Titik simpang yang memiliki kinerja rendah di Kota Yogyakarta diantaranya Simpang Pingit (waktu tunggu lama, over capacity dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam Kota Yogyakarta dari arah Barat-Utara); serta Simpang Demangan (optimalisasi kapasitas simpang melalui pengaturan APILL oleh DIY masih kurang dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam Kota Yogyakarta dari arah Timur-Utara).

Namun demikian, upaya peningkatan kinerja jalan tetap dilakukan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa jalan di Kota Yogyakarta. Manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan antara lain memberlakukan sistem satu arah Jl. C. Simanjuntak dan Jl. Prof. Herman Yohannes. Penataan giratory pada kawasan Malioboro juga turut dilakukan dengan memberlakukan sistem satu arah pada Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Pasar Kembang, Jl. Letjen Suprpto dan Jl. Letjen Suprpto. Selain itu dilakukan peningkatan Jembatan Gembiraloka turut mengurangi masalah kepadatan kawasan yang sebelumnya terjadi. Serta mulai tahun 2012 dilakukan pula pengaturan simpang melalui ATCS yang sudah terpasang pada 23 simpang dari total 50 simpang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

f. Meningkatnya kepadatan lalu lintas

Pada tahun 2021 kinerja jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena terjadi pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat walaupun masih dalam pandemi COVID – 19. Rata–rata kecepatan jalan arteri sekunder pada tahun 2021 sebesar 27,19 km/jam, rata–rata kecepatan jalan kolektor sekunder 27,22 km/jam dan rata–rata kecepatan jalan lokal 25,78 km/jam. Upaya peningkatan kinerja jalan telah dilakukan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa jalan di Kota Yogyakarta, tetapi pada musim liburan kemacetan tetap terjadi.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan *Jogja Smart City/Smart Regency* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province* (JSP) yang masih perlu ditingkatkan upaya tindak lanjutnya.

Berdasarkan data tahun 2017-2021 dilakukan peningkatan jumlah ruang publik yang terpasang free wifi. Hal ini dilakukan sebagai dukungan kepada masyarakat agar dapat melakukan berbagai aktivitas daring di masa pandemi maupun bentuk dari pengembangan *Smart City*. Upaya lain dalam mengembangkan Kota Yogyakarta sebagai *Smart City* juga terlihat dari adanya inovasi tata kelola Pemerintah Kota Yogyakarta dengan basis *Single ID, Single Window, Single Sign On* yaitu *Jogja Smart Service* (JSS). Cukup banyak aplikasi yang telah terintegrasi di dalam JSS seperti layanan administrasi kependudukan, kepengurusan dokumen perijinan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aduan kedaruratan yang dapat langsung diakses oleh masyarakat secara cepat dan langsung terkoneksi dengan OPD pengampu urusan masing–masing. Kota Yogyakarta pun telah berkomitmen mendukung integrasi data pemerintahan melalui inovasi KemenPANRB yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana mandat dari Perpres 95/2018. Komitmen ini terlihat dari target nilai evaluasi SPBE yang ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Diskominfosan yaitu mencapai minimal 3 (tiga). Untuk itu, dalam tindak lanjut mewujudkan *Jogja Smart Province*, Kota Yogyakarta menjadi peranan utama dalam penerapan *Smart City* sehingga diperlukan upaya peningkatan dan pengawalan.

b. Masih adanya penyebaran informasi dan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoax) yang dapat berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. UMKM sebagai sektor ekonomi potensial dari program Gandeng Gendong yang masih perlu pendampingan

Program Gandeng Gendong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergotong-royong membantu warga yang masih mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama warga miskin agar lebih sejahtera. Program Gandeng Gendong ini merupakan upaya Pemkot Yogyakarta untuk melibatkan stakeholder 5K (Kampung, Kampus, Pemkot, Korporat, Komunitas) sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya pembangunan komprehensif. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan dari tahun 2018 adalah penyediaan jamuan makan-minum untuk kebutuhan dinas melalui aplikasi Nglarisi di JSS dengan melibatkan penyedia jasa dari UMKM lokal. Anggaran jamuan rapat dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta kurang lebih mencapai 30 milyar/tahun, apabila dinas memesan jamuan rapat di UMKM lokal akan menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam perjalanannya kegiatan ini juga menimbulkan kesenjangan diantara para pelaku UMKM. Peralnya kualitas produk yang ditawarkan masing-masing pelaku UMKM berbeda, sehingga pelaku UMKM yang mampu menjaga kualitas produknya akan mendapatkan omset yang lebih besar. Selain itu Pemkot Yogyakarta juga membentuk OPD Pembina UMKM dengan satu OPD mengampu beberapa UMKM. Harapannya OPD Pembina UMKM dapat lebih fokus membimbing UMKM binaanya terutama dalam pengembangan produk, sehingga tujuan awal dari kegiatan Nglarisi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Kota Yogyakarta dapat terealisasi.

- b. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal.

Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja. Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Tahun 2021 angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta sebesar 55,35, hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020,. Namun peningkatan ini masih belum optimal karena belum semua angkatan kerja di Kota Yogyakarta dapat masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja). Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah ketersediaan lapangan kerja yang tidak mencukupi.

12. **Urusan Penanaman Modal**

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan jumlah penanaman modal asing

Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 dimana investor PMA mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 3 unit saja. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta.

- b. Penurunan nilai investasi berskala nasional, khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta di tahun 2021 mulai meningkat kembali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 231.859,20 juta rupiah menjadi 121.048,07 juta rupiah dengan rincian PMA sebesar 131.228,02 juta rupiah dan PMDN sebesar 121.048,07 juta rupiah. Nilai ini sudah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2020, saat awal-awal pandemi Covid-19.

Namun karena kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir, masih berdampak pula pada kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat juga masih terbatas dikarenakan masih berlakunya kebijakan pembatasan kegiatan yang mengakibatkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan merumahkan karyawannya maupun menutup usahanya untuk sementara.

- c. Menurunnya daya serap tenaga kerja perusahaan PMDN dan PMA

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Di tahun 2021 terdapat 3 unit PMA di Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19 orang dan 4.907 unit PMDN dengan daya serap sebesar 8.774 tenaga kerja di Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, daya serap tenaga kerja di tahun 2021 merupakan yang terendah, yaitu dari 10,02 jiwa/unit di tahun 2019 menjadi 8,12 jiwa/unit di tahun 2021.

Menurunnya daya serap tenaga kerja disebabkan karena dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Di tahun 2021 jumlah perusahaan PMDN dan jumlah tenaga kerja PMDN memang mengalami peningkatan. Hanya saja daya serap dari perusahaan terhadap pencari kerja masih kurang.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan kepada wirausaha muda

Kota Yogyakarta mencapai 2080, atau 8,65% dari keseluruhan jumlah wirausaha. Akan tetapi tidak semua wirausaha muda mendapatkan pembinaan dari Pemerintah. Padahal melihat trend yang berkembang saat ini wirausaha muda diperkirakan akan terus meningkat jumlahnya karena ada kecenderungan peningkatan belanja *online* di masyarakat dengan adanya kemudahan akses teknologi. Trend yang ada perlu diantisipasi oleh Pemkot Yogyakarta sehingga wirausaha muda ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian kota.

b. Kenakalan remaja yang semakin meresahkan warga

Pandemi Covid mengakibatkan pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring, hal ini mengakibatkan siswa memiliki banyak waktu luang sehingga siswa mencari alternatif kegiatan untuk mengisi waktu luang mereka. Kurangnya pengarahan dan pengawasan dari sekolah dan orang tua mengakibatkan siswa melakukan tindakan kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat di waktu luang mereka. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan upaya intervensi melalui kegiatan-kegiatan positif yang secara langsung melibatkan pemuda, sehingga energi pemuda dapat tersalurkan pada hal positif.

14. **Urusan Statistik**

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan statistik adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral

Penyajian data statistik masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sehingga menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisa data untuk keperluan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

b. Data geospasial yang diproduksi oleh masing – masing OPD sebagian besar belum memenuhi standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan banyak peta tidak *terupdate*.

Masih banyak OPD dalam pembuatan peta belum memenuhi standar KUGI karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi untuk membuat peta. Selain itu peta yang sudah ada banyak yang tidak dilakukan pemutakhiran data, sehingga mengakibatkan data di peta tidak sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan.

15. **Urusan Persandian**

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan persandian adalah sebagai berikut:

- a. Persentase SDM sandiman dibandingkan dengan jumlah OPD yang ditangani relatif minim.

Jumlah sandiman di Pemkot Yogyakarta di tahun 2021 masih berjumlah 5 orang. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan jumlah SDM ataupun meningkatkan kompetensi SDM sandiman.

- b. Perlu adanya peningkatan keamanan informasi, termasuk terkait arsip elektronik dan tanda tangan elektronik, sehingga pelayanan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dapat meningkat.

16. Urusan Kebudayaan

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Jumlah penyelenggaraan pertunjukkan (festival) seni dan budaya pada tahun 2017-2021 fluktuatif. Tahun 2019 menjadi tahun terbanyak diselenggarakannya pertunjukkan seni dan budaya sebanyak 111 hari, sedangkan penyelenggaraan pertunjukkan seni dan budaya di tahun 2020 merupakan yang paling rendah, yaitu 32 hari. Pada tahun 2021 diselenggarakan pertunjukkan seni dan budaya sebanyak 41 hari, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Konsep kegiatan pertunjukkan seni dan budaya di tahun 2021 sudah dirancang dengan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun dengan metode *hybrid* (*luring* dan *daring*).

- b. Menurunnya pelestarian budaya Yogyakarta akibat modernisasi

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota kuno di Indonesia yang memiliki banyak sejarah dan kebudayaan yang kental di masyarakatnya. Pada waktu berdirinya, Kota Yogyakarta berperan sebagai pusat pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlangsung hingga 17 Agustus 1945, kemudian kota Yogyakarta sementara berganti status menjadi Ibukota Republik Indonesia, dan pusat revolusi Indonesia. Yogyakarta pada akhirnya menjadi Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta pun semakin berkembang baik dalam segi kehidupan masyarakatnya maupun segi spasialnya, dan dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa. Namun, seiring dengan perkembangannya, kebudayaan di Kota Yogyakarta cenderung memudar diakibatkan modernisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan kebudayaan asli Yogyakarta.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelestarian budaya yaitu

perkotaan (pusat kehidupan) seperti pada zaman dahulu. Sumbu filosofi sendiri sejatinya merupakan sumbu imajiner yang berkaitan dengan kisah mitologis sebagai simbol fase perjalanan hidup manusia serta nilai-nilai universal etnis dan ras, sosio-ekonomi, sosio-budaya, dan lain sebagainya. Melestarikan Kota Yogyakarta (*City of Philosophy*) sebagai Warisan Dunia bukan berarti menghentikan perkembangan kota dan pembangunan ekonomi. Melainkan perkembangan Kota Yogyakarta ke depannya perlu memperhatikan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan situs-situs dalam sumbu filosofi. Sebagai kota yang telah dirancang dengan nilai-nilai budaya, inti Kota Yogyakarta perlu dijaga agar memiliki nuansa ruang (*sense of place*) yang berbeda dari kota-kota modern lain di berbagai belahan dunia.

17. **Urusan Perpustakaan**

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Minat dan budaya baca sebagian masyarakat masih rendah

Teknologi yang semakin berkembang mengakibatkan masyarakat enggan untuk membaca buku karena mereka dengan mudah mendapatkan informasi melalui internet. Masyarakat masih beranggapan bahwa perpustakaan hanya sekedar tempat meminjam buku dan fenomena yang terjadi sekarang masyarakat datang ke perpustakaan untuk mendapatkan akses wifi gratis.

- b. Belum optimalnya keberlanjutan pelaksanaan inovasi terkait keperpustakaan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat maupun dalam meningkatkan budaya membaca di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah memiliki kurang lebih 40 inovasi terkait perpustakaan dan kearsipan, namun masih segelintir inovasi saja yang dikenal oleh masyarakat luas. Untuk itu, diperlukan strategi-strategi pemasaran yg lebih menarik lagi, agar pemanfaatan inovasi tersebut dapat berkelanjutan.

18. **Urusan Kearsipan**

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran budaya tertib arsip di lingkungan OPD masih kurang

Tingginya volume kerja dan terbatasnya jumlah SDM mengakibatkan hasil kerja tidak tersip dengan tertib, sehingga arsip sulit dicari pada saat dibutuhkan.

- b. Sarana dan prasarana penyimpanan fisik arsip dan pemeliharaan arsip masih kurang

Terbatasnya ruangan di kantor mengakibatkan tidak adanya ruang khusus untuk penyimpanan dan pemeliharaan arsip. Selain itu, prosedur pendukung penyimpanan

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya cakupan bina kelompok pengusaha budidaya perikanan

Kelompok pengusaha budidaya perikanan mengalami kenaikan mencapai 68 kelompok pada tahun 2021. Akan tetapi kelompok yang mendapatkan bantuan pmda hanya 3 kelompok atau sebesar 4,41% saja. Pemerintah perlu meningkatkan cakupan pembinaan kelompok pengusaha budidaya perikanan, sehingga produksi ikan meningkat dan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan budidaya perikanan.

2. Urusan Pariwisata

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendorong perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan terjadi pada tahun 2021, dari 1.384.781 kunjungan di tahun 2020 menjadi 1.276.468 kunjungan di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan sebesar -42,37% per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Terutama karena adanya penerapan PPKM Darurat level IV (Juli-September 2021) dan juga pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMD maupun swasta memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan strategi sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan yang sesuai dengan tantangan saat ini.

- b. Berkurangnya lama tinggal wisatawan

Lama tinggal wisatawan akan mempengaruhi produktifitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan. Lama tinggal wisatawan dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -9,28% per tahun. Pada tahun 2021, lama tinggal wisatawan menurun dari 1,63 hari di tahun 2021 menjadi 1,52 hari. Adapun faktor yang menyebabkan turunnya lama tinggal wisatawan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tutupnya lokasi objek wisata, serta kegiatan atraksi dan event pariwisata

c. PAD sektor pariwisata menurun

PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta. PAD sektor pariwisata menurun yaitu dari Rp 130.558.481.135 di tahun 2020 menjadi Rp 121.632.046.250 di tahun 2021. Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata ini adalah dampak dari penerapan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, dimana kebijakan PSBB, maupun PPKM Darurat Level 4 dilaksanakan. Selain itu penerapan jam operasional di lokasi objek pariwisata yang cenderung singkat jika dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19, sehingga waktu wisatawan untuk menikmati objek pariwisata menjadi lebih singkat.

d. Belum optimalnya sinkronisasi antara agenda budaya dengan agenda wisata

Pagelaran budaya pada dasarnya dapat menarik perhatian para wisatawan untuk dapat meningkatkan *length of stay* atau lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta. Namun, agenda pagelaran budaya yang dimiliki di Kota Yogyakarta masih belum sinkron dengan agenda wisata, khususnya agenda wisata ketika hari-hari libur nasional atau pada saat puncak liburan. Hal ini terlihat dari rendahnya kunjungan wisatawan nusantara maupun asing dalam kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh stakeholder kebudayaan mulai dari tingkat kemantren hingga tingkat Provinsi.

e. Belum optimalnya pengelolaan kampung wisata

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata, pengembangan kampung wisata dinilai strategis dan *multiplier effect* dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Kampung wisata salah satu dari kegiatan kepariwisataan yang berbasis pengembangan potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial masyarakat, seni budaya dan tradisi maupun kerajinan dan kulinernya. Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 17 kampung wisata. Keberadaan kampung wisata ini diharapkan dapat menjadi sektor non-formal yang dapat mengakomodir kebutuhan akan lapangan kerja. Akan tetapi, SDM pengelola kampung wisata masih perlu ditingkatkan kemampuan teknologi dan pengembangan paket wisata di kampung tersebut, sehingga bisa menarik lebih banyak wisatawan.

3. Urusan Pertanian

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

a. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih tinggi

Peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung masyarakat mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian makin tinggi. Selain itu juga belum ada upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

b. Kepemilikan lahan yang sempit mengakibatkan usaha pertanian menjadi tidak efisien

sehingga keproduktifan petani menjadi rendah

- c. Masih rendahnya cakupan bina kelompok petani

Jumlah kelompok petani mengalami kenaikan mencapai 266 kelompok pada tahun 2021. Akan tetapi kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda hanya 29 kelompok atau sebesar 10,90% saja. Pemerintah perlu meningkatkan cakupan pembinaan kelompok petani, sehingga produksi pertanian meningkat dan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menjadi petani perkotaan.

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:

- a. Masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik sampai dengan tahun 2021 sebesar 99,99% dengan penjabaran masih ada 14 rumah tangga yang belum menikmati listrik, meskipun jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020.

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ekspor produk lebih rendah dari nilai impor

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Pada kurun waktu 2016-2020, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Pada tahun 2020, nilai ekspor menurun dari 21.668.399,00 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 20.913.785,80 juta rupiah.

- b. Bantuan binaan pemda untuk kelompok pedagang informal masih sedikit

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini. Pada di tahun 2021, jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 40 unit di tahun 2020 menjadi 90 unit di tahun 2021. Kenaikkan tersebut dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini terfokus pada pemulihan ekonomi sehingga didorong untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk dalam negeri dengan memberikan fasilitasi UMK untuk mengikuti penyelenggaraan Pameran Mandiri DIY maupun Pameran Nasional melalui media online sebanyak 3 kali di tahun 2021.

- c. UMKM belum optimal dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran online/*e-commerce*

Penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran online/*e-commerce* belum optimal karena belum semua UMKM paham cara-cara pemasaran online/*e-commerce* yang bisa menarik minat pembeli. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perdagangan telah melakukan pelatihan pemasaran online/*e-commerce* namun belum semua UMKM memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut karena keterbatasan kuota peserta pelatihan.

6. Urusan Perindustrian

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak IKM mempunyai produk dan jasa terstandarisasi

Pada tahun 2021 persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi hanya sebesar 6,22%. Dari total 4.375 IKM Kota Yogyakarta baru 272 IKM yang telah memiliki standarisasi produk barang dan jasa. Kendala yang dihadapi tidak semua peserta pelatihan bersedia mengikuti standar yang ditentukan.

- b. Masih banyak IKM yang belum memiliki ijin industry

Pada tahun 2021 persentase IKM yang memiliki ijin industri hanya sebesar 3,41%. Dari total 4.375 IKM Kota Yogyakarta baru 149 IKM yang telah memiliki ijin industri. Belum semua IKM memahami manfaat kepemilikan izin usaha industri.

7. Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya minat masyarakat melakukan transmigrasi swakarsa

Minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa rendah karena kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa.

- b. Keterbatasan kuota calon transmigran

Pada tahun 2021 jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi sebanyak 5 KK dengan 16 orang anggota keluarga. Pengiriman transmigrasi bergantung pada pemberian kuota transmigrasi dari Pemerintah Pusat.

2.3.2.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan

Daerah mengingat dinamika permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat yang menyebabkan dinamika kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan lebih responsif;

- b. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 mencapai 75,81 (BB) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Upaya perbaikan perlu dilakukan agar capaian Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dengan memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas pokok dan fungsinya serta target indikator kinerjanya;
- c. Belum optimalnya capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil SAKIP Kota Yogyakarta tahun 2021 memperoleh nilai 81,63 atau predikat A. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil sudah menunjukkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, capaian nilai SAKIP ini perlu ditingkatkan lagi agar dapat meraih predikat AA. Selain itu masih ada OPD yang belum mencapai target nilai SAKIP A pada tahun 2021;
- d. Belum optimalnya nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Pada tahun 2021 nilai EKPPD Kota Yogyakarta 3,4581 dari skala 3 – 4. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator kinerja kunci perlu ditingkatkan lagi;
- e. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi dari pusat yang sangat dinamis terkait penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Belum optimalnya hasil kajian sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan perumusan rancangan kebijakan yang tepat;
- g. Perlunya penyesuaian jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Kemantren dengan perkembangan tuntutan layanan masyarakat; dan
- h. Belum optimalnya ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2021 persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan mencapai 99,30%. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan koordinasi lebih banyak dilakukan secara daring, selain itu penyerapan anggarannya dan pelaksanaan pengendalian secara fisik dengan tinjauan langsung berkurang frekuensinya.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Semakin tingginya dinamika politik dan dinamika kebijakan Pemerintah Pusat yang berimbas ke daerah mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD menjadi salah satu tantangan bagi Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD yang berperan penting dalam penyelesaian produk hukum daerah, pengawasan serta pengawasan ini

- b. Dalam pembahasan dan penetapan produk hukum daerah, seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing partai politik.

3. Inspektorat

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran dari paradigma *watchdog* ke paradigma *consulting* dan *quality assurance*;
- b. Belum optimalnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang salah satunya disebabkan belum adanya kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah;
- c. Belum optimalnya nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- d. Adanya tuntutan terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta untuk terus mempertahankan opini WTP, peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP.

4. Perencanaan

Permasalahan yang kerap ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi melalui SIPD Kementerian Dalam Negeri masih terdapat berbagai permasalahan dan kendala dalam melakukan entry kegiatan, standar belanja dan perubahan nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; dan
- b. Analisa usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah belum optimal sehingga terkadang menimbulkan ketidakselarasan terhadap pencapaian sasaran dan tujuan daerah.

5. Keuangan

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sistem aplikasi informasi pengelolaan keuangan;
- b. Perlu upaya lebih besar lagi dalam implementasi Transaksi Non Tunai baik di Pemerintah Kota agar kebijakan ini tidak menjadi kendala dalam penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan aset daerah belum optimal; dan
- e. Pengalokasian belanja daerah yang masih belum optimal serta kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Dalam rangka pengembangan kapasitas SDM Aparatur khususnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga diklat lain ataupun akademisi/ perguruan tinggi yang terkadang masih menjadi kendala, sehingga masih banyak pegawai yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
- b. Pemerintah Kota telah memperoleh predikat baik dalam penilaian sistem merit yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2020 dengan nilai 287. Hal ini menjadi tantangan kedepannya untuk lebih meningkatkan nilai di dalam 8 aspek sistem merit agar penataan sistem merit semakin sempurna dan dapat menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya;
- c. Kuantitas dan kualifikasi pegawai terkadang belum sesuai dengan standar kualifikasi jabatan serta analisis beban kerja; dan
- d. Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat.

7. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang masih terjadi di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (*evidence base policy*); dan
- b. Pengawasan inovasi belum berjalan optimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawasan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal.

2.3.3. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Berikut ini disajikan permasalahan Kota Yogyakarta berdasarkan sasaran dan program yang diampu oleh Perangkat Daerah.

1. Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

Dari 21 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 1, terdapat 20 indikator sasaran OPD (95,24 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 61 indikator program OPD, terdapat 58 indikator program OPD (95,08 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat, dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen, belum tercapai karena

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

- a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikator program Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, alasan tidak tercapai karena: (1) Penyaluran Bansos tidak dapat terdistribusi keseluruhan karena sebagian KPM sasaran telah mendapatkan Bansos APBN (mengingat adanya kebijakan tidak boleh double intervensi); (2) Data Bansos APBN (sebagai data penyandingan bansos APBD) dinamis/berubah-ubah dan perolehan data bansos terupdate mekanismenya panjang, sehingga pencairan bansos tidak sesuai plotting waktu dan keuangan; dan (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos RI parameternya belum jelas dan kurang terinci;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kemantren Gondokusuman), dengan indikator program Angka Swadaya Murni, alasan tidak tercapai karena: (1) Adanya pandemi covid19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melambat; dan (2) Dana berbagi dan rapat-rapat berkurang sehingga realisasi angka swadaya murni tidak tercapai; dan
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kemantren Tegalrejo), dengan indikator program Angka Swadaya Murni, alasan tidak tercapai karena: (1) Adanya pandemi covid19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melambat; dan (2) Dana berbagi dan rapat-rapat berkurang sehingga realisasi angka swadaya murni tidak tercapai.
2. Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta

Dari 9 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 2, terdapat 6 indikator sasaran OPD (66,67 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 34 indikator program OPD, terdapat 30 indikator program OPD (88,24 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Angka Pengangguran Menurun, dengan indikator sasaran Persentase Jumlah Penganggur, alasan tidak tercapai karena: (1) Turunnya perekonomian menyebabkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia mengingat sebagian penyedia kerja/pengusaha menutup operasi usahanya; (2) Ketersediaan lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat belum sesuai baik dari aspek kebutuhan, kepeminatan masyarakat maupun dari aspek lokasi pekerjaan. Akibatnya sebagian lowongan pekerjaan yang ada kurang direspon secara optimal oleh masyarakat; (3) Jenis pelatihan tertentu kurang mendapatkan animo masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang beragamnya jenis

terkait quota peserta masing-masing daerah dan waktu keberangkatan calon transmigran. Di tahun 2021 calon transmigran yang mendaftarkan di Kota Yogyakarta mencapai 10 KK, namun sesuai kebijakan Pusat maka hanya 5 KK yang diberangkatkan di akhir tahun 2021;

- b. Sasaran Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat, dengan indikator sasaran Nilai Omset Koperasi Tahun n, alasan tidak tercapai karena 9 koperasi yang bergeser pembinaanya ke provinsi dan nasional, penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dari 183 menjadi 167 koperasi; dan
- c. Sasaran Nilai Investasi Meningkat, dengan indikator sasaran Nilai Investasi, alasan tidak tercapai karena: (1) Pandemi covid-19 menyebabkan investasi menurun dan tutup (restoran); (2) Sebagian pelaku usaha belum melakukan migrasi data di OSS RBA sehingga KBLI kegiatan usaha tidak muncul pada LKPM; (3) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait kewajiban penyampaian LKPM.

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

- a. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator program Persentase Penempatan Tenaga Kerja, alasan tidak tercapai karena masih adanya pencari kerja yang pilih-pilih formasi dan lokasi pekerjaan;
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan indikator program Persentase Peningkatan Kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK), alasan tidak tercapai karena pencari kerja masih pilih-pilih jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan;
- c. Program Hubungan Industrial, dengan indikator program Persentase Perusahaan Yang Sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial, alasan tidak tercapai karena: (1) Perusahaan banyak yang tidak beroperasi selama pandemi sehingga mereka tidak bisa menghandle PP/PKB/PKWT yang telah selesai waktunya; (2) Pengawas tidak bisa melakukan pengawasan/pemantauan selama pandemi; dan (3) Manajemen perusahaan yang sering berganti; dan
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator program Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi, alasan tidak tercapai karena UJP belum memiliki kelengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan tersertifikasi Usaha Jasa Pariwisata.

3. Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

Dari 17 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 3, terdapat 16 indikator sasaran OPD (94,12 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 28 indikator program OPD, seluruh indikator program (100 persen) telah mencapai target

- a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen Meningkat, dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gedongtengen, alasan tidak tercapai karena belum maksimalnya manajemen potensi sumberdaya wilayah (antara wilayah dan lembaga masyarakat).
4. Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

Dari 16 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 4, terdapat 11 indikator sasaran OPD (68,75 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 61 indikator program OPD, terdapat 56 indikator program OPD (91,80 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Aksebilitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator sasaran pertama Angka Partisipasi Kasar SD, alasan tidak tercapai karena pengambilan data dilaksanakan setelah adanya sinkronisasi data dari dapodik, sehingga sangat tergantung dari masing masing operator dapodik terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan.

Indikator sasaran kedua, Angka Partisipasi Kasar SMP, alasan tidak tercapai karena pengambilan data dilaksanakan setelah adanya sinkronisasi data dari dapodik, sehingga sangat tergantung dari masing masing operator dapodik terhadap ketersediaan data yang dibutuhkan.

Dan indikator sasaran ketiga, Angka Partisipasi Murni SD, alasan tidak tercapai karena untuk mendapatkan data, menunggu sinkronisasi data dari dapodik.

- b. Sasaran Derajat Kesehatan Meningkat, dengan indikator sasaran pertama Angka Kematian Bayi, alasan tidak tercapai karena jumlah TIM PONED / PONEK masih kurang, keterampilan SDM dalam penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal perlu ditingkatkan, Pandemi Covid 19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program, Jejaring rujukan maternal neonatal yang belum optimal. Selain itu untuk menurunkan kematian bayi perlu intervensi lebih awal yaitu sejak kesehatan remaja, calon pengantin.

Dan indikator sasaran kedua, Prevalensi Stunting, alasan tidak tercapai karena: (1) Integrasi penanganan balita stunting secara lintas sektoral perlu ditingkatkan frekuensi koordinasinya; (2) Belum semua posyandu didampingi petugas darbin; dan (3) Penggunaan alat antropometri yang belum sesuai standar dan teknis pengukuran yang kurang tepat meningkatkan resiko hasil yang kurang akurat.

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

Akreditasi bagi lembaga PNF mulai tahun 2021 hanya diperuntukkan bagi lembaga yang belum pernah diakreditasi oleh lembaga manapun. Adapun Satuan PAUD yang belum diakreditasi ada yang terkendala persyaratan jumlah peserta, yaitu minimal 10 orang; (2) Status akreditasi belum menjadi nilai plus bagi Satuan Pendidikan, misalnya menjadi salah satu syarat untuk mengakses bantuan pemerintah; (3) Penilik PAUD hanya 2 orang, sehingga masing-masing harus membina sekitar 250 lembaga PAUD; dan (4) Keterbatasan kompetensi pengelola PAUD dalam bidang IT (khususnya SPS dan TPA), padahal proses akreditasi PNF menggunakan aplikasi yg menuntut penguasaan IT;

- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan indikator program CPR (Contraceptive Prevalence Rate), alasan tidak tercapai karena calon akseptor menunda akses layanan KB di Puskesmas karena masih takut dengan situasi pandemic. Demikian pula terjadinya PPKM Darurat selama bulan Juli dan Agustus, faskes banyak yang menunda pelayanan KB karena takut tertular, meskipun sudah dilindungi dengan APD terstandar. Pada bulan Juni layanan di rumah sakit yang melayani MOW sudah mulai mengalami kelangkaan oksigen, sehingga calon akseptor yang sudah mendaftar terpaksa tidak dapat dilayani; dan
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, dengan indikator program pertama Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton.

Dan indikator program kedua, Jumlah Pengunjung Taman Budaya, alasan tidak tercapai karena: sempat mengalami penutupan layanan (tutup total) selama kurang lebih 3,5 bulan dikarenakan pemberlakuan kebijakan PPKM Level 4 yang tentunya berpengaruh pada jumlah kunjungan.

5. Misi 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

Dari 5 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 5, terdapat 4 indikator sasaran OPD (80,00 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 16 indikator program OPD, terdapat 13 indikator program OPD (81,25 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Air, alasan tidak tercapai karena adanya kebijakan refocusing anggaran Pandemi covid 19 menghambat program pengembangan layanan pengujian parameter air terakreditasi bahkan program perawatan peralatan uji juga terganggu sehingga bisa berdampak pada potensi dibekukannya layanan pengujian parameter air terakreditasi

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator program Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), alasan tidak tercapai karena banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru serta banyaknya pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya mengalami hambatan karena pandemi covid 19;
- b. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, dengan indikator program Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan, alasan tidak tercapai karena masih terkendala pandemi covid 19 yang menyebabkan tidak ada kegiatan tatap muka (pelatihan, Bimtek, pembinaan); dan
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan indikator program Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik, alasan tidak tercapai karena pada tahun ini tidak ada pembangunan RTHP dikarenakan anggaran masih refocusing untuk penanganan Covid 19. Namun ada penyempurnaan RTHP di 2 lokasi dan penambahan taman yang meningkatkan luasan RTHP secara umum.

6. Misi 6: Membangun Sarana dan Prasarana Publik dan Permukiman

Dari 7 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 6, terdapat 6 indikator sasaran OPD (85,71 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 28 indikator program OPD, terdapat 25 indikator program OPD (89,29 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat, dengan indikator sasaran Persentase Pengurangan Sampah, alasan tidak tercapai karena: (1) Pengajuan anggaran untuk pembangunan pengembangan TPST Karangmiri belum disetujui karena rasionalisasi masa pandemi, sehingga kinerja di lokasi tersebut masih belum bisa dimaksimalkan; (2) Lahan terbuka yang ada di dalam kompleks TPS3R Nitikan perlu dimaksimalkan fungsinya untuk menambah sarana instalasi pengolahan sampah dengan bentuk lain (misalnya menambah alat pengolah sampah berupa insinerator maupun teknologi pemilah sampah lainnya), tujuannya agar jumlah sampah yang diolah bisa lebih optimal dan mampu mengurangi jumlah residu sampah yg akan dibuang ke TPA Piyungan; dan (3) Kurangnya ketertiban dan kedisiplinan beberapa tenaga pengolah sampah dalam bekerja, sehingga kurang efektif dalam manajemen waktu.

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dengan adanya pandemi covid 19; dan

- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan indikator program pertama Jumlah Pelanggaran, alasan tidak tercapai karena kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan bidang perhubungan.

Dan indikator program kedua, Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan, alasan tidak tercapai karena adanya becak bermotor yang masih beroperasi di jalan, sementara becak bermotor tidak memenuhi standar keselamatan sebagai angkutan umum.

7. Misi 7: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Dari 14 indikator sasaran OPD yang ada di Misi 7, terdapat 12 indikator sasaran OPD (85,71 persen) yang dapat mencapai target. Sedangkan untuk program OPD, dari 55 indikator program OPD, terdapat 51 indikator program OPD (92,73 persen) yang telah mencapai target.

Berikut penjelasan indikator sasaran OPD yang tidak tercapai:

- a. Sasaran Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat, dengan indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik, alasan tidak tercapai karena: (1) Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada perubahan mekanisme pemberian pelayanan yang semula secara langsung menjadi daring yang belum tentu cocok untuk diterapkan; dan (2) Sebagian masyarakat belum siap dalam menerima perubahan pelayanan; dan
- b. Sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat, dengan indikator sasaran Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern, alasan tidak tercapai karena: (1) Belum ada kebijakan pengelolaan resiko dan mengintegrasikan proses pengelolaan resiko dengan proses perencanaan pemerintah daerah; (2) Masih rendahnya kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan resiko; (3) Belum ada implementasi pengelolaan resiko melalui identifikasi dan analisa resiko, penyusunan rencana tidak pengendalian (RTP), implementasi RTP, pengomunikasian resiko dan RTP, serta pemantauan dan evaluasi kejadian resiko dan implementasi RTP; (4) Tahun 2021 proses penaliannya berbeda dengan tahun 2020 dengan system New SPIP; (5) Seluruh OPD beradaptasi dan menyesuaikan dengan situasi yang baru; dan (6) Proses baseline penilaian ada 3 pokok unsur penilaian yang sebelumnya hanya ada 1 unsur penilaian.

Sedangkan penjelasan indikator program OPD yang tidak tercapai, yaitu:

- a. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan indikator program Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Ketepatan Waktu

Presiden nomor 12 tahun 2021 yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator program pertama Persentase Penyerapan Belanja Daerah, alasan tidak tercapai karena: (1) Faktor kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran; (2) Perencanaan anggaran yang kurang baik; (3) Terjadinya gagal lelang; dan (4) Tidak adanya kesepakatan harga terkait pengadaan tanah bagi pemerintah kota.

Dan indikator program kedua, Persentase OPD Dengan Laporan Keuangan Kategori Baik, alasan tidak tercapai karena SIM barang/SIM pendapatan belum terintegrasi; dan

- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan indikator program Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik, alasan tidak tercapai karena pengelolaan barang belum dilakukan secara optimal.

2.4. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Berikut ini adalah isu strategis di tahun 2023 yang dirumuskan dari hasil evaluasi RKPd dan permasalahan pembangunan dalam RPJMD:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
4. Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
7. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
9. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
10. Peningkatan Kualitas Pariwisata; dan
11. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

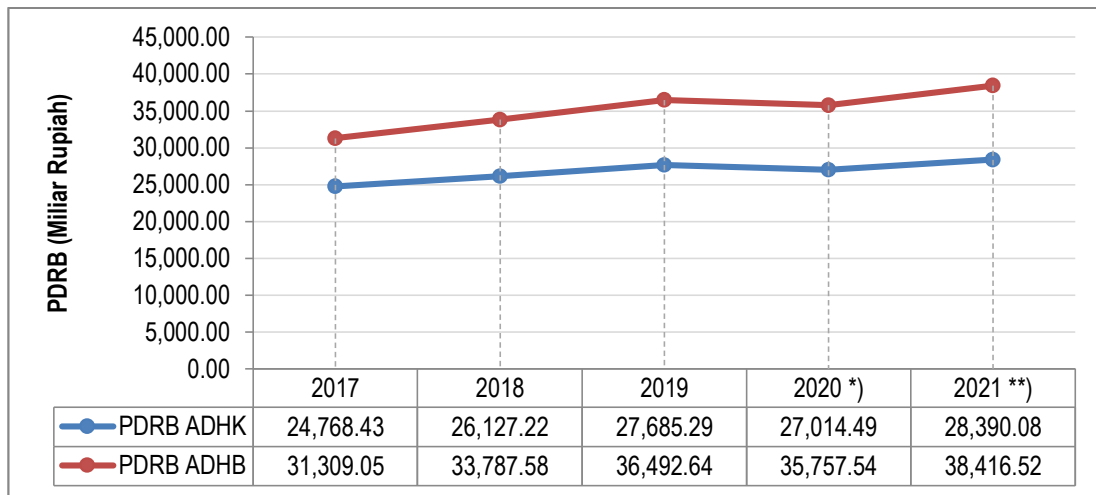
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 24,77 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,49 persen menjadi sebesar 26,13 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,69 triliun rupiah pada tahun 2019, tetapi kemudian berbalik menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,01 triliun rupiah pada tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 5,09 persen menjadi 28,39 triliun rupiah pada tahun 2021.



Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47,86	50,61	53,23	55,18	57,44
B	Pertambangan dan Penggalian	1,12	1,14	1,17	1,13	1,11
C	Industri Pengolahan	4.217,23	4.484,69	4.800,42	4.675,56	4.828,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	70,34	75,28	81,77	80,08	82,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	45,99	48,34	52,22	52,78	56,70
F	Konstruksi	2.422,78	2.678,95	2.866,83	2.415,13	2.677,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.345,12	2.549,69	2.734,02	2.627,90	2.753,36
H	Transportasi dan Pergudangan	1.238,62	1.324,63	1.472,45	1.308,66	1.422,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.241,59	4.576,58	5.031,19	3.905,54	4.238,70
J	Informasi dan Komunikasi	3.270,52	3.520,38	3.747,16	4.476,83	5.155,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.083,55	2.269,74	2.495,53	2.490,37	2.611,87
L	Real Estate	2.850,16	3.072,64	3.341,98	3.482,22	3.595,34
M,N	Jasa Perusahaan	338,22	365,44	397,24	334,81	371,21
O	Administrasi Pemerintahan	2.261,12	2.486,76	2.674,87	2.714,44	2.902,20

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.181,95	1.273,07	1.382,48	1.725,02	1.861,50
S,T,U	Jasa Lainnya	842,67	919,14	994,43	822,05	992,34
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		31.309,05	33.787,58	36.492,64	35.757,54	38.416,52

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Industri Pengolahan; (c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

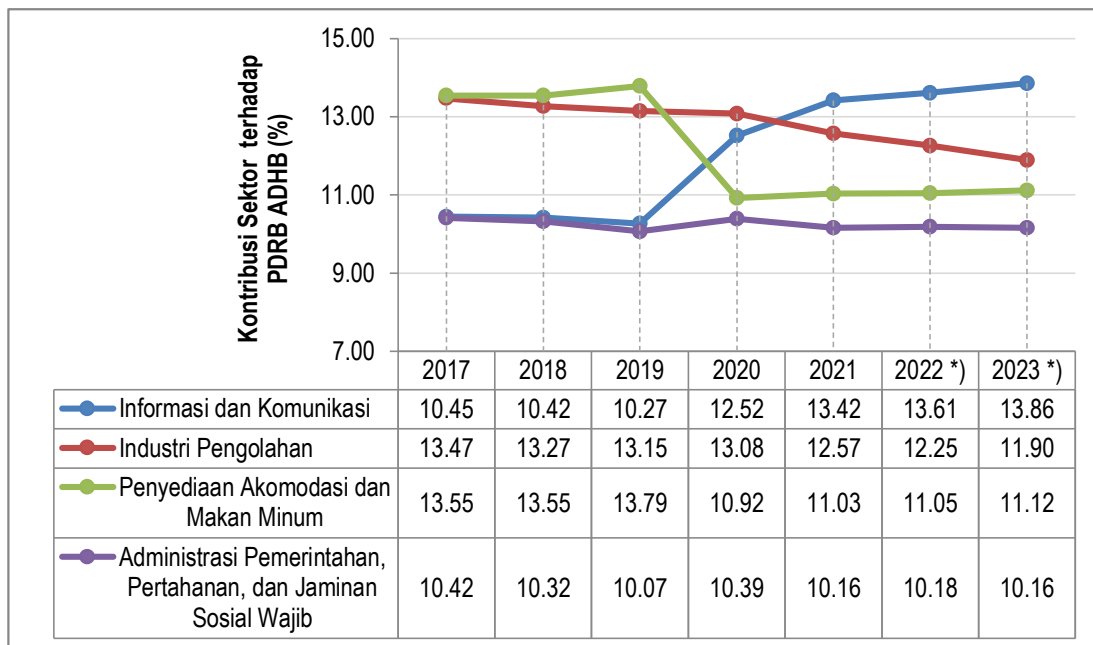
Pada tahun 2021, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,16 triliun rupiah atau sebesar 13,42 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,46 triliun rupiah (13,61 persen) pada tahun 2022 dan 5,89 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,53 triliun rupiah (13,73 persen) pada tahun 2022 dan 6,05 triliun rupiah (14,12 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,61 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2022 dan 6,23 triliun rupiah (14,38 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,83 triliun rupiah atau sebesar 12,57 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,25 persen) pada tahun 2022 dan 5,05 triliun rupiah (11,90 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,20 persen) pada tahun 2022 dan 5,06 triliun rupiah (11,80 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,14 persen) pada tahun 2022 dan 5,06 triliun rupiah (11,68 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke tiga, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 4,24 triliun rupiah atau sebesar 11,03 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,43 triliun rupiah (11,05 persen) pada tahun 2022 dan 4,72 triliun rupiah (11,12 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,44 triliun rupiah (11,03 persen) pada tahun 2022 dan 4,75 triliun rupiah (11,07 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,46 triliun rupiah (11,00 persen) pada tahun 2022 dan 4,78 triliun rupiah (11,01 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan di posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,90 triliun rupiah atau sebesar 10,16 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah (10,18

diproyeksikan mencapai 4,10 triliun rupiah (10,11 persen) pada tahun 2022 dan 4,34 triliun rupiah (10,02 persen) pada tahun 2023.



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

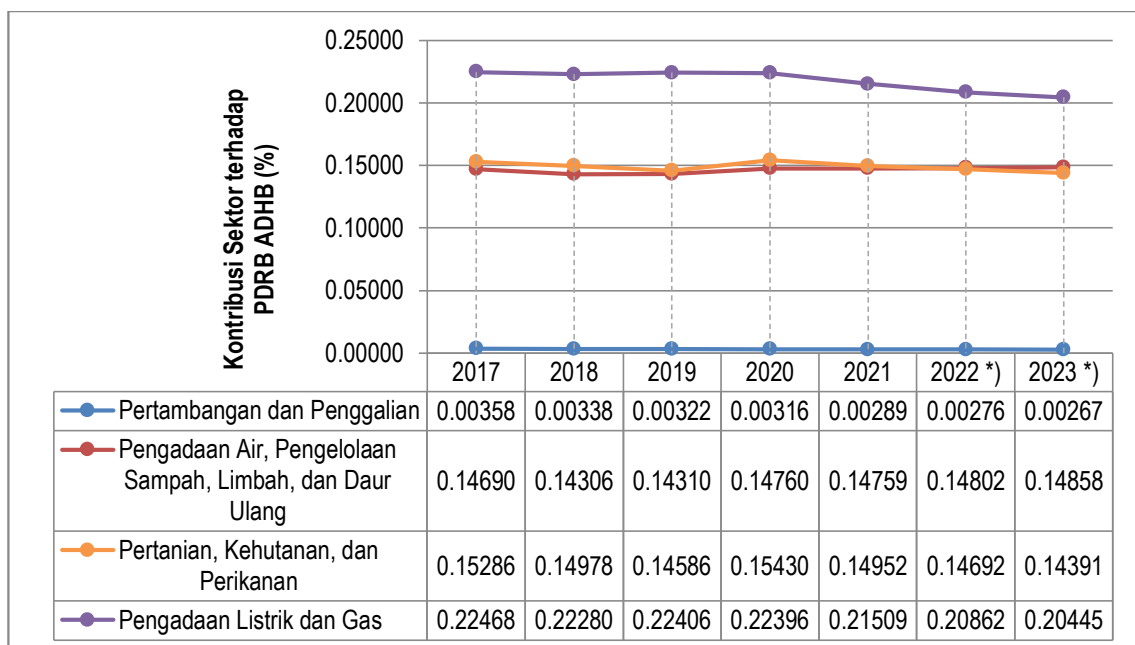
Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2017-2021, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2021, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,11 miliar rupiah atau sebesar 0,00289 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00276 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00267 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00275 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00265 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00274 persen) pada tahun 2022 dan 1,13 miliar rupiah (0,00262 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 56,70 miliar rupiah atau sebesar 0,14759 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,38 miliar rupiah (0,14802 persen) pada tahun 2022 dan 63,12 miliar rupiah (0,14858 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,53 miliar rupiah (0,14777 persen) pada tahun 2022

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 57,44 miliar rupiah atau sebesar 0,14952 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,93 miliar rupiah (0,14692 persen) pada tahun 2022 dan 61,13 miliar rupiah (0,14391 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,96 miliar rupiah (0,14637 persen) pada tahun 2022 dan 61,19 miliar rupiah (0,14278 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,99 miliar rupiah (0,14565 persen) pada tahun 2022 dan 61,26 miliar rupiah (0,14137 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 82,63 miliar rupiah atau sebesar 0,21509 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,69 miliar rupiah (0,20862 persen) pada tahun 2022 dan 86,85 miliar rupiah (0,20445 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,80 miliar rupiah (0,20802 persen) pada tahun 2022 dan 87,10 miliar rupiah (0,20321 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,93 miliar rupiah (0,20722 persen) pada tahun 2022 dan 87,36 miliar rupiah (0,20161 persen) pada tahun 2023.



Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

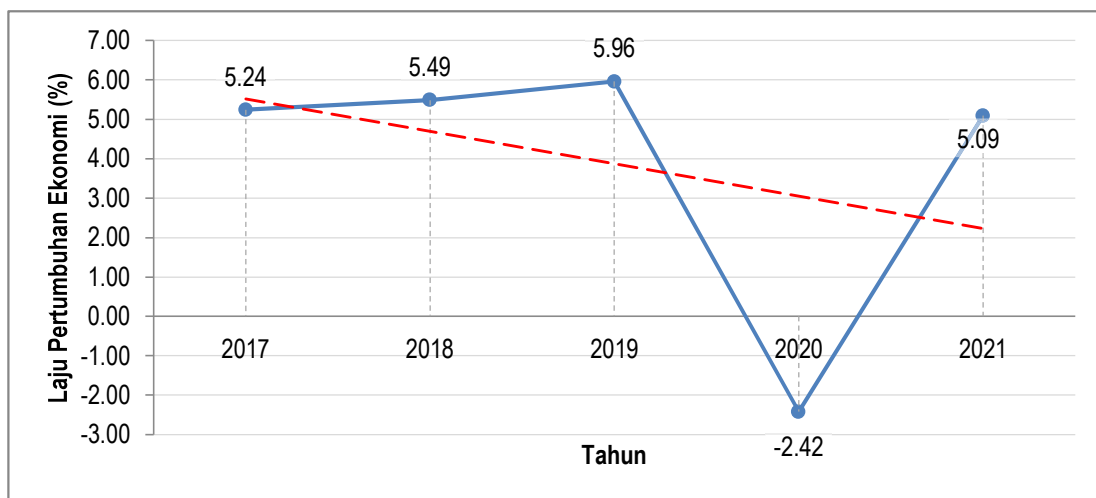
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun

terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,24 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, LPE menurun drastis hingga -2,42 persen dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi pasca pandemi di Kota Yogyakarta membuahkan hasil dengan meningkatnya LPE secara drastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,09 persen.

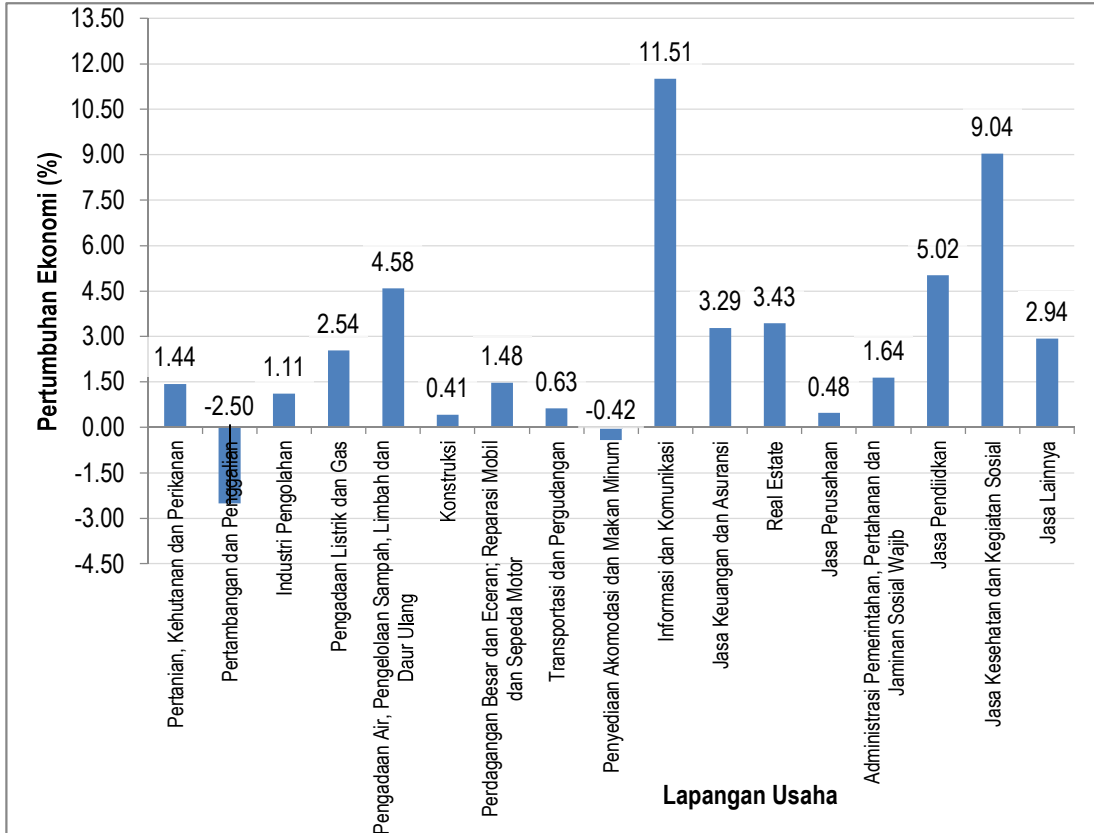


Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Selama tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan hampir seluruh sektor memiliki pertumbuhan negatif, hanya ada enam sektor yang memiliki pertumbuhan positif, yaitu sektor: (a) Informasi dan Komunikasi sebesar 19,65 persen; (b) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,90 persen; (c) Jasa Pendidikan sebesar 4,13 persen; (d) Real Estate sebesar 1,88 persen; (e) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,49 persen; dan (f) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40 persen. Hal ini berarti keenam sektor tersebut tidak terpengaruh secara signifikan adanya pandemi, terutama pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Pendidikan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun 2020 yang cukup tinggi sebesar di atas 5 persen. Upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan hampir semua sektor bernilai positif. Hanya terdapat satu sektor dengan pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor Pertambangan dan Pengalihan dengan pertumbuhan -4,75 persen. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021, terdapat dua sektor dengan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor: (a) Pertambangan dan Pengalihan dengan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor: (a) Pertambangan dan Pengalihan dengan rata-rata pertumbuhan -2,50 persen per tahun; dan (b)

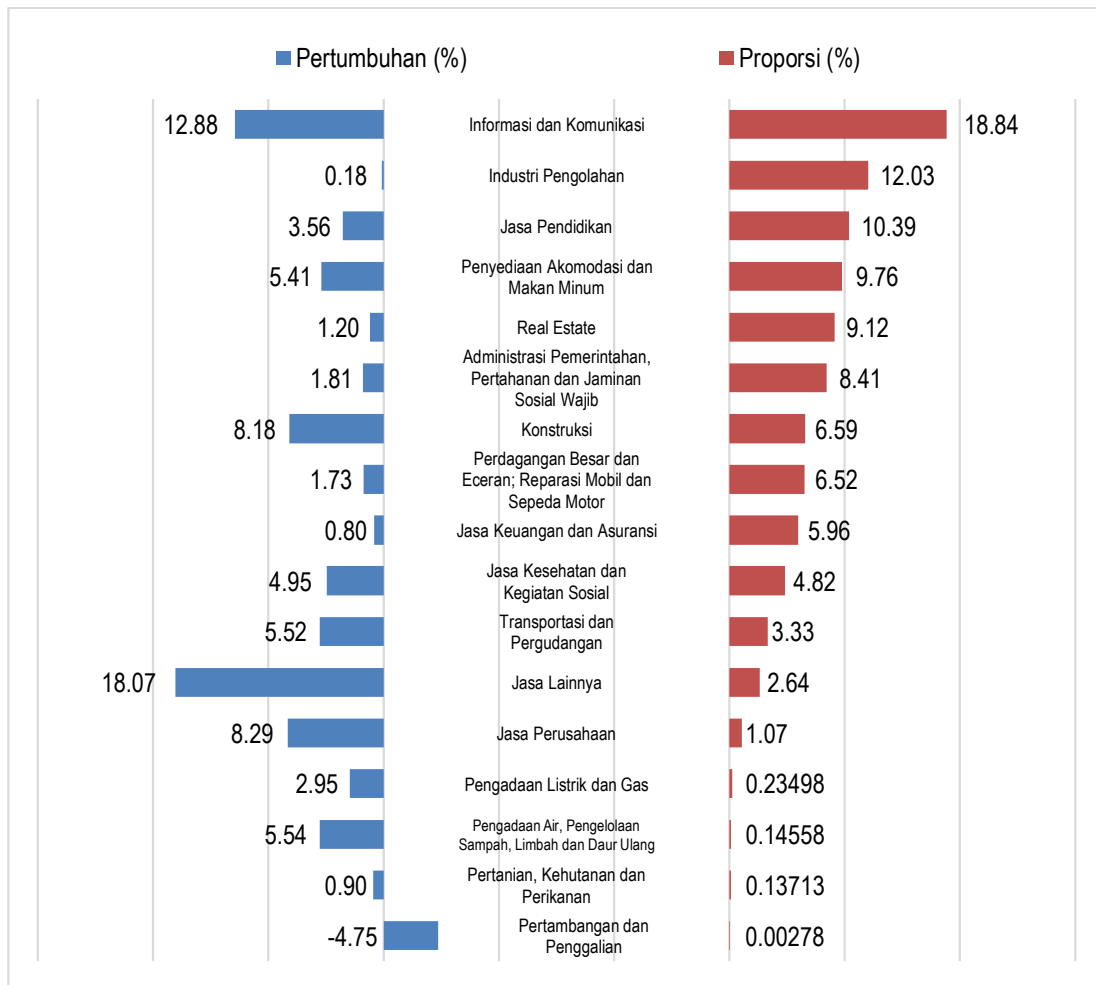
Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar berikut.



Gambar 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

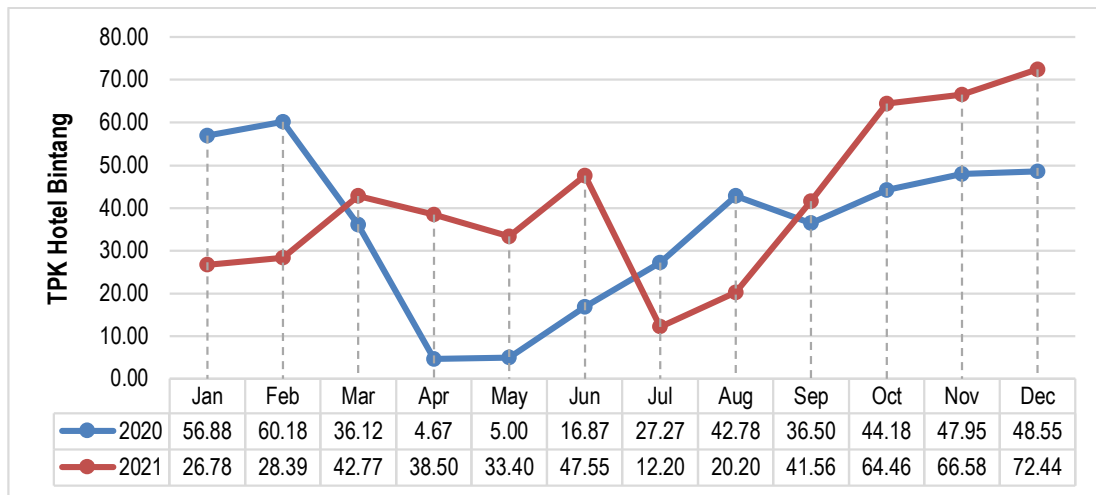
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, DIY maupun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.



Gambar 3.6 Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2021 (ADHK 2010)

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menjadi sektor utama pariwisata, yaitu terkoreksi pada angka -22,56 persen. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,09 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun sebelumnya terpuruk tumbuh sebesar 5,41 persen.



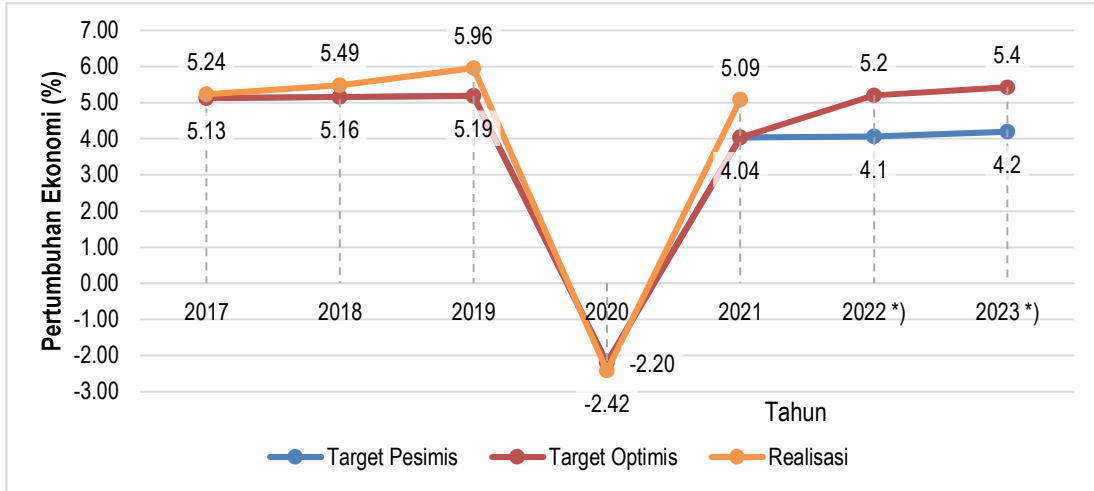
Gambar 3.7 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dinamika pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2020 dan 2021 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2019, TPK Hotel Bintang tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dimulai pada Bulan Maret 2020, yaitu ketika pertama kali diumumkan secara nasional pandemi Covid-19. Pergerakan penurunan terjadi sampai dengan Bulan Juni 2020. Dimulai di Bulan Juli 2020 terjadi peningkatan TPK Hotel Bintang sampai dengan Bulan Desember 2020. Pertumbuhan TPK Hotel kembali mengalami penurunan pada awal tahun 2021 di Bulan Januari dan Bulan Februari dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk diimplementasikan oleh semua daerah sebagai upaya pengendalian penambahan kasus Covid-19. Pada Bulan Maret sampai dengan Juni 2021, TPK Hotel menunjukkan peningkatan seiring dengan penurunan kasus Covid-19. Penambahan kasus Covid-19 secara signifikan sebagai dampak adanya varian baru pada Bulan Juli dan Agustus 2021 membawa penurunan tingkat kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata pada bulan tersebut ditandai dengan penurunan TPK Hotel secara signifikan pada angka 12,20 persen pada Bulan Juli 2021 dan 20,20 persen pada Bulan Agustus 2021. Dimulai di bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 TPK Hotel di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kebangkitan pariwisata di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2022 diprediksi akan sangat bergantung dengan perkembangan kasus Covid-19 dan kebijakan penanganannya oleh pemerintah pusat. Program pemerintah yang menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah program vaksinasi Covid-19 yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam semua sektor dan aktifitas. Keseriusan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi dilakukan dengan mencanangkan program vaksinasi gratis sampai dengan dosis III sehingga kekebalan kelompok yang diharapkan akan

merupakan kunci peningkatan sektor pariwisata yang akan berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor lainnya.



Gambar 3.8 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2022, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata diprediksi akan tumbuh pada rentang 5,15-5,70 persen. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan konsistensi penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*) serta dukungan dari pemerintah pusat pada pengembangan wisata melalui Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (P3TB BYP). Disisi lain, orientasi pariwisata Kota Yogyakarta dikonsepsikan untuk *shifting* dari *mass tourism* menjadi *quality tourism* yang lebih menekankan pada tiga hal dasar, yaitu peningkatan belanja wisatawan, konsumsi atau belanja wisatawan terhadap produk lokal Kota Yogyakarta, serta pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Penekanan pada tiga aspek tersebut akan mengubah konsep berwisata yang hanya memberikan dampak kepada kelompok tertentu menjadi konsep pariwisata yang memberikan *multiplier effect* yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dan dapat memberikan dampak jangka panjang. Perubahan konsep wisata tersebut akan mendasari prediksi pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada periode 2023 untuk tumbuh di atas 5 persen. Perubahan konsep pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung pariwisata lainnya, seperti sektor Industri Pengolahan yang terkait dengan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

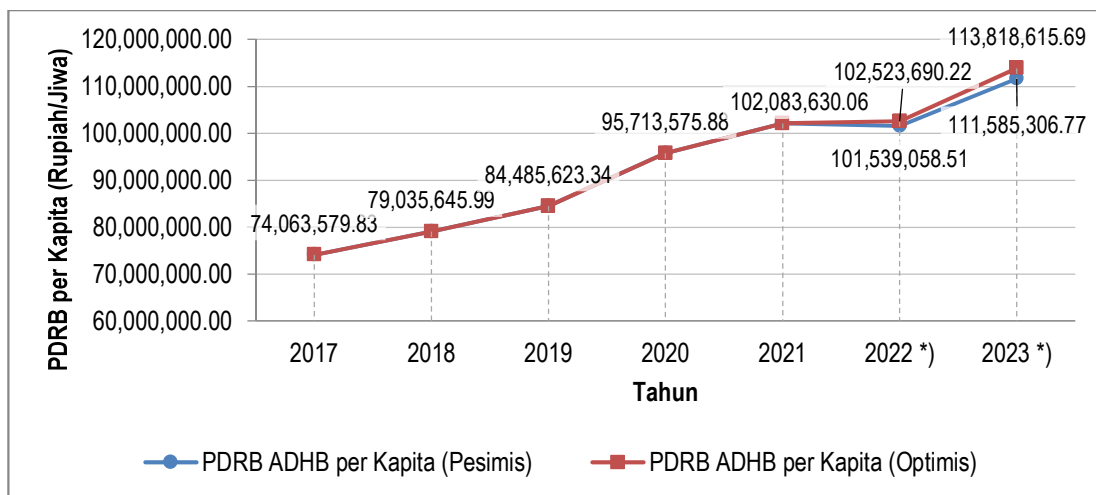
Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan yang didukung dengan adanya program PEN yang terkait dengan pengembangan UMKM dengan fokus pada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penjaminan *loss limit* UMKM dan

pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider *marketplace* dan peningkatan literasi digital UMKM. Dengan strategi tersebut sektor Industri Pengolahan akan terus tumbuh dengan pertumbuhan yang semakin meningkat pada tahun 2023.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada angka 19,65 persen pada tahun 2020 dan 12,88 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menjadi dasar prediksi sektor tersebut untuk tetap tumbuh pada tahun 2023, tetapi pada angka yang lebih kecil. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung dengan pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 4,2-5,4 persen pada tahun 2023.

3.1.3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB ADHB sebesar 31,31 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 422.732 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 74.063.579,83 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 79.035.645,99 rupiah/jiwa pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga sebesar 102.083.630,06 rupiah/jiwa pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 101.539.058,51-102.523.690,22 rupiah/jiwa pada tahun 2022 dan 111.585.306,77-113.818.615,69 rupiah/jiwa pada tahun 2023.



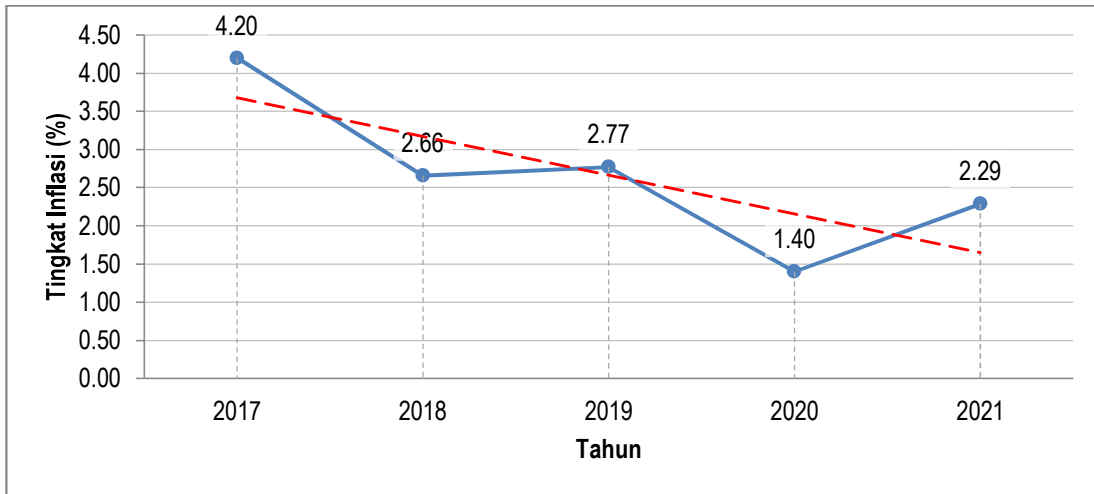
Gambar 3.9 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

3.1.4. Inflasi

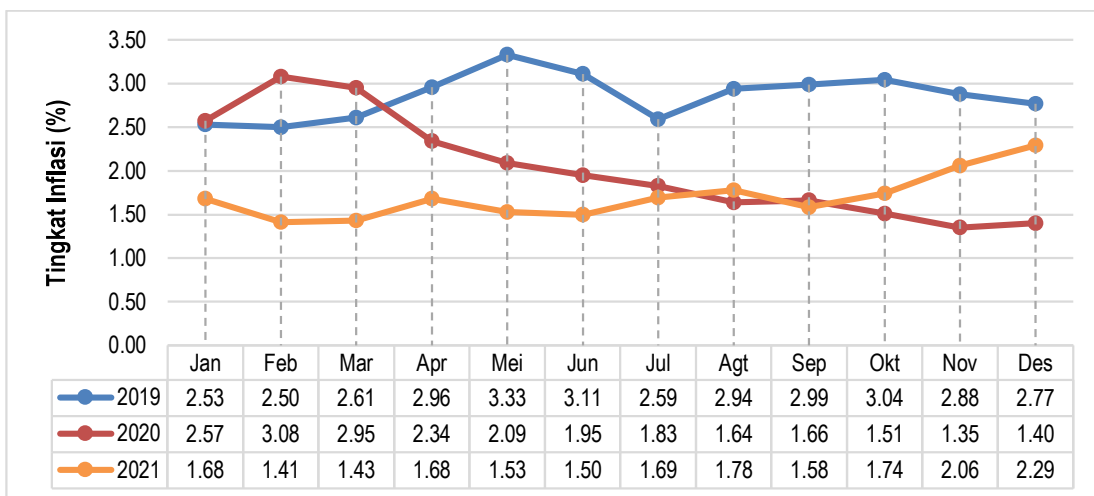
kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Akan tetapi, nilai inflasi kembali meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2021.



Gambar 3.10 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022

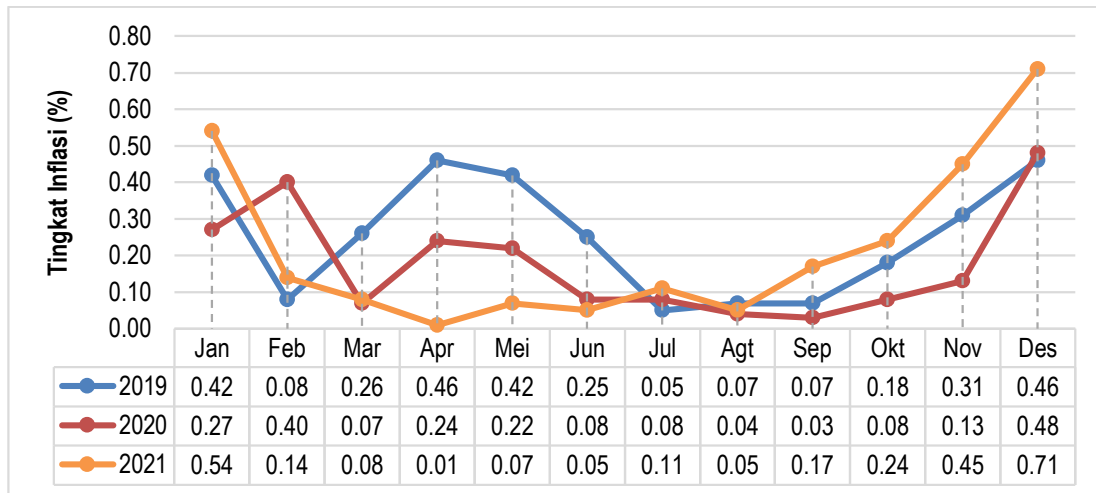
Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.



Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (yoy) 2019-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

menunjukkan adanya peningkatan produktivitas. Peningkatan inflasi pada triwulan IV tahun 2021 masih berada di angka yang kondusif. Inflasi tahunan 2021 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 2,29.



Gambar 3.12 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (mtm) 2019-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

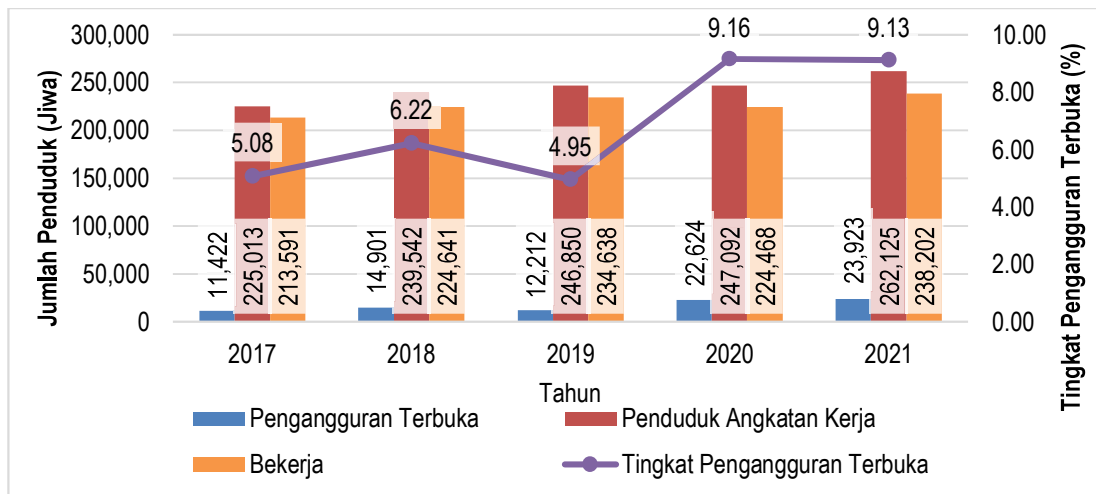
Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada taraf yang minimal karena adanya kebijakan pelarangan mudik oleh Pemerintah Pusat. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri umumnya terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas, tetapi pada tahun 2021 hanya terjadi sedikit peningkatan dari Bulan Maret 2021. Andil terbesar pada inflasi ada pada komoditas makanan, yaitu daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, dan daging sapi. Inflasi antar bulan terjadi peningkatan pada Triwulan IV seiring dengan periode libur sekolah, natal, dan tahun baru.

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Pada tahun 2022, dengan melihat perkembangan inflasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai dengan bulan Februari dimana masih menunjukkan kestabilan disertai dengan adanya kepastian *stock* pangan secara nasional, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih akan berada pada rentang 3.0±1 persen.

berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen untuk tahun 2023.

3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,95 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.

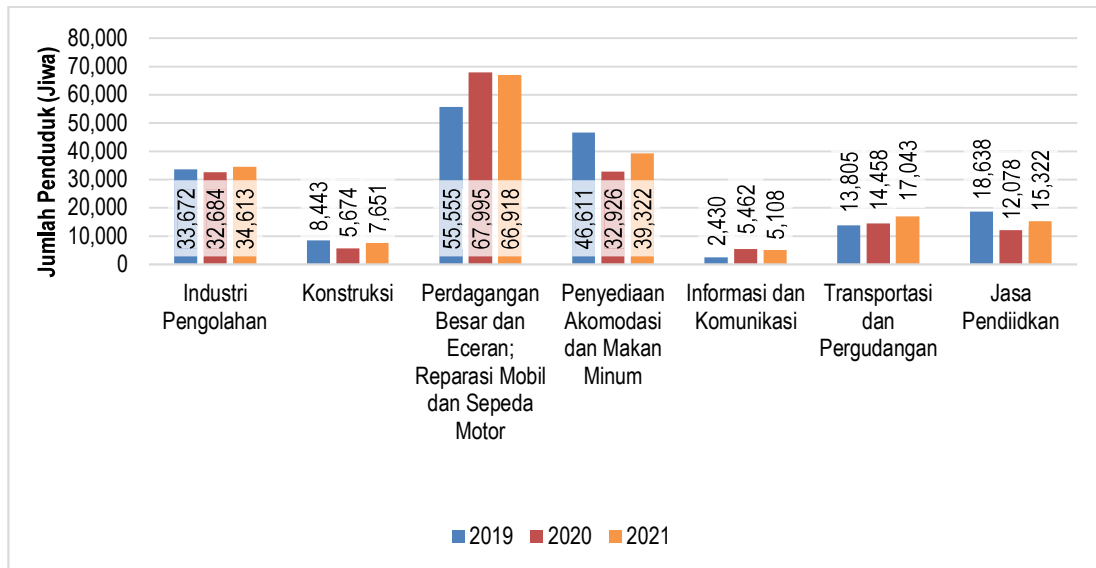


Gambar 3.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022

Secara agregat terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Dari 234.638 orang yang bekerja pada tahun 2019 menjadi 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 atau terjadi pengurangan jumlah orang yang bekerja sebesar 10.170 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 242 orang sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 10.412 orang. Pada tahun 2021, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 224.468 orang pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang pada tahun 2021 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Dengan kata lain, pengurangan jumlah orang

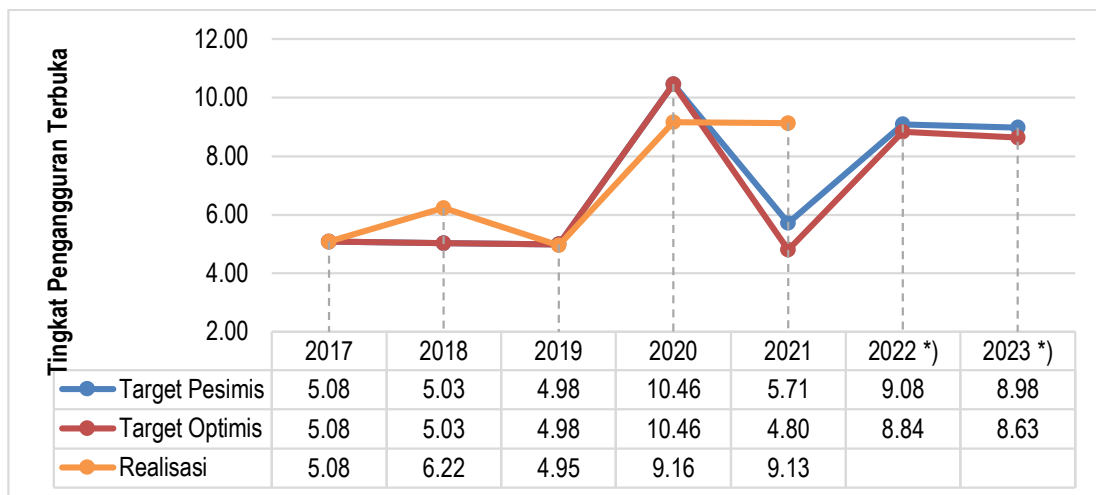
atau sebesar 6,08 persen, sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja yang signifikan menyebabkan angka pengangguran hanya turun sedikit walaupun jumlah orang yang bekerja naik secara signifikan.



Gambar 3.14 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2022

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari enam sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dari segi tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, tetapi di sisi lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor lain yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2020 adalah sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum walaupun belum sebesar pengurangan di tahun 2020. Penambahan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor Jasa Pendidikan. Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan dan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.



Gambar 3.15 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

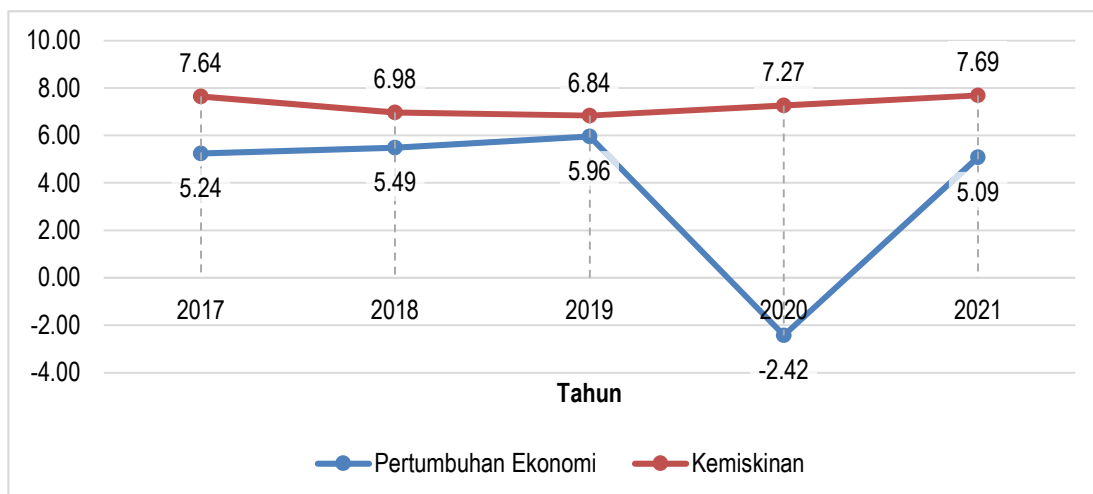
Pada tahun 2023, penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 8,63-8,98 pada tahun 2023.

3.1.6. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan

bukan berarti sebaliknya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.

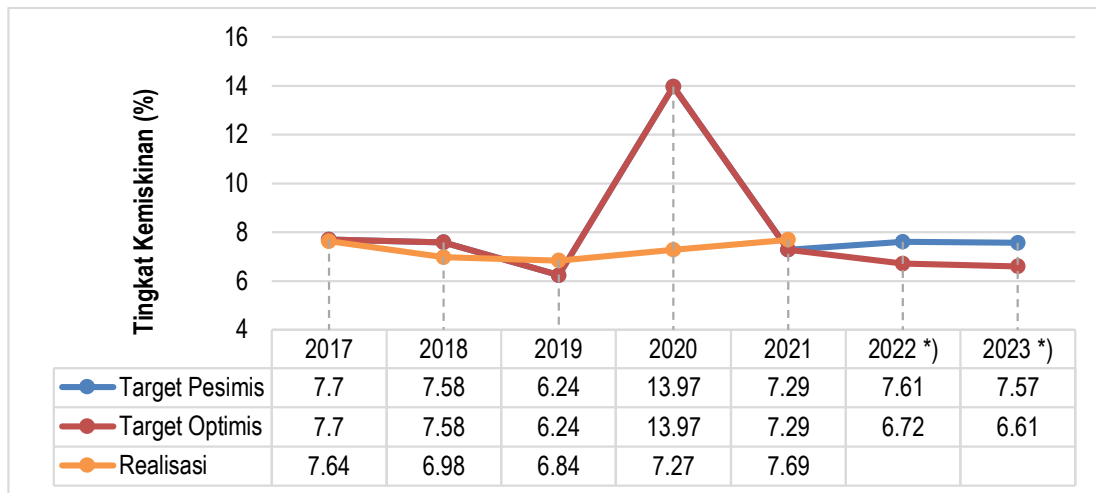


Gambar 3.16 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitar 0,42 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada Bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode Bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan Bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,27 persen menjadi 7,69 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu membawa dampak positif bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. Pemberlakuan PPKM pada awal tahun 2021 dapat disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan dikarenakan sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup signifikan dan pemetretan terhadap kondisi kemiskinan dilakukan pada bulan Maret dimana PPKM masih diberlakukan dan sektor pariwisata masih mengalami perlambatan. Hal tersebut didukung dari data pengeluaran per kapita per *quintile* DIY pada daerah perkotaan menunjukkan peningkatan pada Bulan September 2020, tetapi kembali mengalami



Gambar 3.17 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2023

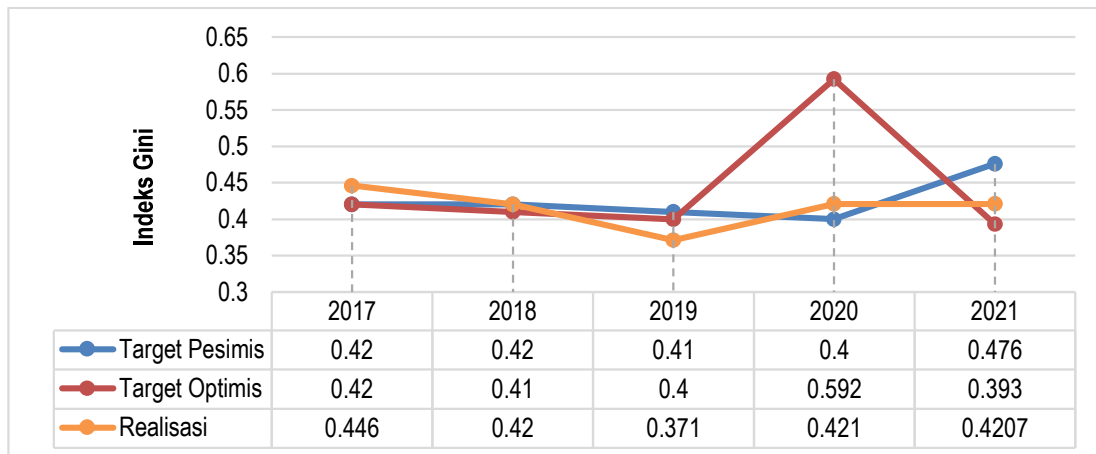
Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Ekonomi yang tumbuh positif dan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2021 menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2023, pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,61-7,57 persen pada tahun 2023.

3.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

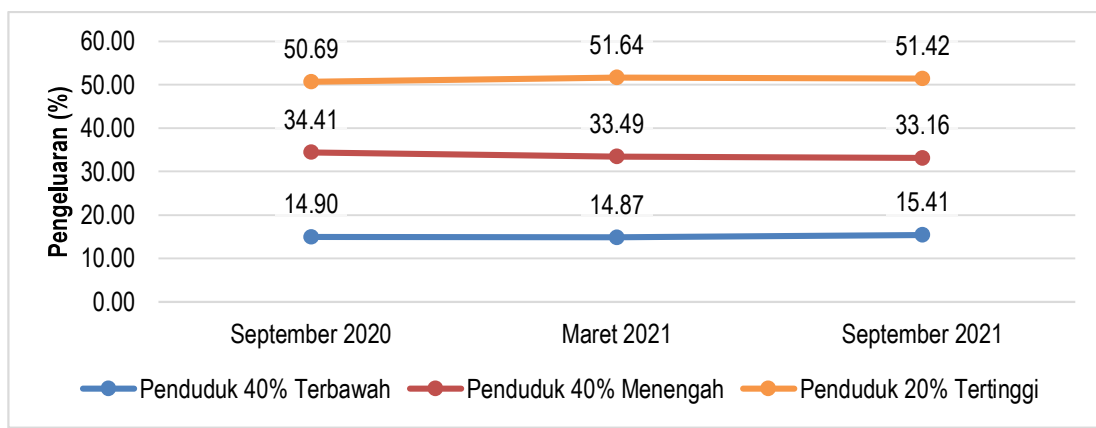
Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini ratio*) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.



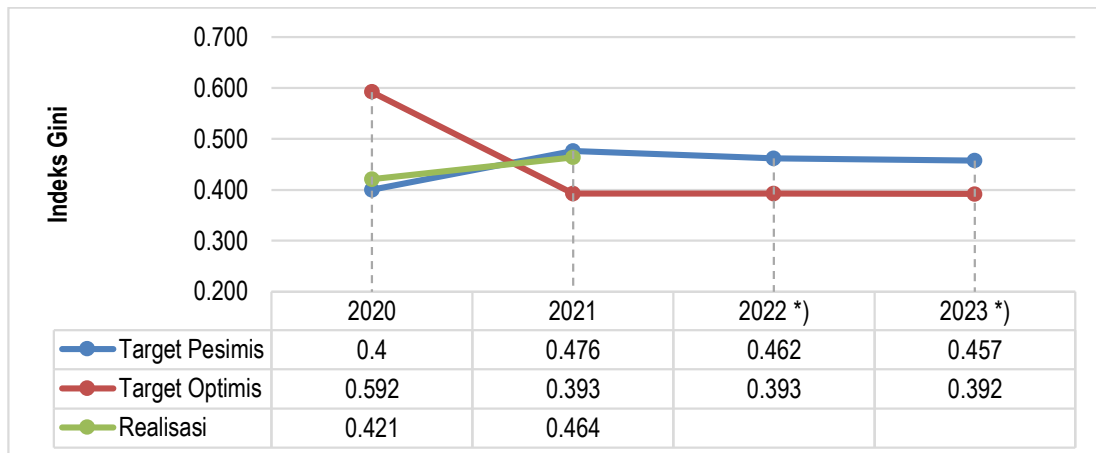
Gambar 3.18 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Yogyakarta Antar Bulan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat. Pada periode tahun 2017-2019, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan. Peluncuran Program Gandeng Gendong yang menitikberatkan pada optimalisasi peran *stakeholder* 5K (pemKot, Kampus, Kampung, Komunitas, dan Korporat) dalam pembangunan menjadi salah satu akselerator penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464.



Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, September 2021 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



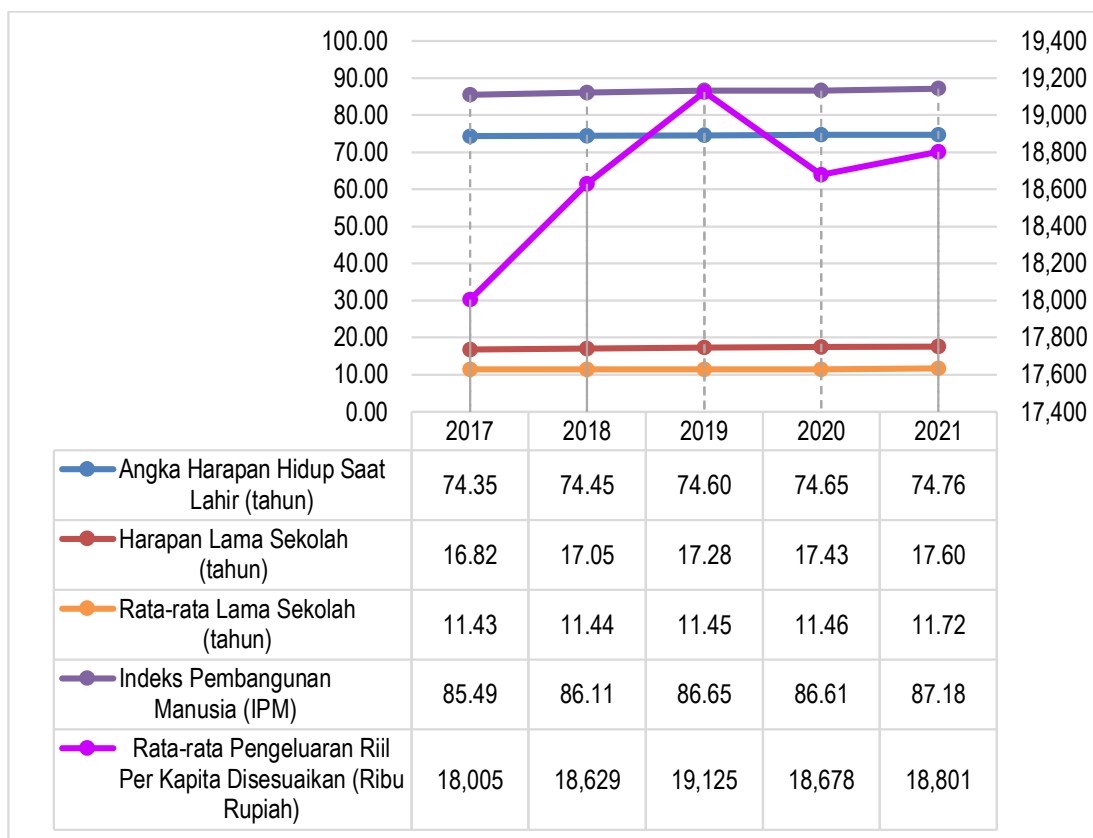
Gambar 3.20 Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2023, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang *tumata, tumanja, krasa* berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses *digital* kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi *digital* dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga pada tahun 2023 diharapkan indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan akan berada pada rentang 0,392-0,457.

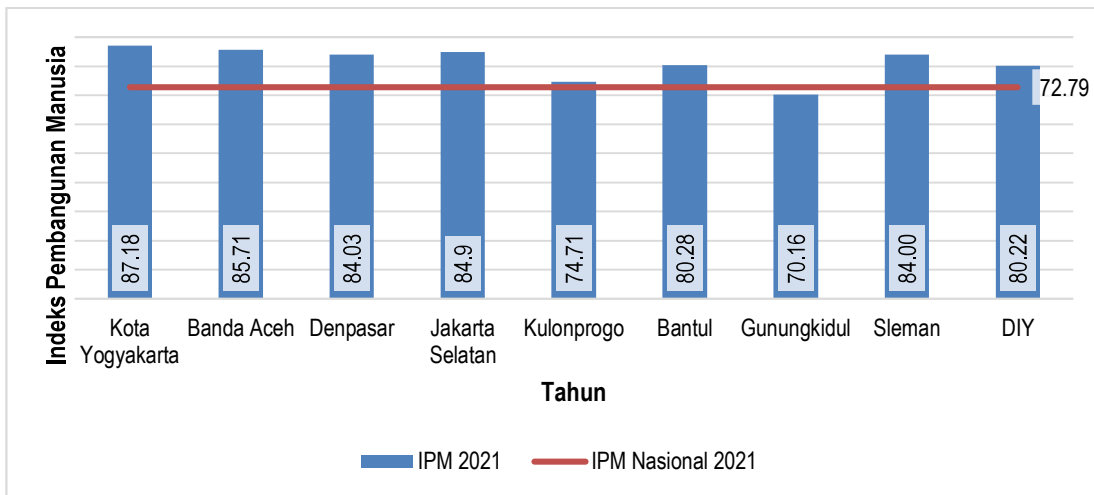
komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusi (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).



Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

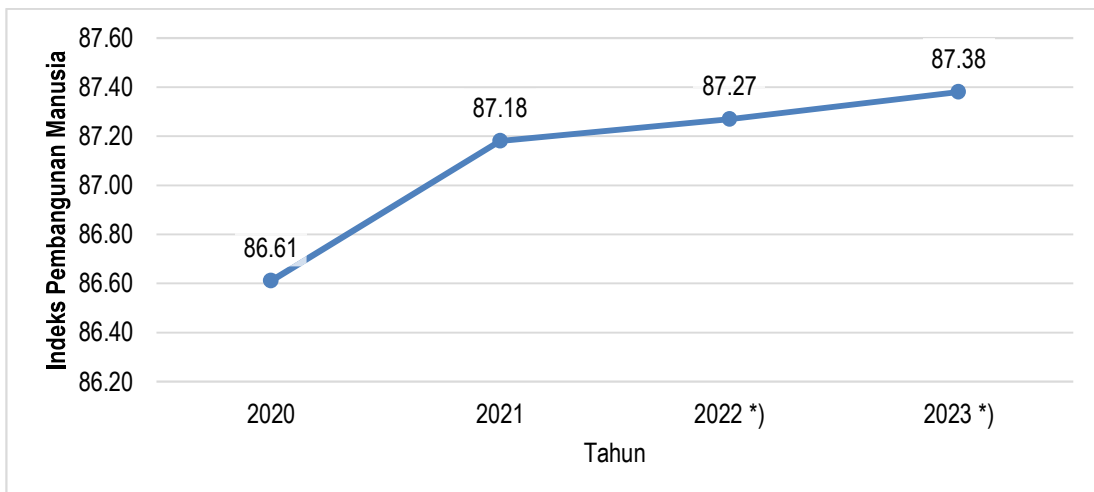
IPM Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2017-2019. Peningkatan tersebut juga didukung dengan peningkatan dari keempat indikator penyusun IPM, bahkan untuk Indikator ekonomi rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya IPM Kota Yogyakarta dari 86,65 pada tahun 2019 menjadi 86,61 pada tahun 2020. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun. Pada tahun 2021, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan walaupun peningkatan indikator rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan pada tahun 2021 belum mendekati rata-rata pengeluaran riil per



Gambar 3.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta v.s. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Lain Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 80,22 lebih tinggi dari IPM Nasional (72,79). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman dan Bantul pada angka 84 dan 80,28. Dua kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Kulonprogo (74,71) dan Kabupaten Gunungkidul (70,16), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah IPM Nasional.



Gambar 3.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan

literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditargetkan meningkat di angka 87,38 pada tahun 2023.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan data tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 35,03 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 63,18 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,79 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber Pendapatan Daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.852.954.092.048,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh dua ribu empat puluh delapan rupiah). Rincian proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 658.724.912.872,00
---------------------------	-----------------------

b. Pendapatan Transfer	Rp 1.194.229.179.176,00
------------------------	-------------------------

Alokasi Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta menurut Berita Acara Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun 2023 dengan skema moderat sebesar Rp 142.428.541.650,00 terakomodir pada Pendapatan Transfer serta Belanja Operasi dan/atau Belanja Modal.

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah untuk tahun 2023.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	REALISASI		
		2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.765.760.418.492,27	1.699.751.020.194,30	1.707.273.287.342,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	689.049.725.509,27	563.174.371.396,88	598.121.885.331,00
1.1.1.	Pajak Daerah	451.265.948.031,00	342.780.587.013,00	372.462.884.351,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	32.428.343.731,00	23.310.646.522,00	26.855.366.529,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.975.003.950,01	34.859.626.698,98	23.991.239.142,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.380.429.797,26	162.223.511.162,90	174.812.395.309,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.075.256.692.983,00	1.105.993.726.262,42	1.078.659.260.087,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	940.626.816.702,00	931.449.048.869,00	884.851.267.937,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	134.629.876.281,00	174.544.677.393,42	193.807.992.150,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.454.000.000,00	30.582.922.535,00	30.492.141.917,00
1.3.1.	Hibah	1.454.000.000,00	30.582.922.535,00	298.000.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	30.194.141.917,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022; Hasil Olahan, 2022

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 63,18 persen dan PAD menyumbang sebesar 35,03 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya;

10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2021, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 598,12 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 116,14 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 3.3 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Audited)			2020 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	425.381.500.000,00	451.265.948.031,00	106,08	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,57
1.1.2.	Retribusi Daerah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.935.929.644,00	28.975.003.950,01	100,14	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.242.774.274,00	176.380.429.797,26	106,74	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23
	Pendapatan Asli Daerah	653.011.939.630,00	689.049.725.509,27	105,52	476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Proporsi Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2021 relatif besar mencapai 63,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 99,22 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 99,95 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Audited)			2020 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	982.099.970.482,00	940.626.816.702,00	95,78	953.032.484.349,00	931.449.048.869,00	97,7
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	119.456.579.275,00	134.629.876.281,00	112,70	173.740.245.587,75	174.544.677.393,42	100,4
	Pendapatan Transfer	1.101.556.549.757,00	1.075.256.692.983,00	97,61	1.126.772.729.936,75	1.105.993.726.262,42	98,1

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2023 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada dua tahun selanjutnya tidak mencapai target. Pada tahun 2021, penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 30,49 miliar rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 99,53 persen.

Tabel 3.5 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Audited)			2020 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	200.000.000,00	1.454.000.000,00	727,00	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Komposisi belanja tahun 2021 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 85,44 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 14,19 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,32 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,06 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 40,98 persen terhadap total Belanja Daerah dan 47,97 persen terhadap Belanja Operasi. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3.6 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019 (Audited)			2020 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	BELANJA DAERAH	1.943.940.157.146,52	1.734.593.335.861,34	89,23	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,63
2.1.	BELANJA OPERASI	1.546.621.849.972,00	1.404.860.023.602,17	90,83	1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,46
2.1.1.	Belanja Pegawai	830.857.956.853,00	760.532.062.428,28	91,54	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,03
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	617.496.329.981,00	553.387.490.228,89	89,62	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	85.740.983.138,00	79.389.047.945,00	92,59	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	12.526.580.000,00	11.551.423.000,00	92,22	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,87
2.2.	BELANJA MODAL	387.087.690.397,00	327.434.372.199,17	84,59	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,86
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	52.092.672.025,00	25.569.058.040,00	49,08	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,83
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.840.905.712,00	96.719.552.169,17	94,05	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,11
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.732.855.774,00	54.312.514.794,87	87,98	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,24
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.413.512.507,00	101.225.143.404,83	87,71	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,48

No.	Uraian	2019 (Audited)			2020 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	848.419.134,00	828.300.673,00	97,63	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	54.159.325.245,00	48.779.803.117,30	90,07	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.227.812.190,52	317.693.064,00	3,86	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30
2.4.	BELANJA TRANSFER	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	2.002.804.587,00	1.981.246.996,00	98,92	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.3.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

5. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

6. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	REALISASI		
		2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)
2.	BELANJA DAERAH	1.734.593.335.861,34	1.517.599.468.488,39	1.691.968.885,00
2.1.	BELANJA OPERASI	1.404.860.023.602,17	1.248.329.702.538,88	1.445.551.076,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	760.532.062.428,28	728.710.179.778,78	693.434.145,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.387.490.228,89	455.864.521.552,10	675.659.110,00
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	79.389.047.945,00	38.725.063.808,00	44.321.476,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	11.551.423.000,00	25.029.937.400,00	32.136.344,00
2.2.	BELANJA MODAL	327.434.372.199,17	193.523.645.423,93	240.007.571,00
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	25.569.058.040,00	17.920.111.920,00	31.234.102,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.719.552.169,17	54.368.762.898,42	57.237.140,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.312.514.794,87	41.131.637.105,54	52.693.245,00
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	101.225.143.404,83	70.226.071.861,47	84.799.299,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	828.300.673,00	3.834.203.993,50	14.043.783,00
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	48.779.803.117,30	6.042.857.645,00	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	317.693.064,00	74.385.331.447,58	5.350.719,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.981.246.996,00	1.360.789.078,00	1.059.517,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.981.246.996,00	1.360.789.078,00	1.059.517,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD tahun 2023 sebesar Rp 54.667.000.000,00 digunakan untuk penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

NO.	URAIAN	REALISASI		
		2019 (Audited)	2020 (Audited)	2021 (Audited)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.448.050.491,52	220.762.753.122,45	382.914.304.828,36
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	226.442.324.759,52	220.340.133.122,45	382.914.304.828,36
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	410.000.000	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.725.732,00	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-	12.620.000,00	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.275.000.000,00	20.000.000.000,00	69.173.050.491,52
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	37.275.000.000,00	20.000.000.000,00	69.173.050.491,52
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-
	Pembiayaan Netto	189.173.050.491,52	200.762.753.122,45	313.828.368.828,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	220.340.133.122,45	382.914.304.828,36	328.914.304.828,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2019, 2020, dan 2021; Hasil Olahan, 2022

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.852.954.092.048,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	658.724.912.872,00
1.1.1.	Pajak Daerah	444.281.800.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.205.394.190,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.215.909.048,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.021.809.635,00
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.194.229.179.176,00
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	928.463.005.000,00
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	265.766.174.176,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
1.3.1.	Hibah	-
1.3.2.	Dana Darurat	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-
	Jumlah Pendapatan	1.852.954.092.048,00
2.	BELANJA DAERAH	1.946.832.789.620,00
2.1.	BELANJA OPERASI	1.642.773.786.302,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	729.540.098.571,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.351.469.051,00
2.1.3.	Belanja Bunga	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-
2.1.5.	Belanja Hibah	96.020.003.680,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	15.862.215.000,00
2.2.	BELANJA MODAL	283.968.694.458,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.449.900.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.935.494.406,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.292.132.700,00
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.689.506.016,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.601.661.336,00
2.2.6	Belanja Modal Lainnya	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.257.000.000,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	833.308.860,00
2.4.1	Belanja Bani Hasil	-

No.	URAIAN	ANGGARAN 2023 (Rp)
	Surplus/(Defisit)	(93.878.697.572,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	148.545.697.572,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.545.697.572,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	148.545.697.572,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.667.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	54.667.000.000,00
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	54.667.000.000,00
	Pembiayaan Netto	93.878.697.572,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-

Sumber: Hasil Olahan, 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan DIY untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD, atau Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) khusus untuk tahun 2023-2026;
2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD; dan
3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025. Visi Kota Yogyakarta tersebut adalah: **Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata	2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa	3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	6. Terwujudnya karakter masyarakat tangguh yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	7. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	8. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	9. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY, dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No	Indikator Makro	Target 2023		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	4,69	4,2 – 5,40
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,0 – 8,0	11,1	6,61 - 7,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	3,8	8,63 – 8,98
4	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*</i>	73,29 – 73,35	81,07	87,20 – 87,38
5	<i>Rasio Gini*</i>	0,375 – 0,378	0,423	0,392 - 0,457

Sumber: RKP Tahun 2023; RPD DIY Tahun 2023-2026; RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKP Kota Yogyakarta Tahun 2023 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2023. Tema RKP untuk tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKP DIY Tahun 2023, yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah

1. **Ekonomi Kreatif**, penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat pandemi lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, di antaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi;
2. **Pariwisata Budaya**, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan. Peningkatan kapasitas kemantren/kelurahan baik sebagai Rintisan Kelurahan Budaya, maupun Kelurahan Budaya, pembinaan terhadap lembaga dan komunitas budaya serta pengembangan event-event budaya juga diupayakan sebagai daya tarik pariwisata di Kota Yogyakarta; dan
3. **Keberdayaan Masyarakat**, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai pusat pelayanan jasa dan pariwisata berbasis budaya melalui pengembangan ekonomi kreatif ditunjang sumber daya manusia berkualitas yang berdaya dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

"Pusat Pelayanan Jasa" adalah:

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

"Pariwisata Berbasis Budaya" adalah:

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain;
3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
4. Peningkatan kualitas pariwisata dilakukan dengan mempromosikan pariwisata

5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (*Intelligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*) dan spiritual (*Spiritual Quotient*);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

"Berwawasan Lingkungan" adalah:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan;
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan di atas, yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sedangkan Prioritas pembangunan DIY pada RKPD tahun 2023 adalah:

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah;
2. Penurunan Kemiskinan;
3. Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik; dan
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Pembangunan Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2005-2025 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kota Yogyakarta.

Dalam pembangunan Kota di tahun 2023, gandeng gendong tetap dilaksanakan sebagai program kerja sama antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melibatkan potensi yang ada dengan pengembangan keberagaman dan

Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung). Pengembangan Inovasi Gerakan Gandeng Gendong ini dilakukan dalam semangat membangun yang Tumata, Tumanja Krasa, Pembangunan yang direncanakan, ditata dengan baik, dari segi kegiatannya, pendanaannya dan juga pembagian peran dalam partisipasi 5K nya, selain itu dilaksanakan dengan fokus dan optimal, sehingga hasilnya dapat benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan dengan Tumata, Tumanja Krasa di tahun 2022 membawa Pariwisata sebagai basis pembangunan Kota Yogyakarta yang dipersiapkan untuk membawa masyarakat untuk bangkit dari pandemi dengan peningkatan Infrastruktur dan perekonomian. Dengan basis ini, masyarakat sebagai subyek pembangunan diberikan layanan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di seluruh wilayah, baik di tingkat kota sampai tingkat kelurahan. Tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, diwujudkan dengan melakukan perencanaan di tingkat kota maupun wilayah secara Bersama-sama serta terintegrasi, serta dilaksanakan dengan lebih cepat dengan menggerakkan seluruh stakeholder pembangunan 5K sesuai dengan peran masing-masing dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan di setiap sektornya maupun di wilayah.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastic. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi

19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik unkit baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan

senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)

Kode PN	Prioritas Nasional	Kode PK	Prioritas Kota Yogyakarta
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	P3	Peningkatan Perekonomian
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	P3	Peningkatan Perekonomian
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
		P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan

Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas DIY diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)

Kode PDIY	Prioritas DIY	Kode PK	Prioritas Kota Yogyakarta
PD1	Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian
PD2	Pemulihan Ekonomi	P3	Peningkatan Perekonomian
PD3	Penurunan Kemiskinan	P3	Peningkatan Perekonomian
PD4	Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PD5	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PD6	Menjaga Daya Dukung Lingkungan	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta

Prioritas Kota Yogyakarta		Sasaran Daerah	
P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	S1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		S11	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
		S7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
		S9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	S5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		S6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		S10	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah

Prioritas Kota Yogyakarta		Sasaran Daerah	
P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	S8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,2 – 5,4
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% – 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,37
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Dalam pencapaian 11 sasaran, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran 1-11. Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan 5K lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran.

4.6.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas pendidikan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Kualitas Pendidikan diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1.	Kualitas pendidikan meningkat	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; 14 Kemantren
		Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; DP3AP2KB
		Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas PUPKP
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pariwisata; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022



Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pariwisata

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Kualitas Pariwisata di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas pariwisata sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pariwisata diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

No.	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan; 14 Kemantren
		Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Peningkatan Kualitas Layanan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Aksesibilitas	Dinas Perhubungan; Dinas PUPKP
		Penguatan Branding Pariwisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kominfosan
		Penguatan Kelembagaan and SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

No.	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Peningkatan Ekonomi Sektor Industri dan UMKM	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
		Perizinan dan Penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penguatan Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi UKM
		Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Menurunnya Kemiskinan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu penurunan kemiskinan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
4.	Menurunnya Kemiskinan masyarakat	Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP; Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pendapatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; DP3AP2KB; 14 Kemantren
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian; Bappeda; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan TKPK	Bappeda; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.5. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran daerah Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pelaksanaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP
		Penguatan Sistem Informasi Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.6. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan formula:

Gambar berikut memperlihatkan kerangka logis untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas lingkungan hidup sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan; 14 Kemantren; Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Sasaran daerah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.7 Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu keberdayaan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
7.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Keberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
		Keberdayaan Anak	DP3AP2KB; Dinas Sosnakertrans
		Keberdayaan Lansia	Dinas Sosnakertrans
		Keberdayaan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosnakertrans
		Data dan Sistem Informasi	Dinas Kominfo; Dinas Sosnakertrans; DP3AP2KB; Bappeda
		Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	DP3AP2KB; Dinas Sosnakertrans; Bappeda

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.8. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kapasitas tata kelola pemerintahan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
8.	Meningkatnya Kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Bagian Tapem; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi dan Keuangan; semua OPD (fungsi Sekretariat)
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
		Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dinas Dukcapil; Dinas Kominfo dan Persandian; Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 14 Kemantren
		Penguatan Inovasi	Bappeda

4.6.9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.9 Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu ketentraman dan ketertiban sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
9.	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren
		Upaya Penindakan (Represif)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022



Gambar 4.10 Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
10.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPKP
		Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP
		Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup; Kemantren
		Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan; Dinas PUPKP
		Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Partisipasi Masyarakat	14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.6.11. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran daerah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu derajat kesehatan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14 Kemantren
		Peningkatan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Dinas Kesehatan
		Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB
		Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan; DPUPKP; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2022

4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		2. Pendidikan Dasar		
		3. Pendidikan Kesetaraan		
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
		2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		4. Pelayanan kesehatan balita		
		5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
		6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
		7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
		9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
3	Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Satpol PP
		2. Pelayanan informasi rawan bencana		BPBD
		3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana		
		5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
		2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Daya Manusia; Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan; Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
		4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
		5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		

Sumber: Hasil Olahan, 2022

4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kota telah menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama pemerintah kabupaten lain dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sinkronisasi sebagai berikut.

Tabel 4.19 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosnakertrans; Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kemanren
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
Tujuan 5 Kesenjangan Gender	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DP3AP2KB
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosnakertrans; Dinas Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan; Pemantapan Kinerja Aparatur	Dinas PUPKP; Bappeda

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP; BPBD; Dinas Kebakaran; DLH
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH; BPBD
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Satpol PP; Badan Kesbangpol; Bappeda; BPKAD; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Peningkatan Perekonomian	DPMPTSP; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan.

4.9. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2023 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

4.9.1. Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Yogyakarta 2023;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPD;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kota Yogyakarta; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta yang lebih baik.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dengan tidak meninggalkan indikator dan target yang tercantum dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program, kegiatan, sub kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2023 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Selain SPM, *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang sudah menjadi komitmen bersama dengan DIY, konsep *money follow program* yang merupakan pendekatan untuk penganggaran yang berdasar pada prioritas program, serta konsep kota Yogyakarta sebagai *smart city* juga disinkronisasikan dalam proses perencanaan.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 baik indikator sasaran maupun program, yang sinkron dengan rencana Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pengampu sub kegiatan dan program bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan dengan peraturan walikota mengenai SOTK yang akan ditetapkan lebih lanjut. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan OPD masing-masing. Sedangkan usulan pada sub kegiatan dan output sesuai urutan prioritas, yang nantinya juga bisa menjadi dasar pemilihan saat terjadi efisiensi pada output maupun target, ketika ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun

Di sisi lain, dalam RKPD juga memuat mengenai program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Berikut Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

No	Urusan/Kegiatan	Anggaran (Rp)		
		Optimis	Moderat	Pesimis
1	Urusan Tata Ruang a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	73.905.319.000	47.905.319.000	47.905.319.000
2	Urusan Pertanahan a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten b. Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.394.353.000	1.394.353.000	1.394.353.000
3	Urusan Kebudayaan a. Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra Dan Permuseuman b. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Dan Warisan Budaya c. Kegiatan Adat, Seni, Tradisi Dan Lembaga Budaya d. Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya e. Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	147.637.556.000	92.207.466.000	91.506.674.000
4	Urusan Kelembagaan a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	921.403.650	921.403.650	921.403.650
Total		223.858.631.650	142.428.541.650	141.727.749.650

Sumber: Berita Acara Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga skenario usulan pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun 2023, yaitu skenario optimis, moderat, dan pesimis. Meskipun demikian, yang digunakan adalah skenario moderat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Usulan Program dan Kegiatan Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok U
1	2	3	4	5	
URUSAN TATA RUANG					
1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Penataan Ja
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Penataan Sa Kraton
2	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Revitalisasi f
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1. Penataan utama Pasar 2. Promosi d Beringharjo
URUSAN PERTANAHAN					
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Pendaftaran Kasultanan o Kadipaten di Pertanahan f

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
					Hasil identifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten di
					Draft Keputusan tentang Bata Kalurahan
					Tanda identifikasi papan nama Kasultanan dan Kadipaten di
				Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Hasil Monitoring terhadap Perencanaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di
					Rekomendasi Tata Ruang Kasultanan dan Kadipaten
			Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi dan pemanfaatan kasultanan dan kadipaten di
				Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Fasilitasi Penanganan keberatan dan permasalahan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
URUSAN KEBUDAYAAN					
1	Dinas Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Peringatan H Inventarisasi kesejarahan Lomba Cerd Sejarah Sosialisasi N
				Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sastra	Pelatihan Ba Jawa
					Kompetisi Ba Jawa
					Festival Sast
					Pelatihan Pr
				Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerd Permuseuman Wajib Kunjur Peningkatan Museum Promosi Mus
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penyusunan Rekomendasi Penetapan/P BWB dan/ata

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
					Rekomendasi Bangunan B KCB, dan K KCB Kajian Waris Sosialisasi B Bangunan di Budaya Pemutakhira Apresiasi Ke Keterawatan
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Peningkatan Kelurahan B Gelar Potens Kelurahan B Akreditasi C Kelurahan B Pembuatan Kelurahan B Pelatihan Ke Kelurahan B Lomba Lukis Tingkat Kota mendapatka terseleksi Workshop S

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
					Penguatan D
					Kebudayaan
					Yogyakarta
					Penguatan L
					Budaya
				Misi Kebudayaan Ke dalam dan	Gelar Seni B
				Luar Negeri dalam Rangka	Yogyakarta (
				Diplomasi Budaya	Parade Buda
					DIY TMII
					Kerjasama M
					Daerah
				Penghargaan Seniman dan	Penghargaan
				Budayawan	Pelaku/Peng
					budaya dan
				Festival Kebudayaan	FKY Kota Yo
				Yogyakarta	
				Gelar Budaya Jogja	Jogja Cross
					Rumaket
					Festival Jogj
					Festival Keth
					Festival Kara
					Festival Lang
					Kota
					Festival Teat
					Festival Sen
				Pengembangan dan	Pagelaran W
				Implementasi Nilai-Nilai Luhur	Festival Dala
				Dalam Masyarakat	Remaja Ting
					Perayaan W

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk	
1	2	3	4	5		
					Kajian Waris Benda	
					Pelatihan Da Ngayogyaka	
					Diseminasi M	
					Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Gelar Upaca Tradisi Tk. D
					Jamasan Pu Sarasehan A	
					Gelar Upaca Parade Dola	
					Penyelenggaraan Even Pnggiat Seni	Pentas Godh
	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Pemanfaatan sosial dalam				
	Pembuatan Pendokumen Seniman Jog					
2	UPT Pengelolaan Taman Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota	Pembangun Budaya Emb (Grha Buday Terbuka, Lan	
					Manajemen	

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
3	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelayanan d Kawasan Gu Pengelola Gumaton Pengelola Penjagaan K Malioboro Kr Sarasehan d komunitas di Gumaton Pengadaan Penjagaan k shelter PKL DISPAR
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pemeliharaa Pemeliharaa Furniture Pemeliharaa Pengelola Penyediaan Air dan Listri Peralatan Pe Tenaga Pem Pemeliharaa Pemolesan T

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
					Pemeliharaan Utara Operasional PKL Maliobo DISPAR
4	Kemantren	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Penyelengga Hari Istimewa
URUSAN KELEMBAGAAN					
1	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	1. Dokumen Jabatan Kele 2. Dokumen dan Fungsi F Daerah Peng Keistimewaa Yogyakarta 3. Kajian me Kemantren

No.	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Tolok Uk
1	2	3	4	5	
			Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Agen Per... Kelompok B... Pemerintaha... 2. Rencana... Plan) tentan... Pemerintaha... 3. Dokumen... Implementas... Pemerintaha...
2	BKPSDM Kota Yogyakarta	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	1. Dokumen... Penyusunan... Berbasis Kav... 2. Diklat Inte... Keistimewan... Eselon III, IV
					TOTAL U

Sumber: Usulan Rencana Kebutuhan Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.3 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1									
1	01							392.747.370.519	
1	01	001						222.428.823.804	
1	01	001	2,01					68.660.000	
1	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan		218.305.416.600
1	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	171.525.600	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora	1 laporan			1 laporan	22.500.000	
1	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora	1 laporan			1 laporan	3.750.000	
1	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora	1 laporan			1 laporan	1.179.151.120	
1	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.459.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	179.787.510	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	54.768.300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	64.776.190	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	002	2,01	012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				4 Unit	910.505.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				420 Paket	614.300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1.773.830.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				167 Satuan Pendidikan	1.506.005.400	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				167 Satuan Pendidikan	82.637.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1500 Peserta Didik	1.205.442.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				165 Satuan Pendidikan	275.283.248	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				165 Satuan Pendidikan	40.286.177.840	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				19809 Orang	30.454.759.280	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				8 Konten Digital	1.382.812.510	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	4 Satuan Pendidikan				4 Satuan Pendidikan	22.952.184.454	
						59 Satuan Pendidikan				59 Satuan Pendidikan		
						900 peserta				750 peserta		
1	01	002	2,02	024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	686.823.134	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	829.700.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				24024 Peserta Didik	558.790.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	002	2,02	037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				66 Satuan Pendidikan	250.483.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				750 Peserta Didik	1.018.579.200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				59 Satuan Pendidikan	147.349.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				41 Satuan Pendidikan	11.729.460.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS sekolah Menengah Pertama				5154 Orang	7.731.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	16774 siswa			16774 siswa	18.888.287.200	
					Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	6 Satuan Pendidikan				3 Satuan Pendidikan		
1	01	002	2,03	004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	86.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03	013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				16232 Peserta Didik	2.804.345.240	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				224 Satuan Pendidikan	4.808.250.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				691 Satuan Pendidikan	10.289.491.840	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03	019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				900 Orang	900.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan belajar Masyarakat	1483 peserta didik			1483 peserta didik	3.896.543.275	
1	01	002	2,04	012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1803 Peserta Didik	1.077.583.275	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,04	015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	438.060.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,04	017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	2.380.900.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	004			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	97,30 %			97,15 %	46.089.779.388	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	004	2,01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar	1 dokumen			1 dokumen	46.089.779.388	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	6442 orang		6442 orang			
1	01	004	2,01	001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				8 Dokumen	20.482.613.960	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	004	2,01	002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	25.607.165.428	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										20.486.586.352	
2	19	002		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	100 %			100 %	3.503.635.040	
2	19	002	2,01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirasaha pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	20000 orang			19850 orang	3.153.474.920	
2	19	002	2,01	001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				25 Orang	105.295.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	002	2,01	002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				4315 Orang	232.100.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	002	2,01	003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				19860 Orang	665.374.920	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	002	2,01	004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				45815 Orang	603.660.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	002	2,01	009 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				46 Orang	1.547.045.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	002	2,02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen			1 dokumen	350.160.120	
2	19	002	2,02	002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	350.160.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100 skala 0-100			100 skala 0-100	16.682.951.312	
2	19	003	2,01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit			8 Unit	480.000.000	
2	19	003	2,01	003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				7 Unit	480.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	450 orang			300 orang	1.559.707.386	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	19	003	2,02	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	460.164.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,02	003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 Orang	1.099.543.386	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	650 orang			500 orang	3.119.058.480	
2	19	003	2,03	001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	2.579.608.240	
2	19	003	2,03	003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				219 Orang	478.628.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,03	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	60.822.240	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 dokumen			1 dokumen	7.625.273.000	
2	19	003	2,04	001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	125.273.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,04	002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	7.500.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 dokumen			2 dokumen	3.898.912.446	
2	19	003	2,05	001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1.196.740.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,05	002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	300.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,05	003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	2.249.802.446	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	003	2,05	004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	152.370.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
2	19	004			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95 %			95 %	300.000.000	
2	19	004	2,01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2 organisasi			2 organisasi	300.000.000	
2	19	004	2,01	002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	300.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.030.300.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.030.300.000	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	251 peserta didik			251 peserta didik	1.030.300.000	
1	01	002	2,04	018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				251 Orang	1.030.300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.917.120.000											
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.917.120.000	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1	788 peserta didik			788 peserta didik	1.917.120.000	
1	01	002	2,02	042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.917.120.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.572.420.000											
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.572.420.000	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2	671 peserta didik			671 peserta didik	1.572.420.000	
1	01	002	2,02	042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.572.420.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.400.400.000											
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.400.400.000	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3	597 peserta didik			597 peserta didik	1.400.400.000	
1	01	002	2,02	042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.400.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.156.980.000											
					Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %	1.156.980.000		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %			
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %			
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %			
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %			
					Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4	492 peserta didik			492 peserta didik			
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.156.980.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	2.139.840.000		
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %			
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %			
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %			
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %			
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %			
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5	913 peserta didik			913 peserta didik	2.139.840.000		
1	01	002	2,02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	2.139.840.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.642.560.000		
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %			
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %			
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %			
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %			
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %			
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6	700 peserta didik			700 peserta didik	1.642.560.000		
1	01	002	2,02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.642.560.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	1.422.600.000		
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %			
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %			
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %			
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %			
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %			
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7	606 peserta didik			606 peserta didik	1.422.600.000		
1	01	002	2,02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.422.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	2.317.920.000		
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %			
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %			
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %			
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %			
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	952 peserta didik		2.317.920.000	
1	01	002	2,02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	2.317.920.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.419.120.000
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %		111,98 %	1.419.120.000
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		105,96 %	
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		93,20 %	
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		98,78 %	
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		98,30 %	
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		90,9 %	
					Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	605 peserta didik		605 peserta didik	
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1.419.120.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.251.780.000
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %		111,98 %	1.251.780.000
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		105,96 %	
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		93,20 %	
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		98,78 %	
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		98,30 %	
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		90,9 %	
					Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10	533 peserta didik		533 peserta didik	
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1.251.780.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					925.320.000
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %		111,98 %	925.320.000
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		105,96 %	
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		93,20 %	
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		98,78 %	
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		98,30 %	
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		90,9 %	
					Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11	393 peserta didik		393 peserta didik	
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	925.320.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					1.141.620.000
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %		111,98 %	1.141.620.000
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		105,96 %	
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		93,20 %	
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		98,78 %	
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		98,30 %	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16	711 peserta didik			711 peserta didik	1.669.440.000	
1	01	002	2,02	042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1.669.440.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	17.528.587.240	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	5600 peserta didik				
1	01	002	2,01	021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5600 Peserta Didik	5.983.737.240	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	5992 peserta didik			5992 peserta didik	9.297.250.000	
1	01	002	2,02	032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5992 Peserta Didik	9.297.250.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	763 peserta didik			763 peserta didik	1.247.600.000	
1	01	002	2,03	011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				763 Peserta Didik	1.247.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	250 peserta didik			250 peserta didik	1.000.000.000	
1	01	002	2,04	010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250 Peserta Didik	1.000.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %			111,98 %	3.917.507.750	
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %			105,96 %		
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %			93,20 %		
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %			98,78 %		
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %			98,30 %		
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %			90,9 %		
1	01	002	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	92 Satuan Pendidikan				
1	01	002	2,01	022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	111.300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				92 Satuan Pendidikan	371.498.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	01	002	2,01	026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				156 Orang	3.434.709.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
										178.758.865.889	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai			A Nilai	110.983.327.366	
1	02	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun pada Dinas Kesehatan (Renstra, Review Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Kompilasi RSB, Kompilasi RBA, Kompilasi DPA-BLUD, Kompilasi DPPA-BLUD, Forum OPD) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan	12 dokumen 14 laporan			12 dokumen 14 laporan	145.948.700	
1	02	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	25.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4.953.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	4.953.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.553.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	5.553.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	93.468.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,01	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	6.265.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Bukti Pengajuan dan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	37 dokumen 12 dokumen			37 dokumen 12 dokumen	107.219.725.680	
1	02	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	107.080.050.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	88.595.680	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	3.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	40.380.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	2 dokumen			2 dokumen	14.400.000	
						Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	36 laporan			36 laporan		
1	02	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen			2 dokumen	17.500.000	
1	02	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	17.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen			1 dokumen	721.039.331	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket			4 paket		
1	02	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.352.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	260.615.931	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.024.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	150.696.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	265.850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya	12 laporan			12 laporan	573.210.000	
1	02	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 bulan	573.210.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan			12 laporan	1.540.097.655	
1	02	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.012.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.523.285.155	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan			12 laporan	751.406.000	
1	02	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				51 Unit	461.028.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 jenis	110.264.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	120.113.550	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	60.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	64 %			61 %	66.507.131.743	
					Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77,80 %			77,23 %			
					Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	98 %			98 %			
					Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95 %			95 %			
1	02	002	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri Kit)	35 unit			20 unit	15.872.632.071	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 puskesmas			18 puskesmas			
					Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional	18 puskesmas			18 puskesmas			
					Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang diberikan	18 puskesmas			18 puskesmas			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,01	006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				18 Unit	200.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	176.633.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				18 Unit	2.949.485.524	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	4.205.469.247	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				12 Paket	7.613.152.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				18 Unit	610.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,01	021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Paket	116.991.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29850 orang			29700 orang	49.685.411.612	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10300 orang			10250 orang		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1604 orang			2200 orang		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen			12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen			12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan	64 dokumen			64 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen			12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat	21 dokumen			21 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	orang			10250 orang		
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 unit			3 unit		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1631 orang			2236 orang		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1631 orang			2236 orang		
						Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta	34 laporan			33 laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren	14 laporan			14 laporan		
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan								
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan								
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	orang			29700 orang		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar	12 laporan			12 laporan		
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19000 orang			19000 orang		
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2236 Orang	170.998.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2236 Orang	100.390.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2200 Orang	185.425.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10250 Orang	22.290.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29700 Orang	133.025.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2887 Orang	184.824.680	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19000 Orang	70.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28699 Orang	10.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13594 Orang	11.451.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				909 Orang	40.514.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6120 Orang	85.545.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9630 Orang	11.267.660	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	162.698.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	230.428.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	32.915.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	1.197.841.640	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	636.097.512	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	89.150.560	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar				15000 Orang	10.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	329.145.720	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	488.425.840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	43.725.288.840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				7 Dokumen	151.350.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				3 Unit	360.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				33 Unit	1.042.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				80000 Keluarga	198.220.160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	5.000.000	
1	02	002	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan)	1 dokumen			1 dokumen	169.308.060	
1	02	002	2,03	001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	169.308.060	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	34 unit			34 unit	779.780.000	
						Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	12 laporan			12 laporan		
1	02	002	2,04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				600 Unit	43.640.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002	2,04	003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan				32 Unit	736.140.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	95 %			95 %	739.727.780	
1	02	003	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta	6500 dokumen			6500 dokumen	155.466.320	
1	02	003	2,01	002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6500 Dokumen	155.466.320	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen			2 dokumen	138.137.460	
1	02	003	2,02	001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	8.750.220	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	003	2,02	003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	129.387.240	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	003	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 laporan			30 laporan	446.124.000	
1	02	003	2,03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				30 Orang	446.124.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	80 %			80 %	350.345.000	
1	02	004	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 dokumen			30 dokumen	16.185.000	
1	02	004	2,01	003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				30 Sarana	16.185.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
1	02	004	2,03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	120 dokumen			120 dokumen	96.050.000			
1	02	004	2,03	001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				120 Dokumen	96.050.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	004	2,04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 dokumen			12 dokumen	136.280.000			
1	02	004	2,04	001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	136.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	004	2,06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	65 laporan			65 laporan	101.830.000			
1	02	004	2,06	001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				65 Unit	101.830.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	005		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	100 %			80,00 %	178.334.000			
1	02	005	2,01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45 kelurahan			39 kelurahan	178.334.000			
1	02	005	2,01	001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				36 Dokumen	178.334.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									1.793.671.681
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	776.392.760			
1	02	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	776.392.760			
1	02	001	2,1	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	776.392.760	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	749.219.909			
1	02	002	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan			12 laporan	749.219.909			
1	02	002	2,02	001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	22.840.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1	02	002	2,02	002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	1.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1	02	002	2,02	003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	14.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	86.280.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	42.350.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3000 Orang	13.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	18.525.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				23 Orang	6.450.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	2.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	2.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	146.125.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	20.725.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4.223.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	6.299.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	37.450.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	30.850.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	36.300.000			
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	242.902.409	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				350 Keluarga	10.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	268.059.012			
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	268.059.012			
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	268.059.012	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.860.110.555	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	624.906.339			
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	624.906.339			
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	624.906.339	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	820.703.492			
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	820.703.492			
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54 Orang	4.810.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54 Orang	5.900.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	13.875.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				319 Orang	42.785.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1777 Orang	10.180.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3209 Orang	39.840.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	36.418.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				966 Orang	3.580.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				422 Orang	3.580.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	2.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				188 Orang	18.100.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				159 Orang	1.840.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	135.500.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				111 Dokumen	43.980.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	6.511.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				183 Dokumen	14.505.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				140 Dokumen	60.495.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	55.082.690	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				159 Dokumen	28.040.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	274.081.052	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1280 Keluarga	19.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	414.500.724	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	414.500.724	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	414.500.724	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.643.337.093	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.171.088.370	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.171.088.370	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.171.088.370	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.022.889.019	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	1.022.889.019	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	21.084.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				103 Orang	1.208.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				98 Orang	3.500.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				657 Orang	133.914.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	12.775.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6467 Orang	9.825.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1508 Orang	45.047.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				648 Orang	2.130.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				360 Orang	2.520.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				54 Orang	14.190.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				306 Orang	7.820.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				333 Orang	3.550.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	65.773.500	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	38.640.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	7.285.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	16.932.500	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	19.775.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	78.880.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	10.450.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	407.590.019	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4182 Keluarga	120.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	449.359.704	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	449.359.704	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				19 Orang	449.359.704	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.624.353.934	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.314.300.000	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.314.300.000	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.314.300.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	756.728.750	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	756.728.750	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				223 Orang		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					30.490.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				223 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				612 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1326 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4679 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				964 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1114 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
					Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					537 Orang	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.450.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	13.838.500	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				74 Orang	5.925.000	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3 Orang	2.685.000	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	58.618.500	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	49.700.000	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	9.240.000	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	47.103.000	Kota Yogyakarta, Demangan, Klitren
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen		Kota Yogyakarta, Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					29.510.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	8.300.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	10.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	240.940.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				450 Keluarga	21.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	553.325.184	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	553.325.184	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				19 Orang	553.325.184	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	639.510.851	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	639.510.851	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	639.510.851	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	773.757.740	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	773.757.740	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	20.040.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	16.700.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	2.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				345 Orang	84.085.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5797 Orang	33.473.750	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2317 Orang	38.237.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				858 Orang	29.098.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				417 Orang	4.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				201 Orang	2.250.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				18 Orang	4.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				195 Orang	2.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	3.750.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kesehatan Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	94.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
					Kegiatan Luar biasa (KLB)							Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				88 Dokumen	29.055.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	8.545.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				23 Dokumen	6.400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				45 Dokumen	21.225.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	17.550.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	5.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	339.398.490	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	12.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	403.080.072		
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	403.080.072		
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 Orang	403.080.072	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.033.372.033
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	803.735.080		
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	803.735.080		
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	803.735.080	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupatan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	790.625.953	
1	02	002	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	790.625.953	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			71 Orang	39.450.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			71 Orang	11.375.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			68 Orang	7.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			562 Orang	51.560.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			960 Orang	48.988.400	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2887 Orang	10.025.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1496 Orang	26.366.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			959 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			522 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			38 Orang	32.856.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			378 Orang	14.089.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Anggaran		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				85 Orang	1.290.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	128.915.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	17.580.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	7.672.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				43 Dokumen	6.740.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	19.525.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	17.220.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	3.150.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	257.024.553	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				500 Keluarga	86.400.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	439.011.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	439.011.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
1	02	003	2,02		Memenuhkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15 Orang	439.011.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
	Standar							Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	02	001		81,5 Skala 0-100		80 Skala 0-100	1.955.000.000		
1	02	001	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	12 laporan	1.955.000.000	
1	02	001	2.1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.955.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	80 Skala 0-100	565.008.715	
1	02	002	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	12 laporan	565.008.715	
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	19.740.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	3.900.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168 Orang	2.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795 Orang	60.860.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1677 Orang	27.965.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5221 Orang	8.770.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1881 Orang	30.550.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2040 Orang	1.200.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				716 Orang	1.200.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				65 Orang	18.315.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				414 Orang	10.110.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				248 Orang	1.710.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	91.500.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	72.320.000	Kota Yogyakarta, Jettis, Bumijo
												Kota Yogyakarta, Jettis, Cokrodiningratan
												Kota Yogyakarta, Jettis, Gowongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	13.505.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12.817.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	14.992.310	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	86.100.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	21.170.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	43.784.405	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4007 Keluarga	22.500.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	605.950.284	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	605.950.284	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	605.950.284	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	02	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.344.968.000	
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	002	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	33.500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	19.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	4.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				975 Orang	132.430.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3785 Orang	21.391.280	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3846 Orang	36.930.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2306 Orang	16.866.600	Semua Kab/Kota, Kotagede, Purbayan
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1404 Orang	1.390.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				653 Orang	1.390.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				57 Orang	5.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				340 Orang	1.065.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				276 Orang	480.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	111.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	70.460.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	13.500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	18.450.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12.700.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	60.500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	26.591.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	194.798.506	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
1	02	002	2.02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2200 Keluarga	22.400.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
					Keuarga							Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	460.422.924	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	460.422.924	
1	02	003	2,02	002	Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15 Orang	460.422.924	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.029.331.361	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	950.616.361	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	950.616.361	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	950.616.361	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	774.497.829	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	774.497.829	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	18.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	5.471.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				133 Orang	300.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				547 Orang	33.140.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				758 Orang	6.100.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3425 Orang	620.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1116 Orang	10.280.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				713 Orang	11.950.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				344 Orang	3.950.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	1.410.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	16.725.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				185 Orang	794.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	176.400.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	13.427.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	7.700.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	11.488.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	12.509.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	159.996.440	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	18.325.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	238.912.389	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1600 Keluarga	27.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	304.217.171	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	304.217.171	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	304.217.171	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	02	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD								
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.008.754.901	
1	02	001	2,1			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.008.754.901	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.008.754.901	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	02	002	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	737.931.800	
1	02	002	2,02			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	737.931.800	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				101 Orang	35.955.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				101 Orang	2.500.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				102 Orang	3.800.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	107.650.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1830 Orang	31.170.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4249 Orang	64.435.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan, Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan, Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1826 Orang	56.160.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1016 Orang	4.870.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				526 Orang	4.870.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				51 Orang	21.700.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				343 Orang	5.270.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	3.195.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	37.200.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	65.695.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.534.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	23.390.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	24.625.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	4.260.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	24.665.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	148.987.800	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				6000 Keluarga	66.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	451.724.136	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	451.724.136	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16 Orang	451.724.136	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
1	02	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.831.885.000	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1.831.885.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	02	002	2,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	1.120.800.300	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			251 Orang	57.095.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			239 Orang	4.140.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			228 Orang	5.625.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1112 Orang	155.880.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1686 Orang	49.020.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7924 Orang		Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					9.360.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3361 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1888 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				926 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				79 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				347 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				486 Orang	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	
										76.875.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	56.967.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1.890.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	28.730.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	22.600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	40.583.200	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	24.030.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	518.325.100	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				950 Keluarga	21.600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	424.064.700		
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	424.064.700		
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				14 Orang	424.064.700	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.697.542.044
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.607.550.000		
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.607.550.000		
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.607.550.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	605.449.528		
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	605.449.528		
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	33.260.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	5.800.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	2.175.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				542 Orang		Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					65.910.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan	
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2056 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6512 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1108 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1069 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				379 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
1	02	002	2,02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				440 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					304 Orang	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					800.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	57.600.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				56 Dokumen	56.109.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	10.419.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				29 Dokumen	32.447.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				22 Dokumen	27.765.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7.324.840	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20.075.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	112.947.688	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1190 Keluarga	36.000.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	484.542.516	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	484.542.516	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	484.542.516	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.064.692.228	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	797.017.688	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	797.017.688	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	797.017.688	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	777.997.680	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	777.997.680	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				122 Orang	34.940.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				109 Orang	1.800.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				111 Orang	1.710.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				654 Orang	107.765.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3223 Orang	24.712.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5562 Orang	34.167.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1488 Orang	33.473.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1456 Orang	3.332.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	3.332.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	4.246.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				289 Orang	4.525.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	5.400.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	59.352.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	35.150.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	7.105.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	24.297.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	94.850.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	26.320.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	17.410.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	227.711.680	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1800 Keluarga	26.400.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	489.676.860	
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	489.676.860	
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				16 Orang	489.676.860	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.667.094.430	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	587.063.000	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	587.063.000	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	587.063.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinananti, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	688.124.054	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	688.124.054	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	27.975.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinananti, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	2.900.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinananti, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	1.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinananti, Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	67.700.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	5.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3598 Orang	15.700.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				938 Orang	33.950.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				217 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	2.900.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				167 Orang	3.940.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	2.530.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	93.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	32.205.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	4.820.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	7.874.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	43.125.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	46.400.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	28.545.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	193.660.054	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				410 Keluarga	72.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	391.907.376	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	391.907.376	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	391.907.376	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.210.685.089	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	2.827.119.000	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	2.827.119.000	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	2.827.119.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	0,44 skala 0-1			0,41 skala 0-1	771.636.697	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	771.636.697	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	771.636.697	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				273 Orang		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					51.820.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1.745.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				163.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6.750.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58.045.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				75.459.750	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2974 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1148 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				70 Orang	20.505.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				190 Orang	3.725.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				539 Orang	2.175.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	121.353.250	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	49.065.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
												Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	9.570.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	22.680.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	34.200.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	8.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12.385.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	101.258.697	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	002	2.02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				200 Keluarga	24.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	02	003							Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	003	2,02						Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	003	2,02	002					Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
1	02	003	2,02	002					Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
1	02	003	2,02	002					Kota Yogyakarta, Tegalrejo
1	02	003	2,02	002					Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
1	02	001							
1	02	001							
1	02	001	2,1						
1	02	001	2,1	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
1	02	001	2,1	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
1	02	001	2,1	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,1	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002							
1	02	002	2,02						
1	02	002	2,02	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
1	02	002	2,02	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
1	02	002	2,02	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2,02	001					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	002					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
1	02	002	2,02	002					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
1	02	002	2,02	002					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2,02	002					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	003					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
1	02	002	2,02	003					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
1	02	002	2,02	003					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2,02	003					Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2047 Orang	145.515.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6888 Orang	35.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13231 Orang	9.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3460 Orang	26.110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3480 Orang	3.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
1	02	002	2,02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1252 Orang	5.650.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				118 Orang		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				3.715.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			701 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			304 Orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	24.475.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	1.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	17.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	29.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002	2.02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				9101 Keluarga	24.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	562.088.057	
1	02	003	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	562.088.057	
1	02	003	2.02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				19 Orang		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
	Standar							Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorsutan, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.297.629.301		
1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	1.104.534.250	
1	02	001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		12 laporan	1.104.534.250	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.104.534.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	80 Skala 0-100	748.430.671
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	12 laporan	748.430.671
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 orang	24.516.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96 orang	4.168.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96 orang	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	795 orang	110.823.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4040 orang	41.695.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju, Muju, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1751 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					31.254.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2850 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				630 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				57 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				175 orang	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2,02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					32.710.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	02	002	2,02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	7.848.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki
1	02	002	2,02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	29.291.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	02	002	2,02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	48.062.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	02	002	2,02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	20.955.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki
1	02	002	2,02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	25.608.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	02	002	2,02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	222.216.411	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	02	002	2,02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4395 Keluarga	41.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	444.664.380	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	444.664.380	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				15 orang	444.664.380	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Maja Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	2.507.899.630	
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan			12 laporan	1.387.800.500	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.387.800.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	619.825.630	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	619.825.630	
1	02	002	2,02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				206 Orang	54.095.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2,02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang	6.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2,02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				187 Orang	6.100.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2,02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				962 Orang	87.880.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
1	02	002	2,02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3700 Orang	17.325.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RRPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5622 Orang	42.425.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2717 Orang	51.210.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1157 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				568 Orang	1.450.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	7.695.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				442 Orang	26.075.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				335 Orang	10.275.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	53.400.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
												Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	42.112.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	19.475.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	18.397.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	26.950.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	50.277.380	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	29.810.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	45.823.750	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	002	2.02	039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				35 Keluarga	21.600.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	500.273.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	003	2,02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	500.273.500	
1	02	003	2,02	002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				17 Orang	500.273.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	19.571.678.838	
1	02	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama	dokumen			8 dokumen	20.750.000	
1	02	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	20.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama	dokumen			2 dokumen	16.000.000	
1	02	001	2,05	005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	16.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama	laporan			12 laporan	2.040.000.000	
1	02	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.040.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama	laporan			12 laporan	141.300.000	
1	02	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	141.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	laporan			12 laporan	17.353.628.838	
1	02	001	2,1	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	17.353.628.838	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	02	002		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	81,5 skala 1-100			80 skala 1-100	13.000.000.000	
1	02	002	2,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit			13 unit	13.000.000.000	
					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket			7 paket		
					Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket			2 paket		
					Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket			2 paket		
					Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	paket			9 paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	02	002	2,01	008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	11.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	02	002	2,01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	1.000.000.000	Kota Yogyakarta, Mengangsan, Brontokusuman	
1	02	002	2,01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	400.000.000	Kota Yogyakarta, Mengangsan, Brontokusuman	
1	02	002	2,01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				12 Paket	300.000.000	Kota Yogyakarta, Mengangsan, Brontokusuman	
1	02	002	2,01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				24 Unit	300.000.000	Kota Yogyakarta, Mengangsan, Brontokusuman	
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	81,5 skala 0-100			80 skala 0-100	5.342.408.189		
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	laporan			12 laporan	5.342.408.189		
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				301 Orang	5.342.408.189	Kota Yogyakarta, Mengangsan, Brontokusuman	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1.425.290.116
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %			100 %	405.628.575		
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 laporan			12 laporan	405.628.575		
1	02	002	2,02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	355.495.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	02	002	2,02	038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	50.133.575	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %			100 %	1.019.661.541		
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta	33 laporan			33 laporan	1.019.661.541		
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				33 Orang	1.019.661.541	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								7.065.598.619
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61 %			46 %	6.955.204.379		
1	02	002	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan	12 laporan			12 laporan	6.411.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
1	02	002	2,01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				30 Unit	6.359.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	002	2,01	019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	20.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	002	2,01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	32.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	12 dokumen			12 dokumen	543.704.379			
1	02	002	2,02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	494.454.379	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	002	2,02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	49.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61 %			46 %	110.394.240			
1	02	003	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	8 laporan			6 laporan	110.394.240			
1	02	003	2,02	002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	110.394.240	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								150.746.557.230	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai			A Nilai	112.571.557.230			
1	02	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RSUD Kota Yogyakarta	dokumen			5 dokumen	5.998.000			
1	02	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.998.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		
1	02	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan			12 laporan	6.000.000			
1	02	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	6.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		
1	02	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen			3 dokumen	3.000.000			
1	02	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		
1	02	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket			1 paket	448.455.610			
					Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	paket			2 paket					
1	02	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	02	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	248.645.610	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan			12 laporan	14.072.601.600	
						Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan			12 laporan		
1	02	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.671.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	11.401.401.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket			1 paket	2.051.917.500	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			11 unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			3 unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			200 unit		
1	02	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	41.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	88.917.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	120.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	1.802.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit			1 unit	95.983.584.520	
1	02	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	95.983.584.520	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasionalkan secara optimal	81 %			80,25 %	38.175.000.000	
						Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	83 %			80 %		
1	02	002	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit			13 unit	37.800.000.000	
						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket			11 paket		
						Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	paket			2 paket		
						Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket			2 paket		
						Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	paket			1 paket		
						Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	unit			1 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	02	002	2,01	008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	2.600.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 paket	4.200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				11 paket	17.500.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 paket	7.000.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,01	017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				2 paket	4.000.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				13 paket	2.500.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	dokumen			2 dokumen	50.000.000		
1	02	002	2,02	032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 dokumen	50.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1	02	002	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit			9 unit	325.000.000		
1	02	002	2,03	003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				9 unit	325.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							115.459.120.280	
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai			A Nilai	20.242.874.198		
1	03	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPUPKP	3 Dokumen			3 Dokumen	175.163.210		
1	03	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	16.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	14.626.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	144.286.460	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP	26 Laporan			26 Laporan	16.038.700.848		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	16.027.680.848	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	11.020.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP	19 Laporan			19 Laporan	662.195.500	
1	03	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.045.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	315.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	120.980.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	211.820.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit			4 Unit	766.533.000	
1	03	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	344.928.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	421.605.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan			36 Laporan	1.241.221.640	
1	03	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	14.430.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	246.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	980.791.640	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	169 Unit			169 Unit	1.359.060.000	
1	03	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	51.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 Unit	949.110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	68.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	275.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	94,00 %			92,50 %	5.971.688.395	
1	03	002	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi	0.2 km			0.3 km	5.050.681.595	
						Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	0.6 km			0.6 km		
1	03	002	2,01	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.1 KM	1.153.597.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	002	2,01	024	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.2 KM	2.104.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	002	2,01	053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	1.792.764.095	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	002	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 km			1 km	921.006.800	
1	03	002	2,02	021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	921.006.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	92,00 %			90,50 %	6.005.000	
1	03	003	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Unit			1 Unit	6.005.000	
1	03	003	2,01	010	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				1 Badan Usaha	6.005.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	89,00 %			88,00 %	5.121.518.040	
						Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	90,00 %			60,00 %		
						Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,90 %			15,42 %		
1	03	005	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 SR			100 SR	5.121.518.040	
						Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	200 SR			157 SR		
						Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	18 Unit			7 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	005	2,01	003	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				157 Rumah Tangga	3.316.643.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	005	2,01	004	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				100 Rumah Tangga	1.804.875.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	7,00 %			5,50 %	12.780.063.280	
1	03	006	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1200 m			1150 m	12.780.063.280	
						Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	10.000 m			10 m		
1	03	006	2,01	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1150 M	9.766.926.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	006	2,01	009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				10000 M	3.013.136.480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	93,00 %			91,49 %	22.241.118.140	
						Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	94,00 %			91,00 %		
1	03	008	2,01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	Unit			7 Unit	22.241.118.140	
						Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung	Dokumen			12 Dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen			9 Dokumen		
1	03	008	2,01	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				12 Dokumen	1.069.345.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	008	2,01	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	758.111.640	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	008	2,01	012	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				7 Unit	20.413.661.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	94,49 %			93,89 %	13.452.290.800	
1	03	009	2,01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan			4 kawasan	13.452.290.800	
						Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan			4 kawasan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	009	2,01	003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	9.641.472.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	009	2,01	004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				4 Kawasan	3.810.818.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelekang jalan	92,75 %			92,00 %	11.178.761.027	
1	03	010	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	10.2 km			9.1 km	11.178.761.027	
						Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	6.8 km			0.726 km		
1	03	010	2,01	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.726 KM	3.958.791.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	010	2,01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				9.1 KM	6.478.811.927	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	010	2,01	019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				100 M	741.158.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	57,20 %			51,80 %	464.801.400	
1	03	011	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan konstruksi	630 Orang			440 Orang	227.799.400	
1	03	011	2,01	004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				120 Orang	84.639.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	011	2,01	006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				120 Orang	72.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	011	2,01	007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200 Orang	71.160.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	011	2,02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	13 Laporan			13 Laporan	237.002.000	
1	03	011	2,02	001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 Laporan	81.152.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	011	2,02	008	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	155.850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	03	013			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00 %			100,00 %	24.000.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	013	5,02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	2 Dokumen			2 Dokumen	24.000.000.000	
						Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1 Dokumen			1 Dokumen		
						Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2 Dokumen			2 Dokumen		
1	03	013	5,02	001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				2 Dokumen	19.000.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan
1	03	013	5,02	014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton				2 Dokumen	5.000.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.456.188.000	
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00 %			100,00 %	97.000.000	
						Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	99,00 %			96,00 %		
1	04	002	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen			1 Dokumen	97.000.000	
1	04	002	2,01	001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	97.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	28,37 %			20,52 %	5.359.188.000	
1	04	003	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	7 Dokumen			4 Dokumen	5.359.188.000	
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	130 Unit Rumah			140 Unit Rumah		
1	04	003	2,03	001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				4 Dokumen	395.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	04	003	2,03	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				140 Unit Rumah	4.963.588.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						25.000.000.000	
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	93,20 %			75,92 %	25.000.000.000	
2	15	002	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	26.672 Unit			21.272 Unit	25.000.000.000	
2	15	002	2,02	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara				21272 Unit	25.000.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.382.290.800	
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00 %			100,00 %	1.382.290.800	
						Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	99,00 %			96,00 %		
1	04	002	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	3 Dokumen			3 Dokumen	1.382.290.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	04	002	2,05	002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3 Dokumen	1.382.290.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3.642.242.580		
1	03	005			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	89,00 %			88,00 %	3.642.242.580		
						Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	90,00 %			60,00 %			
						Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,90 %			15,42 %			
1	03	005	2,01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 SR			100 SR	3.642.242.580		
						Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	200 SR			157 SR			
						Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	18 Unit			7 Unit			
1	03	005	2,01	010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				7 Unit	3.642.242.580	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						8.426.117.696		
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai			A Nilai	6.241.892.496		
1	03	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen			30 Dokumen	30.132.000		
1	03	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.776.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.994.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.094.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.574.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.574.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	14.804.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.316.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan			31 Laporan	5.072.687.040		
1	03	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	5.024.501.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	3.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.274.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	34.653.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	493.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17 Laporan			17 Laporan	11.301.000	
1	03	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.794.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.431.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.805.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.139.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 Dokumen			1 Dokumen	1.566.000	
1	03	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan			100 Laporan	217.432.310	
1	03	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.080.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.110.310	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	27.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	170.110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,06	010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3.132.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit			100 Unit	340.209.690	
1	03	001	2,07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	223.753.840	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	116.455.850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan			29 Laporan	180.139.756	
1	03	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	7.105.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	168.834.756	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit			56 Unit	388.424.700	
1	03	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	26.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	116.425.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	03	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	4.475.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	40.824.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	77,69 %			76,00 %	2.184.225.200	
						Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	90,13 %			88,67 %		
1	03	012	2,01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen			2 Dokumen	452.164.120	
						Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen			750 Dokumen		
1	03	012	2,01	003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	228.206.080	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,01	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				750 Dokumen	223.958.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen			4 Dokumen	946.240.000	
						Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen			2 Dokumen		
1	03	012	2,02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				4 Dokumen	741.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,02	003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Dokumen	204.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen			1 Dokumen	487.883.040	
						Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen			1 Dokumen		
1	03	012	2,03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	336.303.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,03	002	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	151.580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	03	012	2,04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen			6 Dokumen	297.938.040	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	03	012	2,04	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				2 Dokumen	38.580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	012	2,04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				3 Dokumen	195.660.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	03	012	2,04	004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	63.698.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												3.942.213.024	
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan	100 %			100 %	180.257.000		
2	10	004	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen			3 Dokumen	180.257.000		
2	10	004	2,01	001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	180.257.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	10	005			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	100 %			98,27 %	1.589.900.164		
2	10	005	2,01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen			1 Dokumen	1.589.900.164		
2	10	005	2,01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.589.900.164	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	10	008			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	97,69 %			91,67 %	699.089.820		
2	10	008	2,02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan			6 Laporan	699.089.820		
2	10	008	2,02	001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				6 Laporan	699.089.820	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	10	010			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	100 %			50,00 %	78.613.040		
2	10	010	2,01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	2 Laporan			2 Laporan	78.613.040		
2	10	010	2,01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	78.613.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	10	011			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %			25,00 %	1.394.353.000		
						Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %			25,00 %			
2	10	011	5,01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen			4 Dokumen	1.003.831.000		
						Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen			2 Dokumen			
2	10	011	5,01	001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				4 Dokumen	898.081.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	10	011	5,01	004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	105.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	10	011	5,02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara			2 Berita Acara	390.522.000	
						Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen			1 Dokumen		
2	10	011	5,02	001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				1 Dokumen	315.661.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	10	011	5,02	002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				2 Berita Acara	74.861.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											40.264.730.740	
1 05 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja	A Nilai			A Nilai	18.839.034.924	
1 05 001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	15 dokumen			15 dokumen	36.545.132	
1	05	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.066.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	321.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	178.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	321.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	178.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	32.479.132	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	8 laporan			8 laporan	16.931.647.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174 Orang/bulan	16.928.276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	512.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	512.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	512.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	417.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	417.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai	6 laporan			6 laporan	7.500.000	
1	05	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen			2 dokumen	197.580.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	196.240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.340.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan			5 laporan	453.314.292	
1	05	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9.660.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	128.703.752	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	19.675.230	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	95.244.810	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	197.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan			3 laporan	211.768.000	
1	05	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	198.968.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai	4 laporan			4 laporan	1.000.680.000	
1	05	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	154.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	737.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	47.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	100 %			86,24 %	21.425.695.816	
						Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %			100 %		
						Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	97,50 %			97,00 %		
						Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	99,00 %			99,00 %		
1	05	002	2,01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlimas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme	100 orang			100 orang	11.323.451.504	
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas	24 dokumen			24 dokumen		
						Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja	208 dokumen			156 dokumen		
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen			12 dokumen		
						Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup	36 kasus			36 kasus		
						Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta	orang			100 orang		
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 laporan			1 laporan		
1	05	002	2,01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			170 Kasus	7.538.281.696	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			36 Kasus	165.686.272	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			24 Dokumen	95.426.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Dokumen	1.746.740.408	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			100 Orang	278.301.132	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan			156 Dokumen	1.351.515.996	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,01	009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			1 Laporan	147.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi	12 laporan			12 laporan	10.095.244.312	
						Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi	12 laporan			12 laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	05	002	2,02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				6 Laporan	12.990.000		
1	05	002	2,02	002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 Laporan	9.749.403.464	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,02	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				12 Laporan	332.850.848	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1	05	002	2,03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS	1 laporan			1 laporan	7.000.000		
1	05	002	2,03	001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	7.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.880.207.045	
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai			A Nilai	7.740.562.357		
1	05	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat	36 dokumen			36 dokumen	34.140.000		
1	05	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	6.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	6.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat	44 laporan			44 laporan	6.459.513.000		
1	05	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	6.443.933.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	4.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.980.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat	7 laporan			7 laporan	13.484.200	
1	05	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.020.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.740.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.304.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat	1 dokumen			1 dokumen	3.720.000	
1	05	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3.720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat	23 laporan			23 laporan	203.404.600	
1	05	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.382.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	19.922.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	173.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah	30 laporan			30 laporan	513.725.557	
1	05	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	222.005.557	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	280.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	136 unit			136 unit	512.575.000	
1	05	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				114 Unit	34.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	154.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	123.425.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase edukasi proteksi kebakaran	98,80 %			98,20 %		
						Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai responstime (15 menit dalam kota)	100,00 %			100,00 %		
						Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100,00 %			100,00 %		7.139.644.688
1	05	004	2,01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Ruang Kebakaran Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evaluasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	360 dokumen			360 dokumen		
						Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah	1 dokumen			2 dokumen		6.238.643.688

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
					Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	360 laporan			360 laporan		
1	05	004	2,01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya			1 Dokumen	2.008.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			360 Laporan	2.692.404.080	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,01	003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			360 laporan	253.317.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,01	004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			4 Dokumen	41.602.008	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,01	006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			81 Unit	979.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,01	007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			81 Orang	263.820.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	81 dokumen		81 dokumen	251.316.000		
1	05	004	2,02	001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			60 Dokumen	131.116.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,02	002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			1 Dokumen	120.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	4 dokumen		4 dokumen	30.520.000		
1	05	004	2,03	001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian			4 Dokumen	30.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2000 orang		2000 orang	619.165.000		
1	05	004	2,04	001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			2000 Orang	358.615.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	05	004	2,04	002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			45 Desa/Kelurahan	260.550.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									10.812.958.215	
1	05	001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A Nilai			A Nilai	5.146.075.979	
1	05	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	46 Dokumen		46 Dokumen	398.553.040	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	354.013.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	05	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.980.000	
1	05	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.980.000	
1	05	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	32.580.000	
1	05	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	56 Laporan			56 Laporan	3.584.146.000	
1	05	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.560.656.000	
1	05	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	9.570.000	
1	05	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	2.610.000	
1	05	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	9.570.000	
1	05	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.740.000	
1	05	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 Laporan			6 Laporan	299.271.979	
1	05	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	3.340.000	
1	05	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	62.761.015	
1	05	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	32.005.964	
1	05	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	32.392.000	
1	05	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.556.000	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	05	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	166.217.000	
1	05	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan			3 Laporan	325.789.960	
1	05	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.200.000	
1	05	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	29.400.000	
1	05	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	294.189.960	
1	05	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 Unit			60 Unit	538.315.000	
1	05	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	126.740.000	
1	05	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	177.745.000	
1	05	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	18.830.000	
1	05	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	215.000.000	
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	83,09 %			74,65 %	5.666.882.236	
						Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100,00 %			100,00 %		
						Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00 %			100,00 %		
1	05	003	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	6 Dokumen			6 Dokumen	3.369.538.220	
						Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	20 Kawasan			23 Kawasan		
						Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	40 Orang			40 Orang		
1	05	003	2,02	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				425 Orang	281.775.000	
1	05	003	2,02	003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				6 Dokumen	1.890.041.640	
1	05	003	2,02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				10 Kawasan	1.102.381.580	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
1	05	003	2,02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				40 Orang	95.340.000			
1	05	003	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 Orang 100 Orang			100 Orang 100 Orang	1.410.424.016			
1	05	003	2,03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	1.028.654.016			
1	05	003	2,03	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	381.770.000			
1	05	003	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 Laporan			3 Laporan	886.920.000			
1	05	003	2,04	006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				3 Dokumen	886.920.000			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								21.011.370.477	
1	06	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14.626.153.977	
1	06	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	A Nilai 18 dokumen			A Nilai 18 dokumen	85.591.880			
1	06	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	17.260.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.591.232	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.609.668	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	62.390.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	06	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	13 dokumen			13 dokumen	11.026.105.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	11.022.955.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	41 laporan			41 laporan	24.820.000	
1	06	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	15.760.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.080.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	213 dokumen			213 dokumen	5.220.000	
1	06	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				213 Dokumen	5.220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72 laporan			72 laporan	778.944.061	
1	06	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.729.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	160.437.621	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	45.998.180	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.483.760	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	6.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106 Laporan	526.395.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 unit			6 unit	189.490.600	
1	06	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	90.616.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	98.873.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah	36 laporan			36 laporan	2.054.490.936	
1	06	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.954.290.936	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	64 unit			64 unit	461.491.500	
1	06	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.110.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	326.156.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	8.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	54.100.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	92,84 %			90,25 %	620.861.720	
1	06	002	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	6 lembaga			6 lembaga	620.861.720	
1	06	002	2,03	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	55.723.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	002	2,03	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	189.490.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	002	2,03	003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Keluarga	31.920.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	002	2,03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	343.728.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	96,77 %			87,10 %		
						Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	56,41 %			56,41 %		
						Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %			100 %		
						Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	92,11 %			88,16 %	1.655.935.640	
						Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	48,34 %			44,20 %		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	100 %			66,67 %		
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan ke darurat sosial	100 %			100 %		
1	06	004	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	360 orang			360 orang		
						Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJIO)	30 orang			30 orang		
						Jumlah kelompok masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP	362 orang			362 orang	1.211.340.150	
						Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	76 orang			70 orang		
						Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	330 orang			330 orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	004	2,01	003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	27.915.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,01	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				3620 Orang	669.590.810	
1	06	004	2,01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				260 Orang	120.599.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,01	007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	10.176.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,01	008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	361.314.220	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,01	011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2.420.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,01	012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	19.325.000	
1	06	004	2,02	002	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang			500 orang	444.595.490	
						Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang tertangani	45 orang			45 orang		
						Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	195 orang			195 orang		
1	06	004	2,02	002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	138.321.370	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	004	2,02	007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	242.278.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	004	2,02	010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	63.996.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	90,33 %			88,58 %	2.748.132.020	
1	06	005	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen 33368 keluarga			5 dokumen 32438 keluarga	2.748.132.020	
1	06	005	2,02	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				144101 Orang	1.662.426.280	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	005	2,02	003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				32078 Keluarga	919.080.740	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	005	2,02	004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	166.625.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %			100 %	1.360.287.120	
1	06	006	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1000 orang			1000 orang	1.001.446.120	
1	06	006	2,01	001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungusian) Kewenangan Kabupaten/Kota				8000 Orang	1.000.006.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	006	2,01	004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	720.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	006	2,01	005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	720.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	006	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana	3 organisasi sosial			3 organisasi sosial	358.841.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
1	06	006	2,02	001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	2.160.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	06	006	2,02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	356.681.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												4.240.577.660
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												232.793.250
2	07	002			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	70,08 %			67,51 %	232.793.250	
2	07	002	2,01			Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen			1 dokumen	232.793.250	
2	07	002	2,01	001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	232.793.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												1.522.344.260
2	07	003	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	320 orang			320 orang	1.373.842.260	
2	07	003	2,01	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				304 Orang	1.373.842.260	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												113.972.000
2	07	003	2,02	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	51 LPK			51 LPK	113.972.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil												34.530.000
2	07	003	2,04	001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan/UKM/KM			40 perusahaan/UKM/KM	34.530.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												1.297.519.800
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota												1.122.033.050
2	07	004	2,01	003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	18.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	004	2,01	004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				604 orang	17.360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	004	2,01	005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				304 Orang	1.086.223.050	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	004	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	1350 orang			1350 orang	175.486.750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	07	004	2,03	002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				200 Orang	83.876.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	004	2,03	003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1350 orang	91.610.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	46,01 %			40,33 %	1.187.920.350	
2	07	005	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perjanjian kerja di perusahaan	517 perusahaan			423 perusahaan	339.061.250	
						Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah	42,26 %			39,26 %		
2	07	005	2,01	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				25 Perusahaan	18.996.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	005	2,01	002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				15 Perusahaan	13.987.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	005	2,01	003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				362 Laporan	306.078.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	005	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial	18 perkara			24 perkara	848.859.100	
						Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	42,26 %			39,26 %		
2	07	005	2,02	001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				4 Perkara	230.425.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	07	005	2,02	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan				24 Perkara	21.378.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
2	07	005	2.02	003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2 Organisasi	144.318.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	07	005	2.02	004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	84.516.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	07	005	2.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				159 Orang	368.221.850	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								222.276.715	
3	32	003			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
3	32	003	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penempatan transmigran	100 %			100 %	222.276.715			
3	32	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 laporan	52.940.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	32	003	2.01	004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				8 kepala keluarga	41.478.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	32	003	2.01	006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 orang	43.858.675	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	32	003	2.01	007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				8 Kepala Keluarga	84.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								1.544.010.584	
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	06	004	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %			100 %	1.544.010.584			
1	06	004	2.01	001	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	76 orang			70 orang	1.544.010.584			
1	06	004	2.01	001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	848.251.360	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangsan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
1	06	004	2,01	002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	106.063.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangon	
1	06	004	2,01	004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangon	
1	06	004	2,01	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	587.296.224	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangon	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									832.159.720		
1	06	004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	96,77 %		87,10 %	832.159.720	
1	06	004	2,01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJIO)	30 orang	30 orang	832.159.720	
1	06	004	2,01	001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	353.443.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
1	06	004	2,01	002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	67.970.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
1	06	004	2,01	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	53.500.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
1	06	004	2,01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	162.126.720		
1	06	004	2,01	008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	195.120.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									10.861.688.480		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A Nilai			A Nilai	7.742.082.310	
2	08	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 dokumen			30 dokumen	33.289.750	
2	08	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	9.198.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.605.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.410.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	3.016.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	08	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	44 laporan			44 laporan	6.193.506.750	
2	08	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	6.180.333.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	7.576.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	572.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	675.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	2.790.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	3 laporan			3 laporan	19.238.500	
2	08	001	2.03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.210.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2.03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	2.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.060.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.210.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.458.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen			2 dokumen	2.500.000	
2	08	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	8 laporan			8 laporan	141.569.214	
2	08	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.557.150	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.646.318	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.595.665	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	33.360.081	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.750.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah selesai	3 laporan			3 laporan	642.963.599	
2	08	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	520.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.080.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	628.663.599	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	56 unit			56 unit	709.014.497	
2	08	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	100.310.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	163.715.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	126.263.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	318.726.497	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	83,00 %			78,89 %	783.273.171	
2	08	002	2,01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	2 dokumen			2 dokumen	113.080.000	
2	08	002	2,01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	97.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	002	2,01	004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Perangkat Daerah	15.960.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	002	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota	2 dokumen			2 dokumen	163.913.090	
2	08	002	2,02	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	27.423.860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	002	2,02	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Organisasi	136.489.230	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	002	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	3 dokumen			3 dokumen	506.280.081	
2	08	002	2,03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				120 Orang	495.360.126	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	002	2.03	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	10.919.955	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91 %			88 %	139.950.000	
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 dokumen			2 dokumen	75.225.000	
2	08	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	75.225.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 orang			210 orang	64.725.000	
2	08	003	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				210 Orang	64.725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	888-910 Skala 0-1000			822-844 Skala 0-1000	1.342.098.954	
2	08	006	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	173 organisasi			143 organisasi	1.260.944.011	
2	08	006	2.01	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				143 Organisasi	1.171.533.011	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	006	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	89.411.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 dokumen			1 dokumen	81.154.943	
2	08	006	2.02	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	81.154.943	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100 %			100 %	854.284.045	
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	5 lembaga			5 lembaga	751.978.045	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	007	2,01	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	252.967.620	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007	2,01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	499.010.425	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007	2,03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 dokumen			1 dokumen	102.306.000	
2	08	007	2,03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	102.306.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						4.386.331.510	
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	100 %			65 %	292.634.950	
2	14	002	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	53 organisasi			25 organisasi	131.839.120	
2	14	002	2,01	009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				24 Satuan Pendidikan	23.630.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	002	2,01	013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Organisasi	108.209.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	002	2,02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan	3 dokumen			3 dokumen	160.795.830	
2	14	002	2,02	008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				28 Unit	4.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	002	2,02	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	12.680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	14	002	2,02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	143.290.830	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	51,60 %			50,70 %		
						Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	100 %			53,33 %		
						Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	22 %			24,12 %		2.320.962.440
2	14	003	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal	6 dokumen			6 dokumen	484.468.040	
2	14	003	2,01	001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	4.375.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,01	002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	25.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	70.640.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,01	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	218.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,01	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	81.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,01	008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	85.053.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	14	003	2,02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 orang			662 orang	216.000.000	
2	14	003	2,02	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	216.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota	4 dokumen			4 dokumen	1.154.744.400	
2	14	003	2,03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	28.350.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2066 Orang	629.194.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,03	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Jenis	475.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	22.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	003	2,04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepedulikan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 kampung			45 kampung	465.750.000	
2	14	003	2,04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kepedulikan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				45 Kampung	465.750.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	8 %			5 %	1.772.734.120	
2	14	004	2,01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 laporan			3 laporan	1.638.894.120	
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Unit		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi			
2	14	004	2,01	002	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			275.000.000			
2	14	004	2,01	003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		5 Laporan	115.694.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	14	004	2,01	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		495 Orang	1.248.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	14	004	2,02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 laporan	2 laporan	133.840.000		
2	14	004	2,02	002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		5 Laporan	103.195.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	14	004	2,02	004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan	30.645.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				706.307.651		
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91 %		88 %	564.058.651	
2	08	003	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	564.058.651		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	08	003	2,02	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	324.023.651	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	003	2,02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	240.035.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100 %			100 %	142.249.000	
2	08	007	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota	40 orang			40 orang	142.249.000	
2	08	007	2,02	001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	17.415.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007	2,02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Layanan	114.170.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	08	007	2,02	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	10.663.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.658.105.233	
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai			A Nilai	12.593.273.343	
2	09	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	16 dokumen			16 dokumen	19.792.500	
2	09	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5.692.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	820.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	820.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	09	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	4.455.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.365.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan	7 laporan			7 laporan	9.763.232.195	
2	09	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	9.757.449.695	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	110.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	995.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	727.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.535.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	440.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan	6 laporan			6 laporan	5.760.000	
2	09	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.740.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	09	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	560.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan	1 dokumen			1 dokumen	1.600.000	
2	09	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	5 jenis			5 jenis	256.215.492	
2	09	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.161.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	66.520.292	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.326.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.647.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	4.950.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	144.010.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 jenis			6 jenis	104.865.380	
2	09	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	40.005.380	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	64.860.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis			3 jenis	1.589.782.776	
2	09	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	09	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.582.682.776	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 jenis			5 jenis	852.025.000	
2	09	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	24.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	187.835.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	4.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	54.040.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	582.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	55,56 %			28,88 %	623.017.196	
2	09	002	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	25 kawasan			13 kawasan	623.017.196	
2	09	002	2,01	003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				10 Unit	623.017.196	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	2626,9 kkal/kapita/hari			2611,9 kkal/kapita/hari		
						Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	100 %			54,21 %	1.007.923.268	
2	09	003	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	5 dokumen			5 dokumen	548.613.268	
2	09	003	2,01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				13 Laporan	106.376.984	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,01	002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	427.233.820	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,01	004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	15.002.464	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	120 ton			65,05 ton	205.160.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	09	003	2,02	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	13.010.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,02	003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18.3 Ton	192.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 dokumen			2 dokumen	254.150.000	
2	09	003	2,04	001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	74.730.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	003	2,04	002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	179.420.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	004			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	0 wilayah			3 wilayah	97.592.376	
2	09	004	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah informasi kerawanan pangan	1 dokumen			1 dokumen	97.592.376	
2	09	004	2,01	00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	97.592.376	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	005			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi	53.10 %			26.55 %	336.299.050	
2	09	005	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	12 laporan			12 laporan	336.299.050	
2	09	005	2,01	001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	64.518.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	005	2,01	003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31.722.930	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	09	005	2,01	005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	240.058.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						799.763.388	
3	25	004			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin	2.25 %			1.27 %	752.565.888	
3	25	004	2,02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin	18 orang			9 orang	363.371.600	
3	25	004	2,02	002	Relaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				71 Kelompok	150.401.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	004	2,02	004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				6 Kelompok	212.970.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	004	2,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan	95000 ekor			80000 ekor	389.194.288	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	25	004	2,04	002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	389.194.288	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	25	006			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi ikan	35.55 Kg/Kapita/Tahun			35.46 Kg/Kapita/Tahun	47.197.500	
3	25	006	2,02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat	5 jenis			5 jenis	47.197.500	
3	25	006	2,02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				19 Unit Usaha	47.197.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.239.016.005	
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	7.08 %			2.06 %		
						Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	66.67 %			41.67 %	908.680.358	
						Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100 %			100 %		
3	27	002	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	130 petani			130 petani	18.153.000	
3	27	002	2,01	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	18.153.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	002	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel	24 varietas			7 varietas	874.706.038	
3	27	002	2,02	001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				317 VUB	770.363.538	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	002	2,02	002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	104.342.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	002	2,04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi	40 unit usaha			25 unit usaha	15.821.320	
3	27	002	2,04	001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 Laporan	15.821.320	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	24 unit			22 unit	101.774.000	
3	27	003	2,02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	23 unit			18 unit	101.774.000	
3	27	003	2,02	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	101.774.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	90.38 %			61.54 %	1.285.854.742	
						Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	48.72 %			22.49 %		
3	27	004	2,01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali	21 jenis			21 jenis	57.844.710	
3	27	004	2,01	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	57.844.710	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	27	004	2,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner	16118 tindakan			14138 tindakan	236.528.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
3	27	004	2,03	002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	236.528.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	004	2,04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan	2 jenis			2 jenis	991.482.032			
						Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan	4 laporan			4 laporan				
3	27	004	2,04	002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				24 Laporan	365.893.380	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	004	2,04	003	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				12 Laporan	383.087.112	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	004	2,04	004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	242.501.540	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100 %			100 %	200.482.825			
3	27	005	2,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	5 jenis			5 jenis	200.482.825			
3	27	005	2,01	004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	200.482.825	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	49.11 %			27.55 %	742.224.080			
3	27	007	2,01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut	96 kelompok			84 kelompok	742.224.080			
3	27	007	2,01	001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	143.921.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	007	2,01	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	579.703.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	27	007	2,01	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				14 Unit	18.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							53.040.019.964		
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai			A Nilai	22.856.054.729			
2	11	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	28 dokumen			28 dokumen	43.197.000			
2	11	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.772.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		
2	11	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	2.701.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		
2	11	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	36.723.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan		
2	11	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1255 dokumen			1255 dokumen	21.084.703.070			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	11	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/bulan	21.079.093.070	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	630.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	2.610.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	470.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	460.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan			5 laporan	297.694.715	
2	11	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.258.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	137.040.465	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.146.250	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	137.050.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan			3 laporan	1.224.859.944	
2	11	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.750.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	11	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	102.840.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1.119.269.944	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Pengkabelan selesai	150 unit			150 unit	205.600.000	
2	11	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	155.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %			25 %	550.000.000	
2	11	002	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen			1 dokumen	350.000.000	
2	11	002	2,01	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	350.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	002	2,02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	
					Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	%			100 %			
					Terusunnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	%			100 %			
2	11	002	2,02	002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	200.000.000	
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	100 %			100 %	1.720.910.884	
					Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	73.10 %			71.30 %			
2	11	003	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen			3 dokumen	189.390.084	
					Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	5 dokumen			5 dokumen			
2	11	003	2,01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	189.390.084	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	003	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 dokumen			4 dokumen	1.531.520.800	
2	11	003	2,03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				4 Dokumen	1.531.520.800	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,557 %			23,548 %	7.690.179.928	
2	11	004	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	3.06 Ha			2.76 Ha	7.690.179.928	
					Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	76.7 Ha			76.7 Ha			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	11	004	2,01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2.76 Ha	2.464.577.645	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	004	2,01	005	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				76.7 Ha	5.225.602.283	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swpantau Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19,00 % 82,03 % 21,08 %			8,00 % 80,77 % 15,58 %	628.405.744	
2	11	006	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	323 dokumen 26 laporan 156 dokumen			215 dokumen 24 laporan 56 dokumen	628.405.744	
2	11	006	2,01	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				56 Dokumen	394.172.576	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	006	2,01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				24 Laporan	67.711.108	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	006	2,01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				215 Dokumen	166.522.060	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	10,50 %			10,50 %	1.501.815.560	
2	11	008	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	43 lembaga			43 lembaga	1.501.815.560	
2	11	008	2,01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				43 Lembaga	1.501.815.560	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi Persentase sampah yang tertangani	19,20 % 80,50 %			15,00 % 84,60 %	18.092.653.119	
2	11	011	2,01		Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	8 laporan 274.91 ton/hari			8 laporan 284.35 ton/hari	18.092.653.119	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	11	011	2,01	001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	46.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011	2,01	002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				4 Laporan	164.177.250	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011	2,01	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				284.35 Ton/hari	12.963.794.025	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011	2,01	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	1.095.881.544	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011	2,01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				7 Dokumen	3.223.085.300	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	011	2,01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				57 Unit	599.565.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												390.136.128
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	100 %			100 %	390.136.128	
						Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	73.10 %			71.30 %		
2	11	003	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen			3 dokumen	390.136.128	
						Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	5 dokumen			5 dokumen		
2	11	003	2,01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				5 Dokumen	390.136.128	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												2.618.000.682
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai			A Nilai	2.618.000.682	
2	11	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 laporan			1 laporan	2.750.000	
2	11	001	2,05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2.750.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
2	11	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan			5 laporan	106.605.250	
2	11	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	89.385.250	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
2	11	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17.220.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
2	11	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan			3 laporan	262.612.872		
2	11	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	262.612.872	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
2	11	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Pengkabelan selesai	150 unit			150 unit	2.246.032.560		
2	11	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				141 Unit	2.246.032.560	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							8.918.819.977	
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai			A Nilai	6.645.470.763		
2	12	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen			7 dokumen	15.640.000		
2	12	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	630.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	12	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan			7 laporan	5.767.108.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	12	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	5.765.848.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 laporan			6 laporan	1.060.000	
2	12	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan			1 laporan	120.000	
2	12	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	12	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan			5 laporan	282.660.133	
2	12	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.183.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	171.257.690	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.213.443	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	78.286.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis			7 jenis	31.337.900	
2	12	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31.337.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan			3 laporan	256.085.330	
2	12	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	26.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	7.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	222.085.330	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit			108 unit	291.459.400	
2	12	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	105.745.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	79.634.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,09	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	86.079.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	001	2,09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	002		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	96,32 %			95 %	1.210.443.884	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	12	002	2,01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60010 dokumen			60010 dokumen	1.135.095.484	
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	7370 dokumen			7135 dokumen		
2	12	002	2,01	001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				35 Dokumen	11.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	002	2,01	002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6005 Dokumen	991.631.674	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	12	002	2,01	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	94.145.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	12	002	2,01	005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				7100 Dokumen	37.618.560	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	12	002	2,03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan			14 laporan	75.348.400	
2	12	002	2,03	005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				14 Laporan	75.348.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,86 %			95 %	613.708.210	
2	12	003	2,01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen			550 dokumen	461.608.210	
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10000 layanan			10000 layanan		
2	12	003	2,01	001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				550 Dokumen	132.886.705	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	003	2,01	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layanan	328.721.505	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	12	003	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan			5 laporan	152.100.000	
2	12	003	2,02	008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	152.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %			100 %	449.197.120	
2	12	004	2,01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	2 Dokumen			2 Dokumen	8.400.000	
2	12	004	2,01	002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	8.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	12	004	2,03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	5 dokumen			5 dokumen	440.797.120	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4 laporan			4 laporan				
2	12	004	2.03	003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	247.077.120	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
2	12	004	2.03	004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	4.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
2	12	004	2.03	005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	176.725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	12	004	2.03	006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	7.705.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
2	12	004	2.03	008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	4.690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	15	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai			A Nilai	11.601.952.745			
2	15	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	16 dokumen			16 dokumen	86.242.000			
2	15	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.541.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.465.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.465.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2.465.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.465.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	71.828.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2.010.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		
2	15	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	7 laporan			7 laporan	8.901.994.550			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	15	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	8.899.363.300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	251.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	202.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	402.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	687.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	962.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	6 laporan			6 laporan	2.237.500	
2	15	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	397.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran
2	15	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2 laporan			2 laporan	126.711.000	
2	15	001	2,05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	126.225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	15	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	486.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 jenis			7 jenis	502.276.875	
2	15	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	136.105.125	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	30.281.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	81.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	8.760.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Laporan	236.020.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	6 jenis			6 jenis	95.263.000	
2	15	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	15.513.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	79.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	15 jenis			15 jenis	1.063.434.820	
2	15	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	6.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	406.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	650.234.820	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran
2	15	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	5 jenis			5 jenis	823.793.000	
2	15	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	52.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	15	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	467.265.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang
2	15	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	104.728.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang
2	15	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	199.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91.54 %			91.51 %	9.839.227.994	
						Persentase juru parkir yang tertib	98.35 %			97.60 %		
						Persentase ketertiban lalu lintas	83.20 %			83.00 %		
						Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	77.35 %			68.29 %		
						Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	100 %			100 %		
						Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %			100 %		
						Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	97.69 %			94.53 %		
2	15	002	2,02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara	157 unit			157 unit	3.002.750.508	
2	15	002	2,02	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				107 Unit	1.347.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	15	002	2,02	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				155 Unit	1.655.750.508	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwang
2	15	002	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 dokumen			3 dokumen	4.686.902.812	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan			3 laporan		
2	15	002	2,04	001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	416.582.812	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	15	002	2,04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	4.270.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	15	002	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan, uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	4 laporan			4 laporan	1.291.396.584	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	44 laporan			44 laporan		
2	15	002	2,06	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	263.946.792	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
2	15	002	2,06	003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	19.260.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	15	002	2,06	004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				44 Laporan	1.008.189.792	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	15	002	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas	49 laporan			49 laporan	158.580.000			
2	15	002	2,07	001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	132.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	15	002	2,07	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				24 Laporan	15.180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran		
2	15	002	2,07	004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				24 Laporan	11.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	15	002	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan			1 laporan	217.452.666			
2	15	002	2,08	004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				2 Laporan	217.452.666	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2	15	002	2,09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 unit			500 unit	482.145.424			
2	15	002	2,09	001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				513 Unit	482.145.424	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							493.935.952		
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91,54 %				91,51 %	493.935.952		
				Persentase juru parkir yang tertib		98,35 %				97,60 %				
				Persentase ketertiban lalu lintas		83,20 %				83,00 %				
				Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik		77,35 %				68,29 %				
				Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas		100 %				100 %				
				Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		100 %				100 %				
				Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi		97,69 %				94,53 %				
2	15	002	2,05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	12 laporan			12 laporan			493.935.952
2	15	002	2,05	001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				4 Unit	314.464.952	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
2	15	002	2,05	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				8 Orang	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	
2	15	002	2,05	004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2000 Dokumen	50.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	
2	15	002	2,05	005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	
2	15	002	2,05	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	120.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	
2	15	002	2,05	008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	6.831.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								28.902.172.378
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai			A Nilai	11.133.788.494		
2	16	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen			7 dokumen	14.680.000		
2	16	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	16	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	16	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	16	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	16	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	16	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan			7 laporan	9.693.702.000	
2	16	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	9.679.937.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	003	Relaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	990.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah	6 laporan			6 laporan	5.425.000	
2	16	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	36 laporan			36 laporan	7.025.000	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.305.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3.920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	6 laporan			6 laporan	628.654.630	
2	16	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.205.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	106.290.530	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	14.006.150	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	18.123.950	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	209.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	267.629.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah	9 unit			9 unit	35.253.840	
2	16	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	35.253.840	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 laporan			4 laporan	457.046.024	
2	16	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	60.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	14.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	377.496.024	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	52 unit			52 unit	292.002.000	
2	16	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	121.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	43.552.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	27.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	98.00 %			97.25 %	3.074.003.244	
2	16	002	2,01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi	4 dokumen			4 dokumen	3.074.003.244	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meningkat.	4 dokumen				4 dokumen		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media	14 dokumen				14 dokumen		
2	16	002	2,01	003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	218.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002	2,01	004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	994.035.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002	2,01	005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				6 Dokumen	1.248.499.740	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002	2,01	006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen	291.768.504	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	002	2,01	007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	68.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002	2,01	008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	41.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	002	2,01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				10080 Orang	211.170.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	100 %			75.90 %	14.694.380.640	
						Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	79.67 %			62.33 %		
						Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	100 %			100 %		
2	16	003	2,01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 unit			5 unit	5.307.071.000	
2	16	003	2,01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	5.307.071.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	20 unit			20 unit	9.387.309.640	
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen			1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 dokumen			2 dokumen		
						Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	1 dokumen			1 dokumen		
						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan			4 layanan		
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit			1 unit		
2	16	003	2,02	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	316.512.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02	003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	6.687.256.840	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02	004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				3 Dokumen	686.711.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				20 Unit	1.103.084.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	16	003	2,02	008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				4 Layanan	208.569.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	166.576.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	16	003	2,02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	218.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						173.870.000	
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	100 %			100 %	173.870.000	
2	20	002	2,01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral	6 dokumen			6 dokumen	173.870.000	
2	20	002	2,01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen	25.225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	20	002	2,01	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	148.645.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						325.134.168	
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100 %			100 %	325.134.168	
2	21	002	2,01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %			100 %		
2	21	002	2,01	003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 dokumen			12 dokumen	268.340.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	21	002	2,01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keamanan Informasi	1 perangkat daerah			1 perangkat daerah	8.734.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	21	002	2,02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	42 perangkat daerah			42 perangkat daerah	48.060.168	
2	21	002	2,02	001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				42 Perangkat Daerah	48.060.168	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						14.021.942.547	
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai			A Nilai	10.976.457.809	
2	18	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	12 dokumen			12 dokumen	46.233.740	
2	18	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.144.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	18	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2.889.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2.929.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	30.665.840	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2.929.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 laporan	2.511.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.164.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	51 laporan			51 laporan	6.265.044.776	
2	18	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang	6.238.588.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	18	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	4.938.656	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen Akuntansi	4.884.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	3.679.920	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	18	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	3.779.676	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.399.964	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	3.773.760	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	dokumen			33 dokumen	24.796.200	
2	18	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	4.968.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	5.029.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	3.661.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.844.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.640.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3.651.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	5.519.400	
2	18	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	5.519.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.028.163.542	
2	18	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				18 Paket	50.534.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				120 Paket	374.642.486	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	113.596.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	18	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				26 Paket	154.713.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.240.106	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	331.437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 laporan			2 laporan	967.447.700	
2	18	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	231.992.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				52 Unit	735.455.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 laporan			4 laporan	1.249.504.159	
2	18	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	16.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.217.004.159	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	124 unit			124 unit	1.389.748.292	
2	18	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	205.113.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Jenis	6.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	184.566.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	993.468.792	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	399 investor baru			237 investor baru	1.232.338.082	
2	18	002	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	4 dokumen			4 dokumen	471.282.428	
2	18	002	2,01	001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				4 Dokumen	471.282.428	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
					fasilitas/incentif dan kemudahan Penanaman modal							
2	18	002	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	10 jenis media promosi		10 jenis media promosi	761.055.654		
2	18	002	2,02	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			10 Dokumen	761.055.654	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	89 % 95 %		86 % 95 %	696.767.316		
2	18	004	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani	4800 pelayanan		4800 pelayanan	696.767.316		
						Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	12000 pelayanan		12000 pelayanan			
2	18	004	2,01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1000 Pelaku Usaha	453.203.516	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	004	2,01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			100 Kegiatan Usaha	147.604.680	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	004	2,01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			3000 Orang	95.959.120	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	30,36 %		18,80 %	687.639.504		
2	18	005	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kevenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	309 investor 253 pelaku usaha		234 investor 253 pelaku usaha	687.639.504		
2	18	005	2,01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			253 Pelaku Usaha	449.920.824	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	005	2,01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			40 Kegiatan Usaha	237.718.680	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	80 % 81 %		80 % 75 %	428.739.836		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	18	006	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola	4000 arsip			4000 arsip	428.739.836	
						Jumlah tersedianya layanan yang terkelola	10 layanan			10 layanan		
2	18	006	2,01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	428.739.836	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							30.379.562.748
2	22	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai			A Nilai	9.067.027.748	
2	22	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	84 skala 0-100			78 skala 0-100	54.510.800	
2	22	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	14.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8.824.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	25.886.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	5.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1 laporan			1 laporan	8.026.599.000	
2	22	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 ASN	7.987.909.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2.750.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	3.412.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	8.824.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	22	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Paket Laporan	5.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	9.704.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	1 laporan			1 laporan	330.968.396	
2	22	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.310.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	131.368.996	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	28.689.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	164.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	1 laporan			1 laporan	307.652.952	
2	22	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	301.352.952	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	5 jenis			5 jenis	347.296.600	
2	22	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	133.854.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	22	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Jenis	33.442.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	180.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	78.11 %			76.61 %	21.312.535.000	
2	22	008	5,01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman	2 dokumen			2 dokumen	4.427.535.000	
						Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra	1 dokumen			1 dokumen		
2	22	008	5,01	001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				1 Dokumen	1.140.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,01	002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				1 Laporan	2.287.535.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,01	003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				18 Unit	1.000.000.000	
2	22	008	5,02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan	130 objek			90 objek	2.100.000.000	
2	22	008	5,02	002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				90 Objek	2.100.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya	1 dokumen			1 dokumen	14.785.000.000	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya	2 dokumen			2 dokumen			
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	2 laporan			2 laporan			
					Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	1 laporan			1 laporan			
2	22	008	5,07	001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				24 Laporan	1.960.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				91 Lembaga	770.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				1 Laporan	1.200.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				9 Orang	350.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				8 Laporan	5.500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				1 Dokumen	1.070.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	22	008	5,07	008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				450 Orang	1.095.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1.840.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	008	5,07	010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				1 Laporan	500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											14.997.347.659	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1.804.416.659
2	22	001			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	1 Laporan			1 Laporan	30.855.750	
2	22	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	6.480.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.855.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	3 Jenis			3 Jenis	52.100.000	
2	22	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	52.100.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	1 Laporan			1 Laporan	1.576.382.909	
2	22	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.573.882.909	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	22	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	3 Jenis			3 Jenis	145.078.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
2	22	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	43.940.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	46.888.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	9.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	45.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumatan terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	83 Skala 0-100			81.50 Skala 0-100	13.192.931.000		
2	22	008	5,02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	1 objek			1 objek	6.875.000.000		
2	22	008	5,02	001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				1 Objek	6.875.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	008	5,04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya	7 jenis			7 jenis	6.317.931.000		
2	22	008	5,04	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				9 Unit	6.317.931.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								66.917.000.000
2	22	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan)	A Nilai			A Nilai	10.615.000.000		
2	22	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)	1 Paket			8 Paket	2.440.000.000		
2	22	001	2,07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2.440.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)	1 Paket			2 Paket	260.000.000		
2	22	001	2,09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	260.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)	12 bulan			12 bulan	7.915.000.000		
2	22	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	7.915.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	75 %			35 %	56.302.000.000		
2	22	008	5,03		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan	4 event			1 event	56.302.000.000		
2	22	008	5,03	001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	56.302.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								1.350.984.660
2	23	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	79,5 skala 0 -100			78 skala 0 -100			
						Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	3300 judul			1800 judul			
						Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	29 %			20 %		1.279.948.060	
						Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan			1 Laporan			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	23	002	2,01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	5 Laporan			5 Laporan	1.195.246.060	
					Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai	2 Laporan			2 Laporan		
2	23	002	2,01	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1 Layanan	76.886.200	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			2 Perpustakaan	1.007.134.860	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			8 Perpustakaan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			2 Perpustakaan	11.520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4 Orang	3.610.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			2 Layanan	16.200.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			1800 Eksemplar	75.090.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,01	010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	3.205.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	3 Laporan		3 Laporan	84.702.000	
2	23	002	2,02	001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			3 Lokus	8.818.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,02	003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			5 Orang	28.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	002	2,02	004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			10 Perpustakaan	47.284.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	003			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	4 orang		1 orang	71.036.600	
2	23	003	2,01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan		1 Laporan	69.036.600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	23	003	2,01	001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	69.036.600	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	23	003	2,02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan			1 Laporan	2.000.000	
2	23	003	2,02	001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10 Eksemplar	2.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						12.350.673.313	
2	24	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A Nilai			A Nilai	11.565.462.729	
2	24	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	7 Dokumen			7 Dokumen	57.146.698	
2	24	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	192.566	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	55.879.508	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	165.044	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	187.566	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	165.044	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	296.360	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	260.610	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	7 Laporan			7 Laporan	9.021.556.000	
2	24	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	9.020.505.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	140.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	145.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	24	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	10 Dokumen			10 Dokumen	28.551.200	
2	24	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	27.601.200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai	15 Dokumen			15 Dokumen	56.457.000	
2	24	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	27.601.200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	28.855.800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	16 Dokumen			16 Dokumen	369.670.631	
2	24	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.921.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	52.618.600	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	24	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22.463.800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	107.902.386	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	55.573.845	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	111.691.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	1 Unit			1 Unit	12.000.000	
2	24	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	8 Laporan			8 Laporan	1.674.184.200	
2	24	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	39.390.200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.124.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	375.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.626.295.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	97 Unit			97 Unit	345.897.000	
2	24	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit	89.755.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	138.492.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5.500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RRPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	24	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	27.150.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1500 arsip			1000 arsip		
						Jumlah arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan	31921 arsip			30421 arsip		694.429.384
2	24	002	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan arsip yang dikelola, terpelihara, dan terawasi selesai	3 laporan			3 laporan		107.160.000
2	24	002	2,01	002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	51.030.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	002	2,01	003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	56.130.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	002	2,02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis yang dikelola selesai	1300 arsip			1000 arsip		311.874.200
2	24	002	2,02	002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	311.874.200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	002	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai	1 laporan			1 laporan		275.395.184
						Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai	1 laporan			1 laporan		
2	24	002	2,03	001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	81.059.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	002	2,03	002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	194.336.184	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1800 arsip			1200 arsip		88.921.200
2	24	003	2,01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai	1000 arsip			1000 arsip		43.100.000
2	24	003	2,01	001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	43.100.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	003	2,03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai	1 daftar arsip			1 daftar arsip		10.660.000
2	24	003	2,03	001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	10.660.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	003	2,04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai	500 arsip			500 arsip		33.121.200

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	24	003	2,04	002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			500 Arsip	33.121.200	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	003	2,05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai	2 arsip		2 arsip	2.040.000	
2	24	003	2,05	003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			2 Arsip	2.040.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
2	24	004			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	100 %		100 %	1.860.000	
2	24	004	2,01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyedia Daftar Arsip Tertutup selesai	1 laporan		1 laporan	1.860.000	
2	24	004	2,01	001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan			1 SOP	1.860.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.685.746.009	
3	26	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai		A Nilai	6.350.717.239	
3	26	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	20 Dokumen		20 Dokumen	42.403.040	
3	26	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	30.653.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	4.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	56 Laporan		56 Laporan	4.644.747.000	
3	26	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			28 Orang/bulan	4.637.607.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1.160.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	26	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	870.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan			12 Laporan	254.750.000	
3	26	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	250.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5 Laporan	2.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	4 Laporan			4 Laporan	2.320.000	
3	26	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.320.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	121 Laporan			121 Laporan	486.362.399	
3	26	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.368.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	101.455.525	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	21.723.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	26	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	354.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	2.915.074	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	38 Unit			38 Unit	205.394.800	
3	26	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				38 Unit	205.394.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 Dokumen			4 Dokumen	191.300.000	
3	26	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	186.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 Unit			57 Unit	523.440.000	
3	26	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,09	004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	100.990.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	21.950.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	370.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	106,91 Skala 0-156			92,35 Skala 0-156	1.918.747.800	
						Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	67,65 %			58,80 %		
3	26	002	2,03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan.	23 Lokasi			20 Lokasi	1.918.747.800	
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	5 DTW			4 DTW		
3	26	002	2,03	002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	279.540.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	002	2,03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				18 Lokasi	450.245.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	26	002	2,03	004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Paket	380.770.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	002	2,03	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	355.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	002	2,03	007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				17 Lokasi	452.367.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	8 Laporan 3 Dokumen			8 Laporan 3 Dokumen	5.246.618.970	
3	26	003	2,01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen			3 Dokumen	5.246.618.970	
3	26	003	2,01	001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	440.020.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	003	2,01	002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Laporan	3.723.382.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	003	2,01	003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	893.216.570	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	003	2,01	004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	190.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	005			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	30 % 57,67 %			20 % 56,83 %	2.169.662.000	
3	26	005	2,01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	6 Dokumen 3 Laporan 8 Laporan 3 Dokumen			6 Dokumen 3 Laporan 8 Laporan 3 Dokumen	2.169.662.000	
3	26	005	2,01	001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				160 Orang	444.992.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	005	2,01	002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				451 Orang	897.770.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	005	2,01	004	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				60 Orang	126.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	26	005	2,01	005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	26	005	2,01	007	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Dokumen	200.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											23.905.319.000	
1 03 013 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG												
1	03	013	5,02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-			0 -	23.905.319.000	
1	03	013	5,02	001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				6 Dokumen	1.259.450.000	
1	03	013	5,02	016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman				1 Dokumen	22.645.869.000	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											26.528.691.006	
3 30 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
3	30	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	A Nilai			A Nilai	13.934.917.256	
3	30	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	13.308.500	
3	30	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.678.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	3.774.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3.572.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 Laporan			29 Laporan	11.038.426.846	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	30	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	11.034.466.846	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.080.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	540.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 Laporan			55 Laporan	4.800.000	
3	30	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 Laporan			12 Laporan	800.000	
3	30	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	30	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	35 Laporan			20 Laporan	215.052.000	
3	30	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	44.848.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	16.389.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	42.378.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	4.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				76 Laporan	106.937.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 unit			4 unit	28.350.000	
3	30	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28.350.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	36 Laporan			36 Laporan	1.854.780.800	
3	30	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	11.886.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.397.715.200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	445.179.600	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 Unit			331 Unit	779.399.110	
3	30	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	203.469.110	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya				11 Unit	507.260.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	001	2,09	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				292 Unit	68.670.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	002		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20 %			20 %	40.818.750	
3	30	002	2,06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	10 Laporan			10 Laporan	40.818.750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	30	002	2,06	003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				10 Laporan	40.818.750	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	12.538.802.500 rupiah			12.478.802.500 rupiah	11.446.775.700	
						Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	34,48 %			31,03 %		
3	30	003	2,01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan	29 Pasar			29 Pasar	2.479.043.800	
						Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 Pasar			29 Pasar		
3	30	003	2,01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				104 Unit	1.083.822.300	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	003	2,01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				82 Unit	1.395.221.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	003	2,02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 Pasar			29 Pasar	8.967.731.900	
3	30	003	2,02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				7 Dokumen	8.967.731.900	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100 %			100 %	157.446.900	
3	30	004	2,01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 Laporan			3 Laporan	27.578.200	
3	30	004	2,01	003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	27.578.200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	004	2,02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	12 Laporan			12 Laporan	129.868.700	
3	30	004	2,02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	129.868.700	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %			8 %	948.732.400	
3	30	007	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	300 UMK			300 UMK	948.732.400	
						Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	100 UMK			100 UMK		
3	30	007	2,01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMK yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				100 UMK	823.225.900	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30	007	2,01	002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMK yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				300 UMK	125.506.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.676.193.500	
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	12.538.802.500 rupiah			12.478.802.500 rupiah	1.676.193.500	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
3	30	003	2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I	15 Pasar			15 Pasar	1.676.193.500	
3	30	003	2,01	002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				59 Unit	1.676.193.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
3	30	003			Pendapatan retribusi pasar	12.538.802.500 rupiah			12.478.802.500 rupiah	1.771.056.200	
3	30	003	2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 Pasar			15 Pasar	1.771.056.200	
3	30	003	2,01	002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	1.771.056.200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
3	30	001			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.421.165.429,24 rupiah			5.311.103.336,16 rupiah	6.245.994.348	
3	30	001	2,1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	6.245.994.348	
3	30	001	2,1	001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.245.994.348	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											
3	30	003			Pendapatan retribusi pasar	12.538.802.500 rupiah			12.478.802.500 rupiah	914.230.200	
3	30	003	2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	1 Pasar			1 Pasar	914.230.200	
3	30	003	2,01	002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				31 Unit	914.230.200	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											
3	30	006			Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95 %			95 %	368.826.804	
3	30	006	2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Alat UTPP yang ditera/tera ulang	25667 Alat			25667 Alat	368.826.804	
3	30	006	2,01	001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				25650 Unit	240.721.804	Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman
3	30	006	2,01	002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				340 Orang	128.105.000	Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
2	17	001			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai			A Nilai	6.662.638.925	
2	17	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm	16 Dokumen			16 Dokumen	8.115.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	17	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	830.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	785.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm	7 Laporan			7 Laporan	5.656.062.100	
2	17	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	5.651.962.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah	Jenis			6 Jenis	3.000.000	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	17	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Perinkopukm	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000	
2	17	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm	5 Jenis			5 Jenis	201.611.350	
2	17	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	70.177.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.314.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1.980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	112.140.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis			6 Jenis	15.200.000	
2	17	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 unit	4.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis			3 Jenis	564.168.200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	17	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3.960.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	559.208.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Jenis			5 Jenis	213.982.275	
2	17	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	130.762.275	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	003			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi			115 Koperasi	149.335.000	
2	17	003	2,01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	115 Unit Usaha			115 Unit Usaha	149.335.000	
2	17	003	2,01	001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				115 Unit Usaha	149.335.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	004			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi			115 Koperasi	72.000.000	
2	17	004	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan	20 Koperasi			20 Koperasi	72.000.000	
						Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Unit			115 Unit		
2	17	004	2,01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				115 Unit Usaha	12.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	004	2,01	002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				20 Unit Usaha	59.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	765 SDM Koperasi			540 SDM Koperasi	290.809.523	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	17	005	2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	765 Orang			540 Orang	290.809.523	
2	17	005	2,01	001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				540 Orang	290.809.523	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	006		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	30 Unit			12 Unit	275.264.392	
2	17	006	2,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	30 Unit			12 Unit	275.264.392	
2	17	006	2,01	001 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Unit Usaha	275.264.392	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	007		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	400 UKM			400 UKM	544.806.660	
					Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100 UKM			100 UKM		
2	17	007	2,01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro Jumlah pelaku yang mendapatkan pemberdayaan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan dan pendampingan	1 Dokumen 120 Unit Usaha 400 UMKM 100 Wirausaha baru			1 Dokumen 120 Unit Usaha 400 UMKM 100 Wirausaha baru	544.806.660	
2	17	007	2,01	001 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				3600 Unit Usaha	161.847.160	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	007	2,01	003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				400 Unit Usaha	13.652.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	007	2,01	004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Wirausaha baru	369.307.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
2	17	008		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	50 UKM			35 UKM	629.558.570	
2	17	008	2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	265 UKM			265 UKM	629.558.570	
2	17	008	2,01	001 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				265 Unit Usaha	629.558.570	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						951.225.890	
3	31	002		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	26 %			11 %	869.398.690	
3	31	002	2,01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	2 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 200 IKM			2 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 200 IKM	869.398.690	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	30 Sentra			30 Sentra		
3	31	002	2,01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	498.252.950	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	002	2,01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	78.445.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	002	2,01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	292.700.740	
3	31	003			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berjin industri	4,5 %			3 %	8.360.000	
3	31	003	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			2 Dokumen	8.360.000	
3	31	003	2,01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	8.360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %			100 %	73.467.200	
3	31	004	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	73.467.200	
3	31	004	2,01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINas				1 Dokumen	73.467.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2.371.042.150	
3	31	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Logam	464.408.000 rupiah			425.110.000 rupiah	425.110.000	
3	31	001	2,1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan UPT Logam	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	425.110.000	
3	31	001	2,1	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	425.110.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	26 %			11 %	1.945.932.150	
3	31	002	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen			2 Dokumen	1.945.932.150	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Laporan				2 Laporan		
					Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen				3 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen				3 Dokumen		
					Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	200 IKM				200 IKM		
					Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	30 Sentra				30 Sentra		
3	31	002	2,01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	1.945.932.150	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						23.800.456.000	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	23.800.456.000	
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)	44 Laporan/ Dokumen			44 Laporan/ Dokumen	22.750.003.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bulan	22.750.003.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)	2 Kegiatan			2 Kegiatan	1.050.453.000	
4	01	001	2,11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	178.453.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				20 Orang/Bulan	872.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2.412.983.549	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	472.959.003	
4	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)	13 Dokumen			13 Dokumen	2.800.000	
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem)	27 Laporan			27 Laporan	2.400.000	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)	8 Laporan			8 Laporan	2.000.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)	1 Laporan			1 Laporan	400.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Tapem)	10 Laporan			10 Laporan	360.229.003	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	74.136.003	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.970.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.663.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	261.460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Tapem)	3 Unit			3 Unit	28.500.000	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	28.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)	2 Laporan			2 Laporan	1.780.000	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem)	30 Unit			30 Unit	74.850.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	57.475.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	17.375.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	390 (Cepat Berkembang) Nilai			386 (Cepat Berkembang) Nilai	1.940.024.546	
						Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	100 %			100 %		
4	01	002	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen			4 Dokumen	1.940.024.546	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen			1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen			9 Dokumen		
4	01	002	2,01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	342.823.692	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,01	002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				9 Dokumen	1.252.561.491	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	344.639.363	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						3.929.675.085	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	410.105.155	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)	44 Dokumen			44 Dokumen	3.960.000	
4	01	001	2,01	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36 Laporan	1.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra)	28 Dokumen			28 Dokumen	7.560.000	
4	01	001	2,02	002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	1.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)	2 Dokumen			2 Dokumen	2.000.000	
4	01	001	2,03	001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra)	2 Dokumen			2 Dokumen	800.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra)	73 Jenis			73 Jenis	216.535.155	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan				2 Paket	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.409.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.878.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 paket	30.137.205	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29 Laporan	139.460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Kesra)	2 Jenis			2 Jenis	74.000.000	
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	74.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)	1712 Jenis			1712 Jenis	3.200.000	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra)	14 Jenis			14 Jenis	102.050.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	24.825.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
4	01 001 2,09 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	12.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 001 2,09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	55.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	86,68 %		46,67 %	3.519.569.930	
4	01 002 2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen		3 Dokumen	3.519.569.930	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Triantibum Limas	6 Dokumen		3 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen		3 Dokumen		
4	01 002 2,02 001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			26 Dokumen	2.621.565.840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01 002 2,02 002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			4 Dokumen	299.111.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 002 2,02 003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Triantibum Limas			5 Dokumen	598.893.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4	01	SEKRETARIAT DAERAH					3.233.296.392	
4	01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai		A Nilai	1.475.909.120	
4	01 001 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)	32 Dokumen		32 Dokumen	3.312.000	
4	01 001 2,01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	348.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 001 2,01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	348.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 001 2,01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	348.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01 001 2,01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	348.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)	27 Laporan/ Dokumen			27 Laporan/ Dokumen	47.633.280	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	46.673.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)	5 Laporan/ Dokumen			5 Laporan/ Dokumen	1.200.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)	1 Dokumen			1 Dokumen	480.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)	46 Laporan			46 Laporan	1.072.087.940	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	58.037.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.740.940	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.034.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	8.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				47 Laporan	978.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Hukum)	12 Unit			12 Unit	61.900.000	
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	61.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Hukum)	2 Laporan			2 Laporan	59.320.900	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.336.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	54.784.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum)	30 Unit			30 Unit	229.975.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	51.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	13.275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	165.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99.4 Skala 0-100			99.1 Skala 0-100	1.757.387.272	
4	01	002	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	5 Kasus			5 Kasus	1.757.387.272	
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	231 Dokumen			231 Dokumen			
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	7 Dokumen			7 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	002	2,03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				235 Dokumen	732.938.248	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	386.084.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	638.365.024	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH												10.601.983.117
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												10.601.983.117
4	01	001			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai		
4	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)	13 Dokumen			13 Dokumen	5.395.000	
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.995.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)	27 Dokumen			27 Dokumen	4.870.000	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	1.485.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.485.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	2.400.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)	2 Dokumen/ Paket			2 Dokumen/ Paket	30.600.000	
4	01	001	2,05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)	10 Laporan			10 Laporan	719.030.350	
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	401.491.100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	33.629.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	57.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	225.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)	4 Laporan			4 Laporan	243.199.906	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	186.799.906	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	42.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)	71 Unit			71 Unit	1.033.570.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				35 Unit	800.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	30.920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	12.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro)	4 Orang			4 Orang	6.400.000	
4	01	001	2,11	003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	6.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan	43 Paket			43 Paket	6.040.454.083	
4	01	001	2,12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	931.542.351	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				7 Paket	630.682.931	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				23 Paket	4.478.228.801	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	36 Laporan			36 Laporan	2.516.063.778	
4	01	001	2,14	001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	1.384.762.820	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,14	002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	1.109.890.958	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,14	003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	21.410.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
4	01			SEKRETARIAT DAERAH							799.238.535	
4	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai		799.238.535	
4	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu)	21 Dokumen			21 Dokumen		45.845.040	
4	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen		36.393.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen		874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen		460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen		460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan		5.184.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan		1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)	44 Laporan/ Dokumen			44 Laporan/ Dokumen		152.416.764	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			9 Dokumen		48.728.812	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Dokumen		4.785.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			5 Dokumen		58.786.820	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan		1.920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen		880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan		34.996.132	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	2.320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu)	20 Laporan/ Dokumen		20 Laporan/ Dokumen	161.964.204	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	1.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan	580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	9.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	143.874.204	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	6.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu)	1 Laporan		1 Laporan	1.450.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Admkeu)	2 Laporan		2 Laporan	246.107.727	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	5.053.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	58.241.927	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	22.044.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	32.692.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	126.875.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Admkeu)	7 Unit		7 Unit	108.369.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	108.369.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Admkeu)	3 Laporan			3 Laporan	4.700.000	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	3.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu)	27 Unit			27 Unit	78.385.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	52.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	26.285.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.931.880.406	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	496.648.382	
4	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)	23 Dokumen			23 Dokumen	2.604.000	
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	464.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	640.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)	18 Laporan			18 Laporan	1.860.000	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	540.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	1.200.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	300.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)	12 Laporan			12 Laporan	189.904.450	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.587.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	45.059.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.924.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	31.033.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	98.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)	4 Unit			4 Unit	72.000.000	
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	72.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)	2 Laporan			2 Laporan	131.954.932	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	50.034.932	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	80.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)	58 Unit			58 Unit	96.825.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	51.925.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	14.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	90 %			87 %	744.983.040	
4	01	002	2,04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	50 Dokumen			42 Dokumen	744.983.040	
4	01	002	2,04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				42 Dokumen	473.883.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,04	002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	58.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	002	2,04	003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	212.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	86,54 %			80,77 %	690.248.984	
					Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	78 %			57 %			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	003	2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen			24 Dokumen	690.248.984	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	14 Dokumen		14 Dokumen			
4	01	003	2,01	001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			24 Dokumen	268.590.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003	2,01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			6 Laporan	306.978.984	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003	2,01	003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			2 Dokumen	114.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4 01 SEKRETARIAT DAERAH											
4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
4 01 001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
4 01 001 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah											
4 01 001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7 Laporan	2.204.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4 01 001 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
4 01 001 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			9 Dokumen	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	2.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem)	8 Laporan/ Dokumen		8 Laporan/ Dokumen	1.520.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			1 Laporan	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem)	1 Dokumen		1 Dokumen	380.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2 Dokumen	380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Adpem)	10 Laporan		10 Laporan	141.914.250	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	22.378.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	13.088.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	24.050.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			2 Dokumen	1.716.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	79.780.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Adpem)	2 Unit		2 Unit	900.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem)	3 Laporan			3 Laporan	29.221.132	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	28.021.132	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)	16 Unit			16 Unit	64.319.651	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	50.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.499.651	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	99.29 %			98.52 %	509.219.360	
4	01	003	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	509.219.360	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan			
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan			
4	01	003	2,02	001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	228.990.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	003	2,02	002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	132.369.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01	003	2,02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	147.860.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH						1.353.537.313	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	1.028.589.663	
4	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)	16 Dokumen			16 Dokumen	5.333.000	
4	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	783.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	2.349.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.026.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)	27 Laporan			27 Laporan	45.413.807	
4	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	43.768.807	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	135.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	435.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	135.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor)	8 Laporan			8 Laporan	870.000	
4	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	135.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	135.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor)	1 Laporan			1 Laporan	540.000	
4	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Bagor)	12 Laporan			12 Laporan	191.949.240	
4	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.708.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	61.169.590	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.332.650	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	17.298.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	91.940.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Bagor)	3 Laporan			3 Laporan	2.752.000	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	712.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.040.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor)	25 Unit			25 Unit	55.776.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	42.526.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	13.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi	16 Dokumen			16 Dokumen	725.955.616	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen			4 Dokumen			
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan			5 Laporan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	283.386.288	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,13	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	234.446.288	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				12 Dokumen	167.283.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,13	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Dokumen	40.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	004			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	91 %			88 %	324.947.650	
4	01	004	5,01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli	3 Lembaga			3 Lembaga	274.396.150	
4	01	004	5,01	003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				3 Lembaga	274.396.150	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	004	5,02		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan	3 Dokumen			3 Dokumen	50.551.500	
4	01	004	5,02	001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	50.551.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.296.060.022	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	699.210.048	
4	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBI)	19 Dokumen			19 Dokumen	6.986.000	
4	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.064.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.064.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.064.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.064.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.710.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.020.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ)	27 Laporan/ Dokumen			27 Laporan/ Dokumen	53.270.424	
4	01	001	2,02	002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	912.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	532.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.824.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	49.190.424	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,02	008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	812.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	1.824.000	
4	01	001	2,03	001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,03	007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)	1 Dokumen			1 Dokumen	456.000	
4	01	001	2,05	005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (BPBJ)	11 Laporan/ Dokumen			11 Laporan/ Dokumen	168.819.124	
4	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.137.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	44.425.149	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.892.025	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.559.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	100.005.450	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (BPBJ)	10 Unit			10 Unit	78.424.500	
4	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	78.424.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (BPBJ)	5 Laporan			5 Laporan	112.400.000	
4	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	107.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ)	28 Unit			28 Unit	277.030.000	
4	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	60.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	16.780.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	87,00 %			85,50 %	596.849.974	
4	01	003	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	596.849.974	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen			1 Dokumen			
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang			50 Orang			
4	01	003	2,03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	195.995.564	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	01	003	2,03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	213.401.946	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
4	01	003	2,03	003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	187.452.464	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4					SEKRETARIAT DPRD							81.501.866.143	
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	A Nilai			A Nilai	34.917.549.103		
						Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	100 %			100 %			
						Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	100 %			100 %			
4	02	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 Dokumen			33 Dokumen	101.278.800		
4	02	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	11.323.072	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.722.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.722.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.292.786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.292.786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	67.605.156	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan			42 Laporan	5.215.411.088		
4	02	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	5.198.711.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	4.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
4	02	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.465.044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	02	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	2.320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.215.044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan			17 Laporan	24.000.000	
4	02	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju, Semua Kelurahan
4	02	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.160.000	
4	02	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	6.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan			142 Laporan	3.095.453.605	
4	02	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.461.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	239.512.755	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	182.796.850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	02	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	354.219.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	62.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	2.227.304.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	6 Laporan			3 Laporan	315.500.000	
4	02	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	315.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan			123 Laporan	1.852.424.494	
4	02	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	16.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	331.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	1.504.424.494	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan			39 Laporan	1.832.179.422	
4	02	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	192.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	523.863.422	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	101.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.014.196.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD; Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD	40 Orang			40 Orang	21.335.196.000	
4	02	001	2,15	001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	21.124.646.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,15	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	164.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	02	001	2,15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	46.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD; Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	238 Laporan			230 Laporan	1.139.945.694	
4	02	001	2,16	001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	47.631.711	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,16	002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				180 Laporan	403.474.597	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,16	003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	400.634.386	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	001	2,16	004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				9 Paket	288.205.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	100 %			100 %	46.584.317.040	
					Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	100 %			100 %			
					Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan	100 %			100 %			
					Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	100 %			100 %			
4	02	002	2,01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen produk hukum	60 Dokumen			24 Dokumen	10.917.123.264	
4	02	002	2,01	001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.613.223.264	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,01	002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 Dokumen	7.566.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,01	003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	1.054.525.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,01	004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	683.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran	8 Dokumen			8 Dokumen	3.365.530.000	
4	02	002	2,02	001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	576.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,02	002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	561.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,02	003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	867.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	02	002	2,02	004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	637.230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,02	005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	8.650.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,02	006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	713.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan			52 Laporan	10.935.571.492	
4	02	002	2,03	001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	1.606.792.873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	1.480.992.873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	1.480.992.873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	1.480.992.873	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	505.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	3.911.490.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,03	008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	468.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	282 Dokumen			34 Dokumen	7.468.069.942	
4	02	002	2,04	002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	4.025.120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				16 Dokumen	2.064.728.046	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,04	004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	216.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	02	002	2,04	005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	225.806.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,04	006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	868.042.246	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,04	007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	68.373.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	6 Dokumen			6 Dokumen	7.024.778.973	
4	02	002	2,05	002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	1.153.419.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,05	003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	5.871.359.373	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	13 Laporan			13 Laporan	843.990.000	
4	02	002	2,06	001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	388.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,06	002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	455.370.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen			5 Dokumen	678.280.000	
4	02	002	2,07	001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	672.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,07	002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	5.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	172 Dokumen			15 Dokumen	5.350.973.369	
4	02	002	2,08	001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	614.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,08	002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	10.540.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
4	02	002	2,08	003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	2.949.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
4	02	002	2,08	004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1 Dokumen	1.776.293.369	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
PERENCANAAN												
5	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					A Nilai	A Nilai	9.959.746.400	
5	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	16 dokumen		16 dokumen	57.226.510		
5	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	5.188.860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	3.388.860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2.488.860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.488.810	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.488.860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	41.141.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	2.040.360	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda	7 Laporan		7 Laporan	8.790.758.040		
5	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			69 Orang/bulan	8.743.985.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	37.553.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	
5	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	6.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda	6 Laporan			6 Laporan	4.740.000	
5	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda	1 Dokumen			1 Dokumen	61.795.080	
5	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	61.795.080	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Bappeda	5 Jenis			5 Jenis	476.411.770	
5	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	93.422.770	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24.097.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	58.837.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.204.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	292.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis			6 Jenis	166.700.000	
5	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	166.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis			3 Jenis	121.550.000	
5	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	13.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	98.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Jenis			5 Jenis	280.565.000	
5	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	159.240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	62.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	43.925.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	100,00 %			100,00 %	570.972.949	
						Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	92,80 %		92,50 %			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	01	002	2,01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	2 dokumen			2 dokumen	259.347.761	
					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Dokumen			7 Dokumen		
5	01	002	2,01	001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	68.826.824	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,01	002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	71.024.384	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,01	003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	6.965.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,01	005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	22.389.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,01	007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJM/RKPD)				4 Dokumen	90.142.553	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	103.257.412	
5	01	002	2,02	001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	97.767.412	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,02	003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	5.490.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	11 Dokumen			11 Dokumen	208.367.776	
5	01	002	2,03	001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	30.995.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	002	2,03	003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	177.372.376	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	01	003		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	92,80 %			92,50 %	1.860.358.201	
					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80 %			92,50 %		
					Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,80 %			92,50 %		
5	01	003	2,01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	4 Dokumen			4 Dokumen	480.706.496	
					Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	4 Dokumen			4 Dokumen		
					Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	4 Dokumen			4 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
5	01	003	2,01	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	57.371.520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	91.721.520	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,01	008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	331.613.456	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	4 Dokumen			4 Dokumen	384.757.261		
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	4 Dokumen			4 Dokumen			
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	4 Dokumen			4 Dokumen			
5	01	003	2,02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	108.124.840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,02	002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	75.055.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,02	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian				4 Laporan	201.577.381	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	4 Dokumen			4 Dokumen	994.894.444		
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	4 Dokumen			4 Dokumen			
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah	5 Dokumen			5 Dokumen			
5	01	003	2,03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	117.738.712	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,03	004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	436.708.872	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	01	003	2,03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	440.446.860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.238.632.822		
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	65,00 (sangat inovatif) skor				63,76 (sangat inovatif) skor	1.238.632.822	
						Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	94,00 %			91,00 %			
5	05	002	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan	2 Laporan			2 Laporan	145.461.908		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	05	002	2,01	012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	64.869.815	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	05	002	2,01	013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	80.592.093	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	05	002	2,02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian tematis	7 Dokumen			7 Dokumen	462.500.950	
5	05	002	2,02	010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				7 Dokumen	462.500.950	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	05	002	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian strategis	3 Dokumen			3 Dokumen	306.756.924	
5	05	002	2,03	009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	153.378.462	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	05	002	2,03	011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	153.378.462	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	05	002	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan dukungan inovasi	4 Laporan			4 Laporan	323.913.040	
5	05	002	2,04	003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	323.913.040	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN						64.873.493.810	
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai			A Nilai	37.197.942.000	
5	02	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	14 dokumen			14 dokumen	2.870.000	
5	02	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	270.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	800.000	
5	02	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	22 Laporan			22 Laporan	30.006.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	02	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				175 Orang/bulan	30.000.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.000.000	
5	02	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	6 Laporan			6 Laporan	2.160.000	
5	02	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	3 laporan			4 laporan	8.520.000	
5	02	001	2,05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	7.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	02	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 Laporan			7 Laporan	806.108.000	
5	02	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	461.175.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	40.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	138.408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	127.325.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	13.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	24 Unit			24 Unit	35.684.000	
5	02	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	8.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,07	007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12.684.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	7 Laporan			7 Laporan	4.722.040.000	
5	02	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	215.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	02	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4.110.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	396.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	95 Unit			95 Unit	1.614.560.000	
5	02	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	70.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	250.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	7.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	75.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	10.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	1.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100 %			100 %	21.007.439.048	
						Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	97.56 %			95.12 %		
						Persentase penyerapan belanja daerah	87.40 %			87.10 %		
5	02	002	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	88 SKPD			88 SKPD	282.546.910	
						Jumlah dokumen rencana anggaran	89 Dokumen			89 Dokumen		
5	02	002	2,01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	12.900.000	
5	02	002	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	13.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	7.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	02	002	2,01	004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	7.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	9.266.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				41 Dokumen	8.865.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	58.387.325	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	50.516.305	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	114.111.720	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah	92 Laporan 220 Dokumen			92 Laporan 220 Dokumen	20.451.765.846	
5	02	002	2,02	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	20.139.808.860	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				181 Dokumen	4.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	106.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				25 Dokumen	45.353.040	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	6.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				24 Laporan	5.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	02	002	2,02	008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			1 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			6 Dokumen	120.813.946	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			5 Dokumen	7.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,02	011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			51 Orang	13.230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	23 BLUD			23 BLUD	273.126.292	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen		
					"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	12 Laporan			12 Laporan		
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57 Dokumen			57 Dokumen		
5	02	002	2,03	001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 Laporan	97.732.292	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			17 Laporan	3.234.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			64 Laporan	18.980.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			2 Dokumen	40.716.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			6 Dokumen	3.456.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			41 Orang	79.888.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	002	2,03	012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			23 Lembaga	29.120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	100 %		92,68 %	2.907.701.048	
5	02	003	2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	5 Dokumen			6 Dokumen	2.907.701.048	
					"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	17 Laporan			20 Laporan		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 Laporan			14 Laporan		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 OPD			41 OPD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	12 Dokumen			12 Dokumen		
5	02	003	2,01	002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	73.628.320	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	585.979.502	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	2.591.566	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	60.601.937	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				3 Laporan	59.451.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	1.491.585.680	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	339.752.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
5	02	003	2,01	009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	52.206.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	134.393.843	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Laporan	40.824.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	02	003	2,01	013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	66.687.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	30.569.254.642 Rupiah			28.768.474.190 R upiah	3.760.411.714	
						Nilai pendapatan Pajak Daerah	534.077.000.000 Rupiah			444.281.800.000 R upiah		
						Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	16.000.000.000 Rupiah			16.000.000.000 R upiah		
5	02	004	2,01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan			12 Laporan	3.760.411.714	
						Jumlah Dokumen Penagihan, Penyluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	1032 Dokumen			1087 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi	16 Dokumen			16 Dokumen		
						Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan.	120037 Ketetapan			111466 Ketetapan		
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan			12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	41880 Berkas			39466 Berkas				
5	02	004	2,01	001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	7.062.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	92.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				75 Laporan	317.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	65.390.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	489.749.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				111466 Obyek Pajak	108.440.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
5	02	004	2,01	008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				111466 Dokumen	7.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				39466 Layanan	411.974.760	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	1.280.906.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	356.805.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1000 Dokumen	98.857.954	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				111466 Dokumen	491.579.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11 Laporan	30.464.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
5	02	004	2,01	015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2.424.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								596.455.938	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
4	01	004		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan	95,80 %			95,20 %	596.455.938	
4	01	004	5,02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan	1 Laporan			1 Laporan	596.455.938	
4	01	004	5,02	003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	596.455.938	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	03			KEPEGAWAIAN							
5	03	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A Nilai			A Nilai	10.428.834.961	
5	03	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM	13 Dokumen			13 Dokumen	9.725.000	
5	03	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.945.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,01	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM	20 Laporan			20 Laporan	9.084.076.000	
5	03	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	9.032.278.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	45.048.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	03	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM	6 Dokumen			6 Dokumen	3.776.000	
5	03	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.296.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM	1 Dokumen			1 Dokumen	600.000	
5	03	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum BKPSDM	12 Paket			12 Paket	655.523.461	
5	03	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	17.392.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	132.855.961	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1.968.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	03	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	81.755.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	415.152.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	15 Unit			15 Unit	11.000.000	
5	03	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan			3 Laporan	397.717.000	
5	03	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	53.517.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	26.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	317.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	125 Unit			125 Unit	266.417.500	
5	03	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	91.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	72.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	57.837.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
5	03	001	2,09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	93,00 %			90,00 %		
						Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %			100 %		
						Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,80 %			88,20 %	3.619.882.140	
						Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN	6 Dokumen			6 Dokumen		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	03	002	2,01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	3 Dokumen			3 Dokumen	1.647.375.360	
					Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK	3 Dokumen			3 Dokumen		
5	03	002	2,01	002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	103.920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	846.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			1 Laporan	2.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			5 Dokumen	383.303.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			1 Dokumen	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	210.640.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	97.726.360	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			1 Dokumen	435.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,01	012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Laporan	435.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	3 Dokumen			3 Dokumen	603.468.000	
					Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	4 Dokumen			4 Dokumen		
5	03	002	2,02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			2 Dokumen	197.890.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokumen	106.415.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,02	003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen	299.163.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN	4 Dokumen			4 Dokumen	591.969.000	
					Jumlah dokumen pengelolaan asesment center	1 Dokumen			1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN.	6 Dokumen			6 Dokumen		
5	03	002	2,03	001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 Orang	86.884.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	2.365.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				135 Orang	244.376.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	4.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				10 Orang	1.224.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	18.685.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				2 Dokumen	33.530.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	20.670.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				900 Orang	178.315.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,03	015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN.	310 Orang				310 Orang	777.069.780	
					Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.	5 Dokumen				5 Dokumen		
					Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraihan.	4 Dokumen				4 Dokumen		
5	03	002	2,04	001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	223.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	243.340.780	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	03	002	2,04	003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1.740.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				8 Orang	137.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	68.670.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1.305.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	24.220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	36.264.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	38.764.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	03	002	2,04	010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.455.333.309	
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95,80 %			95,20 %	7.455.333.309	
5	04	002	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	2 Dokumen			2 Dokumen	7.455.333.309	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan tatakala.	650 Orang			771 Orang		
5	04	002	2,01	001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	107.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	04	002	2,01	002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	109.526.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5	04	002	2,01	003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				656 Orang	7.238.367.059	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	03				KEPEGAWAIAN						214.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
5	03	002		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,80 %			88,20 %	214.000.000	
5	03	002	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	1 Dokumen			1 Dokumen	214.000.000	
5	03	002	2.03	002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			1 Dokumen	214.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6	01			INSPEKTORAT DAERAH						12.034.117.665	
6	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	A Nilai			A Nilai	11.312.466.055	
6	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6 Dokumen			6 Dokumen	41.562.800	
6	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			17 Laporan	34.062.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	8 Laporan			8 Laporan	10.307.311.000	
6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			83 Orang/bulan	10.302.833.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	498.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
6	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Laporan			6 Laporan	6.072.000	
6	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	932.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	1.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.159.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	940.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	940.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	940.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan			1 Laporan	4.369.000	
6	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	4.369.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 Laporan			7 Laporan	279.865.455	
6	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.316.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	71.325.955	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
6	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.809.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.029.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	151.815.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	6.510.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 Unit			2 Unit	10.000.000	
6	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	10.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah selesai	4 Laporan			4 Laporan	415.855.800	
6	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.997.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	27.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	376.258.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	50 Unit			50 Unit	247.430.000	
6	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	169.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	32.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjuti Pemeriksaan Eksternal	92 %			90 %	307.544.110	
					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset	97 %			95 %			
					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	97 %			95 %			
					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	97 %			95 %			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
6	01	002	2,01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dokumen			11 Dokumen	164.717.110	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan			56 Laporan		
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan			1 Laporan		
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal	Laporan			35 Laporan		
6	01	002	2,01	001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				55 Laporan	73.044.610	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,01	002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	45.067.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,01	003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	10.498.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,01	004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	7.946.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,01	007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				11 Dokumen	28.160.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Laporan			25 Laporan	142.827.000	
					Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan			1 Laporan		
6	01	002	2,02	001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	7.192.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	002	2,02	002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	135.635.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	87,45 %			80,75 %	414.107.500	
					Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	87,45 %			80,75 %		
6	01	003	2,01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Rekomendasi			1 Rekomendasi	103.891.500	
					Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3 Rekomendasi			3 Rekomendasi		
6	01	003	2,01	001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	88.753.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003	2,01	002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	15.138.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003	2,02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	44 Perangkat Daerah			44 Perangkat Daerah	310.216.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Anggaran			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
6	01	003	2,02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur	44 Perangkat Daerah		
6	01	003	2,02	001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat daerah	24.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003	2,02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	16.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003	2,02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	235.406.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
6	01	003	2,02	004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	34.190.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Laporan	100.000.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				
7	01				KECAMATAN			7.567.426.912	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	6.632.908.628	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6 Dokumen	16.247.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.846.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1.122.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	550.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	8.829.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	5.422.498.000	
7	01	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5.419.576.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	500.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	922.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	100.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan			12 Laporan	3.000.000	
7	01	001	2,03	001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	400.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Tegallrejo, Semua Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.600.000	
7	01	001	2,05	005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	159.637.380	
7	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Unit	5.393.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	71.451.005	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	18.894.625	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	19.128.750	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	450.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	44.320.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 Unit			10 Unit	47.291.100	
7	01	001	2,07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	12.300.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				126 Unit	34.991.100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	635.412.092	
7	01	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.180.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	77.880.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	554.352.092	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	100 unit			100 unit	347.223.056	
7	01	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	136.707.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	31.425.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	150.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	29.091.056	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	85,5 poin			82,5 poin	171.482.082	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	5 Dokumen			5 Dokumen	27.080.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Kegiatan	27.080.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%			82,5 %	144.402.082	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	89.900.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	54.502.082	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah			2.148.334.503 Ru piah	576.920.338	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	8 Lembaga			8 Lembaga	84.428.700	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	84.428.700	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen			5 Dokumen	100.188.148	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen			5 Dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga			362 Lembaga			
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %			
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Masyarakat	72.143.604	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	28.044.544	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	1 Lembaga			1 Lembaga	193.038.100	
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Masyarakat	45.017.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Kegiatan	148.021.100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	8 Lembaga			8 Lembaga	199.265.390	
				Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya		1 Lembaga			1 Lembaga			
				Jumlah kampung yang melaksanakan Prokim dan kampung Hijau		14 Kampung			14 Kampung			
				Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam		35 Keluarga			35 Keluarga			
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2 Keluarga	10.320.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				450 Keluarga	41.515.890	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				200 Keluarga	55.815.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	91.614.500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	70 pelanggaran			100 pelanggaran	98.797.232	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	10 kali			10 kali	98.797.232	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	98.797.232	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	87.318.632	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 Bulan			12 Bulan	87.318.632	
				Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat		1 lembaga			1 lembaga			
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	21.772.500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	65.546.132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.212.828.400	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah			2.148.334.503 Ru piah	1.212.828.400	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen			5 Dokumen	1.212.828.400	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen			5 Dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga			362 Lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			11 Unit	907.757.268	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			21 Pokmas / Ormas	305.071.132	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak
UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01 KECAMATAN											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2.148.334.503 Rupiah	1.123.029.569	
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah			2.148.334.503 Ru piah	1.123.029.569	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen			5 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen			5 Dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga			362 Lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			11 Unit	451.215.877	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			22 Pokmas / Ormas	671.813.692	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru
UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01 KECAMATAN											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2.148.334.503 Ru piah	1.091.579.972	
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah			2.148.334.503 Ru piah	1.091.579.972	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen			5 Dokumen		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen			5 Dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga			362 Lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			36 Unit	603.604.868	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			148 Pokmas / Ormas	487.975.104	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo
UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01 KECAMATAN											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2.148.334.503 Ru piah	811.650.514	
7	01	003	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen			5 Dokumen	811.650.514	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen			5 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga			362 Lembaga		
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01 003 2,02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			11 Paket	526.050.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
7	01 003 2,02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			32 Pokmas / Ormas	285.600.514	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000	
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							100.000.000	
2	22 008 5,07 011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							6.855.110.163	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.931.244.220	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16.631.250	
7	01 001 2,01 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	1.575.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	575.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.062.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.950.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	9.068.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,01 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	900.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01 001 2,02 001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan		12 laporan	4.572.568.000	
7	01 001 2,02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			35 Orang/bulan	4.562.443.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	62.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	7.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	62.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	13.000.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	4.200.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.800.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.000.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	451.115.480	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.828.500	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	146.801.480	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16.247.500	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	53.168.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	221.070.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah yg selesai	4 unit			4 unit	108.008.250	
7	01	001	2,07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	108.008.250	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	587.810.440	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.500.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	101.400.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	480.910.440	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara	19 unit			19 unit	181.110.800	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	124.150.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	26.180.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	30.780.800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	88,5 poin			87,75 poin	152.309.510	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan, Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat	100 persen			100 persen	68.822.320	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	68.822.320	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan Camat	100 persen			100 persen	83.487.190	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	17.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	66.487.190	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah			630.000.000 Rupiah	622.805.683	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	14 lembaga			14 lembaga	112.109.440	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	112.109.440	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	128.440.543	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga			30 lembaga			
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen			100 persen			
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Masyarakat	70.870.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	57.570.543	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	60 umkm			60 umkm	132.258.500	
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 persen			100 persen			
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Masyarakat	78.494.250	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
7	01	003	2,03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Lembaga Masyarakat	1.515.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	52.249.250	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	7.920.000		
						Jumlah operasi PPKM	48 kali			48 kali			
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	7.920.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	40 kelompok			40 kelompok	242.077.200		
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	30 gapoktan			30 gapoktan			
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	3 kampung			3 kampung			
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	30 orang			30 orang			
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				80 Keluarga	26.889.200	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	81.398.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06	007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	7.720.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				50 Keluarga	3.860.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				65 Keluarga	19.970.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	7.250.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	94.990.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jatis	100 pelanggaran			275 pelanggaran	71.993.750	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	100 kali			275 kali	71.993.750	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	71.993.750	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jatis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	76.757.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	12 kali 20 lembaga			12 kali 20 lembaga	76.757.000	
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	52.757.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	24.000.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.102.123.045	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jatis	630.000.000 Rupiah			630.000.000 Rupiah	1.102.123.045	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	1 dokumen 4 dokumen 30 lembaga 100 persen			1 dokumen 4 dokumen 30 lembaga 100 persen	1.102.123.045	
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	592.415.660	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	509.707.385	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.092.589.815	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jatis	630.000.000 Rupiah			630.000.000 Rupiah	1.092.589.815	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	1 dokumen 4 dokumen 30 lembaga 100 persen			1 dokumen 4 dokumen 30 lembaga 100 persen	1.092.589.815	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	575.450.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	517.139.815	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7					01 KECAMATAN								
7					01 003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
					Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	630.000.000 Rupiah				630.000.000 Rupiah	1.288.154.230		
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen				1 dokumen	1.288.154.230		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen				4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga				30 lembaga			
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen				100 persen			
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	846.779.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	441.374.480	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2					22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2					22 008 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								
2					22 008 5,07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
					Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi					1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7					01 KECAMATAN								
7					01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	A Nilai				A Nilai	8.883.191.244		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	5 dokumen				5 dokumen	11.855.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.150.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	930.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	597.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	377.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	8.080.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	6.358.049.000	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	6.355.339.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.380.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	360.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	360.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	250.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	3.420.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	570.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	3.425.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	3.425.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	283.766.585	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11.240.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	80.632.085	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	48.494.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	114.400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	29.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	4 unit			8 unit	122.280.000	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	122.280.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.000.924.000	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	168.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	831.424.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	98 unit			98 unit	255.817.191	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21.875.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	97.575.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	32.300.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	104.067.191	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	84 poin			82,5 poin	58.661.132	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			1 dokumen	29.900.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	29.900.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	002	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	28.761.132	
7	01	002	2,04	002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	28.761.132	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Ru piah	590.968.404	
7	01	003	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga			12 lembaga	210.345.000	
7	01	003	2,01	003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	210.345.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	96.593.404	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga masyarakat	53.754.772	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	42.838.632	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	20 UMKM			20 UMKM	53.838.000	
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Masyarakat	32.013.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,03	004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				11 Laporan	21.825.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	4.800.000	
					Jumlah operasi PPKM	6 kali			14 kali		
7	01	003	2,05	003 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	4.800.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	50 orang			50 orang	225.392.000	
					Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	19 Poktan			19 Poktan		
					Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	3 kampung			3 kampung		
					Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	36 keluarga			36 keluarga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	24.392.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	18.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				25 Keluarga	2.325.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				150 Keluarga	10.750.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	169.325.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kementren Gondokusuman	175 pelanggaran			250 pelanggaran	164.924.932	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	55 kali			55 kali	164.924.932	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	164.924.932	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	29.100.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kementren untuk Penanganan Masalah di wilayah	11 kali			11 kali	29.100.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	4 lembaga			4 lembaga		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	8.100.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				10 Dokumen	21.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						973.121.692	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kementren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Ru piah	973.121.692	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	973.121.692	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Unit	534.410.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				29 Pokmas / Ormas	438.711.692	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						633.653.216	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Rupiah	633.653.216	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	633.653.216	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				54 Unit	313.169.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				22 Pokmas / Ormas	320.484.216	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.094.319.604	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Rupiah	1.094.319.604	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	1.094.319.604	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				61 Unit	483.510.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				26 Pokmas / Ormas	610.809.104	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.460.408.264	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Rupiah	1.460.408.264	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	1.460.408.264	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				215 Unit	687.890.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				29 Pokmas / Ormas	772.518.264	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.243.219.532	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kementren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			2.728.767.000 Rupiah	1.243.219.532	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			6 dokumen	1.243.219.532	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				89 Unit	675.729.268	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				36 Pokmas / Ormas	567.490.264	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						6.498.117.724	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kementren Danurejan	A Nilai			A Nilai	5.905.937.446	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen			3 dokumen	11.620.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.620.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	4.651.970.000	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.640.870.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	900.000	
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	900.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.600.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	190.480.200	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.252.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	58.783.200	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	22.272.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105.172.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	6 unit			6 unit	98.375.000	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	98.375.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah selesai	9 laporan			9 laporan	510.252.246	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	437.502.246	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	10 unit			10 unit	440.740.000	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	65.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	43.115.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				144 Unit	27.975.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	304.650.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	84 poin			82,50 poin	71.958.123	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			1 dokumen	27.640.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	27.640.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%			82,5 %	44.318.123	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	5.345.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	38.973.123	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah			1.137.124.275 Rupiah	440.272.155	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	84.799.655	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga masyarakat	63.342.155	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	21.457.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	45 UMKM			45 UMKM	90.337.500	
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				10 Lembaga masyarakat	60.337.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10 Laporan	30.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	16.400.000	
						Jumlah operasi PPKM	48 kali			48 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	16.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	315 orang			260 orang	248.735.000	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	29 kelompok			29 kelompok		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	16 kampung			16 kampung			
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	40 Keluarga			40 Keluarga			
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29 Keluarga	19.115.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	73.145.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				16 Keluarga	3.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	79.875.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	003	2,06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	73.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46 Pelanggaran			49 Pelanggaran	41.250.000		
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	240 kali			240 kali	41.250.000		
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				240 Laporan	41.250.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	38.700.000		
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penukasana Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	38.700.000		
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	10 lembaga			10 lembaga			
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	5.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	32.900.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semu Kelurahan	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN								
7	01				KECAMATAN						1.037.507.887		
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah			1.137.124.275 Ru piah	1.037.507.887		
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %	1.032.707.887		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	513.935.527	Kota Yogyakarta, Danurejan, Sunyatmajan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	518.772.360	Kota Yogyakarta, Danurejan, Sunyatmajan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	4.800.000	
						Jumlah operasi PPKM	48 kali			48 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	4.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Sunyatmajan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.088.563.106	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah			1.137.124.275 Ru piah	1.088.563.106	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.088.563.106	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	637.993.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	450.569.606	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.083.977.777	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.316.363.489 Rupiah			1.137.124.275 Ru piah	1.083.977.777	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.079.160.777	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	446.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	633.160.777	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	4.817.000	
						Jumlah operasi PPKM	48 kali			48 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 Dokumen	4.817.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasaran
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-	-	-	0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						5.495.915.405	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai			A Nilai	5.012.667.509	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen			3 dokumen	7.282.566	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	2.982.566	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	3.885.513.424	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.835.593.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	400.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	48.020.424	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.800.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.800.000	
7	01	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				28 Dokumen	900.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	900.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RRPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	175.320.189	
7	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.581.775	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	51.485.264	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	26.268.900	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.273.250	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	72.711.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	20 unit			20 unit	196.440.600	
7	01	001	2,07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	33.704.800	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	162.735.800	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	547.080.694	
7	01	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	2.500.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	104.400.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	440.180.694	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	14 unit			14 unit	197.430.036	
7	01	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	88.560.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	32.950.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2.120.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	49.050.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	24.750.036	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	86 poin			84.5 poin	68.051.032	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			1 dokumen	18.600.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	18.600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	49.451.032	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	14.800.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	34.651.032	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	741.153.000 Rupiah			719.357.350 Rupiah	313.941.440	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	5 lembaga			5 lembaga	88.530.000	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	88.530.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	61.416.200	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 lembaga			5 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Masyarakat	57.716.390	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	3.699.810	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	220 UMKM			190 UMKM	109.684.940	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2.03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Masyarakat	73.399.500	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Masyarakat	13.690.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				115 Laporan	22.595.440	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	35 kali			35 kali	5.600.000	
7	01	003	2.05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				35 Dokumen	5.600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	5 kelompok			5 kelompok	48.710.300	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	13 gapoktan			13 gapoktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	2 kampung			2 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	14 keluarga			12 keluarga		
7	01	003	2.06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				13 Keluarga	4.675.300	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	4.550.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				2 Keluarga	5.860.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	003	2.06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				12 Keluarga	33.625.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	175 Pelanggaran			250 Pelanggaran	65.440.424	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	35 pelanggaran			35 pelanggaran	65.440.424	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				35 Laporan	65.440.424	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	35.815.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	35.815.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Tertib Masyarakat	3 Lembaga			3 Lembaga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3 Orang	14.580.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	21.235.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.523.728.896	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	741.153.000 Rupiah			719.357.350 Rupiah	1.523.728.896	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	1.523.728.896	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 lembaga			5 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	938.736.750	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	584.992.146	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.203.623.964	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	741.153.000 Rupiah			719.357.350 Rupiah	1.203.623.964	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	1.203.623.964	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 lembaga			5 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	601.550.444	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	602.073.520	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						5.973.446.435	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan		A Nilai		A Nilai	5.170.703.503	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	19 dokumen			19 dokumen	14.240.000	
7	01	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.840.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	7.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.400.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan			12 laporan	3.870.351.000	
7	01	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.865.451.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	900.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	2.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,02	008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	12 laporan			12 laporan	179.207.607	
7	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	9.207.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.804.807	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.122.800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				94 Laporan	66.073.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	15 unit			15 unit	275.770.208	
7	01	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	275.770.208	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang usuran	12 laporan			12 laporan	292.589.688	
7	01	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	233.589.688	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 unit			57 unit	538.545.000	
7	01	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	76.240.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,09	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	60.580.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,09	009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	201.600.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	001	2,09	010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200.125.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	85 poin			84.4 poin	62.031.132	
7	01	002	2,03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	Dokumen			1 Dokumen	22.260.000	
7	01	002	2,03	001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	22.260.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	002	2,04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	12 bulan			12 bulan	39.771.132	
					Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			1 dokumen		
7	01	002	2,04	001 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				6 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	38.571.132	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Ngampilan	750.000.000 Rupiah			600.000.000 Rupiah	548.941.376	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga			12 lembaga	149.535.424	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				17 Laporan	149.535.424	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	51.780.170	
						Jumlah Dokumen Musrembang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan	2 lembaga			2 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga	41.680.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	10.100.170	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	123 laporan			121 laporan	83.931.250	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				15 Lembaga Masyarakat	39.540.750	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	44.390.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	9.600.000	
						Jumlah operasi PPKM	12 bulan			12 bulan		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	9.600.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	12 kelompok			12 kelompok	254.094.532	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	16 keluarga			15 keluarga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	7 kampung			7 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	50 keluarga			50 keluarga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	52.171.132	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				85 Keluarga	81.829.400	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	9.445.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	110.649.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	62 Pelanggaran			68 Pelanggaran	152.470.424	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	12 bulan			12 bulan	152.470.424	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	152.470.424	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	39.300.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 bulan			12 bulan	39.300.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Tertertiban Masyarakat	2 lembaga			2 lembaga		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	16.500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	22.800.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semu Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.149.292.264	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	750.000.000 Rupiah			600.000.000 Rupiah	1.149.292.264	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketertuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	1.125.070.264	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan	2 lembaga			2 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	600.834.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	524.236.264	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	24.222.000	
						Jumlah operasi PPKM	12 bulan			12 bulan		
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
7	01	003	2,05	002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	4.800.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
7	01	003	2,05	004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	17.022.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.065.787.264	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Ngampilan	750.000.000 Rupiah			600.000.000 Rupiah	1.065.787.264	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen			2 dokumen	1.057.787.264	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan	2 lembaga			2 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	750.495.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	307.292.264	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	8.000.000	
						Jumlah operasi PPKM	12 bulan			12 bulan		
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	4.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan
7	01	003	2,05	002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	4.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						6.434.628.202	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	A Nilai			A Nilai	5.336.622.458	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	dokumen			26 dokumen	14.531.500	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.901.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	806.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	806.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	806.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	806.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	6.806.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	laporan			40 laporan	4.314.175.024	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.307.511.124	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.660.900	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	501.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	420.300	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.681.200	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	laporan			2 laporan	2.610.000	
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.610.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	laporan			2 laporan	2.800.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2.800.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	laporan			14 laporan	117.220.846	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.894.375	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	64.373.971	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	25.072.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	23.880.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	unit			52 unit	33.000.000	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				42 Unit	33.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	laporan			10 laporan	733.655.088	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	94.800.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	635.355.088	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	unit			26 unit	118.630.000	
7	01	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	81.150.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	23.580.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	13.900.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	002		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83.87 poin			83.27 poin	423.207.945	
7	01	002	2,03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	dokumen			3 dokumen	389.185.000	
7	01	002	2,03	001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				3 Dokumen	389.185.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%			100 %	34.022.945	
7	01	002	2,04	001 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	11.959.945	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan				3 Laporan	22.063.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	985.400.000 Rupiah			955.400.000 Rupiah	524.647.375	
7	01	003	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	lembaga			16 lembaga	85.105.000	
7	01	003	2,01	003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	85.105.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	dokumen			9 dokumen	63.932.800	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	dokumen			4 dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	lembaga			390 lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	%			100 %		
7	01	003	2,02	001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga masyarakat	54.782.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				9 Laporan	9.150.800	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	laporan			4 laporan	86.769.250	
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	%			100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga masyarakat	43.244.250	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	43.525.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	dokumen			1 dokumen	5.100.000	
						Jumlah operasi PPKM	laporan			24 laporan		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				24 Dokumen	5.100.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	keluarga			610 keluarga	283.740.325	
						Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya	keluarga			30 keluarga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	kampung			8 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	keluarga			40 keluarga		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	7.200.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				120 Keluarga	92.645.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				150 Keluarga	48.130.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				90 Keluarga	18.525.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				600 Keluarga	4.400.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	93.945.325	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2.06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				250 Keluarga	18.895.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantran Wirobrajan	40 Pelanggaran			55 Pelanggaran	53.705.000	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	laporan			24 laporan	53.705.000	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				24 Laporan	53.705.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantran Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	96.445.424	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	Persentase permasalahan wilayah terselesaikan sebagai hasil koordinasi	%			100 %	96.445.424	
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				48 Orang	9.675.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	86.770.424	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.179.320.400	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantran Wirobrajan	985.400.000 Rupiah			955.400.000 Rupiah	1.179.320.400	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	dokumen			9 dokumen	1.179.320.400	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	lembaga			390 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	%			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	657.091.120	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				88 Pokmas / Ormas	522.229.280	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.090.022.535	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantran Wirobrajan	985.400.000 Rupiah			955.400.000 Rupiah	1.090.022.535	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	dokumen			9 dokumen	1.090.022.535	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	lembaga			390 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	%			100 %		
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				261 Unit	488.568.528	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				162 Pokmas / Ormas	601.454.007	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.128.760.304	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Wirobrajan	985.400.000 Rupiah			955.400.000 Rupiah	1.128.760.304	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	dokumen			9 dokumen	1.128.760.304	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	lembaga			390 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	%			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	539.101.440	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				139 Pokmas / Ormas	589.658.864	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						7.164.898.459	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemanren Mantriijeron	A Nilai			A Nilai	6.041.160.202	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	dokumen			7 dokumen	18.120.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3.960.000	
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.260.000	
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.260.000	
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.260.000	
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.260.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RRPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	7.620.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	4.743.864.000	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.731.284.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	3.240.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.240.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	5.400.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	900.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	900.000	
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	4.400.000	
7	01	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				37 Dokumen	1.200.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				37 Dokumen	3.200.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	184.929.726	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.417.100	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	67.390.776	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4.595.600	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	29.356.250	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	74.170.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	unit			14 unit	236.146.400	
7	01	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	85.396.400	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	150.750.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	laporan			12 laporan	591.540.076	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	2.460.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	68.400.000	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	520.680.076	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	unit			21 unit	256.760.000	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	23.200.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	77.355.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	9.175.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	21.730.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	125.300.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	85,20 poin			84,97 poin	469.931.557	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen			3 dokumen	387.160.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	387.160.000	
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	82.771.557	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	13.486.000	
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan				1 Laporan	69.285.557	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	640.000.000 Rupiah			595.000.000 Rupiah	491.492.700	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	4 lembaga			4 lembaga	220.190.400	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	220.190.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen	53.245.000	
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Masyarakat	45.845.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	7.400.000	
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	4 lembaga			4 lembaga	63.664.500	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga masyarakat	34.284.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	29.380.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	20 kali			20 kali	12.000.000	
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	12.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	4 lembaga			4 lembaga	142.392.800	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	3 lembaga			3 lembaga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	3 kampung			3 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	55 keluarga			55 keluarga		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				55 Keluarga	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				55 Keluarga	27.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				55 Keluarga	26.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				55 Keluarga	87.742.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	36 Pelanggaran			36 Pelanggaran	85.298.000	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	kali			80 kali	85.298.000	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	85.298.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	79 %			76 %	77.016.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	77.016.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	4 lembaga			4 lembaga		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				30 Orang	26.426.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	50.590.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.298.874.384	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	640.000.000 Rupiah			595.000.000 Rupiah	1.298.874.384	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga			3 lembaga	1.298.874.384	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	668.230.000	
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				101 Pokmas / Ormas	630.644.384	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.219.978.084	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	640.000.000 Rupiah			595.000.000 Rupiah	1.219.978.084	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga			3 lembaga	1.219.978.084	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	578.150.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92 Pokmas / Ormas	641.828.084	
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												1.501.555.581
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1.501.555.581
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga			3 lembaga	1.501.555.581	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	754.474.000	
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				108 Pokmas / Ormas	747.081.581	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												100.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN												100.000.000
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
						-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												6.843.285.280
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												6.130.308.965
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	19 dokumen			19 dokumen	9.300.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	975.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	975.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	675.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	675.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	3.100.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	53 laporan			53 laporan	4.507.457.000	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	4.501.027.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	160.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	1.500.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	650.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	340.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.480.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	28 laporan			28 laporan	4.540.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	840.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja da		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2 laporan			2 laporan	1.400.000	
7	01	001	2,05	005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.400.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	189.862.788	
7	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.777.750	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	82.649.988	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	5.878.450	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29.150.600	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	200.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	51.206.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	29 unit			29 unit	504.643.370	
7	01	001	2,07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	43.267.700	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	380.925.600	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				80 Unit	80.450.070	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	588.630.807	
7	01	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	104.400.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	482.930.807	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	31 unit			31 unit	324.475.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				14 Unit	92.100.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	20.375.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi				7 Unit	212.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	86,25 poin			85,50 poin	207.668.815	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	2 dokumen			2 dokumen	74.960.419	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	74.960.419	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	132.708.396	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	30.824.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	101.883.896	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	781.706.000 Rupiah			748.539.000 Rupiah	410.427.000	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	31 lembaga			31 lembaga	108.190.000	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	108.190.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen			4 dokumen	43.853.000	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga			30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Lembaga Masyarakat	39.188.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4.665.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	10 UMKM			10 UMKM	108.242.000	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	46.500.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	17.600.000	
						Jumlah operasi PPKM	88 kali			88 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	17.600.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	372 orang			372 orang	132.542.000	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	30 gapoktan			30 gapoktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung Hijau	1 kampung			1 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	50 keluarga			50 keluarga		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	14.175.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	31.322.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				40 Keluarga	14.100.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	72.944.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	70 Pelanggaran			85 Pelanggaran	62.220.500	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	12 kali			12 kali	62.220.500	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	62.220.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	32.660.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	3 lembaga			3 lembaga	32.660.000	
						Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				60 Orang	4.410.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	28.250.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												1.135.982.486
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1.135.982.486
7	01	003				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Kraton	781.706.000 Rupiah			748.539.000 Rupiah		
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen			4 dokumen		1.135.982.486
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga			30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				74 Unit	595.839.520	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				30 Pokmas / Ormas	540.142.966	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												1.516.742.174
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1.516.742.174
7	01	003	2,02			Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Kraton	781.706.000 Rupiah			748.539.000 Rupiah		
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen			4 dokumen		1.516.742.174
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga			30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				154 Unit	837.013.002	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				30 Pokmas / Ormas	679.729.172	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												1.183.278.256
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												1.183.278.256
7	01	003				Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Kraton	781.706.000 Rupiah			748.539.000 Rupiah		
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen			4 dokumen		1.183.278.256
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga			30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				60 Unit	616.898.156	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				30 Pokmas / Ormas	566.380.100	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000		
2					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	0 -	100.000.000		
2					Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-	-	-	0 -	100.000.000		
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7					KECAMATAN						5.490.005.951		
7					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai				A Nilai	4.795.431.421	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen			3 dokumen	39.453.040		
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	31.253.040	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	1.800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	3.654.193.000		
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.646.993.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	
7	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.200.000	
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	600.000	
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	600.000	
7	01	001	2,05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	147.218.445	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.755.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	49.046.595	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	24.790.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	69.626.350	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 unit			10 unit	64.340.000	
7	01	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	12.340.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	52.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	561.842.836	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	96.720.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	463.622.836	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	23 unit			23 unit	327.184.100	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	103.775.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	25.600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	197.809.100	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	88.71 poin			88.41 poin	62.466.782	
7	01	002	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan			15 laporan	10.000.000	
7	01	002	2,01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	10.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	52.466.782	
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	52.466.782	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	2.256.641.980 Rupiah			2.256.641.980 Ru piah	404.482.748	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	10 lembaga			10 lembaga	93.107.500	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	93.107.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	54.554.948	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				23 Lembaga masyarakat	41.759.772	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	12.795.176	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	30 orang			30 orang	38.063.800	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				203 Lembaga masyarakat	23.063.800	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	15.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali			12 kali	12.000.000	
						Jumlah operasi PPKM	10 kali			10 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	75 orang			75 orang	206.756.500	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	16 poktan			16 poktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	3 kampung			3 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	34 KK			34 KK		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				130 Keluarga	28.750.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				120 Keluarga	51.017.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1200 Keluarga	23.674.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	3.550.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				275 Keluarga	99.765.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	110 Pelanggaran			140 Pelanggaran	180.250.000	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	120 kali			120 kali	180.250.000	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	180.250.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	47.375.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	7 lembaga			7 lembaga	47.375.000	
						Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				85 Orang	14.375.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				13 Dokumen	33.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.162.316.264	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	2.256.641.980 Rupiah			2.256.641.980 Ru piah	1.162.316.264	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.159.916.264	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 unit	705.005.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				135 Pokmas / Ormas	454.911.264	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali			12 kali	2.400.000	
						Jumlah operasi PPKM	10 kali			10 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.400.892.480	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	2.256.641.980 Rupiah			2.256.641.980 Ru piah	1.400.892.480	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.398.492.480	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 unit	565.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				188 Pokmas / Ormas	833.492.480	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali			12 kali	2.400.000	
						Jumlah operasi PPKM	10 kali			10 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						5.551.406.320	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemitren Pakualaman	A Nilai			A Nilai	5.122.691.680	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	31 dokumen			31 dokumen	9.200.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.200.000	
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	800.000	
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	800.000	
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	800.000	
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	800.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	4.400.000	
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	400.000	
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	67 laporan			67 laporan	3.952.814.120	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.893.617.000	
7	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	400.000	
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	27.998.560	
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	27.998.560	
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	400.000	
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	400.000	
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1.600.000	
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	400.000	
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai	31 laporan			31 laporan	2.160.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	480.000	
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	240.000	
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	240.000	
7	01	001	2,03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	240.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	480.000	
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	240.000	
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	240.000	
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	14 laporan			14 laporan	1.240.000	
7	01	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	500.000	
7	01	001	2,05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	240.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	500.000	
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	95.869.320	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.696.400	
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	42.468.470	
7	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	8.032.650	
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	13.851.800	
7	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	600.000	
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				46 Laporan	27.220.000	
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	65 Unit			16 Unit	59.091.100	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	59.091.100	
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			12 laporan	669.247.140	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110 Laporan	1.550.000	
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	81.600.000	
7	01	001	2,08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.500.000	
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	581.597.140	
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	72 unit			72 unit	333.070.000	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	67.315.000	
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	30.375.000	
7	01	001	2,09	004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	800.000	
7	01	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	9.580.000	
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	27.100.000	
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	197.900.000	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	85,00 poin			82,00 poin	74.213.290	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	2 dokumen			2 dokumen	52.492.040	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	52.492.040	
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	21.721.250	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3.546.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	18.174.750	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	635.697.000 Rupiah			635.697.000 Rupiah	252.841.250	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	18 lembaga			18 lembaga	99.735.500	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	99.735.500	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	44.580.000	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			3 dokumen		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				215 Lembaga Masyarakat	37.038.000	
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.542.000	
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	50 UMKM			50 UMKM	34.643.250	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				215 Lembaga Masyarakat	14.043.250	
7	01	003	2,03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				215 Lembaga Masyarakat	2.000.000	
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	18.600.000	
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	84 kali			84 kali	1.600.000	
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1.600.000	
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	450 anggota kelompok			450 anggota kelompok	72.282.500	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	2 Gapoktan			2 Gapoktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	2 Kampung			2 Kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	230 keluarga			230 keluarga		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				40 Keluarga	1.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2.06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				270 Keluarga	29.512.500	
7	01	003	2.06	007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	15.150.000	
7	01	003	2.06	008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	4.200.000	
7	01	003	2.06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	1.000.000	
7	01	003	2.06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				921 Keluarga	8.820.000	
7	01	003	2.06	011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				120 Keluarga	10.400.000	
7	01	003	2.06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				78 Keluarga	2.200.000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	77 Pelanggaran			80 Pelanggaran	60.655.100	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	84 kali			84 kali	60.655.100	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	60.655.100	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	41.005.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	41.005.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	27 lembaga			27 lembaga		
7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				120 Orang	13.750.000	
7	01	005	2.01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.255.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
7	01									
		KECAMATAN								
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantran Pakualaman	635.697.000 Rupiah			635.697.000 Rupiah			1.080.008.454
7	01	003	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	518 lembaga		518 lembaga			1.056.008.454
				Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		100 %			
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		53 Unit		476.008.400
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		246 Pokmas / Ormas		580.000.054
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM		2 dokumen		24.000.000
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen		24.000.000
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN					
		KECAMATAN								1.166.199.144
7	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantran Pakualaman	635.697.000 Rupiah			635.697.000 Rupiah			1.166.199.144
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan		518 lembaga		1.144.739.144
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		60 Unit		602.510.000
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		279 Pokmas / Ormas		542.229.144
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM		2 dokumen		21.460.000
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		1 Dokumen		21.460.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					100.000.000
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-		0 -		100.000.000
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-		0 -		100.000.000
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		1 Laporan		100.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN					
		KECAMATAN								7.946.016.068
7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantran Mergangsan	A Nilai			A Nilai			7.294.215.394
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		37 dokumen		24.600.000

Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	9.375.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	6.525.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.900.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	54 laporan			54 laporan	4.856.376.000	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.841.626.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12.250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	625.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	875.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	250.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	625.000	
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	625.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	625.000	
7	01	001	2,05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	625.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	212 laporan			212 laporan	680.552.610	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	61.778.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	352.693.860	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	46.995.750	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	219.085.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	177 unit			177 unit	202.050.000	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	202.050.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	615 laporan			615 laporan	819.318.784	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	6.000.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	96.840.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	716.478.784	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	327 unit			327 unit	710.068.000	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	151.668.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	6.829.250	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	5 Laporan			5 Laporan	73.449.750	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				297 Lembaga Masyarakat	47.845.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	25.604.250	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	1.800.000	
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali		
7	01	003	2,05	003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1.800.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	7 Kelompok			7 Kelompok	229.932.500	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	45 Keluarga			45 Keluarga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	3 Kampung			3 Kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	34 keluarga			34 keluarga		
7	01	003	2,06	003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				45 Keluarga	25.020.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				410 Keluarga	123.702.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,06	009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				10956 Keluarga	6.360.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				68 Keluarga	15.300.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				150 Keluarga	59.550.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	65 pelanggaran			65 pelanggaran	52.781.910	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	72 kali			72 kali	52.781.910	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	52.781.910	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	69.471.132	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	69.471.132	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	6 lembaga			6 lembaga		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	17.250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	52.221.132	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.371.025.300	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.772.892.000 Rupiah			1.221.000.000 Ru piah	1.371.025.300	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen	1.364.775.300	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			45 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Unit	844.523.220	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	520.252.080	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	6.250.000	
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	6.250.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Keparakan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemandirian Merangsan	1.772.892.000 Rupiah			1.221.000.000 Rupiah	1.561.442.427	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen	1.550.522.427	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			45 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	918.416,467	Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	632.105,960	Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	10.920.000	
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali		
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	10.920.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Wirogunan
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN												
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemandirian Merangsan	1.772.892.000 Rupiah			1.221.000.000 Rupiah	1.552.606.080	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen	1.548.306.080	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			45 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	984.200,000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	564.106,080	Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
7	01	003	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	4.300.000	
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali		
7	01	003	2,05	001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	4.300.000	Kota Yogyakarta, Merangsan, Brontokusuman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
2	22	008		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-			0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN						11.665.790.923	
7	01	001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai			A Nilai	10.445.771.443	
7	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	6 dokumen			6 dokumen	15.600.000	
7	01	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	7.739.391.944	
7	01	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	7.692.907.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.284.944	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RRPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RRPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	49.924.980	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	2.240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 dokumen	41.284.980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	29.422.440	
7	01	001	2,05	003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	27.022.440	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	408.864.850	
7	01	001	2,06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8.703.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	150.354.850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	37.830.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	41.697.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	164.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	5.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang lengkap dan sesuai tatakala	8 unit			8 unit	207.785.000	
7	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	207.785.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	1.546.052.229	
7	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	48.184.980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	132.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.365.267.249	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik	10 jenis			10 jenis	448.730.000	
7	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	144.230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	35.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	45.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	224.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo	84 poin			82,5 poin	132.475.000	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	7 dokumen			7 dokumen	66.837.500	

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				7 Dokumen	66.837.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	65.637.500	
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	65.637.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kementren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah			2.203.136.000 Rupiah	929.212.280	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat	3 lembaga			3 lembaga	257.580.280	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	257.580.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga			7 lembaga	133.765.000	
						Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %		
						Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen		
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				600 Lembaga masyarakat	109.165.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	24.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas UMKM	30 %			15 %	256.239.000	
						Meningkatnya lembaga (RT,RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				26 Lembaga masyarakat	35.917.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				26 Lembaga masyarakat	56.947.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	163.375.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	97.230.000	
					Terlaksananya operasi PPKM	48 kali			48 kali		
7	01	003	2,05	003 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	97.230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kampung yang melaksanakan program kampung iklim dan kampung hijau	19 kampung			19 kampung	184.398.000	
					Meningkatnya kapasitas anggota kelompok pemberdayaan	45 %			25 %		
					Meningkatnya kapasitas gabungan kelompok tani	7 kelompok			7 kelompok		
					Meningkatnya kapasitas keluarga terkait penanganan mitigasi bencana alam	210 orang			210 orang		
7	01	003	2,06	003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	11.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				275 Keluarga	30.595.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				400 Keluarga	55.518.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				170 Keluarga	41.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				87 Keluarga	33.395.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				130 Keluarga	12.040.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	004		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	125 Pelanggaran			140 Pelanggaran	108.287.200	
7	01	004	2,02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Operasi Keterlibatan yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	100 kali			100 kali	108.287.200	
7	01	004	2,02	001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	108.287.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7	01	005		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	79 %			76 %	50.045.000	
7	01	005	2,01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	6 kali			6 kali	50.045.000	
					Meningkatnya lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	3 lembaga			3 lembaga		
7	01	005	2,01	008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	50.045.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan
7				UNSUR KEWILAYAHAN							

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	
7	01			KECAMATAN								
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah			2.203.136.000 Rupiah		1.070.493.990	
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga			7 lembaga		1.070.493.990	
					Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %			
					Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen			
					Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen			
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			6 Unit		471.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			67 Pokmas / Ormas		599.213.990	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN							1.248.432.564	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah			2.203.136.000 Rupiah		1.248.432.564	
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga			7 lembaga		1.248.432.564	
					Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %			
					Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen			
					Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen			
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20 Unit		694.825.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			167 Pokmas / Ormas		553.607.564	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN							1.185.618.892	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah			2.203.136.000 Rupiah		1.185.618.892	
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga			7 lembaga		1.185.618.892	
					Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %			
					Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen			
					Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen			
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20 Unit		702.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			85 Pokmas / Ormas		483.468.892	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01			KECAMATAN							1.045.427.730	
7	01	003		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah			2.203.136.000 Rupiah		1.045.427.730	
7	01	003	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga			7 lembaga		1.045.427.730	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %		
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen		
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen		
7	01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			60 Unit	562.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
7	01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			127 Pokmas / Ormas	482.727.730	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto
7		UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01	KECAMATAN					1.327.897.980	
7	01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemitraan Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	1.327.897.980	
7	01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga		7 lembaga	1.327.897.980	
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %		
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen		
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen		
7	01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			87 Unit	914.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
7	01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			87 Pokmas / Ormas	413.397.980	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan
7		UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01	KECAMATAN					1.492.361.916	
7	01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemitraan Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	1.492.361.916	
7	01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga		7 lembaga	1.492.361.916	
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %		
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen		
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen		
7	01 003 2.02 002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			73 Unit	862.053.166	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
7	01 003 2.02 003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			193 Pokmas / Ormas	630.308.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan
7		UNSUR KEWILAYAHAN						
7	01	KECAMATAN					1.343.730.480	
7	01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemitraan Umbulharjo	2.203.436.000 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	1.343.730.480	
7	01 003 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga		7 lembaga	1.343.730.480	
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %			100 %		
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen			7 dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen			8 dokumen		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	462.180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				137 Pokmas / Ormas	881.550.480	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	
2	22	008			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					0 -	100.000.000	
2	22	008	5,07	011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						6.854.341.065	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai			A Nilai	5.860.152.245	
7	01	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	27 dokumen			27 dokumen	14.400.000	
7	01	001	2,01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	6.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.800.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	4.642.185.619	
7	01	001	2,02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	4.631.985.619	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	2.700.000	
7	01	001	2,03	001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,03	007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	300.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	1.200.000	
7	01	001	2,05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	227.827.325	
7	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	9.902.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	71.011.725	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	13.711.600	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	42.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				184 Laporan	90.502.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang usuran pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	48 unit			48 unit	139.866.200	
7	01	001	2,07	005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				62 Unit	41.518.400	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,07	006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	98.347.800	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang usuran pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			12 laporan	536.970.956	
7	01	001	2,08	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48 Laporan	3.360.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	99.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,08	004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	434.010.956	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	69 unit			69 unit	295.002.145	
7	01	001	2,09	001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	22.900.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	91.160.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				31 Unit	4.875.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	9.324.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	166.743.145	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91.50 poin			91.00 poin	137.417.320	
7	01	002	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen			3 dokumen	22.000.000	
7	01	002	2,03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	22.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			100 %	115.417.320	
7	01	002	2,04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	3.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	002	2,04	002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	111.817.320	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.767.000.000 Rupiah			2.731.000.000 Ru piah	502.564.000	
7	01	003	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga			12 lembaga	203.835.000	
7	01	003	2,01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				90 Laporan	203.835.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	37.485.000	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga			315 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Masyarakat	33.385.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,02	004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	4.100.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	498 UMKM			498 UMKM	98.012.500	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,03	001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Masyarakat	29.945.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	68.067.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	8 lembaga			8 lembaga	163.231.500	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	27 Gapoktan			27 Gapoktan		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	255 keluarga			255 keluarga		
7	01	003	2,06	006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				384 Keluarga	52.800.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	003	2,06	010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				210 Keluarga	110.431.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	24 Pelanggaran			24 Pelanggaran	313.027.500	
7	01	004	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	100 kali			100 kali	313.027.500	
7	01	004	2,02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				47 Laporan	313.027.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	41.180.000	
7	01	005	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	11 kali			11 kali	41.180.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	2 lembaga			2 lembaga		
7	01	005	2,01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				155 Orang	16.580.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01	005	2,01	008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				11 Dokumen	24.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1.218.381.842	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	2.767.000.000 Rupiah			2.731.000.000 Rupiah	1.218.381.842	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.218.381.842	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga			315 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				94 Unit	809.769.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				96 Pokmas / Ormas	408.612.842	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.470.756.336	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Kotagede	2.767.000.000 Rupiah			2.731.000.000 Rupiah	1.470.756.336	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.470.756.336	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga			315 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				91 Unit	938.662.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				167 Pokmas / Ormas	532.093.836	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN						1.203.457.248	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Kotagede	2.767.000.000 Rupiah			2.731.000.000 Rupiah	1.203.457.248	
7	01	003	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1.203.457.248	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga			315 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %		
7	01	003	2,02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				69 Unit	698.000.312	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan
7	01	003	2,02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				192 Pokmas / Ormas	505.456.936	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						28.910.943.295	
8	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A Nilai			A Nilai	4.907.570.123	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
8	01	001	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	7 dokumen			7 dokumen	86.075.000	
8	01	001	2,01	001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.270.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.270.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,01	007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	77.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	3.109.492.000	
8	01	001	2,02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.103.902.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	840.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,02	008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
8	01	001	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	1 laporan			1 laporan	8.970.000	
8	01	001	2,03	001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2.175.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,03	002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.170.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,03	003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,03	005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1.485.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,03	006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.170.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,03	007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.170.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 dokumen			1 dokumen	7.830.000	
8	01	001	2,05	003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.610.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,05	004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.610.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,05	005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2.610.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	40 jenis			40 jenis	545.328.866	
8	01	001	2,06	001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.243.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	254.650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.465.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.799.866	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.631.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
8	01	001	2,06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.040.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	205.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 jenis			3 jenis	111.448.900	
8	01	001	2,07	005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	110.448.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 jenis			10 jenis	595.622.732	
8	01	001	2,08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	51.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	543.072.732	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	13 jenis			13 jenis	442.802.625	
8	01	001	2,09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.228.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	71.364.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,09	005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	1.865.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	17.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	001	2,09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	331.370.625	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur
8	01	002			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	84 %			81 %	2.111.974.920	
8	01	002	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 laporan			7 laporan	2.111.974.920	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
8	01	002	2,01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	499.990	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	002	2,01	002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	13.135.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	002	2,01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1027 Orang	2.098.339.930	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	003			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	74,00 %			65,00 %	18.217.110.250	
8	01	003	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 laporan			5 laporan	18.217.110.250	
8	01	003	2,01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	499.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	003	2,01	002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	78.580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	003	2,01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1530 Orang	597.576.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	003	2,01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				710 Orang	16.731.103.480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	003	2,01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	809.350.370	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	65,00 %			55,00 %	685.151.744	
8	01	004	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan			4 laporan	685.151.744	
8	01	004	2,01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	499.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	004	2,01	002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	499.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
8	01	004	2,01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				550 Orang	658.846.144	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	004	2,01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				240 Orang	5.916.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	004	2,01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	19.390.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	005			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	74,00 %			71,00 %	1.274.529.990	
8	01	005	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan			4 laporan	1.274.529.990	
8	01	005	2,01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	499.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	005	2,01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				254 Orang	1.086.315.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	005	2,01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				650 Orang	187.715.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	006			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik yang terjadi wilayah	79,00 %			76,00 %	1.714.606.268	
8	01	006	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 laporan			4 laporan	1.714.606.268	
8	01	006	2,01	001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	540.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	006	2,01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				118 Orang	1.151.989.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	006	2,01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				7 Orang	20.180.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	006	2,01	005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	475.897.268	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
8	01	006	2,01	006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	66.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi
TOTAL							1.946.832.789,620	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja dan Target Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,2 – 5,4
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% – 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,37
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	530
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.185
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Tabel 6.2 Indikator Kinerja dan Target Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
2	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	persentase Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	
		Angka Partisipasi Kasar SD	
		Angka Partisipasi Murni SD	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	
		Angka Partisipasi Murni SMP	
		persentase Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	
		persentase Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	
3	Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	
		Angka Kematian Bayi	10,7 kela
		Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang	
		Prevalensi Stunting	
5	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Skor Akreditasi RS	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
6	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	64,44
7	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	75,33
8	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
9	Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah	Indeks prasarana umum wilayah	75,33
10	Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas.	Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan)	25.

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
11	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Indeks prasarana perumahan dan permukiman	64,44
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
12	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
13	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat	
14	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran	Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran	99,46
15	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	87,33
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
16	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	87,76
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
17	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3
18	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
19	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
20	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,18
21	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Menurunnya kekerasan terhadap anak	
22	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
23	Terkendalinya jumlah penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
24	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	9

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
25	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
26	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
27	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
28	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
29	Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat	Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data	96,67
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
30	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	87,10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
31	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
32	Meningkatnya Layanan Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi Publik	87,10

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
33	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai investasi	319.966
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
34	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
35	Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan	60,3
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
36	Meningkatnya Pembanguan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	37,70
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
37	Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan	Length of Stay (LoS)	1,1
38	Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan	Rata-Rata Belanja Wisatawan	1.200,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
39	Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan	Indeks kinerja perdagangan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
40	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Omset Koperasi	397.114
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n	5.040,00

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
41	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.
		Nilai Investasi IKM	15.948.
	SEKRETARIAT DAERAH		
42	Meningkatnya kualitas kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	81,5
43	Meningkatnya Kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,6
44	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	
45	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tir
46	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71,32
47	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00
	SEKRETARIAT DPRD		
48	Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD	78,2
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
49	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5
	PERENCANAAN		
50	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,5

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
	KEUANGAN		
51	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	93,72
52	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	658.724
	KEPEGAWAIAN		
53	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
54	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara	Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara	92,00
	INSPEKTORAT DAERAH		
55	Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan	Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	level
	KECAMATAN		
56	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	365
57	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	40
58	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	3
59	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Danurejan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan	4

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	
60	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen	3
61	Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Ngampilan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	4
62	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	3
63	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron	3
64	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	3
65	Meningkatnya Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	3
66	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	39
67	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	40
68	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	38
69	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	3
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
70	Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	

Sumber: Rencana Strategis Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.) Walikota dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2023, sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

SUMADI